PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah







2027

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2025.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

(1) RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Pasal 3

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2027;
b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
c. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2027.

Pasal 4

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan;
b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. Penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juli 2026
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 7 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 00

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....I-6
1.4. Maksud dan Tujuan I-7
1.5. Sistematika Dokumen I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Kondisi Umum Daerah II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan masyarakat II-27
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-55
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-186
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun 2025 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2025 .....II-209
2.2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) II-209
2.2.2. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) II-221
2.2.3. Evaluasi Kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP) II-267
2.2.4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....II-274
2.3. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.....II-355
2.4. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah II-360
2.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-360
2.4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah .II-380

2.4.3. Isu Strategis II-388

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Dinamika Ekonomi Global Hingga Tahun 2025 .....III-1
3.1.2. Dinamika dan Kinerja Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2025 .....III-3
3.1.3. Tantangan Perekonomian pada Tahun 2026 dan 2027 .....III-9
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah pada Tahun 2027 .....III-11
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2027.....III-15
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-16
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-27
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-37
3.2.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah III-44

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027 .....IV-5
4.2.1. Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....IV-5
4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....IV-7
4.2.3. Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2027.....IV-127
4.2.4. Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas pada Prioritas Nasional RKP Tahun 2027 .....IV-141
4.2.5. Dukungan Program Daerah terhadap Program Strategis
4.2.6. Nasional IV-166
4.2.7. Dukungan Program Daerah terhadap Pengembangan WP Keburejo IV-180
4.2.8. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....IV-181
4.2.9. Dukungan Prioritas Daerah IV-182

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan V-1
5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-1
5.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar V-10
5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan V-26
5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan V-32
5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan V-33
5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan V-36
5.1.7. Unsur Kewilayahan V-36
5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum V-37
5.2. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2027 .....V-99
5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027 .....V-111

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

6.1. Penetapan Indikator Kinerja VI-1
6.1.1. Indikator Kinerja Makro VI-1
6.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6.1.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-4
6.1.4. Indikator Utama Pembangunan (IUP) VI-22
6.2. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal VI-25

BAB VII PENUTUP VII-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	I-7
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Kebumen	II-4
Gambar 2.3	Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen	II-9
Gambar 2.4	Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Kebumen	II-10
Gambar 2.5	Peta Bahaya Karhutla Kabupaten Kebumen	II-12
Gambar 2.6	Peta Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Kebumen	II-13
Gambar 2.7	Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen	II-14
Gambar 2.8	Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen	II-15
Gambar 2.9	Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen	II-19
Gambar 2.10	Perbandingan TPT dengan Target Daerah RKPD Tahun 2021-2025	II-39
Gambar 2.11	Perbandingan TPT Kebumen dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025	II-39
Gambar 3.1	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 (dalam persen)	III-3
Gambar 4.1	Konsep THIS pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027	IV-7

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (Mdpl) II-2
Tabel 2.2 Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen II-6
Tabel 2.3 Jumlah Sebaran Mata Air di Rinci Menurut Kecamatan II-7
Tabel 2.4 Keadaan Iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Berdasarkan Kecepatan Angin (m/det), Penguapan (mm) dan Curah Hujan (mm) II-8
Tabel 2.5 Persentase Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Kebumen II-10
Tabel 2.6 Persentase Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Kebumen II-10
Tabel 2.7 Persentase Luas Bahaya Karhutla di Kabupaten Kebumen II-11
Tabel 2.8 Persentase Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Kebumen II-12
Tabel 2.9 Persentase Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Kebumen II-14
Tabel 2.10 Persentase Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kebumen II-15
Tabel 2.11 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kebumen II-16
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-21
Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025 .....II-22
Tabel 2.14 Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....II-23
Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Umur Tunggal Kabupaten Kebumen Tahun 2025..II-24
Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2021-2025 .....II-28
Tabel 2.17 PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-28
Tabel 2.18 PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025 .....II-29
Tabel 2.19 Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-32
Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2021-2025 .....II-36
Tabel 2.21 Inflasi Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-37
Tabel 2.22 Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kebumen, Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan Laju Indeks Harga Implisit PDB Nasional Tahun 2021-2025 .....II-38
Tabel 2.23 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-40
Tabel 2.24 Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-41

Tabel 2.25 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-42
Tabel 2.26 Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 .....II-43
Tabel 2.27 Perbandingan Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-45
Tabel 2.28 Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-45
Tabel 2.29 Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-47
Tabel 2.30 Perbandingan Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-48
Tabel 2.31 Perbandingan Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-50
Tabel 2.32 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Kebumen, Puroworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-51
Tabel 2.33 Profil Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-52
Tabel 2.34 Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-55
Tabel 2.35 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021-2025 .....II-56
Tabel 2.36 Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-58
Tabel 2.37 Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-58
Tabel 2.38 Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-59
Tabel 2.39 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-60
Tabel 2.40 Ketersediaan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-60
Tabel 2.41 Rasio Guru per Kelas Rata-Rata terhadap Jumlah Murid Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-61
Tabel 2.42 Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024 .....II-62

Tabel 2.43 Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4 Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-63
Tabel 2.44 Pemajuan Kebudayaan pada Urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-63
Tabel 2.45 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-64
Tabel 2.46 Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-64
Tabel 2.47 Fasilitasi terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 .....II-65
Tabel 2.48 Indeks Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-66
Tabel 2.49 Jumlah Kasus dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-67
Tabel 2.50 Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-69
Tabel 2.51 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-70
Tabel 2.52 Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-72
Tabel 2.53 Angka dan Jumlah Penderita Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-72
Tabel 2.54 Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 ..II-73
Tabel 2.55 Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-74
Tabel 2.56 Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 ..II-74
Tabel 2.57 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-75
Tabel 2.58 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-75
Tabel 2.59 Angka Morbiditas Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-76
Tabel 2.60 Perkembangan Kasus Penyakit Menular 2021-2025 .....II-77
Tabel 2.61 Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-77
Tabel 2.62 Perkembangan Kasus Penyakit Tuberkulosis 2021-2025 .....II-79
Tabel 2.63 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-80
Tabel 2.64 Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2021 - 2025 .....II-81
Tabel 2.65 Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 .....II-81
Tabel 2.66 Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 .....II-83
Tabel 2.67 Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....II-83

Tabel 2.68 Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-84
Tabel 2.69 Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 (km) II-85
Tabel 2.70 Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-88
Tabel 2.71 Capaian Akses Sanitasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 .....II-90
Tabel 2.72 Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 ..II-91
Tabel 2.73 Status Backlog Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 .....II-91
Tabel 2.74 Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-92
Tabel 2.75 Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-93
Tabel 2.76 Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2021 – 2025 .....II-94
Tabel 2.77 Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-95
Tabel 2.78 Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-97
Tabel 2.79 Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-97
Tabel 2.80 Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Tahun 2025 .....II-98
Tabel 2.81 Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana Tahun 2021-2025 .....II-99
Tabel 2.82 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-99
Tabel 2.83 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-100
Tabel 2.84 Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif pada Kantor Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-102
Tabel 2.85 Kinerja Penanganan Permasalahan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-103
Tabel 2.86 Kondisi Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-105
Tabel 2.87 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Keterserapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-106
Tabel 2.88 Kondisi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-107

Tabel 2.89 Profil Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-108
Tabel 2.90 Profil Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 ....II-110
Tabel 2.91 Ketahanan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025 .....II-111
Tabel 2.92 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-112
Tabel 2.93 Penanganan Sengketa Lahan Tahun 2021 – 2025 .....II-113
Tabel 2.94 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 2021-2025 .....II-114
Tabel 2.95 Kinerja Penanganan dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-116
Tabel 2.96 Kinerja Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-118
Tabel 2.97 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-119
Tabel 2.98 Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025 .....II-121
Tabel 2.99 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-122
Tabel 2.100 Kondisi BUMDes Tahun 2021-2025 .....II-124
Tabel 2.101 Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 .....II-125
Tabel 2.102 Perkembangan PKK Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-128
Tabel 2.103 Perkembangan CPR, TFR dan Unmet Need Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-129
Tabel 2.104 Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-130
Tabel 2.105 Kondisi Kelengkapan dan Keselamatan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-131
Tabel 2.106 Persebaran Terminal Tipe A, B, dan C di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....II-132
Tabel 2.107 Data Produksi Terminal Tipe C Tahun 2021 -2025 .....II-132
Tabel 2.108 Jumlah Izin Trayek di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-133
Tabel 2.109 Kondisi Uji KIR di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-134
Tabel 2.110 Profil Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 .....II-135
Tabel 2.111 Profil Kewirausahaan, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-137
Tabel 2.112 Kinerja Investasi dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-138
Tabel 2.113 Kinerja Investasi dan Penanaman Modal berdasarkan Skala Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-138

Tabel 2.114 Kinerja Investasi dan Penanaman Modal per Sektor Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....II-139
Tabel 2.115 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-140
Tabel 2.116 Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025 ....II-142
Tabel 2.117 Kinerja Persandian Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-143
Tabel 2.118 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Manuskrip II-144
Tabel 2.119 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Tradisi Lisan II-144
Tabel 2.120 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Adat Istiadat II-145
Tabel 2.121 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Ritus ...II-146
Tabel 2.122 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Pengetahuan Tradisional II-147
Tabel 2.123 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Teknologi Tradisional II-148
Tabel 2.124 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Kesenian II-149
Tabel 2.125 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Bahasa II-150
Tabel 2.126 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Permainan Rakyat II-151
Tabel 2.127 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Olahraga Tradisional II-152
Tabel 2.128 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Cagar Budaya II-152
Tabel 2.129 Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Obyek Diduga Cagar Budaya II-154
Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-157
Tabel 2.131 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-158
Tabel 2.132 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-161
Tabel 2.133 Data Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas) II-162
Tabel 2.134 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-162
Tabel 2.135 Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen II-163
Tabel 2.136 Luas Penetapan LSD di Kabupaten Kebumen II-164

Tabel 2.137 Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-165
Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-166
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-167
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-168
Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-169
Tabel 2.142 Kunjungan pada Daya Tarik Wisata dan Event Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-170
Tabel 2.143 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-173
Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-175
Tabel 2.145 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-177
Tabel 2.146 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-178
Tabel 2.147 Perkembangan Capaian Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-179
Tabel 2.148 Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen II-180
Tabel 2.149 Tingkat Pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen II-181
Tabel 2.150 Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-182
Tabel 2.151 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-183
Tabel 2.152 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-184
Tabel 2.153 Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-185
Tabel 2.154 Capaian Indikator Urusan kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-186
Tabel 2.155 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-186
Tabel 2.156 Distribusi Persentase PDRB menurut Komponen Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-188
Tabel 2.157 Komposit Pembentuk Indeks Ekonomi Hijau dan Biru Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-190
Tabel 2.158 Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-194

Tabel 2.159 Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-194
Tabel 2.160 Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 ..II-195
Tabel 2.161 Kondisi Likuiditas Perbankan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-198
Tabel 2.162 Amenitas Hotel dan Restoran Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-198
Tabel 2.163 Kondisi Fasilitas/Infrastruktur Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-199
Tabel 2.164 Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-199
Tabel 2.165 Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-200
Tabel 2.166 Return On Asset (ROA) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-202
Tabel 2.167 Desa Swasembada di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-206
Tabel 2.168 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 .....II-206
Tabel 2.169 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 ....II-208
Tabel 2.170 Status Predikat Kinerja II-208
Tabel 2.171 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Daerah II-210
Tabel 2.172 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah II-213
Tabel 2.173 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....II-221
Tabel 2.174 Capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) II-267
Tabel 2.175 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan II-275
Tabel 2.176 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kesehatan II-278
Tabel 2.177 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-281
Tabel 2.178 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman II-285
Tabel 2.179 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat II-287
Tabel 2.180 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Sosial II-289
Tabel 2.181 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Tenaga Kerja II-292
Tabel 2.182 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-294
Tabel 2.183 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pangan II-296

Tabel 2.184 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pertanahan II-298
Tabel 2.185 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Lingkungan Hidup II-299
Tabel 2.186 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-303
Tabel 2.187 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa II-305
Tabel 2.188 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa II-307
Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perhubungan II-309
Tabel 2.190 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika II-310
Tabel 2.191 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-312
Tabel 2.192 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Penanaman Modal II-314
Tabel 2.193 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga II-316
Tabel 2.194 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Statistik II-318
Tabel 2.195 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Persandian II-319
Tabel 2.196 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kebudayaan II-321
Tabel 2.197 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perpustakaan II-322
Tabel 2.198 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan II-323
Tabel 2.199 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan II-325
Tabel 2.200 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pariwisata II-327
Tabel 2.201 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pertanian II-329
Tabel 2.202 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral II-331
Tabel 2.203 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perdagangan II-332
Tabel 2.204 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perindustrian II-334

Tabel 2.205 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Transmigrasi II-336
Tabel 2.206 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah II-338
Tabel 2.207 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat DPRD II-340
Tabel 2.208 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan II-342
Tabel 2.209 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan II-344
Tabel 2.210 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian II-345
Tabel 2.211 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan II-347
Tabel 2.212 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan II-348
Tabel 2.213 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan II-349
Tabel 2.214 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan II-350
Tabel 2.215 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik II-352
Tabel 2.216 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025 .....II-355
Tabel 2.217 Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2027 dengan Misi Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 .....II-389
Tabel 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025 .....III-8
Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah III-11
Tabel 3.3 Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 dan Proyeksi Tahun 2026-2027 .....III-12
Tabel 3.4 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025 .....III-19
Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025 .....III-20
Tabel 3.6 Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027 .....III-23
Tabel 3.7 Proporsi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027 .....III-24
Tabel 3.8 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2022-2025 .....III-29
Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025 .....III-29

Tabel 3.10 Belanja Daerah pada APBD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027 .....III-30
Tabel 3.11 Perhitungan Belanja Fungsi Pendidikan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....III-35
Tabel 3.12 Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....III-36
Tabel 3.13 Perhitungan Belanja Pegawai pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....III-36
Tabel 3.14 Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025 .....III-38
Tabel 3.15 Pembiayaan Daerah pada APBD 2026 dan RKPD Tahun 2027 .....III-40
Tabel 3.16 Rekapitulasi Pelaksanaan Pembiayaan Alternatif Kabupaten Kebumen Tahun 2025 .....III-41
Tabel 3.17 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2027 .....III-45
Tabel 3.18 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah RKPD Tahun 2027 .....III-45
Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2027.....IV-1
Tabel 4.2 Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah beserta indikatornya dan Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2027 .....IV-8
Tabel 4.3 Dukungan Kebijakan 2027 terhadap Pencapaian SUP 2027 .....IV-23
Tabel 4.4 Pemetaan Indikator Proksi Kabupaten Kebumen terhadap IUP Nasional IV-25
Tabel 4.5 Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Nasional RPJPN 2025-2045 dengan Indikator Pembangunan Kabupaten Kebumen (Baseline 2025, Target 2027, Target 2045) IV-26
Tabel 4.6 Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) IV-39
Tabel 4.7 Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 .....IV-45
Tabel 4.8 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2027 .....IV-49
Tabel 4.9 Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah IV-50
Tabel 4.10 Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah IV-74
Tabel 4.11 Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 .....IV-85

Tabel 4.12 Keterkaitan Hasil Evaluasi sampai dengan Tahun 2025, Permasalahan, Isu Aktual, Isu Strategis dan Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2027 .....IV-90
Tabel 4.13 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....IV-103
Tabel 4.14 Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2027 .....IV-115
Tabel 4.15 Keselarasan Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2027 .....IV-121
Tabel 4.16 Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....IV-127
Tabel 4.17 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas pada Prioritas Nasional RKP Tahun 2027 .....IV-141
Tabel 4.18 Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) IV-169
Tabel 4.19 Hasil Utama Pra Musrenbang Tematik Stunting Kabupaten Kebumen Tahun 2026 .....IV-186
Tabel 4.20 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kebumen IV-199
Tabel 5.1 Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2027 .....V-40
Tabel 5.2 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 ..V-70
Tabel 5.3 Program Unggulan Bupati Kebumen Tahun 2027 beserta Program Prioritas dan Anggaran 2027 .....V-101
Tabel 5.4 Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....V-112
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....VI-1
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen Tahun 2027 ....VI-2
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Kebumen Tahun 2027 .....VI-4
Tabel 6.4 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 ...VI-22
Tabel 6.5 Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan Dan Format Penerapan Standar Pelayanan Minimal VI-26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 sendiri merupakan tahapan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2045.

Sebagai tahun kedua pelaksanaan RPJMD, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang telah diletakkan pada tahun sebelumnya, sekaligus mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 adalah "Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan." Tema pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 yang tercantum dalam Bab IV RKPD sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mencapai target pembangunan tahunan secara terukur dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sinergis, terarah, dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, RPJPD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2025–2045, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Proses penyusunan tersebut menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom-up, politis, dan top-down. Pendekatan teknokratis dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh perangkat daerah yang secara fungsional bertugas menyusun perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, termasuk melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan pakar terkait. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dilaksanakan melalui pelibatan Masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan secara berjenjang, terutama melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga sinkronisasi dengan perencanaan di tingkat provinsi dan nasional. Pendekatan politis dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, sedangkan pendekatan top-down dilakukan dengan merujuk pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Secara substansi, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan subkegiatan beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Pasal 150 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun dengan menekankan pada perencanaan yang lebih fokus dan berkualitas, tidak lagi sekadar memuat daftar panjang usulan kegiatan perangkat daerah, tetapi diarahkan agar bersifat spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (achievable), realistis sesuai ketersediaan sumber daya (resource availability), serta dapat dilaksanakan tepat waktu (time-bound). Selain itu, prinsip keberlanjutan pembangunan menjadi landasan penting agar pelaksanaan pembangunan

mampu menjawab kebutuhan lintas ruang dan waktu serta menyelesaikan permasalahan pembangunan secara integral, holistik, dan komprehensif.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta perangkat daerah penanggung jawab yang akan dilaksanakan dalam satu tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD;
3. Secara operasional, menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja penyelenggaraannpemerintahan daerah dalam merealisasikan program, kegiatan, dan subkegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dilakukan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

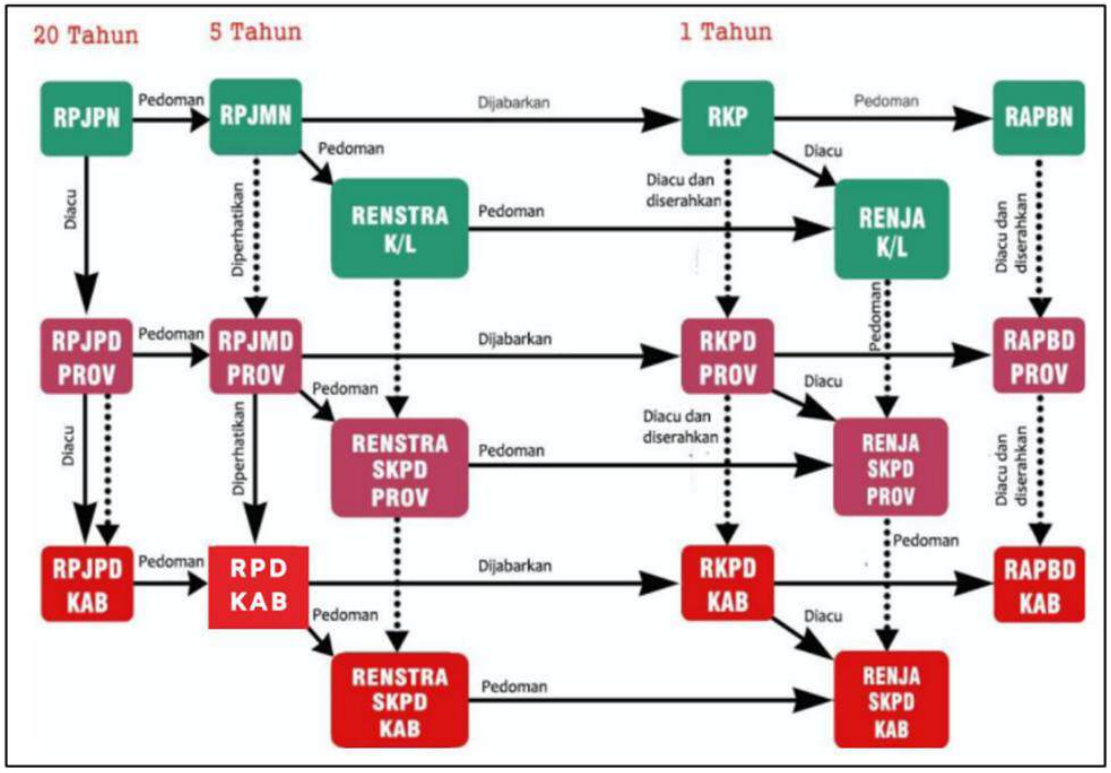
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 berpedoman pada dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah, dokumen perencanaan sektoral yang ada serta merujuk pada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan level pemerintahan desa. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Dokumen RKPD dalam kaitannya dengan dokumen sektoral seperti SPM, SDGs, Reformasi Birokrasi dan dokumen sektoral lainnya juga dituangkan dalam penyajian capaian-capaian indikator SPM maupun indikator yang berhubungan dengan SDGs dan Reformasi Birokrasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagai tahun ke dua penjabaran visi dan misi Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 adalah:

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan perencanaan progam, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah tahun 2027;
2. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tahun 2027;

3. Menciptakan sinergitas program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam melaksanakan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya nasional serta daerah dalam rangka optimalisasi hasil pembangunan daerah;
5. Menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2027; dan
6. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD dan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2027.

1.5. Sistematika Dokumen

Sistematika RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program, kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas sasaran pembangunan tahun 2027.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

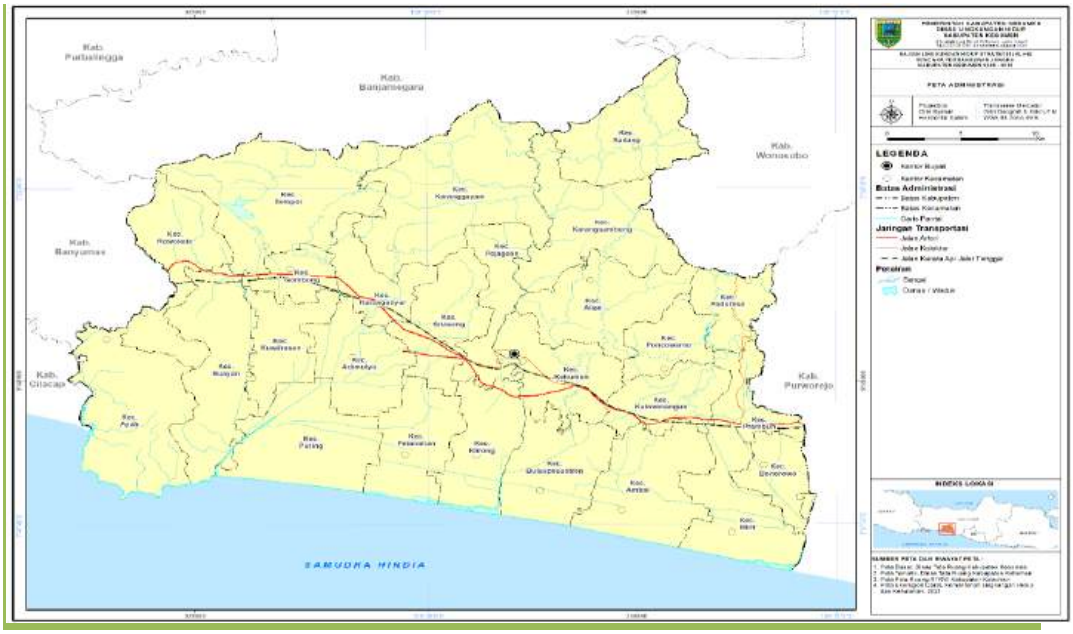
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan jarak dari Kabupaten Kebumen ke pusat ibu kota provinsi sepanjang ±162 km. Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah sebesar 133.409 hektar atau 1.334,09 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Ditinjau secara geografis, wilayah Kabupaten Kebumen terletak antara 109°33' sampai 109°50' Bujur Timur dan 7°27' sampai 7°50' Lintang Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
Sebelah Selatan : Samudra Hindia;
Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas;
Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Secara administrasi kewilayahan Kabupaten Kebumen terbagi menjadi 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.949 dan 6.818 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong, yaitu 19,48 km² atau setara dengan 1,52% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen.

b. Kondisi Topografi

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kebumen cukup bervariasi mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, perbukitan, sampai dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 0-300 mdpl. Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten Kebumen ditunjukkan pada Tabel 2.1. Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (Mdpl).

Tabel 2.1.
Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Kebumen (Mdpl)

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
1	Ayah	Demangsari	9,00
2	Buayan	Buayan	14,00
3	Puring	Sitiadi	16,00
4	Petanahan	Petanahan	15,00
5	Klirong	Klirong	18,00
6	Buluspesantren	Setrojenar	17,00
7	Ambal	Ambalresmi	17,00
8	Mirit	Mirit	16,00
9	Bonorowo	Bonorowo	11,00
10	Prembun	Prembun	38,00
11	Padureso	Padureso	198,00
12	Kutowinangun	Kutowinangun	18,00
13	Alian	Krakal	37,00
14	Poncowarno	Poncowarno	21,00
15	Kebumen	Kebumen	27,00

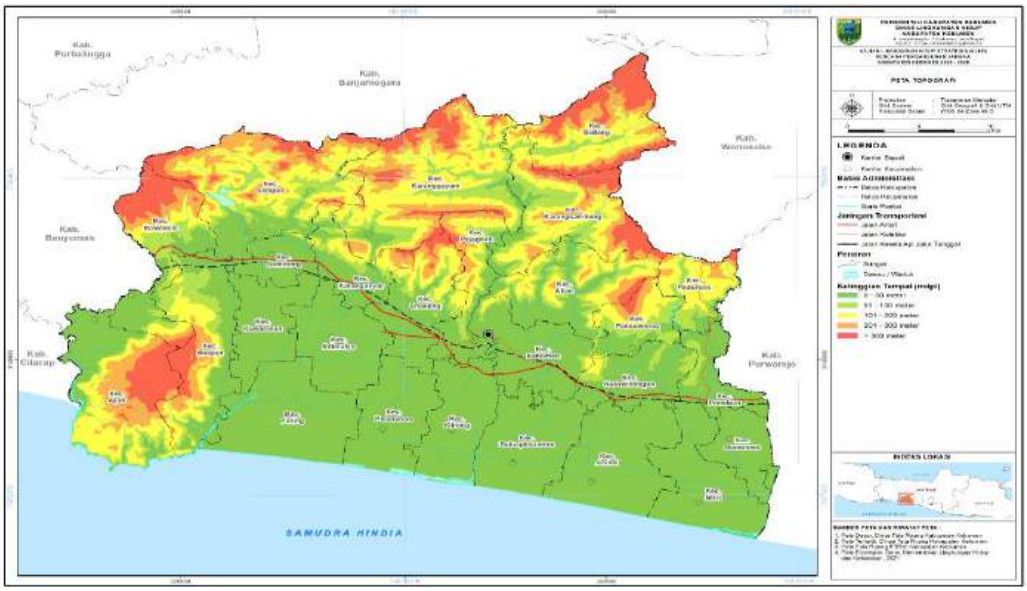
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (meter)
16	Pejagoan	Pejagoan	28,00
17	Sruweng	Sruweng	16,00
18	Adimulyo	Adimulyo	11,00
19	Kuwarasan	Kuwarasan	15,00
20	Rowokele	Rowokele	17,00
21	Sempor	Sempor	29,00
22	Gombong	Gombong	26,00
23	Karanganyar	Karanganyar	20,00
24	Karanggayam	Karanggayam	66,00
25	Sadang	Sadang	117,00
26	Karangsambung	Karangsambung	71,00

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Wilayah Kabupaten Kebumen 61 persen berada pada ketinggian 0-997,5 meter dengan karakteristik wilayah berupa pesisir, dataran rendah, dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1. Kemiringan 0-2 persen seluas 66.953,16 ha atau 52,26 persen;
2. Kemiringan 2-15 persen seluas 5.944,37 ha atau 4,64 persen;
3. Kemiringan 15-40 persen seluas 21.919,37 ha atau 17,11 persen; dan
4. Kemiringan lebih dari 40 persen seluas 33.294,6 ha atau 25,99 persen.

Berdasarkan peta topografi Kabupaten Kebumen, kemiringan lereng wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 5 kelas yaitu agak curam, curam, datar, landai, dan sangat curam. Pada wilayah utara Kabupaten Kebumen berada pada topografi sangat curam, sementara di bagian tengah dan selatan relatif datar dan landai karena merupakan wilayah pesisir.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Kebumen

c. Geologi

Secara geologi wilayah Kabupaten Kebumen memiliki kondisi geologi yang sangat beragam. Kabupaten Kebumen tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (Paleosen) hingga termuda (Pliosen) terdiri dari:

1. Kompleks Melange Luk Ulo (KT1) yang berupa bongkah-bongkah batuan dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);
2. Formasi Karangsambung (Teok) yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, dan basal (berumur Eosen). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa olistolit;
3. Formasi Totogan (Tomt) yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur Oligo Miosen);
4. Anggota Tuf Formasi Waturanda (Tmwt) yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur Miosen Awal);
5. Formasi Waturanda (Tmw) yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf;

6. Formasi Penosogan (Tmp) yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batulempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur Miosen Tengah);
7. Diabas (Tmd) adalah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (Miosen Tengah);
8. Formasi Halang (Tmph) yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur Pliosen);
9. Formasi Peniron (Tpp) yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
10. Batuan Gunungapi Sumbing Muda (Qsm) yang terdiri atas batupasir tufan, tuf pasiran dan breksi andesit;
11. Endapan Pantai (Qac) yang berupa pasir lepas; dan
12. Alluvium (Qa) yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

D. Hidrologi

Secara hidrologis, sumber daya air di Kabupaten Kebumen adalah berasal dari mata air, sungai, danau/waduk/bendungan, rawa dan air tanah. DAS Luk Ulo Hulu merupakan salah satu DAS yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo. Wilayah Kabupaten Kebumen dialiri oleh banyak sungai, yaitu Sungai Luk Ulo, Kali Cicingguling, Kali Ijo, Kali Karanganyar, Kali Kedungbener, Kali Jatinegara, Kali Wawar, Kali Sidomukti, Kali Kretek, Kali Kenteng, Kali Cacaban, Kali Gebang, Kali Kemit, Kali Rama, Kali Cungka, Kali Buntuk dan Kali Kedungsomad. Di Kabupaten Kebumen juga terdapat dua waduk besar yaitu Waduk Sempor yang berada di Kecamatan Sempor dan Waduk Wadaslintang dengan kapasitas penyimpanan air 324.087 m^3 yang digunakan sebagai sumber air untuk wilayah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan pembagian wilayah sungai, sungai di wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi beberapa Sub Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu:

1. Sub SWS Telomoyo: 55.613,552 Ha
2. Sub SWS Jladri 1 Pecaron: 5.593,690 Ha
3. Sub SWS Jatinegara: 18.589,897 Ha
4. Sub SWS Kemit: 19.636,080 Ha
5. Sub SWS Karanganyar: 11.789,885 Ha, dengan volume tampung air 1.786.863.425 m^3
6. Sub SWS Luk Ulo: 67.553,245 Ha, dengan volume tampung air 2.170.485.700 m^3

7. Sub SWS Medono (Wawar): 64.984 Ha, dengan volume tampung air 2.087.935.920 m³
8. Sub SWS Ijo: 4.579,583 Ha, dengan volume tampung air 147.142.002 m³

Sungai Luk Ulo merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kebumen, yang mempunyai daerah tangkapan air seluas 596 km2, dengan panjang sungai utama 62 km, dengan beberapa anak sungai, yaitu Sungai Jeblog, Gebog, Mondo, Lokidang dan Loning. Sungai Luk Ulo melintas sepanjang Kabupaten Kebumen yang berhulu di Kabupaten Banjarnegara dan bermuara di pantai selatan Desa Tanggulangin Kecamatan Klirong. Pada musim hujan debit Sungai Luk Ulo meningkat tajam sedangkan pada musim kemarau sangat kecil. Karakteristik Sungai Luk Ulo pada bagian hulu berkelok-kelok membentuk *meander* sehingga banyak mengandung endapan pasir. Daerah tangkapan sungai Luk Ulo terbagi menjadi 31 km *upstream* di daerah Karangsambung sampai daerah Kebagoran menuju arah muara di selatan Kebumen.

Sementara itu, Kabupaten Kebumen juga mempunyai potensi Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Kroya, Banyumudal, dan CAT Kebumen Purworejo. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologi, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Jika dilihat berdasarkan persebarannya maka potensi CAT tersebut berada di bagian tengah dan selatan Kabupaten Kebumen. Sementara itu di bagian utara Kebumen merupakan wilayah non CAT. Sehingga di Kabupaten Kebumen terdapat dua waduk yang berada di wilayah utara yaitu Waduk Sempor dan Waduk Wadaslintang. Fungsi waduk tersebut yaitu untuk meningkatkan ketersediaan air baku di Kabupaten Kebumen terutama di wilayah utara. Berikut ditampilkan peta persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.2.
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

Cekungan Air Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
CAT Kroya	2.404,64	3,44
CAT Banyumudal	6.961,48	9,97
CAT Kebumen-Purworejo	60.440,13	86,58
Total	69.806,25	100

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki sumber mata air berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen diketahui bahwa jumlah mata air yang terdata sebanyak 277 buah dan tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Tabel 2.3.
Jumlah Sebaran Mata Air di Rinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Mata Air
1	Ayah	18
2	Buayan	37
3	Puring	-
4	Petanahan	-
5	Klirong	-
6	Buluspesantren	-
7	Ambal	-
8	Mirit	-
9	Bonorowo	-
10	Prembun	5
11	Padureso	18
12	Kutowinangun	3
13	Alian	28
14	Poncowarno	12
15	Kebumen	1
16	Pejagoan	14
17	Sruweng	25
18	Adimulyo	-
19	Kuwarasan	-
20	Rowokele	27
21	Sempor	22
22	Gombong	-
23	Karanganyar	20
24	Karanggayam	23
25	Sadang	11
26	Karangsambung	13
	TOTAL	277

Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045, KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 dan DLHKP Kabupaten Kebumen 2022

d. Klimatologi

Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan meliputi suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Kabupaten Kebumen beriklim tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, suhu udara pada tahun 2025 berkisar antara 13,8°C sampai dengan 36,0°C, dengan kelembaban udara antara 68% sampai dengan 97%. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 52 mm dan tertinggi pada bulan November sebesar 673 mm. Kondisi klimatologi tersebut secara umum mendukung pemanfaatan lahan.

Tabel 2.4.
Keadaan Iklim di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Berdasarkan Kecepatan Angin (m/det), Penguapan (mm) dan Curah Hujan (mm)

Bulan *Month*	Suhu/Temperature (0C)			Kelembaban/*Humidity* (%)			Curah Hujan (mm)
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(4)	(5)	(6)
Januari	17,4	26,7	33,4	84	88	95	351
Februari	16,8	24,6	33,8	68	76	96	393
Maret	17,4	27,3	34,8	78	86	97	445
April	16,8	17,2	34,0	77	82	93	304
Mei	17,0	27,2	34,0	81	87	96	411
Juni	15,8	26,7	33,6	80	86	97	96
Juli	14,8	26,2	32,8	75	88	96	52
Agustus	13,8	25,9	33,6	71	86	97	97
September	14,4	25,5	33,8	79	84	96	285
Oktober	16,0	26,9	34,0	80	86	97	553
November	16,0	25,2	33,4	81	86	97	673
Desember	17,0	26,6	36,0	82	88	96	482

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2026

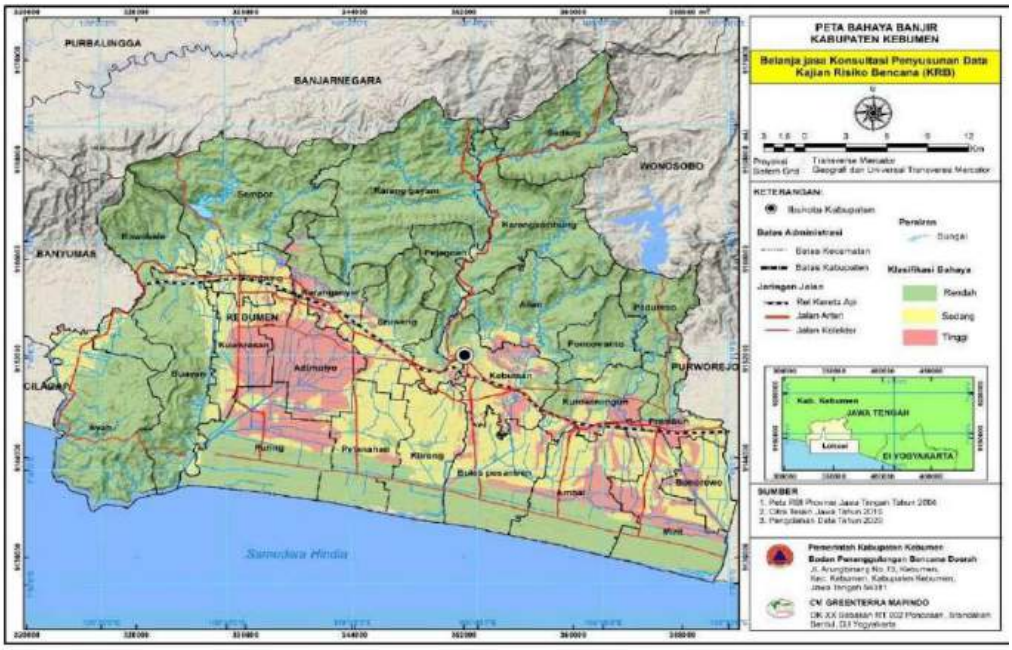
Bulan *Month*	Kecepatan Angin (m/det) *Wind Velocity (m/sec)*			Penguapan/ *Evaporation* (mm)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari	17,00	34,15	50,10	0,00	3,13	5,50
Februari	20,30	33,00	78,00	1,00	3,18	6,00
Maret	19,70	32,48	45,00	1,00	5,08	7,00
April	23,40	35,31	60,80	1,00	3,39	6,00
Mei	18,90	35,25	56,10	1,50	2,87	5,00
Juni	20,80	39,10	51,90	1,00	2,70	5,00
Juli	39,50	54,44	84,30	0,00	2,72	4,50
Agustus	34,30	53,58	118,10	0,00	2,77	5,00
September	26,60	54,87	80,10	0,00	2,63	4,00
Oktober	22,30	47,44	69,60	0,00	3,76	19,00
November	20,10	34,45	65,90	0,00	3,16	23,50
Desember	23,80	36,43	64,00	0,00	2,34	5,00

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2026

e. Kawasan Rawan Bencana

1. Banjir

Ancaman banjir kerap terjadi di wilayah selatan Kabupaten Kebumen yang secara topografis didominasi oleh kondisi lahan yang relatif landai hingga sangat landai, sehingga memiliki tingkat kerentan tinggi terhadap genangan air. Kejadian banjir di Kabupaten Kebumen pada umumnya disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan meluapnya aliran sungai yang kemudian menggenangi wilayah daratan, baik lahan persawahan maupun kawasan permukiman. Berdasarkan hasil pengolahan data serta catatan historis kejadian banjir, diperoleh peta ancaman bencana banjir sebagai berikut:



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.3.
Peta Bahaya Banjir Kabupaten Kebumen

Bencana banjir kerap melanda beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit dan Puring. Kejadian banjir dengan luas genangan serta durasi yang relatif lama umumnya disebabkan oleh meluapnya sungai akibat curah hujan tinggi, jebolnya tanggul sungai, serta kerusakan atau kapasitas saluran irigasi yang kurang memadai. Berdasarkan klasifikasi luas bahayanya, wilayah dengan klasifikasi tinggi mencapai 11,5%, klasifikasi sedang sebesar 21,7% dan klasifikasi rendah sebesar 66,8%. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi wilayah rawan banjir bandang sekitar 18,66%, sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.
Persentase Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
14.701,55	11,50	27.788,77	21,70	85.621,18	66,80

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

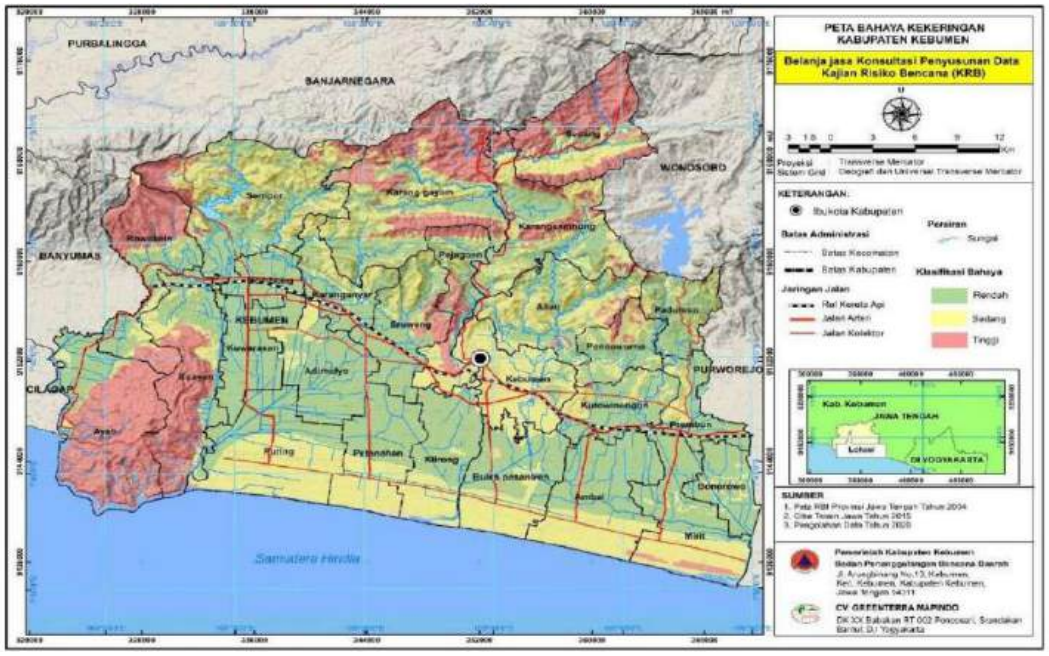
2. Kekeringan

Bahaya kekeringan di Kabupaten Kebumen bersifat periodik tahunan, umumnya pada periode Juni hingga September. Berdasarkan data droping air dari BPBD, wilayah yang terdampak bahaya kekeringan tergolong luas, mencakup 18 Kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen yaitu Kecamatan Karanggayam, Alian, Ayah, Sempor, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Poncowarno, Kebumen, Kutowinangun, Karanganyar, Adimulyo, Rowokele, Padureso, Karangsambung, Klirong, Sadang, serta Petanahan.

Tabel 2.6.
Persentase Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
25.167,87	19,6	42.642,32	33,3	60.301,31	47,1

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.4.
Peta Bahaya Kekeringan Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Kebumen didominasi oleh wilayah dengan tingkat bahaya kekeringan rendah, dengan luas mencapai 60.301,31 Ha atau sekitar 47,1% dari total luas wilayah. Sementara itu, wilayah bahaya kekeringan dengan klasifikasi tinggi luasnya 25.167,87 Ha atau 19,6% dari luas Kabupaten Kebumen dan klasifikasi sedang seluas 42.642,32 Ha atau 33,3% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Perlu dicatat bahwa seluruh wilayah Kabupaten Kebumen diklasifikasikan ke dalam³ kategori tersebut, sehingga wilayah yang secara perhitungan tidak memiliki bahaya kekeringan tetap dimasukkan ke dalam kategori rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen berada pada tingkat bahaya kekeringan sedang hingga tinggi, sehingga pengelolaan sumber daya air, peningkatan kapasitas jaringan irigasi, pembangunan embung, serta konservasi daerah tangkapan air menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

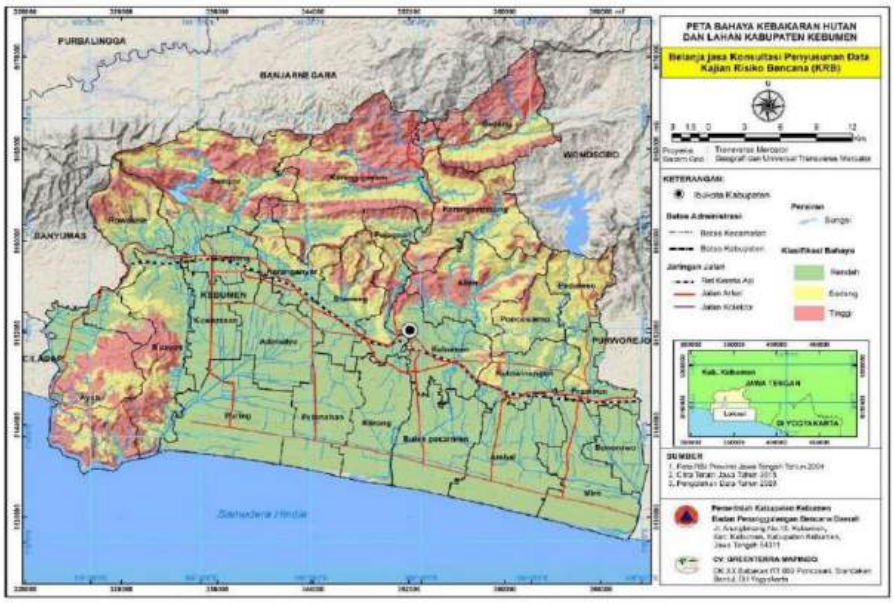
3. Kebakaran Lahan dan Hutan

Bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kebumen umumnya terjadi pada kawasan hutan dan lahan yang dikelola oleh Perhutani. Sebagian besar bahaya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah atau semak-semak saat pembersihan lahan, sisa puntung rokok, maupun sisa api unggun yang masih menyala di kawasan hutan atau lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan seringkali menghadapi kendala karena lokasi kejadian yang sulit dijangkau dan jarak yang relatif jauh sehingga proses pemadaman tidak dapat dilakukan dengan cepat.

Tabel 2.7.
Persentase Luas Bahaya Karhutla di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
27.833,56	21,7	28.241,02	22	72.036,92	56,2

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.5.
Peta Bahaya Karhutla Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Kebumen didominasi oleh bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan klasifikasi rendah yaitu seluas 72.036,92 Ha (56,2%) dari total luas Kabupaten Kebumen. Bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 27.833,56 Ha (21,7%) dari luas wilayah kabupaten.

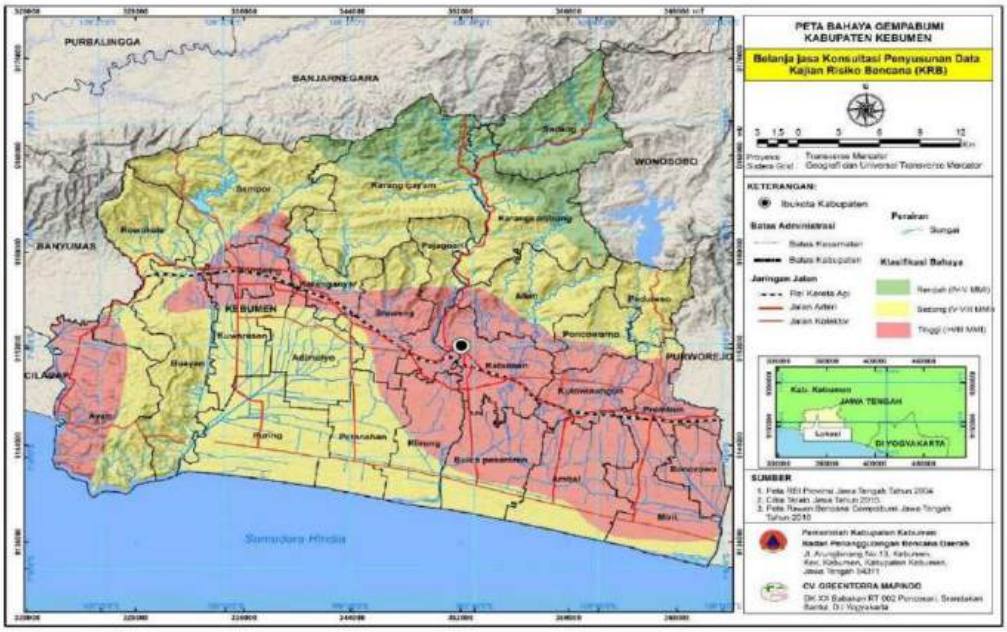
4. Gempa Bumi

Kabupaten Kebumen memiliki potensi bahaya gempa bumi yang tinggi, mengingat posisinya yang berdekatan dengan Zona Subduksi Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Kabupaten Kebumen masuk dalam kawasan megathrust. Selain itu, keberadaan beberapa sesar aktif di wilayah Karangsambung juga berpotensi memicu terjadinya gempa bumi. Berdasarkan catatan kejadian bencana, gempa bumi yang terjadi (dirasakan) di Kabupaten Kebumen umumnya memiliki episentrum di luar wilayah Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.8.
Persentase Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
45.510,34	35,52	69.975,47	54,62	12.625,21	9,85

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.6.
Peta Bahaya Gempa Bumi Kabupaten Kebumen

Hasil analisis tingkat bahaya menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten kebumen berada pada klasifikasi bahaya gempa bumi sedang dengan luas mencapai 69.975,47 Ha atau sekitar 54,6% dari total luas wilayah. Sementara itu, wilayah dengan klasifikasi bahaya tinggi mencakup area seluas 45.510,34 Ha atau 35,52% dan klasifikasi bahaya rendah seluas 12.625,21 Ha atau 9,85% dari total luas Kabupaten Kebumen.

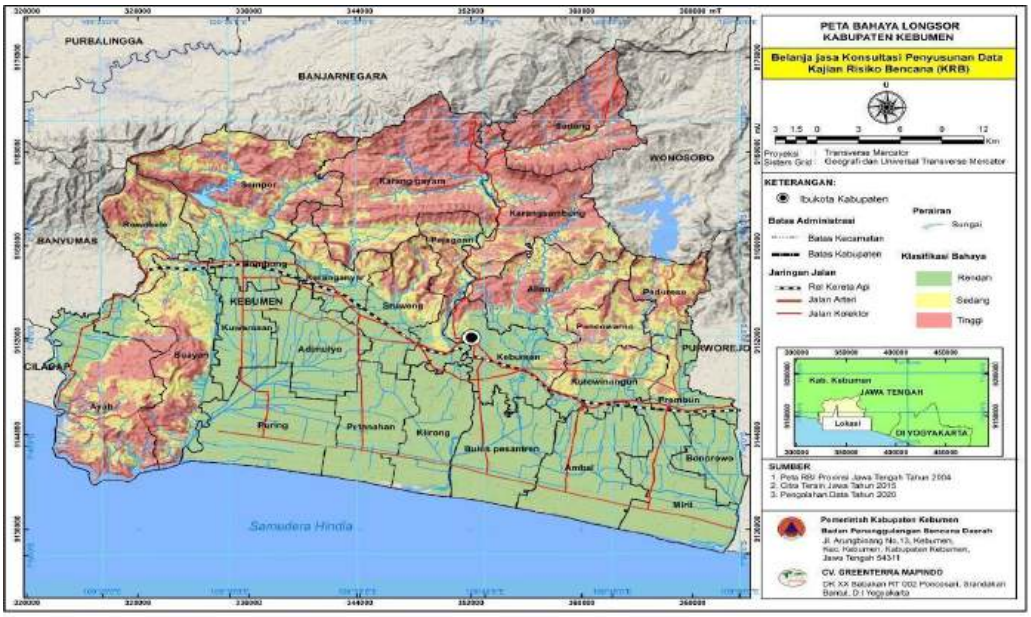
5. Tanah Longsor

Secara topografis, wilayah utara Kabupaten Kebumen didominasi oleh kondisi lahan yang terjal hingga sangat terjal. Bahaya tanah longsor di Kabupaten Kebumen secara alami bersifat periodik dan umumnya terjadi setiap tahun pada musim hujan, terutama di wilayah utara serta kawasan perbukitan selatan Karangbolong. Tingginya frekuensi kejadian tanah longsor menjadikan bencana ini sebagai salah satu prioritas penanganan di Kabupaten Kebumen. Dalam pemetaan potensi bencana, seluruh wilayah kabupaten diklasifikasikan ke dalam tiga kategori bahaya, sehingga wilayah yang secara perhitungan tidak berpotensi terjadi bahaya longsor dimasukkan ke dalam kategori rendah.

Tabel 2.9.
Persentase Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
38.589,87	30,1	24.663,87	19,3	64.857,75	50,6

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.7.
Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen

Berdasarkan tabel di atas, wilayah dengan klasifikasi bahaya tanah longsor tinggi memiliki luas sebesar 38.589,87 Ha atau 30,1%, klasifikasi sedang seluas 24.663,87 Ha atau 19,3%, serta klarifikasi rendah seluas 64.857,75 Ha atau 50,6% dari total luas Kabupaten Kebumen. Ancaman tanah longsor banyak terjadi di kecamatan dengan karakteristik topografi perbukitan dan lereng curam seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso dan Karanggayam.

6. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

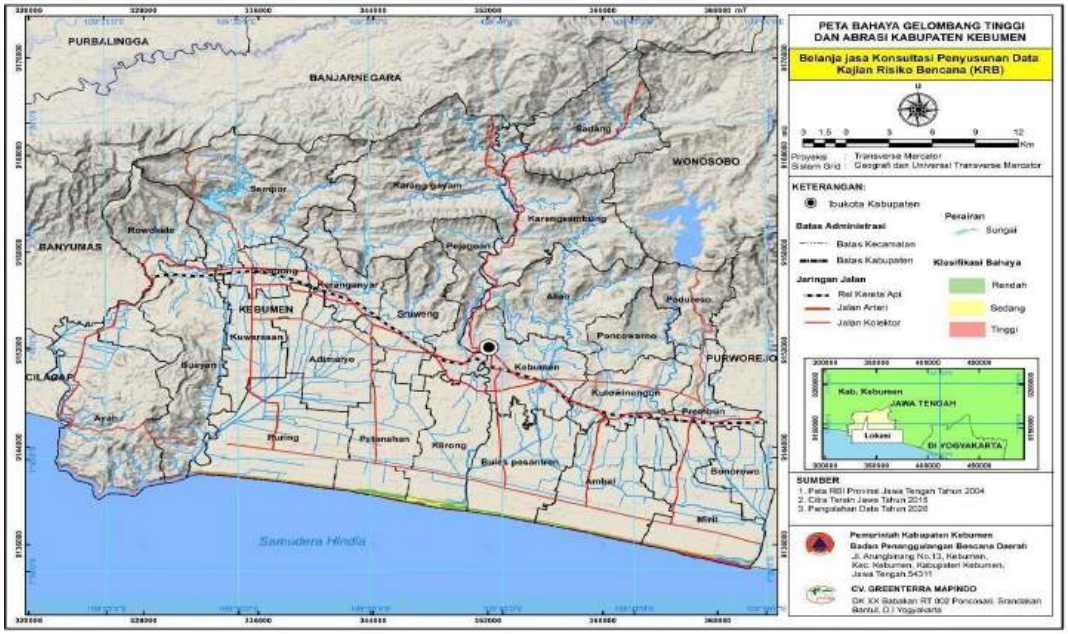
Dampak bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di Kabupaten Kebumen relatif terbatas secara luasan wilayah. Namun demikian, pada kawasan pesisir yang masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian pada sektor kelautan dan pariwisata, dampak yang ditimbulkan cenderung signifikan. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen mulai dari Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan,

Puring, Buayan dan Ayah pernah mengalami dampak gelombang ekstrem dan abrasi, khususnya terhadap masyarakat nelayan dan pelaku usaha di sekitar pantai.

Tabel 2.10.
Persentase Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Kebumen

Tinggi		Sedang		Rendah	
Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
620,18	0,48	280,74	0,22	479,78	0,37

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar 2.8.
Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Kebumen

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi terkonsentrasi pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Wilayah dengan tingkat bahaya tinggi memiliki luas sekitar 620,18 Ha atau 0,48% dari total wilayah Kabupaten Kebumen. Sementara itu, wilayah dengan klasifikasi bahaya sedang mencakup 280,74 Ha atau 0,22% dan wilayah dengan klasifikasi bahaya rendah seluas 479,79 Ha atau 0,37% dari keseluruhan wilayah kabupaten.

f. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung adalah wilayah yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung terdiri atas badan air dengan luas kurang lebih 1.415 hektar, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 3.820 hektar, kawasan konservasi berupa taman pulau kecil dengan luas kurang lebih 0,5 hektar, kawasan lindung geologi berupa kawasan keunikan batuan dan fosil dengan luas kurang lebih 5 hektar, serta kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 63 hektar.

Sementara itu, kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya terdiri atas kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 13.077 hektar dan kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 665 hektar, kawasan perkebunan rakyat dengan luas kurang lebih 23.788 hektar, kawasan pertanian berupa kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 44.113 hektar (ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 hektar), kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 241 hektar, kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan dan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan batuan dengan luas kurang lebih 94 hektar, kawasan pembangkitan tenaga listrik yaitu gardu induk dengan luas kurang lebih 5 hektar, kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.310 hektar, kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 172 hektar, kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 12.798 hektar dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 27.605 hektar, serta kawasan pertahanan dan keamanan termasuk daerah latihan TNI AD dengan luas kurang lebih 2.238 hektar.

Tabel 2.11.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kebumen

No	Penggunaan Lahan	Luas (hektar)
A.	Kawasan lindung terdiri atas:	
	1. Badan Air	1.415
	2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung	3.820

No	Penggunaan Lahan	Luas (hektar)
	3. Kawasan Konservasi berupa Taman Pulau Kecil	0,5
	4. Kawasan lindung geologi berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil.	5
	5. Kawasan Cagar Budaya	
	6. Kawasan Ekosistem Mangrove	63
B.	Kawasan budi daya terdiri atas:	
	1. Kawasan hutan produksi, meliputi:	
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	13.077
	b. Kawasan Hutan Produksi Tetap	655
	2. Kawasan Perkebunan Rakyat	23.788
	3. Kawasan pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan	44.113 hektar (di mana yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 43.154 hektar)
	4. Kawasan perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya	241
	5. Kawasan pertambangan dan mineral meliputi:	
	a. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	94
	b. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yaitu Gardu Induk	5
	6. Kawasan Peruntukan Industri	3.310
	7. Kawasan Pariwisata	172
	8. Kawasan permukiman meliputi:	
	a. Kawasan Permukiman Perkotaan	12.798
	b. Kawasan Permukiman Perdesaan	27.605
	9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan termasuk daerah latihan TNI AD	2.238

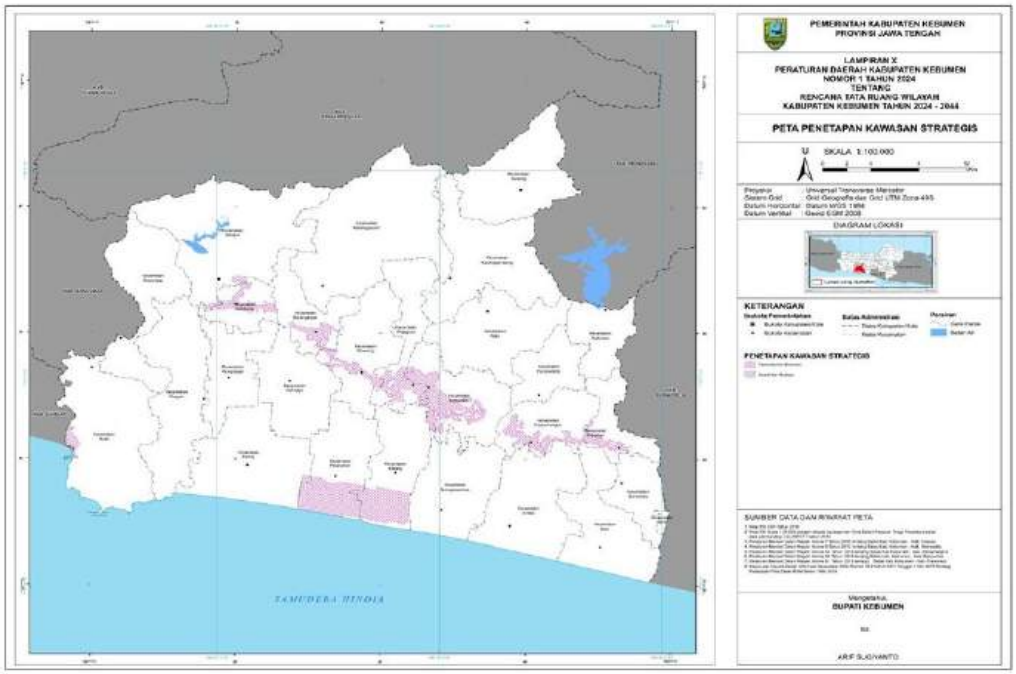
Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

2.1.1.1. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi sub wilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif. Berikut ini konsep potensial akan dikembangkan di wilayah Kebumen yaitu:

1. Kawasan Strategis

Kawasan strategis Kabupaten Kebumen terdiri atas kawasan strategis provinsi di Kabupaten dan kawasan strategis Kabupaten. Berdasarkan RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Kebumen, terdiri atas (1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten meliputi: (a) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, (b) Kawasan Stategis Provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan (c) Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan (2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: (a) Kawasan industri Kebumen, (b) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong, (c) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng, (d) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen, (e) Kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun, dan (f) Kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah.



Sumber: Perda No 1 Tahun 2024, RTRW 2024-2044, 2024

Gambar 2.9.
Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kebumen

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan industri Kebumen merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan industri terpadu sedangkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi kawasan strategis pariwisata terpadu. Pengembangan kawasan industri Kebumen bertujuan mewujudkan kawasan industri yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan arah pengembangan industri, perdagangan dan jasa, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Gombong sebagai kawasan perdagangan dan jasa dan pusat pariwisata budaya dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Karanganyar-Sruweng sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa dengan arah pengembangan perdagangan dan jasa dan permukiman. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen bertujuan mewujudkan Kawasan ekonomi cepat tumbuh Kebumen sebagai Kawasan pusat pemerintahan yang didukung perdagangan dan jasa dan industri dengan arah pengembangan pusat pemerintahan, industri, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun bertujuan mewujudkan kawasan ekonomi cepat tumbuh Prembun-Kutowinangun sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa berbasis Agrobisnis dengan arah pengembangan pertanian, permukiman, dan perdagangan dan jasa. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu

pesisir Ayah bertujuan mewujudkan kawasan pariwisata terpadu pesisir Ayah sebagai kawasan pariwisata alam yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan dengan arah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Kota Pusaka Gombong. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya bertujuan mewujudkan sebagai kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Arah pengembangan Kawasan Kota Pusaka Gombong di Kecamatan Gombong adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman.

2. Geopark Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki kawasan Geopark Kebumen yang saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai *UNESCO Global Geopark* (UGGp). Geopark Kebumen dengan luas kawasan 1.138,70 kilometer persegi daratan dan 21,98 kilometer persegi laut, mencakup 22 kecamatan dan 374 desa dengan mempunyai morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, pedataran sampai pantai. Terdapat 42 *geosite*, 7 *biosite* dan 24 *culturesite* yang berada dalam kawasan Geopark Kebumen yang perlu dikembangkan dengan prinsip konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat, termasuk mengembangkannya sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.

Potensi pariwisata di Kabupaten Kebumen, khususnya dengan keberadaan Geopark Kebumen, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tulang punggung perekonomian. Peningkatan ekonomi melalui upaya *value creation* area-area konservasi masih relatif minim dilakukan, meski potensi tersebut sangat besar. Pemerintah Kabupaten telah berupaya mendorong Kawasan Geopark Kebumen setelah ditetapkan sebagai Geopark Nasional pada Tahun 2018, kini status *Unesco Global Geopark* telah resmi diperoleh Geopark Kebumen pada 17 April 2025.

Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2019, Pengembangan Taman Bumi (Geopark) adalah tata kelola Geopark guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui tiga pilar pengembangan yakni konservasi, edukasi dan pembangunan ekonomi masyarakat. Mengusung visi **"Menjadi Geopark yang Terkemuka, Berkelanjutan dan Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat"**, memandu upaya menuju pengembangan geopark yang tidak hanya memiliki nilai geologi, tetapi juga mengutamakan keseimbangan ekosistem, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan geopark adalah untuk menstimulasi kegiatan ekonomi dalam tataran pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut akan memberikan dampak langsung kepada daerah dalam bentuk

peningkatan mutu kehidupan manusia dan lingkungan di wilayah tersebut. Konsep Geopark mengupayakan suatu perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dari eksploitasi menjadi konservasi dengan mengambil manfaatnya. Dengan terwujudnya *UNESCO Global Geopark*, maka peluang untuk menciptakan sebuah gerbong penarik perekonomian wilayah menjadi sangat terbuka. Dalam hal ini, Geopark mendorong pembangunan ekonomi lokal berbasis keberlanjutan melalui sektor pariwisata, kerajinan lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dihasilkan dari Geopark, seperti ekowisata dan produk berbasis alam, kawasan ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar di sekitar kawasan Geopark, seperti akses jalan, fasilitas air bersih, sarana kesehatan dan komunikasi, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal.

2.1.1.2. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 1.453.417 jiwa, tumbuh sebesar 0,46% dibandingkan dengan tahun 2024. Pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir cukup fluktuatif, namun rata-rata pertumbuhannya masih di bawah 1% kecuali pada tahun 2022. Sementara itu, angka *Sex Ratio* cukup stabil diangka 103 selama periode tahun 2021-2025 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak sekitar 3% dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.12.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.406.606	1.421.143	1.434.023	1.446.833	1.453.417
Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,47	1,03	0,91	0,89	0,46
Rasio penduduk (Persen)	103,00	102,66	103,00	102,89	102,83

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

b. Jumlah Penduduk Per Kecamatan

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 736.988 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 716.429 jiwa, maka sex ratio penduduk mencapai 103%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki. Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Kebumen

merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 137.649 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Padureso yaitu sebanyak 17.774 jiwa. Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan		Laki-laki		Perempuan		Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	33.05.01	Ayah	34.948	50,64	34.062	49,36	69.010	4,75
2	33.05.02	Buayan	36.019	51,03	34.569	48,97	70.588	4,86
3	33.05.03	Puring	34.500	50,71	33.529	49,29	68.029	4,68
4	33.05.04	Petanahan	32.652	50,61	31.865	49,39	64.517	4,44
5	33.05.05	Klirong	34.506	50,69	33.565	49,31	68.071	4,68
6	33.05.06	Buluspesantren	32.032	50,88	30.926	49,12	62.958	4,33
7	33.05.07	Ambal	34.123	50,81	33.029	49,19	67.152	4,62
8	33.05.08	Mirit	29.116	50,71	28.299	49,29	57.415	3,95
9	33.05.09	Prembun	15.333	50,21	15.207	49,79	30.540	2,1
10	33.05.10	Kutowinangun	25.810	50,70	25.100	49,30	50.910	3,5
11	33.05.11	Alian	36.766	50,97	35.361	49,03	72.127	4,96
12	33.05.12	Kebumen	69.643	50,59	68.006	49,41	137.649	9,47
13	33.05.13	Pejagoan	29.748	50,90	28.691	49,10	58.439	4,02
14	33.05.14	Sruweng	32.892	50,47	32.275	49,53	65.167	4,48
15	33.05.15	Adimulyo	19.717	49,98	19.735	50,02	39.452	2,71
16	33.05.16	Kuwarasan	27.509	51,00	26.428	49,00	53.937	3,71
17	33.05.17	Rowokele	27.507	50,51	26.950	49,49	54.457	3,75
18	33.05.18	Sempor	37.520	50,81	36.330	49,19	73.850	5,08
19	33.05.19	Gombong	25.304	49,82	25.483	50,18	50.787	3,49
20	33.05.20	Karanganyar	19.442	50,40	19.133	49,60	38.575	2,65
21	33.05.21	Karanggayam	32.487	51,15	31.030	48,85	63.517	4,37
22	33.05.22	Sadang	12.523	51,40	11.840	48,60	24.363	1,68
23	33.05.23	Bonorowo	11.695	50,87	11.295	49,13	22.990	1,58
24	33.05.24	Padureso	8.968	50,46	8.806	49,54	17.774	1,22
25	33.05.25	Poncowarno	10.159	50,80	9.840	49,20	19.999	1,38
26	33.05.26	Karangsambung	26.069	50,97	25.075	49,03	51.144	3,52
Jumlah			**736.988**	**50,70**	**716.429**	**49,30**	**1.453.417**	**100**

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

c. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan dari 1.098 jiwa/km^2 pada tahun 2021 menjadi 1.134 jiwa/km^2 pada tahun 2025, Angka kepadatan tersebut berarti bahwa rata-rata terdapat 1.134 penduduk yang menghuni setiap 1 km^2 wilayah di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Kebumen merupakan wilayah yang

memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 3.274 jiwa/km^2. Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Sadang sebesar 449 jiwa/km^2.

Tabel 2.14.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Ayah	76,37	69.010	904
2	Buayan	68,42	70.588	1032
3	Puring	61,97	68.029	1098
4	Petanahan	44,84	64.517	1439
5	Klirong	43,25	68.071	1574
6	Buluspesantren	48,77	62.958	1291
7	Ambal	62,41	67.152	1076
8	Mirit	52,35	57.415	1097
9	Prembun	22,96	30.540	1330
10	Kutowinangun	33,73	50.910	1509
11	Alian	57,75	72.127	1249
12	Kebumen	42,04	137.649	3274
13	Pejagoan	34,58	58.439	1690
14	Sruweng	43,68	65.167	1492
15	Adimulyo	43,43	39.452	908
16	Kuwarasan	33,84	53.937	1594
17	Rowokele	53,8	54.457	1012
18	Sempor	100,15	73.850	737
19	Gombong	19,48	50.787	2607
20	Karanganyar	31,4	38.575	1229
21	Karanggayam	109,29	63.517	581
22	Sadang	54,23	24.363	449
23	Bonorowo	20,91	22.990	1099
24	Padureso	28,95	17.774	614
25	Poncowarno	27,37	19.999	731
26	Karangsambung	65,15	51.144	785
	Total 2025	1.281,12	1.453.417	1.134,49
	Total 2024		1.446.833	1.129,35
	Total 2023		1.434.023	1.119,35
	Total 2022		1.421.143	1.109,30
	Total 2021		1.406.606	1.097,95

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

d. Struktur Usia Penduduk

Keberhasilan pembangunan kependudukan dapat tergambarkan dari perubahan struktur umur penduduk yang salah satunya ditunjukkan melalui rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin rendah dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya. Berdasarkan data jumlah penduduk umur tunggal di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menunjukkan proporsi penduduk dengan kategori usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 989.731 jiwa dan non produktif (0-14 tahun, ditambah 65 tahun ke atas) sebanyak 463,686 jiwa. Data tersebut menggambarkan rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kebumen sebesar 46,85%, artinya setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 46 hingga 47 orang yang masuk usia tidak produktif.

Rasio ketergantungan yang berada di bawah 50% menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen sedang berada pada fase struktur penduduk yang relatif menguntungkan (*window of opportunity*). Kondisi ini berpotensi mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, tanpa dukungan kebijakan yang tepat, peluang bonus demografi tersebut berisiko tidak termanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.15.
Jumlah Penduduk Umur Tunggal Kabupaten Kebumen
Tahun 2025

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0 tahun	6.947	6.611	13.558
2	1 tahun	8.052	7.500	15.552
3	2 tahun	9.014	8.758	17.772
4	3 tahun	9.847	9.027	18.874
5	4 tahun	10.821	10.183	21.004
6	5 tahun	11.218	10.518	21.736
7	6 tahun	11.094	10.505	21.599
8	7 tahun	11.227	10.312	21.539
9	8 tahun	10.918	10.138	21.056
10	9 tahun	10.878	10.244	21.122
11	10 tahun	11.058	10.283	21.341
12	11 tahun	11.060	10.221	21.281
13	12 tahun	11.160	10.164	21.324
14	13 tahun	11.482	10.647	22.129
15	14 tahun	11.702	10.920	22.622
16	15 tahun	11.856	10.875	22.731
17	16 tahun	11.721	10.868	22.589

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
18	17 tahun	11.199	10.413	21.612
19	18 tahun	10.075	9.571	19.646
20	19 tahun	10.678	10.169	20.847
21	20 tahun	10.416	9.641	20.057
22	21 tahun	10.882	10.493	21.375
23	22 tahun	11.218	10.562	21.780
24	23 tahun	10.992	10.216	21.208
25	24 tahun	11.366	10.624	21.990
26	25 tahun	12.333	11.488	23.821
27	26 tahun	11.873	10.957	22.830
28	27 tahun	10.990	10.242	21.232
29	28 tahun	11.746	10.489	22.235
30	29 tahun	12.091	10.919	23.010
31	30 tahun	11.989	10.712	22.701
32	31 tahun	11.437	10.343	21.780
33	32 tahun	11.342	10.363	21.705
34	33 tahun	11.495	10.212	21.707
35	34 tahun	10.752	9.898	20.650
36	35 tahun	10.830	10.240	21.070
37	36 tahun	11.663	10.596	22.259
38	37 tahun	10.374	9.392	19.766
39	38 tahun	10.588	9.611	20.199
40	39 tahun	11.169	10.304	21.473
41	40 tahun	11.135	10.174	21.309
42	41 tahun	10.937	10.140	21.077
43	42 tahun	10.552	10.025	20.577
44	43 tahun	11.376	10.839	22.215
45	44 tahun	9.983	9.503	19.486
46	45 tahun	10.276	9.452	19.728
47	46 tahun	10.005	9.448	19.453
48	47 tahun	9.868	9.515	19.383
49	48 tahun	9.285	8.971	18.256
50	49 tahun	8.793	8.935	17.728
51	50 tahun	9.308	9.608	18.916
52	51 tahun	8.377	8.330	16.707
53	52 tahun	8.430	8.756	17.186
54	53 tahun	9.589	9.819	19.408
55	54 tahun	7.716	8.016	15.732
56	55 tahun	8.665	9.129	17.794
57	56 tahun	8.842	9.720	18.562
58	57 tahun	8.080	8.828	16.908

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
59	58 tahun	8.041	8.621	16.662
60	59 tahun	7.334	8.190	15.524
61	60 tahun	8.758	9.791	18.549
62	61 tahun	7.205	8.114	15.319
63	62 tahun	7.458	8.244	15.702
64	63 tahun	7.490	7.730	15.220
65	64 tahun	5.849	6.208	12.057
66	65 tahun	7.572	8.632	16.204
67	66 tahun	6.539	6.717	13.256
68	67 tahun	5.667	6.497	12.164
69	68 tahun	5.221	5.621	10.842
70	69 tahun	5.074	5.654	10.728
71	70 tahun	4.960	5.479	10.439
72	71 tahun	4.966	4.717	9.683
73	72 tahun	3.823	4.138	7.961
74	73 tahun	3.909	3.813	7.722
75	74 tahun	3.113	3.065	6.178
76	75 tahun	3.817	4.384	8.201
77	76 tahun	2.386	2.561	4.947
78	77 tahun	2.280	2.698	4.978
79	78 tahun	1.712	2.157	3.869
80	79 tahun	1.606	1.988	3.594
81	80 tahun	2.067	2.700	4.767
82	81 tahun	1.286	1.512	2.798
83	82 tahun	1.355	1.802	3.157
84	83 tahun	1.628	1.729	3.357
85	84 tahun	888	1.019	1.907
86	85 tahun	1.468	2.127	3.595
87	86 tahun	687	878	1.565
88	87 tahun	750	964	1.714
89	88 tahun	509	682	1.191
90	89 tahun	490	634	1.124
91	90 tahun	522	815	1.337
92	91 tahun	354	399	753
93	92 tahun	324	427	751
94	93 tahun	270	340	610
95	94 tahun	177	194	371
96	95 tahun	319	371	690
97	96 tahun	83	95	178
98	97 tahun	100	89	189
99	98 tahun	65	72	137

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
100	99 tahun	36	45	81
101	100 tahun	40	52	92
102	101 tahun	17	24	41
103	102 tahun	0	0	0
104	103 tahun	3	0	3
105	104 tahun	0	2	2
106	105 tahun	0	1	1
Jumlah		736.988	716.429	1.453.417
Penduduk Usia Produktif				989.731
Penduduk Usia Non Produktif				463.686
Rasio Ketergantungan				46,85

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pembangunan daerah, meskipun tidak secara langsung mencerminkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan angka Pertumbuhan Ekonomi menjadi sinyal membaiknya aktivitas produksi, investasi dan konsumsi di suatu wilayah.

Sepanjang tahun 2021-2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang terus membaik. Pasca Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kebumen terus menguat secara positif dari 3,71 persen pada tahun 2021 menjadi 5,89 persen pada tahun 2025. Secara umum, kinerja pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen, kecuali pada Tahun 2021 dimana realisasi pertumbuhan ekonomi belum mencapai 100 persen.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan lima Kabupaten tetangga yang berbatasan, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen tergolong lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2025 adalah sebesar 5,28 persen hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas yaitu sebesar 5,31 persen. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kebumen perlu terus diikuti dengan upaya penguatan struktur ekonomi yang lebih inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta penurunan tingkat kemiskinan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Tabel 2.16.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2021-2025

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)									
	Kebumen			Nasional	Jateng	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap
	Target RPJMD	Realisasi	Kinerja							
2021	3,91	3,71	94,88%	3,70	3,33	3,31	3,68	3,26	4,00	2,15
2022	4,05-5,36	5,79	100%	5,31	5,31	5,36	5,02	5,29	5,86	5,15
2023	5,00-5,50	5,62	100%	5,05	4,97	5,07	4,30	4,98	5,38	5,32
2024	5,00-5,50	5,38	100%	5,03	4,95	4,84	4,62	5,15	5,35	2,70
2025	5,40-6,30	5,89	100%	5,11	5,37	5,27	5,02	5,26	5,97	3,31
Rata-rata Tahun 2021-2025		5,28	98,98%	4,84	4,79	4,77	4,53	4,79	5,31	3,73

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Perhitungan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK adalah ukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah, yang telah disesuaikan untuk menghilangkan efek inflasi. Dengan kata lain, PDRB ADHK mencerminkan nilai riil dari output ekonomi pada suatu tahun tertentu, menggunakan harga pada tahun dasar yang ditentukan dimana di Indonesia menggunakan tahun dasar 2010. Kinerja PDRB ADHK Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp. 20.253,06 Milyar pada Tahun 2021 menjadi Rp. 25.253,40 Milyar pada Tahun 2025.

Tabel 2.17.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp. Milyar)	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.239,15	4.189,04	4.283,17	4.383,58	4.609,10
B. Pertambangan dan Penggalian	850,88	851,05	842,56	873,08	889,65
C. Industri Pengolahan	4.085,49	4.365,02	4.640,38	4.923,65	5.229,58
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16,35	17,18	17,68	18,23	18,86
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,10	11,21	11,65	12,12	12,33
F. Konstruksi	1.472,57	1.599,21	1.757,34	1.914,33	2.086,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.440,11	3.496,21	3.695,96	3.850,12	4.039,95
H. Transportasi dan Pergudangan	749,64	1.187,86	1.291,94	1.329,63	1.423,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	466,50	598,58	695,28	767,18	857,66
J. Informasi dan Komunikasi	790,00	808,57	888,14	964,89	1.038,29

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp. Milyar)	2021	2022	2023	2024	2025
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	548,32	561,27	569,86	589,26	609,82
L. Real Estate	290,80	310,39	328,66	345,84	350,77
M,N. Jasa Perusahaan	69,00	71,98	76,04	82,31	88,23
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	623,31	631,72	661,27	712,05	729,58
P. Jasa Pendidikan	1.781,44	1.806,02	1.885,60	2.040,25	2.171,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	271,48	276,93	293,52	315,41	335,10
R,S,T,U. Jasa lainnya	546,92	643,54	691,00	725,92	763,64
Produk Domestik Regional Bruto	**20.253,06**	**21.425,79**	**22.630,06**	**23.847,86**	**25.253,40**

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Selain PDRB ADHK, serta dalam memberikan gambaran tentang total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada harga pasar saat ini, yang penting untuk memahami ukuran ekonomi saat ini maka digunakan juga PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). Selain itu, PDRB ADHB juga memberikan indikasi langsung tentang kinerja ekonomi dan daya beli masyarakat pada waktu tertentu. Hal ini penting karena PDRB ADHB nantinya dapat digunakan untuk menghitung pendapatan daerah termasuk pajak, serta untuk merencanakan anggaran pemerintah. Kinerja PDRB ADHB Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp. 29.563,14 Milyar pada tahun 2021 menjadi Rp. 41.520,57 Milyar pada tahun 2025.

Tabel 2.18.
PDRB Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021-2025

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp. Milyar)	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.469,21	6.655,98	7.189,30	7.681,97	8.163,13
B. Pertambangan dan Penggalian	1.454,54	1.500,37	1.532,06	1.587,76	1.640,69
C. Industri Pengolahan	6.299,97	7.101,87	7.954,08	8.770,45	9.407,87
D. Pengadaan Listrik dan Gas	19,67	20,89	21,88	22,62	23,49
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,20	13,55	14,20	15,64	16,57
F. Konstruksi	2.181,32	2.532,43	2.837,83	3.102,26	3.424,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.487,26	4.805,47	5.246,82	5.545,93	5.950,74
H. Transportasi dan Pergudangan	990,51	1.690,48	2.001,80	2.093,21	2.280,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	616,02	831,66	987,96	1.101,10	1.248,94
J. Informasi dan Komunikasi	757,25	775,12	852,80	931,65	1.006,80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	853,34	939,81	973,87	1.018,45	1.077,00
L. Real Estate	349,86	379,19	405,69	428,98	438,84

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Rp. Milyar)	2021	2022	2023	2024	2025
M,N. Jasa Perusahaan	103,71	114,15	125,18	137,99	150,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	910,40	945,35	1.012,43	1.120,40	1.170,94
P. Jasa Pendidikan	2.963,04	3.032,07	3.222,53	3.554,37	3.856,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	392,34	405,49	438,82	483,66	520,44
R,S,T,U. Jasa lainnya	701,50	870,76	963,20	1.032,50	1.143,39
Produk Domestik Regional Bruto	**29.563,14**	**32.614,64**	**35.780,45**	**38.628,96**	**41.520,57**

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan distribusi dan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha pada tahun 2021-2025 seperti tercantum pada tabel di bawah, dapat disimpulkan kondisi struktur ekonomi Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Adanya perubahan kontribusi sektor utama PDRB sejak tahun 2022 dari sebelumnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan digantikan oleh sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun kontribusinya terhadap PDRB dari 21,88% pada tahun 2021 menurun menjadi 19,66% pada Tahun 2025 atau dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2021-2025 sebesar 20,39%. Sebaliknya sektor industri pengolahan semakin meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari 21,31% pada tahun 2021 menjadi 22,66% pada tahun 2025 atau dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2021-2025 sebesar 22,14%.
2. Menguatnya sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2021-2025 sebesar 5,71% untuk sektor industri pengolahan. Hal ini cukup jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2021-2025 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,61%. Walaupun kontribusinya semakin menurun, Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap mendorong pertumbuhan sektor pertanian khususnya pangan, karena Kabupaten Kebumen sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah adalah wilayah lumbung pangan (khususnya padi) dalam rangka mendukung program swasembada pangan di tingkat nasional. Selain itu juga terus mendorong pengembangan sub sektor pertanian yang potensial dan bernilai tinggi seperti kelautan dan perikanan hingga hortikultura serta pengembangan pertanian melalui *corporate farming* dan *integrated farming,* pemanfaatan pekarangan, program petani milenial hingga pembangunan unit usaha pertanian.

3. Subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB adalah industri makanan dan minuman dari 13,56% pada tahun 2021 menjadi 15,75% pada tahun 2025 atau kontribusi rata-rata selama tahun 2021-2025 sebesar 14,79%. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman selama tahun 2021-2025 mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 7,73% dibandingkan subsektor lain di industri pengolahan. Industri makanan dan minuman adalah subsektor produksi dan pengolahan makanan dan minuman dimana di Kabupaten Kebumen pada umumnya didominasi oleh IKM. Hal ini sangat didorong oleh pertumbuhan IKM makanan dan minuman yang juga mendominasi sektor IKM di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga terus mendorong pengembangan IKM (termasuk IKM makanan dan minuman) sebagai bagian pemberdayaan UMKM.
4. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,65% selama tahun 2021-2025. Berdasarkan data, menunjukkan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi lebih dari dua kali lipat dibandingkan subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Hal ini didorong dari meningkatnya aktivitas ekonomi baik di pasar tradisional, pedagang besar hingga eceran maupun toko ritel modern utamanya yang menjual barang kebutuhan pokok hingga sandang.
5. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama tahun 2021-2025 yaitu sebesar 16,04% yang menunjukkan semakin berkembangnya sektor tersebut di wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen dilalui dan dekat dengan akses transportasi nasional bahkan internasional yaitu, jalan nasional, jalur kereta termasuk terdapat beberapa stasiun kereta api, dekat dengan *Yogyakarta International Airport* dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dengan kemudahan konektivitas ini memudahkan angkutan barang maupun orang dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa, Indonesia bahkan secara internasional. Dari data menunjukkan angkutan rel mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama tahun 2021-2025 yaitu sebesar 20,90%. Hal ini dikarenakan semakin populer dan mudahnya akses langsung kereta api dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta,

Malang hingga Surabaya. Arus barang (termasuk jasa ekspedisi) dan orang yang memanfaatkan sarana transportasi kereta api terus meningkat serta ditunjang dengan banyaknya stasiun kereta api yang terlayani oleh KAI, tidak hanya stasiun utama seperti Kebumen dan Gombong, tetapi juga stasiun lain seperti Prembun, Kutowwinangun dan Karanganyar.

6. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama tahun 2021-2025 yaitu sebesar 14,50%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor yang menyangkut layanan yang menyediakan tempat tinggal sementara (hotel, penginapan) dan makanan/minuman untuk konsumen (restoran, tempat makan, katering). Berdasarkan data pertumbuhan sektor ini sangat didorong oleh pertumbuhan subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering) yang mencapai rata-rata selama tahun 2021-2025 sebesar 14,74% dibandingkan subsektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) yang juga tumbuh selama tahun 2021-2025 sebesar 7,12%. Hal ini didorong oleh menjamurnya tempat makan dari restoran hingga warung sederhana di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kebumen termasuk pengembangan kawasan kuliner di alun-alun dan kawasan koridor kota Kebumen.

Tabel 2.19.
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan		**21,88**	**20,41**	**20,09**	**19,89**	**19,66**	**20,39**	**4,52**	**-1,18**	**2,25**	**2,34**	**5,14**	**2,61**
Pertambangan dan Penggalian		**4,92**	**4,6**	**4,28**	**4,11**	**3,95**	**4,37**	**0,96**	**0,02**	**-1,00**	**3,62**	**1,90**	**1,10**
Industri Pengolahan		**21,31**	**21,78**	**22,23**	**22,7**	**22,66**	**22,14**	**3,07**	**6,84**	**6,31**	**6,10**	**6,21**	**5,71**
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Industri Makanan dan Minuman	13,56	14,2	14,86	15,58	15,75	14,79	5,03	9,07	7,94	8,23	8,38	7,73

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025
3	Pengolahan Tembakau	2,58	2,52	2,45	2,38	2,25	2,44	-7,91	1,89	3,34	2,27	0,22	-0,04
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,4	0,38	0,37	0,37	0,34	0,37	3,98	2,67	4,42	3,80	-0,11	2,95
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0,78	0,77	0,74	0,72	0,71	0,74	3,20	5,89	2,47	2,68	4,04	3,66
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,87	1,79	1,71	1,6	1,58	1,71	1,24	1,47	1,39	-0,85	1,64	0,98
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	-2,20	6,32	0,59	0,12	5,86	2,14
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,22	0,22	0,22	0,21	0,2	0,21	8,76	5,39	4,58	0,79	2,17	4,34
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	2,26	3,39	4,83	4,49	2,53	3,50
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1,56	1,55	1,54	1,52	1,49	1,53	6,16	4,45	5,24	3,86	2,96	4,53
11	Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	1,20	1,16	-2,48	-1,05	4,19	0,61

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0,01	0	0	0	0	0,002	-4,34	1,23	-3,53	0,96	0,80	-0,98
14	Industri Alat Angkutan	0	0	0	0	0	0,00	1,14	0,08	-4,11	-0,84	-3,32	-1,41
15	Industri Furnitur	0,1	0,09	0,09	0,08	0,08	0,09	2,35	0,75	1,39	-0,11	0,28	0,93
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04	5,24	1,23	6,95	-0,39	4,75	3,55
Pengadaan Listrik dan Gas		**0,07**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**0,06**	**4,60**	**5,10**	**2,91**	**3,10**	**3,42**	**3,83**
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang		**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**0,04**	**1,20**	**0,99**	**3,89**	**4,04**	**1,74**	**2,37**
Konstruksi		**7,38**	**7,76**	**7,93**	**8,03**	**8,25**	**7,87**	**6,25**	**8,60**	**9,89**	**8,93**	**8,98**	**8,53**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		**15,18**	**14,73**	**14,66**	**14,36**	**14,33**	**14,65**	**6,26**	**1,63**	**5,71**	**4,17**	**4,93**	**4,54**
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4,60	4,17	4,01	3,80	3,69	4,05	14,34	-2,82	2,23	0,46	0,62	2,97
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	10,58	10,56	10,66	10,56	10,64	10,60	3,85	3,09	6,79	5,27	6,15	5,03
Transportasi dan Pergudangan		**3,35**	**5,18**	**5,59**	**5,42**	**5,49**	**5,01**	**3,03**	**58,46**	**8,76**	**2,92**	**7,03**	**16,04**
1	Angkutan Rel	0,07	0,12	0,13	0,14	0,13	0,12	-4,36	81,76	10,91	8,47	7,72	20,90
2	Angkutan Darat	3,24	5,00	5,40	5,22	5,30	4,83	3,15	58,16	8,73	2,83	7,03	15,98
3	Angkutan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian		DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)						LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	RATA-RATA 2021-2025
5	Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0,04	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	2,38	58,26	8,76	2,82	5,45	15,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		**2,08**	**2,55**	**2,76**	**2,85**	**3,01**	**2,65**	**5,90**	**28,31**	**16,16**	**10,34**	**11,79**	**14,50**
1	Penyediaan Akomodasi	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,65	26,33	13,46	-3,39	-1,46	7,12
2	Penyediaan Makan Minum	2,00	2,45	2,66	2,76	2,92	2,56	6,10	28,38	16,25	10,81	12,18	14,74
Informasi dan Komunikasi		**2,56**	**2,38**	**2,38**	**2,41**	**2,42**	**2,43**	**6,02**	**2,35**	**9,84**	**8,64**	**7,61**	**6,89**
Jasa Keuangan dan Asuransi		**2,89**	**2,88**	**2,72**	**2,64**	**2,59**	**2,74**	**1,76**	**2,36**	**1,53**	**3,40**	**3,49**	**2,51**
Real Estate		**1,18**	**1,16**	**1,13**	**1,11**	**1,06**	**1,13**	**1,44**	**6,74**	**5,88**	**5,23**	**1,43**	**4,14**
Jasa Perusahaan		**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,36**	**0,36**	**0,35**	**2,32**	**4,32**	**5,64**	**8,25**	**7,19**	**5,54**
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		**3,08**	**2,90**	**2,83**	**2,90**	**2,82**	**2,91**	**1,52**	**1,35**	**4,68**	**7,68**	**2,46**	**3,54**
Jasa Pendidikan		**10,02**	**9,30**	**9,01**	**9,20**	**9,29**	**9,36**	**0,05**	**1,38**	**4,41**	**8,20**	**6,43**	**4,10**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		**1,33**	**1,24**	**1,23**	**1,25**	**1,25**	**1,26**	**0,23**	**2,01**	**5,99**	**7,46**	**6,24**	**4,39**
Jasa lainnya		**2,37**	**2,67**	**2,69**	**2,67**	**2,75**	**2,63**	**0,59**	**17,67**	**7,37**	**5,05**	**5,20**	**7,18**

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025.

c. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata kemampuan ekonomi penduduk di suatu daerah, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan maupun daya beli riil masyarakat. Seperti halnya PDRB, semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat sehingga standar hidup akan lebih baik. Kinerja PDRB ADHB per kapita Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 terus meningkat dari Rp 21,693 Juta pada tahun 2021 menjadi Rp 28,999 Juta pada tahun 2025. Akan tetapi, secara umum PDRB ADHB per kapita Kabupaten Kebumen masih lebih rendah baik dibandingkan Kabupaten yang berbatasan maupun dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hanya lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo mulai tahun 2024. Namun

demikian, jika dihitung tingkat pertumbuhan selama periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kebumen sebesar 33,68 persen hanya dibawah Nasional dan Kabupaten Banyumas. Dengan terus memacu pertumbuhan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Kebumen akan terus meningkat mengejar ketertinggalan dari daerah lain sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.20.
PDRB Per Kapita Kabupaten Kebumen, Nasional, Jawa Tengah dan Beberapa Kabupaten Tetangga Tahun 2021-2025

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp.Ribu)							
	Kebumen	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2021	21.693,63	25.311,17	22.376,85	22.255,74	31.789,31	55.740,47	38.568,08	62.259,10
2022	23.630,24	27.325,56	24.022,59	24.113,96	34.711,34	60.883,41	41.934,46	71.044,78
2023	25.602,18	29.416,09	25.645,97	25.971,56	37.609,28	65.976,43	45.162,08	74.964,47
2024	27.304,37	31.223,66	27.206,30	27.685,19	40.236,27	67.202,92	47.970,48	78.617,51
2025	28.999,32	33.035,49	28.721,26	29.366,18	42.783,92	69.735,67	50.823,64	83.747,73
Pertumbuhan Tahun 2021-2025	33,68%	30,52%	28,35%	31,95%	34,59%	25,11%	31,78%	34,51%

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

d. Laju Perubahan Tingkat Harga

Untuk mengukur laju perubahan (kenaikan/penurunan) tingkat harga sekelompok barang dan jasa secara umum menggunakan laju inflasi. Kabupaten Kebumen bukan merupakan wilayah yang terpilih sample SBH (Survei Biaya Hidup), maka dalam perhitungan IHK (Indeks Harga Konsumen) menggunakan diagram timbang Kota SBH yang memiliki pola konsumsi yang hampir sama dan letak geografis yang berdekatan yaitu Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Berdasarkan data inflasi yang dikeluarkan oleh BPS, menunjukkan adanya kenaikan inflasi yang sangat signifikan pada tahun 2022 yang merupakan fenomena global. Tingkat inflasi di kota Purwokerto dan Cilacap serta di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung terus melandai dan dapat terkendali hingga mencapai di bawah 2% pada tahun 2024 namun meningkat menjadi lebih dari 2% pada tahun 2025. Meskipun masih sesuai dengan *targeting inflation* tingkat nasional yang dikeluarkan Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan adalah pada *range* 3±1% setiap tahun. Pada tingkat ini, inflasi yang moderat, rendah dan terkendali diharapkan dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan ketidakstabilan harga. Beberapa alasan mengapa inflasi diharapkan moderat, rendah dan terkendali dianggap baik yaitu:

1. Inflasi yang moderat dapat mendorong konsumsi dan investasi, karena konsumen cenderung membeli sekarang daripada menunggu harga naik lebih tinggi;

2. Inflasi yang rendah membantu mencegah deflasi, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan dan perlambatan ekonomi; serta
3. Inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi pelaku bisnis dalam merencanakan harga dan biaya.

Namun, penting untuk diingat bahwa inflasi yang terlalu tinggi dapat merugikan daya beli masyarakat dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, menjaga inflasi dalam rentang yang stabil adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.21.
Inflasi Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Inflasi (%)			
	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2021	2,18	1,88	1,70	1,87
2022	6,49	6,81	5,63	5,51
2023	2,61	2,69	2,89	2,61
2024	1,51	1,82	1,67	1,57
2025	2,61	2,79	2,72	2,92

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Alat ukur lain yang dapat menggambarkan laju perubahan harga adalah laju indeks harga implisit PDRB atau juga disebut deflator PDRB. Indeks ini menghitung perbandingan antara nilai nominal PDRB (yang dihitung berdasarkan harga saat ini) dan nilai riil PDRB (yang dihitung berdasarkan harga konstan). Indeks ini membantu dalam memahami tingkat inflasi dalam perekonomian serta memberikan informasi tentang kinerja ekonomi dan perubahan daya beli masyarakat. Berbeda dengan perhitungan inflasi secara umum yang biasanya menggunakan IHK dan IHP (Indeks Harga Produsen), sebagai perbandingan perhitungan inflasi secara deflator ini menunjukkan perubahan harga seluruh sektor PDRB mencakup semua barang dan jasa dalam perekonomian baik harga bahan baku, produk setengah jadi, produk akhir, dan layanan/jasa.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2023 memiliki pola serta *range* yang sama dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Sementara pada tahun 2024 laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Kebumen mendekati Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Banyumas sebagai *sister city* inflasi bagi Kebumen. Namun pada tahun 2025, laju indeks harga implisit PDRB Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas maupun Kabupaten Cilacap. Hal ini menunjukkan secara umum terjadi laju peningkatan harga secara umum di Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Banyumas, namun masih lebih rendah dibandingkan Nasional.

Tabel 2.22.
Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Kebumen, Banyumas, Cilacap, Jawa Tengah dan Laju Indeks Harga Implisit PDB Nasional Tahun 2021-2025

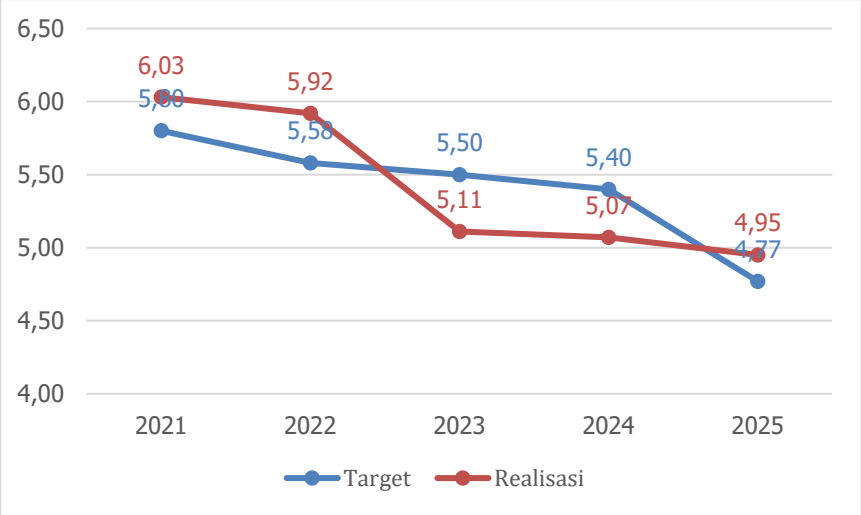
Tahun	Laju Indeks Harga Implisit PDRB/PDB (%)				
	Kebumen	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
2021	1,75	1,95	2,68	1,99	6,00
2022	4,28	4,26	4,96	4,31	9,57
2023	3,87	3,89	3,93	3,64	1,53
2024	2,45	2,58	0,15	2,15	0,89
2025	1,50	1,33	1,38	1,45	2,37

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Kabupaten Kebumen selama ini terus berupaya mengendalikan perubahan tingkat harga, utamanya di tingkat konsumen dengan menggelar Gerakan Pangan Murah. Gerakan Pangan Murah ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan pokok dan strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Adapun bentuk dari kegiatan ini berupa bazar yang menyajikan produk kebutuhan pokok. Gerakan Pangan Murah tidak hanya diikuti oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang mengampu urusan terkait ketahanan pangan, melainkan diikuti pula oleh Bulog, BUMD, Baznas serta stakeholder lain yang digandeng Pemerintah Kabupaten Kebumen.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

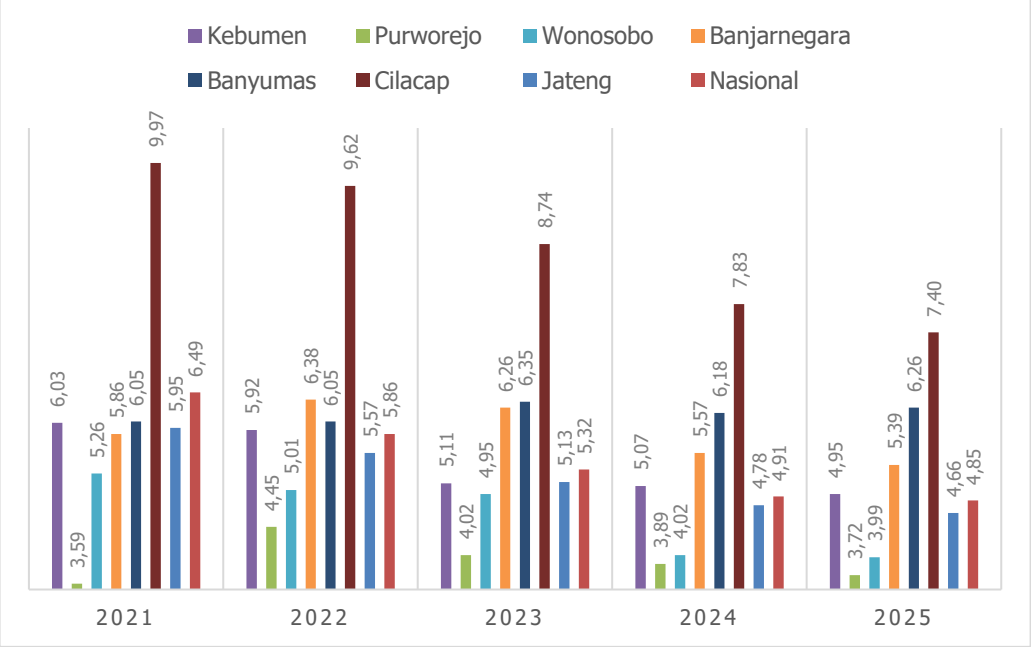
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Kebumen dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Secara umum, semakin rendah persentase TPT, maka semakin baik kondisi perekonomian suatu wilayah. Kinerja TPT Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 terus membaik dari 6,03% pada tahun 2021 menjadi 4,95% pada tahun 2025. Tingkat ketercapaian dibandingkan target yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen menunjukkan mendekati 100% setiap tahunnya bahkan mencapai 100% pada tahun 2023-2024.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar 2.10.
Perbandingan TPT dengan Target Daerah RKPD Tahun 2021-2025

Jika dibandingkan dengan Kabupaten yang berbatasan, TPT Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purworejo dan Wonosobo yang telah mencapai di bawah 4% yang artinya tingkat penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, namun demikian masih lebih baik dibandingkan kabupaten tetangga yang lainnya. Selain itu, TPT Kabupaten Kebumen juga masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar 2.11.
Perbandingan TPT Kebumen dengan Kabupaten Sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

Membaiknya pertumbuhan ekonomi dan tingkat perubahan harga yang moderat sepertinya cukup mampu mengurangi TPT di Kabupaten Kebumen. Namun demikian, dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen harus terus dilakukan kolaborasi semua *stakeholder* utamanya Perangkat Daerah terkait, Balai Latihan Kerja hingga Lembaga Pelatihan Kerja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan UMK/IKM yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja termasuk di luar negeri.

Tabel 2.23.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2025

Tingkat Pengangguran Terbuka		2021	2022	2023	2024	2025
Kebumen	Target RPJMD (%)	5,80	5,51-5,58	5,40-5,50	5,30-5,40	4,77
	Realisasi (%)	6,03	5,92	5,11	5,07	4,95
	Kinerja (%)	96,19	94,26	100	100	96,36
Purworejo		3,59	4,45	4,02	3,89	3,72
Wonosobo		5,26	5,01	4,95	4,02	3,99
Banjarnegara		5,86	6,38	6,26	5,57	5,39
Banyumas		6,05	6,05	6,35	6,18	6,26
Cilacap		9,97	9,62	8,74	7,83	7,40
Jawa Tengah		5,95	5,57	5,13	4,78	4,66
Nasional		6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2025

f. Ketimpangan

Ketimpangan secara umum diukur menggunakan rasio gini yaitu sebuah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna merata (semua orang memiliki pendapatan yang sama) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang ekstrem (semua pendapatan berada di tangan satu orang). Secara umum rasio gini kurang dari 0,3 dianggap ketimpangan rendah, rasio gini 0,3 hingga 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 dianggap ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data BPS, rasio gini Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 0,35 pada Tahun 2021 menjadi 0,327 pada Tahun 2024

yang menunjukkan ketimpangan semakin mengecil. Jika dibandingkan dengan rasio gini di Kabupaten yang berbatasan, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional menunjukkan rasio gini Kabupaten Kebumen lebih rendah yang menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen lebih rendah. Dengan rasio gini di sekitar 0,3 menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen masuk dalam kategori sedang. Sementara itu pada Tahun 2025, rasio gini Kabupaten Kebumen meningkat kembali menjadi 0,340 yang menunjukkan terjadi peningkatan ketimpangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penurunan P0 dan P1 dimana kondisi ini dapat dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen sebenarnya sudah menunjukkan arah positif di mana angka kemiskinan berhasil diturunkan serta kesenjangan di antara penduduk miskin pun semakin kecil dan ada pergerakan penduduk miskin ke arah positif dengan semakin mendekati Garis Kemiskinan. Namun demikian, di satu sisi pergerakan penduduk ke arah positif ini ternyata kemungkinan terjadi juga di level penduduk menengah sampai level penduduk atas di mana pergerakan penduduk menengah ke atas kecepatannya lebih tinggi dibandingkan pergerakan penduduk miskin, dalam artian yang kaya semakin kaya. Fenomena ini diduga mengakibatkan ada peningkatan angka rasio gini pada tahun 2025. Hal ini dikuatkan dengan semakin menjamurnya bisnis yang bertaburan di wilayah Kebumen yang dimiliki kelompok menengah atas, dari berdirinya *cafe shop* baru, klinik kecantikan, menggeliatnya usaha di sektor jasa dan UMKM sampai meningkatnya para konten kreator sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pun tumbuh ke arah yang positif. Namun demikian jika dibandingkan angka nasional dan Jawa Tengah, rasio gini Kebumen masih lebih rendah dan masih di bawah 0,350 yang menunjukkan tingkat ketimpangannya secara umum masih rendah. Sementara itu rasio gini kabupaten sekitar pada Tahun 2025 belum didapatkan hingga dokumen ini disusun.

Tabel 2.24.
Rasio Gini Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Rasio Gini							
	Kebumen	Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jawa Tengah	Nasional
2021	0,35	0,337	0,384	0,365	0,364	0,34	0,372	0,38
2022	0,354	0,353	0,363	0,365	0,353	0,356	0,374	0,38
2023	0,333	0,337	0,356	0,376	0,397	0,364	0,369	0,39
2024	0,327	0,354	0,334	0,357	0,385	0,355	0,367	0,38
2025	0,340	0,298	0,375	0,357	0,358	0,352	0,359	0,363

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2025

BPS sendiri belum menjamin setiap tahun akan merilis data rasio gini hingga tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, untuk mengukur ketimpangan juga dapat menggunakan indikator distibusi pengeluaran

berdasarkan kriteria Bank Dunia yang membagi 3 kelompok masyarakat yaitu 20% masyarakat dengan pendapatan teratas, 40% masyarakat dengan pendapatan menengah dan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah. Ketimpangan sendiri dalam indikator distibusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia diukur berdasarkan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah hanya memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan tinggi;
2. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah memperoleh pendapatan antara 12% hingga kurang dari 17% dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan sedang; serta
3. Jika 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dapat memperoleh pendapatan sebesar 17% atau lebih dari total pendapatan, maka masuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2.25.
Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk Kabupaten Kebumen, Beberapa Kabupaten Tetangga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia untuk 40% Pendapatan Terendah (%)									
	Kebumen			Purworejo	Wonosobo	Banjarnegara	Banyumas	Cilacap	Jateng	Nasional
	Target	Realisasi	Kinerja							
2021	20,45	19,30	94,38	20,24	17,61	18,19	18,85	20,31	18,34	17,76
2022	20,50-21,00	19,86	96,88	20,10	18,61	18,74	19,33	19,39	18,51	18,06
2023	21,00	20,38	97,05	20,76	19,35	18,48	17,32	19,27	18,74	18,04
2024	21,00-21,50	20,76	98,86	19,71	20,35	18,93	18,65	19,38	18,90	18,40
2025	20,80	20,47	98,41	15,87	DATA BELUM TERSEDIA	DATA BELUM TERSEDIA	21,93	19,67	20,02	19,28

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan data distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia yang merupakan hasil Susenas BPS menunjukkan ketimpangan di Kabupaten Kebumen selama tahun 2020-2025 cenderung membaik dari 19,30% pada tahun 2021 menjadi 20,47% pada tahun 2025. Kecenderungan fluktuatif ini sangat dipengaruhi oleh indikator makro lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat harga maupun TPT. Hal ini dikarenakan masyarakat terbawah cenderung mendapatkan penghasilannya tidak tetap atau bersifat harian dan akan dihabiskan untuk membiayai pengeluaran pada saat itu juga sehingga akan sangat dipengaruhi utamanya oleh perubahan tingkat harga yang berfluktuatif setiap hari.

Jika dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kebumen menunjukkan realisasi kinerja masih sedikit dibawah 100% serta secara umum ketimpangan di Kabupaten Kebumen hanya

kalah dari Kabupaten Banyumas. Dengan 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah dapat memperoleh pendapatan sebesar 17% atau lebih dari total pendapatan baik di Kabupaten Kebumen dan wilayah lain yang terdapat dalam tabel, menunjukkan masih masuk dalam kategori ketimpangan rendah, kecuali Purworejo yang sudah masuk pada ketimpangan sedang pada Tahun 2025.

g. Kemiskinan

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan berkualitas sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, melakukan perbandingan kondisi kemiskinan antarwaktu dan antarwilayah, serta menetapkan sasaran penduduk miskin secara tepat guna memperbaiki taraf hidup mereka. Secara umum, tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh berbagai indikator makro lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB dan PDRB per kapita, tingkat inflasi maupun TPT.

Tabel 2.26.
Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Profil Kemiskinan		2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan	Target pada RPJMD (%)	16,85	16,00-17,00	15,00-16,00	14,00-15,00	13,50-14,00
	Realisasi (%)	17,83	16,41	16,34	15,71	13,58
	Kinerja (%)	94,50	100,00	97,92	95,48	100,00
Jumlah Penduduk Miskin		212.900	196.160	195.450	187.950	162.540
Garis Kemiskinan		390.599	416.004	451.678	471.824	502.841
Kenaikan Garis Kemiskinan (%)		2,64	6,50	8,58	4,46	6,57
Inflasi (deflator) (%)		1,75	4,28	3,78	2,52	1,50
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		3,24	3,41	2,89	2,35	1,95
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		0,88	1,02	0,75	0,48	0,40
Angka Kemiskinan Ekstrem		4,42	5,51	2,49	0,63	0,30

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang semakin membaik. Tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan menjadi 17,83% pada tahun 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan pemulihan perekonomian daerah, tingkat kemiskinan kembali menurun secara konsisten hingga mencapai 13,58% pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen secara bertahap. Capaian tersebut didukung sejumlah faktor strategis di antaranya pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan dan intervensi langsung dari Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen, dukungan regulasi berupa Perbup nomor 22 Tahun

2025 untuk mengoptimalkan ketepatan sasaran bantuan penduduk miskin di Kebumen, dan pengoptimalan upaya digitalisasi, penarikan investor, dan optimalisasi sumber dana untuk mendorong roda perekonomian setempat. Kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana Kabupaten Kebumen berhasil menggeser posisinya dari status kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah menjadi peringkat kedua dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 2,13%. Pada tahun 2025, capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.

Di sisi lain, garis kemiskinan yang semakin meningkat masih menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan peningkatan dari Rp 390.599,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 502.841,00 pada tahun 2025. Kenaikan ini tidak terlepas dari meningkatnya harga kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian harga menjadi salah satu upaya strategis yang perlu dilakukan untuk menahan laju peningkatan garis kemiskinan. Kondisi ini tercermin dari pengaruh inflasi, yang diukur melalui deflator, terhadap kenaikan garis kemiskinan pada tahun berikutnya. Sebagai contoh seperti yang tercantum dalam tabel, lonjakan inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,28% berkontribusi terhadap kenaikan garis kemiskinan tertinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 8,58%.

Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan dari semula 4,42% pada tahun 2021 menjadi 0,30% pada tahun 2025. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2025 cukup fluktuatif. Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai P1 dan P2 dari tahun 2021 ke 2022, terutama dipengaruhi oleh tingginya inflasi pada tahun tersebut. Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah pascapandemi serta semakin terkendalinya inflasi, kinerja P1 dan P2 menunjukan perbaikan pada tahun 2023-2025. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sementara penurunan P2 mencerminkan semakin menurunnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten yang berbatasan, tingkat Provinsi Jawa Tengah, maupun nasional selama periode 2021-2025, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan yang relatif lebih baik. Pola fluktuasi tingkat kemiskinan secara umum serupa, yakni mengalami peningkatan pada tahun 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kabupaten Kebumen terus berupaya melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, terutama melalui pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, tepat lokasi, dan tepat waktu. Keberhasilan upaya tersebut tercermin dari capaian kinerja

penurunan tingkat kemiskinan tertinggi se-Pulau Jawa pada tahun 2025 sebesar 2,13%.

Tabel 2.27.
Perbandingan Kinerja Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian	% Penduduk Miskin					% Kinerja Penurunan 2021-2025	% Kinerja Penurunan 2024-2025
	2021	2022	2023	2024	2025		
Kebumen	17,83	16,41	16,34	15,71	13,58	4,25	2,13
Purworejo	12,4	11,53	11,33	10,87	10,06	2,34	0,81
Wonosobo	17,67	16,17	15,58	15,28	13,34	4,33	1,94
Banjarnegara	16,23	15,2	14,9	14,71	13,28	2,95	1,43
Banyumas	13,66	12,84	12,53	11,95	11,15	2,51	0,8
Cilacap	11,67	11,02	10,99	10,68	9,41	2,26	1,27
Jawa Tengah	11,79	10,93	10,77	10,47	9,48	2,31	0,99
Nasional	10,14	9,54	9,36	9,03	8,47	1,67	0,56

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Tabel 2.28.
Perbandingan Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Kinerja Kenaikan 2024-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
Kebumen	Target dalam RPJMD	70	70,57	71	71,5	72,88	
	Realisasi	70,56	71,29	71,88	72,48	73,17	0,69

Uraian		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Kinerja Kenaikan 2024-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Kinerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	10,000	
Purworejo		73,06	73,67	74,35	75,16	75,93	0,77
Wonosobo		69,24	69,69	70,18	70,63	71,5	0,87
Banjarnegara		67,87	68,62	69,16	69,62	70,61	0,99
Banyumas		72,59	73,3	73,96	74,52	75,44	0,92
Cilacap		70,66	71,22	72,04	72,55	73,45	0,9
Jawa Tengah		72,17	72,8	73,39	73,87	74,77	0,9
Nasional		73,16	73,77	74,39	75,02	75,9	0,88

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Capaian IPM Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2021 telah mencapai lebih dari 70, yaitu sebesar 70,56, mengalami peningkatan menjadi 73,17 pada Tahun 2025. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM≥80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Dengan demikian sejak Tahun 2021, kualitas pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh indikator IPM Kabupaten Kebumen masuk kategori tinggi. Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebih target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional menunjukkan IPM Kabupaten Kebumen hanya lebih baik dari Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Sedangkan, kinerja selama Tahun 2024-2025 yang mencapai kenaikan IPM sebesar 0,69 menunjukkan masih kalah cepat dari kinerja Kabupaten tetangga, Jawa tengah dan Nasional. Peningkatan IPM Kabupaten Kebumen sangat dipengaruhi oleh peningkatan komponen pembentuknya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH) dan Pengeluaran Perkapita, sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah

   Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya pendidikan formal (dalam tahun) yang akan ditempuh oleh anak usia 7 tahun, dengan asumsi mengikuti pola partisipasi sekolah pada saat ini. HLS digunakan untuk mengukur akses dan peluang penduduk dalam memperoleh layanan pendidikan pada berbagai jenjang. Semakin tinggi angka HLS, semakin besar peluang anak untuk menempuh pendidikan yang lebih panjang, sehingga indikator ini dapat menjadi gambaran awal mengenai pemerataan akses pendidikan di suatu wilayah.

Tabel 2.29.
Perbandingan Kinerja Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian		Harapan Lama Sekolah (HLS dalam Tahun)					Kinerja Kenaikan 2024-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
Kebumen	Target dalam RPJMD	13,44	13,54	13,64	13,74	13,86	
	Realisasi	13,35	13,36	13,37	13,39	13,42	0,03
	Kinerja (%)	99,33	98,67	98,02	97,45	96,83	
Purworejo		13,51	13,52	13,53	13,55	13,58	0,03
Wonosobo		11,76	11,78	11,8	11,81	12,05	0,24
Banjarnegara		11,63	11,81	11,82	11,83	12,04	0,21
Banyumas		13,03	13,21	13,26	13,34	13,53	0,19
Cilacap		12,63	12,66	12,67	12,69	12,70	0,01
Jawa Tengah		12,77	12,81	12,85	12,86	13,05	0,19
Nasional		13,08	13,1	13,15	13,21	13,30	0,09

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Sesuai data BPS, kinerja HLS Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 13,35 tahun pada Tahun 2021 menjadi 13,42 tahun pada tahun 2025. Hal ini dapat diartikan bahwa anak berusia 7 tahun atau lebih saat ini berpeluang dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari 1 tahun kuliah (atau dapat mengenyam pendidikan hingga lebih dari diploma 1). Walaupun demikian kinerja HLS ini masih sedikit dibawah target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan HLS Kabupaten Kebumen hanya lebih rendah dari Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Sedangkan peningkatan kinerja selama Tahun 2024-2025 sebesar 0,03% menunjukkan perlambatan dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas dan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Cukup tingginya HLS di Kabupaten Kebumen dikarenakan wilayahnya yang dekat dengan kota-kota yang memiliki perguruan tinggi bereputasi baik seperti Yogyakarta, Surakarta dan Purwokerto. Secara umum banyak warga Kabupaten Kebumen yang melanjutkan kuliah di kota-kota tersebut. Selain itu, semakin berkembang kehadiran perguruan tinggi di Kabupaten Kebumen termasuk Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang memiliki kampus Pendidikan Guru

Sekolah Dasar (PGSD). Selain itu mulai tahun 2024, UNS juga membuka program studi reguler diluar PGSD.

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan program beasiswa bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi, antara lain di Universitas Terbuka, Universitas Pertamina dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Pemberian beasiswa tersebut diharapkan dapat memperkuat kompetensi akademik dan profesionalisme generasi muda, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Kebumen dalam menghadapi dinamika pasar kerja dan perkembangan dunia usaha. Dalam jangka panjang, kebijakan ini juga menjadi instrumen penting dalam pemanfaatan bonus demografi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Rata-rata lama sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan masyarakat secara kumulatif. Dalam perhitungannya, lama pendidikan disesuaikan dengan jenjang yang ditamatkan, yaitu 6 tahun untuk tamat Sekolah Dasar (SD), 9 tahun untuk tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 12 tahun untuk tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), tanpa memperhitungkan kemungkinan tinggal kelas.

Semakin tinggi nilai RLS, semakin baik capaian pendidikan penduduk di wilayah tersebut, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 2.30.
Perbandingan Kinerja Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian		Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					Kinerja Kenaikan 2024-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
Kebumen	Target dalam RPJMD	7,64	7,74	7,84	7,94	7,89	
	Realisasi	7,55	7,85	7,86	7,87	7,89	0,02
	Kinerja (%)	98,82	100,00	100,00	99,12	100,00	
Purworejo		8,21	8,32	8,46	8,65	8,74	0,09
Wonosobo		6,82	6,88	6,89	6,90	6,91	0,01
Banjarnegara		6,75	6,84	6,86	6,87	7,10	0,23

Uraian	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					Kinerja Kenaikan 2024-2025
	2021	2022	2023	2024	2025	
Banyumas	7,63	7,78	7,87	7,91	8,10	0,19
Cilacap	7,09	7,18	7,39	7,40	7,65	0,01
Jawa Tengah	7,75	7,93	8,01	8,02	8,15	0,13
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07	0,22

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan dari 7,55 pada tahun 2021 menjadi 7,89 pada tahun 2025. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,89 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Sementara itu, mendasari target RLS pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 menunjukkan pada tahun 2021 dan 2024 sedikit di bawah target sedangkan pada tahun 2022-2023 telah melebihi target dan pada tahun 2025 mencapai target sebesar 7,89.

Jika dibandingkan dengan kabupaten yang berbatasan langsung, capaian RLS Kabupaten Kebumen masih berada di bawah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas, serta lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selama periode tahun 2024–2025, peningkatan RLS Kabupaten Kebumen tercatat sebesar 0,02 tahun. Kenaikan tersebut relatif lebih lambat dibandingkan peningkatan yang terjadi di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Jawa tengah maupun pada tingkat Nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa percepatan peningkatan capaian pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, masih perlu menjadi perhatian dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kebumen.

Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2021-2025. Faktor penghambat kinerja RLS di Kabupaten Kebumen selain kondisi sosial dan ekonomi beberapa kelompok masyarakat, adalah masih rendahnya RLS pada penduduk usia tua ataupun lanjut usia dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan program Kejar Paket A, B maupun C. Selain itu peningkatan kemudahan akses pelayanan pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu serta penanganan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) juga terus ditingkatkan.

3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan harapan hidup saat lahir. Harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu negara. UHH merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam perhitungan IPM. Kinerja UHH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 74,73 tahun pada tahun 2021 menjadi 75,56 tahun pada tahun 2025. Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebih target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Semakin meningkatnya UHH di Kabupaten Kebumen mengindikasikan bahwa derajat Kesehatan masyarakat di Kabupaten Kebumen semakin membaik.

Tabel 2.31.
Perbandingan Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian		Usia Harapan Hidup (Tahun)					Kinerja Kenaikan 2024-2025
		2021	2022	2023	2024	2025	
Kebumen	Target dalam RPJMD	73,5	73,6	73,7	73,8	75,52	
	Realisasi	74,73	74,85	74,98	75,22	75,56	0,34
	Kinerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Purworejo		75,05	75,2	75,37	75,64	76,06	0,42
Wonosobo		73,82	73,89	74,01	74,25	74,56	0,31
Banjarnegara		74,31	74,4	74,5	74,7	74,86	0,16
Banyumas		74,13	74,16	74,2	74,34	74,79	0,45
Cilacap		74,45	74,59	74,73	74,97	75,3	0,33
Jawa Tengah		74,49	74,58	74,69	74,91	75,24	0,33
Nasional		73,46	73,7	73,93	74,15	74,47	0,32

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten sekitar, menunjukkan UHH Kabupaten Kebumen hanya lebih rendah dari Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Banyumas serta lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Peningkatan kinerja selama Tahun 2024-2025 sebesar 0,34. Cukup tingginya UHH di Kabupaten Kebumen menunjukkan sudah cukup baiknya kualitas akses dan pelayanan kesehatan serta ketahanan pangan. Namun demikian kemudahan dan peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan terus dilakukan diantaranya dengan cakupan coverage Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kebumen yang semakin mendekati 100%. Selain itu juga terus dilakukan peningkatan ketahanan pangan serta perbaikan gizi masyarakat

dantaranya dengan program pemberian makanan tambahan untuk anak-anak hingga lanjut usia, serta bagi ibu hamil dan balita sebagai bagian upaya penanganan *stunting.*

b. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi masing-masing anggota rumah tangga (individu) selama setahun yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (tingkat harga/inflasi dan besarnya standar biaya hidup di masing-masing wilayah/daerah). Pengeluaran per kapita menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya. Semakin tinggi pengeluaran per kapita berarti semakin tinggi kemampuan daya belinya sehingga semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi pengeluaran per kapita masing-masing individu di suatu daerah juga menunjukkan semakin kuatnya perekonomian di daerah tersebut.

Tabel 2.32.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun) Kabupaten Kebumen, Puroworejo, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025

Uraian	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rupiah/Orang/Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kebumen	9.028	9.282	9.734	10.176	10.658
Purworejo	10.275	10.671	11.110	11.584	12.085
Wonosobo	10.760	11.108	11.577	11.980	12.552
Banjarnegara	9.407	9.776	10.226	10.595	10.992
Banyumas	11.546	11.905	12.492	12.960	13.301
Cilacap	10.534	10.904	11.432	11.868	12.371
Jawa Tengah	11.034	11.377	11.835	12.276	12.746
Nasional	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp 9.028.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 10.658.000,00 pada tahun 2025. Meskipun secara konsisten mengalami peningkatan, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Seperti halnya RLS, pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di

Kabupaten Kebumen selama kurun waktu tahun 2021-2025. Hal ini terlihat dalam tabel, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen adalah yang terendah dibandingkan wilayah sekitar termasuk dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan per kapita masyarakat untuk terus ditingkatkan dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan agar meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian harga juga terus di lakukan agar kemampuan daya beli masyarakat lebih meningkat selanjutnya pengeluaran per kapita dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni, budaya dan olahraga menjadi salah satu aspek dalam mewujudkan arah pembangunan ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 yaitu pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter. Pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter dalam ketahanan sosial budaya diwujudkan dalam proses pembangunan Kabupaten Kebumen di tengah modernisasi dan globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir, perilaku, identitas, dan karakter masyarakat. Pembangunan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter dalam ketahanan sosial budaya untuk mencegah berbagai dampak negatif akibat pengaruh global.

Tabel 2.33.
Profil Fokus Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)		3,60	4,50	5,80	7,64	22,89
Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)		51.150	51.700	52.300	53.000	53.850
Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)		11,00	12,85	13,91	17,32	21,23
Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)		Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	63,57	64,07	90,66
Indeks Kesalehan	Target dalam RPJMD	75,70	76,00-76,50	77,00-77,50	78,00-78,50	79,00-79,50

URAIAN		2021	2022	2023	2024	2025
Sosial (Angka)	Realisasi	75,70	80,36	82,16	82,38	82,64
	Kinerja (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prestasi Olah Raga (Jumlah perolehan medali pada even olahraga nasional dan internasional)		0	17	15	44	84

Sumber: Disparbud, Setda serta Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter diantaranya dinilai dari kinerja bidang kebudayaan dan pendidikan yang terkait kebudayaan. Hal ini tercermin dari kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 3,60% pada Tahun 2021 menjadi 22,89% pada Tahun 2025. Terdapat 16 cagar budaya yang dilestarikan yaitu Benteng Van Der Wijck, Masjid Jami Saka Tunggal, Bangunan DKT Gombong, Gudang SMP Negeri 1 Prembun, Makam Ki Ageng Bodronolo, Makam Tumenggung Kolopaking, Makam RAA Tirtokoesoemo, Makam KRAA Poerbanegara, Makam Mbah Lancing, Makam Syech Anom Sidakarsa, Makam Keluarga Kertanegara Banjak Wide, Punden Berundak Lurah Karsa di Desa Giyanti, Lingga Yoni di Desa Sumberadi, Jembatan Tembana, Rumah Dinas Dokter Kebumen, dan Gereja Kristen Jawa Kebumen. Sementara itu terdapat 2 warisan budaya tak benda yang dilestraikan yaitu kesenian Jamjaneng, Tari Cepetan Alas, serta tradisi Arab Pegon di Pondok Pesantren Somalangu. Sementara itu, jumlah pengunjung tempat bersejarah juga meningkat dari 51.150 orang pada Tahun 2021 menjadi 53.850 orang pada Tahun 2025. Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir meningkat dari 11% pada Tahun 2021 menjadi 21,23% pada Tahun 2025.

Sedangkan satuan pendidikan yang telah mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan juga meningkat dari 64,07% pada Tahun 2024 menjadi 90,66% pada Tahun 2025. Hal ini menjadi penting dan akan terus dikembangkan mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen telah masuk dalam wilayah Geopark Kebumen yang telah diakui sebagai Global Geopark oleh UNESCO pada Tahun 2025 dimana salah satunya adalah pengembangan *cultural diversity*.

Sejak tahun 2021 Kabupaten Kebumen juga telah menghitung Indeks Kesalehan Sosial (IKS). Penghitungan IKS Kabupaten Kebumen menyesuaikan perhitungan kesalehan sosial yang telah banyak dipakai dalam penelitian yang meliputi (Mahfud S, 1994):

1. Solidaritas sosial, adalah kesediaan untuk memberi dan peduli kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan;

2. Kerja sama atau mutualitas adalah melakukan pekerjaan atau aktivitas secara bersama sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula;
3. Toleransi ialah mampu menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan, tidak memaksakan nilai pada orang lain serta tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda;
4. Adil dan seimbang merupakan perilaku yang mampu bertindak sesuai dengan proporsi, tersedianya kesempatan yang sama dalam bekerja dan beraktualisasi; dan
5. Menjaga ketertiban umum yaitu suatu tindakan yang berhubungan dengan orang lain tanpa mengganggu, merugikan dan melanggar kesejahteraan orang lain.

Kesalehan sosial juga dipengaruhi faktor pengetahuan tentang kesalehan sosial, dan pengetahuan berpengaruh terhadap praktik-praktik kesalehan sosial. Pengetahuan dan praktik kesalehan sosial dipengaruhi beberapa faktor antara lain pendidikan, pendapatan, pekerjaan, tempat tinggal, dan status keagamaan (tokoh agama, pengurus atau jamaah). Kemudian kesalehan sosial juga dipengaruhi faktor kesalehan individu yang digambarkan dengan ibadah rutinitas/ritual keagamaan masing-masing individu. Kinerja IKS Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 75,70 pada Tahun 2021 menjadi 82,64 pada Tahun 2025 dan selalu melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Hal ini dapat terjadi karena dukungan yang besar dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pengembangan keagamaan seperti bantuan tempat ibadah, pondok pesantren, organisasi keagamaan hingga acara keagamaan.

Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter juga dapat didukung oleh pengembangan olahraga utamanya membentuk karakter yang kuat dan sehat secara jasmani. Oleh karena itu, Kabupaten Kebumen juga terus mengembangkan olahraga prestasi. Hal ini tercermin dari keberhasilan atlet Kabupaten Kebumen memperoleh medali pada *event* olahraga nasional dan internasional. Dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19, pada Tahun 2021 tidak terdapat *event* olahraga yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional. Baru pada tahun 2022 mulai diselenggarakan *event* kembali diantaranya penyelenggaraan Porprov, Pra PON dan PON. Prestasi atlet Kabupaten Kebumen terus meningkat dari memperoleh sebanyak 17 medali pada Tahun 2022 namun mengalami penurunan menjadi 15 pada Tahun 2023 namun kembali meingkat pada Tahun 2024 yaitu memperoleh sebanyak 44 medali dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2025 sebanyak 84 medali. Peningkatan kinerja olahraga terus meningkat diantaranya banyaknya dukungan Pemerintah Daerah diantaranya dengan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan atlet hingga penyelenggaraan dan pengiriman atlet ke *event* olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka mengelola potensi yang ada pada anak usia sekolah melalui pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Selain itu, penduduk non usia sekolah juga mendapatkan pelayanan pendidikan melalui pendidikan non formal. Secara umum bidang pendidikan akan mendukung pencapaian IPM beserta kedua komponennya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Gambaran secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Kebumen dapat dilihat sebagai berikut:

1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan mencerminkan tingkat keberhasilan pendidikan penduduk yang dihitung berdasarkan komponen IPM pada dimensi pendidikan, yaitu RLS dan HLS. Dalam penghitungan indeks ini, RLS dibatasi hingga maksimum 15 tahun yang setara dengan jenjang pendidikan sarjana, sedangkan HLS memiliki batas atas 18 tahun sebagai perkiraan lama pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan formal. Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari 62,25 pada Tahun 2021 menjadi 63,58 pada Tahun 2025. Dengan capaian sebesar 63,60 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.

Tabel 2.34.
Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pendidikan	62,25	63,28	63,34	63,43	63,58

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

2) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan formal pada kelompok usia tertentu. APS mencakup seluruh penduduk yang bersekolah pada kelompok usia tertentu, tanpa memperhatikan apakah mereka berada di tingkat pendidikan yang sesuai umur. APS mencerminkan proporsi penduduk suatu kelompok usia yang sedang bersekolah yang dapat menilai keberhasilan akses pendidikan (wajib belajar) di suatu wilayah.

Kinerja APS untuk kelompok usia 5-6 tahun terus meningkat dari 44,86% pada tahun 2021 menjadi 83,33% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin mudahnya akses dan fasilitas pendidikan anak usia dini serta meningkatnya kesadaran orang tua

untuk menyekolahkan anaknya sejak dini. Sementara itu belum diperoleh data untuk Jawa Tengah dan Nasional sehingga belum dapat diperbandingkan.

Kinerja APS untuk kelompok usia 7-12 tahun relatif terus meningkat dari 99,56% pada tahun 2021 menjadi 99,89% pada tahun 2025. Seperti halnya pada usia 7-12 tahun, kinerja APS untuk kelompok usia 13-15 tahun juga mengalami peningkatan dan penurunan dari 99,33% pada tahun 2021 menjadi 97,69% pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 99,56% pada tahun 2024 dan mengalami penurunan kembali menjadi 99,47% pada tahun 2025. Secara umum APS pada kedua kelompok usia ini telah mendekati 100% yang menunjukkan akses pendidikan yang merata serta orang tua dan masyarakat yang telah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Belum mencapai 100% dapat diindikasikan masih terdapat jumlah anak usia di luar target yang mungkin tidak terlayani semisal anak-anak berkebutuhan khusus, anak terlantar maupun anak jalanan. Jika dibandingkan dengan kinerja APS di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, kinerja APS kedua kelompok usia tersebut di Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2025 cenderung terus meningkat dan relatif lebih tinggi.

Sementara itu kinerja APS untuk kelompok usia 16-18 tahun cenderung menurun dari 79,91% pada Tahun 2021 menjadi 77,32% pada Tahun 2025. Dikarenakan pada usia ini sebagian besar mengenyam pendidikan SMA/SMK yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengoordinasikannya agar akses terhadap pelayanan pendidikan SMA/SMK terus meningkat. Walaupun cenderung menurun, kinerja APS Kabupaten Kebumen pada kelompok usia 16-18 tahun selama Tahun 2021-2025 lebih tinggi dibandingkan APS tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Tabel 2.35.
Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2021-2025

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2021	2022	2023	2024	2025
5-6 Tahun	Kebumen	44,86	47,85	82,57	83,34	83,33
	Jawa Tengah	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data belum tersedia
	Nasional	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data belum tersedia
7 - 12 Tahun	Kebumen	99,56	99,67	99,74	99,73	99,89
	Jawa Tengah	99,66	99,58	99,57	99,57	99,54

Usia	Angka Partisipasi Sekolah	2021	2022	2023	2024	2025
	Nasional	99,19	99,10	99,16	99,19	99,23
13 - 15 Tahun	Kebumen	99,33	97,69	98,57	99,56	99,47
	Jawa Tengah	96,84	96,77	97,08	97,12	97,05
	Nasional	95,99	95,92	96,10	96,17	96,3
16 - 18 Tahun	Kebumen	79,91	76,77	76,32	77,32	77,32
	Jawa Tengah	70,79	70,82	70,87	71,60	77,97
	Nasional	73,09	73,15	73,42	74,64	77,86

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

3) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APtS) yaitu perbandingan anak berdasarkan kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Sejalan dengan APS, APtS dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program wajib belajar yang ditunjukkan dengan pemerataan dan kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah maka dapat diartikan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Sesuai dengan kewenangan wajib belajar di tingkat Kabupaten, kinerja APtS Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 untuk tingkat SD/MI cukup fluktuatif. Pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 110 siswa SD/MI yang putus sekolah, kemudian merangkak naik menjadi 301 siswa SD/MI yang putus sekolah pada tahun 2022. Salah satu upaya untuk menurunkan APtS adalah pemberian beasiswa sebagai bagian program penanggulangan kemiskinan yang terbukti dapat menekan APtS di tingkat SD/MI yang pada tahun 2023 menurun hingga 48 siswa saja yang putus sekolah. Dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 menjadi 37 siswa dan 34 siswa pada tahun 2025. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat SMP/MTs dimana pada tahun 2021 terdapat 188 siswa putus sekolah dan terus merangkak naik hingga terdapat 191 siswa SMP/MTs yang putus sekolah pada tahun 2022. Dengan terus ditingkatkannya program beasiswa, APtS di tingkat SMP/MTs pada tahun 2023 dapat ditekan hingga mencapai 73 siswa saja yang putus sekolah. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 220 siswa putus sekolah dan kembali turun pada tahun 2025 menjadi 93 siswa.

Tabel 2.36.
Angka Putus Sekolah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI					
Σ Siswa Putus Sekolah	110	301	48	37	34
Σ Seluruh Siswa	123.087	122.137	121.049	118.855	120.229
% Anak Putus Sekolah	0,089	0,246	0,039	0,031	0,03
SMP/MTs					
Σ Siswa Putus Sekolah	188	191	73	220	93
Σ Seluruh Siswa	61.976	62.422	61.545	58.105	58.354
% Anak Putus Sekolah	0,30	0,31	0,12	0,37	0,16

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

4) Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan

Persentase kelulusan dari tahun 2021-2025 mencapai angka kelulusan 100% tiap tahunnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan sekolah (PAUD, SD dan SMP) di Kabupaten Kebumen dapat memenuhi program wajib belajar sesuai dengan tingkat pendidikan yang merupakan kewenangan Kabupaten.

Tabel 2.37.
Persentase Kelulusan Siswa Per Jenjang Pendidikan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
SMP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PAUD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

5) Kualitas Siswa berdasarkan Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional

Program wajib belajar bukan hanya sekedar untuk lulus namun sebagai cara untuk meningkatkan kualitas kecerdasan siswa sehingga akan dihasilkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Dalam pengembangan kemampuan analitikal, pengukuran kualitas kecerdasan siswa sekolah diukur berdasarkan kemampuan literasi membaca dan numerasi. Kemampuan literasi membaca dan numerasi diperoleh dari Rapor Pendidikan yang menjadi standar kompetensi minimum pada Asesmen Tingkat Nasional. Rapor

Pendidikan ini diperoleh dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang dimulai sejak tahun 2022. Berdasarkan data Rapor Pendidikan selama tahun 2022-2025 menunjukkan kemampuan literasi membaca siswa SD dan SMP meningkat, yaitu Siswa SD dari sebesar 54,16 persen menjadi 84,23 persen dan siswa SMP dari sebesar 68,74 persen menjadi 90,98 persen. Kemampuan numerasi siswa SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2022-2025, yaitu siswa SD dari 36,34 persen menjadi 81,59 persen dan siswa SMP dari 55,84 persen menjadi sebesar 86,79 persen. Kemampuan literasi membaca untuk tingkat SMP/sederajat pada Tahun 2025 telah mencapai lebih dari 70 yang menunjukkan telah masuk kategori baik. Sedangkan kemampuan literasi membaca untuk tingkat SD/sederajat masih dibawah 70.

Tabel 2.38.
Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat SD/Sederajat					
Kemampuan literasi membaca	N/A	54,16	58,88	67,48	84,23
Kemampuan numerasi	N/A	36,34	43,01	57,51	81,59
Tingkat SMP/Sederajat					
Kemampuan literasi membaca	N/A	68,74	71,44	76,43	90,98
Kemampuan numerasi	N/A	55,84	58,38	66,23	86,79

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

6) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD merupakan unsur penting dalam mendukung program wajib belajar. Lembaga PAUD Formal di Kabupaten Kebumen yang berakreditasi terus meningkat dari hanya 20,88% pada tahun 2021 menjadi 99,32% pada Tahun 2025 . Hal ini disebabkan mulai tahun 2019 Badan Akreditasi Nasional (BAN) PAUD PNF mendorong percepatan akreditasi dan memasukkan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai PAUD Formal. Walaupun terdapat moratorium akreditasi pada tahun 2020 guna memperbaiki komponen penilaian akreditasi, namun akreditasi dimulai kembali pada tahun 2021. Sementara itu sejak tahun 2022 kuota untuk mengikuti akreditasi terus meningkat disertai dengan pendampingan secara intensif oleh pemerintah daerah serta optimalisasi peran asesor PAUD untuk mendampingi pengisian pada sistem akreditasi (SISPENA) menyebabkan kenaikan signifikan pada cakupan PAUD Formal Berakreditasi di Kabupaten Kebumen. Jumlah Lembaga PAUD cenderung fluktuatif setiap tahun dan rasio lembaga PAUD terhadap penduduk usia 0-6 tahun hingga tahun 2025 sebesar

1:108 menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 1:125 yang menunjukkan akses terhadap PAUD semakin terbuka.

Tabel 2.39.
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase PAUD Formal Berakreditasi	%	20,88	47,12	92,72	98,59	99,32%
Σ Lembaga PAUD	unit	1.144	1.152	1.144	1.131	1.131
Σ Penduduk Usia 0-6 Tahun	anak	142.230	143.905	132.148	128.438	122.387
Rasio	rasio	1:124,33	1:125,00	1:116,00	1:114,00	1:108

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

7) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat ketersediaan satuan pendidikan. Jumlah SD/MI mengalami penurunan dari 876 pada tahun 2021 menjadi 865 pada tahun 2025. Hal ini dikarenakan dilakukannya *regrouping* yang sejalan dengan menurunnya jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Secara rasio, ketersediaan SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun juga terus menurun dari 1:150,71 pada tahun 2021 menjadi 1:148 pada tahun 2025 yang menunjukkan akses terhadap sekolah semakin terbuka.

Sementara itu, ketersediaan SMP/MTs juga mengalami penurunan dari 213 sekolah pada 2021 menjadi 203 sekolah pada 2025. Hal ini disebabkan adanya *regrouping* untuk SMP Satu Atap (Satap), faktor lain penurunan jumlah SMP/MTs juga dipengaruhi adanya SMP/MTs swasta yang sangat dipengaruhi oleh jumlah siswa yang diterima setiap tahunnya. Secara rasio, ketersediaan SMP/MTs terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun cenderung meningkat dari 1:300,23 pada tahun 2021 menjadi 1:333 pada tahun 2025.

Tabel 2.40.
Ketersediaan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI					
Jumlah Sekolah	876	866	864	864	865
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	132.026	131.750	128.981	127.731	127.747

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio ketersediaan sekolah	1:150,71	1:152,14	1:149,28	1:147,84	1:148
SMP/MTs					
Jumlah Sekolah	213	200	208	206	203
Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun	63.950	64.888	67.086	67.475	67.532
Rasio ketersediaan sekolah	1:300,23	1:324,44	1:322,53	1:327,55	1:333

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

8) Rasio Murid per Kelas

Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid per kelas. Rasio murid per kelas pada jenjang SD/MI tahun 2025 adalah 1:26, jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 32 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SD/MI telah mencukupi. Adapun rasio kelas-murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2025 adalah 1:39 jika dibandingkan dengan rasio ideal Kelas-Murid yaitu 36 siswa per kelas, maka jumlah ruang kelas SMP/MTs telah mencukupi. Kondisi rasio guru dan murid terhadap kelas di Kabupaten Kebumen pada masing-masing jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41.
Rasio Guru per Kelas Rata-Rata terhadap Jumlah Murid
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI					
Jumlah kelas	5.855	5.855	5.825	4.779	4.616
Jumlah Murid	123.807	122.132	121.049	100.162	119.368
Rasio Murid per Kelas	1:21,15	1:20,86	1:20,78	1:20,95	1:26
SMP/MTs					
Jumlah Kelas	2.282	2.191	2.362	1.565	1.575
Jumlah Murid	61.976	62.422	61.545	43.406	61.286
Rasio Murid per Kelas	1:27,16	1:28,49	1:26,06	1:27,73	1:39

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

9) Rasio Murid per Guru

Peningkatan serta pemerataan akses layanan pendidikan dapat diukur dari ketersediaan guru terhadap jumlah murid. Baik Rasio Guru-Murid pada jenjang SD/MI Tahun 2025 dan rasio Guru-Murid pada jenjang SMP/MTs tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun

sebelumnya yaitu menjadi 1:15 dan 1:16. Rasio ini menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar dalam upaya pencapaian mutu pendidikan. Kondisi rasio guru terhadap murid Kabupaten Kebumen pada tiap jenjang pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42.
Rasio Guru Per Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
SD/MI					
Jumlah Guru	7.280	7.298	7.224	8.207	7.940
Jumlah Murid	123.807	122.132	121.049	113.794	120.229
Rasio Guru/Murid	1: 16,91	1 : 16,73	1:16,75	1:13,86	1:15
SMP/MTs					
Jumlah Guru	3.362	4.100	3.879	3.874	3.686
Jumlah Murid	61.109	61.976	62.422	61.545	58.354
Rasio Guru/Murid	1:18,18	1:15,12	1 : 16,09	1:15,88	1:16

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

Rasio ideal guru terhadap murid adalah satu guru untuk 20 peserta didik. Berdasarkan data tabel di atas, rasio guru dan murid di Kabupaten Kebumen pada masing-masing jenjang pendidikan dasar telah memenuhi rasio ideal, dengan rata-rata satu guru melayani sekitar 16–17 siswa. Namun demikian, rasio tersebut belum membedakan status kepegawaian guru, mengingat sebagian besar tenaga pendidik di Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh guru non-PNS.

10) Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, kualitas guru sebagai tenaga pengajar perlu ditingkatkan dan dapat dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4. Persentase guru dengan kualitas S1/D4 pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP/MTs terus meningkat. Hingga tahun 2025 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 pada jenjang pendidikan dasar sudah cukup baik karena sudah diatas 90%, yaitu 99,29% pada jenjang SD/MI dan 98,79% pada jenjang SMP/MTs. Walaupun kedua jenjang terus mengalami peningkatan, namun untuk jenjang PAUD masih cukup rendah yaitu baru mencapai 74,57% pada tahun 2025. Persentase guru dengan kualitas S1/D4 di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43.
Persentase Guru dengan Kualifikasi S1/D4
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
SMP/MTS (%)	95,63	92,58	90,97	97,76	98,79
SD/MI (%)	92,75	96,27	95,00	97,97	99,29
PAUD (Formal) (%)	63,17	67,43	68,94	71,12	74,57%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

11) Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan atau Ekskul Kesenian

Pemajuan kebudayaan berperan penting dalam bidang pendidikan dan diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Pemajuan kebudayaan ditingkatkan dan diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri masyarakat termasuk pada dunia pendidikan dalam upaya menghadapi tantangan budaya globa serta mendukung program Geopark Kebumen sebagai UNESCO Global Geopark. Pemajuan kebudayaan dalam bidang pendidikan dapat diukur dengan indikator satuan pendidikan yang memiliki guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian. Berdasarkan data tabel di bawah ini, terjadi peningkatan satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian di Kabupaten Kebumen dari 64,07% pada tahun 2024 meningkat menjadi 98,72% pada tahun 2025.

Tabel 2.44.
Pemajuan Kebudayaan pada Urusan Pendidikan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Mulok Bahasa Daerah dan/atau Ekskul Kesenian (%)	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	63,57	64,07	98,72

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

12) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat Kabupaten Kebumen sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan daya saing sumber daya manusia . Hal ini dapat diukur dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (yang merupakan usia angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Data menunjukkan terjadi penurunan dari 7,96% pada tahun 2024 menjadi 4,83% pada tahun 2025, namun proporsi ini masih sangat rendah yang menggambarkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga

telah mengalokasikan beasiswa bagi warga untuk dapat berkuliah di antaranya di Universitas Terbuka, Universitas Pertamina dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya secara akademik, serta dapat memberikan pengalaman kehidupan kampus yang mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Kebumen di tengah ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan maupun berusaha.

Tabel 2.45.
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	5,94	7,96	4,83

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

13) Kondisi Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu solusi alternatif yang diberikan kepada masyarakat yang tidak bisa atau telah keluar dari sistem pendidikan formal. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah formal karena berbagai alasan seperti ekonomi, geografis, sosial, atau pribadi. Pendidikan kesetaraan di Kabupaten Kebumen dilakukan oleh lembaga-lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) . Jumlah PKBM hingga tahun 2025 sebanyak 24 lembaga dan terdapat 22 PKBM yang telah terakreditasi, dimana jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2024 sebanyak 15 lembaga PKBM terakreditasi.

Tabel 2.46.
Jumlah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah SKB	1	1	1	1	1
Jumlah PKBM	24	24	24	24	24
Jumlah PKBM terakreditasi	14	14	14	15	22

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

Akreditasi pendidikan kesetaraan merupakan mekanisme penilaian untuk menentukan tingkat pemenuhan standar yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga atau program pendidikan kesetaraan. Proses ini berperan penting dalam menjamin bahwa mutu layanan pendidikan kesetaraan setara dengan pendidikan formal. Namun demikian, pelaksanaan akreditasi pendidikan kesetaraan masih

menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah standar akreditasi yang belum sepenuhnya jelas dan konsisten, sehingga menyulitkan lembaga pendidikan kesetaraan dalam memahami serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari aspek pendanaan, ketersediaan tenaga pendidik, maupun sarana dan prasarana, menjadi hambatan utama dalam pemenuhan standar akreditasi. Proses akreditasi yang relatif kompleks dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga menambah beban bagi lembaga pendidikan kesetaraan. Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan akreditasi masih belum optimal, sehingga terdapat kemungkinan lembaga yang memperoleh status terakreditasi belum sepenuhnya memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

14) Dukungan Terhadap Pendidikan Keagamaan

Perkembangan pesantren dan pendidikan keagamaan menjadi salah satu pilar penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sehingga tercipta insan yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, memiliki rasa cinta tanah air, serta berkontribusi aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan pendidikan. Terkait hal ini Kabupaten Kebumen telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini menjadi landasan penguatan kebijakan pelaksanaan pendidikan keagamaan pada tahun 2027. Di tengah keterbatasan kapasitas anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen tetap berkomitmen memberikan dukungan pembiayaan kepada pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Dukungan tersebut diarahkan tidak hanya pada aspek pendanaan, tetapi juga pada penguatan pendampingan legalitas serta dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas, kemandirian, dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Tabel 2.47.
Fasilitasi terhadap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
Di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025*
Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	2	4	12	6	6
Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Setda dan Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025
**) Data Tahun 2024*

b. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sangat penting. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan yang tercermin pada pencapaian harapan hidup yang merupakan salah satu komponen IPM.

1) Indeks Kesehatan

Mendasari perhitungan komponen IPM harapan hidup saat lahir, dapat diukur kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dari Indeks Kesehatan. Sesuai dengan aturan UNDP, batas bawah harapan hidup adalah 20 tahun sedangkan batas atas 85 tahun menunjukkan kinerja indeks kesehatan Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 84,95 pada tahun 2024 menjadi 85,47 pada tahun 2025. Dengan capaian tersebut, menunjukkan pencapaian sektor kesehatan sudah sangat tinggi karena mendekati nilai maksimum 100 yang menunjukkan secara umum kondisi kesehatan sudah baik.

Tabel 2.48.
Indeks Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kesehatan	84,20	84,38	84,58	84,95	85,47

Sumber: BPS dan Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025 (data diolah)

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985). Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Berdasarkan data, jumlah kasus kematian ibu selama tahun 2021-2025 mengalami penurunan dari 38 kasus pada tahun 2021 menjadi 29

kasus pada tahun 2022. Keterbatasan layanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil selama pandemi, potensi keterpaparan virus, dan komplikasi kehamilan (perdarahan, hipertensi kehamilan, jantung, diabetes) menjadi faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi naiknya jumlah kasus kematian ibu. Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 9 kasus pada Tahun 2025. Demikian juga dengan perhitungan AKI sempat mengalami penurunan dari 201,6 pada tahun 2021 menjadi 92,26 pada tahun 2023. Namun kembali meningkat menjadi 108,96 pada tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun. Dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 71,06. Sementara itu penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2024 antara lain dikarenakan perdarahan sebanyak 4 kasus, kelainan jantung pembuluh darah 4 kasus, hipertensi pada kehamilan sebanyak 3 kasus, infeksi 1 kasus, dan lain–lain 3 kasus. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu yang sesuai standar; belum semua faskes jejaring Puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, Bidan Praktek Mandiri) yang belum berkolaborasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan ANC Terpadu; masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi; serta asih banyak ibu hamil dengan penyakit penyerta. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan kasus kematian ibu diantaranya melalui pengelolaan pelayanan ibu hamil di masyarakat melalui kelas ibu, pengelolaan kesehatan ibu hamil resiko tinggi melalui pendampingan tim ahli, penguatan jejaring sistem rujukan maternal neonatal di Kabupaten Kebumen, meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal di Faskes Rujukan dengan telah terdapat 4 (empat) rumah sakit PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) yaitu pada RSUD Dr. Soedirman, RSUD Prembun, RS PKU Muhammadiyah Gombong dan RSU Purwogondo.

Tabel 2.49.
Jumlah Kasus dan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ayah	2	0	1	1	0
2	Buayan	0	1	1	0	0
3	Puring	2	2	0	0	0
4	Petanahan	1	5	1	1	0
5	Klirong	1	2	1	0	2
6	Buluspesantren	1	0	1	1	0
7	Ambal	4	2	3	4	0
8	Mirit	1	2	1	1	1

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
9	Bonorowo	2	0	0	0	1
10	Prembun	1	0	0	0	0
11	Kutowinangun	3	1	0	0	0
12	Alian	3	2	1	2	0
13	Padureso	0	0	0	0	0
14	Poncowarno	1	0	1	0	1
15	Kebumen	0	1	0	1	0
16	Pejagoan	3	0	2	0	1
17	Sruweng	3	1	0	0	0
18	Adimulyo	1	3	1	1	1
19	Kuwarasan	1	1	0	0	0
20	Rowokele	2	4	0	2	1
21	Sempor	0	0	0	0	0
22	Gombong	1	0	1	0	0
23	Karanganyar	0	0	0	0	0
24	Karanggayam	2	1	0	0	0
25	Sadang	1	1	0	0	0
26	Karangsambung	2	0	0	1	1
Total Jumlah Kasus Kematian Ibu		38	29	15	15	9
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		201,60	165,30	92,26	108,96	71,06

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

3) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Nilai normatif AKB adalah 70 (sangat tinggi), 40 – 70 (tinggi), 20-39 (sedang) dan <20 (rendah). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka

kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. AKB cenderung lebih menggambarkan kesehatan reproduksi dari pada AKI. Meskipun target program terkait khusus dengan kematian balita, AKB relevan dipakai untuk memonitor pencapaian target program karena mewakili komponen penting pada kematian balita. AKB terutama terjadi pada umur 0-28 hari, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2021-2025 yaitu dari 136 kasus pada tahun 2021 menjadi 111 kasus pada tahun 2025. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada tahun 2021 menjadi 8,73 pada Tahun 2025. Kasus penyebab kematian bayi diantaranya disebabkan oleh kasus hipertensi tinggi serta adanya edaran terminasi kehamilan usia 33 minggu pada indikasi pre eklamsi sehingga meningkatkan berat badan lahir rendah dan resiko kematian.

Tabel 2.50.
Jumlah Kasus dan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ayah	5	8	6	0	3
2	Buayan	9	2	12	7	1
3	Puring	10	9	3	7	8
4	Petanahan	9	6	6	3	5
5	Klirong	5	6	10	9	4
6	Buluspesantren	9	12	13	7	5
7	Ambal	4	13	8	9	4
8	Mirit	3	7	9	14	5
9	Bonorowo	1	2	1	4	3
10	Prembun	6	4	6	1	6
11	Kutowinangun	5	5	10	1	3
12	Alian	7	7	6	5	10
13	Padureso	5	1	4	1	1
14	Poncowarno	6	4	3	1	2
15	Kebumen	8	13	16	9	9

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
16	Pejagoan	0	2	3	8	6
17	Sruweng	13	11	10	7	7
18	Adimulyo	5	4	10	6	3
19	Kuwarasan	8	13	5	8	4
20	Rowokele	6	5	6	5	2
21	Sempor	9	11	10	9	6
22	Gombong	2	9	2	8	3
23	Karanganyar	3	9	3	1	2
24	Karanggayam	11	12	7	6	4
25	Sadang	3	2	0	7	2
26	Karangsambung	5	3	7	1	3
Jumlah kasus kematian bayi		136	174	180	203	111
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran		6,96	9,23	10,26	12,49	8,73

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

4) Persentase Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Komplikasi dan kematian ibu *materna*l serta bayi baru lahir dapat terjadi pada saat proses persalinan. Persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dapat meminimalkan jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terus meningkat dari 99,92% pada tahun 2021 menjadi 100% tertangani sejak tahun 2025.

Tabel 2.51.
Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah ibu hamil yang ditolong oleh tenaga kesehatan	18.863	17.549	16.289	13.845	12.712
Jumlah total Ibu Bersalin	18.879	17.559	16.289	13.845	12.712
Presentase	99,92	99,94	100,00	100,00	100,00

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

5) Status Gizi dan Prevalensi *Stunting*

Permasalahan gizi buruk pada anak umumnya mulai meningkat setelah usia balita memasuki lebih dari 18 bulan, yang berkaitan dengan perubahan pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan gizi pada masa pertumbuhan. Pada periode tersebut, kecukupan asupan gizi menjadi faktor penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kecukupan gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak, terdapat 4 faktor yang melatarbelakangi gizi buruk yaitu: ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Kemiskinan salah satu determinan sosial-ekonomi, merupakan akar dari ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan, dan tidak sehat serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan. Malnutrisi masih saja melatar belakangi penyakit dan kematian anak. Kurang kalori protein sesungguhnya berpeluang menyerang siapa saja, terutama bayi dan anak yang tengah tumbuh-kembang. Gizi yang diperoleh seorang anak melalui konsumsi makanan setiap hari. Kecukupan zat gizi berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Kasus gizi buruk bukanlah jenis penyakit yang datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi karena proses yang menahun terus bertumpuk dan menjadi kronik saat mencapai puncaknya. Masalah defisiensi gizi khususnya menjadi perhatian karena berbagai penelitian menunjukan adanya efek jangka panjang terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak manusia.

Selain Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), status gizi pada balita masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya kasus balita dengan gizi kurang, balita dengan gizi buruk, serta tingginya prevalensi *stunting* pada balita.

Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2021 mencapai 0,55% dan meningkat menjadi 4,1% pada tahun 2025. Sementara itu, prevalensi balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,03% pada tahun 2021 hingga mencapai 0,059% pada tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada tahun 2025 menjadi 0,02.

Kecukupan gizi menjadi salah satu hal yang penting guna mempersiapkan generasi sumberdaya manusia yang gemilang di masa yang akan datang. Pemenuhan gizi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian makanan tambahan dan vitamin, namun perlu upaya edukasi dalam pola asuh anak mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Optimalisasi peran Pos Kesehatan Desa (PKD) dan Posyandu sebagai wadah edukasi pada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan, selain itu kader kesehatan menjadi agen *screening* awal kejadian kasus di sekitarnya.

Tabel 2.52.
Prevalensi Balita Gizi Kurang dan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	0,55	3,80	4,20	4,80	4,10
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0,03	0,04	0,059	0,02	0,02

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Selanjutnya, *stunting* adalah isu strategis di bidang kesehatan yang juga harus menjadi perhatian seluruh pihak karena akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. *Stunting* disebabkan oleh rendahnya asupan gizi, lingkungan sosial yang terkait dengan pengasuhan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air bersih dan sanitasi. Menurut WHO, Pertumbuhan *stunting* yang terjadi pada usia dini dapat berlanjut dan berisiko untuk tumbuh pendek pada usia dewasa muda. *Stunting* dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua. (Atikah, Rahayu, 2018). Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pemerintah telah mengupayakan percepatan penurunan *stunting* yang mempunyai pengertian yaitu setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (*e*-PPGBM) prevalensi *stunting* Kabupaten Kebumen sebesar 12,13 persen tahun 2021 dan terus menurun menjadi 7,53 persen pada tahun 2025. Sedangkan jumlah penderita *stunting* juga relatif menurun dari 8.572 orang pada tahun 2021 menjadi 5.190 pada tahun 2025.

Tabel 2.53.
Angka dan Jumlah Penderita Stunting Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Angka *stunting* (%)	12,13	10,23	9,87	9,17	7,53

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penderita *Stunting* (orang)	8.572	7.472	7.591	6.752	5.190

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Meskipun angka penderita *stunting* di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penanganan *stunting* tetap menjadi perhatian pemerintah mengingat dampak yang ditimbulkan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat dalam mengupayakan percepatan penurunan *stunting*. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kebumen perlu untuk mengidentifikasi dan menentukan strategi sebagai bagian dari konvergensi penurunan *stunting* agar angka *stunting* dan jumlah penderita *stunting* dapat menurun.

Salah satu upaya dalam menurunkan angka *stunting* adalah dengan menurunkan prevalensi ibu hamil KEK, untuk mengurangi risiko lahirnya bayi berpotensi *stunting*. Ibu hamil KEK yaitu ibu hamil yang mempunyai ukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA) di bawah 23,5 cm atau Indeks Masa Tubuh (IMT) pada pra hamil atau Trimester I (usia kehamilan ≤ 12 minggu) dibawah 18,5 kg/m2 (kurus). Berdasarkan data, persentase ibu hamil KEK justru mengalami peningkatan dari 9,31% pada tahun 2021 menjadi 12,14% pada tahun 2025. Hal ini terjadi dikarenakan pola makan yang kurang tepat, *body image* sebelum hamil, ataupun keterbatasan ketersediaan makanan. Kenaikan ibu hamil KEK ini dapat menyebabkan kenaikan angka *stunting* karena ibu hamil KEK memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan bayi *stunting*.

Tabel 2.54.
Persentase Ibu Hamil KEK Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Ibu Hamil KEK (persen)	9,13	9,21	11,60	10,90	12,14

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

6) Rasio Dokter dan Penduduk

Untuk memenuhi derajat kesehatan masyarakat maka diperlukan perluasan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan, salah satunya dengan ketersediaan dokter. Rasio dokter terhadap penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2025 menurun dari 1:5.433 pada tahun 2021 menjadi 1:2.097 pada tahun 2025. Dengan nilai rasio hingga tahun 2025 tersebut menunjukkan masih jauh dari kondisi ideal rasio dokter terhadap penduduk yaitu 1: 2.500.

Tabel 2.55.
Rasio Dokter dan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Dokter (Umum dan Spesialis)	255	326	475	476	692
Jumlah Penduduk	1.385.577	1.409.951	1.426.832	1.441.425	1.451.748
Rasio Dokter per Penduduk	1: 5.433	1 : 4.325	1 : 3.003	1 : 3.028	1:2.097

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

7) Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat. Fungsi posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dasar sehingga turut berkontribusi untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data, jumlah posyandu cenderung meningkat dari 2.126 unit pada tahun 2021 menjadi 2.130 pada tahun 2025. Namun demikian berdasarkan perhitungan rasio jumlah posyandu per 100 balita cenderung menurun dari 1:41 pada tahun 2021 menjadi 1:37 pada tahun 2025.

Tabel 2.56.
Rasio Posyandu dan Balita Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

TAHUN	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Posyandu	2.126	2.130	2.127	2.128	2.130
Jumlah Balita	85.576	74.232	78.790	69.080	78.967
Rasio Posyandu per 100 balita	1:41	1:34	1:37	1 : 32	1:37

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

8) Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat pada kurun waktu 2021-2025. Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada tahun 2021 sebesar 1:39.925 dan terus meningkat menjadi 1:41.478 pada tahun 2025. Nilai rasio tersebut masih belum dalam kondisi ideal rasio Puskesmas per satuan penduduk yaitu sebesar 1:30.000. Meskipun demikian, keberadaan Puskesmas Pembantu dan Poliklinik yang tersebar secara merata dapat membantu masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan. Namun demikian dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 79 unit juga jauh belum

mencapai standar sebesar 1:1.500 penduduk atau 1 puskesmas pembantu harusnya melayani maksimal 1.500 penduduk.

Tabel 2.57.
Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Puskesmas	35	35	35	35	35
2	Jumlah Puskesmas Keliling	35	49	49	38	39
3	Jumlah Poliklinik/PKD /Polindes	357	280	304	349	292
4	Jumlah Puskesmas Pembantu	65	69	70	71	79
5	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	492	433	409	455	406
6	Jumlah Penduduk	1.405.644	1.409.951	1.426.832	1.441.425	1.451.748
7	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1:39.295	1:39.296	1:40.767	1:57.657	1:41.478

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

9) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Berdasarkan data hingga tahun 2025 terdapat 12 rumah sakit bertambah 1 rumah sakit baru jika dibandingkan tahun 2023. Dengan semakin banyak rumah sakit yang tersedia diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan bertambahnya 1 rumah sakit baru pada tahun 2025 menyebabkan rasio rumah sakit terhadap penduduk dapat menurun dari 1:125.962 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan menjadi 1:120.979 pada tahun 2025.

Tabel 2.58.
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah RSUD	2	2	2	2	2
Jumlah RS Swasta	9	9	9	10	10
Jumlah RS AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
Jumlah Seluruh RS	11	11	11	12	12

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	1.385.577	1.409.951	1.426.832	1.441.425	1.451.748
Rasio	1:125.962	1:128.177	1:129.712	1:131.038	1:120.979

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

10) Angka Kesakitan dan Perkembangan Penyakit Menular

Menurut Blum (1974), bahwa derajat kesehatan penduduk suatu negara dapat diukur dari angka kematian (mortalitas) dan angka kesakitan (morbiditas). Angka morbiditas di Kabupaten Kebumen cenderung mengalami peningkatan dari 14,24% pada tahun 2021 menjadi 29,37% pada tahun 2025. Namun demikian perlu diketahui secara detil kasus-kasus penyakit menular atau kronis yang terjadi masyarakat.

Tabel 2.59.
Angka Morbiditas Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Morbiditas (Kesakitan)	14,24	23,02	22,39	22,97	29,37

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Terkait penyakit menular, Pemerintah Pusat masih menetapkan AIDS, Tuberkulosis dan Malaria sebagai tujuan/sasaran prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta TBC merupakan salah satu Program Strategis Nasional Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam penyepakatan global untuk mengakhiri AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) pada tahun 2030. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pengendalian penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Sementara itu, prevalensi penyakit menular utama yang masih tinggi di Kebumen adalah kasus HIV/AIDS, TB, dan demam berdarah.

Kasus baru HIV AIDS cenderung mengalami penurunan dari 181 kasus pada tahun 2021 menjadi 128 kasus pada tahun 2025 Kasus HIV AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari yang ada di masyarakat. Ada kemungkinan masih banyak kasus yang belum ditemukan karena orang-orang yang berperilaku risiko tinggi tidak semuanya mau memeriksakan diri sehingga status HIV-nya tidak bisa diketahui.

Sementara itu, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) justru meningkat dari 13 kasus pada tahun 2021 menjadi 9,9 kasus pada tahun 2025. Faktor kebersihan lingkungan, kepadatan penduduk hingga cuaca dan perubahan iklim menjadi penyebab peningkatan angka DBD. Hal yang sama juga terjadi dengan malaria yang meningkat menjadi 23 kasus di tahun 2025 yang bukan kasus

indigenous melainkan berasal dari pendatang dari luar daerah. Program surveilans migrasi malaria tetap dijalankan untuk penanganan dan pencegahan kasus. Program surveilans migrasi malaria merupakan salah satu upaya pencegahan penularan penyakit malaria dengan jalan pemantauan penduduk yang akan atau dari luar Pulau Jawa.

Tabel 2.60.
Perkembangan Kasus Penyakit Menular 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Kasus baru HIV AIDS	181	152	141	151	128
Angka Kesakitan DBD	13,00	11,00	5,80	20,00	9,9
Jumlah Kasus Malaria	4	3	7	20	23

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

Pola hidup masyarakat yang kurang sehat dan rendahnya kesadaran untuk menjaga kebugaran dengan berolahraga meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas, stroke, jantung, kanker dan diabetes. Selain itu kebiasaan merokok menjadi salah satu pemicu penyakit tidak menular seperti gangguan pernafasan, kanker, penyakit paru dan jantung. Peningkatan kasus penyakit tidak menular menimbulkan dampak ekonomi dan produktivitas karena kasus PTM ditemukan pada penduduk usia produktif. Cakupan pemeriksaan PTM oleh tenaga kesehatan baru dilakukan ketika sudah dalam kondisi lanjut, upaya preventif untuk PTM masih kurang.

Tabel 2.61.
Penyakit Tidak Menular Kebumen Tahun 2021-2025

No	Jenis Penyakit	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ca servik	19	94	20	62	31
2	Ca Mamae	149	650	152	486	64
3	Ca Hepar	0	0	NA	0	1
4	Ca Paru	0	0	43	45	4
5	ID DM	98	371	462	652	406
6	ND DM	10.482	14.964	9.910	13.353	12804
7	AMI	118	32	57	20	876
8	Dekom Kordis	666	774	706	420	876
9	Hemoragik	750	539	587	721	1915
10	PPOK	638	1.108	876	2.010	1891

No	Jenis Penyakit	2021	2022	2023	2024	2025
11	Asma Bronkial	293	1.178	969	1468	1023
12	Psikosis	4.123	3.768	66	4.655	4781
13	Hipertensi	69.899	89.803	60.044	64.187	64873
14	Diabetes	10.580	13.251	10.372	11.128	11592
15	Tumor Benjolan	14	56	67	111	242
16	ODGJ	5.041	3.914	4.214	5.487	4781
17	Iva positif	25	32	59	68	126

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

11) Eliminasi Penyakit Tuberkulosis (TB)

Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs). Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Oleh karena itu dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045, eliminasi tuberkulosis menjadi bagian dalam salah satu dari 13 Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia

Dari data yang ada, perkembangan kasus Tuberkulosis adalah sebagai berikut:

1. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung fluktuatif dari 79% pada Tahun 2021 sempat menjadi 101,66% pada Tahun 2022 namun turun kembali menjadi 95% pada Tahun 2025. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Oleh karena itu tinggi rendahnya cakupan ini sangat tergantung dari upaya penemuan kasus TB maupun keberhasilan pengobatannya.
2. Surveilans (pengawasan) atau pelaporan kasus tuberkulosis terus ditingkatkan.Praktik epidemiologi yang memantau penyebaran penyakit ini dilakukan untuk memprediksi, mengamati dan meminimalisasi hal berbahaya yang disebabkan oleh situasi-situasi wabah, epidemi dan pandemi, serta meningkatkan pengetahuan soal faktor yang berkontribusi terhadap keadaan semacam itu. Hal ini tercermin dari *case notification rate* semua kasus TB per 100.000 penduduk yang cenderung meningkat dari 119 kasus pada tahun 2021 menjadi 231 pada tahun 2025 karena

meningkatnya upaya deteksi dini.

3. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis cenderung meningkat dari 43% pada tahun 2021 menjadi 90% pada tahun 2025 yang menunjukkan adanya keberhasilan pengobatan pada penderita yang tercatat mengidap tuberkulosis pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pengobatan TB mengalami beberapa kendala diantaranya kurang disiplinnya pasien dalam mengikuti proses pengobatan sesuai standar serta terjadinya kasus resistensi obat.
4. Penanganan TB tidak hanya dilakukan terhadap penderita positif TB, namun juga keluarga, kerabat dan orang lain yang terdekat yang kemungkinan dapat tertular dari pasien positif. Dengan upaya surveilans dan deteksi, jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat dari 6.705 orang pada tahun 2021 menjadi 18.571 orang pada tahun 2025. Cakupan pelayanan ini juga terus meningkat dari 51,88% pada tahun 2021 dan berhasil mencapai 100% sejak tahun 2022.
5. Upaya penanggulangan TB masih perlu diperkuat di mana terlihat dari penurunan tingkat kematian karena TB per 100.000 orang cenderung menurun dari 6,6 pada tahun 2021 menjadi 16 pada tahun 2025.

Tabel 2.62.
Perkembangan Kasus Penyakit Tuberkulosis 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)	79,00	101,66	95,00	74,00	95,00
Case Notification Rate semua kasus TB per 100.000 penduduk	119	165	194	201	231
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)	43,00	81,00	82,90	116,00	90,00
Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	6.705	13.624	16.568	18.604	18.571
Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	51,88	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6,60	7,80	6,20	4,42	16

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

12) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program pemerintah yang memberikan kepastian jaminan perlindungan finansial kepada penduduk Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. JKN hadir dalam bentuk mekanisme asuransi sosial

dengan memberikan cakupan manfaat kesehatan yang komprehensif baik itu promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 20 ayat 1 juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 89,10% pada tahun 2021 menjadi 98,80% pada tahun 2025. Semakin tingginya cakupan kepesertaan JKN ini mengindikasikan meningkatnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, semakin tingginya kesadaran masyarakat (terutama peserta mandiri) dalam meningkatkan derajat kesehatannya serta semakin meningkatnya komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dengan menanggung beban biaya JKN bagi masyarakat kurang mampu. Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Tabel 2.63.
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Indikator Sasaran	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89,10	90,30	96,76	99,07	98,80

Sumber: DinkesPPKB Kabupaten Kebumen, 2025

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

a) Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Sesuai Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.1.1/554 Tahun 2023 tentang Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten, terdapat 289 ruas jalan kewenangan Kabupaten dengan total panjang 1.017,15 km yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Kebumen. Panjang jalan kewenangan Kabupaten Kebumen ini meningkat dari sebelumnya sepanjang 960,36 km. Hingga tahun 2025 terdapat 470,960 km jalan Kabupaten dalam kondisi baik atau 46,40%, dalam kondisi sedang sepanjang 284,430 km atau 27,96%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 139,030 km atau 13,67% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 122,730 km atau 12,07%. Dari data tersebut menunjukkan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten hingga Tahun 2025 sebesar 74,27% yang diperoleh dari proporsi baik ditambah proporsi sedang. Dengan proporsi lebih dari 70% menunjukkan infrastruktur jalan telah cukup baik dan tidak

mengganggu fungsi jalan secara signifikan. Namun demikian masih terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati *over dimension over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas serta tingginya curah hujan yang mempengaruhi kekuatan konstruksi jalan.

Tabel 2.64.
Panjang dan Proporsi Jalan di Kabupaten Kebumen Berdasarkan Kondisi Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	PANJANG JALAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kondisi Baik (km)	572.798	291.179	470,62	411.814	470,960
2	Kondisi Sedang (km)	176,72	417.001	281.665	335.543	284,430
3	Kondisi Rusak Ringan (km)	119.799	158.466	145.045	166.827	139,030
4	Kondisi Rusak Berat (km)	91.041	92.712	119,82	102.966	122,730
5	Jalan secara keseluruhan (km)	960.358	960.358	1017,15	1017,15	1017,15
6	Proporsi Kondisi Baik (%)	59,67	30,42	46,27	40,49	46,40
7	Proporsi Kondisi Sedang (%)	18,4	43,42	27,69	32,99	27,96
8	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	12,47	16,50	14,26	16,40	13,67
9	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	9,48	9,65	11,78	10,12	12,07
10	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kab/Kota (%)	78,26	73,83	70,97	73,48	74,27

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

Adapun dari segi jenis konstruksi jalan Kabupaten, terdapat 4 jenis konstruksi jalan yang ada di Kabupaten Kebumen meliputi jalan beton, aspal, kerikil dan tanah. Hingga tahun 2025 terdapat 247,850 km atau 24,37% jalan beton, 750,910 km atau 73,82% jalan aspal, 13,35 km atau 1,66% jalan kerikil dan 4,690 km atau 0,46% jalan tanah. Selain menurunkan panjang maupun proporsi jalan kerikil dan tanah, ke depan juga akan terus ditingkatkan panjang serta proporsi jalan beton yang memiliki kualitas kekuatan jalan yang lebih baik mengingat kondisi tanah dan tingginya volume kendaraan

Tabel 2.65.
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Tipe Konstruksi di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

NO	URAIAN	PANJANG JALAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang jalan beton (km)	119,15	146.506	193.164	207.396	247.850
2	Panjang jalan aspal (km)	752.007	507.437	801.536	778.914	750.910

NO	URAIAN	PANJANG JALAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Panjang jalan batu kerikil (km)	83.571	35.688	19,46	23.292	13.35
4	Panjang jalan tanah (km)	5,63	10,25	2,65	7.548	4.690
5	Proporsi panjang jalan beton (%)	12,83	15,26	18,99	20,37	24,37
6	Proporsi panjang jalan aspal (%)	77,28	79,96	78,80	76,58	73,82
7	Proporsi panjang jalan batu kerikil (%)	8,99	3,72	1,95	2,31	1,66
8	Proporsi panjang jalan tanah (%)	0,90	1,07	0,26	0,74	0,46

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

Dengan mengacu pada pedoman pemeriksaan jembatan No. 01/ P/ BM/ 2022 yang digunakan di tahun 2025, terdapat lonjakan jumlah jembatan di Kabupaten Kebumen yang semula menghitung jembatan yang lebar 3 meter dan pada tahun 2025 termasuk jembatan dengan lebar 2 meter. Adapun jumlah jembatan di tahun 2024 sebanyak 637 Unit dan pada tahun 2025 sebanyak 836 unit atau ada penambahan 199 unit. Adapun kualitas jembatan di Kabupaten Kebumen selama 5 tahun terakhir cenderung terus menurun sejak tahun 2021 hingga 2025. Hal ini dapat dilihat dari jembatan dalam kondisi baik yang menurun dari 144 unit atau 22,97% pada tahun 2021 menjadi hanya 2 unit atau 0,24% pada tahun 2025. Jembatan dalam kondisi baik ini menurun kualitasnya menjadi dalam kondisi sedang yang cukup fluktuatif dari 35 unit atau 5,58% pada tahun 2021 menjadi 254 unit atau 30,42% pada tahun 2025. Sementara itu, kondisi rusak ringan cenderung meningkat dari 439 unit pada tahun 2021 atau 70,02% pada tahun 2021 menjadi 556 unit atau 66,71% pada tahun 2025. Sedangkan kondisi rusak berat cenderung turun dari 9 unit atau 1,44% pada tahun 2021 menjadi 19 unit atau 2,28% pada tahun 2025, adapun pada tahun 2025 terdapat 3 unit jembatan atau 0,36% yang kondisinya masuk dalam kategori kritis. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu melakukan usaha perbaikan jembatan mengingat jembatan adalah infrastruktur yang penting untuk menghubungkan antar wilayah di Kabupaten Kebumen terutama pada wilayah tertinggal.

Tabel 2.66.
Jumlah dan Proporsi Jembatan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	JUMLAH JEMBATAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kondisi Baik (unit)	144	45	56	44	2
2	Kondisi Sedang (unit)	35	202	211	185	254
3	Kondisi Rusak Ringan (unit)	439	357	343	388	556
4	Kondisi Rusak Berat (unit)	9	23	17	20	19
5	Kondisi Kritis	-	-	-	-	3
6	Jumlah Jembatan secara keseluruhan (unit)	627	627	627	637	836
7	Proporsi Kondisi Baik (%)	22,97	7,18	8,93	6,91	0,24
8	Proporsi Kondisi Sedang (%)	5,58	32,22	33,65	29,04	30,42
9	Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)	70,02	56,94	54,70	60,91	66,71
10	Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)	1,44	3,67	2,71	3,14	2,28
11	Proporsi Kondisi Kritis (%)	-	-	-	-	0,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

b) Irigasi

Kabupaten Kebumen memiliki daerah irigasi kewenangan kabupaten seluas 8.621 Ha dengan Daerah Irigasi sejumlah 172 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Selain itu di Kabupaten Kebumen juga terdapat Daerah Irigasi (DI) kewenangan pusat dan provinsi. DI kewenangan pusat meliputi DI Sempor (6.478 Ha), DI Serayu (380 Ha) dan DI Waduk Wadaslintang (21.422 Ha). Sedangkan DI kewenangan provinsi yaitu DI Buniayu (di Kecamatan Rowokele) dengan luas 140 Ha. Daerah irigasi yang terdapat di Kabupaten Kebumen secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.67.
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	172 DI Kabupaten	8.621	23,27
2	Sempor (Pusat)	6.478	17,49
3	Wadaslintang (Pusat)	21.422	57,83
4	Serayu (Pusat)	380	1,03

No	Daerah Irigasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
5	Buniayu (Prov) (Rowokele)	140	0,38
Jumlah		37.041	100,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga tahun 2025 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 75,17% pada tahun 2021 menjadi 78,85% pada tahun 2025, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,55% pada tahun 2021 menjadi 1,4% pada tahun 2025. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif menurun dari 1,23% pada tahun 2021 menjadi 1,13% pada tahun 2025 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 22,04% pada tahun 2021 menjadi 18,62% pada tahun 2025. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) selalu meningkat sampai pada tahun 2025 telah mencapai 59,35%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,35% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian sesuai dengan Lampiran 1 Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2015.

Tabel 2.68.
Panjang dan Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Irigasi Teknis Sekunder (m)	186.105	186.105	186.105	186.105	186.105
2	Irigasi Teknis Tersier (m)	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	Irigasi Kondisi Baik (%)	75,17	76,31	78,71	78,75	78,85
4	Irigasi Kondisi Sedang (%)	1,55	1,51	1,44	1,40	1,40
5	Irigasi Kondisi Rusak Ringan (%)	1,23	1,23	1,17	1,17	1,13
6	Irigasi Kondisi Rusak Berat (%)	22,04	20,95	18,67	18,67	18,62
7.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	N/A	N/A	57,42	59,21	59,35

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

c) Drainase

Panjang saluran drainase merupakan total panjang lintasan saluran yang dibangun atau direncanakan, dihitung sepanjang sumbu saluran dari titik awal hingga titik akhir di Kabupaten Kebumen tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.69.
Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025 (km)

No	Saluran Drainase Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Drainase Perkotaan	34,93	34,93	50,32	50,32	50,32
	a. Perkotaan Kebumen	Data Belum Tersedia	27,37	35,6	35,60	35,60
	b. Perkotaan Prembun	Data Belum Tersedia	1,81	1,51	1,51	1,51
	c. Perkotaan Karanganyar	Data Belum Tersedia	5,06	4,79	4,79	4,79
	d. Perkotaan Gombong	Data Belum Tersedia	6,69	8,42	8,42	8,42
2	Drainase Non Perkotaan	919,43	919,43	966,83	966,83	966,83
3	Total Drainase Jalan	960,36	960,36	1.017,15	1.017,15	1.017,15
4	Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan	72,272	72,272	72,272	72,272	72,272
5	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik (%)	15,98	16,00	17,04	16,23	16,23

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

Adapun daftar saluran drainase buangan irigasi yang ada di Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel.2.69.1
Daftar Saluran Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
1	Aren	Jogosimo – Pandanlor	Klirong	5,50
2	Bedogol	Bumiharjo – Banjarwinangun	Petanahan	2,20

No	Nama Saluran Drainase	Desa	Kecamatan	Panjang Saluran (Km)
3	Bengkelung	Redisari	Rowokele	0,50
4	Binangun	Bumiharjo – Trikarso	Sruweng	1,60
5	Bojongsari	Bojongsari	Alian	1,500
6	Badongan	Podoluhur – Kebadongan	Klirong	4,000
7	Buatan	Demangsari	Ayah	2,000
8	Era	Redisari	Rowokele	2,000
9	Garung	Jlegiwinangun	Kutowinangun	2,000
10	Jomboran	Purwosari – Tukinggedong	Puring	4,536
11	Jogomulyo	Jogomulyo – Purbowangi	Buayan	2,700
12	Kaligending	Krandegan	Puring	0,650
13	Kaliori	Rowokele	Rowokele	2,740
14	Kebantengan	Tambakagung – Karangglonggong	Klirong	2,500
15	Kedungkeji	Kretek	Rowokele	1,500
16	Kenteng	Kenteng	Sempor	2,000
17	Klepupayung	Sugihwaras	Adimulyo	2,000
18	Krandegan	Krandegan	Puring	0,665
19	Krasak	Jatimalang	Klirong	2,000
20	Lumpang	Bumiagung	Rowokele	1,500
21	Munggu	Munggu – Tambakmulyo	Petanahan, Puring	10,000
22	Pacor	Jemur Clowok	Kebumen	2,000
23	Rangga Ula	Pringtutul	Rowokele	2,500
24	Siwarak	Jatiroto	Buayan	2,500
25	Semali	Semali	Sempor	1,000
26	Sosogan	Seling	Karangsambung	2,50
27	Sokadana	Kajoran	Karanggayam	2,00
28	Tanjungrejo	Tanjungrejo – Sangubanyu	Buluspesantren	2,750
29	Tembelang	Mangunweni	Ayah	1,600
30	Widakan	Purwoharjo	Puring	0,950
31	Kalibeji	Karangsari	Buayan	0,381
Total				72,272

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel.2.69.2
Daftar Kondisi Saluran Drainase Jalan dan Drainase Irigasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025

KODE KAB.	DAFTAR RUAS JALAN/NAMA DRAINASE	DRAINASE JALAN				DRAINASE IRIGASI			BELUM TERBANGUN (M)
		PANJANG RUAS JALAN (M)	PANJANG SALURAN (M)	KONDISI KERUSAKAN (M)		PANJANG DRAINASE (M)	KONDISI KERUSAKAN (M)		
				BAIK	RUSAK		BAIK	RUSAK	
Perkotaan Kebumen		35.600,00	17.763,00	14.630,03	3.132,97				18.878,00
Perkotaan Prembun		1.510,00	510,00	510,00	-				1.000,00
Perkotaan Karanganyar		4.790,00	4.900,00	4.437,12	462,88				-
Perkotaan Gombong		8.420,00	3.890,00	2.382,60	1.507,40				4.530,00
Non Perkotaan		966.830,00	271.190,69	138.033,02	133.157,67				695.639,31
Drainase Irigasi						133.455,97	29.032,45	104.415,53	
JALAN	JUMLAH TOTAL	1.017.150,00	298.253,69	159.992,77	138.260,92				720.047,31
	(%) THDP JALAN		14,66%	53,64%	46,36%				70,79%
IRIGASI	JUMLAH TOTAL					133.455,97	29.032,45	104.415,53	-
	(%) THDP IRIGASI					100,00%	21,75%	78,24%	
TOTAL	PANJANG IDEAL SALURAN	1.150.605,97							
	JUMLAH TOTAL DRAINASE JALAN + IRIGASI		431.709,67	189.025,22	242.676,45				
	(%) TOTAL		37,52%	16,43%	21,09%				62,58%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

d) Air Minum dan Sanitasi

Aspek air bersih dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi kualitas dan keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam rangka memenuhi salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ke-6 yakni air bersih dan sanitasi layak, Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap aspek tersebut. Akses air minum perpipaan menjadi parameter dikarenakan proses pemanfaatannya oleh masyarakat dapat lebih terjamin dalam hal kualitas dan kebersihan air. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan cenderung fluktuatif dari 23,91% pada tahun 2021 menjadi 17,21% pada tahun 2025. Jaringan perkotaan yakni

jaringan yang dikelola oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen serta jaringan SPAM Regional Keburejo yang dikelola oleh PDAB Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah. Beberapa permasalahan pemenuhan akses air minum oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah masih rendahnya *idle capacity* khususnya SPAM Keburejo rata rata tahun 2023 penyerapan konsumen 60 liter/det masih dibawah kapasitas 150 liter/detik ini berarti masih ada potensi air perpipaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat.

Sementara itu, akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan juga mengalami penurunan dari 12,57% pada tahun 2021 menjadi 0,38% pada tahun 2025 hal ini dikarenakan juga perhitungan Tahun 2021-2024 merupakan akses perpiaan sementara yg baru Tahun 2025 merupakan akses perpiaan siap minum (aman). Jaringan perdesaan yakni jaringan yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat di perdesaan, baik yang berasal dari dana APBN maupun APBD, seperti dari Program Pamsimas, Hibah Air Bersih/Minum, DAK dan sebagainya. Penyelenggaraan sistem air minum perdesaan dikelola oleh KPSPAM, permasalahan dan kendala di setiap desa bervariasi, namun secara umum kendala penyelenggaraan air minum perdesaan yaitu terbatasnya sumber air baku dan manajemen KPSPAM yang perlu ditingkatkan. Selain itu berbeda dengan air minum PDAM, air minum perpipaan di pedesaan belum mendapatkan uji kualitas air minum sehingga belum masuk kategori air siap minum aman.

Secara umum persentase rumah tangga mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baik di perkotaan maupun pedesaan juga mengalami penurunan dari 22,13% pada tahun 2021 menjadi 19,39% pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena pengembangan air minum perpipaan baik di pedesaan maupun perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga yang terjadi. Sedangkan akses rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen telah mencapai 100% sejak tahun 2023.

Tabel 2.70.
Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan
di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	23,91	17,96	18,42	16,27	17,21
2	Akses Rumah Tangga Pedesaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	12,57	10,50	11,04	11,12	0,38

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
3	Persentase Rumah Tangga mendapatkan Pelayanan Air Minum Perpipaan (Pedesaan dan Perkotaan dalam %)	22,13	17,96	18,73	19,62	19,39
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota (%)	87,80	96,84	100,00	100,00	100,00

Sumber: DPUPR dan PDAM Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen, 2025 (data diolah)

Sementara itu, kondisi sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Kebumen mayoritas menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (*on-site system*/SPALD-S) yaitu pengolahan limbah yang diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber tanpa dialirkan. Sistem ini memanfaatkan fasilitas tangki septik skala rumah tangga dan tangki septik di beberapa rumah tangga (5-10 SR), serta *cubluk* di pedesaan. Sistem ini menyediakan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai sarana pengolah lumpur dari tangki septik. Pada saat ini Kabupaten Kebumen memiliki 2 (dua) sarana IPLT yang berada di Kaligending Karangsambung dan IPLT yang berada di Semali Kecamatan Sempor (beroperasi tahun 2023).

Meskipun persentasenya masih kecil, Kabupaten Kebumen juga menerapkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (*off-site system*/SPALD-T), yaitu pengolahan limbah yang diselesaikan secara terpusat/komunal melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kebumen.

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,85% pada Tahun 2021 menjadi 13,98% pada tahun 2025. Walaupun akses sanitasi layak sempat menurun dari 91,99% pada Tahun 2021 menjadi 78,81% pada tahun 2022, namun kembali meningkat pada Tahun 2024 mencapai 96,22% dan turun kembali 80,84% di tahun 2025. Selama ini budaya masyarakat membangun *septic tank* masih pada kriteria belum layak secara fisik dengan kondisi bawah dan dinding belum kedap dan belum dilakukan penyedotan secara rutin 2-3 tahun sekali, bahkan dari segi fisik belum sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat membangun akses sanitasi aman dan kemampuan pembiayaan masyarakat masih rendah. Sedangkan kasus Buang Air Besar Sembarangan (BABS) terbuka sudah tidak ada atau 0% dan BABS tertutup telah mencapai 100% setiap tahunnya.

Tabel 2.71.
Capaian Akses Sanitasi di Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	0,85	1,18	2,02	3,67	13,98
2	Akses Layak (%)	91,99	78,81	86,97	96,22	80,84
3	Akses Belum Layak (%)	5,07	18,67	10,92	3,78	1,82
4	BABS Tertutup (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	BABS Terbuka (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Dispekimhub dan Dinkes Kabupaten Kebumen, 2025

2) Penataan Ruang

Penataan ruang di Kabupaten Kebumen diselenggarakan dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran dari RTRW.

Kabupaten Kebumen memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044, yang mana peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Revisi Perda RTRW ini bertujuan untuk lebih menyesuaikan kebutuhan dan penataan wilayah Kabupaten Kebumen terhadap kebutuhan, permasalahan dan isu pembangunan di Kabupaten Kebumen, Provinsi dan Nasional. Terkait kinerja penyelenggaraan tata ruang menunjukkan terjadinya peningkatan persentase ketaatan terhadap RTRW yang diukur dari kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW dari 75% pada tahun 2021 menjadi 91,45% pada tahun 2025.

Tabel 2.72.
Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,00	91,15	91,25	91,35	91,45

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan program prioritasnya peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kebumen dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 adalah 482.703 dengan jumlah rumah yang tersedia sebesar 356.891.

Kondisi ini menunjukan terdapat rumah tangga yang masih menumpang dengan KK induknya. Sesuai data BKKBN tahun 2021 terdapat data *backlog* sebanyak 64.093 dan menurun menjadi 63.963 pada Tahun 2025. Berdasarkan data ini terdapat kekurangan kepemilikan rumah (*backlog*) yang sangat besar dan harus dipenuhi oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Tabel 2.73.
Status *Backlog* Kepemilikan Rumah di Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 – 2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Rumah	354.807	354.807	354.807	354.807	356.891
Jumlah Rumah Tangga	356.220	369.138	461.823	476.112	482.703
Backlog	64.093	64.093	64.070	64.070	63.963

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen dan Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Selain terkait *backlog* kepemilikan rumah, penanganan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kebumen berjalan membaik. Hal ini ditunjukkan dengan luas permukiman kumuh perkotaan yang tertangani dari 54,64 Ha pada tahun 2021 meningkat menjadi 169,32 Ha pada tahun 2024. Sehingga luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani semakin berkurang dari 288,62 Ha pada Tahun 2021 menjadi 97,93 Ha pada tahun 2025, sesuai dengan SK Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Nomor 600.2.1/872 tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, persentase wilayah kumuh perkotaan juga semakin

berkurang dari 5,00% pada tahun 2021 menjadi 1,69% pada tahun 2025, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ada penanganan mandiri oleh desa.

Tabel 2.74.
Perkembangan Kawasan Kumuh Perkotaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Area Permukiman (Ha)	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82	32.217,82
	a. Permukiman Perkotaan	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96	5.776,96
	b. Permukiman Perdesaan	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85	26.440,85
2	Luas Permukiman Kumuh perkotaan sesuai SK (Ha)	343,27	343,27	343,27	343,27	99,20
3	Luas Permukiman kumuh perkotaan yang tertangani (kumulatif) (Ha)	54,64	55,15	83,82	169,32	1,27
4	Luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani (kumulatif) (Ha)	288,62	288,12	259,45	174,04	97,93
5	Persentase wilayah kumuh perkotaan (%)	5,00	4,99	4,49	3,01	1,69

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Penanganan kawasan kumuh merupakan pekerjaan yang terintegrasi dari berbagai perangkat daerah, yang mencakup 7 (tujuh) aspek penilaian, yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran. Suatu wilayah dikategorikan sebagai kawasan kumuh apabila memperoleh skor <16 dari ketujuh aspek tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Kebumen. Luas permukiman kumuh perkotaan yang tertangani tercatat sebesar 1,27 Ha. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 600.2.1/872 Tahun 2024, penetapan ulang lokasi kawasan kumuh dengan total luas menjadi 99,20 Ha termasuk penanganan yang dilaksanakan di Desa Depokrejo Kecamatan Kebumen pada tahun 2025. Dengan diterbitkannya SK tersebut, sejumlah kawasan yang sebelumnya tercatat sebagai kumuh dinyatakan telah tertangani dan dikeluarkan dari daftar kawasan kumuh, sehingga luas kumuh perkotaan yang belum tertangani berkurang menjadi 97,93 Ha pada tahun 2025.

Dikarenakan keterbatasan kondisi keuangan daerah, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani setiap tahun cenderung menurun, dari 2.293 unit pada tahun 2021 menjadi 675 unit pada tahun 2025, meskipun data realisasi tersebut belum mencakup penanganan yang

bersumber dari dana desa; namun demikian, sisa RTLH yang belum tertangani menunjukkan tren penurunan dari 26.342 unit pada tahun 2021 menjadi 13.660 unit pada tahun 2025, di mana perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya tidak hanya disebabkan oleh penanganan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh pemutakhiran basis data dan penyesuaian metode pendataan pada awal periode RPJMD; sejalan dengan kondisi tersebut, persentase rumah layak huni meningkat menjadi 95,99% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2021, yang selaras dengan penurunan persentase RTLH dari 7,42% menjadi 4,02%, sementara persentase RTLH yang tertangani setiap tahun juga mengalami penurunan dari 8,01% pada tahun 2021 menjadi 4,71% pada tahun 2025. Pada tahun 2025 Pemerintah Daerah telah melaksanakan penanganan RTLH dengan membangun RLH sebanyak 20 unit serta pembangunan RLH penanganan bencana sebanyak 10 unit. Pembangunan RLH menggunakan atap dengan material genteng juga dilakukan sebagai upaya mendukung program gentengisasi nasional yang bertujuan agar rumah lebih sejuk, sehat, estetik, dan nyaman bagi penghuni. Kegiatan sosialisasi secara persuasif juga dilakukan sebagai upaya mendukung program tersebut.

Secara umum, akses hunian layak diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu rumah layak huni, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Rumah layak huni dinilai berdasarkan ketahanan bangunan, meliputi kualitas atap, dinding, dan lantai, serta kecukupan luas tempat tinggal dengan luas lantai per kapita ≥7,2 m². Berdasarkan data Susenas, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak cenderung menurun dari 73,26% pada tahun 2021 menjadi 69,80% pada tahun 2024, namun meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 70,97%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan; semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga pada sektor tersebut.

Penyusunan peraturan kepala daerah sebagai upaya pendukung program strategis nasional 3 juta rumah telah dilakukan. Pelaksanaan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkala mulai dipersiapkan sebagai upaya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

Tabel 2.75.
Jumlah Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah	354.807	354.807	354.807	354.807	356.891
2	Jumlah rumah layak huni	328.465	329.912	331.541	332.347	342.556

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	28.635	26.342	24.895	23.266	14.335
4	Jumlah RTLH tertangani	2.293	1.447	1.629	806	675
5	Sisa RTLH yang belum tertangani	26.342	24.895	23.266	22.460	13.660
6	Persentase rumah layak huni (%)	92,58	92,98	93,44	93,67	95,99
7	Persentase rumah tidak layak huni (%)	7,42	7,02	6,56	6,33	4,02
8	Persentase rumah tidak layak huni tertangani (%)	8,01	5,49	6,54	3,46	4,71
9	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	73,26	71,44	71,09	69,80	70,97

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Pada tahun 2025, penanganan rumah korban bencana masih terbatas, yaitu sebanyak 10 unit. Keterbatasan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada bidang perumahan. Sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah rumah korban bencana di Kabupaten Kebumen yang belum tertangani tercatat sebanyak 60 unit. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Pemenuhan SPM perumahan bagi korban bencana tetap dilaksanakan pada tahun mendatang, dan ditargetkan pada tahun 2026 seluruh rumah korban bencana dapat tertangani.

Tabel 2.76.
Penanganan Rumah Korban Bencana Tahun 2021 – 2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah korban bencana	118	112	91	80	70
2	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	6	21	11	10	10
3	Jumlah rumah korban bencana yang tertangani s/d tahun n	15	36	47	57	67
4	Jumlah rumah korban bencana yang belum tertangani s/d tahun n	112	91	80	70	60

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a) Kebencanaan

Berdasarkan kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis, serta letak geografisnya, Kabupaten Kebumen memiliki sejumlah wilayah yang rawan terjadi bencana yang dapat membahayakan atau mengganggu kehidupan masyarakat. Dampak dari bencana tersebut dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, hilangnya harta benda, serta terganggunya

kondisi psikologis masyarakat. Data mengenai kejadian bencana beserta perkiraan kerugiannya di Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.77.
Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Kerusakan (Rp)	Kerugian (Rp)	Meninggal (orang)	Luka Berat (orang)	Luka Ringan (orang)	Pengungsi (orang)
TAHUN 2021								
1	Tanah Longsor	55	2.082.000.000	1.384.950.000	3	0	0	132
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	11	283.500.000	2.251.500.000	1	0	0	0
4	Angin	47	398.650.000	217.600.000	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	0	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2022								
1	Tanah Longsor	67	7.624.450.000	6.127.475.000	2	0	0	269
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	13	2.554.100.000	69.786.885.000	1	0	0	12.605
4	Angin	86	1.157.688.000	645.987.500	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	0	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2023								
1	Tanah Longsor	29	1.173.800.000	396.050.000	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	0	0		0	0	0	0
3	Banjir	3	75.500.000	69.000.000	0	0	0	0
4	Angin	34	501.067.000	158.800.000	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	20	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	1.387	0	472.285.000	0	0	0	0
TAHUN 2024								
1	Tanah Longsor	69	0	0	0	0	0	0
2	Gempa Bumi	1	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	24	716.090.000	662.350.000	0	0	0	135

No	Jenis Bencana	Jumlah kejadian	Kerusakan (Rp)	Kerugian (Rp)	Meninggal (orang)	Luka Berat (orang)	Luka Ringan (orang)	Pengungsi (orang)
4	Angin	109	0	0	0	0	0	0
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	13	0	0	0	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	52	0	0	0	0	0	0
TAHUN 2025								
1	Tanah Longsor	90	4.605.425.000	2.353.725.000	0	0	0	39
2	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	0	0
3	Banjir	18	875.950.000	1.254.800.000	0	0	0	244
4	Angin	95	340.190.000	480.484.000	0	0	3	2
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	2	500.000	500.000	1	0	0	0
6	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
7	Kekeringan (titik)	2	0	43.000.000	0	0	0	0

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

Selama lima tahun terakhir, dari total 7 (tujuh) jenis potensi bencana di Kabupaten Kebumen, tiga bencana yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian adalah tanah longsor, banjir, dan angin kencang. Ketika musim hujan tiba, bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir di daerah cekungan serta tanah longsor di kawasan pegunungan. Sebaliknya, pada musim kemarau, bencana kekeringan cukup sering terjadi. Sebagai salah satu bentuk penanganan dari pemerintah daerah terhadap bencana kekeringan, dilakukan pendistribusian air bersih (*dropping* air) ke wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan air.

Wilayah rawan banjir di Kabupaten Kebumen pada umumnya terletak di area dataran rendah bagian selatan, mulai dari Kecamatan Ayah hingga Kecamatan Mirit. Di sisi barat Kabupaten Kebumen, Sungai Telomoyo yang melintasi Kecamatan Adimulyo, Kuwarasan, dan Puring menjadi salah satu aliran sungai yang berpotensi tinggi menyebabkan banjir. Sementara itu, di bagian tengah Kabupaten Kebumen, Sungai Kedungbener yang mengalir melalui Kecamatan Kebumen dan Buluspesantren juga termasuk sungai yang rawan banjir. Sedangkan di wilayah timur Kabupaten Kebumen, potensi banjir terdapat di Sungai Gentan yang melintasi Kecamatan Prembun, Mirit, dan Bonorowo.

Tabel 2.78.
Alat Deteksi Dini dan Peringatan Dini Bencana
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Jenis	Jumlah (Titik)					Kebutuhan (Titik)
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	EWS Tsunami	23	23	24	24	24	29
2	EWS Longsor	15	21	24	25	25	85
3	EWS Banjir	3	3	3	3	3	21
4	Detektor Gempa BMKG	2	2	3	3	3	3

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

Sistem peringatan dini atau *early warning system* (EWS) merupakan komponen penting dalam mekanisme kesiapsiagaan masyarakat karena berperan sebagai penghubung antara tahap kesiapsiagaan dan tahap tanggap darurat. Secara teoritis, penyampaian peringatan dini yang tepat waktu dapat mengurangi dampak negatif dari potensi terjadinya bencana berskala besar. Berdasarkan data selama tiga tahun terakhir, jumlah alat deteksi dini di Kabupaten Kebumen relatif stagnan. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan dalam meningkatkan kesigapan dan kecepatan respons masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan kebencanaan saat terdapat potensi terjadinya bencana. Oleh karena itu, pemenuhan dan penambahan jumlah EWS masih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.

Tabel 2.79.
Kinerja Penanganan Bencana Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Tahun	Desa Tangguh Bencana	*Dropping* Air Bersih (tangki)	Evakuasi Bencana (kejadian)	Rehab Rekon Jalan/Jembatan Pasca Bencana	Rehab Tebing Sungai Pasca Bencana
2021	460	3	113	1 Paket	4 Paket
2022	460	0	166	0 Paket	5 Paket
2023	460	1.387	140	1 Paket	0 Paket
2024	460	578	0	0 Paket	2 Paket
2025	460	5	108	1 Paket	1 Paket

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana melalui pembentukan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi terhadap potensi ancaman bencana, menghadapi dampak yang ditimbulkan, serta memulihkan diri secara cepat dan berkelanjutan.

Indikator kunci Desa Tangguh Bencana meliputi penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.

Hingga tahun 2021, jumlah Destana yang telah terbentuk mencapai 460 Destana yang tersebar di seluruh desa/kelurahan. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kapasitasnya, penguatan kapasitas Destana dilakukan secara bertahap dan bergilir setiap tahun. Pada tahun 2025, kegiatan terkait Destana difokuskan pada peningkatan kapasitas 9 desa/kelurahan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.80.
Daftar Desa Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana Tahun 2025

No	Kecamatan	Desa	Sumber Dana
1	Alian	Bojongsari	APBD 2025
2	Alian	Seliling	APBD 2025
3	Kutowinangun	Ungaran	APBD 2025
4	Prembun	Prembun	APBD 2025
5	Gombong	Klopogodo	APBD 2025
6	Buayan	Rangkah	APBD 2025
7	Karangsambung	Kalisana	APBD 2025
8	Kebumen	Bumirejo	APBD 2025
9	Adimulyo	Wajasari	Dana Desa 2025

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat, aspek jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pada tahun 2025, jumlah SDM BPBD bertambah menjadi 62 orang dari sebelumnya 48 orang. Sementara itu, jumlah relawan penanggulangan bencana juga kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 305 orang, setelah sempat menurun tajam menjadi 165 orang pada tahun 2024.

Tabel 2.81.
Sumber Daya Manusia (SDM) Penanggulangan Bencana
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	BPBD (orang)	45	45	45	48	62
2	Relawan Penanggulangan Bencana (orang)	540	540	540	165	305

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

Sejak tahun 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Hasil Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2026 menunjukkan tingkat risiko multibahaya Kabupaten Kebumen pada kategori tinggi untuk kelas bahaya, kategori sedang untuk kelas kerentanan, kategori tinggi untuk untuk kelas kapasitas dan kategori sedang untuk kelas risiko.

Nilai IRBI Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 114,67 pada tahun 2021 menjadi 78,88 pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tingkat risiko bencana di Kabupaten Kebumen. Untuk meminimalkan risiko bencana, upaya dapat difokuskan pada dua komponen utama pembentuk IRBI, yaitu penurunan tingkat kerentanan serta peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola potensi bahaya dan kerentanan tercermin dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mencapai 0,93 pada tahun 2025. Capaian ini masih perlu diperkuat melalui optimalisasi peningkatan terhadap 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

Tabel 2.82.
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	114,67	102,05	110,78	121,38	78,88
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,87	0,90	0,90	0,87	0,93

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen, 2025

b) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen relatif stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dengan persentase Penyelesaian Penegakkan K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dan Persentase Penegakkan Perda yang mencapai 100% pada setiap

tahunnya. Sempat terjadi peningkatan jumlah pelanggaran K3 pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan adanya sejumlah pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Sampai dengan tahun 2025, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 281 orang yang terdiri dari 201 ASN dan 80 Non ASN. Berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, jumlah ideal Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kebumen serendah-rendahnya 251 orang dan setinggi-tingginya 350 orang. Angka ini didapatkan dari perhitungan total skor kriteria umum ditambah kriteria teknis Kabupaten Kebumen sebesar 736 (masuk kategori interval 500-750).

Berdasarkan data, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per jumlah 10.000 penduduk cenderung meningkat selama kurun waktu tahun 2021-2025. Pada tahun 2021, rasio jumlah Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN) per jumlah 10.000 penduduk sebesar 0,34 meningkat menjadi 1,99 pada tahun 2025. Peningkatan rasio ini disebabkan adanya kenaikan jumlah aparatur Polisi Pamong Praja ASN. Pemenuhan SDM Polisi Pamong Praja diperlukan karena adanya tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara penuh sebesar 100 persen dan pada tahun 2025 terjadi penurunan signifikan pelanggaran K3 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan peraturan daerah sebanyak 8.037 kasus.

Sementara itu, penanganan kebakaran di Kabupaten Kebumen telah cukup optimal. Hal ini terlihat dari *response time* penanganan kebakaran di Kabupaten Kebumen yang pada Tahun 2025 mencapai 8 menit. Pencapaian ini cukup baik karena *response time* penanganan kebakaran idealnya paling lambat 15 menit sejak menerima laporan hingga tim pemadam kebakaran tiba di lokasi penanganan.

Tabel 2.83.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

URAIAN KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Aparat Keamanan (Polisi)	814	777	826	826	810
Jumlah Pos Keamanan (Polisi)	7	7	7	7	7
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja (ASN)	49	47	38	41	201
Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja (Non ASN)	103	97	165	165	80
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja (ASN dan Non ASN) per 10.000 Penduduk	0,34	0,99	1,46	1,43	1,99

URAIAN KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pos Siskamling	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
Jumlah Desa/Kelurahan	460	460	460	460	460
Rasio Pos Kamling per desa/kelurahan	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 Dalam 24 Jam	2	21	6	6	6
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	9.750	9.750	12.422	12.422	12.422
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	72,21	71,59	87,20	87,20	87,80
Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	195	307	16.747	35.226	8.037
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	195	307	16.747	35.226	8.037
Presentase Penyelesaian Penegakkan K3	100	100	100	100	100
Jumlah Pelanggaran Perda	65	118	16.796	35.969	8.137
Jumlah Penyelesaian Penegakkan Perda	65	118	16.796	35.969	8.137
Persentase Penyelesaian Penegakkan Perda	100	100	100	100	100
Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran (menit)	7,50	10,10	9,00	8,60	8,00

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan Polres Kebumen, 2025

f. Sosial

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah khususnya bagi penyandang disabilitas, perempuan dan anak perlu adanya peningkatan jumlah fasilitas publik yang inklusif. Fasilitas ini disediakan agar memberikan kemudahan akses dan bisa digunakan oleh semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, kemampuan fisik, kondisi kesehatan atau kebutuhan khusus lainnya. Data menunjukkan rendahnya jumlah perangkat daerah, kantor kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yaitu sebesar 4,34% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 3,39% pada tahun 2025. Sehingga dengan rendahnya persentase tersebut pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan cakupan fasilitas publik yang inklusif sehingga dapat menciptakan lingkungan yang

ramah untuk semua kalangan.

Tabel 2.84.
Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif pada Kantor Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif (%)	0	0	4,34	4,34	3,39

Sumber: DinsosP3A Kabupaten Kebumen, 2025

Istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai bentuk penyempurnaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perubahan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, serta mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pelayanan dan pemenuhan hak. Penggunaan istilah PPKS menjadi nomenklatur resmi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial didukung dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sementara itu, upaya penanganan masalah sosial juga terus dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sepanjang tahun 2021-2025. Secara jumlah terdapat 865.646 orang yang masuk ke dalam golongan PPKS di tahun 2025 di mana secara umum dapat ditangani 17,61% selama tahun 2025. Meskipun capaian penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 telah mencapai 17,61%, realisasi tersebut masih sedikit di bawah target sebesar 17,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan PPKS masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain besarnya jumlah PPKS yang harus dilayani, perlunya peningkatan kualitas dan pemutakhiran data sosial agar intervensi lebih tepat sasaran, serta belum meratanya akses pelayanan pada beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial guna meningkatkan cakupan dan efektivitas penanganan PPKS. Namun, capaian penanganan PPKS yang mendekati target juga didukung dari persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti telah mencapai 100% sejak tahun 2025. Selain itu, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial terus meningkat dari 10,92% pada tahun 2021 menjadi 82% pada tahun 2025. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti juga telah mencapai 100% sejak Tahun 2023 sedangkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti telah mencapai 100% sejak Tahun 2022. Hal yang sama terjadi pada rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yang telah mencapai 100% sejak tahun 2022 sedangkan

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti telah mencapai 100% sejak tahun 2021. Selain itu, persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas juga telah mencapai 100% sejak tahun 2023. Untuk persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota telah mencapai 100% setiap tahunnya. Kinerja ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok marginal dan rentan.

Meskipun berbagai indikator pelayanan kesejahteraan sosial telah menunjukkan capaian yang baik, upaya penanganan PPKS perlu terus diperkuat agar hasil yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Penguatan tersebut tidak hanya dilakukan pada tahap penjangkauan, asesmen, dan rehabilitasi sosial, tetapi juga pada tahap pasca rehabilitasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu meningkatkan dukungan terhadap penanganan PPKS di luar panti melalui monitoring, pendampingan, pengawasan, dan pemberian motivasi kepada penerima manfaat rehabilitasi sosial yang telah kembali ke lingkungan masyarakat. Upaya tersebut penting untuk memastikan keberlanjutan proses rehabilitasi sosial, mendorong kemandirian penerima manfaat, mencegah munculnya kembali permasalahan sosial, serta memastikan mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Dengan demikian, efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kebumen diharapkan semakin meningkat.

Tabel 2.85.
Kinerja Penanganan Permasalahan Sosial
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	58,96*	2,25*	10,27*	0,67*	17,61
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti (%)	98,22	99,74	100,00	100,00	100,00
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	10,92	16,17	17,05	60,53	82,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti (%)	99,34	99,64	100,00	100,00	100,00

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
5	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti (%)	98,67	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti (%)	84,09	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%)	99,34	99,64	100,00	100,00	100,00
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasamya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: DinsosP3A Kabupaten Kebumen, 2025
**) Data merupakan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs. Target dunia yang ingin dicapai yaitu memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Selain itu bidang ketenagakerjaan diharapkan dapat mendorong penurunan angka pengangguran utamanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terjadi dikarenakan adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

1) Kondisi Pencari Kerja

Pencari kerja terdaftar, diperoleh berdasarkan data pemohon kartu kuning atau kartu tanda pencari kerja yang sering disebut pula dengan kartu AK1. Pemilik kartu AK1 secara otomatis akan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sehingga bila sewaktu-waktu ada

informasi lowongan kerja, maka pihak dinas akan memprioritaskan pemilik kartu AK1 untuk mendapatkan informasi. Disnaker juga akan mempromosikan pemilik kartu AK1 kepada perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru. Adapun data jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86.
Kondisi Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pencari Kerja Terdaftar	14.609	15.104	12.367	13.650	10.827
	a. Laki-laki	6.714	6.894	5.892	5.810	4.351
	b. Perempuan	7.895	8.210	6.475	7.840	6.476
2	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	7.569	12.459	4.355	3.553	7.606
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	51,50	82,49	35,21	26,02	70,25

Sumber: Disnaker Kabupaten Kebumen, 2025 (data diolah)

Pelayanan kartu AK-1 merupakan bentuk pelayanan publik sebagai salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan di perusahaan/instansi baik negeri maupun swasta. Pembuatan kartu AK-1 mendasari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Sampai dengan saat ini, kesadaran perusahaan masih relatif rendah untuk melaporkan data penempatan tenaga kerja di perusahaannya kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, hal ini sejalan dengan pentingnya Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Dalam hal pengawasan ketenagakerjaan perusahaan menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja di tingkat Provinsi. Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 14.609 orang pada Tahun 2021 menjadi 10.827 orang pada Tahun 2025. Penurunan ini dikarenakan masih belum optimalnya pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen. Sementara itu, dari data pencari kerja terdaftar tersebut juga terlihat jumlah pencari kerja perempuan cenderung lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

Walaupun jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 12.459 orang atau sekitar 82,49% berhasil ditempatkan atau mendapat pekerjaan, namun sejak Tahun 2023 justru mengalami penurunan hingga hanya mencapai 3.553 orang atau 26,02% pada Tahun 2024, namun kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 7.606 orang atau 70,25%. Situasi perekonomian global hingga

daerah yang tidak menentu sebagai dampak lanjutan Pandemi Covid-19, fenomena ekonomi digital, inflasi hingga deflasi menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan bahkan melakukan PHK dikarenakan beberapa perusahaan bahkan harus tutup. Selain itu pesatnya perkembangan teknologi juga mampu menggeser keberadaan manusia untuk melakukan suatu pekerjaan seperti halnya pekerjaan yang dikerjakan oleh *artificial intellegence*. Walaupun demikian, Dinas Tenaga Kerja tetap berupaya untuk mencari lowongan pekerjaan di perusahaan dengan *Job Canvasing* dan meningkatkan *soft skill* para pekerja.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan TPAK Perempuan serta Keterserapan Tenaga Kerja

Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur besaran tersebut adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan antara angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tabel 2.87.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Keterserapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK dalam %)	67,76	71,57	74,54	77,37	76,17
2	TPAK Perempuan	55,59	60,96	62,49	66,46	66,41
3	Capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja (%)	42,00	57,29	30,66	37,56	51,63

Sumber: BPS dan Disnaker Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan hasil Sakernas hingga Tahun 2024 dengan penimbang jumlah penduduk usia kerja, TPAK di Kabupaten Kebumen selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan dari 67,76% pada Tahun 2021 menjadi 77,37% pada Tahun 2024 dan sedikit menurun menjadi 76,17% pada Tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pasokan tenaga kerja *labour supply* yang aktif di Kabupaten Kebumen semakin meningkat. Hal ini memang berbanding terbalik dengan jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Tenaga Kerja yang cenderung menurun dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan pendaftaran tersebut. Sementara itu selaras dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara total, TPAK perempuan juga cenderung mengalami peningkatan dari 55,59% pada Tahun 2021 menjadi 66,41% pada Tahun 2025.

Namun demikian, capaian peningkatan keterserapan tenaga kerja cenderung sejalan dengan capaian jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan yang sempat mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada Tahun 2022 yaitu mencapai 57,29% berhasil terserap atau memiliki pekerjaan, namun kemudian cenderung menurun hingga mencapai 37,56% pada Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 kembali meningkat yaitu menjadi 51,63%. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan situasi perekonomian yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir menyebabkan banyak perusahaan melakukan penyesuaian atau efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan atau melakukan PHK bahkan beberapa perusahaan juga harus tutup. Selain itu perkembangan ekonomi digital dan *artificial intellegence*. semakin mempengaruhi jumlah lapangan kerja yang tersedia atau semakin membutuhkan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu.

3) Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selain tidak menganggur, masyarakat yang menjadi angkatan kerja diharapkan juga mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupannya sehingga kesejahteraan masyarakat secara umum terjamin. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang terus meningkat dari Rp 1.895.000,00 pada Tahun 2021 menjadi Rp 2.259.873,00 pada Tahun 2025. Peningkatan UMK ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMK biasanya lebih mungkin diterapkan pada sektor formal. Sektor formal lebih dimungkinkan dapat memberikan jaminan atas pekerjaan yang bersifat tetap hingga adanya jaminan sosial bagi kesejahteraan pegawainya. Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal cenderung meningkat dari 30,40% pada tahun 2021 menjadi 27,14% pada tahun 2025. Hal ini juga menyebabkan persentase tenaga kerja informal cenderung meningkat dan semakin mendominasi hingga tahun 2025 mencapai 72,86%. Sementara itu, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan cenderung meningkat dari 34,97% pada tahun 2022 menjadi 36,47% pada tahun 2025. Hal ini disebabkan perhitungan semesta bekerja oleh pemerintah pusat meningkat, yang menjadi pembagi (penyebut) dalam rumus cakupan ini. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 165.359 pekerja di Kabupaten Kebumen telah ter-*cover* BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari 131.393 pekerja penerima upah, 20.970 pekerja bukan penerima upah, serta 12.996 pekerja jasa konstruksi dari total semesta bekerja pada tahun 2025 yang menurut perhitungan pemerintah pusat untuk wilayah Kabupaten Kebumen yaitu sebanyak 453.408 orang.

Tabel 2.88.
Kondisi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Upah Minimum Kabupaten	1.895.000	1.906.782	2.035.890	2.121.947	2.259.873

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
	(Rp)					
2	Persentase tenaga kerja formal (%)	30,40	26,79	31,17	25,50	27,14
3	Persentase tenaga kerja informal (%)	69,60	73,21	68,83	74,50	72,86
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)	Belum Tersedia Data	34,97	34,49	37,36	22,62

Sumber: BPS dan Disnaker Kabupaten Kebumen, 2025

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan proses memberikan akses, kesempatan, dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, baik secara individu maupun kolektif dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan serta memberikan kepada perempuan kendali atas sumber daya dan hak-hak yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan.

Tabel 2.89.
Profil Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,359	0,349	0,344	0,328	0,149
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,06	93,26	93,37	93,41	93,60
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,86	66,87	67,78	69,71	69,71*
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	47,37	58,53	59,65	59,50	59,50*
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	22,00	22,00	22,00	24,00	24,00
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	43,66	48,87	32,97	32,97	32,97*
7	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan (%)	0,007	0,009	0,010	0,007	0,006

Sumber: DinsosP3A Kabupaten Kebumen, 2025
**) Data Tahun 2024*

Terdapat beberapa indikator yang dapat mengukur ketercapaian pemberdayaan perempuan. Yang pertama adalah Indeks Ketimpangan

Gender (IKG) yang menggambarkan bagaimana ketimpangan gender berdasarkan dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi akan mempengaruhi pembangunan manusia. IKG Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang membaik dari 0,359 pada tahun 2021 menjadi 0,149 pada tahun 2025 yang menunjukkan ketimpangan gender semakin rendah. Indikator berikutnya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), di mana seperti halnya IPM, diukur berdasarkan dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG dihitung sebagai rasio antara IPM Perempuan terhadap IPM Laki-Laki sehingga jika nilainya mendekati 1 menunjukkan semakin tingginya tingkat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Kebumen juga cenderung membaik dari 93,06 pada tahun 2021 menjadi 93,60 pada tahun 2025 yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia (SDM) semakin setara antara perempuan dan laki-laki serta permasalahan gender semakin mampu ditangani.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan. IDG Kabupaten Kebumen relatif membaik dari 66,86 pada tahun 2021 menjadi 69,71* pada tahun 2025 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diperbaiki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga cenderung meningkat dari 47,37% pada tahun 2021 menjadi 59,50%* pada tahun 2025. Sementara untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD juga meningkat dari 22% pada tahun 2021 menjadi 24% pada tahun 2025. Namun, hal ini menunjukkan partisipasi perempuan di lembaga parlemen tingkat Kabupaten Kebumen masih berada di bawah 30 persen. Peningkatan partisipasi perempuan perlu terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait peraturan perundang-undangan yang pro perempuan maupun anak. Terkait partisipasi perempuan di lembaga swasta juga cenderung menurun dari 43,66% pada tahun 2021 menjadi 32,97%* pada tahun 2025. Selain isu pemberdayaan, isu lain yang penting adalah perlindungan perempuan di mana hal ini tercermin dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Walaupun persentase kekerasan terhadap perempuan sempat meningkat dari 0,007% pada Tahun 2021 menjadi 0,010% pada tahun 2023, namun dapat kembali menurun di tahun 2025 menjadi sebesar 0,006%. Dalam upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan upaya penanganan, rehabilitasi, bantuan hukum hingga pemulangan dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

2) Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan mencakup pencegahan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran atau perlakuan yang bisa membahayakan kesejahteraan fisik dan mental anak.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran keluarga, masyarakat, serta berbagai lembaga terkait. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi proses tumbuh kembang anak.

Tabel 2.90.
Profil Perlindungan Anak
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kekerasan Anak (%)	0,018	0,015	0,014	0,016	0,03
2	Jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun (kasus)	282	269	278	165	152
3	Indeks Kabupaten Layak Anak	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya

Sumber: DinsosP3A Kabupaten Kebumen, 2025

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen terhadap perlindungan anak. Persentase kekerasan anak meningkat dari 0,018% pada tahun 2021 menjadi 0,03% pada tahun 2025. Selain itu jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun di Kabupaten Kebumen masih terjadi walaupun cenderung menurun hingga pada tahun 2025 tercatat sebanyak 152 kasus. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak juga terus dilakukan dimana hal ini tergambar dari indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) yang telah mencapai tingkatan madya sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan Kabupaten Kebumen telah memenuhi sebagian besar dari 31 indikator KLA khususnya terkait hak anak, telah memiliki kebijakan dan infrastruktur yang lebih ramah anak, terdapat sinergi yang cukup kuat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung program anak serta program dan kegiatan hak anak sudah mulai dilakukan secara berkelanjutan meskipun belum sempurna. Dengan kata lain, KLA tingkatan madya menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen telah berkomitmen serius terhadap hak anak, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

Sehingga agar bisa mencapai tingkatan yang lebih tinggi yaitu nindya, maka ke depan perlu dilakukan:

a) Memastikan kebutuhan seluruh indikator hak anak dengan standar lebih tinggi;
b) Memperluas akses dan kualitas program seperti pendidikan inklusif, kesehatan anak serta perlindungan khusus bagi anak yang rentan; dan

c) Mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap program terkait anak.

c. Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

Untuk mengukur sejauh mana sebuah wilayah mampu menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan, dapat tercermin pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini secara umum mengukur ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pangan. Kinerja IKP Kabupaten Kebumen cenderung meningkat sejak tahun 2021 dengan skor IKP 78,56 hingga tahun 2024 mencapai 81,21. Namun, pada tahun 2025 skor IKP sebesar 72,06 dikarenakan adanya penambahan indikator penilaian dari 6 menjadi 11 indikator (penurunan skor juga terjadi di seluruh kabupaten/kota). Dengan skor IKP 72,06 mencerminkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen berada pada kategori cukup baik/relatif tahan, tetapi belum sangat kuat atau ideal di mana akses dan ketersediaan pangan relatif terjaga serta distribusi dan daya beli masyarakat cukup stabil.

Tabel 2.91.
Ketahanan Pangan di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Ketahanan Pangan	78,56	79,29	80,34	81,21	72,06

Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2025

2) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat

Selain diukur dari ketahanannya, juga perlu diukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi. Hal ini dapat tercermin dari Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. PoU Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 13,52% pada tahun 2021 menjadi 9,24% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan walaupun cenderung menurun, masih terdapat 9,24% dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

Tabel 2.92.
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025

Uraian	Standar	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU dalam %)	-	13,52	12,46	12,00	9,20	9,24
Skor Pola Pangan Harapan (PPH dalam %)	100,00	85,90	90	91,90	93,05	93,45
Skor PPH masing-masing Kelompok Pangan:						
Padi-padian (%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	24,01
Umbi-umbian (%)	2,50	1,00	0,90	1,10	0,84	1,39
Pangan Hewani (%)	24,00	17,50	18,20	19,20	20,92	20,23
Minyak & Lemak (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Buah/ biji Berminyak (%)	1,00	0,40	0,30	0,30	0,38	0,40
Kacang-kacangan (%)	10,00	6,40	8,70	9,20	8,97	10,00
Gula (%)	2,50	2,30	1,90	2,00	1,94	2,42
Sayur & Buah (%)	30,00	28,30	30,00	30,00	30,00	30,00

Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2025

Dalam perencanaan penyediaan pangan mengacu pada peningkatan kemampuan produksi, permintaan pangan (daya beli dan preferensi konsumen) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan gizi seimbang yang didukung oleh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat, untuk mewujudkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman. Indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dinilai dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. PPH merupakan susunan beragam pangan, berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari Sembilan kelompok pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan (mencakup konsumsi terhadap karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

Berdasarkan hasil analisis Skor PPH selama 5 tahun terakhir, capaian Skor PPH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 85,90% pada Tahun 2021 menjadi 93,45% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan skor PPH telah melebihi 90% menunjukkan pola konsumsi pangan Kabupaten Kebumen sudah mendekati ideal atau seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam

meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani. Skor PPH Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa kelompok pangan yang masih berada di bawah standar PPH yakni padi, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, dan gula.

d. Pertanahan

Berdasarkan nomenklatur yang telah diatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2021, bidang urusan pertanahan pada pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini tercermin dari kinerja capaian indikator persentase penanganan sengketa lahan yang setiap tahun selalu dapat terealisasi sebesar 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah serta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan.

Tabel 2.93.
Penanganan Sengketa Lahan Tahun 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penanganan Sengketa Lahan (%)	100	100	100	100	100

Sumber DPUPR dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, 2025

Pemerintah Daerah melaksanakan Reforma Agraria sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan melalui dua pilar utama, yaitu penataan aset dan penataan akses, dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemerintah Daerah bertugas memfasilitasi pertemuan gugus tugas reforma agraria. Saat ini tengah disusun SK gugus tugas reforma agraria di Kabupaten Kebumen. Terkait penataan aset telah menginventarisir data aset dan berkolaborasi dengan BPN terkait wilayah yang sudah dan akan dilaksanakan PTSL. Terkait penataan akses telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait program strategis yang dibutuhkan di lokasi PTSL.

e. Lingkungan Hidup

1) Pelestarian lingkungan hidup diukur dengan indikator

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dibangun dari komponen kualitas air, udara, tanah, dan penanganan sampah. IKLH merupakan penilaian kinerja perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.94.
Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen 2021-2025

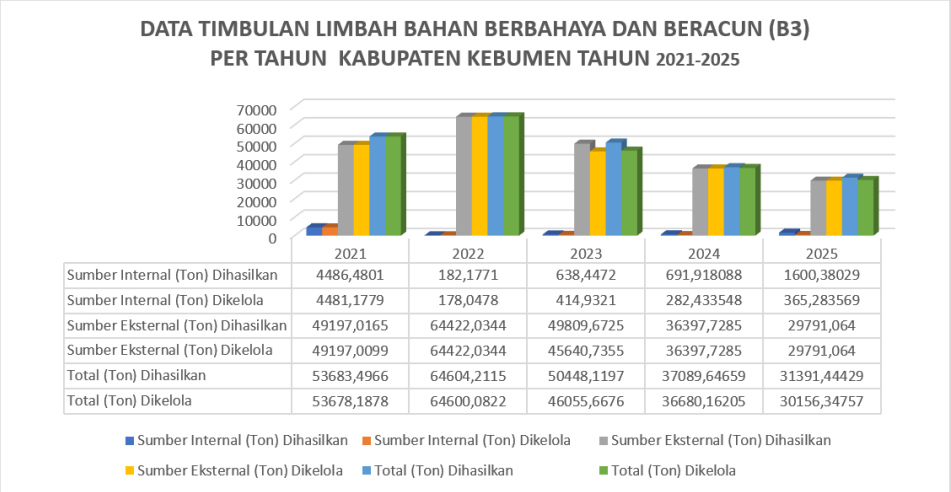
No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,43	68,17	67,16	69,86	75,31
2	Indeks Kualitas Air	52,37	54,49	51,74	53,11	75,53
3	Indeks Kualitas Udara	89,99	90,94	90,41	91,42	81,49
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,86	49,53	50,63	58,73	63,50

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dari 64,43 pada Tahun 2021 menjadi 75,31 pada Tahun 2025 sehingga masih masuk pada kategori baik sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2025 IKA pada posisi 75,53 atau masuk kategori baik, sementara IKU pada posisi 81,49 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 63,50 atau masuk kategori sedang. IKA cukup baik tetapi masih belum optimal pada pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau. Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami. Meskipun capaian nilai IKTL masuk kategori sedang (63,50), akan tetapi angka tersebut sudah berada di atas target yang ditetapkan yakni 57,94. Dinamika capaian IKTL pada rentang tahun 2021 hingga 2025 tidak dapat dilepaskan dari adanya perubahan metodologi penghitungan IKTL yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI. Mulai tahun 2025, penghitungan IKTL menggunakan 22 kelas tutupan lahan, sedangkan pada periode sebelum Tahun 2025 penghitungan hanya menggunakan 11 kelas tutupan lahan. Perubahan ini menyebabkan hasil penghitungan menjadi lebih detail dan representatif terhadap kondisi nyata pemanfaatan lahan di tingkat kabupaten/kota. Perubahan metodologi penghitungan IKTL tersebut secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya regulasi ini, interpretasi

terhadap capaian IKL Tahun 2025 perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak dapat dibandingkan secara linier dengan capaian IKL pada tahun-tahun sebelumnya tanpa mempertimbangkan perubahan formula penghitungan.

Tabel
Data Timbulan LB3 Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Sumber Internal (Ton) Dihasilkan	4486,4801	182,1771	638,4472	691,918088	1600,38029
Sumber Internal (Ton) Dikelola	4481,1779	178,0478	414,9321	282,433548	365,283569
Sumber Eksternal (Ton) Dihasilkan	49197,0165	64422,0344	49809,6725	36397,7285	29791,064
Sumber Eksternal (Ton) Dikelola	49197,0099	64422,0344	45640,7355	36397,7285	29791,064
Total (Ton) Dihasilkan	53683,4966	64604,2115	50448,1197	37089,64659	31391,44429
Total (Ton) Dikelola	53678,1878	64600,0822	46055,6676	36680,16205	30156,34757

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2025

Limbah B3 yang dihasilkan dari berbagai pelaku usaha dan/atau kegiatan di seluruh kabupaten kebumen yang meliputi : fasyankes dan industri. Limbah B3 yang dihasilkan melalui pencatatan limbah B3 yang di hasilkan oleh pelaku usaha/kegiatan serta yang dikelola merupakan limbah B3 di kelola oleh pihak ke 3 yang telah berizin KLH/BPLH untuk pengolah/pemanfaat limbah B3 dan izin dari Kemenhub untuk Transporter Limbah B3. Data limbah B3 yg dikelola dan pemanfaatannya juga akan mempengaruhi IKLH Kabupaten Kebumen.

2) Penanganan dan Pengelolaan Sampah

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 53,75% pada tahun 2021 menjadi 22,63% pada tahun 2025. Penurunan persentase sampah tertangani dikarenakan tidak aktifnya layanan angkut di beberapa Tempat Pengolahan Sampah. Untuk itu, permasalahan penanganan sampah ini harus diupayakan dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah yang lebih tepat yaitu dengan peningkatan kegiatan pengurangan sampah melalui gerakan 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) melalui optimalisasi operasional bank sampah dan TPS3R yang ada serta menyelesaikan permasalahan sampah pada sumbernya.

Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan, hal ini tercermin melalui upaya peningkatan gerakan 3R yang mengalami peningkatan dari 23,41% pada tahun 2021 menjadi 57,62% pada tahun 2025. Selain itu, berdasarkan olahan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah

Nasional (SIPSN) menunjukkan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga mengalami peningkatan dari 37,16% pada tahun 2021 menjadi 54,59% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan kinerja tempat-tempat pengolahan sampah maupun fasilitas daur ulang yang aktif terus meningkat. Proses pengolahan ini melibatkan berbagai metode diantaranya pemilahan, pengomposan, daur ulang dan teknologi pengolahan lain. Untuk itu keberhasilan pengolahan sampah di fasilitas ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam memisahkan sampah sejak dari sumbernya dan efektivitas pengelolaan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Upaya peningkatan pengelolaan sampah tentunya harus dilakukan. Pemerintah Daerah berupaya mendorong seluruh masyarakat untuk meningkatkan gerakan 3R guna menurunkan angka timbulan sampah. Namun upaya tersebut belum optimal pada sektor sistem pengelolaan sampah, dalam arti belum ideal seperti harapan. Penerapan peningkatan sistem dan teknologi pengelolaan sampah, memerlukan waktu bagi masyarakat untuk beradaptasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Penerapan ini diharapkan bisa dilakukan diseluruh wilayah potensi timbulan sampah.

Tabel 2.95.
Kinerja Penanganan dan Pengelolaan Sampah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	53,75	60,51	30,28	25,69	22,63
2.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	23,41	26,17	49,74	53,59	57,62
3.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	37,16	21,34	52,45	53,27	54,59

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2025

3) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) serta Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi GRK telah dituangkan dalam *Enhanced National Determined Contribution* (ENDC) yang diterbitkan pada Tahun 2022 sebagai bagian dari kesepakatan global dalam Perjanjian Paris yang mencakup:

a. Target penurunan emisi GRK secara kondisional sebesar 43,20% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional (pendanaan, transfer teknologi dan penguatan kapasitas). Sedangkan secara tidak kondisional sebesar 31,89% melalui upaya mandiri nasional;
b. Indonesia memfokuskan penurunan emisi pada 5 sektor utama yaitu:

a) kehutanan dan penggunaan lahan dengan mengurangi deforestasi, meningkatkan rehabilitasi hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan;
b) energi dengan transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi dan penghentian penggunaan batubara secara bertahap;
c) pertanian dengan penerapan teknologi rendah emisi dan praktik berkelanjutan;
d) pengolahan limbah dengan pengurangan emisi dari limbah rumah tangga maupun industri; serta
e) proses industri dan penggunaan produk dengan penerapan teknologi ramah lingkungan.

c. Komitmen jangka panjang Indonesia adalah mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2026 atau dapat lebih cepat dengan pengurangan energi fosil secara bertahap, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan seperti surya, angin dan hidro serta rehabilitasi ekosistem karbon biru (mangrove dan laut).

Komitmen Indonesia yang tercantum pada dokumen ENDC Tahun 2022 menunjukkan kontribusi Indonesia dalam mendukung target global untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah $1,5^0$C.

Secara umum hal ini sesuai dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang mentargetkan menuju *net zero emission* pada tahun 2045. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, sebagai salah satu kabupaten yang peduli dengan penurunan emisi GRK, Kabupaten Kebumen telah menyusun dokumen profil emisi GRK pada tahun 2023. Sebagai dokumen inventarisasi GRK yang pertama, yang meliputi empat sektor yaitu sektor energi, sektor IPPU (*Industrial Processes and Product Use*), sektor AFOLU/pertanian dan sektor limbah sebagai penghasil/penyerap emisi. Sejak tahun 2023 melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai dihitung penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO2eq pada tahun 2023 menjadi 152.859,76 TonCO2eq pada tahun 2025. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada tahun 2027 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 2.399.500,84 TonCO2eq. Target tahun 2027 ini sendiri ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga terus ditingkatkan melalui berbagai program. Beberapa program tersebut di antaranya gerakan menanam pohon melalui program Mageri Segoro, 1 anak 2 pohon dan 1 pernikahan 2 pohon serta program desa mandiri energi dengan pengembangan energi alternatif,

melalui penggantian/pemanfaatan lampu LPJU dengan Solar cell. Selain itu juga terdapat program "Sampah Komoditas Ekonomi Masyarakat" dalam meningkatkan kinerja persampahan dengan optimalisasi sistem manajemen pengelolaan persampahan, program pengelolaan sampah mandiri, serta peningkatan pembuatan dan pemanfaatan pupuk organik untuk menggantikan pupuk anorganik sebagai penyumbang emisi GRK.

Tabel 2.96.
Kinerja Penurunan Emisi GRK Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penurunan emisi GRK (TonCO2eq)	NA	NA	145.971,89	151.888,21	152.859,76

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2025
**) Data Tahun 2025 per Januari 2026 AKSARA Bappenas*

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil mayoritas mengalami kenaikan. Kinerja Cakupan Akta Kelahiran secara tren mengalami kenaikan besar dari 96,60% pada 2021 menjadi 99,71% pada 2025. Kemudian pada kinerja Cakupan penerbitan Kartu Keluarga selalu mencapai 100% tiap tahunnya, begitu juga dengan kinerja Cakupan Akta Kematian yang selalu mencapai 100% setiap tahun. Capaian kepemilikan Akta Kelahiran. Capaian kepemilikan Akta Kematian secara tren mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2024 meskipun mengalami penurunan cukup dalam di tahun 2025. Namun pada kinerja perekaman KTP elektronik mengalami penurunan dari 99,44% pada 2024 menjadi 99,29% pada 2025. Kinerja kepemilikan Akta Kelahiran secara tren mengalami kenaikan dari 529.843 pada tahun 2021 menjadi 622.459 pada tahun 2025, begitu juga pada kepemilikan Akta Kematian juga secara tren cakupan naik dari 19.541 pada tahun 2021 menjadi 25.455 pada tahun 2025.

Terkait kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan peningkatan dari 39,66% pada tahun 2021 menjadi 65,07% pada 2025. Sedangkan capaian penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital) secara tren mengalami kenaikan dari 0,65% pada 2022 menjadi 14,99% pada 2025. Namun angka ini masih dibawah target nasional yaitu sebesar 25% dari total pemilik e-KTP. Data kependudukan sangat penting sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan sektoral dalam pembangunan daerah. Data kependudukan juga dijadikan data dasar dalam menentukan perencanaan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	URAIAN KINERJA	2021	2022	2023	2024	2025
1	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga terhadap jumlah kepala keluarga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Perekaman KTP elektronik (%)	99,95	98,00	98,19	99,44	99,29
3	Akta Kelahiran (Akta)	364.263	368.178	371.924	371.480	368.455
4	Cakupan Akta Kelahiran (%)	96,60	99,15	99,43	99,51	99,71
5	Akta Kematian (Akta)	9.903	10.118	10.802	10.361	17.024
6	Cakupan Akta Kematian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Kepemilikan Akta Perkawinan	529.843	565.536	587.721	607.379	622.459
8	Kepemilikan Akta Perceraian	19.541	21.400	23.524	25.528	25.455
9	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak)	39,66	44,43	55,79	60,82	65,07
10	Penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital)	NA	0,65	5,41	11,41	14,99

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

Upaya peningkatan kinerja terus dilakukan dengan beberapa kerjasama guna meningkatkan cakupan layanan admindukcapil. Salah satunya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen telah menjalin kerjasama dengan Kantor Kemenag Kabupaten Kebumen pada 17 Desember 2020 yang disahkan dengan MoU. Kerjasama tersebut dalam rangka penerapan inovasi tentang pelayanan perubahan kartu keluarga dan ktp-el bagi penduduk yang baru menikah melalui inovasi LAYAK MENIKAH IJABAH (Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Pernikahan Identitas Jadi Berubah). Inovasi ini hadir dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih membahagiakan bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan yang baru menikah. Inovasi ini juga dibangun untuk mendapatkan data kependudukan yang valid dan *up to date* (terkini) tentang status perkawinan seseorang.

Selain itu, inovasi lainnya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen di antaranya:

1. **BALADA PAK-KIS (Bayi Lahir Mendapatkan Paket Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KIA, dan KIS)**: Inovasi ini telah dilaksanakan mulai tahun 2016 hingga saat ini, dan telah dikembangkan dengan melibatkan 54 faskes (rumah sakit negeri maupun swasta, klinik bersalin, puskesmas, dan ikatan bidan Indonesia) dan BPJS Kesehatan.
2. **GERLIN DIFADUK (Gerakan Perlindungan Difabel Sadar Administrasi Kependudukan)**: Inovasi ini telah dilaksanakan secara proaktif dengan pelayanan secara jemput bola mulai tahun 2022 hingga saat ini melalui kolaborasi dengan pemerintah desa se-Kabupaten Kebumen, rumah sakit, dan lembaga pendidikan inklusi untuk memberikan

setiap warga kelompok rentan adminduk (disabilitas, lansia, ODGJ, dan keterbatasan akses) mendapatkan hak dokumen kependudukan berupa KTP-el.

3. **GELADI DESA (Gerai Layanan Digital di Desa)**: Mulai diinisiasi dari bulan Mei 2019 dengan nama Kios Pelanduk. Inovasi ini bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa sehingga semakin terjangkau dan mudah. Selain itu juga bertujuan membangun kemandirian masyarakat dalam digitalisasi adminduk. Mulai Oktober 2025, pelayanan adminduk dapat diakses di 460 desa/kelurahan (seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Kebumen).

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercermin dari tingkat pengembangan potensi sumber daya manusia yang dimiliki desa. Selain itu, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dengan fokus pada penguatan kelembagaan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui penguatan peran serta dan partisipasi para pemangku kepentingan di desa melalui berbagai kelembagaan yang ada. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat, penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, serta penguatan kelembagaan kemasyarakatan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat juga diarahkan untuk membangun sinergi antara pembangunan desa dan pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

1) Kemajuan dan Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses yang memadai terhadap pelayanan dasar, infrastruktur yang layak, kemudahan aksesibilitas dan transportasi, kualitas pelayanan publik yang baik, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sangat efektif. Peningkatan jumlah desa mandiri mencerminkan semakin baiknya tingkat pembangunan desa, yang ditopang oleh enam dimensi penilaian, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.

Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2025 telah mencapai 198 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai

kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada tahun 2021 menjadi 44,09% pada tahun 2025.

Sementara itu, jumlah desa maju juga terus meningkat dari 123 desa pada tahun 2021 menjadi 222 desa pada tahun 2025. Selanjutnya, mulai tahun 2025 pengukuran status dan kinerja pembangunan desa tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan menggunakan Indeks Desa (ID) sebagai instrumen penilaian terbaru sesuai dengan kebijakan nasional. Selain itu, sejak tahun 2022 sudah tidak ada lagi desa di Kabupaten Kebumen yang masuk kategori desa tertinggal maupun sangat tertinggal.

Tabel 2.98.
Profil Kemajuan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

No	Klasifikasi	2021*	2022*	2023*	2024*	2025
1	Desa mandiri	1	5	60	152	198
2	Desa maju	123	194	261	246	222
3	Desa berkembang	319	250	128	51	29
4	Desa tertinggal	6	0	0	0	0
5	Desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0
6	Persentase Desa Mandiri (%)	0,22	1,11	13,36	33,85	44,09
7	Indeks Desa (ID)	0,69	0,70	0,76	0,89	77,15

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025
**)Data berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2025 telah menggunakan Indeks Desa (ID)*

2) Peningkatan kapasitas aparatur desa

Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan langkah strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi, aparatur desa dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang administrasi, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Di samping itu, upaya ini juga didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat teknologi dan akses internet yang optimal, guna menunjang efisiensi kerja serta mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat, tepat, dan akurat.

Di samping aspek teknis, peningkatan kapasitas aparatur desa juga mencakup penguatan kelembagaan dan penyempurnaan regulasi yang mendukung kinerja aparatur. Pendampingan oleh pihak yang berkompeten serta supervisi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal. Pemberian apresiasi dan insentif bagi

aparatur yang berprestasi juga berperan penting dalam menjaga motivasi dan etos kerja. Dengan aparatur desa yang semakin profesional dan bersemangat, kualitas pelayanan publik akan meningkat dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan dapat lebih terwujud. Selama tahun 2021-2025 telah dilakukan berbagai rangkaian dalam peningkatan kapasitas aparatur desa di Kabupaten Kebumen sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.99.
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

NO	NAMA KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bimtek Kepala Dusun	130 Desa				
2	Sosialisasi Pilkades Antar Waktu	60 Orang				
3	Sosialisasi Peraturan Bupati	40 Orang				
4	Sosialisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	400 Orang				
5	Bimtek Aplikasi Desa Online	140 Orang				
6	Bimtek BPD	130 Orang				
7	Bimtek Perangkat Desa Baru		130 Orang			
8	Bimtek Kepala Dusun		130 Kadus + 26 Kecamatan + 26 Pendamping			
9	Peningkatan kapasitas BPD dalam Musyawarah Desa		40 Orang			
10	Bimtek Kepala Desa Baru		15 Kades + 16 Ketua BPD + 15 Kecamatan			
11	Sosialisasi Pikades PAW Gelombang I dan II		100 Orang			
12	Sosialisasi Pikades PAW Gelombang II		50 Orang			
13	Sosialisasi Peraturan Bupati		26 PAPDESI + 26 Kecamatan + 4 Forkom BPD			
14	Sosialisasi Standar Pelayanan Publik/SPM Desa		26 Kecamatan + 26 PPDI + 26 PAPDESI +			

NO	NAMA KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025
			7 Forkom BPD			
15	Bimtek Indeks Desa Membangun (IDM)		449 Desa + 26 Kecamatan + 26 Pendamping Desa			
16	Bimtek Penyusunan Sistem Informasi Desa dan Desa Online		449 Desa + 26 Kecamatan + 26 Pendamping Desa			
17	Bimtek Anggota BPD		130 Orang + 26 Kecamatan + 26 Pendamping Desa			
18	Bimtek Sekretaris Desa			78 Orang		449 desa
19	Pembinaan Pencegahan Korupsi dari Kejaksaan Negeri Kebumen dalam Kegiatan Konferensi Kades/Sekdes			26 Kecamatan	26 Kecamatan	26 Kecamatan
20	Peningkatan Kapasitas BPD			50 Orang		400 desa
21	Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa			150 Orang		400 desa
22	Sosilaisasi Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa			60 Orang		400 desa
23	Bimtek IDM dan Desmeli			200 Desa		152 desa
24	Bimtek Anggota BPD			130 Orang	78 orang	52 desa + 8 orang
25	Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Sarana Prasarana			25 Kecamatan		23 kecamatan

NO	NAMA KEGIATAN	2021	2022	2023	2024	2025
26	Sosialisasi ADD dan DD		26 Kecamatan + 449 Desa + 26 Pendamping Desa			449 desa
27	Sosialisasi BHPRD	26 Kecamatan				449 desa
28	Pelatihan/Bimtek Pengelolaan Aset Desa					8 kecamatan
29	Sosialiasi Sipades		26 kecamatan/ 120 desa	269 desa		8 kecamatan

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kesejahteraan masyarakat di desa dipengaruhi oleh penguatan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Salah satu upaya pengembangan ekonomi desa dilakukan melalui pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penilaian klasifikasi BUMDes baru mulai diterapkan seiring dengan berkembangnya BUMDes secara luas setelah diberlakukannya Undang-Undang Desa. Saat ini, seluruh desa di Kabupaten Kebumen telah memiliki BUM Desa dengan jenis unit usaha yang beragam. Keberadaan BUMDes mulai dirasakan kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian desa, meskipun hasilnya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, minimnya permodalan, kurang tepatnya pemilihan jenis usaha, serta lemahnya sinergi antara pengelola, pemerintah desa dan masyarakat.

Tingkat perkembangan pemeringkatan BUMDes di Kabupaten Kebumen semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan BUMDes tingkat maju yang terus meningkat dari 5 BUMDes pada tahun 2021 menjadi 15 BUMDes pada tahun 2025 yang merupakan kenaikan kelas dari BUMDes tingkat berkembang. Sementara itu BUMDes tingkat berkembang meningkat hingga mencapai 201 BUMDes pada tahun 2025.

Tabel 2.100.
Kondisi BUMDes Tahun 2021-2025

No	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
1	BUM Desa MAJU	5	9	17	15	15
2	BUM Desa BERKEMBANG	42	42	51	201	201
3	BUM Desa TUMBUH/PEMULA	272	287	304	113	113

No	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
4	BUM Desa DASAR/PERINTIS	83	111	77	120	120
5	Belum ada BUM Desa	60	47	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

4) Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pemberdayaan ekonomi perdesaan dilakukan dengan melalui program kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah sinergi pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pembangunan Kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan kawasan perdesaan diprioritaskan pada pengembangan potensi atau pemecahan masalah kawasan perdesaan dan penguatan sinergi antar desa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi.

Kabupaten Kebumen telah mempunyai 5 (lima) kawasan perdesaan yang telah terbentuk sejak tahun 2016 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 410/178/KEP/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen yang meliputii:

1. Kawasan Wisata Pesisir Menganti;
2. Kawasan Kampung Peternakan Sapi;
3. Kawasan Anyaman Pandan;
4. Kawasan Produk Unggulan Gula Semut; dan
5. Kawasan Kampung Batik.

Tabel 2.101.
Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021–2026

No	Kawasan Perdesaan	Kinerja	Kendala yang dihadapi
1.	a. 3 (tiga) desa di Kecamatan Karanganyar (Desa Grenggeng, Desa Wonorejo dan Desa Pohkumbang) b. 2 (dua) desa di Kecamatan Karanggayam (Desa Karanggayam dan Desa Penimbun)	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Anyaman Pandan Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Sebagian besar masyarakat menekuni pengrajin anyaman pandan sebagai aktivitas semi produktif dan termasuk masyarakat prasejahtera. b. Kondisi jalan dipengaruhi oleh kontur perbukitan. c. Lahan-lahan pandan Sebagian ditanam di lahan-lahan kosong bukan milik pribadi. Sebagian ditanam di lahan kritis seperti di tepaian tanggul dan di pinggir sungai. d. Hama daun pandan (ulat gendon) sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas bahan baku. e. Instalasi pembuangan dan pengelolaan sampah terpadu di Kawasan belum tersedia. f. Belum massif dihasilkannya produk anyaman pandan dari bahan setengah jadi (complong) menjadi barang jadi. g. Ketidakberdayaan pengrajin yang tidak mempunyai posisi tawar karena besarnya peran *middleman* (tengkulak) yang menentukan harga dan mengirim barang setengah jadi untuk memenuhi pesanana dari luar daerah (Tasikmalaya dan Yogyakarta).
2.	2 (dua) desa di Kecamatan Klirong yaitu Desa Jogosimo dan Desa Tanggulangin	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Peternakan Sapi Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Harga Sapi Tidak Stabil. b. Kemandirian pemasaran dan penjualan masih kurang. c. Bibit Sapi yang berkualitas di jual ke luar Kawasan. d. Pemanfaatan lahan kering untuk hijauan masih belum optimal. e. Belum semua peternak merapkan teknologi pangan. f. Program pengelolaan limbah ternak belum berjalan baik dan teknologi pengolahan limbah belum mencukupi.

No	Kawasan Perdesaan	Kinerja	Kendala yang dihadapi
3.	6 (enam) Desa di Kecamatan Ayah yaitu: 1) Desa Candirenggo 2) Desa Argopeni 3) Desa Karangduwur 4) Desa Srati 5) Desa Pasir 6) Desa Karangbolong	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Wisata Pesisir Menganti Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Perbedaan mekanisme kemitraan antar desa b. Status lahan daya tarik wisata sebagian besar di kawasan perhutanan sosial c. Ekowisata berbasis desa wisata belum berkembang d. Minimnya event kesenian budaya e. Tradisi sedekah bumi/laut belum dikemas untuk mendukung wisata f. Kebersihan kawasan kurang terjaga
4.	a. 2 (dua) desa di Kecamatan Kebumen yaitu Desa Gemeksekti dan Desa Jemur b. 2 (dua) desa di Kecamatan Pejagoan yaitu Desa Jemur dan Desa Pejagoan	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kawasan Kampung Batik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026	a. Sebagian besar masyarakat menekuni pengrajin batik sebagai aktivitas semi produktif b. Pemasaran batik masih terbatas di lingkup lokal c. Plangkan/alat cetak dan bahan batik tergantung dari daerah lain d. Kapasitas produksi masih kurang terutama untuk batik printing masal e. Mutu produksi belum standar dan konsisten f. Desain pola batik belum berkembang mengikuti tren saat ini g. Belum tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Limbah secara terpadu yang mencakup banyak pengrajin dan masyarakat masih membuang limbah batik ke sungai/selokan
5.	13 (tiga belas) desa di Kecamatan Mirit	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	Kawasan perdesaan baru masih diperlukan keberlanjutan penyusunan RPKP

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2026

5) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan suatu gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak utama dalam membina keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial. Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan, mengorganisasi, mengarahkan, dan membina keluarga agar mampu mencapai kondisi keluarga yang sejahtera. Program PKK juga berperan sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang efektif dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan serta pengembangan desa.

Peran PKK dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan pemerintah daerah sangat strategis. PKK berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan sekaligus membantu menangani berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Melalui beragam inovasi dan aktivitas yang berbasis pada partisipasi serta pemberdayaan keluarga, PKK menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembangunan. Secara umum, kegiatan PKK difokuskan pada upaya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa melalui berbagai program yang dilaksanakan. Dengan demikian, perempuan didorong menjadi aktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Pada kurun waktu 2021-2025 perkembangan PKK di Kabupaten Kebumen relatif sama pada setiap tahunnya dimana seluruh kelompok PKK selalu aktif dan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Perkembangan PKK Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PKK	487	487	487	487	487
2	Jumlah PKK aktif	487	487	487	487	487
3	Presentase PKK aktif	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Kelompok Binaan PKK	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Kelompok Binaan PKK terdiri dari 2 desa per kecamatan setiap tahunnya. Materi pembinaan berupa administrasi desa dan pengikutsertaan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten. Namun demikian, kaderisasi pengurus TP PKK perlu menjadi perhatian, hal ini guna mendukung program-program PKK yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya adalah angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*), angka pemakaian kontrasepsi *(Contraceptive Prevalence Rate*), dan *Unmet need* KB. *Total Fertility Rate* (TFR) didefinisikan sebagai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Indikator ini digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah

(tingkat kemiskinan tinggi). Capaian TFR cenderung menurun dari 2,35 pada tahun 2021 menjadi 2,2 pada tahun 2025 yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak (semakin mendekati 2 anak) selama masa usia suburnya atau semakin mendekati target Keluarga Berencana yaitu 2 anak cukup.

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah angka yang menunjukkan banyaknya PUS (Pasangan Usia Subur) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. CPR digunakan untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB serta sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Idealnya CPR dan TFR memiliki hubungan yang negatif, yaitu semakin banyak perempuan subur menggunakan kontrasepsi (semakin tinggi CPR) maka semakin rendah tingkat kelahiran total (TFR) dan sebaliknya. Namun demikian CPR di Kabupaten Kebumen juga cenderung menurun dari 68,56% pada tahun 2021 menjadi 68,26% pada tahun 2025. Hal ini dapat terjadi kemungkinan wilayah Kabupaten Kebumen sedang melalui transisi demografi yaitu tingkat kelahiran lebih rendah dari tingkat kematian sehingga pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Hal ini dapat dikarenakan meningkatnya kesadaran keluarga berencana, meningkatnya peran wanita di pendidikan/karier, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat.

Sementara itu, *unmet need* dapat didefinisikan sebagai kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Angka *unmet need* Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 17,85% pada tahun 2021 menjadi 5,92% pada tahun 2025. Hal ini dapat disimpulkan bahwa angka *unmet need* Kabupaten Kebumen tidak melebihi dari target Nasional yaitu 10%. Artinya, kebutuhan kesehatan reproduksi masyarakat sudah semakin terpenuhi dan kesadaran ber-KB sangat tinggi.

Tabel 2.103.
Perkembangan CPR, TFR dan *Unmet Need*
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Tahun	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	*Total Fertility Rate* (TFR)	*Unmet Need*
2021	68,56%	2,35	17,85%
2022	69,05%	2,38	15,98%
2023	69,96%	2,17	14,66%

Tahun	*Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)	*Total Fertility Rate* (TFR)	*Unmet Need*
2024	67,48%	2,17	13,48%
2025	68,26%	2,2	5,92%

Sumber: Dinkes PPKB, 2024

Selain pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kualitas keluarga juga harus terus ditingkatkan. Hal ini penting karena keluarga berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Tingkat kualitas keluarga tercermin dari Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai alat pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. Kinerja iBangga Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 58,67 pada tahun 2022 menjadi 75,30 pada tahun 2025. Dengan demikian Kinerja iBangga Kabupaten Kebumen sudah mencapai kategori baik dengan nilai lebih dari 70.

Tabel 2.104.
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	NA	58,67	63,17	63,90	75,30

Sumber: Dinkes PPKB, 2025

i. Perhubungan

Pada urusan perhubungan, terdapat beberapa aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah antara lain penyediaan kelengkapan dan keselamatan jalan, pengaturan arus penumpang angkutan umum, kelayakan kendaraan umum dan penyediaan fasilitas terminal.

1) Kelengkapan dan Keselamatan Jalan

Kondisi Ideal pada jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 38,43% pada tahun 2021 menjadi 63,67% pada tahun 2025.

Tabel 2.105.
Kondisi Kelengkapan dan Keselamatan Jalan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Data kecelakaan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kab/kota (%)	38,43	53,99	59,23	60,67	63,67
2.	Jumlah kecelakaan (kejadian)	649	895	1.039	1.178	1.088
3.	Korban Meninggal (orang)	129	148	140	140	144
4.	Korban luka berat (orang)	0	0	0	0	0
5.	Korban luka ringan (orang)	760	1.017	1.189	1.373	1.360
6.	Kerugian Material (rupiah)	160.365.000,00	370.500.000,00	760.000.000,00	821.100.000,00	609.700.000,00

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen dan Polres Kebumen, 2025

Namun demikian angka kecelakaan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 649 kejadian pada tahun 2021 menjadi 1.178 kejadian pada tahun 2024 tetapi turun kembali pada tahun 2025 sebesar 1.088. Angka kecelakaan ini terjadi tidak hanya di ruas jalan kabupaten, tapi juga ruas jalan nasional, provinsi hingga desa. Korban meninggal juga cenderung meningkat dari 129 orang pada tahun 2021 menjadi 144 orang pada tahun 2025. Begitu juga dengan korban luka ringan cenderung meningkat dari 760 orang pada tahun 2021 menjadi 1.360 orang pada tahun 2025. Kerugian material akibat kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan dari Rp 160.365.000,00 pada Tahun 2021 hingga mencapai Rp 821.100.000,00 pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi Rp 609.700.000,00 pada tahun 2025. Beberapa faktor penyebab kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1. Faktor manusia.
   Tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya masih rendah dalam berlalu lintas dengan baik dan menaati aturan.
2. Faktor Sarana dan Prasarana.
   Pada umumnya jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten dan desa yang rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang berlubang, bergelombang dan minim rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan utamanya ketika malam hari.

2) Infrastruktur Terminal

Infrastruktur terminal di Kabupaten Kebumen masih mengelola transportasi lokal. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan terminal bus tipe C di Kabupaten Kebumen berjumlah 3 terminal dan 1 terminal tipe A.

Masih belum optimalnya pengoperasian terminal menjadi tantangan yang harus diselesaikan yaitu: sepinya penumpang, kuantitas dan kualitas armada, dan manajemen angkutan secara menyeluruh yang perlu dilakukan penataan. Kondisi infrastruktur terminal di Kabupaten Kebumen pada kondisi kurang memadai sehingga perlu perbaikan. Saat ini baru terminal Tipe C Kebumen yang terintegrasi dengan pasar pagi sehingga fungsinya kurang optimal. Data terminal bus di Kabupaten Kebumen secara lengkap tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Persebaran Terminal Tipe A, B, dan C
di Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Uraian	Tipe A		Tipe B		Tipe C	
		Jml	Lokasi	Jml	Lokasi	Jml	Lokasi
1	Persebaran Terminal	1	Kec. Kebumen	-	-	3	Kec. Kebumen 1 lokasi, Kec. Karanggayam 1 lokasi, Kec. Gombong 1 lokasi,

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel 2.107.
Data Produksi Terminal Tipe C Tahun 2021 -2025

No	Angkutan umum	2021	2022	2023	2024	2025
Data Produksi Terminal Tipe C (Kunjungan Angkutan per hari)						
1	Terminal Tipe C Kebumen	18	28	23	21	19
2	Terminal Tipe C Gombong	26	31	36	30	28
3	Terminal Tipe C Karanggayam	4	7	6	4	4
Jumlah		48	66	65	55	51
Data Produksi Terminal Tipe C (Jumlah Penumpang per hari)						
1	Terminal Tipe C Kebumen	80	103	91	78	60
2	Terminal Tipe C Gombong	90	124	107	86	90
3	Terminal Tipe C Karanggayam	30	44	37	31	20
Jumlah		200	271	235	195	170

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Kunjungan angkutan per hari di terminal tipe C Kebumen pada tahun 2025 paling banyak di terminal Gombong 28 angkutan per hari diikuti Terminal Kebumen 19 angkutan per hari. Sedang terminal Karanggayam kunjungan bus per hari sejumlah 4 angkutan. Sedikitnya dan semakin turunnya kunjungan bus dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh berkurangnya armada dan trayek bus yang ada. Selain itu bila dilihat dari penumpang yang menggunakan angkutan umum di

terminal juga cenderung menurun sejak tahun 2022 yaitu sebanyak 271 penumpang menjadi hanya 170 penumpang di tahun 2025. Penurunan ini diakibatkan persaingan antar armada khususnya beroperasinya perusahaan bus yang memiliki terminal sendiri serta persaingan dengan moda kereta api.

3) Angkutan Umum

Jumlah angkutan umum di Kabupaten Kebumen terus mengalami penurunan dari 1.746 pada tahun 2021 menjadi hanya 496 unit di tahun 2025. Bersamaan dengan itu, jumlah izin trayek juga mengalami penurunan dari 85 trayek di 2022 menjadi 36 trayek di tahun 2025.

Tabel 2.108.
Jumlah Izin Trayek di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah angkutan umum	1.746	1.472	887	594	496
2	Jumlah izin trayek	37	85	35	35	36

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

Penurunan angkutan penumpang dan kepemilikan izin trayek disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai kendaraan pribadi baik sepeda motor atau mobil serta persaingan dengan layanan transportasi berbasis daring. Selain itu, terdapat penyesuaian kepemilikan yang semula milik perorangan menjadi badan hukum dan pembatasan usia kendaraan angkutan umum serta pembaruan sistem pelayanan perizinan menjadi faktor penurunan jumlah angkutan umum dan jumlah izin trayek di Kabupaten Kebumen. Untuk mengatasi keterbatasan layanan angkutan yang ada di Kabupaten Kebumen, Pemerintah Kabupaten Kebumen sejak tahun 2023 menyediakan moda transportasi Trans Kebumen namun hanya melayani rute Kebumen-Prembun sebanyak 2 unit dan Kebumen-Gombong sebanyak 2 unit. Diharapkan dengan pengadaan tersebut akan membantu pelayanan masyarakat di bidang transportasi yang nyaman, murah dan representatif guna mendukung angkutan yang terintegrasi. Untuk itu perlu disusun perencanaan jangka panjang untuk mewujudkan sarana transportasi kebumen yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan dalam bentuk dokumen rencana induk transportasi Kebumen.

Sementara itu, adanya layanan angkutan umum berbasis daring yang lebih tersedia dan tepat waktu dalam perkembangannya ke depan perlu diintegrasikan dengan angkutan umum bertrayek, yaitu angkutan umum berbasis daring untuk difokuskan pada wilayah-wilayah yang belum terdapat trayek. Layanan angkutan umum berbasis daring juga perlu dioptimalkan karena dapat membuka lapangan kerja bagi pengendara maupun pelaku UMKM dengan adanya layanan antar jemput. Kehadiran layanan angkutan umun berbasis daring juga dapat

mengisi *gap* konektivitas layanan angkutan umum bertrayek di Kabupaten Kebumen ini.

Dalam rangka menunjang keamanan dan kenyamanan transportasi publik, maka dilakukan uji KIR pada kendaraan umum untuk menjamin persyaratan dan kelayakan kendaraan. Jumlah uji KIR angkutan umum terus menurun dari 7.655 unit pada tahun 2021 menjadi hanya 5.880 unit pada tahun 2025 dikarenakan semakin menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi. Cakupan kepemilikan KIR angkutan umum mengalami penurunan dari 47,10% pada tahun 2021 hingga mencapai 41,10% pada tahun 2024, dan 34,00% pada tahun 2025.

Tabel 2.109.
Kondisi Uji KIR di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah uji KIR angkutan umum (unit)	7.655	7.571	6.749	4.414	5.880
2	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	47,10	45,10	46,70	41,10	34,00

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

4) Stasiun dan Perlintasan Kereta Api

Jumlah stasiun kereta api di Kabupaten Kebumen sebanyak 6 stasiun terdiri dari Stasiun Ijo, Stasiun Gombong, Stasiun Karanganyar, Stasiun Kebumen, Stasiun Kutowinangun, dan Stasiun Prembun. Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Nomor: KP.004/1/23/DJKA/2022 tanggal 25 April 2022, tentang Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang, dimana DAOP diamanatkan untuk menutup perlintasan sebidang KA yang belum ada palang pintu tidak terjaga yang rawan kecelakaan.

Jumlah Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 tercatat sebanyak 51 titik. Pada tahun 2022 jumlah tersebut berkurang menjadi 46 titik seiring dengan penutupan 5 titik perlintasan, yaitu 2 titik di Keceme, 1 titik di Sidomukti (Ambal), 1 titik di Panjer (Kebumen), dan 1 titik di Prembun. Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah perlintasan kembali berkurang menjadi titik akibat penutupan 4 titik, yakni Simpang Lima Pejagoan (1 titik), Gombong (1 titik), Kaligawe (1 titik), dan Prembun Timur (1 titik). Pada tahun 2024, jumlah perlintasan Kereta Api kembali berkurang 1 titik, yaitu di Panjer, karena adanya penutupan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) (Daop setempat). Dengan demikian, hingga tahun 2025 jumlah perlintasan Kereta Api di Kabupaten Kebumen menjadi 40 titik, dengan rincian sebagai berikut: dijaga oleh PT KAI sebanyak 18 titik; dijaga oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sebanyak 18 titik; tidak dijaga sebanyak 2 titik, yaitu Sidoagung (Sruweng) dan Krubungan Barat; serta dijaga secara swadaya oleh pemerintah desa sebanyak 1 titik, yaitu Krubungan Timur.

Saat ini juga sedang berproses pengajuan pembukaan perlintasan Kereta Api di Desa Mekarsari sesuai dengan ketentuan dan koordinasi bersama pihak terkait.

j. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di tingkat Kabupaten Kebumen mendapatkan tugas untuk mengotimalkan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat pemerintah dalam rangka peningkatan dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penilaian indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian PAN RB pada tiap tahunnya yaitu terkait kemudahan dan kenyamanan yang diterima pengguna SPBE. Semakin tinggi tingkat kematangan layanan SPBE menunjukkan semakin mudah dan nyaman bagi pengguna SPBE dalam menerima layanan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh instansi pusat dan daerah. Dalam hal ini, sistem aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna SPBE secara daring. Indeks SPBE Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari 3,05 atau kategori baik pada tahun 2021 menjadi 4,07 atau telah masuk kategori sangat baik pada Tahun 2024 tetapi pada tahun 2025 tidak dilakukan perhitungan karena sedang pada masa transisi menjadi indikator Evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI). Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan pelayanan publik berbasis *e-government* perlu terus dilakukan peningkatan jangkauan *fiber* optik untuk mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Kebumen, kualitas dan kuantitas sarana teknologi informasi (*server*, sarana dan prasarana), serta profesionalitas SDM dalam bidang IT baik di Diskominfo maupun perangkat daerah.

Selain itu, akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada Tahun 2024 telah mencakup 89,41% naik menjadi 93,71% pada Tahun 2025. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.

Tabel 2.110.
Profil Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 - 2025

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks SPBE	3,05	3,44	3,70	4,07	NA
	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	NA

URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Rumah Tangga dengan akses internet (%)	80,77	90,82	82,31	89,41	93,71

Sumber: BPS dan Diskominfo Kabupaten Kebumen, 2025

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran besar sekaligus penting dalam perekonomian Kabupaten Kebumen karena sebagian besar sektor usaha adalah usaha mikro, kecil hingga menengah. Koperasi dan UKM juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi berbagai lapisan masyarakat termasuk perempuan dan pekerja informal. Koperasi dan UKM membantu menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan mandiri serta mendorong kewirausahaan masyarakat. Status pekerjaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan orang yang berusaha dibantu buruh tetap cukup fluktuatif. Sempat meningkat pada tahun 2022, namun kemudian menurun hingga tahun 2024 dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 25.223 orang. Orang yang berusaha dibantu buruh tetap adalah jenis usaha yang mempekerjakan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan memiliki jaminan kerja secara berkelanjutan, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan usaha maupun tidak/belum berbentuk badan usaha. Hal ini berdampak terhadap rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang sempat mencapai 4,06% pada tahun 2022, kemudian terus menurun hingga tahun 2024 dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 2,96%.

Sementara itu, peningkatan kinerja koperasi di Kabupaten Kebumen juga terus dilakukan. Cakupan koperasi aktif cenderung meningkat dari 89,4% pada tahun 2021 menjadi 89,80% pada Tahun 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi. Sementara itu, nilai volume usaha koperasi juga terus meningkat dari sekitar Rp 175 Milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 608 Milyar pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan rasio nominal volume usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen yang cenderung meningkat dari 0,59% pada tahun 2021 menjadi 1,46% pada tahun 2025. Sementara itu untuk pengembangan produk halal juga terus ditingkatkan setiap tahun dimana sampai dengan tahun 2025 sudah terdapat 24.652 produk tersertifikasi halal yang dimiliki oleh 20.488 pelaku usaha utamanya UMKM. Pengembangan produk halal diharapkan dpata membuka akses pasar yang lebih luas dimana dengan telah tersertifikasi halal diharapkan dapat lebih mudah masuk ke retail modern, *marketplace* nasional hingga ekspor serta menciptakan efek domino ke sektor lain seperti logistik halal, wisata halal dan kuliner halal dan meningkatkan

kepercayaan konsumen (sebagai daerah maupun negara mayoritas muslim).

Tabel 2.111.
Profil Kewirausahaan, Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No.	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Kewirausahaan (%)	2,21	4,06	2,17	1,18	2,96
2	Orang yang berusaha dibantu buruh tetap (orang)	13.693	26.698	17.641	10.129	25.223
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	89,4	89,00	90,02	90,17	89,80
4	Volume Usaha Koperasi (Rp.000)	175,553,541	145,589,701	309,067,425	544,399,151	608,075,259
5	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,59	0,45	0,86	1,41	1,46
6	Jumlah produk yang sudah tersertifikasi halal	47	554	9.809	6.723	7.519

Sumber: BPS, DisperindagKUKM, Kantor Kemenag Kabupaten Kebumen, 2025

I. Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Peran Investasi begitu penting karena merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan *output* dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dengan pertumbuhan investasi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian terutama usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kebumen.

Berdasarkan data PDRB dari sisi Pengeluaran menunjukkan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap total PDRB cenderung menurun dari 20,37% pada tahun 2021 menjadi 18,80% pada tahun 2025. Untuk itu upaya untuk mengoptimalkan investasi dan penanaman modal terus dilakukan utamanya investasi padat karya serta investasi dengan skala yang besar. Secara nominal realisasi investasi cenderung meningkat dari Rp.106,714 Milyar pada tahun 2021 menjadi Rp263.238 Milyar pada

tahun 2023, namun kemudian menurun hingga Rp.159,021 Milyar pada tahun 2025. Penurunan selaras dengan pergerakan realisasi penanaman modal dalam negeri, sedangkan realisasi penanaman modal asing mulai masuk ke Kabupaten Kebumen sejak tahun 2023 hingga mencapai Rp.31,096 Milyar pada Tahun 2025

Tabel 2.112.
Kinerja Investasi dan Penanaman Modal
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021		2022	2023	2024	2025
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	20,37		19,63	18,81	18,49	18,80
2	Realisasi Investasi (Rp Miliar)	106,714		135,572	263,238	238,272	159,021
3	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp.Miliar)	106,714	135,572	257,838		229,839	127,925
4	Realisasi Penanaman Modal Asing (Rp.Miliar)	0		0	5,400	8,433	31,096

Sumber: BPS dan DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan skala usaha selama periode Tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan investasi terbesar berada pada skala usaha besar dikarenakan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki aset dan omset secara nominal relatif besar yaitu perusahaan berbentuk preseroan terbatas dibandingkan skala usaha lainnya yang berupa UMKM. Sementara itu, berdasarkan sektoral menunjukkan kinerja investasi dan penanaman modal terbesar di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 masih pada sektor tersier yaitu mencapai Rp.603,4 Milyar. Sedangkan untuk sub sektor menunjukkan kinerja investasi dan penanaman modal terbesar pada Tahun 2025 adalah pada sub sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp.297,9 Milyar disusul sub sektor jasa lainnya sebesar Rp.248,1 Milyar dan sub sektor perikanan sebesar Rp.40,3 Milyar.

Tabel 2.113.
Kinerja Investasi dan Penanaman Modal berdasarkan Skala Usaha
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Skala usaha mikro	132,030	351,621	461,553	401,739	476,897
2	Skala usaha kecil	188,620	600,658	321,873	252,201	329,431

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
3	Skala usaha menengah	43,612	205,032	36,113	79,766	47,367
4	Skala usaha besar	292,222	1.185,991	897,400	1.640,790	573,315

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025

Tabel 2.114.
Kinerja Investasi dan Penanaman Modal per Sektor Kabupaten Kebumen Tahun 2025

SEKTOR	2025
PRIMER	84.7 M
Tanaman Pangan & Perkebunan	9.1 M
Peternakan	25.8 M
Kehutanan	0.0 JT
Perikanan	40.3 M
Pertambangan	9.4 M
SEKUNDER	66.8 M
Industri Makanan	36.3 M
Industri Tekstil	1.8 M
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	10.0 JT
Industri Kayu	3.5 M
Industri Kertas & Percetakan	800.7 JT
Industri Kimia & farmasi	2.1 M
Industri Karet dan Plastik	0.0 JT
Industri Mineral non Logam	0.0 JT
Industri Logam, Mesin & Elektronik	4.0 M
Industri Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam	0.0 JT
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	0.0 JT
Industri Lainnya	18.4 M
TERSIER	603.4 M
Listrik, Gas, dan Air	52.6 JT
Konstruksi	37.2 M
Perdagangan & Reparasi	297.9 M
Hotel dan Restoran	9.2 M
Transportasi, Gudang & Komunikasi	10.9 M
Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	0.0 JT
Jasa Lainnya	248.1 M

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2025

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan di Kabupaten Kebumen terus dioptimalkan. Jumlah organisasi kepemudaan terus berkembang mencapai 123 organisasi pada Tahun 2025 dengan terjadi peningkatan keaktifannya menjadi 43% dari sebelumnya 42%. Persentase wirausaha muda mengalami peningkatan hingga mencapai 3% di tahun 2025. Jumlah kegiatan olahraga cenderung terjadi peningkatan dari hanya 5 kegiatan pada tahun 2021 menjadi 8 kegiatan pada tahun 2025 yang menunjukkan masih minimnya kegiatan olahraga. Jumlah lapangan olahraga tetap sebanyak 1.268 unit yang digunakan untuk sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, tenis dan tenis meja. Gedung olahraga bertambah pada tahun 2022 menjadi 39 unit dari sebelumnya 37 unit yang arena futsal, gedung serba guna, kolam renang dan sasana tinju. Jumlah organisasi olahraga meningkat menjadi 42 organisasi pada tahun 2025 dengan prestasi olahraga yang juga terus meningkat sejak pasca Pandemi dari 16 prestasi pada tahun 2021 menjadi 44 prestasi di tahun 2025 yang berhasil diraih. Raihan ini melibatkan banyak atlet berprestasi yang terus meningkat dari 181 atlet pada tahun 2021 menjadi 228 atlet pada tahun 2025 berhasil meraih prestasi. Namun demikian kendala masih dihadapi khususnya dalam upaya pembibitan atlet dari usia dini atau muda.

Tabel 2.115.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	48	122	122	123	123
2	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	42	42	42	43	43
3	Persentase wirausaha muda	DATA BELUM TERSEDIA	4,68	2,40	2,40	3
4	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Olahraga	5	5	7	7	8
5	Jumlah Klub Olahraga	255	258	258	263	263
6	Lapangan Olah Raga	1031	1031	1031	1031	1.268
	Sepakbola	340	340	340	340	460
	Bola Voli	195	195	195	195	213
	Bola Basket	14	14	38	38	38
	Bulutangkis	232	232	110	110	191
	Tenis	36	214	236	236	32

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
	Meja Tenis Meja	214	214	214	214	278
7	Gedung Olahraga	37	39	39	39	39
	Futsal	20	20	20	20	20
	Gedung Serba Guna	6	6	7	7	7
	Kolam Renang	9	6	12	12	12
	Sasana Tinju	2	2	2	2	2
8	Jumlah Organisasi Olahraga	35	39	40	42	42
9	Jumlah prestasi olahraga	16	23	15	44	44
10	Jumlah atlit berprestasi	181	194	92	228	228

Sumber: Disdikpora Kabupaten Kebumen, 2025

n. Statistik

Data/informasi statistik (dokumen statistik) adalah salah satu instrumen analisis yang sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Ketersediaan dokumen statistik yang baik akan memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Namun demikian permasalahan utama yang dihadapi diantaranya adalah masih rendahnya kualitas pengelolaan data di seluruh perangkat daerah serta terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola dan penganalisis data. Pemanfaatan data statistik telah dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah maupun melakukan evaluasi pembangunan daerah yang telah mencapai 100% setiap tahunnya. Kabupaten Kebumen juga telah memiliki sistem data dan statistik yang terintegrasi yaitu aplikasi Satu Data Kebumen yang telah mendapatkan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah dengan setiap tahun telah mencapai 100% dalam mengisi *website* Satu Data sesuai dengan SOP. Dokumen data seperti Buku "Kabupaten Dalam Angka" dan "PDRB" juga selalu rilis oleh BPS sebagai sumber data. Namun demikian terdapat beberapa data penting yang tidak diterbitkan atau tidak ditebitkan setiap tahun oleh BPS untuk level kabupaten/kota seperti inflasi dan indeks gini, sub data/detail data agregat (seperti sub-sub sektor PDRB) serta data pada level hingga kecamatan atau desa.

Tabel 2.116.
Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kebumen, 2025

o. Persandian

Capaian urusan persandian Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari evaluasi tingkat keamanan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013 (standar keamanan informasi) serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk Kabupaten Kebumen yang meningkat dari 501 pada Tahun 2022 menjadi 506 pada Tahun 2023 namun turun kembali pada Tahun 2024 menjadi 504 tetapi naik Kembali di tahun 2025 yaitu sebesar 686 (cukup baik) dengan sertifikat Nomor: SERT.21782/BSSN/D3/KS.02.03/12/2025 tanggal 22 Desember 2025 sehingga bisa di katakan fluktuatif. Dengan nilai Indeks KAMI sesuai dengan pemenuhan kriteria SNI ISO/IEC 27001: 2022 maksimal 918 menunjukkan tingkat kesiapan dan kematangan kerangka kerja keamanan informasi yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pencapaian menuju kategori yang lebih tinggi. Sementara itu, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah atau telah mencapai 100% setiap tahunnya. Sedangkan penggunaan tanda tangan elektronik di tingkat desa dan kelurahan hingga tahun 2025 telah mencapai 454 desa dan kelurahan dari total 460 desa dan kelurahan. Untuk meningkatkan pencapaian indeks KAMI serta memaksimalkan penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dan tanda tangan elektronik maka diperlukan penguatan infrastruktur teknologi informasi, kesadaran keamanan informasi, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 2.117.
Kinerja Persandian Pemerintah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks KAMI	NA	501,00	506,00	504,00	686,00
2	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penggunaan tanda tangan elektronik di tingkat desa dan kelurahan (desa dan kelurahan)	182	268	377	434	454

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kebumen 2025

p. Kebudayaan

Pembangunan di bidang Kebudayaan sebagai amanat pemajuan kebudayaan sangat penting dilakukan untuk membangun kemandirian, harkat martabat, budi pekerti luhur bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan, dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Selain itu kebudayaan juga bisa diartikan sebagai segala hal yang kompleks, yang didalamnya berisikan kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, moral, adat istiadat serta keahlian ataupun ciri khas lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota dalam suatu masyarakat.

Keragaman budaya di Kabupaten Kebumen direpresentasikan dengan banyaknya kawasan cagar budaya yang masih dilestarikan. Cukup banyak ditemukan benda peninggalan sejarah yang bernilai historis tinggi. Sebagian benda tersebut sudah berhasil dikumpulkan dan diidentifikasi. Hal ini sebagai upaya peningkatan pemajuan kebudayaan yang bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan yang ada agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemajuan kebudayaan juga berfungsi untuk memperkaya identitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi budaya lokal. Sebagai fokus upaya pemajuan kebudayaan telah ditentukan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kebumen dalam Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Kebumen sebagai berikut.

a. Manuskrip

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, "Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, objek pemajuan kebudayaan manuskrip pada tahun 2018 berjumlah 5 (lima) objek dan pada tahun 2025 berjumlah 9 (sembilan) objek sebagai berikut.

Tabel 2.118.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Berupa Manuskrip

NO	NAMA OBJEK	BAHASA/AKSARA	BAHAN	KETERANGAN
1	Babad Arungbinang	Jawa	Kertas Eropa	Tulis Tangan/Carik
2	Serat Lokapala	Jawa	Kertas Eropa	Tulis Tangan/Carik
3	Arab Pegon Somalangu	Arab Pegon	Kertas	Tulis
4	Syekh Anom Sidakarsa	Arab	Kertas	Tulis
5	Adege' Masjid Ambal	Jawa	Kertas	Tulis
6	Serat Menak	Jawa/Arab Pegon	Kertas Eropa	Tulis Tangan/Carik
7	Serat Siti Dusun	Jawa	Kertas Eropa	Tulis Tangan/Carik (Perpusnas)
8	Serat Yatna Tama (Babad Kutowinangun)	Jawa	Kertas Eropa	
9	Serat Nitik Mangkunegaran	Jawa	Kertas Eropa	Tulis Tangan/Carik

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

b. Tradisi Lisan

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, "Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, objek pemajuan kebudayaan tradisi lisan pada tahun 2018 berjumlah 1 (satu) objek dan pada tahun 2025 berjumlah 10 (sepuluh) objek sebagai berikut.

Tabel 2.119.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Berupa Tradisi Lisan

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	JENIS
1.	Jemblung	Puring, Ayah	Rapalan
2.	Lengger Sumirah	Karanggayam	Cerita rakyat
3.	Nawang Wulan	Kutowinangun	Cerita rakyat
4.	Gamawijaya	Ambal	Sejarah lisan
5.	Pandan Kuning	Petanahan	Cerita rakyat
6.	Perawan Sunthi	Rowokele	Cerita rakyat
7.	Stana Ronggeng	Rowokele	Cerita rakyat
8.	Kadipaten Kaleng	Puring	Sejarah lisan
9.	Raden Kamandaka Ayah	Cerita rakyat	

NO	NAMA OBJEK	LOKASI	JENIS
10.	Macapat	Kebumen	Rapalan

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

c. Adat istiadat

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, objek pemajuan kebudayaan adat istiadat pada tahun 2018 berjumlah 4 (empat) objek dan pada tahun 2025 berjumlah 28 (dua puluh delapan) objek yaitu:

Tabel 2.120.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Berupa Adat Istiadat

NO	NAMA OBJEK	LOKASI
1.	Nyadran	Kebumen
2.	Wiwit Panen	Karanggayam
3.	Cekokan	Kebumen
4.	Memetri Bumi	Kebumen
5.	Grebek Rolasan	Ambal
6.	Ingkungan Syuran	Panjer, Kebumen
7.	Sedekah Laut	Mirit, Ambal, Puring, Ayah, Petanahan, Buayan
8.	Palakiyah	Karanggayam
9.	Jolenan	Mirit
10.	Cowongan	Buayan
11.	Krapyakan	Rowokele, Kutowinangun
12.	Grebek Bocah Angon	Ambal
13.	Pasar Senggol	Selang, Kebumen
14.	Ngunduh Sarang Burung Lawet	Buayan
15.	Megunungan	Karangsambung
16.	Lawean	Somalangu, Kebumen
17.	Likuran	Kebumen
18.	Kirab Pusaka	Karanganyar
19.	Brokohi	Kebumen
20.	Lawang Kori	Petanahan
21.	Nglamar Mayit	Sruweng
22.	Jabel	Sruweng
23.	Menthak Menthik	Ambal
24.	Pitung Dinanan Badan	Buluspesantren
25.	Kirab Budaya & Gunungan Kabumian	Kebumen

NO	NAMA OBJEK	LOKASI
26.	Kenduren	Kebumen
27.	Tenongan	Kebumen
28.	Punggahan	Kebumen

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

d. Ritus

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pada tahun 2018 objek pemajuan kebudayaan ritus berjumlah 5 (lima) dan pada tahun 2025 berjumlah 11 (sebelas) objek yaitu:

Tabel 2.121.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Ritus

NO	NAMA OBJEK	ETNIS PELAKU BUDAYA	LOKASI
1.	Ngupati	Jawa	Kebumen
2.	Mitoni	Jawa	Kebumen
3.	Puputan	Jawa	Kebumen
4.	Kathina Puja	Jawa	Kebumen
5.	Dun dunan/Tedak Siten	Jawa	Kebumen
6.	Jamasan Pusaka	Jawa	Kebumen
7.	Panggih Penganten	Jawa	Kebumen
8.	Sesaji	Jawa	Kebumen
9.	Larung	Jawa	Kebumen
10.	Ruwat Bumi	Jawa	Kebumen
11.	Ruwat Dadung	Jawa	Peniron, Pejagoan

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

e. Pengetahuan Tradisional

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pada tahun 2018 terdapat 1 (satu) objek

pemajuan kebudayaan pengetahuan tradisional dan pada tahun 2025 terhimpun 37 (tiga puluh tujuh) objek yaitu:

Tabel 2.122.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Pengetahuan Tradisional

NO	NAMA OBJEK	JENIS
1.	Anyaman pandan	Kerajinan
2.	Anyaman bambu	Kerajinan
3.	Anyaman sabut kelapa	Kerajinan
4.	Gerabah	Kerajinan
5.	Penjor	Kerajinan
6.	Pembuatan wayang kulit	Kerajinan
7.	Pembuatan wayang golek	Kerajinan
8.	Pembuatan topeng cepetan	Kerajinan
9.	Batik Kebumenan	Busana
10.	Tenun Seboro	Busana
11.	Kerokan	Metode Penyehatan
12.	Pijet	Metode Penyehatan
13.	Sipatan	Metode Penyehatan
14.	Adus banyu anget krakal	Metode penyehatan
15.	Kethek	Makanan Tradisional
16.	Serabi bumenan	Makanan tradisional
17.	Jipang kacang	Makanan tradisional
18.	Emping melinjo	Makanan tradisional
19.	Lanthing	Makanan Tradisional
20.	Sate ambal	Makanan tradisional
21.	Cucur	Makanan Tradisional
22.	Nasi penggel	Makanan tradisional
23.	Tahu krakal	Makanan tradisional
24.	Meniran	Makanan Tradisional
25.	Tumtuman	Makanan Tradisional
26.	Sega megana	Makanan tradisional
27.	Lemper	Makanan Tradisional
28.	Madu klanceng	Minuman tradisional
29.	Kopi yuam Ambal	Minuman tradisional
30.	Kopi gemplong Karanggayam	Minuman tradisional
31.	Wedang uwuh	Minuman tradisional
32.	Wedang ronde	Minuman tradisional
33.	Dewandaru	Pengetahuan tradisional
34.	Pranata bintang	Pengetahuan tradisional
35.	Pranata mangsa	Pengetahuan tradisional
36.	Pawang hujan	Pengetahuan tradisional
37.	Jamu	Pengobatan tradisional

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

f. Teknologi Tradisional

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 terdapat 32 (tiga puluh dua) objek pemajuan kebudayaan teknologi tradisional dan pada tahun 2025 terdapat 35 (tiga puluh lima) objek yaitu:

Tabel 2.123.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Teknologi Tradisional

NO	NAMA OBJEK	LOKASI
1.	Irus	Kebumen
2.	Pecut Jaweranan Jowo	Kebumen
3.	Alu	Kebumen
4.	Barongan Jaranan Jowo	Kebumen
5.	Cikrak	Kebumen
6.	Gamelan Jaranan Jowo	Kebumen
7.	Gapura	Kebumen
8.	Garu	Kebumen
9.	Kentongan	Kebumen
10.	Kendhil	Kebumen
11.	Kelir Ketoprak	Kebumen
12.	Kenthongan	Kebumen
13.	Kepang Jaranan	Kebumen
14.	Keris	Kebumen
15.	Lesung	Kebumen
16.	Pecut Jaranan	Kebumen
17.	Arit	Kebumen
18.	Gejig	Kebumen
19.	Sekop	Kebumen
20.	Shotel	Kebumen
21.	Srumbung	Kebumen
22.	Talang	Kebumen
23.	Tampah	Kebumen
24.	Tikar	Kebumen
25.	Telenan	Kebumen
26.	Topeng Cepetan	Kebumen
27.	Tumbu	Kebumen

NO	NAMA OBJEK	LOKASI
28.	Tungku Perapian	Kebumen
29.	Ublik	Kebumen
30.	Unduk	Kebumen
31.	Usuk	Kebumen
32.	Welit	Kebumen
33.	Wuwu	Kebumen
34.	Rumah Adat Jawa	Ambal, Sempor
35.	Paesan Makam	Watulawang

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

g. Seni

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, seni film, seni musik, dan seni media". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) objek pemajuan kebudayaan seni dan pada tahun 2025 terdapat 24 (dua puluh empat) objek yaitu:

Tabel 2.124.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Kesenian

NO	NAMA OBJEK	JENIS KESENIAN
1.	Lengger Calung	Seni Tari
2.	Kuda Lumping	Seni Tari
3.	Liong Jawa	Seni Tari
4.	Menthiet	Seni Tari
5.	Wayang Kulit	Seni Pertunjukan
6.	Teater	Seni Pertunjukan
7.	Menoreng	Seni Pertunjukan
8.	Ketoprak	Seni Pertunjukan
9.	Ndolalak	Seni Pertunjukan
10.	Wayang Golek	Seni Pertunjukan
11.	Jemblung	Seni Pertunjukan
12.	Menthiet	Seni Pertunjukan
13.	Rebana	Seni Musik
14.	Jamjaneng	Seni Musik
15.	Karawitan	Seni Musik
16.	Campursari	Seni Musik
17.	Calung	Seni Musik
18.	Keroncong	Seni Musik

NO	NAMA OBJEK	JENIS KESENIAN
19.	Tek-Tek	Seni Musik
20.	Hadroh	Seni Musik
21.	Kentongan	Seni Musik
22.	Angklung	Seni Musik
23.	Gambus	Seni Musik
24.	Rodad	Seni Musik

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

Terdapat 24 (dua puluh empat) seni yang terdiri dari 4 (empat) jenis seni tari, 8 (delapan) jenis seni pertunjukan, dan 12 (dua belas) jenis seni musik. Objek pemajuan kebudayaan seni tersebut terdiri dari seni tradisional dan seni modern yang berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat Kabupaten Kebumen.

h. Bahasa

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, terdapat 1 (satu) objek pemajuan kebudayaan bahasa pada tahun 2018 dan pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) objek yaitu:

Tabel 2.125.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Bahasa

NO	NAMA OBJEK	KONDISI
1.	Bahasa Ngapak Kebumenan	Masih digunakan untuk komunikasi sehari-hari
2.	Bandhek Mirit	Digunakan sehari-hari di daerah Mirit

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

i. Permainan Rakyat

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Permainan rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai terntentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pada tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) objek pemajuan kebudayaan permainan rakyat dan pada tahun 2025 terdapat 23 (dua puluh tiga) objek yaitu:

Tabel 2.126.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Permainan Rakyat

NO.	NAMA OBJEK
1.	Lowok
2.	Pande
3.	Sunda Manda
4.	Gobak Sodor
5.	Bentik
6.	Bentengan
7.	Ular Tangga
8.	Dir Diran
9.	Kar Karan
10.	Umbul
11.	Brek
12.	Sempringan
13.	Bola bekel
14.	Lumbungan
15.	Bencen
16.	Blodor
17.	Lithungan
18.	Tulupan
19.	Layangan
20.	Yoyo
21.	Panggal
22.	Sigok
23.	Seredan

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

j. Olahraga Tradisional

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, "Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, beladiri, pasola, lompat batu, dan debus". Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) objek pemajuan kebudayaan olahraga tradisional dan pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) objek yaitu:

Tabel 2.127.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Olahraga Tradisional

NO	NAMA OBJEK	LOKASI
1.	Pacuan Kuda	Ambal
2.	Kasti	Kebumen
3.	Dagongan	Kebumen
4.	Eggrang	Kebumen
5.	Pencak	Kebumen
6.	Tarik tambang	Kebumen
7.	Balap Karung	Kebumen

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

k. Cagar Budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah warisan budaya kebendaan yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, mencakup benda, bangunan, struktur, situs, serta kawasan cagar budaya. Pelestariannya dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dengan tujuan menjaga identitas bangsa dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025 terdapat 16 (enam belas) objek yaitu:

Tabel 2.128.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Berupa Cagar Budaya

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	PEMERINGKATAN	TANGGAL PENETAPAN
1.	Bangunan Djawatan Kesehatan Tentara Gombong	Jalan Gereja Nomor 17 Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen 54411	SK Nomor 432/132/2021	Daerah Kabupaten	3 Maret 2021
2.	Bangunan Gudang di Kompleks SMPN 1 Prembun	Jalan Slamet Riyadi Nomor 11, Desa Ngeposan, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen 54394	SK Nomor 420/413/2021	Daerah Kabupaten	16 November 2021
3.	Struktur Makam Tumenggung Kolopaking	Dukuh Kuncen, Desa Kalijerek, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/765/2024	Daerah Kabupaten	23 Agustus 2024
4.	Struktur Makam R.A.A. Tirtokoesoemoe	Desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/758/2024	Daerah Kabupaten	23 Agustus 2024

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	PEMERINGKATAN	TANGGAL PENETAPAN
5.	Struktur Punden Berundak Lurah Karsa	Dusun Watukurung, Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/756/2024	Daerah Kabupaten	23 Agustus 2024
6.	Benteng Van Der Wijck	Sidayutengah, Sidayu, Kec. Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54416	Permen Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010	Nasional	22 Juni 2010
7.	Makam Ki Ageng Bodronolo	Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/760/2024	Daerah Kabupaten	23 Agustus 2024
8.	Makam K.R.A.A. Poerbanegara	Desa Bener Wetan, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/759/2024	Daerah Kabupaten	23 Agustus 2024
9.	Lingga-Yoni	Halaman TK Sumberadi Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/751/2024	Daerah Kabupaten	23 Agustus 2024
10.	Masjid Jami' Saka Tunggal	Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.2/525/2023	Daerah Kabupaten	28 Desember 2023
11.	Makam Keluarga Kertanegara Banjak Wide	Desa Pekuncen, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/191/2025	Daerah Kabupaten	08 Juli 2025
12.	Jembatan Tembana	Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/193/2025	Daerah Kabupaten	08 Juli 2025
13.	Makam Syech Anom Sidakarsa	Desa Grogrobeningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/194/2025	Daerah Kabupaten	08 Juli 2025
14.	Makam Mbah Lancing	Desa Mirit, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/192/2025	Daerah Kabupaten	08 Juli 2025
15.	Gereja Kristen Jawa Kebumen	Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/332	Daerah Kabupaten	02 Oktober 2025
16.	Rumah Dinas Dokter (Eks RSUD dr. Soedirman Kebumen)	Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen	SK Nomor 400.6.1/333	Daerah Kabupaten	02 Oktober 2025

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

l. Objek Diduga Cagar Budaya

Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang memiliki indikasi memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya, tetapi belum secara resmi ditetapkan dalam Register Nasional, dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk penetapannya. ODCB ini berpotensi memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, seperti artefak kuno, bangunan bersejarah, situs arkeologis, atau lanskap budaya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025 terdapat 118 (seratus delapan belas) objek yaitu:

Tabel 2.129.
Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Kebumen
Berupa Objek Diduga Cagar Budaya

NO	NAMA OBJEK	ALAMAT
1	Masjid Agung Al Mustofa	Ambal
2	SDN 1 Ambalresmi	Ambal
3	Makam Kertinegoro	Alian
4	Makam Tang Peng Nio	Alian
5	Makam Sabdoguno	Alian
6	Sumber Air Panas Komplek PAP Krakal	Alian
7	Bangunan Mercu Suar	Ayah
8	Benteng Pendem Jepang	Ayah
9	Situs Batu Kalbut	Ayah
10	Watu Kelir	Ayah
11	Pesanggrahan Karangbolong	Buayan
12	Batu Lumpang	Buayan
13	Watu Celeng	Buluspesantren
14	Watu Lumpang	Buluspesantren
15	Urut Sewu Syeh Maulana Baharudin	Buluspesantren
16	Gedung Ruang Kelas SMPN 1 Gombong	Gombong
17	Gedung SMPN 2 Gombong	Gombong
18	Komplek Rumah DKT Gombong	Gombong
19	Masjid Nurul Huda	Gombong
20	Rumah Budaya Martatilaar	Gombong
21	Gedung SMAN 1 Gombong	Gombong
22	Stasiun Gombong	Gombong
23	Tempat Ibadah Aliran Kepercayaan Wonomarto	Gombong
24	Klenteng Hok Tek Bio / Tri Darma	Gombong
25	Bangunan eks SDN 1 Wanareja Karanganyar	Karanganyar
26	Masjid Besar Al. Mujahidin Kauman	Karanganyar
27	Makam Syeh Baribin	karanganyar
28	Stasiun Karanganyar	Karanganyar
29	Pesarean Mbah Kyai Baedlowi	Karanganyar

NO	NAMA OBJEK	ALAMAT
30	Pesarean Kyai H.Mohamad Rachmanoedin	Karanganyar
31	Bukit Cemara	Karanganyar
32	Makam Untung Suropati	Karanggayam
33	Rumah Pusaka Untung Suropati	Karanggayam
34	Makam Mbah Agung Kajoran	Karanggayam
35	Punden Pager Jawa	Karanggayam
36	Makam Hastrosuto / Makam Kyai Wangsit	Karanggayam
37	Makam Danang Sutowijoyo	Karangsambung
38	Gedung Bale Desa	Karangsambung
39	Makam Syech Abdul Kahfi Awal	Kebumen
40	Makam Sunan Geseng	Kebumen
41	Situs Trasidi	Kebumen
42	Bangunan SMPN 7 Kebumen	Kebumen
43	Gedung A Kompleks Setda Kebumen	Kebumen
44	Makam Ngabdurohim	Kebumen
45	Makam Syeh Asmorokondi	Kebumen
46	Masjid Ki Singapatra dan Ki Ageng Sunan Geseng	Kebumen
47	Bangunan Baledesa	Kebumen
48	Patung Ganesha SMPN 1 Kebumen	Kebumen
49	Masjid Darusalam	Kebumen
50	Klenteng Kong Hw Kiong	Kebumen
51	Masjid Agung Kebumen	Kebumen
52	Stasiun Kebumen	Kebumen
53	Marga Ewuh	Klirong
54	Pabrik Exs Sarinabati	Kutowinangun
55	Makam Maduseno	Kutowinangun
56	Makam Bumidirjo	Kutowinangun
57	Makam Aroengbinang	Kutowinangun
58	Martabatab Bulupitu	Kutowinangun
59	Makam Simbah Kyai Joyo Niman	Kutowinangun
60	Makam Nyi Dewi Roro Wangen/Mbah Lanjar	Kutowinangun
61	Makam Simbah Kyai Selondoko	Kebumen
62	Petilasan Simbah Kyai Sunan Geseng	Kebumen
63	Makam Kyai Sabarudin	Padureso
64	Makam Kuwu	Pejagoan
65	Masjid Legok	Pejagoan
66	Makam Syeh Abdul Fatah	Petanahan
67	Pesanggrahan Pandan Kuning	Petanahan
68	Lawang Kori	Petanahan
69	Makam Syeh Abdul Awal	Petanahan
70	Sumur Tua Makam Syeh Anom Sidakarsa	Petanahan
71	Makam	Petanahan
72	Makam Kyai Geseng	Prembun

NO	NAMA OBJEK	ALAMAT
73	Makam Lamdaur	Prembun
74	Makam Mbah Si luh	Prembun
75	Pendopo Kawedanan	Prembun
76	Rumah Loji	Prembun
77	Kantor Polsek Prembun	Prembun
78	Makam Mbah Geleg	Prembun
79	Makam Wirokerti	Puring
80	Makam Sironggeng / Setana Ronggeng	Rowokele
81	Punden Mas Sigit	Rowokele
82	Makam Mbah Legok/Mbah Nur Daiman	Rowokele
83	Trowongan Ijo	Rowokele
84	Punden Mbah Merdayu	Rowokele
85	Punden Mbah Mbatur / Mangku Bumi	Rowokele
86	Makam Mbah Cirebon	Rowokele
87	Makam Mbah Suro	Rowokele
88	Panembahan Mbah Klenteng	Rowokele
89	Panembahan Mbah Wanalela	Rowokele
90	Petilasan Mbah Puser	Rowokele
91	Panembahan Situ Budha	Rowokele
92	Panembahan Ronggeng	Rowokele
93	Makam Mbah Wanaita alias Pandita Rukmin Alias Ageng Mangir	Rowokele
94	Petilasan Mbah Depok	Rowokele
95	Makam Mbah Banda Yuda	Rowokele
96	Makam Mbah Legok/Mbah Nur Daiman	Rowokele
97	Makam Mbah Kla Ang	Rowokele
98	Makam Mbah Diparota	Rowokele
99	Makam Mbah Prawan Sunti	Rowokele
100	Makam Mbah Truna Wedana Alias Cawedana	Rowokele
101	Makam Mbah Capati	Rowokele
102	Makam Mbah Wiradana	Rowokele
103	Punden Jati Teken	Rowokele
104	Tabat Mbah Singa Yudha	Rowokele
105	Tabat Eyang Nur Ahmad / Mbah Gembel	Rowokele
106	Makam Suyudono	Sempor
107	Makam Teropong Roma	Sempor
108	Makam Diposuro	Sempor
109	Makam Sukadis	Sempor
110	Paseban Sultan Kejawang	Sruweng
111	Makam Panjer	Sruweng
112	Masjid Karangjambu	Sruweng
113	Pesanggrahan Sultan Pangeran Diponegoro	Sruweng
114	Patung Ganesha	Sruweng

NO	NAMA OBJEK	ALAMAT
115	Makam Mbah Trunojoyo	Sruweng
116	Makam Syekh Rosyid	Puring
117	Tugu Peringatan Sidobunder	Puring
118	Topeng Pesek	Sruweng

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wahana penyediaan bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Kualitas bahan pustaka dan kuantitas perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna. Hal ini juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Walaupun relatif masih rendah, pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini tercermin dari tingkat pemanfaatan perpustakaan yang terus membaik dari hanya 25,35% pada Tahun 2021 menjadi 32,21% pada Tahun 2025. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat terus dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang terus meningkat dari 12,85 pada Tahun 2021 hingga menjadi 18,95 pada Tahun 2023 namun turun menjadi 17,46 pada Tahun 2025. Sedangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat dari 0,99 pada Tahun 2021 menjadi 1,05 pada Tahun 2025.

Sementara itu, jumlah kunjungan *onsite* dan *online* di Perpustakaan Daerah Kabupaten Kebumen juga terus meningkat dari 270.777 orang pada Tahun 2021 menjadi 315.280 orang pada Tahun 2025. Hal ini didukung dengan penyediaan sebanyak 45.563 koleksi buku dan 30.477 koleksi judul buku serta 283 pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang telah memiliki sertifikat hingga Tahun 2025.

Tabel 2.130.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat pemanfaatan Perpustakaan (%)	25,35	29,42	29,71	31,45	32,21
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	12,85	18,69	18,85	16,91	17,46

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,99	0,99	1,02	1,03	1,05
4	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	270,777	278,174	290.399	307.633	315.280
5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	45.844	47.344	43.940	44.426	45.563
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	27.242	27.992	29.036	29.276	30.477
7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	141	229	283	283*

Sumber: Disarpus Kabupaten Kebumen, 2025
**) Data Tahun 2024*

r. Kearsipan

Kegiatan kearsipan memiliki peranan penting dalam kelancaran pelaksanaan keorganisasian baik sebagai sumber informasi maupun pusat ingatan bagi organisasi itu sendiri sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pengelolaan pengarsipan di Kabupaten Kebumen terus meningkat tercermin dari peningkatan indeks kearsipan dari 80,23 pada tahun 2021 menjadi 96,71 pada tahun 2025. Hal ini didukung dengan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku yang selalu mencapai 100%. Persentase perangkat daerah yang menerapkan arsip baku sampai tahun 2025 telah mencapai 100%.

Tabel 2.131.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kearsipan	80,23	81,58	92,07	93,15	96,71
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip baku (%)	67,62	72,35	74,51	84,24	100,00

Sumber: Disarpus Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia memiliki panjang garis pantai sekitar 57,55 kilometer. Wilayah pesisir dan pantai tersebut memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, serta potensi lainnya seperti produksi garam. Selain itu, wilayah daratan di bagian utara dan selatan juga memiliki potensi Cekungan Air Tanah (CAT) yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perikanan budidaya air tawar.

Perkembangan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kebumen selama periode tahun 2021-2025 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi namun secara umum meningkat. Produksi perikanan tangkap tercatat sebesar 9.646.661,67 kg pada tahun 2021, menurun menjadi 9.138.317,30 kg pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 12.898.015,49 kg pada tahun 2023. Pada tahun 2024 produksi kembali menurun menjadi 9.522.860,00 kg. Selanjutnya produksi meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 10.255.079,00 kg.

Nilai produksi perikanan tangkap juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai produksi tercatat sebesar Rp 212.457.910.669,00 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi Rp 173.982.608.774,00 pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi Rp 176.664.480.191,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai produksi meningkat cukup signifikan hingga mencapai Rp 239.742.697.384,00, meskipun volume produksi pada tahun tersebut mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan harga jual hasil tangkapan atau meningkatnya proporsi komoditas bernilai ekonomi lebih tinggi. Pada tahun 2025 nilai produksi kembali menurun menjadi Rp 216.252.753.322,83.

Upaya peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain dilakukan melalui pembinaan kelompok nelayan. Cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2021 tercatat sebesar 13,33%, relatif stabil pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 13,51% pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan tajam menjadi 2,03%, sebelum kembali meningkat menjadi 10,46% pada tahun 2025. Penurunan pada Tahun 2024 tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan metode pendataan, jumlah kelompok nelayan aktif yang dibina, maupun keterbatasan cakupan pembinaan pada tahun tersebut.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2024. Produksi tercatat sebesar 3.220.874,00 kg pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 3.355.110,00 kg pada tahun 2022 serta 3.453.930,00 kg pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024 produksi kembali meningkat menjadi 3.590.480,00 kg, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 3.524.160,00 kg.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, nilai produksi perikanan budidaya juga mengalami peningkatan hingga tahun 2024. Nilai produksi tercatat sebesar Rp 135.191.978.000,00 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 138.501.573.000,00 pada tahun 2022 serta Rp 152.416.467.300,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai produksi kembali meningkat menjadi Rp 153.838.453.500,00, kemudian menurun menjadi Rp 146.387.278.912,00 pada tahun 2025. Nilai produksi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komoditas perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pembudidaya di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.

Produksi perikanan diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui peningkatan angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan di Kabupaten Kebumen menunjukkan kondisi yang fluktuatif, yaitu sebesar 24,54 kg/kapita/tahun pada tahun 2021, meningkat menjadi 27,19 kg/kapita/tahun pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 22,33 kg/kapita/tahun pada tahun 2023. Pada tahun 2024 angka konsumsi ikan kembali meningkat menjadi 28,08 kg/kapita/tahun. Namun pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,29 kg/kapita/tahun. Penurunan pada tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh perubahan metode penghitungan dengan penggunaan indikator baru, yaitu Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM), sehingga tidak sepenuhnya dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagian produksi perikanan tidak dikonsumsi secara langsung, tetapi diolah terlebih dahulu sehingga memberikan nilai tambah serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Produksi pengolahan hasil perikanan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari 452.173,00 kg pada tahun 2021 menjadi 722.690,29 kg pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 526.588,65 kg pada tahun 2023 dan meningkat kembali menjadi 745.670,00 kg pada tahun 2024. Pada Tahun 2025 produksi pengolahan hasil perikanan meningkat sangat signifikan menjadi 2.057.193,68 kg, yang menunjukkan berkembangnya aktivitas usaha pengolahan hasil perikanan di daerah.

Nilai produksi pengolahan hasil perikanan juga bersifat fluktuatif. Nilai produksi tercatat sebesar Rp 29.218.550.300,00 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp 37.715.056.339,00 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi Rp 34.486.245.497,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai produksi meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp 282.358.587.562,00, yang menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah atau aktivitas pengolahan hasil perikanan pada tahun tersebut. Pada tahun 2025 nilai produksi kembali menurun menjadi Rp 74.959.875.187,15.

Selain sektor perikanan, Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Namun dalam beberapa tahun terakhir produksi garam menunjukkan kecenderungan menurun dari 155.945,00 kg pada Tahun 2021 menjadi 136.265,00 kg pada Tahun 2022, kemudian menurun menjadi 97.448,00 kg pada Tahun 2023, 54.110,00 kg pada Tahun 2024, dan 38.676,00 kg pada Tahun 2025. Penurunan produksi garam

disebabkan kerusakan tambak garam yang disebabkan oleh bencana alam.

Nilai produksi garam juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai produksi tercatat sebesar Rp 623.780.000,00 pada tahun 2021 dan menurun menjadi Rp 599.757.500,00 pada tahun 2022 serta Rp 374.274.300,00 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 nilai produksi meningkat cukup signifikan menjadi Rp 1.977.850.000,00, meskipun volume produksi terus menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya kenaikan harga garam pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2025 nilai produksi kembali menurun menjadi Rp 171.904.500,00.

Tabel 2.132.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi Perikanan Tangkap (kg)	9.646.661,67	9.138.317,30	12.898.015,49	9.522.860,00	10.255.079,00
2	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp)	212.457.910.669	173.982.608.774	176.664.480.191	239.742.697.384	216.252.753.322,83
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	13,33	13,33	13,51	2,03	10,46
4	Produksi Perikanan Budidaya (kg)	3.220.874,00	3.355.110,00	3.453.930,00	3.590.480,00	3.524.160,00
5	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp)	135.191.978.000	138.501.573.000	152.416.467.300	153.838.453.500	146.387.278.912
6	Angka Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	24,54	27,19	22,33	28,08	13,29
7	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (kg)	452.173,00	722.690,29	526.588,65	745.670,00	2.057.193,68
8	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp)	29.218.550.300	37.715.056.339	34.486.245.497	282.358.587.562	74.959.875.187,15
9	Produksi Garam (kg)	155.945,00	136.265,00	97.448,00	54.110,00	38.676,00
10	Nilai Produksi Garam (Rp)	623.780.000	599.757.500	374.274.300	1.977.850.000	171.904.500

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2025

Pada sektor pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Untuk saat ini, pengawasan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan pembentukan kelompok masyarakat pengawas dan kegiatan pelestarian sumberdaya ikan/ restocking di perairan umum. Kelompok masyarakat pengawas diharapkan mampu menjadi

kepanjangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pada sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih efisien dan lebih aplikatif dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Pembinaan juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Tabel 2.133.
Data Kelompok Masyarakat Pengawas (pokmaswas)

Indikator	Base	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah kelompok yang dibentuk (kelompok)	29	1	2	2	1	3

Sumber: DLHKP Kabupaten Kebumen, 2025

b. Pertanian

Nilai produksi pertanian cenderung mengalami peningkatan dari Rp 5.120.190.493.266,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 6.461.150.841.370,00 pada tahun 2025. Kontribusi terbesar dari sub sektor tanaman pangan yang juga terus meningkat dari Rp 2.913.177.189.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 4.109.472.853.260,00 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen merupakan kawasan produksi pertanian khususnya tanaman pangan.

Sementara itu selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun demikian, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,93 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 5,86 ton/ha pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Hal yang sama terjadi pada 5 komoditas bahan pangan utama lokal yang mengalami penurunan dari 6,74 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 6,10 ton/ha pada tahun 2025.

Tabel 2.134.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Komoditas	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peternakan (Rp)	794.374.208.00	675.472.222.750	775.521.422.130	754.657.072.500	1.014.897.092.110
2	Tanaman Pangan (Rp)	2.913.177.189.000	2.838.161.639.900	3.268.936.332.000	3.206.544.491.200	4.109.472.853.260
3	Hortikultura (Rp)	606.848.086.266	532.507.711.400	444.910.433.092	486.956.562.000	562.081.907.800
4	Perkebunan (Rp)	805.791.010.000	792.213.860.000	771.216.574.500	737.468.201.960	774.698.988.200
5	Total Nilai Produksi Pertanian (Rp)	5.120.190.493.266	4.838.355.434.050	5.260.584.761.722	5.185.626.327.660	6.461.150.841.370

No	Komoditas	2021	2022	2023	2024	2025
6	Produktivitas padi (Ton/Ha)	6,93	6,25	5,93	5,67	5,86
7	Produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal terdiri dari 5 komoditas (Ton/Ha)	6,74	6,1	5,66	5,61	6,10

Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2025

Sementara itu, berdasarkan data eksisting lahan pertanian di Kabupaten Kebumen terbagi ke dalam kategori LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), LCP2B (Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan), dan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Luasan KP2B diambil dari delineasi LP2B ditambah LCP2B, yakni 38.389,27 Ha LP2B dan 4.764,60 Ha LCP2B, sehingga didapat 43.153,86 Ha KP2B. Dasar penetapan LP2B, LCP2B KP2B adalah Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 521.1/431 Tahun 2022. Lahan yang sudah ditetapkan LP2B dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan kecuali oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk kepentingan umum, bencana alam dan PSN (Proyek Strategis Nasional). Luasan masing-masing LP2B, LCP2B, dan KP2B pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.135.
Luas Lahan LP2B, LCP2B, dan KP2B di Kabupaten Kebumen

No	Nama Kecamatan	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
1	Adimulyo	2.789,51	92,35	2.881,86
2	Alian	1.317,39	125,69	1.443,08
3	Ambal	3.279,74	183,06	3.462,80
4	Ayah	855,74	134,05	989,79
5	Bonorowo	1.268,95	14,11	1.283,06
6	Buayan	1.265,64	128,51	1.394,15
7	Buluspesantren	2.530,38	170,57	2.700,95
8	Gombong	955,65	60,98	1.016,63
9	Karanganyar	702,20	131,18	833,38
10	Karanggayam	1.532,63	561,59	2.094,22
11	Karangsambung	1.447,73	316,46	1.764,19
12	Kebumen	1.900,48	183,44	2.083,92
13	Klirong	1.528,25	46,51	1.574,76
14	Kutowinangun	1.220,68	78,52	1.299,19

No	Nama Kecamatan	LP2B (Ha)	LCP2B (Ha)	KP2B (Ha)
15	Kuwarasan	2.102,60	67,42	2.170,02
16	Mirit	2.592,22	126,19	2.718,40
17	Padureso	297,19	29,41	326,60
18	Pejagoan	532,34	67,40	599,74
19	Petanahan	1.905,82	106,79	2.012,61
20	Poncowarno	874,89	86,19	961,08
21	Prembun	924,95	78,05	1.003,00
22	Puring	3.422,47	457,01	3.879,48
23	Rowokele	1.021,11	79,07	1.100,18
24	Sadang	794,15	220,42	1.014,57
25	Sempor	1.074,07	156,99	1.231,05
26	Sruweng	1.262,64	52,79	1.315.43
Grand Total		**39.399,39**	**3.754,75**	**43.154,14**

Sumber: Distapang Kabupaten Kebumen, 2025

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pada tanggal 16 Desember 2021 telah mengeluarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK/02.01/XII/2021 tahun 2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dalam rangka mempercepat penetapan LP2B di berbagai kabupaten/kota sehingga diharapkan luasan LSD yang ditetapkan dapat menjadi data persiapan informasi lahan sawah.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut didapat bahwa Kabupaten Kebumen ditunjuk memiliki Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 43.267,44 Ha. Namun selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan sejumlah usulan koreksi atas luasan tersebut, hingga didapat luasan LSD hasil verifikasi aktual seluas 37.984,85 Ha sesuai Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang antara Bupati Kebumen dengan Kementerian ATR/BPN.

Tabel 2.136.
Luas Penetapan LSD di Kabupaten Kebumen

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas LSD berdasarkan Kepmen ATR/BPN No.1589/SK-HK.02.01/XII/2021	43.267,44
2	Luas koreksi LSD	3.731,70

No	Uraian	Luas (Ha)
3	Luas kesepakatan yang tidak dipertahankan	1.550,89
4	Luas Hasil Verifikasi Aktual yang disepakati untuk dipertahankan (1-2-3)	37.984,85

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

Sejak tahun 2022 luasan sawah LSD yang dipertahankan masih seluas 37.984,85 ha, namun hingga tahun 2024 ada beberapa pengajuan dari masyarakat dan pengusaha untuk alih fungsi lahan LSD menjadi lahan dengan fungsi lain. Pengajuan ijin ditujukan ke Kementerian ATR/BTN melalui BTN Kabupaten Kebumen, namun jumlah lahan yang diizinkan untuk alih lahan belum diketahui.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi prioritas pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral. Hal ini dalam upaya dukungan penurunan emisi GRK sekaligus mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Banyaknya infrastruktur energi baru terbarukan di wilayah Kabupaten Kebumen seperti tercantum pada tabel di bawah, namun demikian pemanfaatan potensi EBT masih bisa dioptimalkan akan tetapi terkendala investasi, inovasi dan teknologi.

Tabel 2.137.
Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	Banyaknya Infrastruktur Energi Baru Terbarukan, Jumlah, Kapasitas Total di Kabupaten Kebumen									
		Jumlah Unit					Kapasitas Total				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Biogas (m^3)	20	22	27	31	32	327,00	367,00	397,50	477,50	497,50
2	PLTA (kW)	4	4	4	4	4	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3	PLTMH (kVa)	2	2	2	2	2	400	400	400	500	400
4	PLTS Ground Mounted (kWp)	457	457	457	457	457	23,00	22,85	22,85	22,85	22,90
5	PLTS Rooftop (kWp)	3	3	5	5	5	15	15	36	36	36
6	PJUTS (watt)	370	370	370	370	370	67.200	62.400	62.400	62.400	62.400
7	Pompa Air Tenaga Surya (kWp)	-	-	1	1	1	-	-	1,80	1,80	1,80

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

d. Perdagangan

Urusan perdagangan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dapat sampai ke masyarakat sebagai konsumen akhir dengan tingkat harga yang stabil dan terjangkau. Hal ini dapat dilihat dari disparitas harga yang cenderung menurun dari –9,66 pada tahun 2021 menjadi -9,96 pada tahun 2025. Terdapat 13 komoditas yang dihitung yaitu beras medium, gula pasir, minyak goreng kemasan sederhana, daging sapi paha belakang, daging ayam ras, telur ayam ras, tepung terigu, kedelai impor, cabe merah keriting, cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih impor kating serta ikan kembung. Dengan nilai disparitas tergolong kecil dibawah 10% bahkan minus, dapat diartikan adanya efisiensi sistem distribusi barang antar wilayah dan menurunnya kesenjangan harga suatu komoditas antarwilayah. Dengan disparitas harga positif menunjukkan harga ke-13 komoditas di Kabupaten Kebumen masih lebih tinggi dibandingkan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah, namun demikian secara umum nilai disparitas masih normal karena masih berada di *range* –10 sampai dengan 10.

Dalam hal mendukung kelancaran distribusi di wilayah Kabupaten Kebumen, kualitas sarana perdagangan juga terus ditingkatkan. Hal ini tercermin dengan peningkatan persentase pasar tradisional dalam kondisi baik dari 82,50% pada tahun 2021 menjadi 87,80% pada tahun 2024 namun menurun pada tahun 2025 menjadi 85% karena adanya musibah kebakaran pada Pasar Gombong. Sementara itu nilai ekspor bersih perdagangan Kabupaten Kebumen sempat meningkat dari Rp 41.890.418.021,00 pada Tahun 2021 menjadi Rp 54.858.809.194,00 pada tahun 2024. Namun kembali turun pada tahun 2025 menjadi Rp 48.238.356.558,- dimana ini adalah nilai ekspor produk Kabupaten Kebumen ke luar negeri.

Tabel 2.138.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Disparitas Harga (Persen)	-9,66	-9,57	-9,02	-9,77	-9,96
2	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	82,50	87,50	87,50	87,80	85,00
3	Ekspor Bersih Perdagangan (Rp)	41.890.418.021	34.867.795.457	41.279.344.347	54.858.809.194	48.238.356.558

Sumber: Disperindag Kabupaten Kebumen, 2025

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga terus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan Penggunaan Produk Dalam

Negeri baik melalui upaya sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan BUMD, untuk selanjutnya menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mendorong UMKM unggulan daerah agar lebih produktif dengan pemasaran yang penuh inovasi. Diantaranya memanfaatkan aplikasi Blangkon yang telah memasarkan produk UMKM di Jateng. Selain itu, menjalin kerja sama dengan perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Upaya lainnya adalah melakukan fasilitasi dan pendampingan membantu mempermudah UMKM dalam pengurusan izin berusaha, dan syarat-syarat lain agar UMKM yang berkualitas dapat masuk aplikasi e-Katalog yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi belanja pemerintah daerah secara elektronik.

e. Perindustrian

Pengembangan perindustrian menjadi sangat penting dalam upaya hilirisasi yaitu untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja masyarakat. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Kebumen semakin menguat dengan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar bagi PDRB daerah sejak tahun 2022. Hal ini tercermin dari rasio PDRB industri pengolahan yang semakin meningkat dari 21,31% pada tahun 2021 menjadi 22,66% pada tahun 2025. Hal ini diantaranya didukung jumlah industri kecil menengah yang bertambah hingga mencapai 56.473 unit pada tahun 2025 serta industri besar yang mencapai 4 unit di tahun 2025. Namun dari data tersebut menunjukkan rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar.

Tabel 2.139.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan (Persen)	21,31	21,78	22,23	22,70	22,66
2	Jumlah Industri Kecil Menengah (unit)	56.420	56.430	56.465	56.466	56.473
3	Jumlah Industri Besar (unit)	3	3	4	4	4

Sumber: Disperindag Kabupaten Kebumen, 2025

f. Transmigrasi

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang difasilitasi untuk bertransmigrasi terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen seperti tercantum pada tabel di bawah. Pada tahun 2021 tidak dilakukan program transmigrasi karena terjadinya Pandemi Covid-19. Sementara itu pada tahun 2024 terdapat 1 KK transmigran swakarsa yang melakukan pembiayaan sendiri, namun tetap mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan transmigrasi yaitu karena terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk calon transmigrasi Kabupaten, belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi serta terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran.

Tabel 2.140.
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang difasilitasi untuk bertransmigrasi (KK)	0 KK	10 KK	3 KK	2 KK	1 KK
2	Jumlah transmigran swakarsa (KK)	N/A	N/A	N/A	1 KK	0 KK

Sumber: Disperindag Kabupaten Kebumen, 2025

g. Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Kebumen dikarenakan selain memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial dalam pengembangan pariwisata, juga dikarenakan *Geopark* Kebumen telah disahkan sebaga UNESCO *Global Geopark* pada tahun 2025. Kinerja pariwisata juga cukup menggembirakan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sedikit demi sedikit meningkat dari hanya 5 orang pasca Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 menjadi 25 orang pada tahun 2025. Sedangkan kunjungan wisatawan nusantara juga terus meningkat dari 966.936 orang pada tahun 2021 menjadi 3.884.323 pada tahun 2025.

Sementara itu, rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak 2022 menjadi 1,37 hari pada tahun 2025. Untuk itu perlu diwujudkan paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen. Namun demikian tingkat hunian akomodasi seperti hotel dan tempat penginapan cenderung meningkat dari 28,58% pada tahun 2021 menjadi 50,54% pada Tahun 2025 karena didorong aktivitas lain seperti MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*). Namun dengan tingkat hunian masih sedikit di atas 50% menunjukkan tingkat hunian belum optimal karena menurut patokan umum berdasarkan tren industri perhotelan menunjukkan tingkat hunian 60-70% pada banyak kasus dianggap menguntungkan untuk wilayah kota

kecil. Walaupun demikian, hal ini menyebabkan rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum semakin meningkat dari 2,08% pada tahun 2021 menjadi 3,01% pada tahun 2025. Perkembangan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kelengkapan amenitas di antaranya hotel dan akomodasi lainnya di mana sampai dengan tahun 2025 terdapat 1 hotel berbintang 4, 3 hotel berbintang 3 serta 54 unit akomodasi lainnya. Selain itu, sektor pariwisata juga didorong dalam pengembangan ekonomi kreatif di mana setiap tahun capaian pelaku ekonomi kreatif yang dibina mencapai 100%.

Tabel 2.141.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	5	9	11	23	25
2	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara (orang)	966.936	1.623.856	2.151.098	2.983.399	3.884.323
3	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan (hari)	0,50	1,44	1,64	1,29	1,37
4	Tingkat hunian akomodasi (%)	28,58	30,08	36,08	53,97	50,54
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,08	2,55	2,76	2,85	3,01
6	Jumlah hotel dan akomodasi lainnya:					
	a. Hotel bintang 3 (unit)	2	3	3	3	3
	b. Hotel bintang 4 (unit)	0	0	0	1	1
	c. Akomodasi lainnya (unit)	36	38	37	45	54
7	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

Hingga tahun 2025 terdapat 79 Daya Tarik Wisata (DTW) yang terdiri dari DTW milik Pemkab, Desa Wisata dan Swasta serta juga telah dilaksanakan berbagai even yang mendukung jumlah kunjungan wisata secara keseluruhan.

Tabel 2.142.
Kunjungan pada Daya Tarik Wisata dan Event Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA (DTW)	PENGUNJUNG				
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
	DTW PEMERINTAH:					
1	Goa Jatijajar	84,079	187,048	158,249	80,990	146,281
2	PAP Krakal	25,546	72,198	74,293	30,417	50,633
3	Goa Petruk	1,881	2,916	2,247	1,808	2,727
4	Pantai Logending	27,099	47,703	37,986	27,121	27,988
5	Pantai Suwuk	81,819	114,800	76,853	24,660	66,663
6	Pantai Petanahan/ Pandankuning	47,793	67,110	81,775	161,545	56,988
7	Waduk Sempor	34,746	92,224	93,006	43,687	43,502
8	Waduk Wadaslintang	16,216	43,132	35,159	17,045	18,372
9	Pantai Karangbolong	15,550	24,113	4,064	126,446	275,052
	DTW DESA WISATA/SWASTA:					
10	Desa Karangrejo				150	0
11	Desa Pejagatan				636	7,952
12	Desa Kenoyojayan/ Pantai Mliwis			652,862	520,113	548,836
13	Desa Semali				2,274	6,368
14	Desa Kalibening				0	0
15	Desa Wonosari				5,500	4,329
16	Desa Grenggeng				12,789	21,741
17	Desa Wonoharjo				3,343	5,192
18	Desa Pandansari				7,657	25,939
19	Desa Karangsambung/ Pentulu Indah	4,906		6,851	1,611	6,487
20	Desa Rahayu	3,737	5,678	6,374	7,324	22,070
21	Desa Sendangdalem			1,217	5,967	21,952
22	Desa Karanggayam - Purangga Park	210		7,903	5,660	51,497
23	Desa Gunungsari - curug comal	10,300		7,206	2,500	10,601
24	Desa Karangrejo				328	0
25	Desa Cangkring - Sadang			4,524	10,628	15,368
26	Desa Seboro			1,810	1,912	2,934
27	Desa Penusupan - Watu Gede			2,299	2,194	13,571
28	Desa Jemur Pejagoan				357	0
29	Desa Jemur kebumen				165	0
30	Desa Temanggal				330	2,782
31	Desa Rowokele				2,792	4,153
32	Desa Wisata Buayan			13,748		22,512
33	Desa wisata cangkring	6,874				
34	Desa wisata Grenggeng	113				
35	Pantai Menganti	484,455	581,633	357,467	731,826	295,402
36	Sagara View of Karangbolong	3,312		89,802	202,625	300,430

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA (DTW)	PENGUNJUNG				
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
37	Pantai Bocor		235,000	162,002	135,003	335,081
38	Pantai Pitris			93,244	77,703	39,629
39	Pantai Surumanis	5,523	7,545	3,586	13,468	54,784
40	Pantai Kembar Terpadu				113,504	364,352
41	Pantai Pecaron				95,408	130,991
42	Pantai Cemara Sewu				106,748	114,449
43	Pantai Happy				99,136	108,727
44	Pantai Lampon	2,614		1,533	7,156	33,075
45	Pantai Laguna Lembupurwo		117,000	144,063	120,053	216,507
46	Pantai Peniron	1,007		3,765		
47	Pantai Suwuk Pintu Barat (Masyarakat)	32,724				
48	Pantai Pedalen					
49	Pantai Sawangan Puring					
50	Desa Surorejan - Pantai Laguna Gajah					44,803
51	Desa Surorejan - Pantai Bopong					26,612
52	Desa Surorejan - Pantai Sawangan					27,416
53	Desa Waluyorejo - Pantai Gajah					46,406
54	Jembangan Wisata Alam (JWA)	26,000	25,765	27,221	23,683	36,198
55	BRIN	526			1,472	20,965
56	Songging Water Park	15,712				30,246
57	Benteng Van Der Wijck	9,211				
58	Sawangan Adventure - Ayah	1,237				
59	Taman Reptil	5,673				
60	Bulupitu Tunjung seto	805				
61	Watubale Pasir-Ayah	3,582				
62	Makam mbah Lancing Mirit	1,800				
63	Dewajati Jatijajar					
64	Sendal Explore	2,866				
65	Kampung Etnik	7,251				
66	Wanalela forest- Argopeni Ayah	0				
67	Alian Butterfly Park					
68	Brujul Adventure Park - Desa Peniron-Pejagoan					
69	Wiskuno Maduretno					
70	Kampung Sapi (Sitiadi Puring)					
71	Patemon Pasir-Ayah					
72	wisata Alam Prabu Tirtomoyo					
73	Gebangsari					
74	Rumah Martatilaar Gombong					
75	Taman Banyulangit					

NO	NAMA DAYA TARIK WISATA (DTW)	PENGUNJUNG				
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
76	Goa Barat					
77	Wisata Edukasi Garam					
78	Curug Sindaro					
79	Agrowisata Senkei					30,595
	EVENT:					
80	Festival Lukulo	0				
81	Geo Roster Festival					
82	Kebumen Night Carnival					
83	Geo Fun Bike					
84	KODE 4					
85	JEEP Wisata					
86	Plesir Pit-pitan					
87	KEBUMEN MANGLINGI Diwaduk Sempor	256				
88	KEBUMEN MANGLINGI Di PAP Krakal	372				
89	KEBUMEN MANGLINGI Di Gading Paradise	346				
90	KEBUMEN CREATIV CORNER Di Perpusda Kbm	800				
91	Pesta Rakyat Kebumen				143,743	
92	Krakal Fest				3,945	
93	Kebumen Fest 2025					145,190
	JUMLAH PENGUNJUNG	**966,941**	**1,623,865**	**2,151,109**	**2,983,422**	**3,884,348**

Sumber: Disparbud Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas kinerja aparatur melalui pembenahan menyeluruh pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terkait hal tersebut, pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Mendasari Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 Tahun 2023, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. Penajaman tujuan Reformasi Birokrasi yaitu bersih, efektif dan berdaya saring mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik melalui sasaran strategis general dan tematik. Pada periode 2021-2024 terjadi peningkatan capaian dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, di mana IRB meningkat semula 59,54 (2021) menjadi 87,41/ A- (2025).

Mulai Tahun 2023 dalam Perhitungan IRB terdapat perbedaan rumusan dari tahun sebelumnya, dimana ada penggabungan antara RB General dan RB Tematik. Untuk Kabupaten Kebumen perolehan nilai IRB Tahun 2024 sebesar 85,74, terdiri dari 75,46 penilaian RB General dan

10,28 RB Tematik. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan 11,47 point pada aspek RB General , dan peningkatan 3,36 pada aspek RB Tematik. Nilai RB General dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian meliputi Tingkat implementasi Rencana Aksi RB General (5,26), Indeks SPBE (7,33), Capaian IKU Makro (3,79), Capaian IKU Non Makro (3,86), Opini BPK (WTP :5), Tindak Lanjut Rekomendasi (3,81), Survei Penilaian Integritas (7,5), Survei Kepuasan Masyarakat (7,24). Sedangkan Nilai RB Tematik dipengaruhi oleh beberapa indikator penilaian meliputi Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak) sebesar 1,06, Penggunaan Produk dalam Negeri (Capaian Dampak) sebesar 2,85.

Sedangkan terkait penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dapat tercermin dari nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 diperoleh nilai sebesar 68,92 dengan predikat B (Baik). Terdapat peningkatan 1,38 poin dari perolehan nilai tahun sebelumnya. Nilai SAKIP sebesar 68,92 dipengaruhi oleh komponen penilaian perencanaan kinerja (23,05), pengukuran kinerja (21,53), pelaporan kinerja (10,32), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (14,03). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan pada tingkat unit kerja, khususnya dalam penguatan komitmen manajemen kinerja, di mana pengukuran kinerja saat ini baru dilaksanakan hingga level eselon II atau unit kerja.

Sementara itu, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen juga cenderung mengalami peningkatan. Hasil Penilaian Kementerian PAN-RB Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen dari 4,23 pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sampai dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 4,59. Namun untuk Tahun 2025 sedikit mengalami penurunan hingga diperoleh nilai 4,33. Indeks ini diukur dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarpras pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

Tabel 2.143.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59.54	62.81	79.91	85,74	87,41
2	SAKIP	65,18	65,49	66,11	67,54	68,92
3	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,23	4,37	4,55	4,59	4,33

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
4	Indeks Reformasi Hukum (indeks)	N/A	N/A	57,54	98,52	99,54

Sumber: Setda Kabupaten Kebumen, 2025

b. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD terus mengoptimalkan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan perda, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan naskah akademik, pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan laporan semester, dan pembahasan pertanggungjawaban APBD, pengawasan semua urusan pemerintahan dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK serta pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah, orientasi DPRD, bimbingan teknis DPRD, publikasi dan dokumentasi Dewan, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat dan penyusunan program kerja DPRD, kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dan pelaksanaan reses, penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD, fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerjasama daerah, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja. Secara umum hal ini mendukung:

1) Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota;
2) Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD); serta
3) Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Realisasi penetapan Peraturan Daerah dari pengajuan Raperda yang disahkan tepat waktu pada Triwulan IV Tahun 2025 telah mencapai 73,30%. Namun jumlah Perda inisiatif dari DPRD mengalami penurunan dari 6 Perda inisiatif pada tahun 2024 menjadi 3 Perda inisiatif pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah Perda usulan dari Eksekutif naik signifikan, dari 7 Perda usulan pada tahun 2024 menjadi 12 Perda usulan pada tahun 2025.

Tabel 2.144.
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah PERDA yang ditetapkan	11	13	16	14	11
5	Jumlah RAPERDA yang diajukan	12	18	19	13	15
6	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu (%)	91,67	72,22	84,21	107,69	73,30
7	Jumlah Perda/Raperda Inisiatif dari DPRD	3	5	5	6	3
8	Jumlah Perda/Raperda usulan dari Eksekutif	9	13	14	7	12

Sumber: Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen, 2025

c. Perencanaan

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, informasi pemerintahan daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen menerapkan proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pertanggungjawaban terintegrasi dalam satu sistem yang terhubung mulai penyusunan perencanaan tahun 2021.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) telah dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Kominfo, serta KPK pada tanggal 12 Desember 2023 bertepatan dengan Acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia sebagai aplikasi umum bagi pemerintah daerah dan satu-satunya sistem yang digunakan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mulai tahun perencanaan 2024, Pemerintah Daerah diharapkan sudah menggunakan SIPD RI. Untuk Kabupaten Kebumen telah menerapkan aplikasi SIPD RI dalam perencanaan pembangunan. Penerapan SIPD RI juga dilakukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dua puluh tahunan (RPJPD), lima tahunan (RPJMD) dan tahunan (RKPD).

Perencanaan merupakan salah satu komponen penting dalam SAKIP, dimana kinerja nilai SAKIP perencanaan Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari 22,19 pada Tahun 2021 menjadi 23,05 pada Tahun 2025. Meskipun demikian, upaya peningkatan masih perlu dioptimalkan agar mampu mendukung pencapaian predikat SAKIP minimal kategori B ke atas yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian Visi RPJMD Tahun 2025-2029, menunjukkan pencapaian RPJMD sampai dengan Tahun 2025 telah mencapai 96,85% atau telah masuk kategori Sangat Tinggi. Angka ini diperoleh dari rata-rata capaian IKU Tujuan Daerah dan IKU Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2025. Walaupun telah mencapai kategori Sangat Tinggi, namun masih perlu dilakukan optimalisasi pencapaian utamanya terhadap IKU dengan tingkat capaian terendah. Dari hasil evaluasi menunjukkan 3 besar IKU dengan capaian paling rendah yaitu PDRB ADHK Sektor Perdagangan, PDRB ADHK Sektor Tersier dan Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK. Hal ini juga akan menjadi masukan yang penting dalam penyusunan RPJMD kedepan. Beberapa permasalahan lain juga terjadi dalam perencanaan pembangunan diantaranya masih lemahnya pengelolaan data yang memperlemah analisis dan perumusan kebijakan, belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah sehingga belum mampu memberikan masukan secara optimal, belum optimalnya inovasi daerah yang mendukung perumusan perencanaan dan kebijakan daerah, sangat dinamisnya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat yang menuntut kecepatan dan ketepatan

perencanaan pembangunan yang dinamis serta belum optimalnya kualitas dan kapabilitas SDM perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan diantaranya dengan ketersediaan dan kelengkapan dokumen perencanaan seperti RPJPD yang pada Tahun 2024 telah ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMD maupun RKPD sebagai dokumen arahan pembangunan daerah. Selain itu, Kabupaten Kebumen juga telah menetapkan revisi RTRW yaitu dengan telah ditetapkannya RTRW Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044. Selain itu konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dan selanjutnya ke dalam APBD setiap tahunnya selalu mencapai 100%.

Tabel 2.145.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Komponen perencanan dalam SAKIP	22,19	22,28	22,9	22,9	23,05
2	Tersedianya dokumen perencanaan: RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

d. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Pemerintah daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah kepada masyarakat.

Kemampuan daerah dengan lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan daerah perlu terus dioptimalkan. Rasio pajak daerah terhadap PDRB mengalami tren kenaikan dari 0,38% pada Tahun 2021 menjadi 0,54% pada Tahun 2025. Selain itu, Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah juga mengalami tren kenaikan hingga mencapai 18,91% pada Tahun 2025. Indeks pengelolaan keuangan daerah juga naik dari 64,2253 pada Tahun 2021 menjadi 75,2255 pada Tahun 2024, dengan data di Tahun 2025 belum tersedia karena masih dalam proses perhitungan. Namun capaian keuangan ini masih menunjukkan lemahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025 masuk kategori rendah. Namun demikian laporan keuangan Kabupaten Kebumen tetap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

Tabel 2.146.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,38	0,40	0,38	0,36	0,54
2	Kapasitas Fiskal	Tinggi	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
3	Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	16,67	17,99	15,98	15,44	18,91
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	64,2253	77,674	72,25	75,2255	Data Belum Tersedia
5	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPD Kabupaten Kebumen, 2025

e. Kepegawaian

Pengelolaan urusan kepegawaian dilaksanakan untuk memastikan tersedianya aparatur yang kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Upaya

tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem merit, yakni kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif, adil, dan proporsional tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status perkawinan, usia, maupun k ondisi disabilitas. Penerapan sistem merit di Kabupaten Kebumen menunjukkan perkembangan positif, hal tersebut tercermin dari peningkatan Indeks Sistem Merit yang pada tahun 2021 berada pada angka 179 dengan kategori kurang, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 253,5 dengan kategori baik pada tahun 2023. Untuk capaian Sistem Merit Tahun 2024 masih dalam tahap penilaian oleh Tim Penilai (BKN, KemenPAN RB, dan LAN RI). Sedangkan pada Tahun 2025, terjadi Masa Transisi Kebijakan untuk menggunakan sistem penilaian yang lebih update sehingga pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian Sistem Merit.

Tabel 2.147.
Perkembangan Capaian Sistem Merit
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024*	2025**
Sistem Merit (indeks)	179	144,5	253,5	253,5	NA

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2025
**) Data Tahun 2023*
***) Tahun 2025 merupakan Masa Transisi Kebijakan*

Delapan fokus penilaian sistem merit yaitu perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengembangan dan pembagian karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, serta perlindungan dan pelayanan ASN yang didukung oleh sistem informasi kepegawaian. Penerapan sistem merit tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Untuk Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus mengoptimalkan penerapan sistem merit melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

1) Ketersediaan standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan.
2) Seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama).
3) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi; dalam hal ini Pemetaan Kompetensi bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional, Pengawas dan Administrator agar dapat dikembangkan dan ditempatkan sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.

4) Ketersediaan *talent pool* yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja.
5) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi.
6) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai.
7) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja, pertukaran pegawai, *coaching* dan *mentoring*.

Penerapan sistem merit diarahkan untuk menjawab tantangan pengelolaan sumber daya aparatur sekaligus mengoptimalkan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara konsisten mengalami penurunan, dari sebanyak 10.352 orang pada tahun 2021 menjadi hanya sebanyak 8.062 orang pada tahun 2025. Sejak Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebagian besar berasal dari tenaga honorer dan Petugas Penunjang Kegiatan (P2K) kantor maupun lapangan, sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung kinerja pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai bentuk komitmen dalam penataan tenaga non-ASN, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah mengangkat PPPK Paruh Waktu per Desember 2025 yang difokuskan untuk mendukung pelayanan publik dasar dan pelaksanaan program prioritas daerah. Namun demikian, secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif sejak Tahun 2022, yang sempat mencapai 11.843 orang, kemudian menurun menjadi 11.394 orang pada Tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 11.773 orang pada Tahun 2025. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan kepegawaian, di mana jumlah ASN yang memasuki masa pensiun dan mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya relatif lebih besar dibandingkan dengan penambahan ASN baru, baik melalui pengadaan CPNS, PPPK, maupun mutasi masuk, meskipun pada tahun 2025 telah dilakukan upaya penguatan jumlah ASN.

Tabel 2.148.
Jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen

Tahun	PNS			P3K			ASN (PNS + P3K)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
2021	4.641	5.711	10.352	63	106	169	4.767	5.817	**10.521**
2022	4.294	5.453	9.747	683	1.413	2.096	4.977	6.866	**11.843**
2023	3.853	5.171	9.024	861	1.804	2.665	4.714	6.975	**11.689**
2024	3.533	4.925	8.458	965	1.971	2.936	4.498	6.896	**11.394**
2025	3.261	4.801	8.062	1.304	2.407	3.711	4.565	7.208	**11.773**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2025

Mayoritas tingkat pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengenyam pendidikan tinggi yaitu sebesar 89,72%, utamanya pada tingkat pendidikan D-IV dan S1 sebesar 72,56% hingga Tahun 2025. Proporsi ASN yang berpendidikan di bawah Perguruan Tinggi (SD-SLTA) terus mengalami penurunan dari 16,82% pada Tahun 2021 menjadi 10,28% pada Tahun 2025. Hal ini dikarenakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minimal berpendidikan diploma, sedangkan formasi PPPK baru sebagian besar juga telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal diploma.

Tabel 2.149.
Tingkat Pendidikan ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen

Persentase Tingkat Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
SD-SLTA (%)	16,82	13,23	11,75	10,70	10,28
DI – D III (%)	13,66	11,84	11,48	11,61	11,25
D IV – S1(%)	63,36	69,29	71,12	72,20	72,56
S2 – S3 (%)	6,16	5,55	5,62	5,49	5,91

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2025

f. Pendidikan dan Pelatihan

Upaya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan teknis, fungsional, maupun pelatihan kepemimpinan, sebagai bagian dari strategi peningkatan profesionalisme aparatur. Namun, keterbatasan alokasi anggaran menjadi faktor pembatas sehingga pelaksanaan pengembangan kompetensi difokuskan pada jenis pelatihan yang bersifat prioritas, antara lain pelatihan kepemimpinan untuk pemenuhan kebutuhan jabatan struktural tertentu, pelatihan pra jabatan bagi CPNS apabila terdapat formasi pada tahun berjalan, serta kegiatan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan pembelajaran *online* melalui aplikasi SINAU KEBUMEN. Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) dalam 1 tahun. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerja sama dengan berbagai instansi dalam penyusunan konten pembelajarannya, diantaranya adalah dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional Kawasan Geodiversitas Karangsambung, Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Yogyakarta dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah.

Tabel 2.150.
Perkembangan Peningkatan Kapasitas ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Diklat	2021	2022	2023	2024	2025
Teknis	792	116	229	90	180
Fungsional	60	19	16	2	20
Kepemimpinan	29	13	23	31	18
Prajabatan	498	310	568	0	320
Orientasi P3K	63	683	861	965	802
Pengiriman PNS ke Lembaga Diklat	107	354	58	44	13
Jumlah	1.486	812	836	454	1351

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen, 2025

g. Penelitian dan Pengembangan

Secara umum, penelitian dan pengembangan atau riset dan inovasi daerah lebih difokuskan pada keanekaragaman tenaga kerja, publikasi ilmiah, aplikasi kekayaan intelektual, belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, aplikasi merk dagang. Hal ini tercermin dari nilai kapabilitas inovasi yang menggambarkan kemampuan dalam mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan melalui penerapan proses-proses secara tepat serta cepat dalam menanggapi perubahan teknologi. Kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 1,87 pada Tahun 2021 menjadi 3,03 pada Tahun 2025. Selain itu, capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen mengalami tren kenaikan dari 3,125 pada Tahun 2021 menjadi 3,79 pada Tahun 2025. Namun hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja IDSD secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti kapasitas, efektivitas, dan kinerja lembaga riset serta jumlah belanja riset baik lembaga riset pemerintah maupun swasta (perguruan tinggi dan industri). Untuk itu perlu dioptimalkan kolaborasi antara unsur pemerintah dan swasta khususnya perguruan tinggi untuk meningkatkan kapabilitas inovasi.

Untuk itu beberapa upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan pembangunan atau riset dan inovasi daerah yang berujung pada peningkatan daya saing daerah. Salah satunya dengan pemanfaatan hasil kelitbangan yang cukup fluktuatif dan cenderung meningkat dari 72,73% pada Tahun 2021 menjadi 87,12% pada Tahun 2025 Walaupun demikian masih perlu dioptimalkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh para pemangku kepentingan serta perlunya dievaluasi apakah hasil kelitbangan memang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengambil kebijakan.

Tabel 2.151.
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kapabilitas Inovasi (Angka)	1,87	1,62	2,30	2,92	3,03
2	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,125	3,05	3,41	3,77	3,79
3	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Persen)	72,73	77,08	83,33	85,71	87,12

Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

h. Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu unsur yang mendukung terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kebumen antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen.

Pengawasan merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan standar kinerja yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan. Pengawasan yang diberikan kepada penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya untuk menghindari terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan yang menyebabkan terjadinya kerugian dan tujuan yang diharapkan tidak tercapai optimal. Rekomendasi atas hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ini akan menjadi umpan balik dalam rangka mengambil tindakan perbaikan pada pelaksanaan berikutnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Pengawasan secara berkala dilakukan terhadap semua objek pemeriksaan di seluruh perangkat daerah Kabupaten Kebumen. Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat akan mendapatkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk kategori. Indikator yang menunjukkan kinerja Inspektorat berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian terhadap objek pemeriksaan perangkat daerah adalah besaran rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti dan banyaknya LHP yang diterbitkan dari pelaksanaan penilaian dan pengawasan.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Kebumen sampai pada tahun 2024 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Namun capaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Kabupaten Kebumen mengalami penurunan yaitu pada level 2 pada Tahun 2025.

Kinerja pencegahan korupsi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Namun kinerja Indeks Integritas Nasional untuk Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas mengalami penurunan dari 76,46 pada Tahun 2021 menjadi 75,96 pada Tahun 2025, sehingga masuk dalam kategori Waspada. Penurunan terjadi dikarenakan alasan yang sama yaitu adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.152.
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No	Kinerja Pengawasan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Maturitas SPIP (Nilai)	2,66	3,13	3,19	3,301	2,695
2.	Tingkat Kapabilitas APIP (Nilai)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2
3.	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	76,46	74,8	78,19	75,00	75,96

Sumber: Inspektorat Kabupaten Kebumen, 2025

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Keamanan dan ketertiban merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Untuk menjaga kondisi tersebut, diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Salah satu indikator yang mencerminkan kondisi keamanan dan ketertiban adalah kejadian konflik yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Konflik SARA didefinisikan sebagai benturan fisik disertai unsur kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu yang dipicu oleh pada sentimen identitas seperti

keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2021-2025, di Kabupaten Kebumen tercatat sedikitnya satu kejadian konflik SARA kecuali pada tahun 2022 dengan nol kejadian. Meskipun setiap kejadian tersebut tertangani dengan baik, upaya pengawasan dan deteksi dini tetap perlu diperkuat melalui pemantauan hubungan antarkelompok masyarakat yang dilandasi nilai toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis serta mampu bekerja sama tanpa adanya perbedaan yang bersifat diskriminatif.

Di sisi lain, urusan kesatuan bangsa dan politik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kehidupan demokrasi. Hal ini tercermin dari capaian partisipasi warga dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Partisipasi warga Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024 (pemilihan legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah serentak) mencapai 75,85%. Capaian ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kebumen di Tahun 2020 yang hanya mencapai 64%.

Tabel 2.153.
Capaian Indikator Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Kinerja Pengawasan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA	1	0	1	1	1
2	Partisipasi warga dalam pemilu	NA	NA	NA	75,85%	NA

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Kebumen, 2025

j. Kewilayahan

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota. Secara kelembagaan, kecamatan dibentuk dan ditetapkan melalui peraturan daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Selain tugas tersebut, kecamatan juga mendapatkan tugas lain yaitu melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Implementasi penyelenggara kecamatan di Kabupaten Kebumen dilihat berdasarkan tugas dan fungsinya lebih mendukung pada peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik dan melayani. Indikator kinerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai pengampu urusan kewilayahan di Kabupaten Kebumen ditunjukkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan. Baik IKM Kecamatan maupun Kelurahan terus mengalami peningkatan hingga masing-masing mencapai 92,93% untuk IKM Kecamatan dan 92,01% untuk IKM Kelurahan pada Tahun 2025. Selain itu sebagai pengampu

urusan kewilayahan, Kecamatan juga mendapatkan tugas untuk menjaga kondusivitas wilayah yang selalu terjaga dengan tingkat capaian 100%.

Tabel 2.154.
Capaian Indikator Urusan kewilayahan Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan (%)	81,90	86,85	88,08	91,04	92,93
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan (%)	78,55	85,29	90,24	91,14	92,01
3.	Indeks Kondusivitas Kecamatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Setda Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah salah satunya diukur menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kinerja Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Dalam hal ini, kinerja IDSD Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 3,12 pada tahun 2021 menjadi 3,79 pada tahun 2025 yang menunjukkan masuk dalam kategori sedang-tinggi dan dapat diartikan kinerja baik tetapi masih memiliki ruang untuk peningkatan di beberapa komponen diantaranya fleksibiltas pasar tenaga kerja, kedalaman sistem keuangan, serta kapabilitas inovasi.

Tabel 2.155.
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Uraian Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,12	3,05	3,41	3,77	3,79

Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Analisis PDRB menurut Komponen Pengeluaran

Secara umum kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari PDRB komponen pengeluaran yang dihitung berdasarkan total nilai konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Dengan PDRB ini dapat digambarkan pola konsumsi rumah tangga, peran pemerintah dalam mendukung pembangunan, tingkat investasi daerah serta daya saing perdagangan daerah. Hal ini dapat terlihat dari distribusi persentase PDRB menurut komponen pengeluaran yang menunjukkan proporsi masing-masing komponen pengeluaran terhadap Total PDRB.

Data menunjukkan PDRB Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh konsumsi yaitu sekita 74-75% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan ekonomi daerah masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat dimana dikhawatirkan jika daya beli masyarakat menurun maka pertumbuhan ekonomi dapat terdampak signifikan. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan rendahnya kontribusi komponen lain, utamanya investasi (PMTB) dan net ekspor yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar. Namun demikian jika kontribusi konsumsi tinggi juga dapat memberikan potensi lebih bagi bagi sektor ritel, perdagangan dan jasa lainnya. Tingginya konsumsi menunjukkan aktivitas ekonomi cukup aktif di tingkat rumah tangga, tetapi tidak selalu berarti terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya di kisaran 7-8% setiap tahun yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran semua tingkat pemerintah dari pusat, daerah hingga desa dengan fokus dan lokus program di wilayah Kabupaten Kebumen, diluar belanja modal yang tercacat sebagai PMTB. Persentase pengeluaran pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen yang kecil dapat menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (pemerintah). Selain itu dapat diartikan belanja pemerintah tidak cukup signifikan berdampak pada perekonomian daerah jika komponen utama PDRB lainnya (misal konsumsi rumah tangga atau investasi) menurun.

Tingkat investasi memberikan kontribusi bagi PDRB cenderung menurun setiap tahunnya dari 22,26% pada tahun 2021 menjadi 20,50% pada tahun 2025 yang menunjukkan tingkat investasi relatif masih rendah, sehingga potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan kemampuan memberikan efek multiplier menjadi terbatas. Hal ini juga dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang tahan terhadap guncangan eksternal, karena investasi adalah salah satu motor penggerak utama inovasi dan produktivitas. Disisi lain perubahan inventori juga sangat kecil hanya sekitar 1,8% setiap tahunnya yang dapat menunjukkan produsen terbatas dalam melakukan ekspansi bisnis sehingga skala usahanya relatif stagnan, begitu juga upaya penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Idealnya menurut Bank Dunia dan IMF, proporsi investasi terhadap suatu

perekonomian yang masih berkembang minimal di kisaran 30% agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Untuk peningkatan investasi masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen.

Daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari *net* ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *marketseller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. *Net* ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah serta masih lemahnya pemasaran. Untuk itu investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.156.
Distribusi Persentase PDRB menurut Komponen Pengeluaran
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Komponen PDRB Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Konsumsi Rumah Tangga (%), terdiri dari:	74,63	74,87	75,33	75,59	75,28
	a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (%)	72,80	73,04	73,49	73,64	73,36
	b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT (%)	1,83	1,83	1,84	1,95	1,92
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/*Government Expenditure* (%)	8,65	7,99	7,71	7,57	7,50
3	Tingkat Investasi (%) terdiri dari:	22,26	21,84	21,47	20,42	20.50
	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	20,37	19,63	18,81	18,49	18,80
	b. Perubahan Inventori	1,89	2,21	2,66	1,93	1,70

No	Komponen PDRB Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
4	Net Ekspor (%)	-5,54	-4,70	-4,51	-3,58	-3,28

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

b. Indeks Ekonomi Hijau dan Biru

Hanya terdapat beberapa komposit data/variabel pembentuk indeks ekonomi hijau dan biru di tingkat Kabupaten Kota yaitu sebagai berikut:

b.1. Kinerja Komposit Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2025

Pada dimensi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang cukup baik selama periode 2021–2025. Laju pertumbuhan PDRB riil meningkat dari 3,71 persen pada tahun 2021 menjadi 5,89 persen pada tahun 2025, mencerminkan pemulihan dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, PDRB per kapita terus meningkat dari Rp21,69 juta menjadi Rp28,99 juta per kapita. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas ekonomi daerah secara bertahap. Pada dimensi Efisiensi Sumber Daya, konsumsi listrik per unit PDRB relatif stabil pada kisaran 25–26 ribu kWh per miliar rupiah PDRB, yang mengindikasikan efisiensi penggunaan energi belum mengalami perubahan signifikan. Sementara itu, intensitas penggunaan air berkisar antara 293–307 m^3 per miliar rupiah PDRB selama periode 2022–2025. Stabilnya kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air masih perlu terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi hemat energi dan konservasi sumber daya.

Pada dimensi Kualitas Lingkungan, terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat dari 64,43 pada tahun 2021 menjadi 75,31 pada tahun 2025. Peningkatan terutama didorong oleh membaiknya kualitas air dan tutupan lahan, di mana indeks kualitas tutupan lahan meningkat dari 37,86 menjadi 63,50. Meskipun demikian, indeks kualitas udara pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengendalian pencemaran udara. Pada dimensi Emisi dan Perubahan Iklim, upaya penurunan emisi gas rumah kaca menunjukkan perkembangan positif. Persentase penurunan emisi GRK meningkat dari sekitar 145,97 persen pada tahun 2023 menjadi 152,86 persen pada tahun 2025. Selain itu, luas lahan kritis berhasil ditekan dari 150.240 hektar pada tahun 2022 menjadi sekitar 133.008 hektar pada tahun 2025. Kondisi

ini mengindikasikan adanya perbaikan pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi lahan di Kabupaten Kebumen.

Pada dimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, capaian pengurangan sampah melalui pendekatan 3R menunjukkan tren yang sangat positif, meningkat dari 23,41 persen pada tahun 2021 menjadi 57,62 persen pada tahun 2025. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah juga meningkat menjadi 54,59 persen pada tahun 2025. Namun demikian, persentase sampah yang tertangani justru mengalami penurunan sejak tahun 2022 sehingga diperlukan penguatan sistem pengelolaan persampahan secara menyeluruh. Pada dimensi Inklusi Sosial dan Ketenagakerjaan Hijau, kondisi sosial ekonomi masyarakat menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,03 persen pada tahun 2021 menjadi 4,95 persen pada tahun 2025, sedangkan IPM meningkat dari 70,56 menjadi 73,17. Rasio Gini relatif terjaga pada tingkat ketimpangan sedang. Namun demikian, cakupan pelayanan air minum perpipaan masih berada di bawah 20 persen dalam tiga tahun terakhir sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan ke depan.

Tabel 2.157.
Komposit Pembentuk Indeks Ekonomi Hijau dan Biru
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Dimensi	Variabel/ Data	2021	2022	2023	2024	2025
KOMPOSIT INDEKS EKONOMI HIJAU						
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Laju pertumbuhan PDRB riil (%)	3,71	5,79	5,62	5,38	5,89
	PDRB per kapita (Rp.ribu/kapita)	21.693,63	23.630,24	25.602,18	27.304,37	28.999,32
Efisiensi Sumber Daya	Konsumsi listrik per unit PDRB (kWh per miliar rupiah PDRB)	26,455	25,796	26,050	26,577	26,317
	Intensitas penggunaan air (m^3 per	NA	293.53	307.49	306.24	298.55

Dimensi	Variabel/ Data	2021	2022	2023	2024	2025
	miliar rupiah PDRB)					
Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,43	68,17	67,16	69,86	75,31
	Indeks kualitas air	52,37	54,49	51,74	53,11	75,53
	Indeks kualitas udara	89,99	90,94	90,41	91,42	81,49
	Indeks kualitas tutupan lahan	37,86	49,53	50,63	58,73	63,50
Emisi dan Perubahan Iklim	Persentase penurunan emisi GRK (%)	NA	NA	145.971,89	151.888,21	152.859,76
	Luas lahan kritis (ha)	NA	150,240.12	133,146.59	133,007.67	133,007.67
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	37,16	21,34	52,45	53,27	54,59
	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	53,75	60,51	30,28	25,69	22,63
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (%)	23,41	26,17	49,74	53,59	57,62
Inklusi Sosial dan	Tingkat kemiskinan (%)	3,71	5,79	5,62	5,38	5,89

Dimensi	Variabel/ Data	2021	2022	2023	2024	2025
Ketenagakerjaan Hijau	Tingkat penganggguran terbuka (%)	6,03	5,92	5,11	5,07	4,95
	Rasio Gini	0,35	0,354	0,333	0,327	0,340
	IPM	70,56	71,29	71,88	72,48	73,17
	Persentase Rumah Tangga mendapatkan Pelayanan Air Minum Perpipaan (Pedesaan dan Perkotaan dalam %)	22,13	17,96	18,73	19,62	19,39
KOMPOSIT INDEKS EKONOMI BIRU						
Kinerja Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	0.53	0.51	0.51	0.48	0.53
	Nilai produksi perikanan tangkap (Rp)	212.457.910.669	173.982.608.774	176.664.480.191	239.742.697.384	216.252.753.322,83
	Nilai produksi perikanan budidaya (Rp)	3.220.874,00	3.355.110,00	3.453.930,00	3.590.480,00	3.524.160,00
Keberlanjutan Perikanan	Persentase kapal berizin (%)				37,57	41,80
Pariwisata Bahari Berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisata bahari	705,478	1,194,904	1,709,002	2,562,515	3,114,191

Sumber: BPS, DLHKP, DPUPR dan Disparbud Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

b.2. Kinerja Komposit Indeks Ekonomi Biru Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2025

Pada dimensi Kinerja Ekonomi Kelautan dan Perikanan, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kebumen relatif stabil pada kisaran 0,48–0,53 persen selama periode 2021–2025. Nilai produksi perikanan tangkap sempat menurun pada tahun 2022, namun kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp239,74 miliar sebelum sedikit menurun pada tahun 2025. Sementara itu, produksi perikanan budidaya menunjukkan tren meningkat secara konsisten dari 3,22 juta menjadi 3,52 juta satuan produksi. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan masih memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian pesisir. Pada dimensi keberlanjutan perikanan, dari data yang ada menunjukkan adanya peningkatan capaian kapal berizin dari 37,57% pada Tahun 2024 menjadi 41,80% pada Tahun 2025 yang diharapkan praktek penangkapan ikan yang ramah lingkungan akan semakin meningkat. Pada dimensi Pariwisata Bahari Berkelanjutan, perkembangan yang sangat signifikan terlihat dari jumlah kunjungan wisata bahari yang terus meningkat dari 705.478 kunjungan pada tahun 2021 menjadi lebih dari 3,11 juta kunjungan pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin berkembangnya daya tarik destinasi wisata pesisir di Kabupaten Kebumen. Tren ini sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Namun demikian, peningkatan kunjungan wisata perlu diimbangi dengan pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem kawasan wisata bahari.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Infrastruktur Daerah

Kebijakan pemantapan infrastruktur daerah harus memedomani kebijakan pengembangan struktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah. Selain itu, juga harus memperhatikan kebijakan pengembangan pola ruang wilayah yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya sebagai upaya mewujudkan tertib tata ruang. Pemantapan infrastruktur diprioritaskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Kemantapan infrastruktur dilihat dari Indeks Infrastruktur Daerah yang dibentuk dari 3 indikator infrastruktur, yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum, Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman, dan Indeks Infrastruktur Perhubungan.

Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah menurun dari 64,59% pada tahun 2021 menjadi 43,26% pada tahun 2025. Yang dalam hal ini ditunjang oleh tiga komponen yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang naik menjadi 50,02% pada tahun 2025. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman menunjukkan turun tajam dari 54,50% pada tahun 2021 menjadi 2,99% pada tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan fluktuatif dari 82,72% pada tahun 2021 menjadi 76,78% pada tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan Target kinerja sampai dengan tahun 2025 sebesar 86,03% menunjukkan peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infrastruktur daerah.

Tabel 2.158.
Indeks Infrastruktur Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Infrastruktur (%)	64,59	43,40	43,81	39,61	43,26
2	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (%)	56,55**	47,90	49,15	48,56	50,02
3	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (%)	54,50	7,25	7,94	1,73	2,99
4	Indeks Infrastruktur Perhubungan (%)	82,72	75,00	74,34	68,53	76,78

Sumber: DPUPR dan Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025
***) Perhitungan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Tahun 2021 belum menyertakan IKSI karena datanya tidak tersedia*

b. Transportasi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan cenderung meningkat, hal ini menunjukkan adanya penambahan volume kendaraan yang lebih tinggi dibandingkan penambahan panjang jalan. Oleh karena itu beberapa ruas jalan di Kabupaten Kebumen mulai mengalami kemacetan utamanya pada saat pagi hari ketika jam berangkat kerja dan sekolah serta sore hari ketika jam pulang kerja dan sekolah. Kemacetan juga terjadi ketika musim liburan termasuk ketika lebaran dan *long weekend.* Sementara itu kinerja kapasitas angkutan umum dan terminal di wilayah Kabupaten Kebumen juga cenderung menurun hanya mengangkut sebanyak 145.422 orang/barang pada tahun 2025. Untuk itu pemantapan sarana jalan dan transportasi masih perlu ditingkatkan di

seluruh wilayah Kabupaten Kebumen utamanya dalam rangka mengendalikan beban biaya logistik.

Tabel 2.159.
Profil Fasilitas/Infrastruktur Transportasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	16	14	17	17	17
2	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang/barang)	1.140.893	1.181.840	1.218.291	223.830	145.422
3	Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun (orang/barang)	1.140.893	1.181.840	1.218.291	202.260	129.513

Sumber: Disperkimhub Kabupaten Kebumen, 2025

c. Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Kebumen mendasari RTRW Tahun 2011-2031 untuk kinerja Tahun 2020 hingga 2023 dan RTRW Tahun 2024-2044 untuk kinerja Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan ketaatan terhadap RTRW sesuai dengan peruntukannya yaitu dari 75% pada Tahun 2020 menjadi 91,35% pada Tahun 2024. Sementara itu berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024-2044 yang menggantikan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2011-2031 menunjukkan adanya penurunan luasan seluruh kawasan budidaya dari 221.434 hektar menjadi 128.106 hektar. Hal ini menyebabkan rasio luas kawasan produktif terhadap luas seluruh kawasan budidaya berubah dari 85,01% menjadi 64,13%. Sedangkan luas kawasan industri telah ditentukan pada RTRW Tahun 2024-2044 yaitu sebesar 3.310 hektar atau mencakup 2,58% dari luas seluruh kawasan budidaya. Untuk rasio luas kawasan perkotaan terhadap luas seluruh kawasan budidaya juga berubah dari 4,35% menjadi 9,99% dikarenakan semakin berkembangnya permukiman perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus tumbuh. Oleh karena itu, peruntukan lahan perlu dioptimalkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW yang berlaku.

Tabel 2.160.
Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	RTRW 2011-2031			RTRW 2024-2044	
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	75,00	91,15	91,25	91,35	91,35

No	Uraian	RTRW 2011-2031			RTRW 2024-2044	
		2021	2022	2023	2024	2025
2	Luas seluruh kawasan budidaya (penjumlahan dari no.3 s.d. 13 dalam hektar), terdiri dari:	221.434	221.434	221.434	128.106	128.106
3	Luas kawasan peruntukan hutan produksi	14.245	14.245	14.245	13.742	13.742
4	Luas kawasan hutan rakyat	30.926	30.926	30.926	0	0
5	Luas kawasan perkebunan rakyat	0	0	0	23.788	23.788
6	Luas kawasan peruntukan pertanian	143.073	143.073	143.073	44.113	44.113
7	Luas kawasan peruntukan perikanan	0	0	0	241	241
8	Luas kawasan peruntukan pertambangan	0	0	0	99	99
9	Luas kawasan peruntukan pariwisata	0	0	0	172	172
10	Luas kawasan peruntukan industri	0	0	0	3.310	3.310
11	Luas kawasan peruntukan permukiman kota	9.632	9.632	9.632	12.798	12.798
12	Luas kawasan peruntukan permukiman desa	23.558	23.558	23.558	27.605	27.605
13	Luas kawasan pertahanan dan keamanan	0	0	0	2.238	2.238
14	Rasio luas kawasan produktif (no. 3 s.d. 9) per luas seluruh kawasan budidaya	85,01%	85,01%	85,01%	64,13%	64,13%
15	Rasio luas kawasan industri (no. 10) per luas seluruh kawasan budidaya	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	2,58%
16	Rasio luas kawasan perkotaan (no. 11) per luas seluruh kawasan budidaya	4,35%	4,35%	4,35%	9,99%	9,99%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2025

d. Fasilitas/Infrastruktur Lembaga Keuangan

Dalam pembangunan ekonomi diperlukan penguatan lembaga intermediasi keuangan utamanya perbankan. Lembaga ini penting untuk

menghubungkan pihak yang kelebihan dana (kreditor dan investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (debitor dan pelaku usaha). Kelancaran aliran modal (likuiditas) sangat penting dalam perekonomian karena adanya efisiensi alokasi sumber daya dana yang berlebih kepada kelompok produktif serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian. Lembaga internediasi keuangan juga membantu mengurangi risiko bagi individu atau perusahaan dengan menyediakan instrumen keuangan seperti tabungan, deposito hingga asuransi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan memitigasi risiko kredit lebih baik dibandingkan individu. Lembaga intermediasi keuangan terutama yang berskala mikro dapat mewujudkan inklusi keuangan yaitu dengan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan untuk mendapatkan layanan tersebut, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Kondisi likuiditas utamanya perbankan di Kabupaten Kebumen dapat tercermin diantaranya dari kondisi dana pihak ketiga (simpanan) dan kredit (pinjaman) di perbankan yang berada di Kabupaten Kebumen. Rasio total dana pihak ketiga pada seluruh bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dari 20,53% pada tahun 2021 menjadi 20,08% pada Tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin berkurangnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan kredit dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada rasio total dana pihak ketiga pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB yang cenderung menurun dari 1,97% pada Tahun 2021 menjadi 1,46% pada Tahun 2025. Untuk itu perlu ditingkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas untuk dapat menyimpan kelebihan dana atau asetnya pada lembaga keuangan seperti perbankan.

Sementara itu, rasio total kredit pada Bank Umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB mengalami fluktuasi hingga hanya mencapai 14,66% pada Tahun 2025. Sedangkan rasio total kredit pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB cenderung menurun dari 1,53% pada Tahun 2021 menjadi 1,13% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya fungsi perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut. Akan tetapi terjadi peningkatan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit dari 54,48% pada Tahun 2021 menjadi 81,99% pada Tahun 2025 yang menunjukkan peningkatan inklusi keuangan. Kinerja perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen didukung dengan jenis jumlah kantor bank yang mencapai 66 unit pada Tahun 2025 yang terdiri dari Bank BUMN, BUMD, Swasta Nasional (Konvensional dan Syariah) dan BPR (Konvensional dan Syariah).

Tabel 2.161.
Kondisi Likuiditas Perbankan
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum dan BPR per PDRB	20,53%	19,42%	17,44%	16,71%	20,08%
2	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	1,97%	1,75%	1,59%	1,53%	1,46%
3	Total Kredit Pada Bank Umum dan BPR per PDRB	18,66%	21,79%	17,95%	15,01%	14,66%
4	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	1,53%	1,56%	1,43%	1,24%	1,13%
5	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	54,48%	56,27%	55,65%	71,89%	81,99%
6	Jumlah kantor bank (unit)	110	72	66	66	66

Sumber: Setda dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

e. Amenitas Hotel dan Restoran

Sebagai daerah yang potensial untuk pengembangan wisata serta penyelenggaraan even, Kabupaten Kebumen telah didukung amenitas hotel dan restoran. Hingga Tahun 2025 jumlah restoran/rumah makan mencapai 357 unit sedangkan hotel dan akomodasi lainnya sebanyak 58 unit termasuk hotel berbintang 3 dan 4. Hal ini juga sangat mendukung pengembangan *Geopark* Kebumen yang mendapatkan status *Global Geopark* oleh UNESCO pada Tahun 2025. Dengan demikian peningkatan maupun potensi usaha hotel dan restoran perlu ditingkatkan dalam mendukung penyediaan amenitas pariwisata maupun *Geopark.*

Tabel 2.162.
Amenitas Hotel dan Restoran
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah restoran/rumah makan	221	238	317	339	357
2	Jumlah hotel dan akomodasi lainnya	38	41	40	49	58

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen, 2025

f. Fasilitas/Infrastruktur Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi

Penyediaan fasilitas air bersih, listrik dan telekomunikasi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Sejak tahun 2023, cakupan rumah tangga yang menggunakan air bersih maupun listrik telah mencapai

100%, dimana akses air bersih diperoleh melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi, sementara listrik seluruhnya bersumber dari PLN. Sedangkan persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menggunakan HP/komputer terus meningkat dan mencapai 87,73% pada tahun 2025. Untuk itu fasilitas ini harus terus dioptimalkan, utamanya kemudahan bagi para pengguna baru khususnya sektor usaha.

Tabel 2.163.
Kondisi Fasilitas/Infrastruktur Air Bersih, Listrik dan Telekomunikasi Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih (%)	87,80	96,84	100,00	100,00	100,00
2	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	99,67	99,66	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan HP/Komputer	82,97	86,33	83,22	84,61	87,73

Sumber: DPUPR dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

2.1.4.2. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Tingkat Kriminalitas dan Demonstrasi

Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Kebumen relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai upaya penciptaan kantrantibmas diupayakan oleh segenap *stakeholder* terkait, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk tetap menjaga keamanan lingkungannya. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2021-2025 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2025 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan yaitu pada kasus pencurian dan penipuan. Angka kriminalitas di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164.
Jumlah Tindak Kriminalitas Tercatat Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Tindak Kriminal	2021	2022	2023	2024	2025
1	Narkoba	36	32	37	29	29
2	Pembunuhan	0	3	0	2	2
3	Kekerasan Seksual	28	0	26	29	27

No	Tindak Kriminal	2021	2022	2023	2024	2025
4	Penganiayaan	6	5	14	5	7
5	Pencurian	46	41	54	35	46
6	Penipuan	16	16	13	9	12
7	Pemalsuan Uang	0	1	0	1	0
	Jumlah Total	132	98	144	110	123

Sumber: Polres Kabupaten Kebumen, 2025

Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2025 masih tergolong cukup tinggi walaupun mengalami penurunan di tahun 2025. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik terutama di tahun 2024 yang merupakan tahun dimana pesta demokrasi diselenggarakan melalui Pemilu dan Pilkada serentak. Berbagai unjuk rasa yang selama ini terjadi di Kabupaten Kebumen relatif berjalan tertib sehingga tidak menimbulkan berbagai kerugian dan tidak berdampak negatif terhadap iklim investasi yang ada di Kabupaten Kebumen.

Tabel 2.165.
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Bidang	2021	2022	2023	2024	2025
1	Bidang Politik	4	5	2	8	4
2	Bidang Ekonomi	0	3	2	4	1
Jumlah		4	8	4	12	5

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Kebumen, 2025

b. Perizinan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Perizinan menjadi hal yang sangat penting bagi peningkatan daya saing investasi karena berkaitan dengan legalitas, kelancaran operasional, serta kepastian hukum bagi investor. Dengan optimalnya kinerja perijinan, maka akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis.

Untuk memaksimalkan pelayanan perizinan tersebut, upaya yang dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran izin di Kabupaten Kebumen dilakukan dalam kurun waktu 7 hari. Saat ini untuk melakukan perizinan sudah dilakukan dalam satu pintu di Mal Pelayanan Publik. Berbagai ijin sudah terintegrasi di sana termasuk perizinan untuk investasi. Melalui Sistem OSS (*One Single Submission*), izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari satu jam. Keuntungan adanya OSS antara lain:

1) Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan. OSS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini menggunakan SPIPISE dengan PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Di dalam OSS juga terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya seperti Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Indonesia *National Single Window* (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kemendagri demi memudahkan perizinan
2) Mudah dan Cepat saat Mengurus Perizinan, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan.
3) Pengawasan Sistem Semakin Ketat, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Pemberian Insentif dapat berbentuk: a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah. b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. Pemberian Kemudahan dapat berbentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan Investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Tabel 2.166.
***Return On Asset (ROA)* Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**
Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Return on Aset (ROA) BUMD (Persen)	3,58	2,73	4,01	3,83	2,69

Sumber: Setda dan BPS Kabupaten Kebumen (data diolah), 2025

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga ikut serta secara aktif dalam sektor riil perekonomian daerah tertentu/prioritas dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai sebuah lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan efek multiplier yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. BUMD juga diharapkan dapat berperan lebih strategis pada era otonomi, baik dalam upayanya mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah hingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab pada prinsipnya, muara dari otonomi daerah adalah tercapainya kemandirian dalam sektor pendanaan pemerintah daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Secara umum, tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan, dalam bentuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan bagi pemerintah daerah.

Untuk itu optimalisasi kinerja BUMD perlu terus ditingkatkan dengan peningkatan produktivitas perusahaan (BUMD) melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Hal ini tercermin dari *Return On Asset* (ROA) BUMD yang menunjukkan kinerja masih rendah dan fluktuatif hingga Tahun 2025 sebesar 2,69%. Angka ini merupakan gabungan dari seluruh BUMD, walaupun relatif kecil namun karena terdapat BUMD yang padat aset seperti air minum, dengan ROA sebesar itu dapat dikategorikan cukup baik walaupun belum tinggi.

c. Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Dukungan pemerintah sangat penting daya menjaga iklim usaha dan daya saing investasi di Kabupaten Kebumen. Kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Kebumen dapat dilakukan dengan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Walaupun bersifat pungutan,

namun jika dikelola dengan baik maka kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat mendukung iklim usaha dan daya saing investasi. Pajak dan retribusi menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan publik seperti jalan, listrik, air bersih serta fasilitas umum lainnya termasuk peningkatan keamanan dan stabilitas sosial. Kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia lokal sehingga tercipta tenaga kerja lokal yang berkualitas yang dibutuhkan bagi dunia usaha. Selain itu juga dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan *start up* serta adanya kebijakan insentif pajak bagi mereka juga dapat meningkatkan daya saing usaha bisnisnya.

Mendasari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten Kebumen terdiri dari:

1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a) PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan);
   b) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
   c) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
   d) Pajak Reklame;
   e) PAT (Pajak Air Tanah);
   f) Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);
   g) Pajak Sarang Burung Walet;
   h) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
   i) Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).
2) Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a) Pelayanan kesehatan;
   b) Pelayanan kebersihan;
   c) Pelayanan parkir di tepi Jalan umum;
   d) Pelayanan Pasar
   e) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   f) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   g) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   h) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   i) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   j) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   k) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
   l) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   m) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung); dan
   n) Penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing).

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemberian keringanan, pengurangan dan

pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi serta insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi.

Selain kebijakan fiskal terkait pajak dan retribusi daerah, beberapa Peraturan Daerah (Perda) juga telah ditetapkan untuk mendukung iklim usaha dan daya saing daerah di wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu:

1) Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Pelindungan Usaha Mikro; bahwa menumbuhkan iklim usaha mikro agar memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pembenahan dari aspek regulasi, maka perlu membentuk suatu peraturan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, pengembangan, dan pelindungan usaha mikro;
2) Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan pelaku usaha dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha sesuai kewenangan daerah;
3) Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa; bahwa dalam rangka pembinaan pemerintah desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya;
4) Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; bahwa tempat pelelangan ikan merupakan sarana bagi para nelayan untuk menjual hasil tangkapan dan pembudidayaan ikan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Kebumen, perlu mengoptimalkan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
5) Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang;
6) Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pariwisata; bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Kebumen diarahkan dapat memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha;
7) Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; bahwa pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah serta Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah

Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah;

8) Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana di daerah, sehingga perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat serta tercipta lingkungan yang baik dan sehat;
9) Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; bahwa Pasar Rakyat merupakan sarana perdagangan bagi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan diberdayakan; serta
10) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Desa; bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara mandiri segala potensi yang ada di Desa serta bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama adengan Desa lain dan/atau dengan Pihak Ketiga guna mengatasi permasalahan serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing tinggi.

d. Pengembangan Desa Swasembada

Desa swasembada merupakan desa yang telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi pada berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial dan infrastruktur. Semakin banyak jumlah desa swasembada dalam suatu daerah maka semakin tinggi daya saing daerah tersebut, karena desa swasembada mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang kuat, kemandirian ekonomi, ketersediaan infrastruktur yang memadai, kemandirian sosial serta tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Namun demikian, capaian desa swasembada di Kebupaten Kebumen masih relatif terbatas. Jumlah desa swasembada sempat mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 72 desa atau 16,04%. Namun kembali mengalami penurunan menjadi 22 desa atau 4,89% pada tahun 2025.

Tabel 2.167.
Desa Swasembada di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah desa berstatus swasembada (desa)	31	72	41	23	22
Persentase desa berstatus swasembada (Persen)	6,90	16,04	9,13	5,12	4,89

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumberdaya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis fokus sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1/S2/S3 serta rasio ketergantungan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

A. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia salah satunya diukur melalui rasio penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1/S2/S3. Dalam hal ini jika semakin banyak penduduk yang telah menamatkan pendidikannya hingga S1 ke atas dianggap kualitas SDM penduduk juga semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang yang terlihat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan akan lebih produktif dalam bekerja yang dapat mencerminkan sebagai tenaga kerja yang berkualitas. Berdasarkan data Agregat Kependudukan Kabupaten Kebumen menunjukkan jumlah penduduk yang telah menamatkan pendidikan S1, S2 maupun S3 terus mengalami peningkatan. Secara total jumlah lulusan S1/S2/S3 meningkat dari 38.003 orang pada Tahun 2021 menjadi 48.384 orang pada Tahun 2025. Hal ini juga menyebabkan rasio penduduk yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang S1/S2/S3 juga meningkat dari 2,70% pada Tahun 2021 menjadi 3,33% pada Tahun 2025. Namun demikian dengan rasio penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga S1 ke atas hanya sekitar 3% menunjukkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen masih relatif rendah.

Tabel 2.168.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah lulusan S1 (orang)	36.602	39.825	41.813	44.016	46.391
2.	Jumlah lulusan S2 (orang)	1.344	1.542	1.688	1.815	1.920
3.	Jumlah lulusan S3 (orang)	57	56	56	63	73

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3 (orang)	38.003	41.423	43.557	45.894	48.384
5.	Jumlah Penduduk (orang)	1.405.644	1.421.143	1.434.023	1.446.833	1.453.417
6.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	2,70%	2,91%	3,04%	3,17%	3,33%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Rasio ketergantungan Kabupaten Kebumen fluktutif, namun cenderung meningkat dari 46,57% pada Tahun 2021 menjadi 46,85% pada Tahun 2025. Jika dilihat dari usia menunjukkan penduduk usia di atas 64 tahun terus bertambah, salah satunya dikarenakan meningkatnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Kebumen. Perlu diketahui bahwa dari total penduduk Kebumen tahun 2025 sebesar 1.453.417 penduduk, terdapat 989.731 penduduk usia produktif, dan sebesar 463.686 penduduk usia non produktif, dengan rincian 302.509 penduduk berusia di bawah 15 tahun dan sebesar 161.177 penduduk berusia 65 tahun ke atas. Penduduk usia produktif Kabupaten Kebumen mengalami penurunan dari 991.399 penduduk pada 2024 menjadi 989.731 penduduk pada 2025. Namun penduduk usia non produktif Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan dari 455.434 penduduk pada 2024 menjadi 463.686 penduduk pada 2025.

Semakin meningkatnya rasio ketergantungan mengandung arti semakin meningkat pula beban tanggungan bagi kelompok usia produktif dalam menanggung kelompok usia non produktif. Persentase ketergantungan Kabupaten Kebumen tahun 2025 mencapai angka 46,85% yang bermakna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 hingga 47 penduduk usia non produktif. Untuk itu peluang masih melimpahnya usia produktif saat ini harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas mereka salah satunya dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk usia di bawah 15 tahun harus dioptimalkan kualitas pendidikannya agar nantinya siap bekerja dengan produktivitas yang tinggi ketika telah memasuki usia kerja sehingga tenaga kerja Kabupaten Kebumen akan lebih berdaya saing.

Tabel 2.169.
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk Usia <15 thn (orang)	317.595	297.631	306.173	304.696	302.509
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun (orang)	132.653	145.909	144.267	150.738	161.177
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (Usia <15 thn ditambah Usia > 64 tahun dalam orang)	450.248	443.540	450.440	455.434	463.686
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64 (orang)	966.721	977.603	976.392	991.399	989.731
Rasio Ketergantungan (%)	46,57	45,37	46,10	45,94	46,85

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Kebumen, 2025

2.2. Evaluasi Kinerja RKPD Sampai Dengan Tahun 2025 dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2025

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mendasari target RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Hal ini dikarenakan dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan sampai dengan tahun n-2 yaitu Tahun 2025 dengan target RKPD Tahun 2025 dan target sampai dengan akhir tahun/periode RPJMD yaitu Tahun 2029. Capaian IKU terdiri dari IKU Tujuan Daerah, IKU Sasaran Daerah, IKU Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta IKU Program seperti yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Status predikat kinerja menggunakan skala nilai peringkat kinerja Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Wajib sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.170.
Status Predikat Kinerja

Status Predikat Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja
ST = Sangat Tinggi	91% ≤100%
T = Tinggi	76% ≤90%
S = Sedang	66% ≤75%
R = Rendah	51% ≤65%

Status Predikat Kinerja	Interval Nilai Capaian Kinerja
SR = Sangat Rendah	≤50%

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

2.2.1. Evaluasi Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.2.1.1. IKU Tujuan Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Daerah Kabupaten sesuai yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 sejumlah 9 indikator. Hasil evaluasi kinerja IKU Tujuan Daerah sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.171.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,48	72,88	73,17	100,00%	ST	74,90	97,69%	ST
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	15,71	14,71-13,90	13,58	100,00%	ST	10,50-9,73	77,32%	T
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	5,40-6,30	5,89	100,00%	ST	7,80-8,30	75,51%	S
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	27,29	31,67	29,00	91,57%	ST	54,16	53,55%	R
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	39,61	47,11	43,26	91,83%	ST	53,76	80,47%	T
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	151.888,21	1.985.634,95	152.859,76	7,70%	SR	5.688.603,15	2,69%	SR
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,74	86,03	87,41	100,00%	ST	87,50	99,90%	ST
8	Indeks Kebudayaan	Indeks	11,50	12,26	19,81	100,00%	ST	22,48	88,12%	T
9	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,38	82,41	82,64	100,00%	ST	84,29	98,04%	ST
Rata-rata Capaian RKPD 2025						87,90%	T	Rata-rata Capaian RPJMD s.d. 2025	74,81%	S

Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berbagai sumber), 2025

Capaian kinerja daerah hingga tahun 2025 yang digambarkan melalui 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Daerah mencapai rata-rata 87,90 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T). Terdapat 8 indikator yang telah mencapai capaian Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator dengan capaian masih Sangat Rendah (SR).

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tingkat capaian sebesar 100% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Kinerja IPM Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana sejak tahun 2021 telah mencapai 70,56 dan meningkat menjadi 73,17 pada tahun 2025. Berdasarkan skala internasional (UNDP), sejak tahun 2021 kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi karena IPM berada pada rentang nilai 70 ≤ IPM < 80. Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebih target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia baik pada segi pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.
b) Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang semakin membaik. Tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan menjadi 17,83 persen pada tahun 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan pemulihan perekonomian daerah, tingkat kemiskinan kembali menurun secara konsisten hingga mencapai 13,58 persen pada tahun 2025. Kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana Kabupaten Kebumen berhasil menggeser posisinya dari status kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah menjadi peringkat kedua dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 2,13 persen. Pada tahun 2025, capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan telah mencapai 100,00 persen sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.
c) Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat capaian sebesar 100,00% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Sepanjang tahun 2021-2025 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen menunjukkan tren yang terus membaik. Pasca Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen terus menguat secara positif dari 3,71 persen pada tahun 2021 menjadi 5,89 persen pada tahun 2025.
d) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 91,57% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan rata-rata kemampuan ekonomi penduduk di suatu daerah, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan maupun daya beli riil masyarakat. Seperti halnya PDRB, semakin tinggi PDRB per kapita menunjukkan semakin tingginya

penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat sehingga standar hidup akan lebih baik.

e) Indeks Infrastruktur dengan tingkat capaian sebesar 91,83 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Indeks infrastruktur sebesar 43,26 persen pada tahun 2025, ditunjang oleh tiga komponen yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum, indeks infrastruktur perumahan dan permukiman, dan indeks infrastruktur perhubungan.

f) Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan tingkat capaian sebesar 7,70% atau masih mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).
Sejak tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai menghitung penurunan emisi GRK dan secara hasil mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO2eq pada tahun 2023 menjadi 152.859,76 TonCO2eq pada tahun 2025. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada tahun 2027 yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 2.399.500,80 TonCO2eq. Target tahun 2027 ini ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK. Salah satu faktor yang menyebabkan belum tercapainya penurunan Emisi GRK Kumulatif yaitu belum optimalnya pelaporan hasil aktivitas masyarakat dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca.

g) Indeks Reformasi Birokrasi dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Pada periode 2021-2025 terjadi peningkatan capaian dalam mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, di mana Indeks Reformasi Birokrasi meningkat semula 59,54 pada tahun 2021 menjadi 87,41 pada tahun 2025.

h) Indeks Kebudayaan dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Indeks Kebudayaan di tahun pertama RPJMD menunjukkan bahwa capaian kinerja telah *on the track.* Indeks Kebudayaan diharapkan akan mencapai target pada akhir periode RPJMD dikarenakan kebudayaan merupakan bagian utama dari pengembangan *Geopark* Kebumen sebagai UNESCO *Global Geopark*.

i) Indeks Kesalehan Sosial dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Indeks Kesalehan Sosial mengalami peningkatan capaian, yaitu pada tahun 2024 sebesar 82,38 persen menjadi 82,64 persen pada tahun 2025.

Sementara itu, **capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025** menunjukkan capaian rata-rata sebesar 74,81 persen dengan kategori Sedang (S). IKU Tujuan yang telah mencapai predikat Sangat Tinggi (ST) sejumlah 3 indikator, 3 indikator mencapai predikat Tinggi (T), 1 indikator dengan predikat Sedang (S), 1 indikator berstatus predikat Rendah (R) dan 1 indikator dengan predikat Sangat Rendah (SR).

2.2.1.2. IKU Sasaran Daerah

Terdapat 21 IKU Sasaran Daerah sesuai yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Hasil evaluasi kinerja IKU Sasaran Daerah sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.172.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Daerah

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,76	20,80	20,47	98,41%	ST	21,02	97,38%	ST
2	Indeks Pendidikan	Indeks	63,43	64,80	63,58	98,12%	ST	68,06	93,42%	ST
3	Indeks Kesehatan	Indeks	84,95	85,41	85,47	100,00%	ST	87,70	97,46%	ST
4	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,59	2,72	5,14	100,00%	ST	3,47	100,00%	ST
5	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,12	2,13	2,14	100,00%	ST	2,16	99,07%	ST
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-3,71	-3,50	-3,28	100,00%	ST	-1,00	30,49%	SR
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,00	6,30	6,21	98,57%	ST	8,04	77,24%	T
8	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,35	10,87	11,79	100,00%	ST	13,87	85,00%	T
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,07	4,77	4,95	96,36%	ST	4,10	82,83%	T

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
10	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	1,73	5,75	2,99	52,00%	R	14,24	21,00%	SR
11	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	68,53	86,03	76,78	89,25%	T	90,02	85,29%	T
12	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	48,56	49,54	50,02	100,00%	ST	57,02	87,72%	T
13	Persentase Desa Mandiri	Persen	NA	35,41	44,09	100,00%	ST	49,89	88,37%	T
14	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	61,57	65,26	65,18	99,88%	ST	67,91	95,98%	ST
15	Indeks Risiko Bencana	Indeks	121,38	118,42-116,96	78,88	100,00%	ST	112,27-107,77	100,00%	ST
16	Nilai SAKIP	Nilai	67,54	68,78	68,92	100,00%	ST	75,00	91,89%	ST
17	Nilai gritas	Nilai	3,30	3,42	2,695	78,80%	T	4,00	67,38%	S
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,59	4,61	4,33	93,93%	ST	4,72	91,74%	ST
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	7,64	12,10	22,89	100,00%	ST	18,47	100,00%	ST
20	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	NA	77,00	53,79	70,00%	S	87,00	61,83%	R

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian				
21	Indeks Ketertiban Umum	Indeks	98,47	100,00	100,00	100,00%	ST	100,00	100,00%	ST
Rata-rata Capaian RKPD 2025						94,06%	ST	Rata-rata Capaian RPJMD s.d 2025	83,53%	T

Sumber: BPS dan Pemerintah Kabupaten Kebumen (berbagai sumber), 2025

Capaian kinerja RKPD Tahun 2025 menunjukkan 21 IKU Sasaran Daerah mencapai rata-rata Tingkat capaian 94,08 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Terdapat 17 IKU telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 IKU Sasaran status predikat kinerja Tinggi (T), 1 indikator status predikat Sedang (S) dan 1 indikator status predikat Rendah (R), masing-masing indikator kinerja sasaran daerah yaitu:

a) Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia dengan tingkat capaian sebesar 98,41% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Belum tercapainya Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kirteria Bank Dunia dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kelompok masyarakat menengah ke atas serta terjadinya inflasi yang memberikan dampak lebih berat bagi kelompok bawah dikarenakan sebagian besar pengeluaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok.
b) Indeks Pendidikan dengan tingkat capaian sebesar 98,12 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen mengalami peningkatan dari 62,25 pada tahun 2021 menjadi 63,58 pada tahun 2025. Dengan capaian sebesar 63,58 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.
c) Indeks Kesehatan dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
d) LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
e) Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
f) Net Ekspor Barang dan Jasa dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
g) LPE Kategori Industri Pengolahan dengan tingkat capaian sebesar 98,57 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Subsektor industri pengolahan pada tahun 2025 telah tumbuh 6,21 persen lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi secara agregat yaitu sebesar 5,89 persen, namun masih sedikit lebih rendah dibandingkan target perlumbuhan sub sektor industri pengolahan yang telah ditetapkan yaitu 6,30%. Hal ini dikarenakan situasi perekonomian yang fluktuatif dan susah diprediksi menyebabkan adanya peningkatan harga bahan baku yang mempengaruhi *supply* dan *demand.*
h) LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
i) Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian sebesar 96,36 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Kinerja TPT Kabupaten Kebumen selama tahun 2021-2025 terus membaik dari 6,03 persen pada tahun 2021 menjadi 4,95 persen pada tahun 2025.

Tingkat ketercapaian dibandingkan target yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen menunjukkan mendekati 100 persen setiap tahunnya bahkan mencapai 100 persen pada tahun 2023-2024. Membaiknya pertumbuhan ekonomi dan tingkat perubahan harga yang moderat sepertinya cukup mampu mengurangi TPT di Kabupaten Kebumen. Namun demikian, dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kebumen harus terus dilakukan kolaborasi semua stakeholder utamanya Perangkat Daerah terkait, Balai Latihan Kerja hingga Lembaga Pelatihan Kerja. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan UMK/IKM yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, serta pelatihan dan penempatan tenaga kerja termasuk di luar negeri

j) Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan tingkat capaian sebesar 52,00 persen atau masih berada pada status predikat kinerja Rendah (R). Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani dan kawasan kumuh yang belum tertangani
k) Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan tingkat capaian sebesar 89,25 persen atau mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
l) Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
m) Persentase Desa Mandiri dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Kebumen menunjukan tren peningkatan selama periode 2021-2025. Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2025 telah mencapai 198 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan ini dipengaruhi oleh semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa serta motivasi desa dalam mencapai status desa mandiri karena berpengaruh pada penerimaan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada tahun 2021 menjadi 44,09% pada tahun 2025.
n) Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian sebesar 99,88% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
o) Indeks Risiko Bencana dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Nilai IRBI Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan menurun yang mengindikasikan berkurangnya tingkat risiko bencana, yaitu dari 114,67 pada tahun 2021 menjadi 78,88 pada tahun 2025. Untuk meminimalkan risiko bencana tersebut, upaya dapat difokuskan pada dua komponen utama pembentuk IRBI, yaitu penurunan tingkat kerentanan serta peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana.
p) Nilai SAKIP dengan tingkat capaian sebesar 100,00% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
   Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari 65,18 pada tahun 2021 menjadi 68,92 pada tahun 2025, sesuai dengan target

yang telah ditetapkan dan berada pada kategori B/Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa AKIP telah berjalan dengan baik pada unit kerja utama, namun masih diperlukan penguatan manajemen kinerja hingga ke level unit kerja yang lebih rendah.

q) Nilai Maturitas SPIP dengan tingkat capaian sebesar 78,80 persen atau mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sementara secara tren dari tahun 2021-2024, menunjukan tren kenaikan signifikan pada Nilai Maturitas SPIP dari 2,66 di tahun 2021 naik menjadi 3,30 di tahun 2024. Namun menurun menjadi 2,695 pada tahun 2025.

r) Indeks Pelayanan Publik dengan tingkat capaian sebesar 93,93% atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

s) Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

t) Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan dengan tingkat capaian 70 persen atau mencapai status predikat Sedang (S) pada tahun 2025 dengan capaian realisasi 53,79 persen.

u) Indeks Ketertiban Umum dengan tingkat capaian 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Kebumen relatif stabil selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dengan persentase Penyelesaian Penegakkan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan Persentase Penegakkan Perda yang mencapai 100 persen pada setiap tahunnya. Sementara itu, penanganan kebakaran di Kabupaten Kebumen telah cukup optimal. Hal ini terlihat dari *response time* penanganan kebakaran di Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 mencapai 8 menit, dimana idealnya paling lambat 15 menit sejak menerima laporan hingga tim pemadam kebakaran tiba di lokasi penanganan.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan 21 IKU Sasaran telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T) dimana 4 IKU telah mencapai tingkat capaian 100 persen. Terdapat 5 IKU Sasaran status predikat kinerja Tinggi (T), 1 Indikator dengan predikat Sedang (S), 1 Indikator dengan predikat Rendah (R) dan 2 indikator rengan predikat Sangat Rendah (SR), masing-masing indikator kinerja sasaran daerah yaitu:

a) Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia dengan tingkat capaian sebesar 97,38 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

b) Indeks Pendidikan dengan tingkat capaian sebesar 95,42 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

c) Indeks Kesehatan dengan tingkat capaian sebesar 97,46 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
d) LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan pada tahun 2025 RPJMD telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada setiap periode maupun pada akhir periode.
e) Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat capaian sebesar 99,07 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
f) Net Ekspor Barang dan Jasa dengan tingkat capaian sebesar 30,49 persen atau masih mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).
Daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari net ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *marketseller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. Net ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah serta masih lemahnya pemasaran. Untuk itu investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen
g) LPE Kategori Industri Pengolahan dengan tingkat capaian sebesar 77,24 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
h) LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan tingkat capaian sebesar 85,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
i) Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian sebesar 82,83 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T). Ke depan upaya penurunan TPT akan dilakukan dengan rencana pengembangan Kawasan Industri untuk manufaktur yang merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
j) Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan tingkat capaian sebesar 21,00 persen atau mencapai status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).
k) Indeks Infrastruktur Perhubungan dengan tingkat capaian sebesar 85,29 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

l) Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum dengan tingkat capaian sebesar 87,72 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
m) Persentase Desa Mandiri dengan tingkat capaian sebesar 88,37 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).
n) Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tingkat capaian sebesar 95,98 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
o) Indeks Risiko Bencana dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
p) Nilai SAKIP dengan tingkat capaian sebesar 91,89 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
q) Nilai Maturitas SPIP dengan tingkat capaian sebesar 67,38 persen atau masih mencapai status predikat kinerja Sedang (S).
r) Indeks Pelayanan Publik dengan tingkat capaian sebesar 91,74 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
s) Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan dengan tingkat capaian sebesar 100 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).
t) Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan pada tahun 2025 dengan tingkat capaian 61,83 persen atau masih berada pada status predikat kinerja Rendah (R).
u) Indeks Ketertiban Umum dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Secara agregat rata-rata target akhir RPJMD sampai dengan Tahun 2025 adalah sebesar 83,53 persen atau telah mencapai status predikat kinerja Tinggi (T).

2.2.2. Evaluasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mampu merepresentasikan pencapaian sasaran utama pembangunan secara menyeluruh dan strategis diperlukan agar hasil evaluasi kinerja lebih akurat dan fokus guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. IKK juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Adapun capaian IKD dan IKK Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.173.
Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,79	72,06	88,10	T	82,94	86,88	T
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	9,15	9,24	99,02	ST	7,55	81,71	T
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	17,00	17,21	100,00	ST	35,00	49,17	SR
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	58,00	59,35	100,00	ST	61,50	96,50	ST
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,71	75,31	100,00	ST	74,94	100,00	ST
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,93	13,98	100,00	ST	30,00	46,60	SR

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	55,81	54,59	97,81	ST	60,89	89,65	T
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	1.985.634,90	152.859,76	7,69	SR	5.688.603,15	2,69	SR
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	118,42-116,96	78,88	100,00	ST	112,27-107,77	100,00	ST
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,83	0,46	55,42	R	0,83	55,42	R
11	Rasio Penduduk	Persen	103,04	102,83	99,79	ST	103,34	99,50	ST
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	1.138,69	1.135	99,73	ST	1180,81	96,12	ST
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,40-6,30	5,89	100,00	ST	7,80-8,30	75,51	S
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,71-13,90	13,58	100,00	ST	10,50-9,73	77,32	T
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	31,67	29,00	91,57	ST	54,16	53,55	R
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,77	4,95	96,36	ST	4,1	82,83	T
5	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,80	20,47	98,41	ST	21,02	97,38	ST
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,88	73,17	100,00	ST	74,9	97,69	ST
7	Indeks Kesehatan	Indeks	85,41	85,47	100,00	ST	87,7	97,46	ST
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,52	75,56	100,00	ST	77,01	98,12	ST
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14	9	100,00	ST	12	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
10	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,10	7,53	100,00	ST	8,98	100,00	ST
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	Persen	95,00	95,00	100,00	ST	96,25	98,70	T
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	Persen	90,00	90,00	100,00	ST	92,81	96,97	ST
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,07	98,80	99,73	ST	99,07	99,73	ST
14	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	75,62	80,86	100,00	ST	76,12	100,00	ST
15	Jumlah Kasus Kematian Balita	Kasus	160	160	100,00	ST	140	87,50	T
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	36,00	36,00	100,00	ST	80	45,00	SR
17	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100	100,00	ST
18	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100	100,00	ST
19	Persentase Puskesmas yang Memiliki Kebijakan Operasional Aktifitas Fisik bagi Masyarakat	Persen	85,00	85,00	100,00	ST	100	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
20	Indeks Pendidikan	Indeks	64,80	63,58	98,12	ST	68,06	93,42	ST
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,89	7,89	100,00	ST	8,14	96,93	ST
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,86	13,42	96,83	ST	14,74	91,04	ST
23	Literasi Membaca SD	Persen	84,29	84,23	99,93	ST	86,79	97,05	ST
24	Literasi Membaca SMP	Persen	87,30	90,98	100,00	ST	89,80	100,00	ST
25	Numerasi Membaca SD	Persen	73,94	81,59	100,00	ST	76,19	100,00	ST
26	Numerasi Membaca SMP	Persen	82,35	86,79	100,00	ST	84,85	100,00	ST
27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,11	4,83	59,56	R	9,45	51,11	R
28	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	85,85	83,33	97,06	ST	89,26	93,36	ST
29	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,28	0,28	100,00	ST	1,74	16,09	SR
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	41,19	22,62	54,92	SR	54,29	41,66	SR
31	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	Persen	8,03	8,03	100,00	ST	41,3	19,44	SR
32	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan	Persen	12,10	22,89	100,00	ST	18,47	100,00	ST
33	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	53.800	53.850	100,00	ST	59.090	91,13	ST
34	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif	Persen	22,63	21,23	93,81	ST	24,72	85,88	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir								
35	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	64,31	90,66	100,00	ST	66,48	100,00	ST
36	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,41	82,64	100,00	ST	84,29	98,04	ST
37	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	85,43	86,30	100,00	ST	89,13	96,82	ST
38	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	Lembaga	NA	NA	NA	NA	486	NA	NA
39	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	Lembaga	NA	NA	NA	NA	251	NA	NA
40	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	77,00	53,79	70,00	S	87,00	61,83	R
41	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,56	0,56	100,00	ST	0,71	78,87	T
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,67-64,68	75,30	100,00	ST	68,52-68,56	100,00	ST
43	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,327-0,318	0,149	100,00	ST	0,313-0,266	100,00	ST
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Rasio Ketergantungan	Persen	46,90	46,85	99,89	ST	47,15	99,34	ST
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	22,97	22,66	98,65	ST	24,04	94,26	ST
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,30	6,21	98,57	ST	8,04	77,24	T
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,00	3,01	100,00	ST	3,90	77,18	T
5	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	10,87	11,79	100,00	ST	13,87	85,00	T
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,00	2,96	98,67	ST	3,64	81,32	T
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,83	1,46	79,78	T	2,04	71,57	S
8	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	4,08	2,69	65,93	R	4,59	58,60	R
9	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,78	4,26	89,12	T	4,86	87,65	T
10	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	27	25	92,59	ST	40	62,50	R
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77,81	76,17	97,89	ST	80	95,21	ST
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	66,96	66,41	99,18	ST	69,46	95,61	ST
13	Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,97	3,03	100,00	ST	3,22	94,10	ST
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)	Persen	19,03	18,80	98,79	ST	19,66	95,63	ST
15	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-3,50	-3,28	100,00	ST	-1	30,49	SR

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	74,86	70,97	94,80	ST	96,01	73,92	S
17	Persentase Desa Mandiri	Persen	35,41	44,09	100,00	ST	49,89	88,37	T
18	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89,52	93,71	100 ,00	ST	90,07	100,00	ST
19	Indeks Infrastruktur	Indeks	47,11	43,26	91,83	ST	53,76	80,47	T
20	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	5,75	2,99	52,00	R	14,24	21,00	SR
21	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	86,03	76,78	89,25	T	90,02	85,29	T
22	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	49,54	50,02	100,00	ST	57,02	87,72	T
23	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	74,36	74,27	99,88	ST	84,36	88,04	T
24	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	79,78	63,67	79,81	T	91,51	69,58	S
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,62	0,54	87,09	T	0,62	87,09	T
26	Disparitas Harga	Persen	±10	-9,96	100,00	ST	±10	100,00	ST
27	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	2,72	5,14	100,00	ST	3,47	100,00	ST
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,03	87,41	100,00	ST	87,50	99,90	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,53	99,54	100,00	ST	98,58	100,00	ST
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,09	NA	NA	NA	4,22	NA	NA
4	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61	4,33	93,93	ST	4,72	91,74	ST
6	Indeks Integritas Nasional	Indeks	79,81	75,96	95,18	ST	83,07	91,44	ST
7	Nilai SAKIP	Nilai	68,78	68,92	100,00	ST	75,00	91,89	ST
8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,42	2,695	78,80	T	4,00	67,38	S
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,81	3,79	99,48	ST	4,00	94,75	ST
10	Indeks Ketertiban Umum	Indeks	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
11	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	5	1	100,00	ST	3	100,00	ST
12	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,60	1,46	91,25	ST	1,63	89,57	T
13	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,44	1,13	78,47	T	1,47	76,87	T
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	85,85	83,33	97,06	ST	89,26	93,36	ST
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	99,73	99,89	100,00	ST	100,00	99,89	ST
3	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	Persen	11,64	11,52	99,83	ST	12,23	94,19	ST
4	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	69,96	67,45	96,41	ST	72,46	93,09	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
5	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	60,41	57,50	95,18	ST	74,91	76,76	T
6	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	81,03	79,93	98,64	ST	86,53	92,37	ST
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	69,55	68,04	97,83	ST	77,05	88,31	T
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	88,02	85,79	97,47	ST	92,81	92,44	ST
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV	Persen	78,06	74,57	100,00	ST	83,06	100,00	ST
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	78,95	75,57	95,72	ST	83,45	90,56	T
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	75,99	74,28	97,75	ST	83,49	88,97	T
12	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	76,39	70,03	91,67	ST	81,39	86,04	T
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	75,87	71,07	93,67	ST	80,87	87,88	T
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	63,80	59,17	92,74	ST	76,30	77,55	T
15	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	66,14	65,64	99,24	ST	78,14	84,00	T
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14	9	100,00	ST	12	100,00	ST
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,10	7,53	100,00	ST	8,98	100,00	ST
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
7	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Tuberkulosis Sesuai Standar								
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota	Persen	11,79	12,51	100	ST	19,45	12.51	SR
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	Persen	79,54	78,85	99,13	ST	83,59	94,32	ST
3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi dan bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
4	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	Persen	96,85	97,95	100,00	ST	100,00	97,95	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
5	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	99,52	95,50	95,96	ST	100,00	95,50	ST
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	74,57	74,27	99,60	ST	80,00	92,84	ST
7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/Teknisi/Analis	Persen	55,69	55,69	100,00	ST	58,53	95,15	ST
8	Persentase Pengawasan Penyelenggaran Jasa Konstruksi Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	55,63	55,63	100,00	ST	58,47	95,14	ST
9	Jumlah Hari Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Nonberusaha (Sesuai Kewenangan) yang Terbit/Dilayani Pemerintah Daerah	Hari	15	15	100,00	ST	10	66,67	ST
10	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	41,67	37,50	89,99	T	100,00	37,50	SR
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni								
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	1,21	1,27	100	ST	7,26	17,49	SR
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	10,29	4,71	45,77	SR	21,21	22,21	SR
5	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	19,46	19,46	100	ST	41,30	47,12	SR
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5	5	100,00	ST	5	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
4	Presentase SOP yang Tersedia dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
5	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan sebagai Penunjang dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
6	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat Dasar	Persen	2,00	0,00	0,00	SR	3,25	0,00	SR
7	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
8	Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
9	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
10	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
11	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
14	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	96,18	94,38	98,13	ST	100,00	94,38	ST
f. Sosial									
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
4	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Sasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
5	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
6	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
8	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Disediakan Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
9	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
11	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
14	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan selama Satu Tahun	Persen	80,00	101,39	100,00	ST	90,00	100,00	ST
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,50	1,09	100,00	ST	1,00	100,00	ST
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	29.980.394,50	51.181.043,00	100,00	ST	35.786.291,80	100,00	ST
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	28,62	70,30	100	ST	46,10	100,00	ST
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,54	93,60	100,00	ST	94,05	99,52	ST
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,327-0,318	0,149	100,00	ST	0,313-0,266	100,00	ST
3	Persentase ARG Daerah	Persen	29,12	28,00	96,15	ST	37,16	75,35	S
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Mendapatkan Layanan Komprehensif								
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
c. Pangan									
1	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	Persen	11,63	17,89	100,00	ST	17,89	100,00	ST
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	93,10	93,45	100,00	ST	94,55	98,83	ST
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	45,65	32,60	71,41	S	89,13	36,57	SR
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	92,94	93,82	100,00	ST	95,88	97,85	ST
d. Pertanahan									
1	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	100,00	65,00	65,00	R	100,00	65,00	R
2	Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah dalam Satu Desa atau Kelurahan Lengkap secara Berkualitas	Persen	42,00	NA	NA	NA	47	NA	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
3	Ditetapkannya Hak atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	84,93	84,93	T	100	84,93	T
e. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah *(B53)	Indeks	74,71	75,31	100,00	ST	74,94	100,00	ST
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	79,40	49,41	62,23	R	79,90	61,84	R
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persen	81,03	0,00	0,00	SR	100	0,00	SR
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00	100,00	100 ,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persen	99,59	99,71	100,00	ST	100,00	99,71	ST
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	64,28	65,07	100,00	ST	80,00	81,34	T
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	13,68	14,99	100 ,00	ST	25,00	59,96	R
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	4,61	NA	NA	NA	6,16	NA	NA
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,16	2,20	98,18	ST	2,13	96,81	ST
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern	Persen	67,20	68,09	100,00	ST	67,50	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)								
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi *(unmet need)*	Persen	10,50	5,92	100,00	ST	8,50	100,00	ST
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15 -19 tahun	14,50	15,60	92,95	ST	13,23	84,81	T
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,67-64,68	75,30	100,00	ST	68,52-68,56	100,00	ST
i. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,64	0,64	100,00	ST	0,64	100,00	ST
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	79,78	63,67	79,81	T	91,51	69,58	S
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Persen	100,00	31,00	31,00	SR	100,00	31,00	SR
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	11,70	24,41	100,00	ST	11,83	100,00	ST
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	1,50	12,74	100,00	ST	4,00	100,00	ST
3	Pertumbuhan wirausaha	Persen	5,00	237,34	100,00	ST	10,00	100,00	ST
l. Penanaman Modal									
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	9,50	9,91	100,00	ST	10,75	92,19	ST
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100,00	100,38	100,00	ST	100,00	100,00	ST
m. Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat	Persen	0,22	0,03	13,64	SR	0,32	9,38	SR

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
2	Persentase Atlet yang Berasal dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi	Persen	0,91	0,25	27,47	SR	1,01	24,75	SR
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,70	NA	NA	NA	2,75	NA	NA
o. Persandian									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	79,17	74,73	94,39	ST	84,38	88,56	T
p. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	80,13	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
2	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	Persen	13,38	13,38	100,00	ST	19,11	70,02	S
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Dibidang Kebudayaan	Persen	1,50	1,54	100,00	ST	3,50	44,00	SR
q. Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,80	81,80	100,00	ST	81,30	100,00	ST
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	17,05	17,46	100,00	ST	17,75	98,37	ST
r. Kearsipan									

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	94,29	96,07	100,00	ST	98,00	98,03	ST
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	9.760.932,00	10.255.079,00	100,00	ST	11.043.598,00	92,86	ST
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Kg	3.680.242,00	3.524.160,00	95,76	ST	4.163.856,00	84,64	T
b. Pariwisata									
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	10,00	1,70	17,00	SR	10,00	17,00	SR
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Nonbintang)	Persen	70,44	8,70	12,35	SR	70,44	12,35	SR
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
c. Pertanian									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	12,46	0,15	1,20	SR	14,45	1,04	SR
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	9,45	-0,01	-0,11	SR	10,96	-0,09	SR
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	9,60	31,00	100,00	ST	11,13	100,00	ST
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	6,66	0,03	0,45	SR	7,72	0,39	SR
5	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan	Ha	555,00	555,00	100,00	ST	695	79,86	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
6	Persentase Penyakit Hewan yang Tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100	100,00	ST
d. Kehutanan									
e. Energi dan Sumber Daya Mineral									
f. Perdagangan									
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kabupaten/Kota	Persen	30,00	73,92	100,00	ST	40	100,00	ST
2	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	37,46	52,74	100,00	ST	68,11	77,43	T
g. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Persen	38,64	42,85	100,00	ST	41,84	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota								
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Persen	42,49	8,85	100,00	ST	44,66	95,14	ST
3	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan Dibandingkan dengan Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Dilakukan Pengawasan.	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
4	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik' Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
	Industri yang Sudah Dilakukan Pembinaan.								
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
h. Transmigrasi									
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	32,75	31,21	100,00	ST	30	96,12	ST
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,74	18,91	100,00	ST	18	100,00	ST
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	96,40	61,43	63,72	R	96,65	65,92	R
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	6,60	3,56	53,93	R	6,85	51,97	R
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	13,61	9,23	67,81	S	17,37	53,14	R
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	-10,00	-18,90	52,91	R	-5	26,45	SR
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	80,00	79,01*	98,76	ST	88	89,78	T

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	73,00	NA	NA	NA	85,5	NA	NA
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	1,00	NA	NA	NA	1	NA	NA
e. Fungsi Pengawasan									
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/ Opini	WTP	WTP	100,00	ST	WTP	100,00	ST
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,42	2,695	78,80	T	4	67,37	S
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Level 3 (3,34)	Level 2 (2,31)	66,67	S	Level 3 (3,72)	66,67	S
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,11	2,573	82,73	T	3,45	74,57	S
5	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	95,99	92,93	96,81	ST	100	92,93	ST
f. Fungsi Pengadaan									
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	28,18	25,96	92,12	ST	43,94	59,08	R
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	19,36	18,39	94,98	ST	24,21	75,96	S

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	45,00	40,00	100,00	ST	70	100,00	ST
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	100,00	ST	Tepat	100,00	ST
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100	100,00	ST
h. Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,72	NA	NA	NA	5	NA	NA

*data menggunakan realisasi tahun 2024

Capaian kinerja RKPD Tahun 2025 untuk IKD adalah sebagai berikut:

1. Aspek Geografi dan Demografi

Sebagian besar indikator pada aspek geografi dan demografi menunjukkan capaian kinerja yang baik hingga sangat tinggi. Capaian kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Indikator yang mencapai target tahun 2025 dengan capaian sebesar 100 persen dan berstatus sangat tinggi, yaitu indikator akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota, indeks kualitas lingkungan hidup daerah, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, serta indeks risiko bencana;
b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian sebesar 99,02 persen dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST);
c. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mencapai 97,81 persen dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST);
d. Rasio penduduk mencapai 99,79 persen dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST);
e. Indeks ketahanan pangan mencapai 88,10 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
f. Laju pertumbuhan penduduk hanya mencapai 55,42 persen yang masih berstatus predikat kinerja Rendah (R);

g. Penurunan emisi GRK kumulatif yang baru mencapai 7,69 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, capaian indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai target tahun 2025 dengan predikat Sangat Tinggi (ST). Indikator ekonomi makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kondisi yang relatif terkendali dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kesehatan, dan usia harapan hidup juga menunjukkan tingkat capaian mendekati atau mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Selain itu, indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia menunjukkan tingkat pemerataan yang cukup baik. Di sektor kesehatan masyarakat, sebagian besar indikator pelayanan kesehatan dasar dan program kesehatan prioritas mencapai target secara optimal, seperti cakupan imunisasi dasar lengkap, pelayanan hipertensi sesuai standar, serta cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Penanganan tuberkulosis juga menunjukkan capaian yang baik baik dari sisi *treatment coverage* maupun *treatment success rate.* Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih berstatus predikat sedang, rendah dan sangat rendah, antara lain:

a. Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan yang masih berstatus predikat kinerja sedang dengan capaian 70 persen;
b. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi masih berstatus predikat kinerja rendah dengan capaian 59,56 persen;
c. Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih berstatus predikat kinerja sangat rendah dengan capaian 54,92 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat, pemerataan akses layanan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan pembangunan daerah ke depan.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pada Aspek Daya Saing Daerah tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi daya saing daerah masih terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pembangunan daerah. Pada sektor ekonomi dan industri, indikator rasio ketergantungan, rasio PDRB industri pengolahan, serta LPE kategori industri pengolahan menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat capaian mendekati maupun mencapai target tahun 2025. Indikator rasio kewirausahaan daerah juga menunjukkan capaian sangat baik. Di sektor ketenagakerjaan dan sosial ekonomi, indikator tingkat partisipasi angkatan kerja, termasuk partisipasi angkatan kerja perempuan, menunjukkan capaian

sangat tinggi. Hal ini mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Indikator kapabilitas inovasi serta pembentukan modal tetap bruto juga menunjukkan performa yang baik dan mendukung penguatan daya saing daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang masih berstatus predikat tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah, antara lain:

a. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang masih berstatus predikat kinerja tinggi dengan capaian 79,78 persen;
b. Indeks infrastruktur perhubungan yang masih berstatus predikat kinerja tinggi dengan capaian 89,25 persen. Hal ini menunjukkan dan konektivitas jalan guna mendukung pemerataan pembangunan wilayah.
c. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota yang masih berstatus predikat kinerja tinggi dengan capaian 79,81 persen
d. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang masih berstatus predikat kinerja tinggi dengan capaian 87,09 persen
e. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB masih berstatus predikat kinerja tinggi yaitu dengan capaian 79,78 persen
f. *Return on Aset* (ROA) BUMD dengan tingkat capaian sebesar 65,93 persen masih berstatus predikat kinerja rendah
g. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan tingkat capaian sebesar 52,00 persen masih berstatus predikat kinerja rendah. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas infrastruktur permukiman.

4. Aspek Pelayanan Umum

Evaluasi kinerja pada Aspek Pelayanan Umum tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini mencerminkan upaya dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berjalan cukup optimal.

a. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Reformasi Hukum berhasil mencapai target dengan tingkat capaian 100 persen dan status predikat sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan sistem hukum dan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
b. Indikator pelayanan publik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan Nilai SAKIP menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal tersebut menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
c. Indikator Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Ketertiban Umum juga menunjukkan capaian sangat tinggi, yang menandakan kondisi daerah relatif kondusif serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Jumlah kejadian konflik SARA berhasil dijaga pada tingkat rendah sehingga stabilitas sosial masyarakat tetap terpelihara.
d. Angka partisipasi sekolah pada berbagai kelompok usia secara umum menunjukkan capaian sangat tinggi. Hal ini menunjukkan akses

pendidikan masyarakat terus mengalami peningkatan dan mendukung pembangunan sumber daya manusia daerah.

e. Nilai Maturitas SPIP berada pada kategori Tinggi (T) dengan capaian 78,80 persen, yang menunjukkan bahwa implementasi pengendalian intern pemerintah masih perlu diperkuat, terutama dalam pengelolaan risiko dan pengawasan internal.
f. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB masih berada pada kategori Tinggi (T) dengan capaian 78,47 sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan sektor jasa keuangan.

Secara keseluruhan, Aspek Pelayanan Umum tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan dominasi capaian berkategori sangat tinggi.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

A. Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Capaian kinerja Urusan Pendidikan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar bidang pendidikan telah berjalan optimal dan mampu mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Beberapa indikator yang berstatus predikat kinerja Tinggi (T) sehingga masih perlu masih diperlukan upaya peningkatan kinerja guna mencapai target RPJMD, antara lain:

a. Skor Kemampuan Numerasi SD dengan tingkat capaian sebesar 76,76 persen;
b. Skor Kemampuan Numerasi SMP dengan tingkat capaian sebesar 88,31 persen;
c. Iklim Keamanan SD dan SMP dengan tingkat capaian sebesar 90,56 persen dan 88,97 persen;
d. Iklim Kebinekaan SD dan SMP dengan tingkat capaian sebesar 86,04 persen dan 87,88 persen;
e. Iklim Inklusivitas SD dan SMP dengan tingkat capaian sebesar 77,55 persen dan 84,00 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja telah berada pada kategori baik, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan budaya sekolah yang inklusif, serta peningkatan kualitas lingkungan pendidikan guna mencapai target RPJMD secara optimal.

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Urusan Kesehatan tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Hal ini

menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan dasar di daerah telah berjalan optimal dan mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada aspek kesehatan ibu dan anak, indikator jumlah kasus kematian ibu berhasil ditekan sesuai target, sedangkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita menunjukkan capaian yang sangat baik. Selain itu, indikator persentase pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia seluruhnya mencapai target pelayanan minimal dengan tingkat capaian 100 persen.

Pada aspek pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan khusus, indikator pelayanan kesehatan penderita hipertensi, diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, tuberkulosis, serta orang dengan risiko terinfeksi HIV juga menunjukkan capaian sangat baik dengan realisasi sesuai target tahun 2025. Hal ini mencerminkan semakin optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Secara umum tidak terdapat indikator yang berstatus predikat sedang, rendah maupun sangat rendah pada Urusan Kesehatan. Seluruh indikator utama menunjukkan status predikat Sangat Tinggi sehingga menggambarkan kinerja pelayanan kesehatan daerah yang sangat baik dan konsisten dalam mendukung pencapaian target RPJMD.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan pekerjaan umum di daerah telah berjalan cukup optimal dalam mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pada sektor sumber daya air dan irigasi, indikator persentase luas layanan irigasi multiguna kewenangan kabupaten/kota menunjukkan capaian sangat baik bahkan melampaui target tahun 2025. Indikator persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota juga menunjukkan capaian tinggi dengan tingkat capaian mendekati target RPJMD.

Pada sektor air minum dan sanitasi, indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi menunjukkan capaian optimal dengan tingkat capaian 100 persen. Selain itu, indikator persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman juga menunjukkan capaian sangat baik.

Pada sektor infrastruktur jalan, indikator persentase kepatuhan PBG, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota, serta indikator pelayanan infrastruktur lainnya secara umum menunjukkan capaian yang baik dan mendukung peningkatan konektivitas wilayah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang berstatus predikat kinerja Tinggi (T), antara lain:

a. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota dengan tingkat capaian sebesar 94,32 persen;
b. Persentase kepatuhan PBG;
c. Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kinerja infrastruktur daerah telah berada pada kategori baik, masih diperlukan peningkatan kualitas pemeliharaan infrastruktur, penguatan pengawasan bangunan gedung, serta percepatan peningkatan kualitas jaringan jalan dan irigasi guna mencapai target RPJMD secara maksimal.

4. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Mayoritas indikator kinerja telah mencapai target dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan bidang ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat telah berjalan optimal dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, masih terdapat indikator yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan kinerja, yaitu:

a. Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar dengan tingkat capaian sebesar 0,00 persen dan status predikat kinerja Sangat Rendah (SR);
b. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan tingkat capaian sebesar 94,38 persen dan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), namun belum sepenuhnya mencapai target akhir RPJMD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara umum capaian kinerja telah berada pada kategori sangat baik, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, khususnya melalui pendidikan dan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP, serta penguatan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan guna mendukung pencapaian target RPJMD secara optimal.

5. Sosial

Capaian kinerja Urusan Sosial berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, penanganan korban bencana, serta pelayanan kesejahteraan sosial telah berjalan optimal dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Beberapa indikator bahkan telah melampaui target yang ditetapkan, seperti indikator jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan sosial telah berjalan efektif dalam mendukung perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu

menjaga konsistensi kualitas pelayanan sosial, meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pencapaian target RPJMD dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan telah berjalan optimal, khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penerapan tata kelola ketenagakerjaan yang layak, serta penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini mencerminkan bahwa target pembangunan bidang ketenagakerjaan telah tercapai secara optimal dan mendukung peningkatan kualitas serta daya saing tenaga kerja daerah.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pelayanan terhadap korban kekerasan telah berjalan secara optimal.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan Sedang (S). Indikator yang masih memerlukan peningkatan kinerja yaitu Persentase ARG Daerah dengan tingkat capaian sebesar 75,35 persen dan status predikat kinerja Sedang (S). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar indikator telah mencapai target secara optimal, masih diperlukan penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender guna mendukung pencapaian target RPJMD secara maksimal.

3. Pangan

Capaian kinerja Urusan Pangan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan Sedang (S). Sebagian besar indikator telah mencapai target yang ditetapkan, terutama pada pengelolaan cadangan pangan, skor pola pangan harapan, serta pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Sedang (S), dan Sangat Rendah (SR). Beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan peningkatan kinerja yaitu Persentase penanganan daerah rawan pangan

dengan tingkat capaian sebesar 36,57 persen dan status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketahanan pangan daerah secara umum telah terjaga dengan baik, masih diperlukan upaya peningkatan dalam penanganan daerah rawan pangan melalui penguatan intervensi program, peningkatan distribusi pangan, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mencapai target RPJMD secara optimal.

4. Pertanahan

Capaian kinerja Urusan Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal. Beberapa indikator masih belum memiliki realisasi capaian sehingga belum dapat dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan kinerjanya secara menyeluruh.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan status predikat kinerja Tinggi (T) serta terdapat indikator yang masih belum menunjukkan capaian kinerja. Indikator yang masih memerlukan peningkatan yaitu Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah dengan tingkat capaian sebesar 84,93 persen dan status predikat kinerja Tinggi (T). Selain itu, indikator penyelesaian kasus tanah garapan serta tertatanya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan secara lengkap dan berkualitas masih memerlukan percepatan pelaksanaan agar target RPJMD dapat tercapai sesuai rencana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pertanahan daerah masih memerlukan penguatan koordinasi, percepatan penyelesaian legalitas aset tanah, serta peningkatan kualitas administrasi pertanahan guna mendukung kepastian hukum dan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

5. Lingkungan Hidup

Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Indikator kualitas lingkungan hidup daerah telah menunjukkan capaian yang sangat baik, namun masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa masih diperlukan perhatian serius terhadap beberapa indikator, antara lain:

a. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan tingkat capaian sebesar 61,84 persen dan status predikat kinerja Rendah (R);
b. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dengan tingkat capaian sebesar 0,00 persen dan status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kualitas lingkungan hidup daerah telah terjaga dengan baik, masih diperlukan peningkatan pengelolaan persampahan, penguatan pengawasan dan penegakan kepatuhan lingkungan, serta optimalisasi pembinaan terhadap pelaku usaha guna mencapai target RPJMD secara optimal.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat

baik dengan mayoritas indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah berjalan optimal, terutama dalam pemenuhan dokumen kependudukan masyarakat.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang berada pada status predikat kinerja Tinggi (T) dan Rendah (R), sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kinerja guna mencapai target RPJMD secara optimal, antara lain:

a. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak dengan tingkat capaian sebesar 81,34 persen;
b. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital dengan tingkat capaian sebesar 59,96 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan perluasan akses layanan administrasi kependudukan digital guna meningkatkan kepemilikan dokumen identitas masyarakat secara menyeluruh.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini mencerminkan bahwa program pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas desa telah berjalan secara optimal.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan mayoritas indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum dapat dievaluasi karena data capaian belum tersedia, yaitu Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan desa agar pengukuran capaian indikator dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana telah berjalan efektif.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Namun demikian, masih terdapat indikator yang berada pada status predikat kinerja Tinggi (T), yaitu Angka Kelahiran Remaja umur 15–19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19) dengan tingkat capaian sebesar 84,81 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan edukasi kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pembinaan keluarga, serta

penguatan program pendewasaan usia perkawinan guna menekan angka kelahiran remaja dan mencapai target RPJMD secara optimal.

9. Perhubungan

Capaian kinerja Urusan Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), dan Sangat Rendah (SR). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian program pembangunan sektor perhubungan telah berjalan baik, namun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian dan percepatan kinerja.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum merata. Beberapa indikator masih berada pada status predikat kinerja Sedang (S) dan Sangat Rendah (SR), antara lain:

a. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 69,58 persen;
b. Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dengan tingkat capaian sebesar 31,00 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan penyediaan perlengkapan jalan, penguatan keselamatan transportasi, serta peningkatan pembinaan dan sertifikasi perusahaan angkutan umum guna mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman dan berkualitas.

10. Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika, termasuk pengembangan jaringan dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, telah berjalan optimal.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan koperasi dan pengembangan usaha mikro serta kewirausahaan telah berjalan secara optimal.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor UMKM, peningkatan usaha formal, dan pengembangan kewirausahaan telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

12. Penanaman Modal

Capaian kinerja Urusan Penanaman Modal berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan realisasi investasi daerah berkembang secara positif.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan pelayanan penanaman modal telah mampu mendorong peningkatan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih rendah dengan indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Indikator Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat hanya mencapai tingkat capaian sebesar 13,64 persen.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang masih sangat rendah dengan tingkat capaian sebesar 9,38 persen dan berada pada status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan akses dan partisipasi pemuda dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta penguatan program pemberdayaan pemuda guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing generasi muda daerah.

C. Urusan Pilihan

1. Statistik

Capaian kinerja Urusan Statistik berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola statistik sektoral daerah telah berjalan dengan baik dalam mendukung penyediaan data yang berkualitas untuk perencanaan pembangunan daerah.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) masih perlu mendapat perhatian karena tingkat capaian baru mencapai 2,75 atau masih berada pada kategori belum optimal terhadap target RPJMD. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengelolaan data statistik sektoral, peningkatan kualitas metadata, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik daerah.

2. Persandian

Capaian kinerja Urusan Persandian berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah telah berjalan secara optimal dalam mendukung perlindungan data dan sistem informasi pemerintahan.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan status predikat kinerja Tinggi (T). Tingkat capaian indikator Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah tercatat sebesar 88,56 persen sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas keamanan siber, penguatan manajemen risiko keamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang persandian dan keamanan informasi guna mencapai target RPJMD secara optimal.

3. Kebudayaan

Capaian kinerja Urusan Kebudayaan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Indikator tersebut meliputi Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan, Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan, serta Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), dan Sangat Rendah (SR). Beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian antara lain:

a. Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan dengan tingkat capaian sebesar 70,02 persen;
b. Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan dengan tingkat capaian sebesar 44,00 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun upaya pelestarian budaya telah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan dalam proses inventarisasi dan pendaftaran cagar budaya serta penguatan kapasitas dan sertifikasi tenaga kebudayaan agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal.

4. Perpustakaan

Capaian kinerja Urusan Perpustakaan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Indikator tersebut meliputi Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan kedua indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya baca dan pengembangan literasi masyarakat telah berjalan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Kearsipan

Capaian kinerja Urusan Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan indikator Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kearsipan daerah telah berjalan secara efektif dan mendukung tertib administrasi pemerintahan.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat capaian sebesar 98,03 persen dan berada pada

status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan pengawasan kearsipan.

6. Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Indikator tersebut meliputi Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budi Daya.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Indikator yang masih memerlukan perhatian yaitu Produksi Perikanan Budi Daya dengan tingkat capaian sebesar 84,64 persen dan berada pada status predikat kinerja Tinggi (T). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan produktivitas usaha budi daya, penguatan sarana prasarana perikanan, serta peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha perikanan guna mencapai target RPJMD secara optimal.

7. Pariwisata

Capaian kinerja Urusan Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan indikator Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum serta Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing berada pada status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Sementara itu, indikator Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator dengan capaian rendah yang memerlukan perhatian, antara lain:

a. Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum dengan tingkat capaian sebesar 17,00 persen;
b. Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang dan Nonbintang) dengan tingkat capaian sebesar 12,35 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan promosi pariwisata, peningkatan kualitas destinasi wisata, serta pengembangan iklim investasi yang kondusif guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah.

8. Pertanian

Capaian kinerja Urusan Pertanian berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan beberapa indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan sebagian lainnya berada pada status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Indikator yang mencapai status Sangat Tinggi (ST) meliputi Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan, Luas Area Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, serta Persentase Penyakit Hewan yang Tertangani.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian, antara lain:

a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan tingkat capaian sebesar 1,04 persen;
b. Peningkatan Produksi Hortikultura dengan tingkat capaian sebesar -0,09 persen;
c. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan dengan tingkat capaian sebesar 0,39 persen;
d. Luas Area Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian sebesar 79,86 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas beberapa komoditas unggulan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan teknologi pertanian, peningkatan kualitas sarana produksi, pengendalian risiko bencana pertanian, serta penguatan pendampingan kepada petani guna mendukung pencapaian target RPJMD.

9. Perdagangan

Capaian kinerja Urusan Perdagangan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Indikator tersebut meliputi Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kabupaten/Kota serta Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Indikator yang masih memerlukan perhatian yaitu Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku dengan tingkat capaian sebesar 77,43 persen dan berada pada status predikat kinerja Tinggi (T). Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan metrologi legal dan optimalisasi pelayanan tera/tera ulang guna menjamin perlindungan konsumen dan mendukung tertib niaga.

10. Perindustrian

Capaian kinerja Urusan Perindustrian berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan sektor industri, pengawasan industri, peningkatan investasi, serta penyediaan informasi industri telah berjalan optimal dan mendukung penguatan sektor industri daerah.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Beberapa indikator utama yang mendukung capaian tersebut antara lain:

a. Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor dengan tingkat capaian sebesar 95,14 persen;
b. Persentase jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen;

c. Persentase jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal baik dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen;
d. Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini dengan tingkat capaian sebesar 100,00 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor industri daerah telah berjalan efektif melalui peningkatan investasi, penguatan pengawasan industri, serta optimalisasi layanan informasi industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Capaian kinerja aspek Perencanaan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 belum dapat dievaluasi secara optimal karena indikator Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah masih dalam proses pengukuran capaian. Namun demikian, target indikator telah ditetapkan sebesar 100 persen sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung prioritas pembangunan nasional melalui sinkronisasi program daerah.

2. Keuangan

Capaian kinerja aspek Keuangan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang bervariasi dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Beberapa indikator yang masih memerlukan perhatian dan peningkatan kinerja antara lain:

a. Persentase realisasi anggaran urusan wajib pelayanan dasar dengan tingkat capaian sebesar 63,56 persen dan status predikat kinerja Rendah (R);
b. Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik dengan tingkat capaian sebesar 53,14 persen dan status predikat kinerja Rendah (R);
c. Persentase penurunan SILPA dengan tingkat capaian sebesar 26,45 persen dan status predikat kinerja Sangat Rendah (SR);
d. Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan tingkat capaian sebesar 89,78 persen dan status predikat kinerja Tinggi (T).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan keuangan daerah secara umum telah berjalan baik, masih diperlukan optimalisasi efektivitas belanja daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran, serta penguatan pengelolaan SILPA agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal.

3. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja aspek Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan indikator Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan capaian sebesar 98,76 persen.

Namun demikian, capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan status predikat kinerja Tinggi (T) dengan tingkat capaian sebesar 89,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen ASN telah berjalan baik, namun masih diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas manajemen SDM aparatur, serta optimalisasi sistem pengembangan kompetensi ASN guna mencapai target RPJMD secara optimal.

4. Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja aspek Penelitian dan Pengembangan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 belum dapat dievaluasi karena indikator kinerja masih belum tersedia atau dalam proses pengukuran, sehingga status capaian dan predikat kinerja belum dapat ditentukan.

Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu mendorong penguatan pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi daerah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah guna mendukung pencapaian target RPJMD.

5. Fungsi Pengawasan

Capaian kinerja aspek Fungsi Pengawasan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), dan Sedang (S). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah telah berjalan cukup efektif.

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa indikator masih memerlukan peningkatan kinerja, antara lain:

a. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan tingkat capaian sebesar 67,37 persen dan status predikat kinerja Sedang (S);
b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan tingkat capaian sebesar 66,67 persen dan status predikat kinerja Sedang (S);
c. Manajemen Risiko Indeks dengan tingkat capaian sebesar 74,57 persen dan status predikat kinerja Sedang (S).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan telah berjalan cukup baik, masih diperlukan penguatan implementasi SPIP, peningkatan kapabilitas APIP, serta pengembangan manajemen risiko yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

6. Fungsi Pengadaan

Capaian kinerja aspek Fungsi Pengadaan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

Namun demikian, capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat indikator yang memerlukan peningkatan, yaitu:

a. Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan tingkat capaian sebesar 59,08 persen dan status predikat kinerja Rendah (R);

b. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ dengan tingkat capaian sebesar 75,96 persen dan status predikat kinerja Sedang (S).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan pengadaan barang dan jasa telah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan secara optimal serta penguatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa guna mendukung pencapaian target RPJMD secara berkelanjutan.

7. Hubungan dengan Perwakilan Daerah

Capaian kinerja pada aspek Hubungan dengan Perwakilan Daerah berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan seluruh indikator berada pada status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini mencerminkan bahwa koordinasi dan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N dan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N masing-masing mencapai tingkat capaian sebesar 100 persen dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan dan penetapan regulasi daerah, khususnya yang berkaitan dengan APBD dan rancangan peraturan daerah, telah dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perwakilan daerah telah berjalan optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, tertib administrasi, dan berorientasi pada kepastian regulasi daerah.

8. Pelayanan Publik

Capaian kinerja pada aspek Pelayanan Publik berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 belum dapat dievaluasi secara menyeluruh karena realisasi indikator tahun berjalan belum tersedia. Indikator Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N masih berstatus belum tersedia data realisasi sehingga capaian dan status predikat kinerja belum dapat ditentukan.

Meskipun demikian, target akhir RPJMD sebesar 5 menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kepatuhan terhadap standar pelayanan, peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan, serta penguatan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, sehingga diperlukan penguatan evaluasi, monitoring, dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik agar target RPJMD dapat tercapai secara optimal.

2.2.3. Evaluasi Kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Capaian Indikator Utama Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dengan sebagian besar indikator mencapai status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah berjalan cukup efektif. Namun beberapa indikator yang masih perlu adanya peningkatan kinerja.

Tabel 2.174.
Capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP)

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,88	73,17	100,00	ST	74,9	97,69	ST
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86,03	87,41	100,00	ST	87,50	99,90	ST
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,40-6,30	5,89	100,00	ST	7,80-8,30	75,51	S
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	14,71-13,90	13,58	100,00	ST	10,50-9,73	77,32	T
5	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	1.985.634,90	152.859,76	7,69	SR	5.688.603,15	2,69	SR
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,52	75,56	100,00	ST	77,01	98,12	ST
7	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14	9	100,00	ST	12	100,00	ST
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,10	7,53	100,00	ST	8,98	100,00	ST
9	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	Persen	95,00	95,00	100,00	ST	96,25	98,70	ST
10	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Success Rate)*	Persen	90,00	90,00	100,00	ST	92,81	96,97	ST
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,07	98,80	99,73	ST	99,07	99,73	ST

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,89	7,89	100,00	ST	8,14	96,93	ST
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,86	13,42	96,83	ST	14,74	91,04	ST
14	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):								
	a) Literasi Membaca SD	Persen	84,29	84,23	99,93	ST	86,79	97,05	ST
	b) Literasi Membaca SMP	Persen	87,30	90,98	100,00	ST	89,80	100,00	ST
	c) Numerasi Membaca SD	Persen	73,94	81,59	100,00	ST	76,19	100,00	ST
	d) Numerasi Membaca SMP	Persen	82,35	86,79	100,00	ST	84,85	100,00	ST
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,11	4,83	59,56	R	9,45	51,11	R
16	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	85,85	83,33	97,06	ST	89,26	93,36	ST
17	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,28	0,28	100,00	ST	1,74	16,09	SR
18	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	12,10	22,89	100,00	ST	18,47	100,00	ST
19	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	53.800	53.850	100,00	ST	59.090	91,13	ST
20	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Persen	22,63	21,23	93,81	ST	24,72	85,88	T

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
21	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	64,31	90,66	100,00	ST	66,48	100,00	ST
22	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,41	82,64	100,00	ST	84,29	98,04	ST
23	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	85,43	86,30	100,00	ST	89,13	96,82	ST
24	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	Lembaga	NA	NA	NA	NA	486	0,49	NA
25	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	Lembaga	NA	NA	NA	NA	251	3,98	NA
26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,327-0,318	0,149	100,00	ST	0,313-0,266	100,00	ST
27	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	64,67-64,68	75,30	100,00	ST	68,52-68,56	100,00	ST
28	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61	4,33	93,93	ST	4,72	91,74	ST
29	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,53	99,54	100,00	ST	98,58	100,00	ST
30	Indeks Integritas Nasional	Indeks	79,81	75,96	95,18	ST	83,07	91,44	ST
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,09	NA	NA	NA	4,22	NA	NA
32	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	5	1	100,00	ST	3	100,00	ST
33	Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,97	3,03	100,00	ST	3,22	94,10	ST
34	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	31,67	29,00	91,57	ST	54,16	53,55	R

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
35	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	22,97	22,66	98,65	ST	24,04	94,26	ST
36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,00	3,01	100,00	ST	3,90	77,18	T
37	*Return on Aset* (ROA) BUMD	Persen	4,08	2,69	65,93	R	4,59	58,60	R
38	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	27	25	92,59	ST	40	62,50	R
39	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,77	4,95	96,36	ST	4,1	82,83	T
40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	66,96	66,41	99,18	ST	69,46	95,60	ST
41	Persentase Desa Mandiri	Persen	35,41	44,09	100,00	ST	49,89	88,37	T
42	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	74,36	74,27	99,88	ST	84,36	88,04	T
43	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	79,78	63,67	79,81	T	91,51	69,58	S
44	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	74,86	70,97	94,80	ST	96,01	73,92	S
45	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89,52	93,71	100,00	ST	90,07	100,00	ST
46	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,62	0,54	87,09	T	0,62	87,09	T
47	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,60	1,46	91,25	ST	1,63	89,57	T

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
48	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,44	1,13	78,47	T	1,47	76,87	T
49	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)	Persen	19,03	18,80	98,79	ST	19,66	95,63	ST
50	Disparitas Harga	Persen	±10	-9,96	100,00	ST	±10	100,00	ST
51	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,00	2,96	98,67	ST	3,64	81,32	T
52	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,83	1,46	79,78	T	2,04	71,57	S
53	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,80	20,47	98,41	ST	21,02	97,38	ST
54	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	41,19	22,62	88,54	T	54,29	67,17	S
55	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	Persen	8,03	8,03	100,00	ST	41,30	19,44	SR
56	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	81,79	72,06	88,10	T	82,94	86,88	T
57	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Persen	9,15	9,24	99,03	ST	7,55	81,71	T
58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,71	75,31	100,00	ST	74,94	100,00	ST
59	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,93	13,98	100,00	ST	30,00	46,60	SR
60	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	55,81	54,59	97,81	ST	60,89	89,65	T
61	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	118,42-116,96	78,88	100,00	ST	112,27-107,77	100,00	ST

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Tahun 2025			Status Predikat Kinerja RKPD 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025
			Target	Realisasi	Capaian (%)				
62	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	17,00	17,21	100,00	ST	35,00	49,17	SR
63	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	58,00	59,35	100,00	ST	61,50	96,50	ST

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

Capaian Indikator Utama Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2025, beberapa indikator yang masih perlu adanya peningkatan kinerja adalah sebagai berikut.

a. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T) dengan capaian 79,81 persen;
b. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T) dengan capaian 87,09 persen
c. Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB masih berada pada kategori Tinggi (T) dengan capaian 78,47 sehingga diperlukan upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penguatan sektor jasa keuangan;
d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T) yaitu dengan capaian 79,78 persen;
e. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T) yaitu dengan capaian 88,42 persen;
f. Indeks ketahanan pangan mencapai 88,10 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
g. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi masih berstatus predikat kinerja Rendah (R) dengan capaian 59,56 persen;
h. *Return on Aset* (ROA) BUMD dengan tingkat capaian sebesar 65,93 persen masih berstatus predikat kinerja rendah (R);
i. Penurunan emisi GRK kumulatif yang baru mencapai 7,69 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Capaian kinerja RPJMD sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa indikator masih memerlukan peningkatan kinerja, antara lain:

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat capaian 75,51 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sedang (S);
b. Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian 77,32 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
c. Penurunan Emisi GRK Kumulatif dengan tingkat capaian 2,69 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR);
d. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian 51,11 persen yang masih berstatus predikat kinerja Rendah (R);
e. Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan dengan tingkat capaian 16,09 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR);
f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 53,55 persen yang masih berstatus predikat kinerja Rendah (R);
g. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan tingkat capaian 77,18 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
h. *Return on Aset* (ROA) BUMD dengan tingkat capaian 58,60 persen yang masih berstatus predikat kinerja Rendah (R);
i. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara dengan tingkat capaian 62,50 persen yang masih berstatus predikat kinerja Rendah (R);
j. Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian 82,83 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
k. Persentase Desa Mandiri tingkat capaian 88,37 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
l. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota tingkat capaian 88,04 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
m. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota dengan tingkat capaian 69,58 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sedang (S);
n. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dengan tingkat capaian 73,92 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sedang (S);
o. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dengan tingkat capaian 87,09 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
p. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB dengan tingkat capaian 89,57 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
q. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB dengan tingkat capaian 76,87 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sedang (S);
r. Rasio Kewirausahaan Daerah dengan tingkat capaian 81,32 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
s. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dengan tingkat capaian 71,57 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sedang (S);
t. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan tingkat capaian 67,17 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sedang (S);

u. Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif dengan tingkat capaian 19,44 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR);
v. Indeks Ketahanan Pangan dengan tingkat capaian 86,88 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
w. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dengan tingkat capaian 81,71 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
x. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dengan tingkat capaian 46,60 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR);
y. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dengan tingkat capaian 89,65 persen yang masih berstatus predikat kinerja Tinggi (T);
z. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dengan tingkat capaian 49,17 persen yang masih berstatus predikat kinerja Sangat Rendah (SR);

2.2.4. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025

1. Urusan Pendidikan

Capaian kinerja urusan Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 2 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2030), kedua indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 18 indikator kinerja yang sebagian besar menunjukkan capaian sangat baik pada tahun 2025. Dari 18 indikator sasaran tersebut, sebanyak 17 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), sedangkan 1 indikator masih berada pada kategori Rendah (R). Capaian kinerja pada level Sasaran pada tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), terdapat 9 indikator dengan status predikat Sangat Tinggi (ST), 8 indikator berkategori Tinggi (T), dan 1 indikator masih berada pada kategori Rendah (R).

Pada level program, terdapat 7 indikator yang tersebar dalam 4 program. Seluruh indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, sebanyak 6 indikator masih berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), sedangkan 1 indikator berada pada kategori Tinggi (T)

Tabel 2.175.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pendidikan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
1	Pendidikan	**Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga**	**Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Di Atas 15 Tahun**	Tahun	7,89	7,89	100,00	ST	8,14	96,93	ST	Disdikpora
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,86	13,42	96,83	ST	14,74	91,04	ST	Disdikpora
		Meningkatnya tata kelola pendidikan yang berkualitas	Literasi Membaca SD	Persen	84,29	84,23	99,93	ST	86,79	97,05	ST	Disdikpora
			Literasi Membaca SMP	Persen	87,30	90,98	100,00	ST	89,80	100,00	ST	Disdikpora
			Numerasi SD	Persen	73,94	81,59	100,00	ST	76,19	100,00	ST	Disdikpora
			Numerasi SMP	Persen	82,35	86,79	100,00	ST	84,85	100,00	ST	Disdikpora
			Karakter SD	Nilai	Baik	Baik	100,00	ST	Baik	100,00	ST	Disdikpora
			Karakter SMP	Nilai	Baik	Baik	100,00	ST	Baik	100,00	ST	Disdikpora
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi *(B10)	Persen	8,11	4,83	59,56	R	9,45	51,11	R	Disdikpora
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	persen	88,02	86,93	98,76	ST	92,81	93,66	ST	Disdikpora
			Skor Kemampuan Literasi SD	nilai	69,96	67,45	96,41	ST	72,46	93,09	ST	Disdikpora
			Skor Kemampuan Literasi SMP	nilai	81,03	79,93	98,64	ST	86,53	92,37	ST	Disdikpora
			Skor Kemampuan Numerasi SD	nilai	60,41	57,50	95,18	ST	74,91	76,76	T	Disdikpora
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	nilai	69,55	68,04	97,83	ST	77,05	88,31	T	Disdikpora

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
			Iklim Inklusivitas SD	nilai	63,80	59,17	92,74	ST	76,30	77,55	T	Disdikpora
			Iklim Inklusivitas SMP	nilai	66,14	65,64	99,24	ST	78,14	84,00	T	Disdikpora
			Iklim Keamanan SD	nilai	78,95	75,57	95,72	ST	83,45	90,56	T	Disdikpora
			Iklim Keamanan SMP	nilai	75,99	74,28	97,75	ST	83,49	88,97	T	Disdikpora
			Iklim Kebinekaan SD	nilai	76,39	70,03	91,67	ST	81,39	86,04	T	Disdikpora
			Iklim Kebinekaan SMP	nilai	75,87	71,07	93,67	ST	80,87	87,88	T	Disdikpora
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	44,77	46,76	100,00	ST	44,92	100,00	ST	Disdikpora
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen	78,06	74,57	95,52	ST	83,06	89,78	T	Disdikpora
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persen	100,00	100,88	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disdikpora
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	Persen	85,03	103,30	100,00	ST	90,03	100,00	ST	Disdikpora
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persen	64,31	90,66	100,0	ST	66,48	100,00	ST	Disdikpora
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan	Persen	16,37	77,4	100,00	ST	17,47	100,00	ST	Disdikpora

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	Kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru									
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya Presentase Pengajuan izin yang dilayani	Presentase Pengajuan Izin yang dilayani	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disdikpora

2. Urusan Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan menunjukkan hasil yang sangat baik. Terdapat 1 indikator tujuan yang seluruhnya memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, kedua indikator tersebut juga tetap berada pada kategori Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 8 indikator kinerja yang tersebar dalam 3 sasaran, dan seluruh indikator tersebut pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, seluruh indikator sasaran tersebut juga masih berada pada kategori Sangat Tinggi (ST), yang menunjukkan konsistensi capaian kinerja dalam mendukung target pembangunan kesehatan daerah.

Pada level program, terdapat 6 indikator yang tersebar dalam 4 program. Capaian kinerja 6 indikator program pada Tahun 2025 semuanya memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 6 Indikator terdapat 4 Indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T), sedangkan 1 indikator berada pada kategori Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.176.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kesehatan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
2	Kesehatan	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan**	**Usia Harapan Hidup**	Tahun	75,52	75,56	100,00	ST	77,01	98,12	ST	DinkesPPKB
		Meningkatnya pelayanan kesehatan khususnya ibu dan anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu	kasus	14,00	9,00	100,00	ST	12	100,00	ST	DinkesPPKB
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	persen	9,10	7,53	100,00	ST	8,98	100,00	ST	DinkesPPKB
			Angka Kematian Balita	per.1000 kelahiran	12,00	9,28	100,00	ST	10,85	100,00	ST	DinkesPPKB
		Meningkatnya penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular	persen	91,00	91,25	100,00	ST	95,00	96,05	ST	DinkesPPKB
			Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular	persen	75,00	93,27	100,00	ST	80,00	100,00	ST	DinkesPPKB
		Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan nasional	Cakupan Kepesertaan Jaminan	persen	99,07	98,80	99,73	ST	99,07	99,73	ST	DinkesPPKB

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
			Kesehatan Nasional *(B6)									
			Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	persen	75,62	80,86	100,00	ST	76,12	100,00	ST	DinkesPPKB
		Meningkatnya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persen	78,50	84,70	100,00	ST	84,00	100,00	ST	DinkesPPKB
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	36,00	36,00	100,00	ST	80	45,00	SR	DinkesPPKB
		Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	Persen	93,61	96,81	100,00	ST	95,00	100,00	ST	DinkesPPKB
		Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	Persen	90,00	90,00	100,00	ST	92,81	96,97	ST	DinkesPPKB
	Program Peningkatan Kapasitas	Meningkatnya Kapasitas Sumber	Persentase Peningkatan Kompetensi	Persen	94,00	92,00	97,87	ST	95,25	96,58	ST	DinkesPPKB

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Sumber Daya Manusia Kesehatan	Daya Manusia Kesehatan	SDM Bidang Kesehatan									
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan	Persen	76,33	76,33	100,00	ST	84,67	90,15	ST	DinkesPPKB
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	Persen	17,00	21,40	100,00	ST	27,00	79,26	T	DinkesPPKB

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 7 indikator kinerja yang tersebar dalam 7 sasaran. Dari 7 indikator tersebut capaian kinerja pada Tahun 2025 terdapat 5 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat

kinerja Tingi (T) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S), 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 8 indikator yang tersebar dalam 8 program. Capaian kinerja 8 indikator program pada Tahun 2025 terdapat 5 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan terdapat 3 indikator dengan capaian NA. Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 8 Indikator terdapat 2 Indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T), 1 indikator berada pada kategori Sedang (S) dan terdapat 3 Indikator dengan capaian NA.

Tabel 2.177.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah serta meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria**	**Persentase infrastruktur wilayah kondisi baik**	Persen	50,06	49,82	99,52	ST	53,98	92,29	ST	DPUPR
		Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	74,36	74,27	99,88	ST	84,36	88,04	T	DPUPR

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Meningkatnya akses air minum rumah tangga perkotaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	17,00	17,21	100,00	ST	35,00	49,17	SR	DPUPR
		Meningkatnya akses air minum rumah tangga perdesaan yang terstandar	Akses Rumah Tangga Perdesaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	0,38	0,38	100,00	ST	0,48	79,17	T	DPUPR
		Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	indeks	58,00	59,35	100,00	ST	61,50	96,50	ST	DPUPR
		Meningkatnya kualitas drainase	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	persen	19,98	16,43	82,23	T	25,19	65,22	S	DPUPR
		Meningkatnya cakupan fasilitas publik yang inklusif	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	persen	8,03	8,03	100,00	ST	41,30	19,44	SR	DPUPR
		Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang	persen	71,07	15,00	21,11	SR	95,00	15,79	SR	DPUPR
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	78,75	78,85	100,00	ST	87,50	90,11	T	DPUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Meningkatnya Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM	Persen	3,17	NA	NA	NA	5,82	NA	NA	DPUPR

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Penyediaan Air Minum	Perdesaan Aman										
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Cakupan drainase yang tertangani	Persen	0,78	NA	NA	NA	1,05	NA	NA	DPUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Inklusif	Persen	82,15	85,52	100,00	ST	83,94	100,00	ST	DPUPR
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Tertanganinya bangunan gedung+bangunan SPAM yang membutuhkan DED	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	Persen	15,00	15,00	100,00	ST	20,00	75,00	S	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	70,65	73,68	100,00	ST	84,36	87,34	T	DPUPR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil	Persen	64,92	NA	NA	NA	65,48	NA	NA	DPUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya Persentase Kinerja	Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang	Persen	73,90	91,45	100,00	ST	97,62	93,68	ST	DPUPR

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Pelaksanaan Penataan Ruang										

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 terdapat 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 4 indikator yang tersebar dalam 4 program. Capaian kinerja 4 indikator program pada Tahun 2025 semua indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 4 Indikator terdapat 2 Indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.178.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	**Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah**	**Persentase Luas Kawasan Kumuh Kurang dari 10 Ha**	Persen	98,79	98,72	100,00	ST	92,74	93,94	ST	Disperkimhub
		Meningkatnya kualitas hunian layak	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	74,86	70,97	94,80	ST	96,01	98,74	ST	Disperkimhub
	Program Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disperkimhub
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	1,21	1,27	100,00	ST	4,76	26,68	SR	Disperkimhub

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani Tertangani	Persen	10,29	66,14	100,00	ST	21,21	100,00	ST	Disperkimhub
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	5,93	13,98	100,00	ST	30,00	46,60	SR	Disperkimhub

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 3 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2030) 3 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 3 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 3 sasaran dan semua indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 5 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 5 indikator program pada Tahun 2025 semua indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 5 Indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.179.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	**Meningkatkan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana**	**Persentase penanganan kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap kebakaran *(response time rate)***	Persen	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SatpolPP
			Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda	Persen	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	SatpolPP
			Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,88	0,93	100,00	ST	0,93	100,00	ST	BPBD
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	Capaian Prioritas Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,87	0,94	100,00	ST	0,92	100,00	ST	BPBD
		Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum	Persentase penanganan pelanggaran Perda	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	SatpolPP
		Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran	Persentase petugas pemadam yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	SatpolPP

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
			serta desa dan kelurahan yang masyarakatnya mendapatkan edukasi									
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	SatpolPP
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	29,00	29,00	100,00	ST	100,00	29,00	ST	SatpolPP
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD	Angka	0,75	1	100,00	ST	0,8	100,00	ST	BPBD
		Meningkatnya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD Bencana dalam IKD	Angka	0,85	0,89	100,00	ST	0,9	98,89	ST	BPBD
		Meningkatnya Pengembangan	Skor Pengembangan Sistem Pemulihan	Angka	0,88	0,90	100,00	ST	0,93	96,77	ST	BPBD

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Sistem Pemulihan Bencana	Bencana dalam IKD									

6. Urusan Sosial

Capaian kinerja urusan Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 6 indikator yang tersebar dalam 6 program. Capaian kinerja 6 indikator program pada Tahun 2025 semua indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, ke-6 Indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.180.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Sosial

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
6	Sosial	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat**	**Persentase Pemerlu**	Persen	17,67	17,61	100,00	ST	15,93	90,46	T	DinsosP3A

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		yang merata serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	**Pelayanan Kesejahteraan**									
		Meningkatnya pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	Persen	0,43	0,77	100,00	ST	3,12	24,68	SR	DinsosP3A
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,0	ST	DinsosP3A
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya layanan PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang tertangani	Persen	100,00	99,52	99,52	ST	100,00	99,52	ST	DinsosP3A
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya cakupan perlindungan jaminan sosial	Cakupan perlindungan jaminan sosial	Persen	80,27	101,39	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persentase TMP Yang Dikelola	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A

7. Urusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja urusan Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 3 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 3 sasaran. Dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 4 indikator yang tersebar dalam 4 program. Capaian kinerja 4 indikator program pada Tahun 2025 terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Capaian kinerja pada level Program

pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 4 Indikator tersebut terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S) dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.181.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Tenaga Kerja

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
7	Tenaga Kerja	**Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**	Persen	77,81	76,17	97,89	ST	80	95,21	ST	Disnaker
		Meningkatnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja	Persentase Kelulusan Uji Kompetensi	Persen	100,00	87,5	87,50	T	100,00	87,50	T	Disnaker
		Meningkatnya pemberdayaan angkatan kerja perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	66,96	66,41	99,18	ST	69,46	95,61	ST	Disnaker

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Persentase Keterserapan Tenaga Kerja	Persen	27,43	51,63	100,00	ST	32,53	100,00	ST	Disnaker
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan besar yang telah menyusun RTK Mikro	Persen	19,35	19,35	100,00	ST	100,00	19,35	SR	Disnaker
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lembaga LPK yang berizin	Persen	100,00	50,00	50,00	SR	100,00	50,00	SR	Disnaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan pencari kerja yang terdaftar	Persen	26,52	70,25	100,00	ST	29,02	100,00	ST	Disnaker
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	41,19	22,62	88,54	T	54,29	75,87	S	Disnaker

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 2 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 2 sasaran. Ke-2 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 2 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 6 indikator yang tersebar dalam 6 program. Capaian kinerja 6 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 6 Indikator tersebut terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.182.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak**	**Indeks Pembangunan Gender dan Pemenuhan Hak Anak**	Persen	80,56	80,59*	100,00	ST	83,48	96,54	ST	DinsosP3A
		Meningkatnya kesetaraan gender dalam aktivitas pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,54	93,60	100,00	ST	94,05	99,52	ST	DinsosP3A
		Meningkatnya perlindungan anak terhadap kekerasan dan diskriminasi	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Indeks	67,57	67,57*	100,00	ST	72,91	92,68	ST	DinsosP3A
	Program Pengarusutamaan	Meningkatnya Pengarusutamaan	Cakupan Pengarusutamaan	Persen	18,38	21,57	100,00	ST	100,00	21,57	SR	DinsosP3A

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
	Program Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Cakupan Program Perlindungan Perempuan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	18,36	79,16	100,00	ST	100,00	79,16	T	DinsosP3A
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya Pemenuhan hak anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	pratama/ madya/ nindya/ utama/ KLA	Madya	Madya*	100,00	St	Utama	50,00	SR	DinsosP3A
	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Cakupan Perlindungan Anak	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DinsosP3A

9. Urusan Pangan

Capaian kinerja urusan Pangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Tinggi (T). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level sasaran, terdapat 2 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 2 sasaran. Ke-2 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 4 indikator yang tersebar dalam 4 program. Capaian kinerja 4 indikator program pada Tahun 2025 terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 4 Indikator tersebut terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.183.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pangan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
9	Pangan	**Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian**	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**	Persen	81,79	72,06	88,10	T	82,94	86,88	T	Distapang
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) *(B52)	Persen	9,15	9,24	99,03	ST	7,55	81,71	T	Distapang
		Meningkatnya kualitas	Skor PPH Konsumsi	Skor	93,10	93,45	100,00	ST	94,55	98,84	ST	Distapang

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		konsumsi pangan										
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Persen	89,90	89,50	99,55	ST	91,86	97,43	ST	Distapang
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi	Angka Kecukupan Energi	Persen	3650,56	3694,94	100,00	ST	3.675,56	100,00	ST	Distapang
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	45,65	32,60	71,41	S	89,13	36,57	SR	Distapang
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman	Persen	92,94	93,82	100,00	ST	95,88	97,85	ST	Distapang

10. Urusan Pertanahan

Capaian kinerja urusan Pertanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status NA. Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja dengan status NA. Pada level program, terdapat 2 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 2 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status NA.

Tabel 2.184.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pertanahan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
10	Pertanahan	**Meningkatkan kualitas infrastruktur pembangunan daerah serta meningkatkan pelaksanaan fasilitasi reforma agraria**	**Persentase Peningkatan Pelaksanaan Fasilitasi Reforma Agraria**	Persen	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	DPUPR
		Meningkatnya pelaksanaan kegiatan fasilitasi reforma agraria	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Reforma Agraria	Persen	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	DPUPR
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Meningkatnya Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	NA	NA	NA	NA	100	NA	NA	DPUPR

11. Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 2 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 2 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 4 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 4 sasaran. Ke-4 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 10 indikator yang tersebar dalam 9 program. Capaian kinerja 10 indikator program pada Tahun 2025 terdapat 6 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) dan 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 10 Indikator tersebut terdapat 4 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) dan 4 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.185.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Lingkungan Hidup

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
11	Lingkungan Hidup	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan daya saing ekonomi sektor perikanan**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	Indeks	74,71	75,31	100,00	ST	74,94	100,00	ST	DLHKP
			Persentase Pengelolaan Sampah	Persen	81,61	78,09	95,69	ST	85,67	91,15	ST	DLHKP

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Meningkatnya perbaikan kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,80	75,53	100,00	ST	72,30	100,00	ST	DLHKP
		Meningkatnya perbaikan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,48	81,49	94,23	ST	86,53	94,18	ST	DLHKP
		Meningkatnya perbaikan kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	57,94	63,50	100,00	ST	58,04	100,00	ST	DLHKP
		Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	55,81	54,59	97,81	ST	60,89	89,65	T	DLHKP
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	87,50	87,50	T	100,00	87,50	T	DLHKP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik	Persen	24,00	8	33,33	SR	64,00	12,50	SR	DLHKP
		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Udara yang Kualitasnya Baik	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DLHKP

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Lingkungan Hidup										
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seKabupaten	Ha	33.369,031	839,15	2,51	SR	33.369,431	2,51	SR	DLHKP
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Tingkat Kabupaten	Persentase kegiatan usaha yang memiliki izin pengelolaan LB3	Persen	43,67	50,00	100,00	ST	100,00	50,00	SR	DLHKP
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	Persentase pengawasan lingkungan hidup	Persen	32,55	11,21	34,44	SR	79,72	14,06	SR	DLHKP
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup	Persen	21,30	22,39	100,00	ST	27,83	80,45	T	DLHKP

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Hidup Untuk Masyarakat	Hidup Untuk Masyarakat										
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Tercapainya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Persen	3,48	3,48	100,00	ST	3,48	100,00	ST	DLHKP
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DLHKP
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya pengelolaan Persampahan	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	Persen	10,25	15,32	100,00%	ST	10,25	100,00%	ST	DLHKP

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 Indikator tersebut juga memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.186.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	**Meningkatkan kepemilikan dokumen admindukcapil dan pemanfaatan data**	**Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindukcapil dan Pemanfaatan Data**	Persen	92,27	92,84	100,00	ST	93,35	99,45	ST	Disdukcapil
		Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen admindukcapil	Persentase Penerbitan Dokumen Admindukcapil	Persen	90,34	91,06	100,00	ST	92,94	97,97	ST	Disdukcapil
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	79,00	82,18	100,00	ST	81,50	100,00	ST	Disdukcapil

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Persen	99,88	99,93	100,00	ST	99,95	99,98	ST	Disdukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disdukcapil

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 4 indikator yang tersebar dalam 4 program. Capaian kinerja 4 indikator program pada Tahun 2025 terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 4 Indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.187.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	**Meningkatkan kemandirian desa**	**Indeks Desa**	Indeks	77,02	77,15	100,00	ST	80,4	96,11	ST	Dinas PMD
		Meningkatnya status desa	Persentase kenaikan status desa	Persen	3,78	4,89	100,00	ST	3,78	100,00	ST	Dinas PMD
	Program Penataan Desa	Meningkatnya Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa	Persen	18,49	6,90	37,32	SR	100,00	6,90	SR	Dinas PMD
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama (misalnya jalan, pasar, atau irigasi)	Persen	20,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Dinas PMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya Desa dengan Layanan Administrasi baik	Persentase Desa dengan Layanan Administrasi baik	Persen	73,75	78,00	100,00	ST	79,25	98,42	ST	Dinas PMD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Meningkatnya legalitas kelembagaan, partisipasi dalam	Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik	Persen	25,00	25,00	100,00	ST	37,50	66,67	S	Dinas PMD

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Dan Masyarakat Hukum Adat	musyawarah desa dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa										

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030,1 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 5 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 5 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 5 Indikator tersebut terdapat 4 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Tabel 2.188.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	**Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan berkesinambungan serta meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan**	**Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)**	Indeks	64,67-64,68	75,30	100,00	ST	68,52-68,56	100,00	ST	DinkesPPKB
		Meningkatnya kualitas perencanaan keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,16	2,20	98,18	ST	2,13	96,81	ST	DinkesPPKB
	Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR 15-19)	Angka	14,50	15,60	92,95	ST	13,23	84,81	T	DinkesPPKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	Persen	67,20	68,69	100,00	ST	67,50	100,00	ST	DinkesPPKB
		Terlaksanya Pembinaan	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak	Persen	10,50	5,92	100,00	ST	8,50	100,00	ST	DinkesPPKB

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Terpenuhi (*Unmet Need*)									
		Terlaksananya pembinaan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	88,35	91,80	100,00	ST	88,70	99,60	ST	DinkesPPKB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	61,00	82,71	100,00	ST	66,00	92,42	ST	DinkesPPKB

15. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 Indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Tabel 2.189.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perhubungan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
15	Perhubungan	**Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman dengan prasarana/ sarana utilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas konektivitas wilayah**	**Rasio Konektivitas**	Indeks	0,64	0,64	100,00	ST	0,64	100,00	ST	Disperkimhub
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	79,78	63,67	79,81	T	91,51	69,58	S	Disperkimhub
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persen	79,78	63,67	100,00%	ST	91,25	69,57	S	Disperkimhub

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 2 indikator dengan Realisasi NA.

Pada level sasaran, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 2 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 2 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 2 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 2 Indikator tersebut terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Tabel 2.190.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
16	Komunikasi dan Informatika	**Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintahan**	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	Indeks	4,09	NA	NA	NA	4,26	NA	NA	Diskominfo
			Indeks Pemerintah Digital	Indeks	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Diskominfo
		Meningkatnya penyediaan akses	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89,52	93,71	100,00	ST	90,07	100,00	ST	Diskominfo

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		internet kepada masyarakat										
		Meningkatnya keterbukaan data dan informasi publik kepada masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Nilai	85,00	93,64	100,00	ST	94,00	100,00	ST	Diskominfo
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Kategori	Menuju Informatif	Informatif	100,00	ST	Informatif	80,00	T	Diskominfo
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Diskominfo

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Capaian kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level sasaran, terdapat 2 indikator kinerja yang tersebar ke dalam 2 sasaran, 2 indikator level sasaran tersebut terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 2 indikator

tersebut terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Pada level program, terdapat 5 indikator yang tersebar dalam 5 program. Capaian kinerja 5 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 5 Indikator tersebut terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Tabel 2.191.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	**Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan**	**Rasio Kewirausahaan Daerah**	Persen	3	2,96	98,67	ST	3,64	81,32	T	DisperindagKUKM
		Meningkatnya koperasi aktif dan sehat	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,83	1,46	79,78	T	2,04	71,57	S	DisperindagKUKM
		Meningkatnya kapasitas usaha	Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Persen	9,17	237,27	100,00	ST	9,22	100,00	ST	DisperindagKUKM

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		mikro kecil daerah										
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Persen	0,74	20,20	100,00	ST	12,00	100,00	ST	DisperindagKUKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang kompeten	Persen	3,54	22,93	100,00	ST	31,38	73,07	S	DisperindagKUKM
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase advokasi kepada koperasi	Persen	25,34	52,81	100,00	ST	28,07	100,00	ST	DisperindagKUKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan UKM yang berkualitas	Persen	11,74	12,50	100,00	ST	14,78	84,57	T	DisperindagKUKM
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Pengembangan UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	Persen	1,95	237,08	100,00	ST	2,54	100,00	ST	DisperindagKUKM

18. Urusan Penanaman Modal

Capaian kinerja urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 5 indikator yang tersebar dalam 5 program. Capaian kinerja 5 indikator program pada Tahun 2025 terdapat 4 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 5 Indikator tersebut terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.192.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Penanaman Modal

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
18	Penanaman Modal	**Meningkatkan nilai tambah baru yang diinvestasikan dalam pembangunan ekonomi daerah**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)**	Persen	19,03	18,80	98,79	ST	19,66	95,63	ST	DPMPTSP
		Meningkatnya penanaman modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	9,50	9,91	100,00	ST	10,75	92,19	ST	DPMPTSP
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Tercapainya realisasi nilai investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi penanaman modal	Miliar rupiah	752,00	754,86	100,00	ST	1.224,90	61,63	S	

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya calon Pelaku usaha/penanam modal yang menginvestasikan modalnya di daerah	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	Persen	10,00	-40,00	-25,00	SR	28,00	-70,00	SR	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tercapainya Pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Persen	92,50	100,00	100,00	ST	92,50	100,00	ST	DPMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Kegiatan Usaha yang telah terverifikasi dan dilakukan Pengendalian	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	Persen	100,00	105,56	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersusunnya Dokumen hasil pengolahan dan pengkajian data penanaman modal yang mudah diakses	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	Persen	100,00	200,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DPMPTSP

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 2 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) 2 indikator tersebut terdapat 1 indikator yang masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator lainnya memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) .

Pada level sasaran, terdapat 2 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 2 indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 3 Indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.193.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
19	Kepemudaan dan Olahraga	**Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan secara inklusif serta meningkatkan pembangunan pemuda dan olahraga**	**Indeks Pembangunan Olahraga**	Indeks	0,36	0,36	100,00	ST	0,46	78,26	T	Disdikpora
			Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	35,25	35,25	100,00	ST	37,00	95,27	ST	Disdikpora

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Meningkatnya derajat kebugaran jasmani	Indeks Kebugaran Jasmani	Indeks	24,3	24,3	100,00	ST	26,20	92,75	ST	Disdikpora
		Meningkatnya potensi kewirausahaan pemuda	Indeks Kewirausahaan Pemuda	Indeks	3,70	3,70	100,00	ST	4,20	88,09	ST	Disdikpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persen	34,42	34,96	100,00	ST	76,74	45,56	SR	Disdikpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Persentase prestasi Olahraga	Persentase Prestasi Olahraga	Persen	32,17	86,67	100,00	ST	42,13	100,00	ST	Disdikpora
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya Cakupan Prestasi Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan	Persen	66,67	66,67	100,00	ST	100,00	66,67	ST	Disdikpora

20. Urusan Statistik

Capaian kinerja urusan Statistik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan Realisasi NA. Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program dimana realisasi pada tahun 2025 masih NA.

Tabel 2.194.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Statistik

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
20	Statistik	**Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintah**	**Indeks Pembangunan Statistik**	Persen	2,70	2,69*	99,62	ST	2,75	97,82	ST	Diskominfo
		Meningkatnya keandalan data perangkat daerah dalam portal satu data	Persentase Data Perangkat Daerah yang Lolos Validasi	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Diskominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Predikat	Baik	NA	NA	NA	Memuaskan	NA	NA	Diskominfo

*data menggunakan realisasi tahun 2024

21. Urusan Persandian

Capaian kinerja urusan Persandian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.195.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Persandian

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
21	Persandian	**Meningkatkan tata kelola Satu Data, meningkatkan keamanan data dan informasi pembangunan serta meningkatkan digitalisasi pemerintah**	**Indeks Keamanan Informasi**	Kategori	Cukup Baik	Cukup Baik	100,00	ST	Baik	75,00	S	Diskominfo
		Meningkatnya keamanan dokumen pemerintah	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tandatangan Elektronik dalam Layanan Administrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Diskominfo

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
			Desa dan Kelurahan									
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Kategori	Tinggi	Tinggi	100,00	ST	Tinggi	100,00	ST	Diskominfo

22. Urusan Kebudayaan

Capaian kinerja urusan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut juga masih memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 2 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 2 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S).

Tabel 2.196.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kebudayaan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
22	Kebudayaan	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah**	**Persentase pelestarian kesenian dan adat istiadat**	Persen	79,17	70,83	89,47	ST	100,00	70,83	S	Disparbud
		Meningkatnya upaya pelestarian seni, budaya dan adat istiadat	Persentase Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Kebudayaan	Persen	100,00	85,71	85,71	T	100,00	85,71	T	Disparbud
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	85,43	86,30	100,00	ST	89,13	96,82	ST	Disparbud
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	Persen	1,51	1,6	100,00	ST	2,23	71,75	S	Disparbud

23. Urusan Perpustakaan

Capaian kinerja urusan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 2 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 2 indikator program pada Tahun 2025 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 2 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.197.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perpustakaan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
23	Perpustakaan	**Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	Indeks	17,05	17,46	100,00	ST	17,75	98,37	ST	Disarpus
		Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan dalam pembangunan	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,25	0,28	100,00	ST	1,74	16,10	SR	Disarpus
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	80,80	81,10	100,00	ST	81,30	100,00	ST	Disarpus
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disarpus

24. Urusan Kearsipan

Capaian kinerja urusan Kearsipan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator kinerja yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, terdapat 1 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 2 indikator realisasi NA. Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 2 indikator realisasi NA.

Tabel 2.198.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
24	Kearsipan	**Meningkatkan kualitas literasi masyarakat dan tata kelola arsip daerah**	**Persentase pencipta arsip yang menerapkan arsip baku**	Persen	78,24	85,88	100,000	ST	97,67	89,93	T	Disarpus
		Meningkatnya SDM pengelola arsip yang kompeten dan profesional	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	NA	19,83	100,00	ST	100,00	19,83	SR	Disarpus

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya Pengelolaan pencipta Arsip yang menerapkan arsip baku	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Persen	94,29	96,07	100,00	ST	98,00	98,03	ST	Disarpus
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip yang dilaksanakan	Kegiatan	0	NA	NA	NA	5	NA	NA	Disarpus
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah regulasi akses izin penggunaan arsip tertutup	Dokumen	0	NA	NA	NA	1	NA	NA	Disarpus

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 2 indikator yang tersebar dalam 2 saasaran. Dari 2 indikator tersebut terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator lainnya memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 2 indikator tersebut terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikaktor memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 6 indikator yang tersebar dalam 4 program. Capaian kinerja 6 indikator program pada Tahun 2025, terdapat 4 memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030,

terdapat 3 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Rendah (R).

Tabel 2.199.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Kearsipan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
25	Kelautan dan Perikanan	**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dan daya saing ekonomi sektor perikanan**	**Persentase Peningkatan Nilai Produksi Kelautan dan Perikanan**	Persen	6,25	-5,20	0,00	SR	6,25	0,00	SR	DLHKP
		Meningkatnya produksi komoditas perikanan dan kelautan	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap	Persen	3,25	-8,35	0,00	SR	3,25	0,00	SR	DLHKP
			Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	Persen	3,00	3,15	100,00	ST	3,00	100,00	ST	DLHKP
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut	Milyar Rupiah	246,93	219,71	88,97	T	286,26	76,75	T	DLHKP
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau	Milyar Rupiah	146,38	158,68	100,00	ST	169,70	93,50	ST	DLHKP

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	Persen	8,04	8,48	100,00	ST	10,22	82,97	T	DLHKP
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Milyar Rupiah	39,49	45,99	100,00	ST	50,41	91,23	ST	DLHKP
		Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Garam	Milyar Rupiah	0,195	0,31	100,00	ST	0,249	100,00	ST	DLHKP
		Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	Persen	6,72	5,67	84,37	T	8,62	65,78	R	DLHKP

26. Urusan Pariwisata

Capaian kinerja urusan Pariwisata Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level sasaran, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 sasaran. 3 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikaktor memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, terdapat 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sedang (S) dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Rendah (R).

Tabel 2.200.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pariwisata

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
26	Pariwisata	**Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata serta meningkatkan kualitas warisan budaya daerah**	**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**	Persen	3	3,01	100,00	ST	3,9	77,18	T	Disparbud
		Meningkatnya kualitas obyek wisata	Rata-Rata Lama Tinggal	Hari	1,17	1,23	100,00	ST	1,33	92,48	ST	Disparbud
		Meningkatnya kunjungan pariwisata	Persentase Kenaikan Kunjungan Wisatawan	Persen	1,75	30,20	100,00	ST	3,50	100,00	ST	Disparbud
		Meningkatnya pengembangan subsektor ekonomi kreatif	Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	11,76	11,76	100,00	ST	29,41	39,98	SR	Disparbud

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen	11,72	11,72	100,00	ST	27,34	42,86	R	Disparbud
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disparbud
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	Persen	12,01	12,01	100,00	ST	17,60	68,23	S	Disparbud

27. Urusan Pertanian

Capaian kinerja urusan Pertanian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.201.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pertanian

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
27	Pertanian	**Meningkatkan ketahanan pangan di seluruh daerah dan daya saing ekonomi sektor pertanian**	**Nilai Produksi Pertanian**	Rupiah	5.375.938.813.885	6.461.150.841.370	100,00	ST	6.437.538.062.186	100	ST	Distapang
		Meningkatnya produksi sektor pertanian	Produksi Sektor Pertanian	Ton	636.133,68	779.776,20	100,00	ST	668.582,89	100,00	ST	Distapang
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persen	9,25	13,37	100,00	ST	9,55	100,00	ST	Distapang
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	Persen	29,14	29,14	100,00	ST	29,33	99,35	ST	Distapang
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Persentase penyakit hewan yang tertangani	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Distapang

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Masyarakat Veteriner	masyarakat veteriner										
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persen	1,38	1,38	100,00	ST	1,73	79,76	T	Distapang
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian dan Peternakan	Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Distapang
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Persen	73,75	73,75	100,00	ST	85,00	86,76	T	Distapang

28. Urusan Energi dan sumber daya mineral

Capaian kinerja urusan Energi dan sumber daya mineral Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.202.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
28	Energi dan sumber daya mineral	**Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan**	**Tingkat pemanfaatan EBT dalam pembangunan**	Persen	50,00	50,00	100,00	ST	50,00	100,00	ST	Disnaker
		Meningkatnya pemanfaatan EBT	Persentase Pemanfaatan EBT	Persen	50,00	50,00	100,00	ST	50,00	100,00	ST	Disnaker
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase potensi pemanfaatan EBT	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disnaker

29. Urusan Perdagangan

Capaian kinerja urusan Perdagangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 5 indikator yang tersebar dalam 5 program. Capaian kinerja 5 indikator program pada Tahun 2025, terdapat 3 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 5 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T) dan 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Tabel 2.203.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perdagangan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
29	Perdagangan	**Meningkatkan kewirausahaan daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan**	**LPE Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**	Persen	4,51	5,48	100,00	ST	4,61	100	ST	DisperindagKUKM

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		sektor perdagangan										
		Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	0,143	0,143	100,00	ST	0,149	95,97	ST	DisperindagKUKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	Persen	6,77	-5,89	-87,00	SR	0,90	-15,28	SR	DisperindagKUKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga	Persen	±10	-9,96	100,00	ST	±10	100,00	ST	DisperindagKUKM
	Program Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	Persen	1,00	-12,06	-8,29	SR	1,50	-12,44	SR	DisperindagKUKM
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Tertera	Persen	37,46	52,74	100,00	ST	68,11	77,43	T	DisperindagKUKM
	Program Penggunaan Dan Pemasaran	Meningkatnya Penggunaan dan	Persentase Pelaksanaan	Persen	92,34	92,56	100,00	ST	92,60	99,96	ST	DisperindagKUKM

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Produk Dalam Negeri	Pemasaran Produk Dalam Negeri	Belanja Produk Dalam Negeri									

30. Urusan Perindustrian

Capaian kinerja urusan Perindustrian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.204.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Perindustrian

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
30	Perindustrian	**Meningkatkan kewirausahaan**	**Rasio PDRB Industri**	Persen	22,97	22,66	98,65	ST	24,04	94,26	ST	DisperindagKUKM

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		daerah, kontribusi kategori industri pengolahan dalam struktur ekonomi daerah, serta pertumbuhan sektor perdagangan	**Pengolahan**									
		Meningkatnya kapasitas industri daerah	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen	0,001	0,0018	100,00	ST	0,01	18	SR	DisperindagKUKM
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	Persen	38,64	42,85	100,00	ST	41,84	100,00	ST	DisperindagKUKM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Dokumen yang Terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	DisperindagKUKM
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100	100,00	ST	DisperindagKUKM

31. Urusan Transmigrasi

Capaian kinerja urusan Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.205.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Transmigrasi

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
31	Transmigrasi	**Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, meningkatkan kepuasan transmigran serta meningkatkan peranan EBT dalam pembangunan berkelanjutan**	**Indeks Kepuasan Transmigran**	Persen	83	100,00	100,00	ST	91	100,00	ST	Disnaker

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Meningkatnya transmigran yang menetap	Persentase Kumulatif Transmigran yang Menetap	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disnaker
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang berhasil/menetap	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Disnaker

32. Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 2 indikator dengan status predikat 1 indikator memiliki kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator realisasi di tahun 2025 NA. Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator realisasi NA.

Pada level sasaran, terdapat 7 indikator yang tersebar dalam 6 sasaran. Dari 7 indikator tersebut terdapat 4 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR), dan 1 dan 1 indikator realisasi NA pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 7 indikator tersebut terdapat 4 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), 2 indikaktor memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR) dan 1 indikator realisasi NA.

Pada level program, terdapat 4 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 4 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Tabel 2.206.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat Daerah

No	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
32	Sekretariat Daerah	**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja dan meningkatkan fasilitasi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan**	**Nilai EKPPD**	Nilai	3,28	3,27	99,70	ST	3,34	97,90	ST	Setda
			Indeks Fasilitasi Keagamaan	Indeks	NA	NA	NA	NA	10,36	NA	NA	Setda
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,53	99,54	100,00	ST	98,58	100,00	ST	Setda
		Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan dan akses keuangan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	Indeks	90,40	96,40	100,00	ST	94,00	100,00	ST	Setda
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,78	4,26	89,12	T	4,86	87,65	T	Setda
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,77	89,91	99,05	ST	90,60	99,23	ST	Setda
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi legalitas kelembagaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat	Persen	5,00	1,51	30,20	SR	22,63	6,67	SR	Setda

No	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
			Fasilitasi Legalitas Kelembagaan									
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi peningkatan kapasitas	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas	Persen	5,44	25,92	100,00	ST	7,48	100,00	ST	Setda
		Meningkatnya pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapat fasilitasi sarana prasarana	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapat Fasilitasi Sarana Prasarana	Persen	7,00	2,41	34,42	SR	21,13	11,41	SR	Setda
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	70,00	70,00	100,00	ST	75,00	93,33	ST	Setda
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,56	0,56	100,00	ST	0,71	78,87	T	Setda
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	Indeks	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Setda
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	84,36	84,36	100,00	ST	84,45	99,89	ST	Setda

33. Sekretariat DPRD

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.207.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sekretariat DPRD

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
33	Sekretariat DPRD	**Meningkatkan kualitas fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD**	Indeks	78	78,00	100,00	ST	82	95,12	ST	Setwan
		Meningkatnya keterpenuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan agenda DPRD	Persentase Agenda DPRD yang Terselesaikan Tepat Waktu	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Setwan
	Program Dukungan	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi	Persentase pemenuhan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Setwan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD									

*data menggunakan realisasi tahun 2024

34. Fungsi Penunjang Perencanaan

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030) indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.208.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
34	Perencanaan	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah**	**Indeks Kualitas Perencanaan Daerah**	Indeks	23,10	23,05	99,78%	ST	24,71	93,28%	ST	Bapperida
		Meningkatkan kualitas perencanaan perangkat daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	23,20	21,80	93,96%	ST	24,80	87,90	T	Bapperida
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Bapperida
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Bapperida
		Meningkatnya Koordinasi dan	Cakupan Koordinasi dan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Bapperida

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	sinkronisasi perencanaan urusan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									

35. Fungsi Penunjang Keuangan

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 2 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 2 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 2 sasaran. Dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T), pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 3 indikator tersebut terdapat 2 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST), dan 1 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.209.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
35	Keuangan	**Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan tata kelola keuangan daerah**	**Opini BPK atas Laporan Keuangan**	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100,00	ST	Wajar Tanpa Pengecualian	100,00	ST	BPKPD
			Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persen	15,43	18,91	100,00	ST	18,00	100,00	ST	BPKPD
		Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	72,25	75,22*	100,00	ST	78,00	96,43	ST	BPKPD
		Meningkatnya pendapatan asli daerah yang berkualitas	Tingkat Pertumbuhan PAD	Persen	4,40	19,86	100,00	ST	4,70	100,00	ST	BPKPD
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,62	0,54	87,09	T	0,62	87,09	T	BPKPD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	95,2	95,10	99,89	ST	96,20	98,85	ST	BPKPD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah	Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan Ketentuan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	BPKPD
	Program Pengelolaan	Meningkatnya upaya	Persentase Capaian	Persen	100,00	102,17	100,00	ST	100,00	100,00	ST	BPKPD

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Pendapatan Daerah	ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Pendapatan Daerah									

36. Fungsi Penunjang Kepegawaian

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan realisasi tahun 2025 adalah NA.

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.210.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
36	Kepegawaian	**Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja, dan berintegritas**	**Indeks Sistem Merit**	Indeks	253,5	NA	NA	NA	350,00	NA	NA	BKPSDM

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		serta meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan										
		Meningkatnya ketepatan penempatan jabatan dan kinerja ASN	Nilai Dimensi Ketepatan Penempatan Jabatan dan Kinerja ASN	Persen	99,10	99,10	100,00	ST	99,60	99,49	ST	BKPSDM
	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya Kinerja ASN dengan predikat minimal baik	Persentase kinerja ASN dengan predikat minimal baik	Persen	98,15	98,05	99,90	ST	98,65	99,30	ST	BKPSDM

37. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Rendah (SR).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025, memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 1 indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.211.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
37	Pendidikan dan Pelatihan	**Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja, dan berintegritas serta meningkatkan kualitas ASN berbasis pendidikan dan pelatihan**	**Persentase ASN yang Memiliki Sertifikat Pengembangan Kompetensi**	Persen	44,61	44,61	100,00	ST	90,00	49,56	SR	BKPSDM
		Meningkatnya kelulusan ASN dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persen	80,00	80,00	100,00	ST	99,00	80,80	T	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	45,00	45,00	100,00	ST	45,50	98,90	ST	BKPSDM

38. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengambangan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025.

Pada level program, terdapat 1 indikator yang tersebar dalam 1 program. Capaian kinerja 1 indikator program pada Tahun 2025 realisasi NA.

Tabel 2.212.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
38	Penelitian dan Pengembangan	**Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan kapabilitas inovasi daerah**	**Kapabilitas Inovasi**	Nilai	2,97	3,03	100,00	ST	3,22	94,10	ST	Bapperida
		Meningkatnya penyelenggaraan riset dan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovasi	Inovatif	Inovatif	100,00	ST	Sangat inovatif	97,53	ST	Bapperida
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	Persen	100,00	NA	NA	NA	100,00	NA	NA	Bapperida

39. Fungsi Penunjang Pengawasan

Capaian kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sedang (S) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Rendah (R).

Pada level program, terdapat 2 indikator yang tersebar dalam 2 program. Capaian kinerja 2 indikator program pada Tahun 2025, 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator realisasi NA. Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 2 indikator tersebut 1 indikator memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 1 indikator realisasi NA.

Tabel 2.213.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
39	Pengawasan	**Meningkatkan integritas daerah**	**Indeks Integritas Nasional**	Indeks	79,81	75,96	95,18	ST	83,07	91,44	ST	Itda
		Meningkatnya pengawasan internal pemerintah daerah	Kapabilitas APIP	Nilai	3,32	2,31	69,57	S	3,57	64,70	R	Itda
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Persen	84,85	NA	NA	NA	87,50	NA	NA	Itda
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintah daerah	Penambahan Unit Kerja Yang Mendapat Predikat WBK	Unit Kerja	1	1	100,00	ST	1	100,00	ST	Itda

40. Kewilayahan

Capaian kinerja Kewilayahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 3 indikator yang tersebar dalam 3 program. Capaian kinerja 3 indikator program pada Tahun 2025, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, 3 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Tabel 2.214.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
40	Kewilayahan	**Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan**	Indeks	87,27	92,93	100,00	ST	91,69	100,00	ST	Kewilayahan
		Meningkatnya kualitas tata kelola kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Indeks	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Kewilayahan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	26 Kecamatan

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan	persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	26 Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di Kecamatan yang Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	26 Kecamatan

41. Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 pada level tujuan memiliki 1 indikator dengan status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level tujuan tahun 2025 dibandingkan dengan Taget akhir RPJMD (2030), 1 indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level sasaran, terdapat 1 indikator yang memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) pada tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, indikator tersebut masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST).

Pada level program, terdapat 5 indikator yang tersebar dalam 5 program. Capaian kinerja 5 indikator program pada Tahun 2025, indikator tersebut memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST). Capaian kinerja pada level Program pada tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030, dari 5 indikator tersebut terdapat 1 indikator masih memiliki status predikat kinerja Sangat Tinggi (ST) dan 4 indikator memiliki status predikat kinerja Tinggi (T).

Tabel 2.215.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
41	Kesbangpol	**Meningkatkan stabilitas keamanan daerah**	**Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi**	Persen	100	100	100,00	ST	100	100,00	ST	Kesbangpol
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewapadaan dini	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	5	1	100,00	ST	3	100,00	ST	Kesbangpol
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	75,00	75,00	100,00	ST	85,00	88,23	T	Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembanganetika Serta Budaya Politik	Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Persen	75,00	75,00	100,00	ST	85,00	88,23	T	Kesbangpol

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
		Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Persen	72,00	72,00	100,00	ST	90,00	80,00	T	Kesbangpol
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persen	75,00	75,00	100,00	ST	85,00	88,23	T	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan	Persen	100,00	100,00	100,00	ST	100,00	100,00	ST	Kesbangpol

No.	Urusan/ Program	Tujuan/ Sasaran/ *Outcome*	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Status Predikat Kinerja 2025	Target Akhir RPJMD Tahun 2030	Tingkat Capaian s.d. Tahun 2025 (%)	Status Predikat Kinerja RPJMD s.d. 2025	Perngkat Daerah Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)					
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	kerjasama intelijen									

2.3. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023–2025, secara umum pelaksanaan pelayanan dasar di Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan mayoritas indikator pada seluruh urusan pelayanan dasar telah mencapai realisasi sebesar 100 persen selama tiga tahun berturut-turut.

Tabel 2.216.
Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
					2023	2024	2025
1	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	persen	100	100	100
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	persen	NA	NA	100
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	persen	100	100	100
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	persen	NA	NA	100
		Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	100	100	100
Capaian Bidang Urusan Pendidikan					100	100	100
2	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100

		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100

		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen	100	100	100
Capaian Bidang Urusan Kesehatan					100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	100	100	100
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	100	100	100
Capaian Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					100	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	100	100	100
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	100	100	100
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	persen	100	100	100

			Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	100	100	100
Capaian Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					100	100	100
6	Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	100
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	100
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	persen	100	100	100
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	persen	100	100	100
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100
Capaian Bidang Urusan Sosial					100	100	100

Capaian SPM untuk urusan Pendidikan menunjukkan seluruh indikator pelayanan dasar baik Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, maupun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah tercapai secara optimal. Selain itu, pada tahun 2025 indikator rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional juga telah mencapai target sebesar 100 persen.

Pada urusan kesehatan, seluruh jenis pelayanan dasar mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, hingga pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes melitus, tuberkulosis, dan HIV telah mencapai realisasi 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat telah berjalan secara merata dan optimal.

Selanjutnya, pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari serta pelayanan pengolahan air limbah domestik juga berhasil mencapai realisasi 100 persen. Kondisi ini mencerminkan semakin meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah juga menunjukkan capaian maksimal sebesar 100 persen selama periode evaluasi.

Sementara itu, pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, seluruh indikator pelayanan seperti penegakan Perda dan Perkada, pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana maupun kebakaran telah terealisasi sebesar 100 persen.

Adapun pada urusan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana juga telah mencapai target 100 persen.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal. Ke depan, diperlukan upaya mempertahankan kualitas pelayanan, peningkatan akurasi data, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah agar capaian SPM tetap terjaga secara berkelanjutan.

2.4. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

2.4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan prioritas dari beberapa permasalahan pembangunan yang ada di daerah. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah meliputi permasalahan pembangunan multisektor yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy* dengan mendasarkan pada hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta beberapa aspek pelayanan umum yang terkait dengan sasaran dan prioritas daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan dengan mendasarkan gambaran aspek pelayanan umum serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.

Mendasari hasil analisis gambaran aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing serta beberapa aspek pelayanan umum yang terkait dengan sasaran dan prioritas daerah dapat ditentukan permasalahan pembangunan daerah yang bersifat makro dan merupakan permasalahan lintas sektor serta berkaitan dengan isu strategis daerah yang juga perlu menjadi perhatian pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 yaitu:

1. **Masih tingginya tingkat kemiskinan.**

   Kabupaten Kebumen telah berhasil menurunkan posisinya dari Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen masih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga berbagai permasalahan mendasar perlu mendapat perhatian dan penanganan lebih lanjut, dengan beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

   1.a. Kenaikan garis kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan.

   Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp.390.599,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.502.841,00 pada tahun 2025. Kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan.

   1.b. Masih rendahnya PDRB perkapita sebagai proksi masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kebumen.

   Kinerja PDRB ADHB per kapita Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2025 terus meningkat dari Rp.21,693 Juta pada Tahun 2021 menjadi Rp.28,999 Juta pada Tahun 2025. Akan tetapi, secara umum PDRB ADHB per kapita Kabupaten Kebumen masih lebih rendah baik dibandingkan Kabupaten yang berbatasan maupun dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hanya lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo mulai Tahun 2024. Namun demikian, jika

dihitung tingkat pertumbuhan selama periode 2021-2025 menunjukkan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Kebumen sebesar 33,68 persen hanya dibawah Nasional dan Kabupaten Banyumas. Dengan terus memacu pertumbuhan diharapkan PDRB per kapita Kabupaten Kebumen akan terus meningkat mengejar ketertinggalan dari daerah lain sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.c. Masih rendahnya pengeluaran perkapita sebagai proksi masih rendahnya daya beli masyarakat Kebumen.

Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp.9.028.000,00 pada Tahun 2021 menjadi Rp.10.658.000,00 pada Tahun 2025. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Seperti halnya RLS, pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021-2025. Peningkatan per kapita masyarakat untuk terus ditingkatkan dengan memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan pekerjaan agar meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, upaya pengendalian harga juga terus di lakukan agar kemampuan daya beli masyarakat lebih meningkat selanjutnya pengeluaran per kapita dan kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat.

1.d. Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk dimana pengeluaran dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan (pangan) dan pengeluaran bukan makanan (sandang, papan, kesehatan, pendidikan). Semakin tinggi persentase pengeluaran non makanan menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk. Walaupun PDRB masih didominasi konsumsi rumah tangga, namun secara umum pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran untuk makanan masih mendekati 51% yaitu menjadi 50,99% pada tahun 2025 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih berada di kelompok menengah ke bawah yang baru mampu memenuhi kebutuhan dasar (primer) sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier masih terbatas.

1.f. Tingginya tingkat pekerja informal.

Sektor formal lebih dimungkinkan dapat memberikan jaminan atas pekerjaan yang bersifat tetap hingga adanya jaminan sosial bagi kesejahteraan pegawainya dibandingkan sektor informal. Namun

demikian dikarenakan rendahnya keterserapan tenaga kerja khususnya pada sektor formal, menyebabkan beralih ke sektor informal. Hal ini ditunjukkan dengan persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 30,40% pada Tahun 2021 menjadi 27,14% pada Tahun 2025. Hal ini juga menyebabkan persentase tenaga kerja informal cenderung meningkat dan semakin mendominasi hingga Tahun 2025 mencapai 72,86%.

1.g. Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang tercermin dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum optimal namun cenderung meningkat dari 34,97% pada Tahun 2022 menjadi 36,47% pada Tahun 2025. Beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya disebabkan masih banyak yang berkerja di sektor informal.

1.h. Masih rendahnya TPAK Perempuan.

TPAK laki-laki cenderung lebih besar dari perempuan dimana hingga Tahun 2025 TPAK perempuan hanya sebesar 66,41% dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 85,74%. Hal ini kemungkinan dapat terjadi dikarenakan:

a. Masih terdapat peran gender tradisional dimana perempuan lebih berperan pada urusan domestik/rumah tangga sehingga tidak aktif sebagai angkatan kerja;
b. Perempuan mungkin masih memiliki akses yang lebih terbatas pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan pasar kerja;
c. Perempuan mungkin menghadapi kesenjangan upah atau tidak tertarik memasuki pasar tenaga kerja karena pekerjaan tertentu kurang menguntungkan;
d. Tugas dan tanggung jawab sebagai perempuan (ibu) dapat mempengaruhi persepsi penerima kerja dalam mempekerjakan perempuan serta masih belum optimalnya fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak atau kebijakan cuti melahirkan yang memadai dapat membatasi partisipasi perempuan di tempat kerja; serta
e. Perempuan mungkin masih menghadapi budaya dan norma sosial yang membatasi mobilitas dan pilihan pekerjaan perempuan.

1.i. Masih terdapat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Walaupun persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semakin menurun hingga menjadi 17,61% dari total keseluruhan populasi penduduk di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025. Namun secara jumlah masih terdapat 865.646 orang yang masuk ke dalam golongan PPKS di Tahun 2025 yang tetap harus membutuhkan penanganan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah.

1.j. Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.

Data menunjukkan masih minimnya perangkat daerah, kantor kecamatan, kelurahan dan desa yang telah menyediakan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak yaitu sebesar 4,34% pada Tahun 2023 sampai 2025.

1.k. Masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan.

Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan cenderung menurun dari 23,91% pada Tahun 2021 menjadi 17,21% pada Tahun 2025. Beberapa permasalahan pemenuhan akses air minum oleh PDAM Tirta Bumi Sentosa adalah masih rendahnya *idle capacity* khususnya SPAM Keburejo rata-rata tahun 2023 penyerapan konsumen 60 liter/det masih dibawah kapasitas 150 liter/detik ini berarti masih ada potensi air perpipaan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Sementara itu, akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan juga cenderung mengalami penurunan dari 12,57% pada Tahun 2021 menjadi 0,38% pada Tahun 2025 hal ini dikarenakan juga perhitungan Tahun 2021-2024 merupakan akses perpipaan sementara yang baru Tahun 2025 merupakan akses perpipaan siap minum (aman). Penyelenggaraan sistem air minum perdesaan dikelola oleh KPSPAM, permasalahan dan kendala di setiap desa bervariasi, namun secara umum kendala penyelenggaraan air minum perdesaan yaitu terbatasnya sumber air baku dan manajemen KPSPAM yang perlu ditingkatkan. Selain itu berbeda dengan air minum PDAM, air minum perpipaan di pedesaan belum mendapatkan uji kualitas air minum sehingga belum masuk kategori air siap minum aman.

1.l. Masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

Capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,85% pada Tahun 2021 menjadi 13,98% pada Tahun 2025 menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kebumen belum memiliki akses sanitasi aman. Selama ini budaya masyarakat membangun *septic tank* masih pada kriteria belum layak secara fisik dengan kondisi bawah dan dinding belum kedap dan belum dilakukan penyedotan secara rutin 2-3 tahun sekali, bahkan dari segi fisik belum sesuai persyaratan yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat membangun akses sanitasi aman dan kemampuan pembiayaan masyarakat masih rendah.

1.m. Masih tingginya angka *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 tercatat sebanyak 482.703 rumah tangga, sementara jumlah rumah yang tersedia sebesar 356.891 unit. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah rumah tangga dan ketersediaan rumah, sehingga terdapat rumah tangga yang masih menumpang atau belum memiliki rumah sendiri. Berdasarkan data BKKBN, *backlog* kepemilikan rumah pada tahun 2021 sebesar 64.093 unit dan menurun menjadi 63.963 unit pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, angka backlog tersebut masih tergolong tinggi sehingga pemenuhan kebutuhan rumah perlu terus diupayakan melalui peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

1.n. Masih adanya rumah yang tidak layak huni (RTLH).

Dikarenakan kondisi keuangan daerah, jumlah RTLH yang tertangani setiap tahun cenderung menurun dari 2.293 unit pada Tahun 2021 menjadi hanya 806 unit pada Tahun 2024. Di Tahun 2025 sebesar 675 karena data pelaporan dari Dana Desa belum tersedia. Namun demikian sisa RTLH yang belum tertangani terus menurun jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar 26.342 unit menjadi 13.660 unit pada tahun 2025, di mana perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya tidak hanya disebabkan oleh penanganan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh pemutakhiran basis data dan penyesuaian metode pendataan pada awal periode RPJMD; sejalan dengan kondisi tersebut, persentase rumah layak huni meningkat menjadi 95,99% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2021, yang selaras dengan penurunan persentase RTLH dari 7,42% menjadi 4,02%, sementara persentase RTLH yang tertangani setiap tahun juga mengalami penurunan dari 8,01% pada tahun 2021 menjadi 4,71% pada tahun 2025.

1.o. Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

Secara umum, akses hunian layak diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu rumah layak huni, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Rumah layak huni dinilai dari ketahanan bangunan, meliputi kualitas bahan atap, dinding, dan lantai yang memenuhi syarat, serta kecukupan luas tempat tinggal, yaitu luas lantai per kapita ≥ 7,2 m².

Berdasarkan data Susenas, persentase rumah tangga dengan akses hunian layak cenderung menurun dari 73,26% pada tahun 2021 menjadi 69,80% pada tahun 2024, namun meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 70,97%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan; semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga pada sektor tersebut.

1.p. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani.

Hal ini ditunjukkan dengan luas permukiman kumuh perkotaan yang belum tertangani semakin berkurang dari 288,62 Ha pada Tahun 2021 menjadi 97,93 Ha pada tahun 2025, sesuai dengan SK Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Nomor 600.2.1/872 tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian, persentase wilayah kumuh perkotaan juga semakin berkurang dari 5,00% pada tahun 2021 menjadi 1,69% pada tahun 2025, hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ada penanganan mandiri oleh desa

2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

2.a. Masih terdapat kasus *stunting.*

Selain AKI dan AKB, status gizi masih perlu menjadi perhatian. Dimana hal ini ditandai masih ditemukannya kasus balita gizi kurang, balita gizi buruk dan tingginya angka *stunting*. Persentase balita gizi kurang pada tahun 2021 mencapai 0,55% dan meningkat menjadi 4,1% pada Tahun 2025. Sementara itu, persentase balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,03% pada Tahun 2021 hingga mencapai 0,059% pada Tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada Tahun 2025 menjadi 0,02%. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (*e*-PPGBM) prevalensi *stunting* Kabupaten Kebumen sebesar 12,13 persen Tahun 2021 dan terus menurun menjadi 7,53 persen pada Tahun 2025. Sedangkan jumlah penderita *stunting* juga relatif menurun dari 8.572 orang pada Tahun 2021 menjadi 5.190 pada Tahun 2025.

2.b. Masih terdapat penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi.

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) yang mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. PoU Kabupaten Kebumen cenderung menurun dari 13,52% pada Tahun 2021 menjadi 9,24% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan walaupun cenderung menurun, masih terdapat 9,24% dari total penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk meningkatkan akses pangan dan gizi, seperti melalui bantuan pangan, subsidi atau peningkatan produksi pangan lokal. Dampak kekurangan gizi seperti ini juga dapat menurunkan produktivitas, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial seperti tingginya beban kesehatan masyarakat.

2.c. Belum seimbangnya kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan.

Berdasarkan hasil analisis Skor PPH selama 5 tahun terakhir, capaian Skor PPH Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 85,90% pada Tahun 2021 menjadi 93,45% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Dengan skor PPH telah melebihi 90% menunjukkan pola konsumsi pangan Kabupaten Kebumen sudah mendekati ideal atau seimbang sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjutkan. Capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani. Skor PPH Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa kelompok pangan yang masih berada di bawah standar PPH yakni padi, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, dan gula.

2.d. Masih rendahnya angka konsumsi ikan (AKI).

Angka Konsumsi Ikan (AKI) di Kabupaten Kebumen cenderung fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 24,54 kg/kapita/tahun namun di tahun 2025 menjadi 13,29 kg/kapita/tahun. Dengan demikian angka ini masih jauh jika dibandingkan target ideal konsumsi ikan yang ditetapkan pemerintah pusat pada Tahun 2025 yaitu sebesar 26,26 kg/kapita/tahun. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 terdapat perubahan istilah Angka Konsumsi Ikan (AKI) menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) dan telah ditetapkan besaran target pada tahun 2025–2029 sebesar 26,26 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2025 capaian KIM nasional tercatat sebesar 26,08 kg/kapita/tahun. Angka ini terus didorong untuk tumbuh rata-rata 2,18% per tahun guna memenuhi kebutuhan protein hewani. pada tahun 2025 dan ditargetkan mencapai 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029.

Rendahnya Konsumsi Ikan Masyarakat juga dipengaruhi oleh produksi ikan budidaya yang memiliki kendala pada sektor biaya pakan yang semakin tinggi dan akses pasar yang lemah. Penurunan kualitas air, pencemaran dan perubahan iklim juga menyebabkan penurunan produksi ikan.

Kurang optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, hal tersebut tercermin masih terdapat praktik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tidak ramah lingkunagan. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan masih kuarang memadahi.

2.f. Masih terjadi Angka Kematian Ibu (AKI).

Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun hingga sebanyak 9 kasus pada Tahun 2025. Demikian juga dengan perhitungan AKI sempat mengalami penurunan dari 201,6 pada tahun 2021 menjadi 92,26 pada tahun 2023. Namun kembali meningkat menjadi 108,96 pada tahun 2024 dikarenakan pembandingnya yaitu jumlah kelahiran menurun. Dan kembali menurun pada Tahun 2025 menjadi 71,06. Sementara itu penyebab kasus kematian ibu pada Tahun 2025 antara lain dikarenakan perdarahan sebanyak 4 kasus, kelainan jantung pembuluh darah 4 kasus, hipertensi pada kehamilan sebanyak 3 kasus, infeksi 1 kasus, dan lain –lain 3 kasus. Faktor faktor yang mempengaruhi yaitu masih kurangnya kepatuhan pelaksanaan pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu yang sesuai standar; belum semua faskes jejaring Puskesmas (klinik, dokter praktek mandiri, Bidan Praktek Mandiri) yang belum berkolaborasi dengan Puskesmas dalam pelaksanaan ANC Terpadu; masih banyak ibu hamil yang resiko tinggi; serta asih banyak ibu hamil dengan penyakit penyerta.

2.g. Masih tingginya Angka Kematian Bayi.

Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2021-2025 yaitu dari 136 kasus pada Tahun 2021 menjadi 203 kasus pada Tahun 2025. Hal yang sama juga tercermin pada AKB yang meningkat dari 6,96 pada Tahun 2021 menjadi 12,49 pada Tahun 2025. Kasus penyebab kematian bayi diantaranya disebabkan oleh kasus hipertensi tinggi serta adanya edaran terminasi kehamilan usia 33 minggu pada indikasi pre eklamsi sehingga meningkatkan berat badan lahir rendah dan resiko kematian.

2.h. Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis

Indonesia merupakan negara ke-2 tertinggi penderita tuberkulosis. Hal tersebut mendorong pengendalian tuberkulosis nasional terus dilakukan dengan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program. Kasus tuberkulosis di Kabupaten Kebumen menunjukkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis cenderung fluktuatif dari 79% pada Tahun 2021 sempat menjadi 101,66% pada Tahun 2022 namun turun kembali menjadi 95% pada Tahun 2025. Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Oleh karena itu tinggi rendahnya cakupan ini sangat tergantung dari upaya penemuan kasus TB maupun keberhasilan pengobatannya. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis cenderung meningkat dari 43% pada tahun 2021 menjadi 90% pada tahun 2025 yang menunjukkan adanya keberhasilan pengobatan pada penderita yang tercatat mengidap tuberkulosis pada tahun sebelumnya. Namun demikian, pengobatan TB mengalami beberapa kendala diantaranya kurang disiplinnya pasien dalam mengikuti proses pengobatan sesuai standar serta terjadinya kasus resistensi obat.

2.i. Masih rendahnya tingkat capaian pendidikan.

Hal ini tergambarkan dari Indeks Pendidikan yang mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu populasi yang diperoleh dari perhitungan komponen IPM dimensi pendidikan yaitu RLS dan HLS. Dalam perhitungannya batas atas untuk RLS adalah 15 tahun (setara dengan tingkat Pendidikan sarjana) dan untuk HLS adalah 18 tahun (perkiraan maksimum dalam sistem pendidikan formal). Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 62,25 pada Tahun 2021 menjadi 63,58 pada Tahun 2025. Dengan capaian baru sekitar 63,34 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.

2.j. Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM Kabupaten Kebumen.

Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan dari 7,55 pada Tahun 2021 menjadi 7,89 pada Tahun 2025. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,89 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Jika dibandingkan dengan wilayah Kabupaten tetangga, menunjukkan RLS Kabupaten Kebumen masih di bawah Kabupaten Purworejo dan Banyumas serta juga masih di bawah tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sedangkan kinerja selama Tahun 2024-2025 yang hanya mengalami kenaikan 0,02 menunjukkan kalah cepat dengan kinerja Kabupaten Banyumas dan Purworejo serta Nasional. Masih lemahnya kinerja RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2021-2025. Faktor penghambat kinerja RLS di Kabupaten Kebumen selain kondisi sosial dan ekonomi beberapa kelompok masyarakat, adalah masih rendahnya RLS pada penduduk usia tua ataupun lanjut usia dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH).

2.k. Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat Kabupaten Kebumen sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan daya saing sumber daya manusia . Hal ini dapat diukur dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas (yang merupakan usia angkatan kerja) yang berkualifikasi pendidikan tinggi. Data menunjukkan terjadi penurunan dari 7,96% pada tahun 2024 menjadi 4,83% pada tahun 2025, namun proporsi ini masih sangat rendah yang menggambarkan kualitas SDM Kabupaten Kebumen.

2.l. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan.

Walaupun relatif masih rendah, pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen terus meningkat. Hal ini

tercermin dari tingkat pemanfaatan perpustakaan yang terus membaik dari hanya 25,35% pada Tahun 2021 menjadi 31,45% pada Tahun 2025. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat terus dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang terus meningkat dari 12,85 pada Tahun 2021 hingga menjadi 18,95 pada Tahun 2023 namun turun menjadi 17,46 pada Tahun 2025. Sedangkan rasio perpustakaan per satuan penduduk meningkat dari 0,99 pada Tahun 2021 menjadi 1,05 pada Tahun 2025.

2.m. Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kebumen relatif membaik dari 66,86 pada Tahun 2021 menjadi 69,71* pada Tahun 2025 yang menunjukkan masih terdapat kesenjangan gender yang perlu diperbaiki. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah juga cenderung meningkat dari 47,37% pada Tahun 2021 menjadi 59,50%* pada Tahun 2025. Sementara untuk proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD juga meningkat dari 22% pada Tahun 2021 menjadi 24% pada Tahun 2025. Hal ini menujukkan partisipasi perempuan di lembaga parlemen tingkat Kabupaten Kebumen masih berada di bawah 30 persen. Peningkatan partisipasi perempuan perlu terus ditingkatkan agar pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial serta menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait peraturan perundang-undangan yang pro perempuan maupun anak. Terkait partisipasi perempuan di lembaga swasta juga cenderung menurun dari 43,66% pada Tahun 2021 menjadi 32,97%* pada Tahun 2025.

2.n. Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak.

Walaupun persentase kekerasan terhadap perempuan sempat meningkat dari 0,007% pada Tahun 2021 menjadi 0,010% pada Tahun 2023, namun dapat kembali menurun di Tahun 2025 menjadi sebesar 0,006%. Sementara persentase kekerasan terhadap anak sempat menurun dari 0,0148 pada Tahun 2021 menjadi 0,014% pada Tahun 2023, namun sedikit meningkat pada Tahun 2025 menjadi 0,03%.

2.o. Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak.

Jumlah perkawinan anak di bawah usia 19 Tahun di Kabupaten Kebumen masih terjadi walaupun cenderung menurun hingga pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 152 kasus.

3. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

3.a. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan.

Status pekerjaan di Kabupaten Kebumen menunjukkan orang yang berusaha dibantu buruh tetap cukup fluktuatif. Sempat meningkat pada Tahun 2022, namun kemudian menurun hingga Tahun 2024 dan meningkat kembali pada Tahun 2025 menjadi 25.223 orang. Orang yang berusaha dibantu buruh tetap adalah jenis usaha yang mempekerjakan karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan memiliki jaminan kerja secara berkelanjutan, sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Usaha yang dimaksud dapat berbentuk badan usaha maupun tidak/belum berbentuk badan usaha. Hal ini berdampak terhadap rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang sempat mencapai 4,06% pada Tahun 2022, kemudian terus menurun hingga Tahun 2024 dan meningkat kembali pada Tahun 2025 menjadi 2,96%.

3.c. Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar.

Jumlah industri kecil dan menengah hanya bertambah 43 unit selama periode Tahun 2021-2025 sehingga mencapai 56.473 unit pada Tahun 2025 yang menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah. Sementara itu, jumlah industri besar baru mencapai 4 unit hingga Tahun 2025 yang menunjukkan masih sedikitnya industri besar.

3.d. Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen.

Cakupan koperasi aktif cenderung meningkat dari 89,4% pada Tahun 2021 menjadi 89,80% pada Tahun 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi. Sementara itu, nilai volume usaha koperasi juga terus meningkat dari sekitar Rp.175 Milyar pada Tahun 2021 menjadi Rp.608 Milyar pada Tahun 2025. Hal ini sejalan dengan rasio nominal volume usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen yang cenderung meningkat dari 0,59% pada Tahun 2021 menjadi 1,46% pada Tahun 2025 Dengan rasio tersebut menunjukkan masih rendahnya volume usaha koperasi.

3.e. Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya.

Selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,93 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 5,86 ton/ha pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Seperti halnya produktivitas padi, 5 komoditas bahan pangan utama lokal juga mengalami penurunan yaitu dari 6,74 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 6,10 ton/ha pada tahun 2025.

3.f. Menurunnya volume produksi perikanan tangkap.

Data menunjukkan produksi perikanan tangkap fluktuatif cenderung naik dari 9.646.661,67 kg pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2025

menjadi 7.090.220,00 kg. Walaupun menurut volume produksi perikanan tangkap menurun hingga Tahun 2025.

3.g. Menurunnya volume produksi garam.

Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 155.945,00 kg pada Tahun 2021 menjadi hanya 38.676,00 kg pada Tahun 2025 atau turun sebesar –24,80% antara periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

3.h. Masih rendahnya daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen.

Daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari *net* ekspor yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen masih sangat tergantung pada barang dan jasa dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Dapat juga berarti lebih banyak uang yang keluar daerah dibandingkan ke dalam daerah dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi dengan berbelanja ke wilayah perkotaan besar utamanya di dekat Kabupaten Kebumen seperti Yogyakarta atau Purwokerto serta cukup tingginya aktivitas membeli barang secara *online* dengan *marketseller* berasal dari luar Kabupaten Kebumen. *Net* ekspor yang masih negatif juga dapat menunjukkan masih lemahnya daya saing produk/komoditas yang dihasilkan di dalam daerah yang disebabkan oleh biaya produksi tinggi (kurang efisien), kualitas dan diversifikasi produk rendah serta masih lemahnya pemasaran. Untuk itu investasi yang dapat menghasilkan produk/komoditas lokal yang berdaya saing sangat dibutuhkan oleh perekonomian Kabupaten Kebumen.

3.i. Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan.

Rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak 2022 menjadi 1,29 hari pada Tahun 2024. Untuk itu perlu diwujudkan paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen. Namun demikian tingkat hunian akomodasi seperti hotel dan tempat penginapan tetap meningkat dari 28,58% pada Tahun 2021 menjadi 53,97% pada Tahun 2024 karena didorong aktivitas lain seperti MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*). Namun dengan tingkat hunian masih sedikit di atas 50% menunjukkan tingkat hunian belum optimal karena pada umumnya berdasarkan tren industri perhotelan menunjukkan tingkat hunian 60-70% pada banyak kasus dianggap menguntungkan untuk di wilayah kota kecil.

3.j. Kontribusi investasi bagi PDRB masih rendah yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar.

Tingkat investasi memberikan kontribusi bagi PDRB cenderung menurun setiap tahunnya dari 21,84% pada Tahun 2020 menjadi 20,43% pada Tahun 2024 dan pada Tahun 2025 mencapai 18,80% yang menunjukkan tingkat investasi relatif masih rendah, sehingga potensi untuk meningkatkan kapasitas produktif jangka panjang dan kemampuan memberikan efek multiplier menjadi terbatas. Hal ini juga dapat membuat pertumbuhan ekonomi kurang tahan terhadap guncangan eksternal, karena investasi adalah salah satu motor penggerak utama inovasi dan produktivitas. Disisi lain perubahan inventori juga sangat kecil hanya sekitar 1,8% setiap tahunnya yang dapat menunjukkan produsen terbatas dalam melakukan ekspansi bisnis sehingga skala usahanya relatif stagnan, begitu juga upaya penyerapan tenaga kerja juga stagnan. Idealnya menurut Bank Dunia dan IMF, proporsi investasi terhadap suatu perekonomian yang masih berkembang minimal di kisaran 30% agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan. Untuk peningkatan investasi masih sangat dibutuhkan oleh Kabupaten Kebumen.

3.k. Masih rendahnya kemampuan likuditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen termasuk perbankan BUMD.

Kondisi likuiditas utamanya perbankan di Kabupaten Kebumen dapat tercermin diantaranya dari kondisi dana pihak ketiga (simpanan) dan kredit (pinjaman) di perbankan yang berada di Kabupaten Kebumen. Rasio total dana pihak ketiga pada seluruh bank umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB menunjukkan kecenderungan menurun dari 20,53% pada tahun 2021 menjadi 20,08% pada Tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya penurunan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin berkurangnya kemampuan likuiditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen untuk memberikan kredit dan menjalankan operasionalnya secara optimal. Hal yang sama juga terjadi pada rasio total dana pihak ketiga pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB yang cenderung menurun dari 1,97% pada Tahun 2021 menjadi 1,46% pada Tahun 2025. Untuk itu perlu ditingkatkan literasi keuangan bagi masyarakat luas untuk dapat menyimpan kelebihan dana atau asetnya pada lembaga keuangan seperti perbankan. Sementara itu, rasio total kredit pada Bank Umum dan BPR di wilayah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB mengalami fluktuasi hingga hanya mencapai 14,66% pada Tahun 2025. Sedangkan rasio total kredit pada Bank milik Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap total PDRB cenderung menurun dari 1,53% pada Tahun 2021 menjadi 1,13% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya fungsi perbankan milik daerah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan

dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian daerah tersebut.

3.l. Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah.

Kinerja kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen cenderung mengalami kenaikan dari 1,87 pada Tahun 2021 menjadi 3,03 pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan kemampuan kapabilitas inovasi Kabupaten Kebumen masih lebih rendah dibandingkan kinerja IDSD secara keseluruhan dan masih masuk pada kategori sedang yang dapat berarti kapabilitas inovasi telah memadai namun terdapat banyak area yang perlu diperbaiki seperti efisiensi pemerintah, aksesibilitas infrastruktur atau kualitas tenaga kerja. Sementara itu, kinerja IDSD Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 3,12 pada Tahun 2021 menjadi 3,79 pada Tahun 2025 yang menunjukkan masuk dalam kategori sedang-tinggi dan dapat diartikan kinerja baik tetapi masih memiliki ruang untuk peningkatan di beberapa komponen. Namun demikian beberapa hal masih harus menjadi fokus perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas yang berdaya saing.

4. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah.

4.a. Belum mantapnya infrastruktur daerah

Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah menurun dari 64,59% pada Tahun 2021 menjadi 38,89% pada tahun 2025. Yang dalam hal ini ditunjang oleh tiga komponen yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang turun menjadi 50,02% pada Tahun 2025. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman menunjukkan turun tajam dari 54,50% pada Tahun 2021 menjadi 2,99% pada Tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan fluktuatif dari 82,72% pada Tahun 2021 menjadi 76,78% pada Tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2025 baru mencapai 86,03% menunjukkan peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infarstruktur daerah.

4.b. Terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap.

Hingga Tahun 2025 terdapat 470,960 km jalan kabupaten dalam kondisi baik atau 46,40%, dalam kondisi sedang sepanjang 284,430 km atau 27,96%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 139,030 km atau 13,67% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 122,730 km atau 12,07%. Dari data tersebut menunjukkan persentase panjang

jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten hingga Tahun 2025 sebesar 74,27% yang diperoleh dari proporsi baik ditambah proporsi sedang. Dengan proporsi lebih dari 70% menunjukkan infrastruktur jalan telah cukup baik dan tidak mengganggu fungsi jalan secara signifikan. Namun demikian masih terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati over dimensi dan over loading (ODOL)/melebihi kapasitas serta tingginya curah hujan yang mempengaruhi kekuatan konstruksi jalan.

4.c. Kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun.

Hal ini dapat dilihat dari jembatan dalam kondisi baik yang menurun dari 144 unit atau 22,97% pada Tahun 2021 menjadi hanya 2 unit atau 0,24% pada Tahun 2025. Jembatan dalam kondisi baik ini menurun kualitasnya menjadi dalam kondisi sedang yang cukup fluktuatif dari 335 unit atau 5,58% pada tahun 2021 menjadi 254 unit atau 30,42% pada tahun 2025. Sementara itu, kondisi rusak ringan cenderung meningkat dari 439 unit pada tahun 2021 atau 70,02% pada tahun 2021 menjadi 556 unit atau 66,71% pada tahun 2025.

Sedangkan kondisi rusak berat cenderung turun dari 9 unit atau 1,44% pada tahun 2021 menjadi 19 unit atau 2,28% pada tahun 2025, adapun pada tahun 2025 terdapat 3 unit jembatan atau 0,36% yang kondisinya masuk dalam kategori kritis.

4.d. Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen.

Kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan (fasilitas keselamatan) jalan secara tuntas di 1 ruas jalan untuk setiap jenis perlengkapan jalan yang dimungkinkan berbeda-beda kebutuhannya (jenis dan/atau jumlahnya) pada setiap ruas jalannya. Hal ini berkontribusi untuk meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen terus meningkat dari 38,43% pada Tahun 2021 menjadi 63,67% pada Tahun 2025.

4.e. Kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga Tahun 2025 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105 meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Dari data tersebut menunjukkan proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 75,17% pada Tahun 2021 menjadi 78,85% pada Tahun 2024, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,55%

pada Tahun 2021 menjadi 1,4% pada Tahun 2024. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan relatif meningkat dari 1,23% pada Tahun 2020 menjadi 1,13% pada Tahun 2025 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 22,04% pada Tahun 2021 menjadi 18,62% pada Tahun 2025. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada Tahun 2025 telah mencapai 59,35%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,35% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.

5. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

5.a. Fluktuatifnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dari 64,43 pada Tahun 2021 menjadi 75,31 pada Tahun 2025 sehingga masih masuk pada kategori baik sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 tahun 2021. Hal ini dikarenakan fluktuatifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2025 IKA pada posisi 75,53 atau masuk kategori baik, sementara IKU pada posisi 81,49 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 63,50 atau masuk kategori sedang. IKA cukup baik tetapi masih belum optimal pada pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau. Penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami.

5.b. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan hal ini tercermin melalui upaya peningkatan gerakan 3R yang mengalami peningkatan dari 23,41% pada Tahun 2021 menjadi 57,62% pada Tahun 2025. Selain itu, berdasarkan olahan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah juga mengalami peningkatan dari 23,41% pada tahun 2021 menjadi 54,59% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan kinerja

tempat-tempat pengolahan sampah maupun fasilitas daur ulang yang aktif terus meningkat.

5.c. Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).
Sejak Tahun 2023 melalui aplikasi AKSARA dari pemerintah pusat, telah mulai dihitung penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO2eq pada Tahun 2023 menjadi 152.859,76 TonCO2eq pada Tahun 2025. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada Tahun 2027 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 2.399.500,84 TonCO2eq. Target Tahun 2027 ini ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK.

5.d. Belum Optimalnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
IRBI Kabupaten Kebumen cenderung menurun yang menunjukkan lebih menurun risiko terhadap bencana yaitu dari 114,67 pada tahun 2021 menjadi 78,88 pada tahun 2025. Untuk meminimalisir risiko bencana, dari ketiga komponen pembentuk IRBI dapat diupayakan dengan menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mencapai 0,93 pada tahun 2025 dimana perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.

6. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

6.a. Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Kebumen berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat dari 59,54 pada Tahun 2021 menjadi 87,41 pada Tahun 2025. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bisa meningkat menuju kategori

Memuaskan (90-100). Sementara itu, pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen juga dianggap terus membaik oleh Kementerian PAN-RB dengan terus meningkatnya indeks pelayanan publik Kabupaten Kebumen dari 4,23 pada Tahun 2021 menjadi 4,33 pada Tahun 2025. Indeks ini diukur dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarpras pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

6.b. Masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah yang tercermin dari nilai SAKIP.

Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 65,18 pada Tahun 2021 menjadi 68,92 pada Tahun 2025 atau masuk kategori B/Baik (Nilai > 60–70). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja diantaranya pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

6.c. Masih diperlukan optimalisasi pencegahan korupsi.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas menunjukkan kinerja yang meningkat dari 76,46 pada Tahun 2021 menjadi 78,19 pada Tahun 2023 namun juga turun menjadi 75,96 pada Tahun 2025 dan masuk dalam kategori Waspada. Penurunan terjadi dikarenakan alasan yang sama yaitu adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun.

6.d. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah.

Sementara itu pengeluaran konsumsi pemerintah relatif kecil hanya di kisaran 7-8% setiap tahun yang menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kebumen lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta dan masyarakat. Pengeluaran pemerintah ini terdiri dari pengeluaran semua tingkat pemerintah dari pusat, daerah hingga desa dengan fokus dan lokus program di wilayah Kabupaten Kebumen, diluar belanja modal yang tercacat sebagai PMTB. Persentase pengeluaran pemerintah di wilayah Kabupaten Kebumen yang kecil dapat menunjukkan keterbatasan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran publik (pemerintah). Selain itu dapat diartikan belanja pemerintah tidak cukup signifikan berdampak pada perekonomian daerah jika komponen utama PDRB lainnya (misal konsumsi rumah tangga atau investasi) menurun. Kemampuan daerah dengan lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan daerah perlu terus dioptimalkan. Namun demikian kemampuan APBD sangatlah terbatas. Meskipun tren rasio pajak daerah terhadap PDRB cenderung naik dari 0,38 persen pada Tahun 2021 menjadi 0,54 persen pada Tahun 2025, namun realisasi APBD terlihat masih

rendahnya proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yang juga cenderung menurun hingga mencapai 18,91% pada Tahun 2025 yang menunjukkan masih lemahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini juga menyebabkan kapasitas fiskal yang selama 4 tahun terakhir (2022-2025) masuk kategori rendah.

6.e. Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri.
Dari 449 total desa di Kabupaten Kebumen, hingga tahun 2025 telah mencapai 198 desa yang masuk kategori desa mandiri. Kenaikan yang signifikan jumlah desa dengan status mandiri sejak tahun 2023 dikarenakan semakin intensifnya pendampingan dalam pengisian indikator dan pemutakhiran data kepada desa sehingga dapat meningkatkan nilai dan juga disebabkan oleh meningkatnya pemahaman para kepala desa beserta jajarannya untuk mengisi indikator sesuai dengan keadaan di desanya masing-masing. Motivasi desa juga semakin meningkat karena bagi desa yang dapat mencapai kategori mandiri akan mendapatkan tambahan dana alokasi kinerja. Hal ini menyebabkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen terus meningkat dari 0,22% pada Tahun 2021 menjadi 44,09% pada tahun 2025. Namun demikian, dengan cakupan sebesar 44,09% menunjukkan persentase desa mandiri di Kabupaten Kebumen belum optimal.

6.f. Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.
Akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada Tahun 2024 telah mencakup 89,41% naik menjadi 93,71% pada Tahun 2025. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.

7. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban.
Hal ini tercermin dari cukup tingginya angka kriminalitas dan aksi unjuk rasa. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2021-2025 secara umum mengalami tren penurunan. Namun pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2025 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Selain itu juga terdapat tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi

dan diselesaikan secara penuh sebesar 100%, namun demikian pada tahun 2025 terjadi penurunan signifikan pelanggaran K3 kasus dan pelanggaran terhadap penerapan peraturan daerah menjadi 8.037 kasus dan pelanggan terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 8.137 kasus. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik SARA yang terjadi di wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2021-2025, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

8. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.

Permasalahan ini didukung oleh beberapa akar permasalahan sebagai berikut:

8.a. Masih rendahnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

Hal ini tercermin dari kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 3,60% pada Tahun 2021 menjadi 22,89% pada Tahun 2025 dimana dengan capaian tersebut masih perlu upaya lebih untuk terus ditingkatkan.

8.b. Belum optimalnya pengunjung tempat bersejarah karena dianggap kurang menarik.

Jumlah pengunjung tempat bersejarah cenderung belum optimal dan belum mampu tumbuh pesat dimana pada Tahun 2021 terdapat 51.150 pengunjung dan pada Tahun 2025 menjadi 53.850 pengunjung. Angka kunjungan ini menunjukkan tempat bersejarah belum menarik wisatawan dimana mereka lebih tertarik mengunjungi daya tarik wisata terbaru yang lebih menarik dan *instagramable* untuk ditampilkan di akun media sosial mereka

8.c. Masih rendahnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian

Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir meningkat dari 11,00% pada tahun 2021 menjadi 21,23% pada tahun 2025. Namun angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan didalam RPJMD yaitu pada tahun 2025 targetnya sebesar 22,63. Diperlukan upaya

yang lebih serius agar kelompok kesenian semakin aktif untuk mengadakan pertunjukan kesenian.

2.4.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan urusan penyelenggaraan pemerintahan disusun mendasari gambaran aspek pelayanan umum serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2.4.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pembangunan di sektor pendidikan memiliki fungsi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, pembangunan di sektor pendidikan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

1) Masih rendahnya tingkat capaian Pendidikan tercermin dari Indeks Pendidikan;
2) Masih rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
3) Belum optimalnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) utamanya pada usia 5-6 tahun dan 16-18 tahun;
4) Belum optimalnya Angka Partisipasi Kasar (APK);
5) Masih terdapat angka putus sekolah baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs;
6) Perlu ditingkatkan standar kompetensi minimum siswa;
7) Belum optimalnya kualifikasi S1/D4 guru PAUD (formal);
8) Masih rendahnya satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau ekskul kesenian; serta
9) Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

b. Kesehatan

Permasalahan di sektor kesehatan di Kabupaten Kebumen yaitu:

1) Masih terjadinya kasus kematian ibu;
2) Cukup tingginya kasus kematian bayi;
3) Masih terdapat kasus prevalensi *stunting*;
4) Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular; serta
5) Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kebumen yaitu:

1) terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati over dimensi dan *over loading* (ODOL)/melebihi kapasitas;
2) kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun;

3) kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian;
4) masih sedikit saluran drainase dalam kondisi baik;
5) masih rendahnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan, begitu juga dengan masih rendahnya akses rumah tangga pedesaan terhadap air minum perpipaan; serta
6) masih rendahnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukiman yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1) Tingginya *backlog*/kebutuhan rumah di Kabupaten Kebumen;
2) Masih adanya rumah tidak layak huni (RTLH);
3) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;
4) Masih adanya rumah terdampak bencana yang belum tertangani; serta;
5) Menurunnya persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah permasalahan yang terkait dengan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

1) Adanya tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen;
2) Belum optimalnya kesiapsiagaan pemadam kebakaran;
3) Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana;
4) Menurunnya relawan penanggulangan bencana; serta
5) Masih kurangnya peralatan *Early Warning System* (EWS).

f. Sosial

Permasalahan sosial di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1) Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak; serta
2) Masih terdapat kesenjangan antara jumlah PPKS yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan cakupan penanganan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah.

2.4.2.2. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga kerja

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1) Masih rendahnya penempatan pencari kerja;
2) Masih rendahnya keterserapan tenaga kerja;
3) Masih rendahnya TPAK Perempuan;
4) Tingginya tingkat pekerja informal; serta
5) Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1) Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan;
2) Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak; serta
3) Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak.

c. Pangan

Permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Kebumen diantaranya:

1) Masih terdapat penduduk di Kabupaten Kebumen yang mengalami masalah pemenuhan gizi;
2) Belum optimalnya ketersediaan pangan; serta
3) Belum seimbangnya kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan.

d. Pertanahan

Berdasarkan nomenklatur yang telah diatur pada Permendagri 90/2021, bidang urusan pertanahan pada pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa tanah garapan. Hal ini tercermin dari kinerja capaian indikator persentase penanganan sengketa lahan yang setiap tahun selalu dapat terealisasi sebesar 100%. Faktor pendorong capaian indikator ini adanya koordinasi yang baik antar instansi Perangkat Daerah serta dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menghindari konflik sosial pertanahan dengan memfasilitasi penyelesaian pertanahan.

e. Lingkungan hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaanya, ditemukan permasalahan meliputi:

3. Menurunnya Indeks Kualitas L gkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH);

1) Menurunnya kemampuan penanganan sampah;
2) Belum optimalnya pengurangan sampah melalui 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*);
3) Belum optimalnya pengolahan timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah; serta
4) Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca).

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Administrasi kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi pelayanan publik yang professional. Arah administrasi kependudukan antara lain untuk meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan dan mendukung pembangunan sistem

administrasi kependudukan. Beberapa permasalahan administrasi kependudukan diantaranya:

1) Masih rendahnya penggunaan identitas kependudukan digital (KTP digital);
2) Belum optimalnya cakupan perekaman KTP elektronik;
3) Belum optimalnya cakupan Akte Kelahiran; serta
4) Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

g. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Beberapa permasalahan terkait pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

1) Menurunnya jumlah desa berstatus swasembada;
2) Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri; serta
3) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas sarana prasarana fisik hasil kerjasama.

h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana diantaranya:

1) Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.

i. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan di antaranya:

1) Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen;
2) Meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas;
3) Masih belum optimalnya pengoperasian terminal; serta
4) Semakin menurunnya jumlah angkutan umum dan izin trayek.

j. Komunikasi dan informatika

Beberapa permasalahan terkait komunikasi dan infomatika diantaranya:

1) belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana teknologi informasi (server, sarpras jaringan dan sarpras penyiaran);
2) belum terpenuhi jumlah SDM bidang IT di Diskominfo dan kurang kompetensi SDM bidang IT di beberapa Perangkat daerah; serta
3) Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

k. Koperasi, usaha kecil dan menengah

Pemberdayaan dan peningkatan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan serta memperkuat struktur perekonomian nasional dan daerah, menggerakkan aktivitas ekonomi sektor riil, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor Koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

1) Masih rendahnya tingkat kewirausahaan; serta
2) Belum optimalnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen.

l. Penanaman modal

Penanaman modal diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan penanaman modal, yaitu:

1) Menurunnya kinerja investasi karena menurunnya penanaman modal dalam negeri yang masih mendominasi investasi di Kabupaten Kebumen; serta
2) Masih rendahnya tingkat investasi penanaman modal asing.

m. Kepemudaan dan olahraga

Berikut adalah permasalahan terkait dengan kepemudaan dan olahraga:

1) Masih rendahnya kreativitas dan kewirausahaan pemuda dapat dilihat dari tingkat wirausaha muda yang masih rendah;
2) Masih minimnya jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga;
3) Masih terbatasnya pembibitan atlet;
4) Belum optimalnya akses dan partisipasi pemuda dalam pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

n. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik daerah yang baik dapat menjadi pendukung perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Meski demikian masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya:

1) terbatasnya SDM pengelola dan penganalisis data tersertifikasi; serta
2) terdapat beberapa data penting yang tidak diterbitkan atau tidak ditebitkan setiap tahun oleh BPS untuk level kabupaten/kota seperti inflasi dan indeks gini, sub data/detail data agregat (seperti sub-sub sektor PDRB), serta data pada level hingga kecamatan atau desa.

o. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang cukup baik, yang ditandai dengan telah diimplementasikannya tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah. Meskipun demikian, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1) Belum optimalnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah;
2) Belum seluruh desa/kelurahan menerapkan tanda tangan elektronik;
3) Belum optimalnya penguatan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan kesadaran keamanan informasi, serta penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan standar yang berlaku;
4) Masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pada urusan persandian dan keamanan informasi.

p. Kebudayaan

Beberapa permasalahan terkait urusan kebudayaan di antaranya:

1) Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; serta
2) Belum optimalnya jumlah kunjungan ke tempat bersejarah.

q. Perpustakaan

Beberapa permasalahan perpustakaan yang dihadapi diantaranya:

1) Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan; serta
2) Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat.

r. Kearsipan

Permasalahan pada urusan kearsipan yaitu masih belum optimalnya jumlah desa/kelurahan, sekolah, lembaga masyarakat dan OPD yang telah menerapkan Arsip Secara Baku.

2.4.2.3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan urusan perikanan dan kelautan di antara yaitu:

1) Menurunnya volume produksi perikanan tangkap;
2) Menurunnya cakupan bina nelayan;
3) Masih rendahnya angka konsumsi ikan; serta
4) Menurunnya volume produksi garam.

b. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

1) Menurunnya kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB; serta
2) Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya.

c. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi prioritas pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral. Namun demikian pemanfaatan potensi EBT belum optimal karena terkendala investasi, inovasi dan teknologi.

d. Perdagangan

Nilai sektor perdagangan konsisten menjadi salah satu yang memiliki kontribusi cukup besar pada pendapatan daerah. Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat

sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

1) Masih rendahnya daya saing perdagangan menurut perhitungan PDRB komponen pengeluaran;
2) Disparitas harga masih jauh dari 0% yaitu –9% yang dapat mengindikasikan hasil pertanian yang belum tersalurkan optimal, sehingga menekan dapat produksi; serta
3) Masih terdapat pasar tradisional dalam kondisi kurang baik.

e. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah *(value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam kurun 5 tahun terakhir kontribusi sektor industri pengolahan mencapai lebih dari 20% terhadap PDRB. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1) Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah; serta
2) Masih sedikitnya industri besar.

f. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dari Pusat dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran. Kemudian permasalahan lainnya yang terjadi di Kabupaten Kebumen sebagaimana berikut:

1) Terbatasnya Kuota Transmigrasi dari Pemerintah Pusat untuk Calon transmigrasi Kabupaten.
2) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan pusat dalam penyelenggaraan transmigrasi
3) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran

g. Pariwisata

Pengembangan pariwisata menjadi sangat penting bagi Kabupaten Kebumen dikarenakan selain memiliki sumber daya alam dan budaya yang potensial dalam pengembangan pariwisata, juga dikarenakan *Geopark* Kebumen telah disahkan sebaga UNESCO *Global Geopark* pada Tahun 2025. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada urusan pariwisata di antaranya sebagai berikut:

1) Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan;

2) Belum adanya paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen; serta
3) Belum optimalnya tingkat hunian akomodasi.

2.4.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada fungsi sekretariat daerah Kabupaten Kebumen antara lain:

1) Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
2) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan manajemen kinerja;
3) Perlu terus ditingkatkan kualitas pelayanan publik oleh masing-masing perangkat daerah; serta
4) Perlu dioptimalkan profitabilitas BUMD.

b. Sekretariat DPRD

Beberapa permasalahan yang ada pada fungsi Sekretariat DPRD antara lain:

1) Optimalisasi pengesahan Perda tepat waktu; serta
2) Optimalisasi Perda Inisiatif dibandingkan dengan Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

c. Perencanaan

Permasalahan yang terkait dengan perencanaan antara lain:

1) Belum optimalnya capaian nilai perencanaan dalam SAKIP;
2) Belum optimalnya pencapaian kinerja IKU khususnya IKU dengan tingkat capaian terendah;
3) Masih lemahnya pengelolaan data yang memperlemah analisis dan perumusan kebijakan;
4) Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pengendalian perencanaan daerah sehingga belum mampu memberikan masukan secara optimal;
5) Belum optimalnya inovasi daerah yang mendukung perumusan perencanaan dan kebijakan daerah;
6) Sangat dinamisnya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat yang menuntut kecepatan dan ketepatan perencanaan pembangunan yang dinamis; serta
7) Belum optimalnya kualitas dan kapabilitas SDM perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

d. Keuangan

Permasalahan yang terkait dengan keuangan antara lain:

1) Masih rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB;
2) Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah;
3) Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah; serta
4) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

e. Kepegawaian

Urusan kepegawaian memiliki tugas memastikan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan kepuasan pegawai, dan

terwujudnya budaya kerja yang berdasarkan pada prestasi dan integritas. Hal ini ditunjukkan dengan sistem merit dimana indeks sistem merit Kabupaten Kebumen terus membaik dari sebelumnya hanya 144,5 (kategori Kurang) kemudian dapat meningkat hingga mencapai 253,5 (kategori Baik) pada Tahun 2024, dengan angka capaian Tahun 2025 menggunakan capaian Tahun 2024. Namun demikian perlu pengoptimalan penerapan sistem merit agar bisa mencapai kategori Sangat Baik dengan nilai minimal 325 yaitu dengan penerapan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

f. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam upaya peningkatan kapasitas ASN dapat dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan teknis, fungsional maupun diklat jenjang kepemimpinan guna meningkatkan profesionalitas ASN terus ditingkatkan. Namun demikian keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama sehingga hanya jenis diklat tertentu yang diprioritaskan seperti diklat kepemimpinan dalam rangka mengisi jabatan struktural tertentu, prajabatan untuk CPNS (jika terdapat formasi CPNS di tahun tersebut) serta orientasi P3K. Sementara itu untuk meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan pembelajaran *online* melalui aplikasi SINAU KEBUMEN. Hal ini dalam rangka mendukung Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang diantaranya menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) dalam 1 tahun.

g. Penelitian dan Pengembangan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan yaitu:

1) Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah;
2) Perlu ditingkatkan produktivitas yang berdaya saing; serta
3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan.

h. Pengawasan

Masalah yang terkait dengan unsur pengawasan pemerintahan antara lain:

1) Diperlukannya optimalisasi pengendalian dan pengawasan intern pemerintah; serta
2) Diperlukannya optimalisasi pencegahan korupsi.

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Beberapa permasalahan yang terkait kesatuan bangsa dan politik antara lain:

1) Masih terjadi kejadian konflik SARA;
2) Belum optimalnya partisipasi warga dalam Pemilu; serta
3) Meningkatnya demonstrasi terutama di tahun politik.

j. Kewilayahan

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait unsur kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) adalah belum optimalnya pelayanan publik yang diukur dari tingkat kepuasan masyarakat.

2.4.3. Isu Strategis

Mendasari permasalahan pembangunan daerah yang telah dirumuskan di atas maka dapat diperoleh isu strategis daerah pada Tahun 2027 yang juga telah sinkron dengan Misi Daerah pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.217.
Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Tahun 2027 dengan Misi Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029

PERMASALAHAN DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	MISI DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029
a. Masih tingginya tingkat kemiskinan;	a. Penanggulangan kemiskinan;	Misi 1: Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Adil dan Inklusif
b. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	
c. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	c. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	Misi 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah
d. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	d. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	Misi 3: Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan
e. Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan;	e. Peningkatan pembangunan kawasan lingkungan;	
f. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	f. Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, *Ngopeni, Ngayomi,* dan *Ngayemi*
g. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban;	g. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;	Misi 5: Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub Rukun atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal
h. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.	h. Peningkatan pemajuan kebudayaan.	

a. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan menjadi masalah mendasar sekaligus isu penting bagi Kabupaten Kebumen karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus menunjukkan hasil yang membaik. Tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan dari 17,83% pada tahun 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan pemulihan perekonomian daerah, tingkat kemiskinan kembali menurun secara konsisten hingga mencapai 13,58% pada tahun 2025. Kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dimana Kabupaten Kebumen berhasil menggeser posisinya dari status

kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah menjadi peringkat kedua dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 2,13%. Pada tahun 2025, capaian kinerja penurunan tingkat kemiskinan telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Di sisi lain, peningkatan garis kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Kenaikan garis kemiskinan; yang belum diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat
2. Masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat disebabkan oleh:
   a. Masih rendahnya PDRB perkapita sebagai proksi masih rendahnya pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Kebumen;
   b. Masih rendahnya pengeluaran perkapita sebagai proksi masih rendahnya daya beli masyarakat Kebumen; serta
   c. Pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Kebumen masih didominasi pada pengeluaran untuk makanan dibandingkan untuk non makanan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
3. Terdapat permasalahan pada ketenagakerjaan yaitu:
   a. Masih rendahnya penempatan pencari kerja serta keterserapan tenaga kerja;
   b. Tingginya tingkat pekerja informal;
   c. Belum optimalnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; serta
   d. Masih rendahnya TPAK Perempuan;
4. Masih terdapat masalah sosial yaitu:
   a. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah PPKS yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial dengan cakupan penanganan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah; serta
   b. Masih minimnya penyediaan fasilitas khusus untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, perempuan, dan anak.
5. Masih rendahnya tingkat infrastruktur dasar masyarakat, diantaranya yaitu:
   a. Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan masih perlu ditingkatkan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan;
   b. Akses rumah tangga terhadap sanitasi aman masih perlu ditingkatkan;
   c. *Backlog* perumahan di Kabupaten Kebumen masih perlu ditangani;
   d. Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) masih memerlukan penanganan;
   e. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak masih belum optimal; serta
   f. Penanganan kawasan kumuh belum sepenuhnya tuntas.

b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Kinerja IPM Kabupaten Kebumen selama Tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana sejak tahun 2021 telah mencapai lebih dari 70, yaitu sebesar 70,56, menjadi 73,17 pada Tahun 2025. Berdasarkan skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi (IPM≥80), kategori tinggi (70 ≤ IPM < 80), kategori sedang (60≤ IPM < 70), dan kategori rendah (IPM < 60). Dengan demikian sejak Tahun 2021, kualitas pembangunan manusia Kabupaten Kebumen telah dianggap masuk kategori tinggi. Realisasi kinerja IPM setiap tahun juga telah melebih target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Namun demikian kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan mengingat semakin meningkat pula daya saing sumber daya manusia di era globalisasi seperti saat ini. Selain itu, mendasari perumusan permasalahan perlu diperhatikan berbagai hal berikut dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yaitu:

c. Masih terdapat permasalahan gizi dan pangan di masyarakat yaitu:
   1) Masih terdapat kasus *stunting;*
   2) Masih terdapat penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan;
   3) Belum seimbangnya kualitas konsumsi pangan ditunjukkan pada skor PPH yang masih di bawah standar pada beberapa kelompok pangan;
   4) Masih rendahnya angka konsumsi ikan; serta
   5) Masih rendahnya ketersediaan pangan.
d. Masih terdapat berbagai isu kesehatan diantaranya yaitu:
   1) Masih tingginya Angka Kematian Bayi;
   2) Belum optimalnya eliminasi tuberkulosis.
e. Masih rendahnya tingkat capaian Pendidikan diantaranya dikarenakan oleh:
   1) Masih lemahnya kinerja Rata-rata Lama Sekolah;
   2) Masih rendahnya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi; serta
   3) Masih rendahnya tingkat pemanfaatan perpustakaan.
f. Terdapat isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga yaitu:
   1) Masih terdapat kesenjangan pemberdayaan gender bagi perempuan;
   2) Masih terdapat kekerasan pada perempuan dan anak;
   3) Masih cukup tinggi angka kasus perkawinan anak;
   4) Belum optimalnya pemenuhan hak anak; serta
   5) Belum optimalnya kualitas keluarga di Kabupaten Kebumen.

c. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah.

Kinerja perekonomian daerah terus membaik pasca Pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan kinerja PDRB ADHK Kabupaten Kebumen terus meningkat dari sebesar Rp. 20.253.059,43 Juta pada Tahun 2021 menjadi Rp. 23.837.831,17 Juta pada Tahun 2025. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kinerja PDRB ADHB Kabupaten Kebumen yang terus

meningkat dari sebesar Rp. 29.563.144,02 Juta pada Tahun 2021 menjadi Rp. 41.520.565,96 Juta pada Tahun 2025. Namun demikian berbagai masalah, tantangan sekaligus potensi perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen diantaranya:

a. Masih rendahnya produktivitas ekonomi daerah dikarenakan oleh:
   1) Belum optimalnya laju pertumbuhan ekonomi;
   2) Masih rendahnya tingkat kewirausahaan;
   3) Masih rendahnya tingkat wirausaha muda;
   4) Masih rendahnya pertumbuhan industri kecil dan menengah serta masih sedikitnya industri besar;
   5) Masih rendahnya volume usaha dan kualitas perkoperasian di Kabupaten Kebumen;
   6) Menurunnya produktivitas tanaman padi dan tanaman pangan utama lokal lainnya;
   7) Menurunnya volume produksi perikanan tangkap; serta
   8) Menurunnya volume produksi garam;
b. Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah diantaranya dikarenakan oleh:
   1) Masih rendahnya daya saing perdagangan Kabupaten Kebumen serta belum terbangunnya ekosistem berorientasi ekspor;
   2) Menurunnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
   3) Kontribusi investasi bagi PDRB masih rendah yang menunjukkan kurangnya pengembangan sektor produktif yang dapat menghasilkan nilai tambah lebih besar serta belum terbangunnya ekosistem investasi hijau;
   4) Masih rendahnya akses keuangan di daerah;
   5) Masih rendahnya kemampuan likuditas perbankan di wilayah Kabupaten Kebumen termasuk perbankan BUMD; serta
   6) Masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah.
c. Perekonomian daerah juga memiliki tantangan sekaligus potensi yang dapat dilihat dari struktur PDRB Kabupaten Kebumen yaitu sebagai berikut:
   1) Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tantangan pengembangan sektor ini ke depan. Adanya perubahan kontribusi sektor utama PDRB sejak tahun 2022 dari sebelumnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan digantikan oleh sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus menurun kontribusinya terhadap PDRB dari 21,88% pada Tahun 2021 menurun menjadi 19,66% pada Tahun 2025 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2021-2025 sebesar 20,39%. Sebaliknya sektor industri pengolahan semakin meningkat kontribusinya terhadap PDRB dari 21,31% pada Tahun 2021 menjadi 22,66% pada Tahun 2025 atau dengan rata-rata kontribusi selama Tahun 2021-2025 sebesar 22,14%;
   2) Potensi semakin menguatnya kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Kebumen.

Menguatnya sektor industri pengolahan dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2021-2025 sebesar 5,71% untuk sektor industri pengolahan. Hal ini cukup jauh lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama Tahun 2021-2025 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 2,61%;

3) Potensi semakin meningkatnya kontribusi subsektor industri makanan dan minuman yang didominasi oleh UMKM.
   Subsektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB adalah industri makanan dan minuman dari 13,56% pada Tahun 2021 menjadi 15,75% pada Tahun 2025 atau kontribusi rata-rata selama Tahun 2021-2025 sebesar 14,79%. Selain itu, subsektor industri makanan dan minuman selama Tahun 2021-2025 mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi sebesar 7,73% dibandingkan subsektor lain di industri pengolahan. Industri makanan dan minuman adalah subsektor produksi dan pengolahan makanan dan minuman dimana di Kabupaten Kebumen pada umumnya didominasi oleh IKM. Hal ini sangat didorong oleh pertumbuhan IKM makanan dan minuman yang juga mendominasi sektor IKM di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen juga terus mendorong pengembangan IKM (termasuk IKM makanan dan minuman) sebagai bagian pemberdayaan UMKM;
4) Potensi pengembangan sektor perdagangan sebagai sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB Kabupaten Kebumen utamanya pada sub sektor perdagangan besar dan eceran.
   Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga yang berkontribusi bagi PDRB dengan rata-rata kontribusi sebesar 14,65% selama Tahun 2021-2025. Berdasarkan data, menunjukkan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi lebih dari dua kali lipat dibandingkan subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya. Hal ini didorong dari meningkatnya aktivitas ekonomi baik di pasar tradisional, pedagang besar hingga eceran maupun toko ritel modern utamanya yang menjual barang kebutuhan pokok hingga sandang;
5) Potensi pengembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum utamanya pada subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering, dsb).
   Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2021-2025 yaitu sebesar 14,50%. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah sektor yang menyangkut layanan yang menyediakan tempat tinggal sementara (hotel, penginapan) dan makanan/minuman untuk konsumen (restoran, tempat makan, katering). Berdasarkan data pertumbuhan sektor ini sangat didorong oleh pertumbuhan subsektor penyediaan makan-minum (restoran, tempat makan, katering) yang mencapai rata-rata

selama Tahun 2021-2025 sebesar 14,74% dibandingkan subsektor penyediaan akomodasi (hotel, penginapan) yang juga tumbuh selama Tahun 2021-2025 sebesar 7,12%. Hal ini didorong oleh menjamurnya tempat makan dari restoran hingga warung sederhana di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Kebumen termasuk pengembangan kawasan kuliner di alun-alun dan kawasan koridor kota Kebumen; serta

6) Potensi pengembangan transportasi dan pergudangan karena wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah.

   Sektor transportasi dan pergudangan mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2021-2025 yaitu sebesar 16,04% yang menunjukkan semakin berkembangnya sektor tersebut di wilayah Kebumen yang memiliki posisi strategis di wilayah selatan Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen dilalui dan dekat dengan akses transportasi nasional bahkan inetrnasional yaitu, jalan nasional, jalur kereta termasuk terdapat beberapa stasiun kereta api, dekat dengan *Yogyakarta International Airport* dan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Dengan kemudahan konektivitas ini memudahkan angkutan barang maupun orang dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa, Indonesia bahkan secara internasional. Dari data menunjukkan angkutan rel mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi selama Tahun 2021-2025 yaitu sebesar 20,90%. Hal ini dikarenakan semakin populer dan mudahnya akses langsung kereta api dari dan ke Kabupaten Kebumen dengan berbagai wilayah di Pulau Jawa termasuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Solo, Semarang, Yogyakarta, Malang hingga Surabaya. Arus barang (termasuk jasa ekspedisi) dan orang yang memanfaatkan sarana transportasi kereta api terus meningkat serta ditunjang dengan banyaknya stasiun kereta api yang terlayani oleh KAI, tidak hanya stasiun utama seperti Kebumen dan Gombong, tetapi juga stasiun lain seperti Prembun, Kutowwinangun dan Karanganyar.

d. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.

Pemantapan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah menjadi hal yang penting untuk mendukung upaya peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan indeks infrastruktur daerah menurun dari 64,59% pada Tahun 2021 menjadi 38,89% pada tahun 2025. Yang dalam hal ini ditunjang oleh tiga komponen yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang turun menjadi 50,02% pada Tahun 2025. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman menunjukkan turun tajam dari

54,50% pada Tahun 2021 menjadi 2,99% pada Tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan mengalami penurunan dari 82,72% pada Tahun 2021 menjadi 76,78% pada Tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Namun demikian dengan kinerja sampai dengan Tahun 2025 baru mencapai 86,03% menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infarstruktur daerah. Untuk itu beberapa hal perlu diperhatikan dalam pengembangan infarstruktur daerah diantaranya:

a. Terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap;
b. Kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun kondisi sedang terus menurun;
c. Belum optimalnya cakupan kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten di Kebumen;
d. Belum optimalnya kelancaran lalu lintas dan perhubungan; serta
e. Kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.
f. Belum optimalnya konektivitas dan integrasi ekonomi antara Kabupaten Kebumen dan Purworejo sebagai penggerak utama WP Keburejo.

e. Peningkatan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dari 64,43 pada Tahun 2021 menjadi 75,31 pada Tahun 2025 sehingga masih masuk pada kategori sedang. Hal ini dikarenakan fluktutifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga Tahun 2025 IKA pada posisi 75,53 atau masuk kategori baik, sementara IKU pada posisi 81,49 atau masuk kategori sangat baik dan IKTL pada posisi 63,50 atau masuk kategori sedang. IKA cukup baik tetapi masih belum optimal pada pengelolaan limbah rumah tangga termasuk deterjen dan sampah organik, penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi dan pencemaran air tanah dan sungai serta semakin banyaknya pengambilan air tanah. IKTL juga masih rendah dikarenakan pembangunan kota, permukiman, sarana perekonomian, jalan dan infrastruktur lainnya mengurangi luas lahan hijau, penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan tanah tandus dan tidak produktif hingga perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat merusak vegetasi alami.

Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan dalam beberapa hal berikut yaitu:

a. Fluktuatifnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terutama dikarenakan masih rendahnya Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTLH);
b. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
c. Belum optimalnya penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca); serta

d. Terjadinya peningkatan risiko terhadap bencana.

f. Pengoptimalan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi. Delapan area perubahan dalam IRB yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) pelayanan publik. Hal ini cukup berdampak pada pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang terus meningkat dari 59,54 pada Tahun 2021 menjadi 87,41 pada Tahun 2025. Dengan meningkatnya IRB, diharapkan perwujudan demokrasi substansial atas asas kesetaraan dan kualitas kebijakan yang dihasilkan akan semakin membaik. Untuk itu upaya peningkatan implementasi IRB perlu terus dilakukan agar indeks IRB bisa meningkat menuju kategori Memuaskan (90-100). Efisisensi, efektivitas, dan akuntablitas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus terus dioptimalkan untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masih diperlukan peningkatan upaya implementasi Reformasi Birokrasi;
b. Masih belum optimalnya kinerja instansi pemerintah yang tercermin dari nilai SAKIP;
c. Masih diperlukan optimalisasi pencegahan korupsi;
d. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah;
e. Masih rendahnya jumlah desa yang telah berstatus mandiri; serta
f. Belum optimalnya kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat umum.

g. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Penciptaan wilayah yang aman, tertib dan kondusif perlu terus dioptimalkan, namun demikian terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Hal ini tercermin dari cukup tingginya angka kriminalitas dan aksi unjuk rasa. Berdasarkan data jumlah tindak kriminalitas yang tercatat di Kabupaten Kebumen, selama kurun waktu tahun 2021-2025 secara umum mengalami tren penurunan. Namun, pada tahun 2024 beberapa tindak kriminalitas mengalami kenaikan kekerasan seksual dan pemalsuan uang. Sementara itu, jumlah aksi unjuk rasa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2025 masih tergolong cukup tinggi bahkan mengalami peningkatan di tahun 2024 yang merupakan tahun poltik. Demonstrasi atau unjuk rasa yang terjadi sebagian besar pada bidang politik. Selain itu juga terdapat tren peningkatan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan pelanggaran terhadap penerapan Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Kebumen. Walaupun kedua pelanggaran tersebut dapat diatasi dan diselesaikan secara penuh serratus persen. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan

signifikan pelanggaran K3 dan pelanggaran terhadap penerapan peraturan daerah menjadi 8.037 kasus dan pelanggan terhadap penerapan Peraturan Daerah sebanyak 8.137 kasus. Selain itu juga diperlukan peningkatan kewaspadaan serta peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Hal ini dapat tercermin dari kejadian konflik SARA yang terjadi di wilayah. Kejadian konflik SARA adalah banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan. Sepanjang tahun 2021-2025, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak sekali kejadian konflik SARA pada Tahun 2021, 2023 dan 2024. Walaupun selalu dapat tertangani, optimalisasi pengawasan dini perlu dioptimalkan dengan memantau hubungan antar kelompok masyarakat yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan.

h. Peningkatan pemajuan kebudayaan.

Peningkatan pemajuan kebudayaan perlu terus dioptimalkan untuk memupuk jatidiri masyarakat sekaligus menciptakan ekspresi budaya yang mendukung pengembangan *Geopark* Kebumen, untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Belum optimalnya upaya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda; serta
b. Belum optimalnya angka kunjungan tempat bersejarah karena dianggap kurang menarik; serta
c. Belum optimalnya kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global, nasional, dan regional yang berkembang hingga tahun 2025, serta proyeksi dan tantangan yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2026 dan 2027. Perumusan kebijakan ini juga memperhatikan kesinambungan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang daerah, arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta kondisi struktural perekonomian Kabupaten Kebumen.

Secara umum, perekonomian global dan nasional masih berada dalam fase pemulihan yang rapuh dengan tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menuntut kebijakan ekonomi daerah yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan basis ekonomi lokal guna menjaga stabilitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1. Dinamika Ekonomi Global hingga Tahun 2025

Ketidakpastian perekonomian global masih berlanjut hingga tahun 2025 dan bahkan menunjukkan kecenderungan semakin kompleks. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan siklikal yang saling berinteraksi, baik dari sisi geopolitik, geoekonomi, teknologi, maupun lingkungan, yang secara kumulatif memberikan tekanan terhadap stabilitas dan prospek pertumbuhan ekonomi global. Beberapa faktor utama yang memengaruhi dinamika ekonomi global tahun 2025 antara lain:

1. Ketegangan Geopolitik yang Berkelanjutan dan Meluas
   Ketegangan geopolitik masih terjadi dan belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi yang signifikan, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, Ukraina–Eropa Timur, serta meningkatnya rivalitas geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan Asia Timur. Konflik-konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik dan keamanan global, tetapi juga memicu gangguan pasokan energi dan pangan, meningkatkan risiko inflasi global, serta menurunkan kepercayaan pasar dan investasi lintas negara.
2. Fragmentasi Ekonomi Global dan Penguatan Proteksionisme Perdagangan
   Tahun 2025 ditandai dengan semakin menguatnya fragmentasi ekonomi global (*global economic fragmentation*), ditunjukkan oleh berlanjutnya kebijakan proteksionisme, perang tarif, serta penerapan sanksi ekonomi dan hambatan non-tarif antarnegara. Kebijakan tarif resiprokal dan

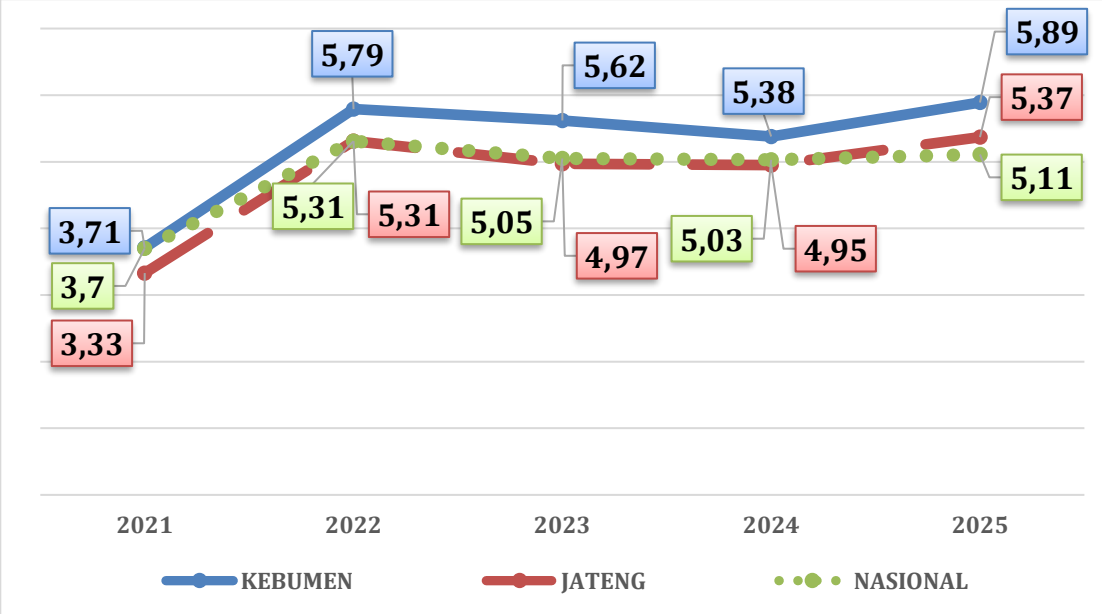
pembatasan perdagangan strategis oleh negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat dan mitra-mitranya, terhadap berbagai negara berkembang, memberikan tekanan terhadap kinerja perdagangan internasional, rantai pasok global, serta memperlambat pemulihan ekonomi dunia secara merata.

3. Eskalasi Persaingan Industri dan Teknologi (*Tech Cold War*)
   Persaingan global di bidang teknologi strategis semakin intensif pada tahun 2025, khususnya pada sektor teknologi digital, semikonduktor, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), energi terbarukan, dan teknologi pertahanan. Pembatasan ekspor teknologi, larangan transfer pengetahuan, serta pembentukan blok-blok teknologi semakin memperkuat fenomena *tech cold war*. Kondisi ini mendorong biaya produksi yang lebih tinggi, memperlebar kesenjangan teknologi antarnegara, serta meningkatkan risiko disrupsi pada industri manufaktur dan sektor ekonomi berbasis teknologi.
4. Peningkatan Risiko dan Dampak Perubahan Iklim serta Bencana Alam
   Ancaman perubahan iklim dan pemanasan global semakin nyata pada tahun 2025, tercermin dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai ekstrem, kebakaran hutan, dan tanah longsor di berbagai belahan dunia. Dampak bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga mengganggu ketahanan pangan global, menurunkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan energi, serta meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi, khususnya di negara berkembang.
5. Disrupsi Rantai Pasok, Volatilitas Pasar, dan Pengetatan Kebijakan Keuangan Global
   Kombinasi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, persaingan teknologi, serta risiko iklim menyebabkan berlanjutnya disrupsi rantai pasok global. Kondisi ini memicu volatilitas harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, ketidakstabilan pasar keuangan, serta tekanan pada pasar tenaga kerja yang ditandai dengan meningkatnya risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah negara.
   Di sisi lain, respons bank sentral global terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi masih ditandai dengan kebijakan moneter yang relatif ketat, mempertahankan suku bunga pada level tinggi lebih lama. Kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pembiayaan dan beban pembayaran utang, menurunkan ruang fiskal pemerintah, serta memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global dan nasional.

3.1.2. Dinamika dan Kinerja Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2025

Ketidakpastian global masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi kinerja perekonomian nasional dan daerah hingga tahun 2025. Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Eropa Timur, fragmentasi geoekonomi global, perlambatan perdagangan dunia, serta meningkatnya proteksionisme dan persaingan teknologi industri strategis terus memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi global. Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, dampak perubahan iklim, serta risiko pemanasan global yang berdampak langsung terhadap sektor pangan, energi, dan logistik. Dinamika global tersebut berimplikasi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025.

Pasca pandemi Covid-19, perekonomian global dan nasional sempat mengalami tekanan inflasi tinggi pada tahun 2022 yang menjadi fenomena lintas negara. Memasuki periode 2023–2025, tekanan inflasi cenderung mereda, namun diikuti oleh fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat melemahnya permintaan global dan penyesuaian daya beli masyarakat. Kondisi tersebut tercermin pada dinamika pertumbuhan ekonomi, struktur lapangan usaha dan komponen PDB/PDRB, inflasi, serta kinerja ketenagakerjaan selama periode 2023–2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Gambar 3.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021-2025
(dalam persen)

Secara agregat, perekonomian nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen tetap menunjukkan pertumbuhan positif hingga tahun 2025. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami moderasi dibandingkan periode pemulihan awal pasca pandemi. Pertumbuhan ekonomi nasional masih mampu dijaga pada kisaran di atas 5 persen, namun menunjukkan kecenderungan melandai seiring menurunnya permintaan eksternal dan normalisasi kebijakan fiskal dan moneter. Jawa Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat yang ditopang oleh kontribusi industri pengolahan seiring menguatnya peranan kawasan industri di Jawa Tengah.

Sementara itu, Kabupaten Kebumen masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kinerja tersebut didorong oleh peran sektor industri pengolahan skala kecil dan menengah, perdagangan, pertanian, serta konsumsi domestik. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen belum optimal karena terbatasnya ekspansi investasi baru, tekanan biaya produksi, serta melemahnya daya beli masyarakat.

Dari sisi struktur ekonomi, sektor industri pengolahan tetap menjadi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar bagi perekonomian nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025. Pada tingkat nasional, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih berada di kisaran 18–19 persen, dengan laju pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi agregat. Kondisi ini menunjukkan indikasi berlanjutnya fenomena deindustrialisasi prematur, ditandai dengan melambatnya pertumbuhan sektor manufaktur dibandingkan sektor jasa.

Di Provinsi Jawa Tengah, sektor industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB. Namun demikian, pertumbuhan sektor ini masih berada pada kisaran moderat dan cenderung sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi agregat Jawa Tengah, mengindikasikan terbatasnya penguatan nilai tambah dan inovasi industri. Fenomena deindustrialisasi relatif juga mulai terlihat, terutama pada industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya dan persaingan regional.

Di Kabupaten Kebumen, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 20 persen terhadap PDRB dan masih menunjukkan kinerja pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan nasional dan Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan peran penting industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dan UMKM. Namun demikian, hingga tahun 2025 juga mulai terlihat kecenderungan perlambatan pertumbuhan sektor

industri pengolahan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata daerah, mengindikasikan perlunya penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi produk industri daerah.

Dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Kebumen hingga tahun 2025 masih sangat didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Pada tingkat nasional, konsumsi rumah tangga berkontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB dan tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, laju pertumbuhannya cenderung moderat seiring dengan tekanan daya beli dan kehati-hatian rumah tangga dalam membelanjakan pendapatan. Di Provinsi Jawa Tengah, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDRB dengan tingkat pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan nasional, namun menunjukkan kecenderungan melambat. Hal ini mencerminkan meningkatnya tekanan biaya hidup dan keterbatasan peningkatan pendapatan riil masyarakat. Sementara itu, di Kabupaten Kebumen, konsumsi rumah tangga menjadi komponen dominan dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap PDRB. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif masih terjaga, namun menunjukkan perlambatan yang lebih nyata, mencerminkan tingginya sensitivitas perekonomian daerah terhadap fluktuasi harga dan pendapatan masyarakat.

Perkembangan konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh dinamika inflasi yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rilis resmi BPS, inflasi nasional pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan secara tahunan dan terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Tekanan harga terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang menunjukkan peningkatan relatif lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan utilitas, kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, serta penyediaan makanan dan minuman. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks harga, sehingga memberikan kontribusi penahan terhadap laju inflasi secara keseluruhan.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, inflasi pada tahun 2025 menunjukkan pola yang sejalan dengan nasional dan terjadi secara relatif merata pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama pada kelompok kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan utilitas, kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, serta penyediaan

makanan dan minuman, yang mencerminkan adanya tekanan permintaan dan biaya pada berbagai sektor perekonomian. Di sisi lain, penurunan indeks harga pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan efisiensi layanan masih mampu menahan tekanan inflasi secara parsial. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa inflasi masih bersifat cukup luas (*broad-based*), sehingga pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan rantai pasok, serta peningkatan efisiensi distribusi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk Kabupaten Kebumen, mengingat inflasi tidak dihitung secara langsung oleh BPS, maka digunakan proksi inflasi daerah terdekat serta indeks harga implisit PDRB sebagai indikator dinamika harga. Berdasarkan indikator tersebut, tekanan inflasi pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan pola inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tekanan harga terutama berasal dari kelompok kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selain itu, kenaikan harga juga terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki, perumahan dan utilitas, kesehatan, transportasi, pendidikan, rekreasi, serta penyediaan makanan dan minuman, yang menunjukkan bahwa tekanan inflasi bersifat cukup luas di berbagai sektor konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan harga secara tahunan, yang mencerminkan adanya efisiensi layanan dan perkembangan teknologi yang masih mampu menahan laju inflasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama perekonomian daerah tidak hanya terletak pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada penguatan daya beli dan peningkatan pendapatan riil masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perkembangan konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh dinamika inflasi yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat. Berdasarkan rilis resmi BPS, inflasi nasional pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan secara tahunan dan terjadi pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Tekanan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, perumahan dan energi, transportasi, serta berbagai jenis jasa konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa inflasi tahun 2025 lebih mencerminkan tekanan biaya hidup dibandingkan peningkatan permintaan, sehingga berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, inflasi pada tahun 2025 menunjukkan pola yang sejalan dengan nasional dan terjadi secara relatif merata pada hampir seluruh kelompok pengeluaran. Kenaikan harga terutama terjadi

pada kelompok makanan dan minuman, perumahan dan energi, transportasi, serta jasa konsumsi seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan makanan dan minuman. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tekanan inflasi tidak hanya bersifat musiman, tetapi juga mencerminkan meningkatnya biaya hidup masyarakat. Meskipun stabilitas harga secara umum masih terjaga, tekanan inflasi tersebut berpotensi membatasi ruang pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Untuk Kabupaten Kebumen, mengingat inflasi tidak dihitung secara langsung oleh BPS, maka digunakan proksi inflasi daerah terdekat serta indeks harga implisit PDRB sebagai indikator dinamika harga. Berdasarkan indikator tersebut, tekanan inflasi pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan meningkat sejalan dengan pola inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan tekanan harga terutama dipengaruhi oleh kelompok kebutuhan pokok, perumahan dan energi, transportasi, serta jasa konsumsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama perekonomian daerah tidak hanya terletak pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada penguatan daya beli dan peningkatan pendapatan riil masyarakat agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang salah satunya tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hingga tahun 2025, TPT nasional dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren menurun, mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja pasca pandemi. Kabupaten Kebumen juga menunjukkan kecenderungan penurunan TPT yang sejalan dengan nasional dan provinsi. Namun demikian, pada tahun 2027 pengangguran masih menjadi tantangan pembangunan daerah, terutama dalam menghadapi dinamika struktural pasar kerja, ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, serta keterbatasan penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja produktif agar penurunan TPT dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Tabel 3.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen Tahun 2022-2025

Uraian		2022	2023	2024	2025	Rata-rata Tahun 2022-2025	Peningkatan/ Penurunan/ Pelambatan Tahun 2022-2025
Nasional	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	5,05	5,03	5,11	5,13	-0,20
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,89	4,64	4,43	5,30	4,82	-0,07
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	4,94	4,83	4,94	4,98	4,93	0,04
	Inflasi (%)	5,51	2,61	1,57	2,92	3,15	-3,22
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,32	4,91	4,85	5,24	-1,01
Jawa Tengah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,97	4,95	5,37	5,15	0,06
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	3,88	4,32	3,52	4,06	3,95	0,18
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,52	5,68	5,15	4,78	5,28	-0,74
	Inflasi (%)	5,63	2,89	1,67	2,72	3,23	-2,91
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,57	5,13	4,78	4,66	5,04	-0,91
Kebumen	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	5,62	5,38	5,89	5,67	0,1
	Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebagai sektor pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	6,84	6,31	6,10	6,21	6,37	-0,63
	Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai komponen pendorong pertumbuhan ekonomi (%)	5,82	5,97	5,59	5,64	5,76	-0,18
	Inflasi *Sister City* Purwokerto (%)	6,49	2,61	1,51	2,61	3,31	-3,88
	Laju Indeks Harga Implisit PDRB atau PDRB deflator sebagai proksi inflasi	4,28	3,87	2,45	1,50	3,03	-2,78
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,92	5,11	5,07	4,95	5,26	-0,97

Sumber : BPS (data diolah), 2026

3.1.3. Tantangan Perekonomian pada Tahun 2026 dan 2027

Pertumbuhan ekonomi global pada periode 2026–2027 diperkirakan masih berada dalam kondisi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Proses pemulihan pasca berbagai guncangan global belum sepenuhnya kuat dan merata, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia cenderung moderat dan rentan terhadap perkembangan risiko eksternal. Ketidakstabilan geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta dinamika kebijakan ekonomi global menjadi faktor utama yang membatasi penguatan momentum pemulihan ekonomi dunia. Berbagai tantangan utama diperkirakan akan berlanjut dan berpotensi memengaruhi perekonomian global, nasional, dan daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Konflik geopolitik dan kenaikan harga energi yang merambat ke inflasi
   Ketidakpastian geopolitik, khususnya konflik di kawasan Teluk Persia, berpotensi mengganggu pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Meskipun porsi impor migas Indonesia dari kawasan tersebut relatif terbatas, peningkatan harga energi diperkirakan tetap berdampak pada kenaikan inflasi, terutama melalui meningkatnya biaya transportasi, logistik, dan produksi. Di sisi lain, kenaikan harga amoniak sebagai bahan baku pupuk berpotensi meningkatkan inflasi pangan, mengingat Indonesia masih bergantung pada impor dari kawasan tersebut. Apabila konflik meluas dan mengganggu jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz dan Laut Merah, biaya distribusi global diperkirakan semakin meningkat akibat pengalihan rute logistik. Kondisi ini dapat menambah beban subsidi energi, meningkatkan biaya usaha, serta menekan daya beli masyarakat apabila berlangsung dalam jangka panjang.
2. Fragmentasi perdagangan dan perang dagang serta dampak kesepakatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia
   Ketegangan dagang antarnegara besar (seperti AS vs Cina dan AS vs Uni Eropa) menimbulkan ketidakstabilan perdagangan global dengan risiko yaitu meningkatnya tarif perdagangan internasional, syok pada rantai pasok hingga kemungkinan penundaan investasi dimana investor akan lebih memilih untuk berinvestasi di *safe haven* seperti emas. Bagi Indonesia hal ini dapat berakibat pada meningkatnya hambatan ekspor dan menurunnya investasi asing serta berdampak pada melambatnya peluang investasi di daerah. Selain itu kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat juga dikhawatirkan dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang "inferior", bukan timbal-balik yang setara. Isu utama kesepakatan perdagangan tersebut bukan sekedar pada persoalan tarif dan perdagangan barang, akan tetapi lebih luas lagi mencakup pada sektor jasa terutama terkait akses terhadap data digital. Kesepakatan perdagangan tersebut juga dapat mengancam sektor pertanian dan kedaulatan pangan dengan dibukanya akses pasar dan kewajiban impor komoditi pertanian dari Amerika Serikat.

3. Perlambatan ekonomi negara besar
   Ekonomi beberapa negara lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia, terutama Cina, terus melambat akibat melemahnya permintaan domestik dan terjadinya krisis properti yang menyebabkan konsumsi dalam negeri Cina menurun. Hal ini dapat berakibat pada turunnya permintaan ekspor komoditas Indonesia, yang masih menjadi tulang punggung kinerja ekspor tanah air, serta juga dapat menurunkan kinerja industri manufaktur utamanya yang berorientasi ekspor sehingga dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).
4. Utang global yang sangat besar
   Sebagian besar negara di dunia, terutama negara-negara maju, saat ini memiliki utang publik dan swasta yang sangat besar melebihi batas maksimal proporsi hutang terhadap PDB yaitu 60 persen, bahkan banyak yang melebihi 100 persen, yang menyebabkan banyak negara harus menahan belanjanya. Hal ini dapat berpengaruh pada defisit APBN Indonesia serta perlunya selektivitas proyek infrastruktur dan program pemerintah yang membutuhkan pendanaan besar agar tidak semakin membebani APBN. Hal tersebut pada akhirnya akan membatasi transfer keuangan pusat kepada pemerintah daerah yang dapat menurunkan kapasitas keuangan daerah.
5. Perubahan teknologi dan *Artificial Intelegence* (AI)
   Investasi besar di teknologi dan AI memang bisa meningkatkan produktivitas, tetapi juga akan menimbulkan risiko munculnya otomasi pekerjaan yang akan berpengaruh buruk pada ketimpangan keterampilan pekerja yang dapat mengakibatkan PHK bagi pekerja yang *low skill.* Bagi Indonesia hal ini akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dengan kemampuan digital, dimana jika SDM tidak siap digital maka dapat dipastikan akan tertinggal, serta di sisi lain makin menekan industri yang bersifat tradisional.
6. Risiko lingkungan, perubahan iklim dan bencana alam
   Risiko perubahan iklim tetap menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian global. Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, badai tropis, serta dampak lingkungan lainnya diperkirakan masih akan menimbulkan gangguan terhadap sektor pertanian, energi, dan infrastruktur dasar. Selain itu, tekanan pada ketahanan pangan di berbagai wilayah dapat berdampak pada stabilitas harga komoditas global. Kerugian ekonomi akibat kejadian tersebut cenderung menambah beban fiskal negara untuk pemulihan dan adaptasi, serta berpotensi memperlemah produktivitas sektor *riil* dalam jangka menengah dan panjang.

Tabel 3.2.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027
Pertumbuhan Ekonomi Global (IMF dalam %)	3,3	3,3	3,1	3,2
Skenario Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam RPJM Nasional 2025-2029 (%)	5,03	5,11	6,3	5,8-6,5
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (RPJMD Jateng 2025-2029 dalam %)	4,95	5,37	5,0-6,0	5,60-7,40

Sumber : IMF, KEM PPKF tahun 2027, dan Rancangan RKPD Jawa Tengah tahun 2027, 2026

Pada periode 2026–2027, perekonomian global diproyeksikan tumbuh moderat di tengah ketidakpastian geopolitik dan perdagangan internasional. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,2 persen pada 2027, meskipun masih dibayangi berbagai risiko eksternal. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Di tengah perlambatan global, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam RPJMN 2025–2029, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan mencapai 6,3 persen pada 2026 dan berada pada kisaran 5,8–6,5 persen pada 2027. Target tersebut didukung oleh penguatan investasi, peningkatan daya saing, transformasi ekonomi, serta kebijakan fiskal dan moneter yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Sejalan dengan kebijakan nasional, Provinsi Jawa Tengah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0–6,0 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 5,60–7,40 persen pada 2027. Pencapaian target tersebut diarahkan melalui penguatan sektor-sektor unggulan, seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru.

Secara umum, proyeksi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi global cenderung moderat, Indonesia dan Jawa Tengah tetap menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi melalui penguatan fundamental ekonomi dan transformasi sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan daerah perlu tetap adaptif terhadap dinamika global agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara berkelanjutan.

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah pada Tahun 2027

Memperhatikan perkembangan ekonomi global, nasional, dan regional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2026–2027 diarahkan terus meningkat secara bertahap. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai

5,80–6,30 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 6,00–7,85 persen pada 2027 sebagai bagian dari dukungan terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi tersebut, kondisi ketenagakerjaan diharapkan semakin membaik dengan target Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 4,60 persen pada 2026 dan 4,50–4,00 persen pada 2027, sementara PDRB per kapita diproyeksikan meningkat dari Rp36,05 juta menjadi Rp40,44 juta.

Perbaikan kinerja ekonomi diharapkan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari meningkatnya distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia menjadi 20,85 persen pada 2026 dan 20,89 persen pada 2027, menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 14,30–13,40 persen pada 2026 dan 11,68–10,80 persen pada 2027, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 73,80 pada 2026 menjadi 74,00 pada 2027. Target-target tersebut menunjukkan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025
dan Proyeksi Tahun 2026-2027

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025	Target 2026	Target 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	3,71	5,79	5,62	5,38	5,89	5,80-6,30**	6,00-7,85***
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,03	5,92	5,11	5,07	4,95	4,60**	4,50-4,00***
3	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	21,69	23,63	25,60	27,30	28,99	36,05**	40,44**
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	19,30	19,86	20,38	20,76	20,47	20,85**	20,89**
5	Tingkat Kemiskinan (%)	17,83	16,41	16,34	15,71	13,59	14,30-13,40**	11,68-10,80***
6	Indeks Pembangunan Manusia	70,56	71,29	71,88	72,48	73,17	73,80**	74,00***

Sumber: BPS 2021-2025, Bappeda Kabupaten Kebumen 2026
*Keterangan : **) Target pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029*
****) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*

Dinamika dan ketidakpastian perekonomian global dan nasional yang masih berlanjut diperkirakan tetap memberikan tekanan terhadap kinerja perekonomian daerah pada tahun 2027. Kondisi tersebut menuntut kebijakan ekonomi daerah yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi makro Kabupaten Kebumen pada tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar dan pengembangan sektor pariwisata, dengan tetap menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat sebagai prasyarat utama percepatan penanggulangan

kemiskinan. Fokus kebijakan tersebut selanjutnya diwujudkan melalui berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Penguatan Kualitas Tenaga Kerja melalui:
   a. Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, khususnya pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
   b. Memperkuat program *link and match* antara dunia pendidikan, pelatihan, dan dunia usaha/industri, termasuk sektor pariwisata dan UMKM;
   c. Mendorong pengembangan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan usaha mikro kecil sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru;
   d. Mendorong investasi yang bersifat padat karya dan berbasis potensi lokal guna memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.
2. Penguatan Sektor Pertanian sebagai penopang Ekonomi Daerah melalui:
   a. Regenerasi pelaku usaha pertanian melalui penguatan program petani milenial;
   b. Peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia pertanian melalui pendampingan usaha;
   c. Penguatan kelembagaan dan manajemen usaha pertanian melalui pengembangan *corporate farming* dan kemitraan usaha;
   d. Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian guna mendukung produktivitas dan aksesibilitas wilayah perdesaan;
   e. Fasilitasi akses permodalan usaha Pertanian;
   f. Pengembangan komoditas pertanian bernilai tambah dan berorientasi pasar; serta
   g. Peningkatan fasilitasi pemasaran hasil pertanian, termasuk integrasi dengan sektor pariwisata dan UMKM lokal;
3. Pengembangan Pariwisata sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pengembangan sektor pariwisata diarahkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, melalui:
   a. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur menuju destinasi pariwisata;
   b. Pengembangan destinasi wisata berbasis potensi alam, budaya, dan kearifan lokal;
   c. Pemajuan kebudayaan serta peningkatan dan pengembangan ekspresi budaya;
   d. Penguatan peran masyarakat dan UMKM lokal dalam rantai nilai pariwisata;
   e. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata daerah secara terpadu;
   f. Mendorong investasi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Penguatan Ketahanan dan Ketersediaan Pangan melalui:
   a. Pelaksanaan gerakan pangan murah dan subsidi harga pangan strategis guna menjaga keterjangkauan harga serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan;
   b. Penguatan infrastruktur dan kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebagai cadangan pangan lokal; serta
   c. Peningkatan pemantauan ketersediaan dan harga pangan di pasar melalui pemantauan berkala terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan/Pembelian (HAP) sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
5. Pengembangan industri melalui:
   a. Hilirisasi industri kecil dan menengah;
   b. Pengembangan agroindustri;
   c. Pengembangan industri berbasis produk unggulan;
   d. Pengembangan industri padat karya;
   e. Dukungan dan koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kebumen dalam pengembangan kawasan industri di wilayah Kabupaten Kebumen;
   f. Pengembangan inkubator bisnis dan *start up;*
   g. Peningkatan inovasi, produktivitas dan mutu produk UMKM;
   h. Perluasan pemasaran;
   i. Kemudahan permodalan; serta
   j. Peningkatan konsumsi produk UMKM lokal.
6. Pengembangan sektor jasa melalui:
   a. Optimalisasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan memanfaatkan bahan baku lokal;
   b. Optimalisasi sektor pariwisata melalui peningkatan promosi, even, paket wisata yang terintegratif, pengembangan ekonomi kreatif serta optimalisasi *Geopark* Kebumen melalui pengembangan *geosite* prioritas; serta
   c. Dukungan terhadap pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengoptimalan rantai distribusi dan jasa keuangan.
7. Meningkatkan pengendalian harga melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
8. Meningkatkan pengembangan dan kualitas infrastruktur daerah dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pengembangan sektor potensial lainnya yaitu sektor pariwisata, perdagangan serta sektor transportasi dan pergudangan

sekaligus dalam rangka memanfaatkan posisi strategis Kabupaten Kebumen di wilayah selatan Jawa Tengah;

9. Peningkatan pelayanan publik melalui penciptaan kemudahan berusaha untuk sektor berbasis pertanian, industri, jasa dan ekonomi kreatif serta fasilitasi sertifikasi produk terutama yang mengoptimalkan potensi lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
10. Peningkatan inovasi yang akan mengakselerasi pembangunan daerah; serta
11. Pengembangan sumber ekonomi baru melalui penguatan kerjasama antar daerah dan peningkatan investasi daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2027

Arah kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 merupakan perwujudan kebijakan fiskal daerah yang diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan melalui pengelolaan keuangan yang sehat, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan ini ditempuh dengan mengoptimalkan seluruh sumber-sumber penerimaan daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran daerah secara efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal daerah dalam jangka menengah. Keuangan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah yang pengelolaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Dari sisi penerimaan, keuangan daerah bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan pembiayaan daerah. Sementara dari sisi pengeluaran, keuangan daerah digunakan untuk membiayai belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam konteks Tahun 2027, arah kebijakan keuangan daerah dirumuskan dengan memperhatikan dinamika perekonomian global dan nasional yang masih diwarnai oleh ketidakpastian, penyesuaian kebijakan fiskal nasional pasca periode pemulihan ekonomi, serta tuntutan peningkatan kualitas belanja daerah yang semakin kuat. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kualitas dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta pengelolaan pembiayaan yang pruden dan terukur. Dari sisi belanja, kebijakan keuangan daerah Tahun 2027 difokuskan pada penguatan belanja yang produktif, berkualitas, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur dasar, serta pengendalian

inflasi dan kemiskinan, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Penguatan tata kelola keuangan daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal, sehingga keuangan daerah benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2027.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan kebijakan fiskal pemerintah pusat serta pemerintah provinsi. PAD dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemberlakuan kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor sejak Tahun 2025, dengan peningkatan porsi bagi hasil kabupaten/kota menjadi 66 persen, masih menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kinerja PAD pada Tahun 2027, khususnya terkait dinamika kepemilikan dan penjualan kendaraan bermotor.

Sementara itu, pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional dan provinsi. Oleh karena itu, kebijakan pendapatan daerah diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan kualitas, kepastian, dan keberlanjutan sumber-sumber pendapatan daerah.

3.2.1.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah selama periode tahun 2022-2025 mengalami perkembangan yang positif. Realisasi pendapatan daerah selama tahun 2022-2025 yaitu dari sebesar Rp 2.847.196.017.404 pada tahun 2022 menjadi Rp 3.069.200.546.472 pada tahun 2025 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,62%, dengan rincian sebagai berikut:

1. PAD mengalami perkembangan yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,92% selama periode tahun 2022-2025. Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah cenderung meningkat dari 17,99% pada tahun 2022 menjadi 18,91% pada tahun 2025 dengan

rata-rata proporsi sebesar 17,08% selama periode tahun 2022-2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih terbatasnya kemandirian keuangan daerah, namun kecenderungannya kearah yang semakin baik. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen PAD selama periode tahun 2022-2025 sebagai berikut:

a. Pajak daerah mengalami pertumbuhan cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 22,26% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,25%;
b. Retribusi daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan terbesar dibandingkan komponen PAD lainnya yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 292,31%, dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 3,36%;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,36%, dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,69%; serta
d. Lain-lain PAD yang Sah menjadi satu-satunya yang mengalami rata-rata pertumbuhan minus/berkontraksi sebesar -36,06%. Meskipun mengalami pertumbuhan yang minus, komponen Lain-lain PAD yang Sah merupakan penyumbang terbesar yang bersumber dari PAD dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 7,78%.

2. Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,40% selama tahun 2022-2025, sedangkan proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah tetap menjadi yang terbesar, yaitu dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 82,71%, namun cenderung menurun dari 81,82% pada tahun 2022 menjadi 81,09% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan masih bergantungnya Pendapatan Kabupaten Kebumen dari pendapatan transfer terutama dari Pemerintah Pusat. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer tahun 2022-2025 sebagai berikut:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat secara agregat mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,22% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 75,89%. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2022-2025 sebagai berikut:
      1) Dana Bagi Hasil (DBH) justru mengalami rata-rata pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -0,93%. Penurunan ini dikarenakan adanya kecenderungan strategi dari pemerintah pusat dengan mengganti/menggeser menjadi insentif fiskal khususnya pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu rata-rata

proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 1,22%;

2) Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4,07% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 42,17% yang merupakan sumber Pendapatan terbesar bagi Kabupaten Kebumen. Kebijakan penggunaan DAU telah berubah sejak tahun 2023 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yaitu adanya DAU *Earmark* yang secara nominal menambah alokasi DAU, akan tetapi penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat (*mandatory*) sehingga sangat membatasi fleksibilitas ruang fiskal APBD;
3) Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,69% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 17,27%. DAK terdiri dari DAK Fisik dan Non Fisik, alokasi DAK Fisik sangat dipengaruhi oleh lokus prioritas nasional, dimana terkadang tidak semua daerah menjadi lokus bagi beberapa bidang DAK Fisik yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan DAK Non Fisik lebih bersifat rutin yang digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, DAK-NF didominasi oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
4) Insentif Fiskal (IF) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 46,39%, tingginya insentif fiskal Kabupaten Kebumen dikarenakan keberhasilan dalam penanganan *stunting* dan pengelolaan keuangan Daerah. Rata-rata proporsi IF terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,47%; serta
5) Dana Desa (DD) mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,23% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 14,76%. DD bersifat transfer atau hanya melewati rekening kas pemerintah kabupaten untuk selanjutnya ditransfer langsung ke rekening kas pemerintah desa;

b. Pendapatan transfer antardaerah secara keseluruhan diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara agregat mengalami perkembangan yang negatif/terkontraksi sebesar -2,17% dengan rata-rata proporsi pendapatan transfer antardaerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 6,83%. Secara rinci, kinerja masing-

masing komponen pendapatan transfer antardaerah tahun 2022-2025 sebagai berikut:

1) Pendapatan bagi hasil terkontraksi sebesar -8,46% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 5,55%; serta
2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 193,61% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,28%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2022-2025 hanya bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat yang bersifat *reimburse.* Sepanjang tahun 2022-2025, pemerintah Kabupaten Kebumen selalu mendapatkan hibah air minum, sedangkan hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) telah berakhir pada tahun 2022 serta hibah sanitasi pada tahun 2023 oleh pemerintah pusat dialihkan dalam bentuk DAK Fisik. Pada tahun 2024 Kabupaten Kebumen juga mendapatkan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sedangkan di tahun 2025 tidak ada pendapatan dari Hibah. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama tahun 2022-2025 rata-rata sebesar 316,90% dengan rata-rata proporsi terhadap total pendapatan daerah hanya sebesar 0,21%.

Tabel 3.4.
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Tahun 2022-2025

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025
	Total Pendapatan	**2.847.196.017.404**	**2.901.021.509.721**	**3.137.694.279.634**	**3.069.200.546.472**	**2,62**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**512.346.375.475**	**463.650.961.705**	**484.291.013.938**	**580.301.987.602**	**4,92**
A.1.	Pajak daerah	129.843.875.322	137.222.705.502	139.434.789.479	222.396.578.469	22,26
A.2.	Retribusi daerah	28.375.110.419	28.881.046.419	33.229.154.159	319.033.178.055	292,31
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17.640.585.052	19.123.340.688	21.856.399.056	24.341.513.937	11,36
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	336.486.804.682	278.423.869.096	289.770.671.244	14.530.717.141	-36,06
B	**Pendapatan Transfer**	**2.329.703.641.941**	**2.435.850.438.454**	**2.634.840.256.696**	**2.488.898.558.870**	**2,40**

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025
B.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.366.495.205.883	**2.331.162.442.341**	**3,22**
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.706.540.321.941	1.783.201.602.063	1.884.387.249.883	1.877.407.961.729	3,27
B.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	38.220.093.261	36.123.723.591	33.987.975.000	36.911.825.200	-0,93
B.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.306.369.023.000	1.322.224.058.321	4,07
B.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	**494.615.159.880**	**507.146.964.042**	**544.030.251.883**	**518.272.078.208**	1,69
B.1.2.	Insentif Fiskal	0	11.805.728.000	20.849.462.000	24.222.868.000	46,39
B.1.3.	Dana Desa	416.756.373.000	455.959.893.200	461.258.494.000	429.531.612.612	1,23
B.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**206.406.947.000**	**184.883.215.191**	**268.345.050.813**	**157.736.116.529**	**-2,17**
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	175.763.136.000	174.243.934.191	181.816.080.313	129.339.182.267	-8,46
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	30.643.811.000	10.639.281.000	86.528.970.500	28.396.934.262	193,61
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**5.145.999.988**	**1.520.109.562**	**18.563.009.000**	**0**	**316,90**
C.1.	Pendapatan Hibah	5.145.999.988	1.520.109.562	18.563.009.000	**0**	316,90

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

Tabel 3.5.
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022-2025

No.	Uraian Pendapatan	Proporsi Tahun 2022	Proporsi Tahun 2023	Proporsi Tahun 2024	Proporsi Tahun 2025	Rata-rata Proporsi Tahun 2022-2025
	Total Pendapatan	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**17,99**	**15,98**	**15,43**	**18,91**	**17,08**
A.1.	Pajak daerah	4,56	4,73	4,44	7,25	5,25
A.2.	Retribusi daerah	1,00	1,00	1,06	10,39	3,36

No.	Uraian Pendapatan	Proporsi Tahun 2022	Proporsi Tahun 2023	Proporsi Tahun 2024	Proporsi Tahun 2025	Rata-rata Proporsi Tahun 2022-2025
A.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,62	0,66	0,70	0,79	0,69
A.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	11,82	9,60	9,24	0,47	7,78
B	**Pendapatan Transfer**	**81,82**	**83,97**	**83,97**	**81,09**	**82,71**
B.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**74,58**	**77,59**	**75,42**	**75,95**	**75,89**
B.1.1.	Dana Perimbangan	59,94	61,47	60,06	61,17	60,66
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1,34	1,25	1,08	1,20	1,22
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	41,22	42,74	41,63	43,08	42,17
B.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	17,37	17,48	17,34	16,89	17,27
B.1.2.	Insentif Fiskal	0,00	0,41	0,66	0,79	0,47
B.1.3.	Dana Desa	14,64	15,72	14,70	13,99	14,76
B.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**7,25**	**6,37**	**8,55**	**5,14**	**6,83**
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	6,17	6,01	5,79	4,21	5,55
B.2.2.	Bantuan keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	1,08	0,37	2,76	0,93	1,28
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,18**	**0,05**	**0,59**	**0,00**	**0,21**
C.1.	Pendapatan Hibah	0,18	0,05	0,59	0,00	0,21

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

3.2.1.2. Asumsi Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2027

Pada RKPD Tahun 2027, pendapatan daerah diasumsikan sebesar Rp3.022.466.671.160, meningkat 4,00% dibandingkan APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.906.114.900.000. Perbandingan dilakukan terhadap APBD Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Secara rinci, asumsi pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. PAD diasumsikan meningkat 0,89% menjadi Rp588,71 miliar. Meskipun nilainya meningkat, proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah turun dari 20,08% menjadi 19,48%. Rincian masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut:
   a. Pajak daerah diasumsikan naik sebesar 2,10% dibandingkan APBD Tahun 2026, namun proporsi terhadap total pendapatan daerah

turun dari 8,21% menjadi 8,06%. Sejak tahun 2025, *opsen* PKB telah masuk pada komponen pajak daerah;

b. Retribusi daerah diasumsikan naik sebesar 1,31% dibandingkan APBD Tahun 2026, namun proporsi terhadap total pendapatan daerah turun dari 10,50% menjadi 10,23%. Sejak tahun 2025, pendapatan BLUD telah masuk pada komponen retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diasumsikan mengalami penurunan sebesar –9,32% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,94% dan bersumber dari deviden BUMD;
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diasumsikan turun sebesar -10,96% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 0,25%. Penurunan dikarenakan adanya asumsi penurunan pada Hasil Penjualan BMD, Jasa Giro, Pendapatan Bunga serta pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (Inkracht).

2. Pendapatan transfer diasumsikan meningkat 4,79% dibandingkan APBD Tahun 2026, dengan proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah diasumsikan meningkat dari sebesar 79,92% pada APBD Tahun 2026 menjadi 80,52% pada RKPD Tahun 2027. Proporsi pada RKPD 2027 masih lebih kecil jika dibandingkan rata-rata proporsi selama tahun 2022-2025 yaitu sebesar 82,71% yang menunjukkan adanya upaya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Rincian masing-masing komponen pendapatan transfer adalah sebagai berikut:
   a. Pendapatan transfer pemerintah pusat diasumsikan meningkat 5,11% dibandingkan APBD Tahun 2026, dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 76,48%. Rincian masing-masing komponen pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:
      1) DBH diasumsikan meningkat 77,16% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi DBH terhadap total pendapatan daerah sebesar 1,04%;
      2) DAU diasumsikan meningkat sebesar 7,50% dibandingkan APBD Tahun 2026 dan proporsi terhadap total pendapatan daerah juga diasumsikan meningkat menjadi 46,82%. Komponen DAU yang bersifat *earmark* diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2026, sedangkan untuk komponen DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diasumsikan meningkat;
      3) DAK Fisik pada APBD 2026 maupun asumsi RKPD 2027 tidak dialokasikan. Hal ini dikarenakan alokasi DAK Fisik sangat

dipengaruhi oleh lokus prioritas nasional, di mana tidak semua daerah menjadi sasaran bagi beberapa bidang DAK Fisik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4) DAK Non Fisik diasumsikan sama dengan alokasi yang ada sebelumnya pada APBD Tahun 2026; serta
5) Dana Desa diasumsikan sama dengan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah sebesar 12,35%.

b. Pendapatan transfer antardaerah yang diasumsikan hanya pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk bantuan keuangan tidak diasumsikan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bagi hasil diasumsikan turun sebesar -0,90,% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total pendapatan daerah yaitu sebesar 4,04%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diasumsikan karena belum adanya rencana pengajuan hibah kepada pemerintah pusat.

Tabel 3.6.
Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027

No.	Uraian Pendapatan	APBD 2026	Asumsi RKPD Tahun 2027	Kenaikan/ (penurunan) TA 2027 dibanding TA 2026
	Total Pendapatan	**2.906.114.900.000**	**3.022.466.671.160**	**4,00%**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**583.543.180.000**	**588.709.028.000**	**0,89%**
A.1.	Pajak Daerah	238.536.294.000	243.536.294.000	2,10%
A.2.	Retribusi Daerah	305.248.729.000	309.256.213.000	1,31%
A.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.438.212.000	28.508.763.000	-9,32%
A.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.319.945.000	7.407.758.000	-10,96%
B	**Pendapatan Transfer**	**2.322.571.720.000**	**2.433.757.643.160**	**4,79%**
B.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.199.272.864.000**	**2.311.570.177.160**	**5,11%**
B.1.1.	Dana Perimbangan	1.825.975.074.000	1.938.272.387.160	6,15%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	17.659.537.000	31.286.502.000	77,16%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.316.471.531.000	1.415.141.879.160	7,50%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	

No.	Uraian Pendapatan	APBD 2026	Asumsi RKPD Tahun 2027	Kenaikan/ (penurunan) TA 2027 dibanding TA 2026
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	491.844.006.000	491.844.006.000	
B.1.2.	Insentif Fiskal	0	0	
B.1.3.	Dana Desa	373.297.790.000	373.297.790.000	0,00%
B.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**123.298.856.000**	**122.187.466.000**	**-0,90%**
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	123.298.856.000	122.187.466.000	-0,90%
B.2.2.	Bantuan Keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	0	0	
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	0	
C.1.	Pendapatan Hibah	0	0	

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

Tabel 3.7.
Proporsi Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027

NO.	URAIAN PENDAPATAN	APBD 2026	Asumsi RKPD Tahun 2027
	TOTAL PENDAPATAN	**100,00%**	**100,00%**
A	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**20,08%**	**19,48%**
A.1.	Pajak Daerah	8,21%	8,06%
A.2.	Retribusi Daerah	10,50%	10,23%
A.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,08%	0,94%
A.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,29%	0,25%
B	**Pendapatan Transfer**	**79,92%**	**80,52%**
B.1.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**75,68%**	**76,48%**
B.1.1.	Dana Perimbangan	62,83%	64,13%
B.1.1.1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,61%	1,04%
B.1.1.2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	45,30%	46,82%
B.1.1.3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00%	0,00%
B.1.1.4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	16,92%	16,27%
B.1.2.	Insentif Fiskal	0,00%	0,00%
B.1.3.	Dana Desa	12,85%	12,35%
B.2.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**4,24%**	**4,04%**
B.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	4,24%	4,04%
B.2.2.	Bantuan Keuangan (dari Pemerintah Provinsi)	0,00%	0,00%
C.	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,00%**	**0,00%**

NO.	URAIAN PENDAPATAN	APBD 2026	Asumsi RKPD Tahun 2027
C.1.	Pendapatan Hibah	0,00%	0,00%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

3.2.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah pada RKPD Tahun 2027

Mencermati dinamika fiskal daerah serta hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2027 yang berfokus pada penguatan kualitas penerimaan, keberlanjutan fiskal, dan kepastian hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan struktur pendapatan daerah semakin optimal, adaptif terhadap perubahan regulasi, serta mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu dan diselaraskan secara penuh dengan kerangka regulasi nasional dan daerah, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada Tahun 2027 telah memasuki fase implementasi penuh. Dengan kerangka regulasi tersebut, kebijakan pendapatan daerah diarahkan tidak hanya pada optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, tetapi juga pada peningkatan tata kelola, kepatuhan wajib pajak, serta penguatan basis data dan sistem administrasi pendapatan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Seiring dengan semakin matangnya implementasi kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target nominal, tetapi juga pada penguatan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sehat, berkelanjutan, dan berorientasi pelayanan. Dalam rangka optimalisasi PAD, Pemerintah Kabupaten Kebumen akan menempuh langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berfokus pada penguatan tata kelola, peningkatan kepatuhan serta perluasan basis pendapatan, antara lain melalui:

1. Penguatan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, optimalisasi penagihan aktif baik rutin maupun tunggakan, penguatan pengawasan berbasis risiko, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penguatan ekstensifikasi PDRD melalui pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, pendataan wajib pajak baru yang telah memenuhi kriteria, serta pengembangan potensi pajak dan retribusi yang sejalan dengan kondisi perekonomian daerah dan daya beli masyarakat;
3. Optimalisasi pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) melalui peningkatan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen, termasuk integrasi data dan penguatan peran daerah dalam mendukung kepatuhan pajak kendaraan;
4. Perluasan dan pendalaman Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, transparansi, serta akuntabilitas penerimaan daerah sekaligus mendukung pencegahan kebocoran penerimaan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penyederhanaan proses perizinan guna mendorong peningkatan investasi dan perluasan basis pajak daerah;
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD dengan pendekatan pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis digital;
7. Penguatan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara berkelanjutan;
8. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) melalui peningkatan inventarisasi, pemanfaatan aset secara produktif, kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga, serta pelaksanaan lelang aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Optimalisasi pengelolaan kas daerah melalui penempatan dana yang prudent dan terukur guna meningkatkan pendapatan bunga dan jasa giro tanpa mengganggu likuiditas daerah;
10. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD melalui penguatan kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan.

Sementara itu, dalam rangka pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan Tahun 2027 diarahkan pada penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi secara lebih intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya dalam menyikapi kebijakan transfer ke daerah yang berbasis formula dan kinerja. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan akurasi perencanaan, optimalisasi alokasi, serta peningkatan capaian indikator yang menjadi

dasar perhitungan transfer. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendorong diversifikasi sumber pendanaan pembangunan melalui pengembangan kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta/badan usaha. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR), penguatan peran lembaga sosial dan keagamaan termasuk Badan Amil Zakat Nasional, serta pengembangan skema kerja sama pemanfaatan aset daerah dan sumber pembiayaan alternatif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara agregat, kapasitas belanja daerah sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal yang bersumber dari pendapatan daerah dan pembiayaan neto. Oleh karena itu, perencanaan belanja Tahun 2027 disusun secara realistis dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan, kapasitas pembiayaan, serta kesinambungan fiskal daerah. Secara distributif, alokasi belanja diarahkan pada prioritas pembangunan daerah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja, dengan pendekatan yang selektif, akuntabel, efisien, dan berkeadilan. Melalui pengalokasian yang tepat sasaran dan terukur, belanja daerah diharapkan mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

3.2.2.1. Kinerja Belanja Daerah pada Tahun 2022-2025

Kinerja belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022-2025 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,41%. Realisasi belanja daerah selama tahun 2022-2024 mengalami peningkatan dari sebesar Rp.2.824.358.293.725 pada tahun 2022 menjadi Rp3.126.694.533.457 pada tahun 2024, namun di tahun 2025 mengalami penurunan belanja daerah menjadi sebesar Rp3.026.509.314.539, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja operasi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,08% selama tahun 2022-2025 dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung meningkat dari 67,92% pada tahun 2022 menjadi 69,28% pada tahun 2025 dengan rata-rata proporsi sebesar 68,43%. Hal ini menunjukkan masih dominannya komponen belanja operasi terhadap APBD Kabupaten Kebumen. Secara rinci, kinerja masing-masing komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:
   a. Belanja pegawai mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3,09% selama tahun 2022-2025, dengan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah juga mengalami peningkatan dari

40,44% pada tahun 2022 menjadi 41,33% pada tahun 2025 dengan rata-rata proporsi sebesar 39,63%. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Kebumen belum memenuhi ambangbatas belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja pada tahun 2027 sesuai ketentuan UU HKPD;

b. Belanja barang dan jasa mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,67% selama tahun 2022-2025 paling rendah dibandingkan Komponen belanja operasi lainnya dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 25,01%;
c. Belanja subsidi mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 72,22% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,03%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024 yang digunakan untuk subsidi bunga sebagai dukungan kemudahan permodalan bagi wirausaha dan subsidi harga dalam rangka menjaga kestabilan harga;
d. Belanja hibah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 28,14% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah sebesar 3,45%. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 yang digunakan penyelenggaran proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024; serta
e. Belanja bantuan sosial menjadi satu-satunya komponen belanja operasi yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -21,42% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,31%.

2. Belanja modal mengalami rata-rata pertumbuhan paling kecil dibandingkan komponen belanja daerah lainnya yaitu hanya tumbuh sebesar 0,12% selama tahun 2022-2025 dengan proporsi terhadap Total Belanja Daerah cenderung menurun dari 9,64% pada tahun 2022 menjadi 9,02% pada tahun 2025 dengan rata-rata proporsi sebesar 9,24%. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya belanja modal pada APBD Kabupaten Kebumen, harapan kedepan bahwa belanja modal Kebumen Semakin tinggi sehingga dapat memberikan efek multiplier yang lebih bagi perekonomian daerah. Terbatasnya belanja modal disebabkan oleh masih mengandalkan dari sumber pendanaan DAK Fisik, DAU *Earmark* Pekerjaan Umum, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pendapatan hibah;
3. Belanja tidak terduga mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 43,72% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 0,03%. Hal ini dikarenakan tidak

adanya situasi darurat khususnya bencana yang memerlukan pendanaan secara signifikan; serta

4. Belanja transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,37% selama tahun 2022-2025 dengan rata-rata proporsi terhadap Total Belanja Daerah hanya sebesar 22,31%. Secara umum adalah belanja transfer kepada pemerintah desa yang selain didominasi oleh belanja transfer bersumber dana DD, juga terdapat belanja transfer dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2022-2025

No	Uraian Belanja	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025 (%)
A.	**Belanja Operasi**	**1.918.270.224.061**	**2.020.914.516.871**	**2.145.786.592.502**	**2.096.855.532.358**	**3,08**
1.	Belanja Pegawai	1.142.207.137.167	1.153.775.444.865	1.188.427.007.238	1.250.924.182.020	3,09
2.	Belanja Barang dan Jasa	704.907.763.493	726.725.182.478	800.813.552.333	758.434.074.806	2,67
3.	Belanja Subsidi	313.864.348	675.656.402	1.447.997.750	1.261.000.000	72,22
4.	Belanja Hibah	59.752.651.931	128.698.064.603	145.222.914.681	81.622.204.552	28,14
5.	Belanja Bantuan Sosial	11.088.807.122	11.040.168.523	9.875.120.500	4.614.070.980	-21,42
B.	**Belanja Modal**	**272.301.599.864**	**278.842.913.538**	**278.735.832.493**	**273.137.836.471**	**0,12**
C.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.295.204.500**	**409.940.801**	**323.000.000**	**1.035.914.118**	**43,72**
D.	**Belanja Transfer**	**632.491.265.300**	**676.974.543.619**	**701.849.108.462**	**655.480.031.592**	**1,37**
	Total Belanja (A+B+C+D)	**2.824.358.293.725**	**2.977.141.914.829**	**3.126.694.533.457**	**3.026.509.314.539**	**2,41**

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

Tabel 3.9.
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2025

No	Uraian Belanja	Proporsi APBD Tahun 2022 (%)	Proporsi APBD Tahun 2023 (%)	Proporsi APBD Tahun 2024 (%)	Proporsi APBD Tahun 2025 (%)	Rata-rata Proporsi Tahun 2022-2025 (%)
A.	**Belanja Operasi**	67,92	67,88	68,63	69,28	68,43

No	Uraian Belanja	Proporsi APBD Tahun 2022 (%)	Proporsi APBD Tahun 2023 (%)	Proporsi APBD Tahun 2024 (%)	Proporsi APBD Tahun 2025 (%)	Rata-rata Proporsi Tahun 2022-2025 (%)
1.	Belanja Pegawai	40,44	38,75	38,01	41,33	39,63
2.	Belanja Barang dan Jasa	24,96	24,41	25,61	25,06	25,01
3.	Belanja Subsidi	0,01	0,02	0,05	0,04	0,03
4.	Belanja Hibah	2,12	4,32	4,64	2,70	3,45
5.	Belanja Bantuan Sosial	0,39	0,37	0,32	0,15	0,31
B.	**Belanja Modal**	9,64	9,37	8,91	9,02	9,24
C.	**Belanja Tidak Terduga**	0,05	0,01	0,01	0,03	0,03
D.	**Belanja Transfer**	22,39	22,74	22,45	21,66	22,31
	Total Belanja (A+B+C+D)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

3.2.2.2. Asumsi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2027

Belanja daerah pada RKPD Tahun 2027 diasumsikan sebesar Rp3.097.694.532.160. dengan proporsi terbesar ada pada Belanja Operasi sebesar 66,87%, diikuti Belanja Transfer sebesar 20,94%, Belanja Modal sebesar 11,88% dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,31%. Secara rinci asumsi belanja Tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Belanja Daerah pada APBD Tahun 2026 dan RKPD Tahun 2027

No	Uraian Belanja	APBD 2026	Asumsi RKPD Tahun 2027	Kenaikan/ (penurunan) TA 2027 dibanding TA 2026	Proporsi Belanja pada APBD Tahun 2026	Proporsi Belanja pada Asumsi RKPD Tahun 2027
	Total Belanja (A+B+C+D)	**2.992.699.969.000**	**3.097.694.532.160**	**3,51%**	**100,00%**	**100,00%**
A	**Belanja Operasi**	**2.065.232.235.001**	**2.071.329.708.662**	**0,30%**	**69,01%**	**66,87%**
1.	Belanja Pegawai	1.219.965.113.840	1.198.697.982.256	-1,74%	40,76%	38,70%
2.	Belanja Barang dan Jasa	753.557.617.291	797.638.295.268	5,85%	25,18%	25,75%
3.	Belanja Subsidi	1.950.000.000	2.930.000.000	50,26%	0,07%	0,09%
4.	Belanja Hibah	83.544.875.870	68.918.431.138	-17,51%	2,79%	2,22%
5.	Belanja Bantuan Sosial	6.214.628.000	3.145.000.000	-49,39%	0,21%	0,10%
B	**Belanja Modal**	**293.289.005.908**	**368.147.557.338**	**25,52%**	**9,80%**	**11,88%**
C	**Belanja Tidak Terduga**	**2.000.000.000**	**9.480.000.000**	**374,00%**	**0,07%**	**0,31%**
D	**Belanja Transfer**	**632.178.728.091**	**648.737.266.160**	**2,62%**	**21,12%**	**20,94%**

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027

1. Belanja operasi diasumsikan meningkat 0,30% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total belanja daerah menurun dari 69,01%menjadi 66,87%. Secara rinci, komponen belanja operasi adalah sebagai berikut:
   a. Belanja pegawai diasumsikan turun 1,74% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total belanja daerah menurun dari 40,76% menjadi 38,70%. Hal ini merupakan upaya meningkatkan efisiensi belanja pegawai agar secara bertahap memenuhi ketentuan Undang-Undang HKPD, dengan tetap mengakomodasi asumsi accrues sebesar 1%;
   b. Belanja barang dan jasa diasumsikan meningkat 5,85% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total belanja daerah diasumsikan naik menjadi 25,75%;
   c. Belanja subsidi diasumsikan meningkat sebesar 50,26% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total belanja daerah juga meningkat menjadi 0,09%;
   d. Belanja hibah diasumsikan turun -17,51% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total belanja daerah juga menurun menjadi 2,22%; serta
   e. Belanja bantuan sosial juga diasumsikan turun -49,39% dibandingkan APBD Tahun 2026 dengan proporsi terhadap total belanja daerah juga turun menjadi 0,10%;
2. Penurunan alokasi belanja hibah diarahkan untuk memperkuat belanja modal yang diasumsikan meningkat 25,52% dibandingkan APBD Tahun 2026, dengan proporsi terhadap total belanja daerah naik dari 9,80% menjadi 11,88%. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan memberikan multiplier effect yang lebih besar terhadap perekonomian daerah;
3. Belanja tidak terduga diasumsikan mengalami kenaikan hingga sebesar 374,00% dibandingkan tahun 2026, dengan proporsi terhadap total belanja tahun 2027 juga meningkat dari 0,07% menjadi 0,31%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kebutuhan angsuran tahunan untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 11 kelurahan di Kebupaten Kebumen. Total kebutuhan angsuran sebesar Rp44,88 miliar untuk 6 tahun sehingga setiap tahunnya membutuhkan anggaran Rp7,48 miliar; serta
4. Belanja transfer diasumsikan meningkat 2,62% dibandingkan APBD Tahun 2026, namun proporsinya terhadap total belanja daerah menurun dari 21,12% menjadi 20,94%. Kebijakan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban transfer

dan peningkatan ruang fiskal untuk mendukung belanja yang lebih produktif.

3.2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2027

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah periode Tahun 2025–2029. Pengalokasian belanja disusun secara terarah, terukur, dan konsisten dengan agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Visi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029 adalah "Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman–Maju–Sejahtera–Berbudaya". Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi pembangunan yang menjadi pedoman dalam penentuan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah, sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif;
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM yang Inovatif dan Berkelanjutan;
3. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Ngopeni, Ngayomi, dan Ngayemi; dan
5. Mewujudkan Masyarakat yang Damai, Guyub, dan Rukun atas Dasar Nilai Keagamaan dan Budaya Lokal.

Pada Tahun 2027, tema pembangunan daerah adalah "Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan." Tema tersebut menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan belanja daerah, sehingga alokasi anggaran difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung pelayanan dasar, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan belanja disusun dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, kehati-hatian fiskal, dan keberlanjutan, serta memastikan keberpihakan anggaran pada program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penurunan kemiskinan. Secara umum, kebijakan fiskal Tahun 2027 diarahkan pada:

1) Menjaga kesinambungan fiskal daerah dengan tetap mengendalikan pertumbuhan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah;

2) Mengoptimalkan kualitas belanja agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan manfaat bagi masyarakat;
3) Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pembangunan infrastruktur dasar secara merata;
4) Memperkuat sinergi belanja daerah dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional.

Arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun dengan mendasarkan pada prioritas pembangunan daerah serta kapasitas fiskal yang tersedia. Penetapan prioritas belanja dilakukan secara selektif dan terukur untuk memastikan dukungan optimal terhadap pencapaian tema pembangunan, target kinerja daerah, serta percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun prioritas Belanja Daerah Tahun 2027 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi tetap menjadi komponen utama dalam APBD 2027, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

   a. Belanja Pegawai
      - Dialokasikan secara terkendali untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
      - Diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas aparatur, khususnya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan dasar dan pengelola destinasi pariwisata;
      - Dilakukan pengendalian belanja pegawai agar tidak mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan.

   b. Belanja Barang dan Jasa
      - Diprioritaskan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan publik lainnya;
      - Mendukung operasional dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang telah terbangun;
      - Mendukung pengelolaan dan promosi destinasi pariwisata daerah serta penguatan Ekonomi Kreatif sebagai pendukung sektor pariwisata;
      - Dilaksanakan secara selektif dan efisien untuk menghindari belanja yang bersifat konsumtif dan kurang berdampak.

   c. Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial
      - Belanja hibah dan bantuan sosial diarahkan secara lebih tepat sasaran untuk mendukung kelompok masyarakat rentan dan miskin;

- Mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan kohesi sosial;
- Dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, dengan fokus pada:

- Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, seperti jalan, sanitasi, air bersih, drainase, dan fasilitas umum lainnya;
- Peningkatan aksesibilitas wilayah, khususnya konektivitas menuju pusat pelayanan dan kawasan wisata;
- Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk sarana prasarana destinasi wisata, penataan kawasan wisata, dan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat;
- Belanja modal yang berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- Pengendalian belanja modal agar tetap proporsional dan berorientasi pada kebutuhan prioritas daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dialokasikan secara memadai untuk:

- Mengantisipasi kebutuhan penanganan keadaan darurat, bencana alam, dan kejadian luar biasa;
- Menjamin keberlangsungan pelayanan dasar dan perlindungan masyarakat dalam kondisi tidak terduga;
- Menjaga stabilitas pelaksanaan APBD tahun berjalan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer diarahkan untuk:

- Mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas pemerintah desa;
- Memperkuat peran desa dalam penyediaan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, dan penanggulangan kemiskinan;
- Menjamin kesinambungan pendanaan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prioritasi belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 dan halaman 176 Permendagri 14 Tahun 2025). Dari perhitungan belanja fungsi Pendidikan menunjukkan anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku (telah melebihi 20%), yaitu mencapai 34,14% pada Asumsi RKPD Tahun 2027. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya digunakan untuk belanja gaji guru (termasuk TPG) dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

Tabel 3.11.
Perhitungan Belanja Fungsi Pendidikan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2027
A	**Total Anggaran Fungsi Pendidikan (A1+A2+A3+A4)**	**1.057.597.022.480**
A.1.	Urusan Bidang Pendidikan	1.027.000.523.736
A.2.	Urusan Bidang Kebudayaan	9.277.968.276
A.3.	Urusan Bidang Perpustakaan	5.184.116.068
A.4.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.134.414.400
B	**Total Belanja Daerah**	**3.097.694.532.160**
C	**Rasio Anggaran Pendidikan (A/B)**	**34,14%**

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

2. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja daerah setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Apabila persentase tersebut belum terpenuhi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan perhitungan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, total belanja daerah sebesar Rp3,10 triliun setelah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp648,74 miliar menghasilkan dasar perhitungan sebesar Rp2,45 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja infrastruktur daerah yang merupakan

belanja infrastruktur pelayanan publik yang terdapat pada seluruh perangkat daerah mencapai Rp804,4 miliar atau 32,85%, sehingga masih berada di bawah ketentuan minimal 40% dan perlu ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Secara rinci data asumsi perhitungan belanja infrastruktur daerah tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2027
A	Total Belanja Daerah	3.097.694.532.160
B	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah dan/atau Desa	648.737.266.160
C	Selisih (A-B)	2.448.957.266.000
D	Jumlah Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	804.415.166.375
E	Proporsi Belanja Infrastruktur Daerah (D/C)	32,85%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

3. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% dari total belanja APBD. Apabila proporsi belanja pegawai masih melebihi batas tersebut, pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan perhitungan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, belanja pegawai sebesar Rp1,20 triliun setelah dikurangi Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp278,42 miliar dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp411 juta, menghasilkan belanja pegawai yang diperhitungkan sebesar Rp919,86 miliar atau 29,70% dari total belanja daerah. Dengan demikian, proporsi belanja pegawai pada RKPD Tahun 2027 telah memenuhi ketentuan batas maksimal 30% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.13.
Perhitungan Belanja Pegawai pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2027
A	Belanja Pegawai	1.198.697.982.256
B	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	278.424.643.000

No	Komponen Perhitungan	Asumsi RKPD Tahun 2027
C	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	411.000.000
D	Total Belanja Pegawai yang Berasal dari Luar TKD yang Telah Ditentukan Penggunaannya (A-B-C)	919.862.339.256
E	Total Belanja Daerah	3.097.694.532.160
F	Proporsi Belanja Pegawai yang Berasal dari Luar TKD yang Telah Ditentukan Penggunaannya terhadap Belanja Daerah (D/E)	29,70%

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah tidak hanya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, tetapi juga disusun dengan memperhatikan pemenuhan belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan alokasi anggaran pada sektor pendidikan serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas utama sebagai prasyarat dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, struktur belanja daerah diharapkan mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah jangka menengah dan panjang.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen yang memengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan neto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan neto diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah, serta pencairan dana cadangan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pemberian pinjaman daerah. Dengan pengelolaan pembiayaan yang prudent, terukur, dan berorientasi pada kesinambungan fiskal, kebijakan pembiayaan diharapkan mampu menjaga stabilitas APBD sekaligus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

3.2.3.1. Kinerja Pembiayaan Daerah pada Tahun 2022-2025

Kinerja pembiayaan daerah secara umum terbagi dua yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2022-2025 cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -3,11% dimana secara umum sangat dipengaruhi oleh SiLPA, karena kontribusi SiLPA terhadap penerimaan pembiayaan paling mendominasi. Secara rinci masing-masing komponen penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama periode 2022-2025 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,65%;
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman selama periode 2022-2025 mengalami penurunan dengan rata-rata terkontraksi sebesar -1,08%, dikarenakan belum optimalnya penyerapan dana talangan pangan; serta
3. Pencairan dana cadangan telah dilakukan pada tahun 2024 untuk pembiayaan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai kesepakatan dengan KPUD dan Bawaslu.

Secara umum, realisasi pengeluaran pembiayaan selama tahun 2022-2025 juga cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,79%. Secara rinci masing-masing komponen pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana cadangan sempat dilakukan pada tahun 2022 dan 2023 yang kemudian digunakan untuk pembiayaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2024;
2. Penyertaan modal (investasi) daerah menurun cukup signifikan di tahun 2024 menjadi sebesar Rp.2,5 Milliar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp.20 Milliar dan pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp8 Milliar, dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2022-2025 sebesar 47,84%;
3. Pemberian pinjaman daerah juga mengalami penurunan selama periode tahun 2022-2025 dengan kontraksi sebesar -1,08%.

   Dengan masing-masing kinerja pada sisi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto yang juga cenderung menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif yaitu berkontraksi sebesar -2,74% selama tahun 2022-2025.

Tabel 3.14.
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2022-2025

No	URAIAN PEMBIAYAAN	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025
A.	**Penerimaan Pembiayaan**	**271.279.627.198**	**260.917.350.878**	**129.903.437.770**	**187.965.691.946**	**-3,11**
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	269.179.627.198	258.817.350.878	115.323.977.770	185.965.691.946	0,65
2.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000	2.000.000.000	-1,08
3.	Pencairan dana cadangan	-	-	12.774.460.000	-	-

No	URAIAN PEMBIAYAAN	Realisasi APBD Tahun 2022	Realisasi APBD Tahun 2023	Realisasi APBD Tahun 2024	Realisasi APBD Tahun 2025	Rata-rata Pertumbuhan Tahun 2022-2025
B.	**Pengeluaran pembiayaan**	**35.300.000.000**	**42.331.000.000**	**4.305.000.000**	**10.000.000.000**	**20,79**
1.	Pembentukan dana cadangan	15.000.000.000	20.000.000.000	-	-	33,33
2.	Penyertaan modal (investasi) daerah	18.200.000.000	20.231.000.000	2.500.000.000	8.000.000.000	47,84
3.	Pemberian pinjaman daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	1.805.000.000	2.000.000.000	-1,08
	Pembiayaan Netto/Defisit (A-B)	**235.979.627.198**	**218.586.350.878**	**125.598.437.770**	**177.965.691.947**	**-2,74**

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

3.2.3.2. Asumsi Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2027

Pada RKPD Tahun 2027, penerimaan pembiayaan diasumsikan sebesar Rp111.771.861.000, meningkat 18,05% dibandingkan APBD Tahun 2026. Penerimaan pembiayaan tersebut terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya yang diasumsikan sebesar Rp109.671.861.000, meningkat 18,46% dibandingkan APBD Tahun 2026. Sementara itu, penerimaan kembali pemberian pinjaman diasumsikan tetap sebesar Rp2.100.000.000, sedangkan pencairan dana cadangan tidak diasumsikan.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, alokasinya diasumsikan meningkat signifikan sebesar 351,16% menjadi Rp36.544.000.000, yang disebabkan oleh:

1. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000 untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebagai mekanisme penyediaan anggaran secara bertahap melalui APBD;
2. Penyertaan modal (investasi) daerah meningkat 140,73% menjadi Rp14.444.000.000 untuk mendukung penguatan permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), antara lain BPR Bank Kebumen, PT Luk Ulo, BPR BKK Jawa Tengah, BPD Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa, dan PT. Aneka Usaha;
3. Pemberian pinjaman daerah diasumsikan tetap sebesar Rp2.100.000.000, sama dengan alokasi pada APBD Tahun 2026.

Dengan asumsi tersebut, pembiayaan netto pada RKPD Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp75.227.861.000, atau menurun 13,12% dibandingkan APBD Tahun 2026, seiring dengan meningkatnya alokasi

pengeluaran pembiayaan untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 3.15.
Pembiayaan Daerah pada APBD 2026 dan RKPD Tahun 2027

NO.	URAIAN PEMBIAYAAN	APBD 2026	Asumsi RKPD Tahun 2027	Kenaikan/ (penurunan) TA 2027 dibanding TA 2026
A.	**Penerimaan Pembiayaan**	**94.685.069.000**	**111.771.861.000**	**18,05%**
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	92.585.069.000	109.671.861.000	18,46%
2.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
3.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
B.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**8.100.000.000**	**36.544.000.000**	**351,16%**
1.	Pembentukan Dana Cadangan	0	20.000.000.000	N/A
2.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000.000.000	14.444.000.000	140,73%
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
	Pembiayaan Netto (A-B)	**86.585.069.000**	**75.227.861.000**	**-13,12%**

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

3.2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada RKPD Tahun 2027

Mendasari dinamika yang terjadi, kebijakan pembiayaan daerah dilakukan dengan melakukan optimalisasi:

1. Peningkatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian internal terhadap penyaluran dana talangan pangan dan perikanan guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas pengelolaan.
2. Identifikasi SiLPA yang bersifat mandatory untuk dialokasikan kembali pada belanja wajib dalam Perubahan RKPD/APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Identifikasi SiLPA non-mandatory untuk dimanfaatkan dalam rangka menutup defisit RKPD/APBD atau mendukung belanja prioritas pada Perubahan RKPD/APBD.
4. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dana penyertaan modal pada BUMD guna memastikan optimalisasi kinerja dan kontribusi terhadap keuangan daerah.

5. Perluasan akses terhadap alternatif sumber pembiayaan sebagai upaya mendukung akselerasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
6. Pengkajian rencana penyiapan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2029 untuk menjamin kesiapan pendanaan sesuai tahapan yang direncanakan.

3.2.3.4. Sumber Pembiayaan Alternatif

Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menginisiasi pengembangan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya melalui pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Upaya tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan optimalisasi kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah. Selain melalui CSR/TJSLP, pembiayaan alternatif juga bersumber dari dukungan lembaga sosial keagamaan, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selama tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai melalui pembiayaan alternatif di Kabupaten Kebumen seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 3.16.
Rekapitulasi Pelaksanaan Pembiayaan Alternatif
Kabupaten Kebumen Tahun 2025

No	Badan Usaha	Nama Kegiatan	Nilai Pembiayaan
1.	PT BPR BKK Kebumen	Dukungan Kegiatan BUMD Peduli Inflasi	Rp25.000.000
		Bantuan Pengajian Akbar Pondok Pesantren	Rp500.000
		Partisipasi & Dukungan Paket Sembako Hari Raya Idul Fitri 1446 H	Rp4.500.000
		Dialog Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bagi Kepala Desa Se Jateng	Rp5.000.000
		Bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Stunting	Rp13.500.000
		Sponsorship kegiatan kejuaraan olahraga daerah PBSI	Rp1.500.000
		Dukungan Kegiatan Gebyar Produk UKM Karya Disabilitas	Rp1000.000
		Bantuan Modal Usaha UMKM Inovasi Gerabah JAGAT JANITRA II	Rp.2.500.000
		Bantuan Modal Usaha UMKM Emping JAGAT BAROKAH	Rp.2.500.000
		Bantuan Alat Pengolahan Pangan Lokal TP PKK	Rp.2.500.000

No	Badan Usaha	Nama Kegiatan	Nilai Pembiayaan
		Bantuan Alat Pengolahan Pangan KWT RIZQI BAROKAH	Rp.2.500.000
		Dukungan Kegiatan Stabilitas Keamanan di Kab Kebumen Forum BUMD	Rp.7000.000
		Pemberian Beasiswa Berupa Tabungan SIMPEL	Rp4.590.000
		Sponsorship kegiatan kejuaraan olahraga daerah Tenis Meja dan Hut Kebumen	Rp5.000.000
		Pengobatan Gratis & Sunatan Massal	Rp99.358.700
		Jambanisasi 8 Warga Desa Ayam Putih Kec Buluspesantren	Rp50.960.000
		Sponsorship kegiatan kejuaraan olahraga daerah Bulu Tangkis	Rp2.000.000
2.	PT. Luk Ulo Farma (Perseroda)	Dukungan kesiapsiagaan stabilitas keamanan di Kabupaten Kebumen	Rp4.000.000
3.	Perumda Air Minum	Dukungan BUMD Peduli Inflasi untuk Masyarakat Miskin	Rp25.000.000
		Bantuan Paket Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu Sekitar Sumber	RP21.000.000
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi dan UMKM	Rp30.000.000
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi dan UMKM Kebumen Fest 2025	Rp6.900.000
		Kegiatan Peningkatan Usaha UMKM	Rp7000.000
		Kegiatan Peningkatan Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan UMKM Kebumen	Rp7.500.000
		Dukungan Kegiatan Peningkatan UMKM	Rp2.806.200
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi untuk UMKM di Wilayah Petanahan	Rp6.460.000
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi untuk UMKM di Wilayah Petanahan	Rp6.600.000
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi bagi UMKM di Kebumen	Rp2.773.000
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi UMKM	Rp6.438.475
		Kegiatan Peningkatan Ekonomi UMKM di Petanahan	Rp3.328.000
4.	BAZNAS	Peningkatan Gizi / Pangan Murah Subsidi Silang	Rp122.340.000
		Bantuan Paket Sembako	Rp435.861.200
		RTLH/Relokasi Pasca Bencana dan Bencana	Rp138.000.000
		Santunan anak yatim/piatu	Rp167.264.184
		Bantuan RTLH	Rp1.358.693.421
		Bantuan Alat Kesehatan di 26 Kecamatan	Rp311.228.130
		Biaya pengobatan melalui UPZ RSDS	Rp182.456.724
		Operasional Ambulance	Rp11.280.000
		Bantuan Biaya Kekurangan /Tagihan RS	Rp106.337.350
		Bantuan Melalui UPZ Kementerian Agama	Rp391.746.646
		Penunjang Pendidikan SD Negeri Reguler	Rp1.263.950.000
		Penunjang Pendidikan SD/MI Swasta Reguler	Rp83.400.000

No	Badan Usaha	Nama Kegiatan	Nilai Pembiayaan
		Penunjang Pendidikan SMP Negeri Reguler	Rp408.500.000
		Penunjang Pendidikan SMP/ MTs Swasta Reguler	Rp303.800.000
		Penunjang Pendidikan SMP dan SMA/SMK/MA Isidental	Rp397.236.350
		Bantuan Renovasi Untuk Masjid/Mushola	Rp218.000.000
		Pemberdayaan Ekonomi Umat	Rp414.262.000
		Modal Usaha	Rp259.000.000
		Pelatihan Keterampilan	Rp166.831.100
		Renovasi Tempat Usaha	Rp11.500.000
		Penunjang Pendidikan SD Negeri Reguler	Rp1.263.950.000
		Ternak Domba dan Unggas	Rp332.200.000
		Bantuan Jambanisasi	Rp36.500.000
		Bantuan Pembuatan Sumur Bor	Rp19.300.000
		Pemberian Bantuan Makan untuk anak Stunting	Rp80.055.300
		Pemberian Bantuan Makan untuk Penderita HIV AIDS	Rp112.979.800
		Pemberian Bantuan Makan untuk Penderita TBC	Rp31.281.277
		Pembelian Mobil Ambulance	Rp305.590.000
		Beasiswa D3/S1	Rp250.000.000
		Beasiswa Tahfidz	Rp150.000.000
		Beasiswa TPK	Rp70.238.550
		Beasiswa Santri	Rp84.000.000
		Peningkatan Kompetensi SDM Guru Agama	Rp114.400.000

Sumber : Bagian Perekonomian SETDA Kabupaten Kebumen dan Baznas Tahun 2025 (data diolah)

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berupaya meningkatkan pendanaan CSR diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan;
2. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Daerah;
3. memberikan arahan kepada Badan Usaha di Daerah dalam pemenuhan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang tepat sasaran dan tepat manfaat di Daerah;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan komitmen Badan Usaha untuk berkontribusi pada program pembangunan Daerah secara melembaga dan berkelanjutan;
5. memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha di Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

6. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diwujudkan dalam bentuk: hibah, beasiswa, subsidi, bantuan sosial, pelayanan sosial, pemberdayaan, promosi, dan/atau bentuk lainnya yang ditentukan Badan Usaha;
7. Usaha Kecil, Menengah dan koperasi dapat turut aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kesukarelaan dan kemampuan;
8. Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dibentuk Forum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
9. Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berjasa dan berprestasi dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; serta
10. Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah dimana hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk penyusunan kebijakan tahun berikutnya.

Selain CSR, pemerintah Kabupaten Kebumen akan berupaya menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD, dan Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya memaksimalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, penguatan kerjasama antar wilayah serta antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan peran filantropi, dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan, lingkungan hidup, dan/atau lainnya dalam kegiatan pembangunan.

3.2.4. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Untuk mendanai pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2027, dilakukan analisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, yang dihitung dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan setelah dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang bersifat mengikat, meliputi belanja pegawai (gaji dan tunjangan kinerja ASN, gaji P3K, gaji dan tunjangan KDH serta DPRD), insentif dan honor pengelola kegiatan, DAK Nonfisik untuk tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru, serta pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut, dari total penerimaan daerah sebesar Rp3.134.238.532.160, setelah dikurangi belanja wajib sebesar Rp1.198.697.982.256 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp36.544.000.000, diperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan pada RKPD Tahun 2027 sebesar

Rp1.898.996.549.904. Kapasitas riil tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dan pendanaan program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan fiskal Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.17.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2027

No	Uraian	Asumsi RKPD 2027
A.	Pendapatan	3.022.466.671.160
B.	Penerimaan Pembiayaan	111.771.861.000
C.	Total penerimaan (A+B)	3.134.238.532.160
	Dikurangi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat:	
D.	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Kinerja ASN, Gaji P3K, Gaji dan Tunjangan KDH dan DPRD, Insentif dan Honor Pengelola Kegiatan serta DAK Nonfisik Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru)	1.198.697.982.256
E.	Pengeluaran Pembiayaan	36.544.000.000
F.	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan (C-D-E)**	1.898.996.549.904

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

Tabel 3.18.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah RKPD Tahun 2027

No	Uraian	Asumsi RKPD Tahun 2027
A.	**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan, yang Selanjutnya Digunakan untuk Belanja Prioritas:**	**1.898.996.549.904**
B.	**Prioritas I adalah belanja mandatory yang terdiri dari:**	**1.325.328.703.160**
B.1.	Belanja Minimal 10% dari Penerimaan PKB dan Opsen PKB	85.523.665.000
B.2.	Belanja Minimal 10% dari Penerimaan Pajak Tenaga Listrik	4.500.000.000
B.3.	Belanja Minimal 37,5% dari Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk JKN	27.459.894.000
B.4.	Belanja Minimal 12,5% dari Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum tentang Rokok	9.153.298.000
B.5.	Belanja Minimal 10% dari Penerimaan Pajak Air Tanah	45.000.000
B.6.	Belanja BLUD dari Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD (Pendapatan BLUD)	266.228.844.000
B.7.	Belanja BLUD dari SiLPA BLUD	5.212.000.000
B.8.	Belanja dari Penerimaan DBHCHT	14.809.744.000
B.9.	Belanja dari Penerimaan DAU Earmark Kelurahan	2.200.000.000
B.10.	Belanja dari Penerimaan DAU Earmark Pendidikan	0
B.11.	Belanja Penerimaan dari DAU Earmark Kesehatan	13.622.731.000
B.12.	Belanja dari Penerimaan DAU Earmark Pekerjaan Umum	0
B.13.	Belanja dari Penerimaan DAK Fisik	0
B.14.	Belanja dari Penerimaan DAK Non Fisik (diluar Tunjangan Profesi dan Tamsil Guru)	213.008.363.000
B.15.	Belanja dari Penerimaan Insentif Fiskal	0
B.16.	Belanja Transfer ke Desa dari Penerimaan Dana Desa	373.297.790.000
B.17.	ADD	196.252.290.160

No	Uraian	Asumsi RKPD Tahun 2027
B.18.	BPJS Perangkat Desa	6.492.000.000
B.19.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.656.366.000
B.20.	Belanja Gaji P3K Paruh Waktu	69.386.718.000
B.21.	Belanja Tidak Terduga	9.480.000.000
B.22.	Belanja dari Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	0
B.23.	Belanja dari Pendapatan Hibah	0
B.24.	Belanja dari Penerimaan Dana Cadangan	0
C.	**Prioritas II terdiri dari:**	**569.978.986.744**
C.1.	Belanja Operasional dan Prioritas Perangkat Daerah (Non Belanja Pegawai)	197.775.548.000
C.2.	Belanja Kebijakan	372.203.438.744
D	**Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (A-B-C)**	**3.688.860.000**

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Visi Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "*Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya*". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif;
2. Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan;
3. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni, ngayomi,* dan *ngayemi*; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal.

Visi dan Misi Kabupaten Kebumen dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran jangka menengah. Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 beserta target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2027 secara lengkap diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2027

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
VISI : "KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN- MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA"	**Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**74,00***
			Tingkat Kemiskinan	**Persen**	**11,68-10,80***
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
MISI 1: Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif		Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	66,11
		Sasaran 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	86,33
MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan	**Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**6,00-7,85***
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	**Juta rupiah**	**40,44**
		Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,00
		Sasaran 2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,14
			Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-2,50
		Sasaran 2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,95
		Sasaran 2.4. Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,07

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan		Sasaran 2.5 Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-4,00*
	Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif		**Indeks Infrastruktur**	**Indeks**	**49,53**
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif	**Ton CO2Eq**	**2.399.500,84**
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks	8,30
		Sasaran 3.2 Meningkatnya aksesibiltas dan mobilitas masyarakat	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	87,67
		Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	52,62
		Sasaran 3.4 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur desa dan kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri	Persen	49,89**
		Sasaran 3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	66,32

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
		Sasaran 3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	Indeks	115,96-113,29
MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, *ngopeni, ngayomi*, dan *ngayemi*	**Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**87,42****
		Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	71,27
		Sasaran 4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,65
		Sasaran 4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66
MISI 5: Mewujudkan masyarakat yang damai, *guyub*, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal	**Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan**		**Indeks Kebudayaan**	**Indeks**	**17,18**
			Indeks Kesalehan Sosial	**Indeks**	**83,16**
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Persen	14,65

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2027
		Sasaran 5.2 Meningkatnya kondusivitas Wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	81,00
			Indeks Ketertiban Umum	Indeks	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029,2025
*Keterangan: *) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*
***) target telah disesuaikan dengan mendasari kinerja pada Tahun 2025*

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada tabel di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut, maka terdapat 5 (lima) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yang akan dicapai hingga akhir tahun periode RPJMD Tahun 2025-2029.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1 Tema Pembangunan Tahun 2027

Tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 bersumber dari tema pembangunan/arah kebijakan pembangunan daerah yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, yaitu "**Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**". Pemenuhan infrastruktur memiliki peran strategis dalam memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar sekaligus mendorong pengembangan pariwisata sebagai motor percepatan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, transportasi publik, jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas penduduk, dan memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik secara merata. Infrastruktur yang memadai juga menjadi prasyarat bagi terbukanya peluang ekonomi baru, terutama di daerah yang sebelumnya terisolasi, sehingga mendorong pertumbuhan usaha lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain, infrastruktur pariwisata seperti akses jalan menuju destinasi, sarana transportasi, penunjuk arah, fasilitas pendukung, dan konektivitas digital akan meningkatkan daya tarik dan kenyamanan

wisatawan. Dengan berkembangnya pariwisata, sektor terkait seperti kuliner, kerajinan, perhotelan, dan jasa transportasi akan tumbuh, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar bagi produk lokal. Melalui sinergi antara penguatan pelayanan dasar dan pengembangan pariwisata, pemenuhan infrastruktur akan menjadi katalis penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengurangi kesenjangan, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dilakukan dengan menerapkan konsep THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial). Konsep **tematik** sebagai arah kebijakan dalam mencapai target-target pembangunan. Selanjutnya konsep **holistik** dilakukan dengan prioritas pembangunan yang dijabarkan dalam program prioritas beserta target dan pagu indikatifnya yang secara detail dijabarkan pada Bab V. Program prioritas selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam kegiatan hingga sub kegiatan yang secara lengkap (termasuk target, pagu, lokus dan fokus) telah terentri pada SIPD Tahun 2027 seperti yang tercantum pada Lampiran III. Konsep **integratif** dilakukan dengan melibatkan *multistakeholders* dari beberapa pemangku kepentingan seperti perangkat daerah, akademisi, jurnalis, komunitas, dunia usaha, legislatif, perangkat daerah tingkat propinsi maupun lembaga/kementerian dalam sebuah sinergi untuk pelaksanaan perencanaan prioritas pembangunan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian dan pariwisata, serta pengembangan Geopark Kebumen yang selanjutnya diuraikan secara rinci pada subbab-subbab berikut pada Bab IV ini. Seperti halnya konsep integratif, konsep **spasial** dilakukan memperhatikan lokus prioritas diantaranya dilakukan pada pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengembangan infrastruktur pendukung perekonomian dan pariwisata, serta pengembangan Geopark Kebumen yang selanjutnya diuraikan secara rinci pada subbab-subbab berikut pada Bab IV ini.



Gambar 4.1
Konsep THIS pada Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

4.2.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 telah disusun dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan isu aktual strategis sebagai berikut.

4.2.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan nasional termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Terdapat 8 prioritas nasional pembangunan (Asta Cita) dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan; serta
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema RKP Nasional Tahun 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Dalam rangka mendukung prioritas nasional, keselarasan juga telah terjadi antara sasaran pembangunan daerah beserta indikatornya dan prioritas daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dengan prioritas nasional dan sasaran prioritas nasional Tahun 2027 yang menunjukkan kesamaan arah pembangunan Kabupaten Kebumen dengan Nasional. Secara lengkap keselarasan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.
Keselarasan Sasaran Pembangunan Daerah beserta indikatornya dan Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2027

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Indikator: • Indeks Demokrasi Indonesia • Indeks Hak Asasi Manusia	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Indeks Ketertiban Umum	100%	Prioritas 12 Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik.
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1	Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan Indikator: • Asia Power Index *(Military Capability)* • Asia Power Index (*Diplomatic Influence)* • Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Indeks Ketertiban Umum	100%	Prioritas 12 Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		Area Tempat Tinggalnya • Global Cybersecurity Index • Indeks Keamanan Laut Nasional				penguatan pelayanan publik.
	2	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Pangan • Pertumbuhan PDB Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,00%	Prioritas 8 Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	3	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Energi secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Energi • Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,32%	Prioritas 8 Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	4	Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Indikator: • Indeks Ketahanan Air Nasional • Kapasitas Tampungan Air • Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	52,62%	Prioritas 7 Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		• Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman				
	5	Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Indikator: • Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global • Indonesia Blue Economy Index (IBEI) • Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	2,43%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 5 Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
				Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,50%	
	6	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Indikator: • Indeks Ekonomi Hijau • Timbulan Sampah terolah di fasilitasi pengolahan sampah • Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif • Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tahunan	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,32%	Prioritas 8 Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		• Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati • Indeks kualitas lingkungan hidup •Indeks Kualitas Udara •Indeks Kualitas Air •Indeks Kualitas Lahan •Indeks Kualitas Air Laut				
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Indikator: • Stok infrastruktur terhadap PDB	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	8,30%	Prioritas 7 Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.
			Meningkatnya aksesibiltas dan mobilitas masyarakat	Indeks infrastruktur perhubungan	87,67%	
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	52,62%	
	2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB Indikator: • Total aset sektor keuangan/PDB • Aset perbankan/PDB • Aset dana pensiun/PDB • Aset asuransi/PDB • Kapitalisasi pasar modal/PDB • Total kredit/PDB • Inklusi keuangan	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	2,14%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 5 Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya
				Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,50%	

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
						kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	3	Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas Indikator: • Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal • Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB • Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah • Rasio kewirausahaan	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 6 Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	4	Meningkatnya nilai tambah pariwisata Indikator: • Rasio PDB pariwisata • Devisa pariwisata	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,07%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
	5	Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif Indikator: • Proporsi PDB ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	12,07%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas	1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata Indikator: • Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun • Harapan Lama Sekolah • Rata-rata nilai PISA : membaca, matematika, sains • Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional : literasi membaca numerasi • Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi • Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi • Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	66,11	Prioritas 2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
	2	Terwujudnya kesehatan untuk semua Indikator: • Usia Harapan Hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	86,33	Prioritas 3 Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		• Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) • Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) • Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita • Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk) • Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional				berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
	3	Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif Indikator: • Indeks pembangunan kualitas keluarga • Indeks perlindungan anak • Indeks pembangunan pemuda • Indeks ketimpangan gender • Indeks pembangunan gender • Mobilitas penduduk lanjut usia • Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	20,89%	Prioritas 1 Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	4	Menguatnya iptek, inovasi dan produktivitas tenaga kerja Indikator: • Peringkat indeks inovasi global • Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		• Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB) • Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan				pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 6 Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat Indikator: Jumlah perolehan medali emas pada olympic games Jumlah perolehan medali emas paralympic games • Peringkat pada Asian Games • Peringkat pada Asian Para Games Peringkat pada SEA GAMES • Peringkat pada ASEAN Para Games • Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	86,33	Prioritas 3 Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	1	Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan	6,95%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
nilai tambah di dalam negeri		Indikator: • Rasio PDB industri pengolahan				memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
	2	Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global Indikator: • Biaya logistik • Pembentukan modal tetap bruto (%PDB) • Ekspor barang dan jasa (%PDB)	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	2,14%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 5 Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
				Net Ekspor Barang dan Jasa	-2,50%	
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1	Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan Indikator: • Tingkat kemiskinan • Tingkat kemiskinan ekstrem • Proporsi penduduk kelas menengah	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	20,89%	Prioritas 1 Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		• Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan • Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal				
	2	Meningkatkan akses rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Indikator: • Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	8,30%	Prioritas 7 Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.
	3	Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Indikator: • Persentase desa mandiri	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	Persentase Desa Mandiri	49,89%	Prioritas 7 Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.
	4	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indikator: • Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional • Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap PDB nasional	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	2,14%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 5 Peningkatan iklim

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
						investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	1	Terwujunya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional Indikator: • Indeks pembangunan hukum • Indeks persepsi korupsi • Indeks Materi Hukum • Indeks Integritas Nasional • • Indeks integritas partai politik	Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern	Nilai Maturitas SPIP	3,65	Prioritas 10 Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
	2	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Indikator: • Indeks reformasi birokrasi nasional Indeks Pelayanan Publik • Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71,27	Prioritas 10 Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik	4,66	Prioritas 9 Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik,

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
						pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan.
	3	Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba Indikator: • Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Indeks Ketertiban Umum	100%	Prioritas 12 Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik.
	4	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai Agen Pembangunan Indikator: • Return on Asset (RoA) BUMN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71,27	Prioritas 10 Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
	5	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	71,27	Prioritas 10 Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		Pengembangan Inovasi Pembiayaan Indikator: • Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB • Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB				ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
	6	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Indikator: • Tingkat inflasi	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50%	Prioritas 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Prioritas 6 Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur	1	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju Indikator: • Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) • Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	14,65%	Prioritas 11 Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal

Prioritas Nasional		Sasaran Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027	Prioritas Daerah 2027
		• Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)				guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
			Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	81,%	Prioritas 11 Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
				Indeks Ketertiban Umum	100	
	2	Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Indikator: • Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana	115,96-113,29	Prioritas 8 Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun RKPD Tahun 2027 senantiasa memastikan relevansi dan konsistensi setiap kebijakan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional jangka panjang. Instrumen utama untuk memastikan konsistensi tersebut adalah Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. IUP Nasional terdiri dari 45 indikator yang mencakup tiga agenda transformasi besar: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola, dilengkapi Landasan Transformasi dan Kerangka Implementasi.

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Tema pembangunan yang ditetapkan adalah "Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan". Tema ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa kluster IUP Nasional, antara lain:

- Kluster Perlindungan Sosial: Target penurunan Tingkat Kemiskinan dari 13,58% (2025) menuju 11,68-10,80% (2027) dan 0,67-0,00% (2045).
- Kluster Infrastruktur & Hunian: Target peningkatan RT Akses Hunian Layak dari 70,97% (2025) ke 84,98% (2027) dan 100% (2045).
- Kluster Pariwisata: Target Jumlah Wisatawan Mancanegara dari 25 orang (2025) ke 28 orang (2027) dan 72-75 orang (2045).
- Kluster Lingkungan: Target Penurunan Emisi GRK Kumulatif 2.399.500,84 TonCO2eq pada 2027 sebagai dukungan komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement.

Data Evaluasi Kinerja IUP Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (Tabel 2.169), sebagian besar IUP Kebumen menunjukkan kinerja yang baik. Dari 63 IUP dalam sistem perencanaan Kebumen, sebagian besar mencapai predikat Sangat Tinggi (ST). Beberapa catatan penting:

- Indikator dengan kinerja Outstanding (melebihi target): Prevalensi Stunting (7,53% vs target 9,10%), Jumlah Kematian Ibu (9 kasus vs target 14), Cagar Budaya dilestarikan (22,89% vs target 12,10%), Indeks Pembangunan Keluarga/iBangga (75,30 vs target 64,67-64,68).
- Indikator dengan kinerja perlu perhatian: Proporsi Penduduk Berkualifikasi PT (4,83% dari target 8,11% — capaian 59,56%), ROA BUMD (2,69% dari target 4,08% — capaian 65,93%), Penurunan Emisi GRK Kumulatif (152.859 TonCO2eq dari target 1.985.635 — baru 7,69%).
- Indikator dengan perkembangan positif namun butuh akselerasi: RT Akses Sanitasi Aman (13,98% menuju target 2045 81-86%), Akses Air Minum Perpipaan Perkotaan (17,21% menuju target 2045 75-100%).

Lintasan (trajectory) data dari baseline 2025, target 2027, dan target 2045, beberapa observasi strategis dapat diidentifikasi:

- Indikator dengan lintasan sesuai jalur (on-track): Indeks Reformasi Birokrasi, JKN, TB Treatment Coverage, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Indeks Integritas Nasional, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rasio Kewirausahaan Daerah, dan Timbulan Sampah Terolah menunjukkan tren positif yang konsisten menuju target 2045.
- Indikator yang memerlukan akselerasi: Penurunan Emisi GRK Kumulatif memerlukan lompatan besar dari 152.860 TonCO2eq (2025) ke 2.399.501 TonCO2eq (2027) dan 17.748.645 TonCO2eq (2045). Demikian pula Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman perlu meningkat hampir 6 kali lipat dari 13,98% (2025) ke 81-86% (2045) dalam 20 tahun. Ini memerlukan strategi pendanaan inovatif dan kolaborasi multistakeholder.
- Indikator dengan target ambisius: Tingkat Kemiskinan ditargetkan turun dari 13,58% (2025) ke 0,67-0,00% (2045), yang merupakan target yang sangat ambisius. Pencapaiannya bergantung pada keberhasilan transformasi ekonomi melalui peningkatan PDRB per kapita (dari Rp29 juta menuju Rp128,57-151 juta), penguatan sektor industri, pariwisata, dan kewirausahaan.

Prioritas nasional menginginkan tercapainya pembangunan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang maju dan inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif pada tahun 2045. Ketiga agenda transformasi ini secara langsung tercermin dalam visi Kabupaten Kebumen dalam RPJMD 2025-2029, yakni "Kebumen Berdaya: Kebumen Beriman-Maju-Sejahtera-Berbudaya". Berikut adalah penjabaran relevansi per dimensi transformasi:

Tabel 4.3.

Dukungan Kebijakan 2027 terhadap Pencapaian SUP 2027

Dimensi Transformasi Nasional	Yang Diinginkan Nasional (IUP 2045)	Kondisi Kebumen Saat Ini (2025)	Respons Kebijakan RKPD Kebumen 2027	Indikator Sasaran Utama Pembangunan Daerah (SUP Daerah)
Transformasi Sosial — Kesehatan untuk Semua	UHH >81 thn; Stunting <5,26%; Kematian Ibu 10 kasus; Coverage TB 100%	UHH 75,56 thn; Stunting 7,53% (di bawah target nasional); Kematian Ibu 9 kasus; TB Coverage 95%	Prioritas 3: Pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan berkualitas. Termasuk penyediaan BPJS-PBI bagi miskin, alat bantu disabilitas, penanganan stunting berbasis data desa.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Transformasi Sosial — Pendidikan Berkualitas	RLS 9,03 thn; HLS 16,67 thn; Literasi SD 95,29%; Numerasi SD 86,69%	RLS 7,89 thn; HLS 13,42 thn; Literasi SD 84,23%; Numerasi SD 81,59%. Proporsi PT baru 4,83%.	Prioritas 2: Aksesibilitas & kualitas pendidikan. Beasiswa, pendidikan non-formal, optimalisasi pesantren, peningkatan APK PAUD.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Transformasi Sosial — Perlindungan Sosial	Kemiskinan 0,00-0,50%; Jamsostek 80,50%; Fasilitas inklusif tersedia	Kemiskinan 13,58% (tertinggi ke-2 di Jateng, namun turun 4,25% dalam 4 tahun); Jamsostek 22,62%	Prioritas 1: Pengentasan kemiskinan via sarpras dasar terjangkau. Prioritas 6: Sarpras produksi-pemasaran UMKM. Strategi RPKD: mikro (dimensi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, konsumsi) & makro (LPE, stabilitas harga, investasi).	Tingkat Kemiskinan
Transformasi Ekonomi — Produktivitas & Inovasi	PDRB Per Kapita Rp128-151 Jt; Pengangguran 1,96-2,26%; TPAK Perempuan 77-78%	PDRB Per Kapita Rp29 Jt; TKT 4,95%; TPAK Perempuan 66,41%; ROA BUMD 2,69%	Prioritas 4 & 5: Infrastruktur aksesibilitas pelaku usaha & iklim investasi. Prioritas 8: Ekonomi hijau-biru berbasis potensi lokal. Pengembangan corporate farming, petani milenial, UMKM kreatif.	PDRB per Kapita

Dimensi Transformasi Nasional	Yang Diinginkan Nasional (IUP 2045)	Kondisi Kebumen Saat Ini (2025)	Respons Kebijakan RKPD Kebumen 2027	Indikator Sasaran Utama Pembangunan Daerah (SUP Daerah)
Transformasi Ekonomi — Pariwisata & Ekraf	Wisatawan Mancanegara 72-75 orang; Rasio Akomidasi Makan Minum 6,23-6,41%	Wisatawan Mancanegara 25 orang (2025); Rasio PDRB Akomodasi 3,01%	Prioritas 1, 7: Pengembangan pariwisata dan sarpras destinasi. Program unggulan: Geopark Kebumen, koridor wisata Kebumen–Purworejo–Borobudur, pengembangan desa wisata.	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Transformasi Tata Kelola	IRB 90; SPBE 5; IPP 5; IIN 92-96; IRH 90	IRH 99,54 (ST); SPBE NA; IPP 4,33; IIN 75,96; IRB 78,88 (sangat baik)	Prioritas 9: Penguatan ASN digital. Prioritas 10: Perencanaan berbasis data kemiskinan terpadu. Prioritas 12: Keamanan dan kepastian hukum. SAKIP B (68,92); 302 inovasi teridentifikasi.	Tingkat Kemiskinan
Lingkungan Hidup & Resiliensi Bencana	Emisi GRK kumulatif 17,75 Jt TonCO2; Sanitasi Aman 81-86%; IRB 51-68; Air Perpipaan 75-100%	Emisi GRK kumulatif 152.860 TonCO2 (baru 6,4% dari target 2027); Sanitasi Aman 13,98%; IRB 78,88; Air Perpipaan 17,21%	Prioritas 4 & 7: Infrastruktur air bersih, sanitasi, persampahan. Penurunan Emisi GRK kumulatif 2.399.500,84 TonCO2eq menjadi target RKPD 2027 mendukung komitmen Indonesia Paris Agreement.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Dalam proses penyusunan dan penetapan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Perda No. 11 Tahun 2024), terdapat sejumlah IUP Nasional yang secara disagregasi hanya tersedia di tingkat nasional atau provinsi. Hal ini bukan kelemahan sistem perencanaan daerah, melainkan konsekuensi dari desain metodologi pengukuran yang memang dirancang untuk skala nasional. Kondisi ini telah diakui dan disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam forum koordinasi penyusunan RPJPD, sehingga diputuskan penggunaan indikator proksi yang relevan dan dapat diukur di tingkat kabupaten.

Tabel 4.4.
Pemetaan Indikator Proksi Kabupaten Kebumen terhadap IUP Nasional

Kategori Indikator yang Diproksi	Alasan Tidak Tersedia di Tingkat Kabupaten	Indikator Proksi yang Digunakan Kebumen
Survei/Indeks Eksklusif Nasional	IDI, IKUB, IPK, Inklusi Keuangan (SNLIK) — dihitung K/L dengan metodologi dan sampel nasional; tidak ada output kabupaten	Jumlah Kejadian Konflik SARA, Indeks Kesalehan Sosial, Total DPK Bank Kab/PDRB
Indikator Skala Provinsi/Nasional	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah, Proporsi UKM/IKM level provinsi, Nilai Transaksi Saham per Provinsi — satuan pengukuran berada di atas level kabupaten, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Disparitas Harga Kebumen, Rasio Kewirausahaan Daerah, PMTB (% PDRB), Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan, Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah, Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir, Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus
Data Energi & Lingkungan Agregat	Porsi EBT Bauran Energi, Intensitas Energi Primer, Indeks Ekonomi Hijau, Keanekaragaman Hayati — dihitung ESDM/KLHK di tingkat nasional/provinsi	% RT Akses Internet, IKLH Daerah, Timbulan Sampah Terolah
Data Ketenagakerjaan Tidak Terpilah	% Penyandang Disabilitas di sektor formal, % Pekerja di keahlian menengah-tinggi — survei Sakernas tidak memberikan output disagregasi kabupaten untuk variabel ini	Cakupan Fasilitas Publik Inklusif, Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Berdasarkan data capaian Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dan target Tahun 2027, terdapat beberapa temuan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2027:

- Indikator dengan capaian melampaui target nasional maupun daerah (Outstanding): Prevalensi Stunting (7,53% vs target 9,10% RKPD dan 9,05% target 2027) — Kebumen bahkan lebih baik dari rata-rata nasional (13,08% baseline 2025). Indeks Reformasi Hukum (99,54) jauh melampaui target nasional (3,30 dalam indeks berbeda skala). Kematian Ibu turun ke 9 kasus dari target 14. Ini mengindikasikan keberhasilan tata kelola program sektoral yang efektif.
- Indikator yang on-track namun butuh konsistensi: Cakupan JKN (98,80% menuju 99,07% 2027 dan 99,50% 2045), Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Indeks Pelayanan Publik, dan IKLH — semuanya bergerak pada lintasan yang tepat menuju target 2045. Konsistensi program prioritas dalam RKPD 2027 menjadi kunci.
- Indikator yang memerlukan akselerasi signifikan: Penurunan Emisi GRK Kumulatif baru mencapai 152.860 TonCO2eq, sementara target 2027 adalah 2.399.501 TonCO2eq. Perlu lompatan kebijakan besar melalui integrasi agenda dekarbonisasi dalam setiap program prioritas. RT Akses Sanitasi Aman baru 13,98%, target 2045 mencapai 81-86%, artinya dalam 20 tahun perlu kenaikan sekitar 67-72 poin persentase.
- Indikator dengan gap struktural yang memerlukan transformasi jangka panjang: Kemiskinan (13,58%) masih tertinggi ke-2 di Jawa Tengah meskipun penurunannya

terbaik. Proporsi Penduduk Berkualifikasi PT baru 4,83% dari target 8,56% (2027). PDRB Per Kapita Rp29 Jt vs target jangka panjang Rp128-151 Jt. Ketiganya hanya dapat diatasi melalui transformasi struktural ekonomi dan investasi SDM yang konsisten dan terencana.

Tema pembangunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 "Pemenuhan Infrastruktur dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan" merespons secara langsung kebutuhan akselerasi indikator-indikator tersebut. Infrastruktur jalan mendukung konektivitas ekonomi dan pariwisata; infrastruktur air dan sanitasi merespons gap IUP lingkungan; infrastruktur pendidikan dan kesehatan merespons gap IUP sosial; dan pengembangan pariwisata Geopark merespons kebutuhan transformasi ekonomi menuju target PDRB per kapita dan pengurangan kemiskinan jangka panjang.

Tabel 4.5.
Penyelarasan 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Nasional RPJPN 2025-2045 dengan Indikator Pembangunan Kabupaten Kebumen (Baseline 2025, Target 2027, Target 2045)

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
1. TRANSFORMASI									
Transformasi Sosial									
Kesehatan untuk Semua									
4	01.01.01.02	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	tahun	74,92	81,00	75,56	76,11	81,25	
Kesehatan ibu dan anak:									
6	01.01.01.04	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 KH	111	15	**9 (kasus)***	**14 (kasus)***	**10 (kasus)***	**) Proksi: Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus). Data Kebumen tersedia dalam kasus absolut, bukan rasio per 100.000 KH.*

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
7	01.01.01.05	b) Prevalensi Stunting pada balita (%)	%	13,08	5,00	7,53	9,05	5,26	
Penanganan Tuberkulosis:									
9	01.01.01.07	a) Cakupan TB Treatment Coverage (%)	%	91	100	95,00	95,00	100,00	
10	01.01.01.08	b) Angka Keberhasilan Pengobatan TB (%)	%	91	100	90,00	90,00	95,00	
11	01.01.01.09	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	%	88,72	99,50	98,80	99,07	99,50	
Pendidikan Berkualitas yang Merata									
Hasil Pembelajaran:									
a) % kab/kota mencapai SKM asesmen nasional:									
15	01.01.02.03	i) Literasi Membaca	%	51,50 - 53,50	90,04 - 92,04	**84,23(SD)/90,98(SMP)***	**85,29(SD)/88,30(SMP)***	**95,29(SD)/98,30(SMP)***	**) Proksi: Persentase Siswa yang Mencapai SKM Literasi Membaca SD dan SMP (%). Data Kebumen tersedia per jenjang satuan pendidikan, bukan per % kab/kota.*
16	01.01.02.04	ii) Numerasi	%	3,71 - 5,71	67,21 - 69,21	**81,59(SD)/86,79(SMP)***	**74,69(SD)/83,35(SMP)***	**86,69(SD)/93,35(SMP)***	**) Proksi: Persentase Siswa yang Mencapai SKM Numerasi SD dan SMP (%). Data Kebumen tersedia per*

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
									jenjang satuan pendidikan, bukan per % kab/kota.
b) % satuan pendidikan mencapai SKM:									
18	01.01.02.06	i) Literasi Membaca	%	52,24 - 54,24	80,14 - 82,14	**84,23(SD)/90,98(SMP)***	**85,29(SD)/88,30(SMP)***	**95,29(SD)/98,30(SMP)***	**) Proksi: Persentase Siswa yang Mencapai SKM Literasi Membaca SD dan SMP (%). Data Kebumen tersedia per jenjang siswa, bukan per satuan pendidikan.*
19	01.01.02.07	ii) Numerasi	%	25,83 - 27,83	67,21 - 69,21	**81,59(SD)/86,79(SMP)***	**74,69(SD)/83,35(SMP)***	**86,69(SD)/93,35(SMP)***	**) Proksi: Persentase Siswa yang Mencapai SKM Numerasi SD dan SMP (%). Data Kebumen tersedia per jenjang siswa, bukan per satuan pendidikan.*
20	01.01.02.08	b) Rata-rata Lama Sekolah > 15 thn (thn)	tahun	8,73-8,74	11,04 - 11,08	7,89	7,99	9,03	
21	01.01.02.09	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	tahun	13,12	14,48 - 14,49	13,42	14,21	16,67	
22	01.01.02.10	Proporsi Penduduk ≥15 thn Berkualifikasi PT (%)	%	8,30	8,18-13,11	4,83	8,56	12,71	

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
23	01.01.02.11	% Pekerja Lulusan Dikmentas di Keahlian Menengah-Tinggi (%)	%	58,85	75	N/A	N/A	N/A	
Perlindungan Sosial yang Adaptif									
25	01.01.03.01	Tingkat Kemiskinan (%)	%	8,67-9,17	0,00-0,50	**13,58**	**11,68-10,80***	**0,67-0,00**	*) Rakortekrenbang Jateng 2026
26	01.01.03.02	Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	19,81	80,50	22,62	47,27	71,32	
27	01.01.03.03	% Penyandang Disabilitas di Sektor Formal	%	20	55	**8,03***	**19,13***	**10,00***	*) Proksi: Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif (%).
2. TRANSFORMASI EKONOMI									
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi									
30	01.02.01.01	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	33,88 - 34,06	40,71 - 41,71	22,66	23,46	28,00-28,90	
Pengembangan Pariwisata:									
32	01.02.01.03	a) Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum (%)	%	3,03	7,08	3,01	3,36	6,23-6,41	
33	01.02.01.04	b) Jml Wisatawan Mancanegara (Ribu Org)	Ribu Org	4,68	14,96	**25 org***	**28 org***	**72-75 org***	*) Proksi: Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang). Data Kebumen tersedia dalam satuan Orang,

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
									bukan Ribu Orang.
34	01.02.01.05	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	1,00	1,25	**29,00***	**40,44***	**128,57-151,00***	**) Proksi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita (Juta Rupiah).*
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:									
36	01.02.01.07	a) Proporsi UKM Non-Pertanian Lv. Provinsi (%)	%	13,55	24,68	**2,96***	**3,23***	**8,00-10,76***	**) Proksi: Rasio Kewirausahaan Daerah (%).*
37	01.02.01.08	b) Proporsi IKM Level Provinsi (%)	%	6,08	11	**22,66***	**23,46***	**28,00-28,90***	**) Proksi: Rasio PDRB Industri Pengolahan (%).*
38	01.02.01.09	c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	3,35	9,10	2,96	3,23	8,00-10,76	
39	01.02.01.10	d) Rasio Volume Usaha Koperasi/PDRB (%)	%	10,14	10	1,46	1,89	2,68-7,37	
40	01.02.01.11	e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	%	1,73	5,37	2,69	4,22	5,59-6,08	
Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik:									
42	01.02.01.13	a) Tingkat Penganggur an Terbuka (%)	%	4,2-4,9	2,2-3,2	**4,95**	**4,50-4,00***	**2,26-1,96**	**) Rakortekrenbang Jateng 2026*
43	01.02.01.14	b) Proporsi Lapangan Kerja Formal (%)	%	42	83	N/A	N/A	N/A	
44	01.02.01.15	Tingkat Partisipasi Angkatan	%	2,63	3,13	66,41	67,96	77,37-78,17	

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
		Kerja Perempuan (%)							
Penerapan Ekonomi Hijau									
48	01.02.02.02	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	—	2,60	3,75	**75,31***	**74,80***	**76,14***	**) Proksi: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks).*
49	01.02.02.03	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	%	21,52	2,26	N/A	N/A	N/A	
Transformasi Digital									
51	01.02.03.01	Indeks Pembangunan TIK	Peringkat	6	7,12	**93,71***	**89,74***	**90,00***	**) Proksi: Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%).*
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global									
53	01.02.04.01	Koef. Variasi Harga Antarwilayah Provinsi	—	7,63	0,22	**-9,96***	**±10***	**±10***	**) Proksi: Disparitas Harga (%). Data koefisien variasi harga antarwilayah tingkat provinsi tidak tersedia; diganti Disparitas Harga Kebumen.*
54	01.02.04.02	Pembentukan Modal Tetap Bruto / PMTB (%)	%	1,30	1,30	18,80	19,28	21,02	
55	01.02.04.03	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,02	22,08	N/A	N/A	N/A	

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan									
58	01.02.05.02	a) Proporsi PDRB Wilayah Metropolitan/Nasional	%	2,41 (WM Semarang)	3,37 (WM Semarang)	N/A	N/A	N/A	
59	01.02.05.03	b) RT Akses Hunian Layak, Terjangkau (%)	%	3,01	100	70,97	84,98	100,00	
60	01.02.05.04	c) Persentase Desa Mandiri (%)	%	—	—	44,09	49,89	20,05	
3. TRANSFORMASI TATA KELOLA									
Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif									
63	01.03.01.01	Indeks Reformasi Hukum	—	3,30	4,03	99,54	98,55	90,00	
64	01.03.01.02	Indeks SPBE	—	3,34 (2022)	5	NA	4,11	5,00	
65	01.03.01.03	Indeks Pelayanan Publik	—	4,54 (2022)	5	4,33	4,66	5,00	
66	01.03.01.04	Indeks Integritas Nasional	—	3,42	4,10	75,96	81,44	92,01-96,10	
4. LANDASAN TRANSFORMASI									
Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial									
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional, Demokrasi Substansial:									
70	02.01.01.01	a) % Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	70	100	**99,54***	**98,55***	**90,00***	**) Proksi: Indeks Reformasi Hukum (Indeks).*
71	02.01.01.02	b) % Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	%	65	85	**1***	**4***	**0***	**) Proksi: Jumlah Kejadian Konflik*

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
									SARA (Kali).
72	02.01.01.03	Indeks Pembangunan Hukum	—	—	—	**99,54***	**98,55***	**90,00***	**) Proksi: Indeks Reformasi Hukum (Indeks).*
73	02.01.01.04	Proporsi Penduduk Merasa Aman Berjalan Sendirian (%)	%	74,56 (2020)	91,94	**1***	**4***	**0***	**) Proksi: Jumlah Kejadian Konflik SARA (Kali).*
74	02.01.01.05	Indeks Demokrasi Indonesia	—	Tinggi	Tinggi	N/A	N/A	N/A	
Stabilitas Ekonomi Makro:									
76	02.01.02.01	Rasio Pajak Daerah / PDRB (%)	%	1,10	2,05	0,54	0,62	0,62	
77	02.01.02.02	Tingkat Inflasi (%)	%	2,8-3,4	0,9-2,8	**-9,96***	**±10***	**±10***	**) Proksi: Disparitas Harga (%). Data tingkat inflasi spesifik Kebumen tidak tersedia dalam dokumen IUP; digunakan Disparitas Harga sebagai proksi stabilitas harga.*
Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:									
79	02.01.02.04	a) Total DPK Bank Milik Kab/Kota / PDRB (%)	%	1,06	3,21	1,46	1,61	1,70-1,73	
80	02.01.02.05	b) Aset Dana	%	0,72	0,05	**1,46***	**1,61***	**1,70-1,73***	**) Proksi: Total Dana Pihak Ketiga*

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
		Pensiun / PDRB (%)							*Pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB (%).*
81	02.01.02.06	c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi (Rp Miliar)	RpM	22.449,41	121.081,39	**18,80***	**19,28***	**21,02***	**) Proksi: Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB). Data nilai transaksi saham tidak relevan di tingkat kabupaten; digunakan PMTB sebagai proksi investasi daerah.*
82	02.01.02.07	d) Total Kredit / PDRB (%)	%	23,03	3,09	1,13	1,45	1,59-1,64	
83	02.01.02.08	Inklusi Keuangan (%)	%	3,84	4,13	**1,46***	**1,61***	**1,70-1,73***	**) Proksi: Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kab/Kota per PDRB (%).*
Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan:									
85	02.01.03.01	Jml Kerja Sama Sister Province/Sister City	—	—	—	**3,03***	**3,07***	**2,47-2,50***	**) Proksi: Kapabilitas Inovasi (Nilai).*
. KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI									
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju:									
88	02.02.01.01	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	—	59,9-59,92	73,29-73,99	**82,64***	**83,16***	**88,41***	*Proksi: Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb)*

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
									yang dilestarikan Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus
89	02.02.01.02	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	—	78,65 - 78,69	86,16 -86,6	**1***	**4***	**0***	*Proksi: Jumlah Kejadian Konflik SARA (Kali).*
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender:									
91	02.02.02.01	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga)	—	73,81 - 73,82	79,12 - 79,17	75,30	66,21-66,23	70,00-71,00	
92	02.02.02.02	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	—	0,57	0,17-0,16	0,149	0,321-0,297	0,16-0,10	
Lingkungan Hidup Berkualitas:									
94	02.02.03.01	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	—	0,33	0,41	**75,31***	**74,80***	**76,14***	**) Proksi: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks).*
96	02.02.03.03	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	—	2,84	69,88	75,31	74,80	76,14	

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
		Daerah (IKLH)							
97	02.02.03.04	b) RT Akses Sanitasi Aman (%)	%	13,08	85	13,98	17,97	81,00-85,93	
c) Pengelolaan Sampah:									
99	02.02.03.06	- Timbulan Sampah Terolah (%)	%	16,51 (2022)	90	54,59	57,84	73,98-90,00	
100	02.02.03.07	- Proporsi RT Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	%	25,48 (2022)	100	**54,59***	**57,84***	**73,98-90,00***	**) Proksi: Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%).*
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan:									
a. Ketahanan Energi:									
104	02.02.04.03	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	kWh	950	2.355	N/A	N/A	N/A	
105	02.02.04.04	- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/M	213	130	N/A	N/A	N/A	
106	02.02.04.05	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	%	12,57	2,90	9,24	8,35	4,10-2,38	
c. Ketahanan Air:									
108	02.02.04.07	- Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	m^3/det	5,03	1,98	**17,21***	**26,00***	**75,00-100,00***	**) Proksi: Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum*

No	Kode	Indikator IUP Nasional	Satuan	Target Nasional		Target Kebumen			Keterangan / Proksi
				Baseline 2025	Target 2045	Baseline 2025	Target 2027	Target 2045	
									Perpipaan (%).
109	02.02.04.08	- Akses RT Perkotaan Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	1,66	100	17,21	26,00	75,00-100,00	
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim:									
111	02.02.05.01	Indeks Risiko Bencana (IRB)	—	4,82	94,03 - 75,80	78,88	115,96-113,29	67,92-51,06	
Persentase Penurunan Emisi GRK (%):									
113	02.02.05.03	a. Kumulatif (TonCO2eq)	Ton CO2	0,25	1,27	152.859,76	2.399.500,84	17.748.644,94	
114	02.02.05.04	b. Tahunan (%)	%	12,58	70,91	N/A	N/A	N/A	
5. KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI									
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan									
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan									
Kesinambungan Pembangunan									

Keterangan:

**) Indikator proksi — sesuai kesepakatan bersama Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJPD 2025-2045, karena indikator IUP Nasional hanya tersedia disagregasinya di tingkat nasional/provinsi.*

Kolom bertanda (*) latar kuning: nilai Kebumen menggunakan indikator proksi yang relevan dan dapat diukur di tingkat kabupaten.

Sumber: IUP Nasional RPJPN 2025-2045; RPJPD Kabupaten Kebumen 2025-2045 (Perda No. 11/2024); RKPD Kabupaten Kebumen 2027; diolah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga berkomitmen untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang merupakan penjabaran operasional dari prioritas pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama disusun untuk memastikan bahwa sasaran

pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara lebih terarah melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 mengintegrasikan berbagai Kegiatan Prioritas Utama ke dalam program perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan masing-masing, sehingga tercipta sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung pencapaian target RPJMN Tahun 2025–2029. Integrasi tersebut juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan pembangunan yang selaras, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Kegiatan Prioritas Utama mencakup berbagai sektor pembangunan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah. Pada bidang transformasi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Kebumen mendukung penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab melalui Program Pengelolaan Informasi Publik, pengembangan ekosistem digital melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, penguatan keamanan informasi melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, transformasi digital layanan publik, serta peningkatan penerimaan daerah melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pada sektor ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam, dukungan diwujudkan melalui pengembangan pangan akuatik (blue food), pengembangan pangan hewani, pengembangan pangan lokal dan nabati, pengelolaan susut dan sisa pangan, konservasi sumber daya air, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi, peningkatan kualitas air sungai dan danau, pengelolaan persampahan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati. Program-program tersebut dilaksanakan melalui urusan Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Lingkungan Hidup sebagai upaya mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan kualitas sumber daya alam daerah.

Pada bidang pembangunan sumber daya manusia, Kabupaten Kebumen mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pencegahan anak tidak sekolah, pengembangan sekolah unggul, pemenuhan kebutuhan guru, serta penguatan riset dan inovasi daerah. Di bidang kesehatan, dukungan diarahkan pada penurunan angka kematian ibu dan anak, percepatan penurunan stunting, penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, pemberian makan bergizi, penguatan ekosistem pendukung program makan bergizi, penuntasan tuberkulosis, eliminasi penyakit kusta, penguatan pelayanan kesehatan primer, peningkatan kualitas rumah sakit, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.

Pada bidang penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Kebumen mendukung pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan daya saing UMKM melalui Kartu Usaha Produktif, penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, penyediaan perumahan yang terintegrasi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), serta pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa. Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap pengembangan olahraga berprestasi, peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara berbasis kinerja, serta penguatan karakter bangsa dan pengembangan kebudayaan melalui pelestarian cagar budaya dan kawasan pemajuan kebudayaan. Rangkaian program tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kebumen telah mengintegrasikan berbagai Kegiatan Prioritas Utama ke dalam program pembangunan daerah secara komprehensif, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus mempercepat terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Kebumen yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan.

Tabel 4.6.
Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU)

Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Program Daerah Dalam RKPD	Urusan
01.02.01 KP: Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	Program Pengelolaan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
	Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan		
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Program Daerah Dalam RKPD	Urusan
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala		
02.14.01 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Meningkatnya jumlah SDM digital dan terjaganya keamanan data	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persandian
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
	Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali		
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati *(biosafety dan biosecurity)*		
02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas air Permukaan		
	Meningkatnya kualitas pengujian parameter lingkungan		
	Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri		
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Meningkatnya Jumlah Kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Program Daerah Dalam RKPD	Urusan
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)	Tercapainya pemerataan akses Pendidikan berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
04.04.02 KP: Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, In-Service Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
04.08.02 KP: Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi		
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga
04.11.01 KP: Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Program Daerah Dalam RKPD	Urusan
04.11.02 KP: Pencegahan dan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui pendekatan spesifik dan sensitif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.11.04 KP: Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta & Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.15.01 KP: Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
04.15.02 KP: Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
04.15.03 KP: Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kesehatan

Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Program Daerah Dalam RKPD	Urusan
	mendorong peningkatan, pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	Daya Manusia Kesehatan	
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi Masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	Program Penignkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
07.12.01KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Terwujudnya Kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan	Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang menumbuhkan kapasitas SDM dan Lembaga	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan

Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Program Daerah Dalam RKPD	Urusan
Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	kebudayaan dalam berkarya		

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 merupakan arah kebijakan pembangunan nasional yang dirancang sebagai upaya percepatan transformasi pembangunan melalui delapan klaster prioritas, yaitu Kedaulatan Pangan, Kemandirian Energi dan Air, Pendidikan, Kesehatan, Hilirisasi dan Industrialisasi, Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana, Ekonomi Kerakyatan dan Desa, serta Penurunan Kemiskinan. Delapan klaster tersebut merupakan bentuk investasi pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat daya saing ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan PKPN didukung oleh penguatan tata kelola pemerintahan, transformasi digital, penegakan hukum, serta sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 melalui penyelarasan kebijakan, program, dan kegiatan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Penyelarasan tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan PKPN ke dalam program prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, sehingga pembangunan daerah tidak hanya diarahkan untuk mencapai target RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Program Kerja Prioritas Nasional diwujudkan melalui berbagai program perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan masing-masing klaster prioritas. Program-program tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan, dan diversifikasi pangan; peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; penguatan koperasi, UMKM, dan ekonomi desa; penyediaan infrastruktur dasar dan perumahan; pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya air; pengembangan transformasi digital pemerintahan; serta percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendukung agenda pembangunan nasional secara terpadu, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara Program Kerja Prioritas Nasional dengan kebijakan pembangunan daerah, berikut disajikan persandingan antara delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 dengan program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai kewenangan daerah.

Tabel 4.7.
Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027

No	Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	Arah Kebijakan/Program Nasional	Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2027	Program RKPD Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah
1	Kedaulatan Pangan	Penguatan produksi pangan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan	Pengembangan pangan akuatik (Blue Food), pengembangan pangan hewani, pengembangan pangan lokal dan nabati, pengelolaan susut pangan, konservasi sumber daya air	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan SDA	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan, DPUPR
2	Kemandirian Energi dan Air	Penguatan ketahanan air dan pengelolaan sumber daya air	Pengembangan SPAM terintegrasi, konservasi sumber daya air, peningkatan kualitas air sungai dan danau	Program Pengelolaan SDA, Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM, Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
3	Pendidikan	Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan	Pengembangan PAUD, revitalisasi sarana pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, sekolah unggul, peningkatan kompetensi guru, riset dan inovasi	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Riset dan Inovasi Daerah	Dindikpora, Bapperida
4	Kesehatan	Penguatan pelayanan kesehatan dan percepatan	Penurunan AKI-AKB, percepatan penurunan stunting, pemeriksaan	Program Pemenuhan UKP dan UKM, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Dinkes PPKB

No	Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	Arah Kebijakan/Program Nasional	Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2027	Program RKPD Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah
		peningkatan gizi masyarakat	kesehatan gratis, makan bergizi gratis, penuntasan TBC, penguatan layanan primer dan rumah sakit	Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	
5	Hilirisasi dan Industrialisasi	Penguatan industri berbasis potensi daerah dan inovasi	Pengembangan koperasi sektor produksi, UMKM, riset dan inovasi daerah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengembangan UMKM, Program Riset dan Inovasi Daerah	Disperindag KUKM, Bapperida
6	Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana	Penyediaan infrastruktur dasar, permukiman layak dan ketahanan wilayah	Pembangunan jalan, penyediaan PSU, pengembangan kawasan permukiman, pengelolaan persampahan, konservasi lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program PSU, Program Pengelolaan Persampahan	DPUPR, Disperkimhub, Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan
7	Ekonomi Kerakyatan dan Desa	Penguatan koperasi, UMKM, ekonomi desa dan transformasi digital	Pengembangan koperasi sektor produksi, pemberdayaan UMKM, peningkatan infrastruktur desa, kerja sama desa, digitalisasi pelayanan publik	Program Pemberdayaan UMKM, Program Pengembangan UMKM, Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Disperindag KUKM, Dispermades, Diskominfo
8	Penurunan Kemiskinan	Pengurangan kemiskinan melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemberdayaan	Dinsos P3A, Disperindag KUKM, Dindikpora, Dinkes PPKB

No	Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	Arah Kebijakan/Program Nasional	Dukungan Kabupaten Kebumen Tahun 2027	Program RKPD Kabupaten Kebumen	Perangkat Daerah
			pendidikan dan kesehatan, penyediaan rumah layak huni	UMKM, Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pemenuhan UKP dan UKM	

4.2.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2027 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema Pembangunan Daerah Tahun 2027 yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi. Tahun 2027 juga diarahkan untuk "Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah meliputi:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan; serta
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Program prioritas Provinsi Jawa Tengah untuk sektor kepariwisataan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
2. Pengembangan Destinasi Wisata Alam, Budaya dan Religi berdasarkan potensi wilayah;
3. Pengembangan Destinasi Wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng dan Rawa Pening;
4. *Event* olahraga memancing terbesar di Asia; serta
5. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan desa.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dalam Wilayah Pengembangan WP Keburejo yang tercantum dalam program unggulan Pengembangan Geo-Tourism (Geopark Kebumen dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan terpadu dengan Pariwisata DIY adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui;

- Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Kutoarjo–Borobudur yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api (Prameks Yogyakarta–Kutoarjo) serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata (Borobudur) dan perindustrian;
- Penyelesaian pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perekonomian (mendorong dan memfasilitasi optimalisasi terminal sebagai DTW dan sentra oleh-oleh UMKM serta pusat kuliner khas Kebumen dan Purworejo);
- Fasilitasi dorongan perpanjangan layanan Kereta Api Prameks dari semula Yogyakarta–Kutoarjo menjadi Yogyakarta–Kutoarjo–Kebumen;
- Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan Mandiraja–Gombong;
- Penanganan jalan provinsi pendukung akses dan konektivitas untuk pengembangan koridor wisata Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang; akses ke jalan nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY;
- Upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan keselamatan jalan wisata Pantai-Geopark Kebumen-KSPN Dieng. Kesemuanya mendukung penguatan struktur ruang dan keterkaitan wilayah yang merupakan peran Kabupaten Kebumen dalam memperkuat konektivitas antar pusat pertumbuhan di WP Keburejo.

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui;
   - Upaya mendorong pengembangan daya tarik wisata Geopark Kebumen dan Pantai;
   - Peningkatan upaya promosi keberadaan Geopark Kebumen sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain;
   - Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya;
   - Upaya mendorong pengembangan desa wisata Geopark Kebumen;
   - Pengembangan koridor wisata Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang;

- Pengembangan geopark melalui jelajah Geopark Kebumen, peningkatan kapasitas pengelolaan geopark serta perkuatan mitra kolaboratif kejaringan geopark global;
- Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) yang berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

Sementara itu, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2027 berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 beserta Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2027

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2027
Tujuan: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan			
	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,51 - 8,17
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	56,0 - 59,8
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,50
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah			
	Indeks Integritas Nasional	Angka	82,25
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,80 - 90,22
	Otonomi Fiskal Daerah	Persen	66,80

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun 2027
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan			
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60 - 7,40
	Tingkat Inflasi	Persen	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,78
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter			
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,63
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,65 - 4,08

Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025

Selain itu, dalam meningkatkan sinergitas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen juga mendukung beberapa program prioritas Jawa Tengah Tahun 2027 yang secara rinci tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.9.
Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
1	2	3		4	5
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	**- Tingkat Kemiskinan - PDRB per Kapita - Indeks Reformasi Birokrasi**				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas	**- Indeks Integritas Nasional - Indeks Demokrasi Indonesia**				

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
Pembangunan Daerah	**- Otonomi Fiskal Daerah**				
		PP.	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa		
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PI.	Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam "Jateng Ngopeni"		
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PI.	Smart response diwujudkan dengan Call Center 24 jam "Jateng Nglakoni"		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PI.	Digitalisasi manajemen arsip		
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PA.	Mengefektifkan Kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan public berbasis wilayah		
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		PA.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak		
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PA.	Pengembangan *sister province*		
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA.	Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "*Cyber Security* Jawa Tengah" dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		PA.	Program kerja sama Forkopimda		
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
		PT.	Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PT.	Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis hexahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan)		
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
					PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		PT.	Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah		
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		PI.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD		
				PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		PI.	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PA.	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK		
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PA.	Transformasi tata kelola tambang galian C		
				PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PP.	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA.	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan		
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		PA.	Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai Warisan budaya ke UNESCO		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PA.	Melanjutkan program Bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PA.	Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PA.	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PT.	Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender yang berkeadilan		
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		PT.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PPROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PI.	Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah		
				PROGRAM PENGELOLAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PENDAPATAN DAERAH	
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		PA.	Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal		
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		PA.	Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PT.	Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**- Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**				
		PP.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PP.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		PP.	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		PI.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)		
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAANUSAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI.	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI.	Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
				PROGRAM KONSERVASI	

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
		PI.	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PI.	Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa		
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-
		PI.	Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PA.	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		PA.	Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot)		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PA.	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		PA.	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PA.	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-
		PA.	Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-
		PA.	Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global		
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
		PA.	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api		

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	-
		PA.	Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan		
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		PA.	Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau)		
				PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PA.	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya		
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
		PA.	Pengembangan pertanian yang terintegrasi		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PA.	Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PA.	Pendirian Koperasi Buruh		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		PA.	Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora		
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PA.	Event olahraga memancing terbesar di Asia		

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PA.	Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PA.	Pengembangan investasi berbasis padat modal infrastruktur padat karya		
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		PA.	Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PA.	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
		PA.	Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa		
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PA.	Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah		
				PROGRAM PENATAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				ORGANISASI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA.	Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PA.	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata		
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		PT.	Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		PT.	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan		
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		PT.	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PT.	Revitalisasi embung		
				PROGRAM PENGELOLAAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		PT.	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau		
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
		PT.	Pengembangan *urban farming* untuk pertanian Kawasan perkotaan		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
		PT.	Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		PT.	Penguatan dan pembinaan e-sport Jawa Tengah Jawa Tengah		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PT.	Penyediaan benih yang berkualitas		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
		PT.	Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PT.	Regulasi pengembangan kawasan industri		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		PT.	Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha		
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		PT.	Membangun jaringan pasar		

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
			(ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (e-commerce)		
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		PT.	Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program "PERUSAHAAN ASUH"		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PP.	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go internasional*, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana		
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		PP.	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		PI.	Peningkatan bantuan keuangan desa		
				PROGRAM PENGELOLAAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				KEUANGAN DAERAH	
		PI.	Jambanisasi 100%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PI.	Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PA.	Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-
		PA.	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		PA.	Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
		PA.	Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PA.	Petani milenial gajian		

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PA.	Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah		
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA.	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana		
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PT.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin		
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		PT.	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya		
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		PT.	Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		PT.	Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PT.	Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat		
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
		PT.	Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PT.	Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta		
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		PP.	Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai		
				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	
		PI.	Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah Pekalongan, Demak dan Semarang)		
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PA.	Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali		
				PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
		PA.	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-
		PA.	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
		PT.	Menghadirkan infrastruktur yang *carbon neutral*		
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
		PT.	Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
		PT.	Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok		
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		PT.	Subsidi pangan murah		
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PI.	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru		
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	**- Indeks Modal Manusia - Tingkat Pengangguran Terbuka**				
		PP.	Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)		
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PA.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		PA.	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		PA.	Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra-kerja		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
		PA.	Pemberdayaan masyarakat hutan sosial	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Bukan Kewenangan Kabupaten
		PT.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PT.	Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan		

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		PT.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas		
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PT.	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila		
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		PP.	Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren		
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	PROGRAM PMEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		PP.	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
		PI.	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI.	Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet)		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PA.	Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PA.	Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		PA.	Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PA.	BOSDa Madrasah Aliyah		

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA.	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta	BUKAN KEWENANGAN KABUPATEN	BUKAN KEWENANGAN KABUPATEN
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
		PA.	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga		
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PA.	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PT.	Pap smear gratis (skrining Ca serviks)		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGANDAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PT.	Peningkatan operasional kader posyandu		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		PT.	Peningkatan kualitas hidup lansia		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PT.	Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Provinsi Jawa Tengah	Program Daerah (Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis) Provinsi Jawa Tengah		Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Dukungan Kabupaten Kebumen 2027
		PT.	Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah		
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PT.	Penanganan bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PT.	Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa		
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 35 Program Delegasi yang menjadi prioritas pembangunan lintas kabupaten/kota. Kabupaten Kebumen menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan program-program tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam program prioritas daerah serta inisiatif unggulan Bupati Kebumen. Keselarasan tersebut terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.10.
Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
1	Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas	ASN Nyaman, Terampil, Dan Inovatif Aktivitas: 1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Implementasi SAKIP 3. Penetapan Tata Kelola Pemerintah Digital (SPBE) 4. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik 5. Penerapan SPIP dan Whistle Blowing System	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Program pengelolaan Aplikasi Informatika
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
			Program Pencatatan Sipil
			Program Pendaftaran Penduduk
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
	ASN dan perangkat desa.	6. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 8. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 9. Implementasi sistem Merit 10. Penyelenggaraan Seleksi Terbuka JPT 11. Penyelenggaraan Diklatpim (PKA dan PKP) 12. Pengembangan kompetensi ASN melalui program SINAU 13. Penguatan kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah dengan masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, dan pemerintah desa.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Kepegawaian Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun Aktivitas: 1. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 2. Pemilihan Duta Pelajar Anti Narkoba	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		Plesir Bareng & Bakulan Laris Aktivitas: 1. Pengembangan daya tarik wisata sejarah makam dan tempat ibadah Muslim di wilayah Kabupaten Kebumen 2. Memfasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal 3. Peningkatan literasi terkait produk tersertifikasi halal kepada UMKM melalui sosialisasi dan dan fasilitasi bekerjasama dengan BPJPH Kemenag	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
3	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Desa Berdaya Aktivitas: 1. Pelaksanaan Posyandu 6 SPM 2. Peningkatan Kegiatan PKK 4. Lomba Vlog GKSTTB (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana) 5. Bimbingan Teknis Aparatur Pemerintah Desa 6. Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Administrasi Pemerintahan Desa

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
4	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Lingkungan Bersih Lestari Aktivitas: 1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3. Perbaikan RTLH 4. Pembangunan jalan dan drainase lingkungan 5. Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat di kawasan permukiman kumuh	Program Penataan Bangunan Gedung Program Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Njamu Bergas Aktivitas: 1. Penambahan jaringan SPAM dan sambungan SPAM ke rumah warga 2.Pembangunan dan rehabilitasi drainase jalan kabupaten 3. Peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten 4. Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan 5. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
5	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Anak Soleh Aktivitas: 1. Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Sekolah Mengaji (Program Maghrib Mengaji (SE Bupati tentang Kegiatan Maghrib Mengaji) 2. Kegiatan Amaliah Ramadhan 3. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat 4. Beasiswa Santri	Program Pengelolaan Pendidikan
6	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Muda Kreatif Aktivitas: 1. Pelatihan kewirausahaan pemuda 2. Pembinaan organisasi pemuda 3. Seleksi pemuda wirausaha Tingkat Kabupaten Kebumen 4. Seleksi Pemuda Pelopor Kader Kewirausahaan,	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
		5. Lomba Jambore Pemuda Kabupaten Kebumen	
7	Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Muda Kreatif Aktivitas: 1. Pengembangan Sport Center di Stadion Candradimuka 2. Pemanfaatan GOR di Kec Karanganyar, Petanahan, Prembun, Gombong, Kebumen	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Sregep Ngode Aktivitas: 1. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan pemasaran digital, serta pengembangan konten promosi destinasi dan desa wisata 2. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan dalam memfasilitasi pembinaan, pelatihan, matching job vacancy dan penempatan tenaga kerja disabilitas pada sektor riil 3. Pelatihan bagi disabilitas melalui BLK untuk meningkatkan kompetensi dan atau kewirausahaan	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Penempatan Tenaga Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Perempuan Berdaya Aktivitas: 1. Penguatan Kelembagaan dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis bagi Kecamatan Berdaya 2. Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Pelatihan Teknis Olahan Pangan atau Non Pangan Potensi Lokal Desa	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Plesir Bareng & Bakulan Laris Aktivitas: 1. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan pemasaran digital, serta pengembangan konten	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
		promosi destinasi dan desa wisata 2. Promosi dan pemasaran pariwisata daerah (termasuk desa/kampung wisata) melalui berbagai even di Kabupaten Kebumen yang menjadi bagian kalender wisata Kabupaten Kebumen 3. Pengembangan destinasi wisata unggulan dan kawasan Geopark Kebumen, peningkatan amenitas, aksesibilitas, atraksi wisata	
9	Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.	Plesir Bareng & Bakulan Laris Aktivitas: 1. Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan pemasaran digital, serta pengembangan konten promosi destinasi wisata 2. Promosi dan pemasaran pariwisata daerah melalui berbagai even di Kabupaten Kebumen yang menjadi bagian kalender wisata Kabupaten Kebumen 3. Pengembangan destinasi wisata unggulan dan kawasan Geopark Kebumen, peningkatan amenitas, aksesibilitas, atraksi wisata 4. Pengembangan Kawasan Industri	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Sregep Ngode Aktivitas: 1. Penyelenggaraan Job Fair 2. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dengan pelaku industri agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja
10	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian,	ASN Nyaman, Terampil, Dan Inovatif Aktivitas: 1. Bimtek anti korupsi 2. Diklat PPNS	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
	Kejaksanaan, BPK dan KPK		
11	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Sehat dan Cerdas Bareng Biyunge Aktivitas: 1. Pendampingan Tim Ahli Sp.OG dan Sp. Anak ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal Neonatal 2. Baksos, Cek Kesehatan dan Pengobatan Gratis, Khitan Massal, dan Layanan Speling 3. Pembangunan Puskesmas Pembantu 4. Pelayanan KB MKJP	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	Bukan Kewenangan Kabupaten	Bukan Kewenangan Kabupaten
13	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	Biyunge Momong Aktivitas: 1. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya 2. Penguatan lembaga dengan melakukan pelatihan/bimbingan teknis tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Manajemen Kasus bagi Kecamatan Berdaya	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Perempuan
14	Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu	Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge Aktivitas: 1. Menyusun Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) : Sosialisasi Permenkes No. 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan penambahan Nakes Wajib di Puskesmas yang tadinya hanya 9 nakes (Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Nutrisionis atau Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
		Medis, Apoteker, Promosi Kesehatan) berubah menjadi 13 nakes (Dokter Dengan Kompetensi Kedokteran Keluaga Layanan Primer, Psikologi Klinis dan Fisioterapis) 2. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK 5 Tahun sampai dengan 2030 3. Menyusun rekomendasi kebutuhan SDMK ke Kemenkes Menghitung kebutuhan Fasyankes beserta Puskesmas Pembantu. 4. Melakukan Desk data dengan Bagian Organisasi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5. Menyusun Peta Jabatan dilakasanakan jika Rekomendasi Kebutuhan SDMK dari Kementerian Kesehatan sudah ada sebagai dasar pembuatan Peta Jabatan	
15	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Biyunge Momong Aktivitas: 1. Pendampingan terhadap korban anak dan perempuan yg mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan penelantaran 2. Memberikan Layanan Pendampingan psikologi, bantuan hukum, kesehatan, mediasi, pemulangan dan reintegrasi	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Perlindungan Khusus Anak Program Perlindungan Perempuan
16	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	Plesir Bareng & Bakulan Laris Aktivitas: 1. Memfasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal 2. Peningkatan literasi terkait produk tersertifikasi halal kepada UMKM melalui sosialisasi dan dan fasilitasi bekerjasama dengan BPJPH Kemenag 3. Fasilitasi P-IRT	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
17	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru	Petani Makmur Dan Swadaya Pangan Aktivitas:	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
	sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	1. Sertifikasi halal terhadap tukang jagal dari RPU yang telah tersertifikasi NKV 2. fasilitasi pelatihan untuk tukang jagal yang belum memiliki sertifikat atau yang masa berlakunya telah habis. 3. Sosialisasi dan edukasi terpadu kepada tukang jagal di RPH/RPU/TPH/Masjid atau panitia kurban terkait pentingnya kompetensi tukang jagal yang telah memiliki sertifikasi halal 4. Melakukan koordinasi dengan BI, Baznas, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah terkait kolaborasi dalam pemberian	
18	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Muda Kreatif Aktivitas: Pelatihan konten kreator desa	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Plesir Bareng & Bakulan Laris Aktivitas: Peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, pelatihan pemasaran digital, serta pengembangan konten promosi destinasi dan desa wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
19	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	Plesir Bareng & Bakulan Laris Aktivitas: 1. Subsidi bunga 2. Inkubasi bisnis 3. Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM 4. Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri 5. Promosi Penggunaan Produk Lokal 6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk di Pemkab melalui e-Katalog Lokal 7. Pembinaan dan pendampingan pembentukan koperasi 8. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan koperasi beserta anggotanya	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
20	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
21	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
22	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Lingkungan Bersih Lestari Aktivitas: 1. Sosialisasi Edukasi Kebencanaan 2. Gladi Kebencanaan (TTX, CPX, FTX) 3. Peningkatan Kapasitas Destana 4. Bimbingan Teknis Tim Reaksi Cepat 5. Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan dan *Early Warning System* 6. Kegiatan Pelatihan, Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran 7. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Pemeliharaan dan pengelolaan RTH 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA 10. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 11. Fasilitasi, Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 12. Pelaksanaan konservasi lingkungan hidup 13. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten kepad para Pengelola dan Aktivis Lingkungan Hidup 14. Pendampingan penyusunan Perdes Lingkungan Hidup 15. Fasilitasi, pembinaan dan pendampingan sekolah Adiwiyata 16. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
23	Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
24	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana		Program Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Program Penanggulangan Bencana Program Penanganan Bencana Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
25	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	Muda Kreatif Aktivitas: 1. Pemberian tali asih untuk para atlet dan pelatih yang berprestasi (minimal tingkat provinsi)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
		2. Pemberian Uang pembinaan untuk atlet berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	
26	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	Sehat dan Cerdas Bareng Biyunge Aktivitas: 1. Proses Penerimaan PDPD (Peserta Didik Penyandang Disabilitas) melalui jalur afirmasi pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2. Assesmen pada anak berkebutuhan khusus sebagai langkah awal penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus 3. Pengadaan sarpras sekolah inklusi 4. Peningkatan kapasitas Guru Pengajar PDBK	Program Pengelolaan Pendidikan
27	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	Petani Makmur Dan Swadaya Pangan Aktivitas: 1. Memberikan legalitas usaha kepada pembudidaya ikan kecil agar terdata dan mendapatkan pembinaan. 2. Mengatur dan mendukung kegiatan budidaya ikan agar berkelanjutan, produktif, dan ramah lingkungan. 3. Mengelola seluruh aspek teknis dan kelembagaan perikanan budidaya untuk peningkatan produksi dan kesejahteraan pelaku usaha, mulai dari pembentukan kelembagaan (Pokdakan), pembenihan, teknis budidaya termasuk kesehatan ikan sampai dengan pemasarannya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
28	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	Desa Berdaya Aktivitas: 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3. Bimbingan Teknis Pengelola Kerja Sama Antar Desa 4. Pelatihan Kewirausahaan 5. Pelatihan Digital Marketing	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Kerja Sama Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
29	Cek kesehatan gratis	Sehat dan Cerdas Bareng Biyunge Aktivitas: 1. Skrining penyakit menular dan penyakit tidak menular melalui cek kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
		2. Skrining TBC terintegrasi dengan CKG 3. Pemberian tatalaksana hipertensi, Diabetes Melitus dan dislipidemia hasil CKG 4. Cek kesehatan gratis pegawai SPPG 5. Cek kesehatan gratis karyawan RS 6. Cek kesehatan gratis dan skrining TBC bhabinkamtibmas	
30	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Biyunge Momong Aktivitas: 1. Pengurusan ijin sekolah rakyat 2. Penjangkauan dan penetapan peserta didik sekolah rakyat 3. Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait, supaya informasi ttg Migran korban tindak Kekerasan bisa terinformasikan dan tersampaikan ke Dinas Sosial 4. Fasilitasi Bantuan Tidak Terduga kepada Migran Korban Tindak Kekerasan 5. Fasilitasi Perlindungan dan Pendampingan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Program Pemberdayaan Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Perlindungan Khusus Anak Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
31	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	Lingkungan Bersih Lestari Aktivitas: Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
32	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;	Perempuan Berdaya Aktivitas: 1. Fasilitasi Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan dengan Pelatihan Teknis Olahan Pangan berdasarkan Potensi Lokal Desa 2. Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Eks Pekerja Migran Indonesia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
33	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun Aktivitas: 1. Pendidikan Politik Masyarakat 2. Kegiatan dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan 1. Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan

No	Program Delegasi Provinsi	Program Unggulan Bupati	Program Prioritas (Nomenklatur)
			Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
34	Peningkatan operasional kader posyandu	Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge Aktivitas: 1. Lomba Kader Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan 2. Lomba Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan 3. Jambore Kader Posyandu Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
35	Peningkatan kualitas hidup lansia	Cerdas Dan Sehat Bareng Biyunge Aktivitas: 1. Pelatihan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Usia Lanjut bagi Tenaga Kesehatan 2. Senam Lansia Bersama di wilayah Puskesmas. 3. Penyelenggaran Bina Keluarga Lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sumber: Perda Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupeten Kebumen Tahun 2025-2030

Sebagai bentuk sinergitas dan dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan/tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu mengoptimalkan berbagai aktivitas yang selaras dengan pengembangan sektor pariwisata serta penguatan ekonomi syariah. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Indikator Tematik Prov. Jawa Tengah Tahun 2027	Target Kab. Kebumen	Satuan	Aktivitas Kab. Kebumen Mendukung Tematik Prov. Jawa Tengah Tahun 2027
Pariwisata				
1.	Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan oleh Provinsi Jawa Tengah	15	Unit	1. Melaksanakan pemetaan DTW Alam beresiko tinggi (contoh : rawan kecelakaan, rawan bencana, dll.) 2. Melakukan penilaian skala prioritas DTW Alam beresiko tinggi yang akan dijadikan *pilot project;*

No	Indikator Tematik Prov. Jawa Tengah Tahun 2027	Target Kab. Kebumen	Satuan	Aktivitas Kab. Kebumen Mendukung Tematik Prov. Jawa Tengah Tahun 2027
				3. Melaksanakan edukasi, pelatihan dan workshop terkait peyusunan SOP Pelayanan dan Manajemen Risiko kepada SDM pengelola DTW
2.	Jumlah Desa/Kampun Wisata Baru yang Dicanangkan Provinsi Jawa Tengah	35	Unit	1. Melaksanakan pemetaan calon Desa Wisata/Kampung Wisata yang akan masuk ke databese Provinsi; 2. Mendukung Provinsi melakukan penilaian skala prioritas calon Desa Wisata sesuai potensi masing-masing desa menjadi shortlist database: 3. Melakukan pendampingan, pelatihan, *workshop*, pengembangan desa menjadi Desa Wisata yang akan ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah
3.	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah	5	Unit	Memfokuskan pengembangan pada daya tarik wisata sejarah makam dan tempat ibadah Muslim di wilayah Kabupaten Kebumen
4.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.000.000	Orang	1. Penyelenggaraan *Event* Pariwisata dan Budaya; 2. Promosi Pemasaran Pariwisata; 3. Pameran Pariwisata Daerah; 4. Penguatan Paket Pariwisata.
5.	Jumlah Konten Kreator yang dilatih oleh Provinsi Jawa Tengah	20	Orang	Pelatihan konten kreator desa wisata di Kebumen
Ekonomi Syariah				
6.	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal yang akan difasilitasi BPJPH Kemenag dan Provinsi Jawa Tengah	21.068	Produk	1. Memfasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal 2. Peningkatan literasi terkait produk tersertifikasi halal kepada UMKM melalui sosialisasi dan dan fasilitasi bekerjasama dengan BPJPH Kemenag
7.	Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal yang difasilitasi oleh Provinsi	2	Unit	Sertifikasi halal terhadap tukang jagal dari RPU yang telah tersertifikasi NKV
8.	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	11.425.095.636	Rupiah	1. Penguatan Regulasi: Sistem Payroll Zakat ASN; 2. Digitalisasi: Optimalisasi Bank Jateng sebagai kanal utama penghimpunan; 3. Koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Kebumen untuk sinkronisasi data dan teknis penyaluran.
9.	Jumlah Penyaluran	13 Milyar	Rupiah	1. Mengarahkan BUMD, BLUD, dan mitra kerja daerah untuk menggunakan pembiayaan syariah, serta

No	Indikator Tematik Prov. Jawa Tengah Tahun 2027	Target Kab. Kebumen	Satuan	Aktivitas Kab. Kebumen Mendukung Tematik Prov. Jawa Tengah Tahun 2027
	Pembiayaan Syariah oleh Bank Jateng di wilayah Kabupaten Kebumen			integrasi program bantuan UMKM ke pembiayaan (bukan hanya hibah); 2. Penguatan UMKM sebagai basis pembiayaan syariah; 3. Sinkronisasi program pembangunan dengan pembiayaan syariah; 4. Penguatan peran TPKAD Kabupaten/Kota bersama OJK, BI, dll.
10.	Jumlah Tukang Jagal yang Orang Tersertifikat Halal yang difasilitas Provinsi Jawa Tengah	8	Orang	1. Fasilitasi pelatihan untuk tukang jagal yang belum memiliki sertifikat atau yang masa berlakunya telah habis. 2. Sosialisasi dan edukasi terpadu kepada tukang jagal di RPH/RPU/TPH/Masjid atau panitia kurban terkait pentingnya kompetensi tukang jagal yang telah memiliki sertifikasi halal 3. Melakukan koordinasi dengan BI, Baznas, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah terkait kolaborasi dalam pemberian fasilitasi pelatihan

Sumber: Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap arah kebijakan tematik Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 telah mencakup seluruh indikator prioritas, mulai dari pengembangan destinasi wisata alam, pengembangan desa wisata, penguatan wisata ramah muslim, peningkatan kunjungan wisatawan, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan konten kreator. Berbagai aktivitas yang direncanakan menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen dalam meningkatkan kualitas daya tarik wisata, memperkuat promosi dan pemasaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi antarperangkat daerah, pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah provinsi agar pengembangan pariwisata tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan (length of stay), meningkatkan belanja wisatawan (tourist spending), membuka lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap indikator tematik Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 telah mencakup aspek utama pengembangan industri halal, pembiayaan syariah, penghimpunan dana sosial keagamaan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan daerah, pendekatan yang dilakukan perlu bergeser dari sekadar pemenuhan target indikator menjadi

penguatan ekosistem ekonomi syariah. Penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui integrasi antara sertifikasi halal, pengembangan UMKM halal, pembiayaan syariah, digitalisasi ekonomi, optimalisasi zakat produktif, serta kolaborasi dengan BPJPH, BAZNAS, Bank Jateng Syariah, OJK, Bank Indonesia, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi syariah tidak hanya mendukung pencapaian indikator Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga berpotensi menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan daya saing UMKM, dan percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

4.2.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2027 dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan tahun 2025 dengan mempertimbangkan permasalahan, isu aktual, isu strategis, sinkronisasi dengan pokok-pokok pikiran DPRD, potensi kewilayahan dan pendekatan partisipatif untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting karena prioritas pembangunan daerah bertujuan untuk mengatasi permasalahan daerah serta tantangan hingga peluang dari munculnya isu-isu aktual maupun isu strategis. Prioritas pembangunan daerah tersebut terkait erat dan selaras dengan arah kebijakan Tahun 2027 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan Kabpaten Kebumen Tahun 2027 sebagai berikut.

1) Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
3) Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
4) Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
5) Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
6) Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
7) Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.

8) Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
9) Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan.
10) Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
11) Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan.
12) Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik.

Keterkaitan prioritas pembangunan dengan hasil evaluasi sampai dengan tahun 2025, permasalahan, isu aktual, dan isu strategis selanjutnya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.12.
Keterkaitan Hasil Evaluasi sampai dengan Tahun 2025, Permasalahan, Isu Aktual, Isu Strategis dan Prioritas Daerah pada RKPD Tahun 2027

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
Angka kemiskinan sebesar 13,58 persen pada tahun 2025 dan masih menduduki peringkat kedua kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa Tengah.	Masih tingginya tingkat kemiskinan;	Penanggulangan kemiskinan;	Prioritas 1: Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2025 mencapai 17,61% atau sedikit di bawah target sebesar 17,67%. Meskipun berbagai indikator pelayanan kesejahteraan sosial, seperti pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan, rehabilitasi sosial, perlindungan penyandang disabilitas, dan penanganan korban bencana telah mencapai 100%, upaya penanganan PPKS masih menghadapi tantangan berupa besarnya jumlah PPKS, perlunya peningkatan kualitas dan pemutakhiran data, serta belum meratanya akses pelayanan kesejahteraan sosial.	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Prioritas 3: Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar
Berdasarkan data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan dari Rp9.028.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp10.658.000,00 pada tahun 2025. Namun demikian, pengeluaran per kapita Kabupaten Kebumen masih menjadi yang terendah dibandingkan wilayah sekitar termasuk dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan pengeluaran per kapita dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen.	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Prioritas 1: Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Prevalensi balita gizi kurang pada tahun 2021 mencapai 0,55% meningkat menjadi 4,10% pada tahun 2025. Sementara itu, prevalensi balita gizi buruk sempat meningkat dari 0,03% pada tahun 2021 hingga mencapai			Prioritas 3: Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
0,059% pada tahun 2023 dan dapat menurun kembali pada tahun 2024 menjadi 0,02%. Prevalensi *stunting* di Kabupaten Kebumen dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami tren penurunan atau membaik. Menurut eletronik Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) prevalensi *stunting* Kabupaten Kebumen sebesar 12,13 pada tahun 2021 dan terus menurun menjadi 7,53 pada tahun 2025. Sedangkan jumlah penderita *stunting* juga relatif menurun dari 8.572 orang pada tahun 2021 menjadi 5.190 pada tahun 2025.			berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar
Pasca Pandemi Covid-19, jumlah kasus kematian ibu kembali menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2025. Perhitungan AKI juga menunjukkan penurunan dari 201,60 pada tahun 2021 menjadi 71,06 pada tahun 2025.			
Data menunjukkan jumlah kasus kematian bayi terus meningkat selama periode 2021-2024 yaitu dari 136 kasus pada tahun 2021 menjadi 103 kasus pada tahun 2024. Namun kemudian menurun pada tahun 2025 menajdi 111 kasus. Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan dari 6,96 pada tahun 2021 menjadi 8,73 pada tahun 2025.			
Tercermin dari Indeks Pendidikan yang mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu populasi yang diperoleh dari perhitungan komponen IPM dimensi pendidikan yaitu RLS dan HLS. Dalam perhitungannya batas atas untuk RLS adalah 15 tahun (setara dengan tingkat Pendidikan sarjana) dan untuk HLS adalah 18 tahun (perkiraan maksimum dalam sistem pendidikan formal). Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan Indeks Pendidikan Kabupaten Kebumen relatif meningkat dari 62,25 pada Tahun 2021 menjadi 63,60 pada tahun 2025. Dengan capaian baru sekitar 63,60 menunjukkan perlu upaya peningkatan RLS maupun HLS agar mencapai skala maksimum 100 yaitu RLS sebesar 15 tahun dan HLS sebesar 18 tahun.			Prioritas 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
Kinerja RLS Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan dari 7,55 pada tahun 2021 menjadi 7,89 pada tahun 2025. Hal ini merepresentasikan bahwa penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2025 rata-rata menjalani pendidikan formal setara 7,89 tahun atau hampir menamatkan Kelas VIII (SMP). Hal ini menunjukkan masih jauh dari kondisi RLS yang diinginkan yaitu selama 15 tahun (atau sampai dengan jenjang Diploma III). Masih rendahnya RLS dapat diasumsikan sebagai salah satu komponen penghambat pertumbuhan IPM di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu Tahun 2020-2025.			
Kinerja urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2025 terdapat 123 organisasi kepemudaan dengan tingkat keaktifan mencapai 43%, persentase wirausaha muda sebesar 3%, serta peningkatan prestasi olahraga menjadi 44 prestasi yang diraih oleh 228 atlet. Meskipun demikian, jumlah kegiatan olahraga masih terbatas dan upaya pembibitan atlet usia dini masih belum optimal sehingga memerlukan penguatan pembinaan dan pengembangan olahraga secara berkelanjutan.	Masih belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan pembinaan olahraga;	Peningkatan kualitas sumber daya manusia;	Prioritas 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.
Terjadi penurunan rasio kewirausahaan di Kabupaten Kebumen yang sempat mencapai 4,06% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi hanya 2,96% pada tahun 2025.	Masih rendahnya produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;	Prioritas 6: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Jumlah industri kecil dan menengah hanya bertambah 53 unit selama periode Tahun 2021-2025 sehingga mencapai 56.473 unit pada Tahun 2025 yang menunjukkan masih rendahnya pertumbuhan/penambahan industri kecil dan menengah. Sementara itu, jumlah industri besar baru mencapai 4 unit hingga Tahun 2025 yang menunjukkan masih sedikitnya industri besar.			
Selain sebagai bahan pangan utama, Kabupaten Kebumen juga masih menjadi lumbung padi nasional. Namun, produktivitas padi cenderung mengalami penurunan dari 6,93 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 5,86 ton/ha pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena anomali cuaca menyebabkan mundurnya musim tanam. Seperti halnya produktivitas padi,			Prioritas 1: Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
5 komoditas bahan pangan utama lokal juga mengalami penurunan yaitu dari 6,74 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 6,10 ton/ha pada tahun 2025.			
Persentase koperasi aktif cenderung meningkat dari 89,4% pada tahun 2021 menjadi 89,80% pada tahun 2025 berdasarkan data yang diperoleh dari *Online Data System* (ODS) Kementerian Koperasi. Sementara itu, nilai volume usaha koperasi juga terus meningkat dari sekitar Rp 175 Milyar pada tahun 2021 menjadi Rp 608 Milyar pada tahun 2025. Sementara rasio volume usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 0,59% pada Tahun 2021 menjadi 1,46% pada Tahun 2025. Angka ini menunjukan rasio tersebut menunjukkan masih rendahnya volume usaha koperasi.			Prioritas 5: Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Data menunjukkan produksi perikanan tangkap mengalami fluktuasi dari 9.646.661,67 kg pada tahun 2021 menjadi 12.898.015,49 kg pada tahun 2023, namun menurun pada tahun 2024 menjadi 9.522.860 kg atau turun sebesar 26,17% antara periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya produksi meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 10.255.079,00 kg.			Prioritas 8: Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi produksi garam. Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir produksi garam cenderung menurun dari 155.945,00 kg pada Tahun 2021 menjadi hanya 38.676,00 kg pada Tahun 2025 atau turun sebesar 75,19% antara periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.			
Berdasarkan data *baseline* yang ada pada tahun 2025 menunjukkan Indeks Akses Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen sebesar 4,26. Dengan skor sebesar 4,26 mencerminkan tingkat akses keuangan di Kabupaten Kebumen masih berada pada tingkat menengah-rendah.			Prioritas 10: Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik untuk memastikan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan publik

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
Terjadi net ekspor barang dan jasa yang selalu negatif (walaupun semakin mengecil atau membaik) setiap tahunnya yaitu dari –5,54% pada Tahun 2021 menjadi -3,28% pada Tahun 2025. Angka minus menunjukkan adanya defisit perdagangan dimana produk/komoditas dari luar daerah lebih banyak terjual di Kabupaten Kebumen dibandingkan produk/komoditas yang dihasilkan Kebumen yang terjual di luar daerah.			Prioritas 4: Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Rata-rata lama tinggal wisatawan cenderung menurun sejak 2022 menjadi 1,37 hari pada tahun 2025. Untuk itu perlu diwujudkan paket wisata yang terintegratif agar wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Kebumen. Namun demikian tingkat hunian akomodasi seperti hotel dan tempat penginapan tetap meningkat dari 28,58% pada Tahun 2021 menjadi 50,54% pada Tahun 2025 karena didorong aktivitas lain seperti MICE (*Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions*). Namun dengan tingkat hunian masih sedikit di atas 50% menunjukkan tingkat hunian belum optimal karena menurut patokan umum berdasarkan tren industri perhotelan menunjukkan tingkat hunian 60-70% pada banyak kasus dianggap menguntungkan untuk di wilayah kota kecil.			
Indeks infrastruktur daerah menurun dari 64,59% pada tahun 2021 menjadi 39,89% pada tahun 2025. Yang dalam hal ini ditunjang oleh tiga komponen yaitu indeks infrastruktur pekerjaan umum yang naik menjadi 50,02% pada tahun 2025. Indeks ini diperoleh dari agregat persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap, persentase infrastuktur sumber daya air kewenangan kabupaten dalam kondisi baik dan persentase pelayanan air bersih perpipaan. Indeks infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman menunjukkan turun tajam dari 54,50% pada tahun 2021 menjadi 2,99% pada tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase rumah tidak layak huni tertangani serta persentase penanganan kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Sedangkan indeks infrastruktur perhubungan fluktuatif dari 82,72% pada tahun 2021 menjadi 76,78% pada tahun 2025. Indeks ini merupakan agregat dari persentase ketersediaan perlengkapan jalan, persentase ketersediaan terminal tipe-C serta persentase alat uji KIR dalam keadaan baik. Capaian kinerja sampai	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah;	Prioritas 7: Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
dengan tahun 2025 yang masih rendah menunjukkan perlunya peningkatan sekaligus akselerasi dalam upaya pemantapan infrastruktur daerah.			
Hingga tahun 2025 terdapat 470,960 km jalan Kabupaten dalam kondisi baik atau 46,40%, dalam kondisi sedang sepanjang 284,430 km atau 27,96%, dalam kondisi rusak ringan sepanjang 139,030 km atau 13,67% dan dalam kondisi rusak berat sepanjang 122,730 km atau 12,07%. Dari data tersebut menunjukkan persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten hingga Tahun 2025 sebesar 74,27% yang diperoleh dari proporsi baik ditambah proporsi sedang. Dengan proporsi lebih dari 70% menunjukkan infrastruktur jalan telah cukup baik dan tidak mengganggu fungsi jalan secara signifikan. Namun demikian masih terjadi permasalahan penurunan kualitas jalan dalam kondisi mantap yang diantaranya dikarenakan oleh kondisi kerusakan yang masih belum tertangani, kondisi geografis/tanah serta banyaknya volume kendaraan yang melewati over dimension over loading (ODOL)/melebihi kapasitas serta tingginya curah hujan yang mempengaruhi kekuatan konstruksi jalan.			
Terjadi penurunan jembatan dalam kondisi baik dari 144 unit pada tahun 2021 menjadi hanya 2 unit tahun 2025.			
Kinerja rasio konektivitas di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat dari 0,35 pada Tahun 2021 menjadi 0,64 pada Tahun 2025 walaupun sempat mencapai puncaknya pada Tahun 2022 sebesar 0,82. Penurunan ini terjadi dikarenakan semakin meningkatnya pertumbuhan volume kendaraan akibat meningkatnya aktivitas masyarakat yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan baik lebar jalan maupun rute alternatif.			
Panjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten hingga tahun 2025 yaitu irigasi teknis sekunder sepanjang 186.105meter dan irigasi teknis tersier sepanjang 28.300 meter. Proporsi irigasi dalam kondisi baik terus meningkat dari 75,17% pada tahun 2021 menjadi 78,85% pada tahun 2025, sedangkan proporsi irigasi kondisi sedang relatif menurun dari 1,55% pada tahun 2021 menjadi 1,40% pada tahun 2025. Sementara itu, irigasi kondisi rusak ringan menurun dari 1,23% pada tahun 2021 menjadi			

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
1,13% pada tahun 2025 dan irigasi kondisi rusak berat menurun dari 22,04% pada tahun 2021 menjadi 18,62% pada tahun 2025. Secara menyeluruh, kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen (IKSI) pada tahun 2025 telah mencapai 59,35%. Indeks ini digunakan untuk mengetahui kondisi kinerja sistem irigasi yang meliputi prasarana fisik, produktifitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Dengan nilai indeks sebesar 59,35% maka kinerja sistem irigasi kewenangan Kabupaten Kebumen masih dikategorikan berkinerja kurang dan perlu perhatian.			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kebumen cukup fluktuatif dan cenderung menurun dari 64,43 pada tahun 2021 menjadi 75,31 pada Tahun 2025 sehingga masih masuk pada kategori baik. Hal ini dikarenakan fluktutifnya kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Hingga tahun 2025 Indeks Kualitas Udara (IKU) pada posisi 81,49 dan IKA pada posisi 75,53 atau masuk kategori baik sedangkan IKTL pada posisi 63,50 atau masuk kategori sedang.	Belum optimalnya pembangunan berwawasan lingkungan;	Peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan;	Prioritas 8: Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Kinerja penanganan sampah di Kabupaten Kebumen dilihat dari persentase jumlah sampah yang tertangani cenderung menurun dari 53,75% pada tahun 2021 menjadi 22,63% pada tahun 2025.			
Penurunan emisi GRK yang mengalami kinerja membaik dari 145.971,89 TonCO2eq pada tahun 2023 menjadi 152.859,75 TonCO2eq pada tahun 2025. Walaupun terus membaik namun angka ini masih cukup jauh dari target basis data pada Tahun 2027 yang terdapat pada RPJPD Kabupaten Kebumen yang harus dapat menurunkan sebesar 2.399.500,84 TonCO2eq. Target Tahun 2027 ini sendiri ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan Kabupaten Kebumen terhadap komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi GRK.			
IRBI Kabupaten Kebumen menunjukkan kecenderungan menurun yang menunjukkan lebih menurun risiko terhadap bencana dari 114,67 pada tahun 2021 menjadi 78,88 pada tahun 2025. Untuk meminimalisir risiko bencana, dari ketiga komponen pembentuk IRBI dapat diupayakan dengan			

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
menurunkan komponen kerentanan dan peningkatan komponen kapasitas dalam penanggulangan bencana. Kapasitas Kabupaten Kebumen dalam mengelola bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan ditunjukkan dengan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang mencapai 0,93 pada tahun 2025 dimana perlu memaksimalkan peningkatan 71 indikator penilaian Indeks Kapasitas Daerah.			
Akses masyarakat umum terhadap teknologi informasi dalam hal ini internet juga harus terus ditingkatkan karena kemudahan akses ini dapat membantu aktivitas masyarakat baik sosial, budaya maupun ekonomi. Hal ini tercermin dari persentase rumah tangga dengan akses internet yang pada Tahun 2024 telah mencakup 89,41% naik menjadi 93,71% pada Tahun 2025. Selain kemudahan, keamanan dan pemanfaatan yang bersifat positif terhadap akses internet oleh masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan masalah sosial, budaya dan ekonomi di tengah masyarakat.	Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Pengoptimalan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;	Prioritas 9: Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan
Nilai SAKIP Kabupaten Kebumen menunjukkan peningkatan dari 65,18 pada tahun 2021 menjadi 68,92 pada tahun 2025 dengan predikat B (Baik). Hal ini menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Namun demikian terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja diantaranya pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon II atau unit kerja.			Prioritas 10: Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan
Sebagai upaya pencegahan korupsi, capaian Indeks Integritas Nasional Kabupaten Kebumen berdasarkan Survei Penilaian Integritas menunjukkan kinerja yang meningkat dari 76,46 pada Tahun 2021 menjadi 78,19 pada Tahun 2023 namun juga turun menjadi 75,96 pada Tahun 2025 dan masuk dalam kategori Waspada. Penurunan terjadi dikarenakan alasan yang sama yaitu adanya faktor koreksi kejadian korupsi dan rata-rata responden internal menjawab menurun.			

HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	PERMASALAHAN UTAMA DAERAH TAHUN 2027	ISU STRATEGIS DAERAH TAHUN 2027	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2027
Sepanjang tahun 2021-2025, di Kabupaten Kebumen telah terjadi paling tidak satu kali kejadian konflik SARA pada tahun 2021, 2023, 2024 dan 2025. Meskipun tahun 2022 tidak terdapat kejadian konflik SARA.	Belum optimalnya keamanan dan ketertiban;	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat;	Prioritas 12: Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik
Kinerja persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan terus meningkat dari 3,60% pada Tahun 2021 menjadi 22,89% pada tahun 2025 dimana dengan capaian tersebut masih perlu upaya lebih untuk terus ditingkatkan.	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan.	Peningkatan pemajuan kebudayaan.	Prioritas 11: Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan
Jumlah pengunjung tempat bersejarah cenderung belum optimal dan beluim mampu tumbuh pesat dimana pada tahun 2021 terdapat 51.150 pengunjung dan pada Tahun 2025 menjadi 53.850 pengunjung. Angka kunjungan ini menunjukkan tempat bersejarah belum menarik wisatawan dimana masyarakat lebih tertarik mengunjungi daya tarik wisata terbaru yang lebih menarik dan *instagramable* untuk ditampilkan di akun media sosial.			
Kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir meningkat dari 11,00% pada tahun 2021 menjadi 21,23% pada tahun 2025. Namun angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan dalam RPJMD yaitu target pada tahun 2025 sebesar 22,63%. Diperlukan upaya yang lebih serius agar kelompok kesenian semakin aktif untuk mengadakan pertunjukan kesenian.			

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

Dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyelarasan antara strategi utama, strategi prioritas, dan arah kebijakan dengan tema pembangunan Kabupaten Kebumen. Selengkapnya strategi utama, strategi prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Tahun 2027 mendasari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
      - Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
      - Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial
      - Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah
      - Pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, penataan kawasan wisata dan sarana penunjang lainnya
      - Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
      - Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli Masyarakat
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga
      - Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
      - Pembinaan kepemudaan dan olahraga
      - Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan
      - Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
      - Pengembangan sekolah unggulan dan inklusif yang merata dan berkelanjutan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan memiliki strategi prioritas meliputi:

a. Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah
   - Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi
   - Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
   - Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan

4. Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya
      - Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis kewilayahan dan ekonomi kreatif
      - Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat
      - Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match
      - Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
5. Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan
      - Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
6. Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM memiliki strategi prioritas meliputi:

a. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital
   - Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya

7. Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan
      - Pengembangan akses transportasi yang mendukung aktivitas perekonomian, khususnya kepariwisataan dan UMKM
      - Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
8. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
      - Pengembangan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
      - Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim danusaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional memiliki strategi prioritas meliputi:
   a. Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Peningkatan pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi
- Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan
- Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT
- Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

10. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien
        - Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
        - Akselerasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi
          dan intensifikasi guna kemandirian daerah
        - Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah
11. Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal memiliki strategi prioritas meliputi:
    a. Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
        - Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian
        - Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan
        - Penguatan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan citra positif daerah
        - Pengembangan kurikulum pesantren yang memadukan pendidikan agama, kewirausahaan, keterampilan hidup (*life skills*), dan penguatan karakter
12. Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat memiliki strategi prioritas meliputi:

a. Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik. Adapun strategi ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:
   - Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif
   - Pembentukan forum komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan mengantisipasi potensi konflik.

Tabel 4.13.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau bagi masyarakat	1. Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan
			AK 2. Penanganan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial masyarakat dengan basis data tunggal yang integratif.
			AK 3. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 4. Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah
			AK 5. Pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, penataan kawasan wisata dan sarana penunjang lainnya
			AK 6. Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif
			AK 7. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat
	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat	2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar
			AK 1. Pemenuhan kelengkapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, ruang keterampilan, dan sarana olahraga

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 2. Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal
			AK 3. Pembinaan kepemudaan dan olahraga
			AK 4. Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan
			AK 5. Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan
			AK 6. Pengembangan sekolah unggulan dan inklusif yang merata dan berkelanjutan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan	3.Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar
			AK 1. Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 2. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi
			AK 3. Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan
			AK 4. Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan
	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah	Penguatan ekonomi kerakyatan yang produktif, kreatif, dan inovatif serta peningkatan sumber pertumbuhan ekonomi baru	4. Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		
	Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata		
	Meningkatnya kesempatan kerja		
			AK 1. Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya
			AK 2. Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
			AK 3. Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat
			AK 4. Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program *link and match*
			AK 5. Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal
	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dan atraktif	5. Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan
			AK 2. Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
	Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi	Penguatan wirausaha muda dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan penguatan UMKM	6. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Akselerasi peran aktif pemuda dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM yang inovatif dan berbasis digital

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 2. Pengembangan *creative hub* dan *co-working space* untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya
Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan, dan inklusif	Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan infrastruktur berbasis kewilayahan	7. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik
	Meningkatnya aksesibiltas dan mobilitas masyarakat		
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum		
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan		
			AK 1. Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan
			AK 2. Pengembangan akses transportasi

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			yang mendukung aktivitas perekonomian, khususnya kepariwisataan dan UMKM
			AK 3. Pengembangan wilayah melalui optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan ketahanan bencana daerah	8. Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah		
			AK 1. Pengembangan produk ramah lingkungan yang melibatkan UMKM, perguruan tinggi, dan komunitas lokal
			AK 2. Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			lokal yang berkelanjutan
Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT dan ASN yang profesional	9.Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Peningkatan pengembangan kompetensi PNS secara berkelanjutan sesuai kebutuhan jabatan dan hasil analisis gap kompetensi
			AK 2. Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan
			AK 3. Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 4. Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif	10. Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan
	Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern		
			AK 1. Akselerasi pengelolaan keuangan daerah berbasis program pembangunan yang efektif dan efisien
			AK 2. Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi
			AK 3. Akselerasi pengelolaan pendapatan daerah berbasis ekstensifikasi dan intensifikasi guna kemandirian daerah

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 4. Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah
Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	Penguatan karakter masyarakat berbasis norma agama dan identitas budaya lokal	11.Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan
			AK 1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan festival, pameran, dan pertunjukan seni budaya secara rutin sebagai sarana promosi dan pelestarian
			AK 2. Mendorong partisipasi generasi muda dalam pelestarian dan inovasi seni budaya serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM dan kepariwisataan
			AK 3. Penguatan diplomasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan citra positif daerah

TUJUAN RPJMD TAHUN 2025-2029	SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI UTAMA RPJMD TAHUN 2025-2029	STRATEGI PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2027
			AK 4. Pengembangan kurikulum pesantren yang memadukan pendidikan agama, kewirausahaan, keterampilan hidup (*life skills*), dan penguatan karakter
	Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	Pemenuhan rasa aman, damai, dan gotong royong dalam masyarakat	12.Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik
			AK 1. Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif
			AK 2. Pembentukan forum komunikasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga hubungan harmonis dan mengantisipasi potensi konflik

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 juga telah selaras dengan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah maupun Nasional Tahun 2027. Selanjutnya dukungan program prioritas (termasuk target dan pagu indikatifnya) terhadap Prioritas Daerah dan Prioritas

Nasional Tahun 2027. Secara lengkap keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2027 tersaji pada Tabel 4.6.

Tabel 4.14.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional Tahun 2027

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Unggul dan Sejahtera	**Sasaran 1.1:** Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan masyarakat	**Prioritas 1** Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**Prioritas 2** Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Unggul dan Sejahtera	**Sasaran 1.2 :** Meningkatnya kualitas Pendidikan	**Prioritas 2** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	**Prioritas 3** Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	**Prioritas 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Tujuan 1 : Mewujudkan Masyarakat Yang Unggul dan Sejahtera	**Sasaran 1.3 :** Meningkatnya drajat kesehatan masyarakat	**Prioritas 3** Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka		

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		penguatan pelayanan dasar		
Tujuan 3 : Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	**Sasaran 3.3 :** Meningkatnya kualitas infrastrruktur pekerjaan umum	**Prioritas 4** Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**Prioritas 2** Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Tujuan 3 : Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	**Sasaran 3.1:** Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat	**Prioritas 5** Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan	**Prioritas 2** Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
	Sasaran 3.3 : Meningkatnya kualitas infrastrruktur pekerjaan umum	penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan		bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru **Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Tujuan 3 : Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	**Sasaran 3.4:** Meningkatnya pemerataan Pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan	**Prioritas 6** Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**Prioritas 2** Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
				industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	**Sasaran 2.2:** Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah **Sasaran 2.3:** menignkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi			
Tujuan 3 : Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	**Sasaran 3.2 :** Meningkatnya Aksesibilitas dan mobilitas masyarakat	**Prioritas 7** Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik	**Prioritas 2** Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	**Sasaran 2.4** Meningkatnya Pengembangan Potensi dan daya tarik wisata			
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	**Sasaran 2.1 :** Menignkatnya Produktivitas Sektor pertanian daerah	**Prioritas 8** Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**Prioritas 2** Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Tujuan 4: Mengimplementasikan birokrasi di seluruh bidang Pembangunan	**Sasaran 4.1:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	**Prioritas 9** Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka	**Prioritas 1** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	**Prioritas 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan		
Tujuan 4: Mengimplementasikan birokrasi di seluruh bidang Pembangunan	**Sasaran 4.1:** Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah **Sasaran 4.3 :** Meningkatnya kualitas pelayanan public berbasis IT	**Prioritas 10** Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan		
Tujuan 5 : Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan	**Sasaran 5.1 :** Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya **Sasaran 5.2 :** Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan	**Prioritas 11** Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**Prioritas 3** Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	**Prioritas 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
		Prioritas 12 Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial	**Prioritas 1** Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan	**Prioritas 1** Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Prioritas Kabupaten Kebumen	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik	Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, 2026

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sejumlah 12 prioritas secara keseluruhan prioritas tersebut selaras dengan 3 prioritas daerah Provinsi Jawa Tengah, dan 8 prioritas nasional pada RPJMN. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional sebesar 100% karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah telah sesuai dan selaras dengan prioritas nasional.

Selain itu, dalam perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 perlu memperhatikan keselarasan antara tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2027. Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 telah selaras dengan Tujuan, Sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen dengan indikator dan target pada Tahun 2027 serta Prioritas Daerah Tahun 2027 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.15.
Keselarasan Tujuan, Sasaran RPJMD, Prioritas Daerah Kabupaten Kebumen dengan Prioritas Nasional Tahun 2027

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	74,00*	**Prioritas 1** Peningkatan pembangunan dan	**Prioritas 4** Memperkuat pembangunan sumber daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
	Tingkat Kemiskinan (Persen)	11,68-10,80*	pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan **Prioritas 2** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar **Prioritas 3** Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar	manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Sasaran 1.1 Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen)	20,89		
Sasaran 1.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (Indeks)	66,11		
Sasaran 1.3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan (Indeks)	86,33		
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,00-7,85*	**Prioritas 4** Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	40,44		

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
Sasaran 2.1 Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Persen)	3,00	pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan **Prioritas 5** Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan **Prioritas 6** Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan **Prioritas 8** Mendorong pengembangan ekonomi hijau	ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru **Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Sasaran 2.2 Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen terhadap Provinsi Jawa Tengah (Persen) Net Ekspor Barang dan Jasa (Persen)	2,14 -2,50		
Sasaran 2.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perekonomian Kerakyatan Berbasis Hilirisasi	LPE Kategori Industri Pengolahan (Persen)	6,95		
Sasaran 2.4. Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Daya Tarik Wisata	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Persen)	12,07		
Sasaran 2.5 Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,50-4,00*		

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
			dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	
Tujuan 3. Menyediakan Infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif	Indeks Infrastruktur	49,53	**Prioritas 7** Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik **Prioritas 8** Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata	**Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru **Prioritas 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta
	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	2.399.500,84		
Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Pemukiman Masyarakat	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Indeks)	8,30		
Sasaran 3.2 Meningkatnya Aksesibiltas dan Mobilitas Masyarakat	Indeks Infrastruktur Perhubungan (Indeks)	87,67		
Sasaran 3.3. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum (Indeks)	52,62		
Sasaran 3.4 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri (Persen)	49,89**		

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
Sasaran 3.5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	66,32	guna percepatan penanggulangan kemiskinan	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi **Prioritas 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
Sasaran 3.6 Meningkatnya Kualitas Antisipasi dan Penanganan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (Indeks)	115,96-113,29		
Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	87,42**	**Prioritas 9** Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan **Prioritas 10** Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran	**Prioritas 7** Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan penyelundupan
Sasaran 4.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP (Nilai)	71,27		
Sasaran 4.2 Meningkatnya Efektivitas dan Kapabilitas Pengendalian Intern	Nilai Maturitas SPIP (Nilai)	3,65		
Sasaran 4.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,66		

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
			berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan	
Tujuan 5. Meningkatkan Pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilainilai keagamaan	Indeks Kebudayaan (Indeks)	17,18	**Prioritas 11** Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan **Prioritas 12** Menjamin keamanan dan kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan	**Prioritas 1** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia **Prioritas 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru **Prioritas 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
	Indeks Kesalehan Sosial (Indeks)	83,16		
Sasaran 5.1 Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (Wbtb) yang Dilestarikan (Persen)	14,65		
Sasaran 5.2 Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Berbasis Nilai-Nilai Keagamaan	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan (Persen)	81,00		
	Indeks Ketertiban Umum (Indeks)	100,00		

Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Daerah	Prioritas Nasional
			pelayanan publik	masyarakat yang adil dan makmur

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, 2026
*Keterangan: *) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*
***) target telah disesuaikan dengan mendasari kinerja pada Tahun 2025*

4.2.3 Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2027

Secara konsisten prioritas pembangunan daerah dalam pelaksanaannya didukung oleh program prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagai berikut.

Tabel 4.16.
Konsistensi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Kabupaten Kebumen Tahun 2027

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
PRIORITAS 1 Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	Dinas Sosial dan P3A
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Sosial dan P3A

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	Dinas Sosial dan P3A
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	Dinas Pertanian dan Pangan
PRIORITAS 2 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/ Paket A	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTS/Paket B	
		Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Prestasi Kepramukaan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PRIORITAS 3 Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Dinas Kesehatan dan PPKB
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Success Rate)*	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan dan PPKB
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan	Dinas Kesehatan dan PPKB

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	Dinas Kesehatan dan PPKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Dinas Kesehatan dan PPKB
PRIORITAS 4 Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersedian Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yang tertangani	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Air Payau	DLHKP
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	DLHKP
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	DLHKP
		Nilai Produksi Garam	
		Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	Disperindag KUKM
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga	Disperindag KUKM
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Disperindag KUKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga LPK yang berizin	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PRIORITAS 5 Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	DPMPTSP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	DPMPTSP
PRIORITAS 6 Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Disperindag KUKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	Disperindag KUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	Disperindag KUKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PRIORITAS 7 Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Disperkimhub
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Disperkimhub
	PROGRAM PERUMAHAN DAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Disperkimhub

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Disperkimhub
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Disperkimhub
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan drainase yang tertangani	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Kantor dalam kondisi Baik dan Inklusif	DPUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	DPUPR
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	DPUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang ditetapkan dengan Perbup Penegasan Batas Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Layanan Administrasi Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PRIORITAS 8 Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pascabencana guna percepatan penanggulangan kemiskinan Mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan,			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik	DLHKP
		Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Udara yang Kualitasnya Baik	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	DLHKP

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup	DLHKP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	DLHKP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	DLHKP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	DLHKP
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD	BPBD
		Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
		Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial dan P3A
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase potensi pemanfaatan EBT	Dinas Tenaga Kerja
PRIORITAS 9 Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan	**SEKRETARIAT DAERAH**		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Sekretariat Daerah
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	Sekretariat Daerah
		Capain Penerapan SPM Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	Disdukcapil
	KEPEGAWAIAN		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kinerja ASN dengan Predikat Minimal Baik	BKPSDM
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BKPSDM
	KEWILAYAHAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kewilayahan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Kewilayahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Kewilayahan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) ditingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
PRIORITAS 10 Pemenuhan dan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis data kemiskinan terpadu untuk memastikan program pemberdayaan ekonomi dan percepatan penanggulangan kemiskinan	**SEKRETARIAT DAERAH**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah
		Nilai IKM Perangkat Daerah	
	PERENCANAAN		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD	Bapperida

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Bapperida
		Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	Bapperida
	KEUANGAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	BPKPD
	URUSAN PENGAWASAN		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat Daerah
PRIORITAS 11 Pemanfaatan acara keagamaan dan budaya untuk memperluas promosi produk UMKM, pariwisata lokal, dan peluang kerja berbasis potensi unggulan lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PRIORITAS 12 Menjamin keamanan dan	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
kepastian hukum di kawasan potensial investasi melalui penguatan koordinasi aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka penguatan pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bakesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Bakesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase kewaspadaan nasional	Bakesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM	INDIKATOR	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, 2026

4.2.4 Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas pada Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Kebumen juga memberikan dukungan program daerah terhadap program prioritas pada prioritas nasional RKP Nasional Tahun 2027 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 4.17.
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas pada Prioritas Nasional RKP Tahun 2027

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas Nasional 1 : Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia				
Program Pembangunan 1.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	79,00 persen	Bakesbangpol
Program Pembangunan 1.2. Penguatan Demokrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	79,00 persen	Bakesbangpol

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 1.3 Pemantapan Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Informatif	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pembangunan 1.4 Kepemimpinan Nasional yang Berdasarkan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	78,00 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	79,00 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	100,00 persen	Bakesbangpol
Program Pembangunan 1.5 Transformasi Akses terhadap Keadilan dan Pengarustamaan HAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Prioritas Nasional 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan				

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru				
Program Pembangunan 2.1 Penguatan Pertahanan Negara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	100,00 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	100,00 persen	Bakesbangpol
Program Pembangunan 2.2. Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH			
Program Pembangunan 2.3. Penguatan Sistem Keamanan Negara	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	79,00 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	79,00 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	100,00 persen	Bakesbangpol
Program Pembangunan 2.4. Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	100,00 persen	Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 2.5. Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH			
Program Pembangunan 2.6 Keamanan Siber, sandi, dan sinyal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pembangunan 2.7 Diplomasi Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	1,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	907,85 miliar rupiah	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	23,08 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92,50 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100,00 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	100,00 persen	DPMPTSP
Program Pembangunan 2.8 Hubungan Internasional yang Kondusif	TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH			
Program Pembangunan 2.9 Swasembada Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	90,29 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	3660,56 kkal	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	63,04 persen	Dinas Pertanian dan Pangan

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman	94,12 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9,37 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersedian Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	29,21 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yang tertangani	100,00 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	1,53 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan	100,00 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	77,50 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut	261,97 miliar rupiah	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Air Payau	155,30 miliar rupiah	DLHKP
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	8,91 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	43,54 miliar rupiah	DLHKP
		Nilai Produksi Garam	0,215 miliar rupiah	
		Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	7,82 persen	
Program Pembangunan 2. 10 Swasembada Energi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase potensi pemanfaatan EBT	100,00 persen	Dinas Tenaga Kerja

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 2.11 Swasembada Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	81,18 persen	DPUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM	4,23 persen	DPUPR
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik	40,00 persen	DLHKP
Program Pembangunan 2.12 Pemenuhan Akses Air Minum Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM	4,23 persen	DPUPR
Program Pembangunan 2.13 Percepatan Pemenuhan Akses Sanitasi Aman untuk Masyarakat	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	3,63 persen	Disperkimhub
Program Pembangunan 2.14 Ekonomi Syariah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pencapian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	39,92 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	13,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	2,21 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	1,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,39 indeks	Sekretariat Daerah
Program Pembangunan 2.15 Ekonomi Digital	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	13,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	2,21 persen	Disperindag KUKM

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	1,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	0,60 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92,50 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	100,00 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	907,85 miliar rupiah	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	23,08 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	13,97 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,39 nilai	Sekretariat Daerah
Program Pembangunan 2.16 Ekonomi Sirkular Industri	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	65,51 persen	DLHKP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup	51,42 persen	DLHKP

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10,25 persen	DLHKP
Prioritas Pembangunan 2.17 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se Kabupaten	33.369,191 hektar	DLHKP
Prioritas Pembangunan 2.18 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik	40,00 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se Kabupaten	33.369,191 hektar	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	65,51 persen	DLHKP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup	51,42 persen	DLHKP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	23,91 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3,48 persen	DLHKP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan	100,00 persen	DLHKP

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
		Perusakan Lingkungan Hidup		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10,25 persen	DLHKP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Tata Ruang	84,00 persen	DPUPR
Program Pembangunan 2.19 Penerapan Ekonomi Sirkular dari Sumber Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara Partisipatif (Hulu)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10,25 persen	DLHKP
Program Pembangunan 2.20 Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Hilir)	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10,25 persen	DLHKP
Program Pembangunan 2.21 Pembangunan Rendah Karbon	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100,00 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik	40,00 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se Kabupaten	33.369,191 hektar	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	65,51 persen	DLHKP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup	51,42 persen	DLHKP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,	Persentase Desa dan Kelurahan yang	23,91 persen	DLHKP

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup		
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3,48 persen	DLHKP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100,00 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10,25 persen	DLHKP
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Tata Ruang	84,00 persen	DPUPR
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	1,53 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	8,91 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Prosentase potensi pemanfaatan EBT	100,00 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	81,18 persen	DPUPR
Program Pembangunan 2.22 Tenaga Kerja Hijau	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan besar yang telah menyusun RTK Mikro	51,61 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga LPK yang berizin	100,00 persen	Dinas Tenaga Kerja
Program Pembangunan 2.23 Pengelolaan Hutan Lestari	TIDAK SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAERAH			

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 2.24 Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut	261,97 miliar rupiah	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Air Payau	155,30 miliar rupiah	DLHKP
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	8,91 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	43,54 miliar rupiah	DLHKP
		Nilai Produksi Garam	0,215 miliar rupiah	
		Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan	7,82 persen	
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi				
Program Pembangunan 3.1 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	89,04 persen	Disperkimhub
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	78,37 persen	DPUPR
Program Pembangunan 3.2. Penguatan Konektivitas dan Transisi Energi Listrik	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase potensi pemanfaatan EBT	100,00 persen	Dinas Tenaga Kerja
Program Pembangunan 3.3. Penguatan Konektivitas dan Ekosistem Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100,00 persen	Dinas Komunikasi dan Informatika

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 3.4. Pengembangan Pengairan dan Irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	81,18 persen	DPUPR
Program Pembangunan 3.5 Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	12,00 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	13,49 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	26,43 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	13,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	2,21 persen	Disperindag KUKM
Program Pembangunan 3.6 Pendalaman Sektor Keuangan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,39 nilai	Sekretariat Daerah
Program Pembangunan 3.7 Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	17,19 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara	100,00 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	13,97 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Program Pembangunan 3.8 Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	13,97 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	100,00 persen	Bapperida

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas				
Program Pembangunan 4.1 Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	44,83 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/ Paket A	100,00 persen	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTS/Paket B	87,03 persen	
		Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV	80,06 persen	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	65,04 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	16,81 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Pengajuan Izin yang dilayani	100,00 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembangunan 4.2. Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	65,04 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	16,81 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 4.3 Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	16,81 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembangunan 4.4 Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	44,83 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Kasar (APK)SD/MI/ Paket A	100,00 persen	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTS/Paket B	87,03 persen	
		Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / DIV	80,06 persen	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Presentase Pengajuan Izin yang dilayani	100,00 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembangunan 4.7 Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	100,00 persen	Bapperida
Program Pembangunan 4.9 Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	81,00 nilai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Pembangunan 4.10 Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB	72,30 nilai	Dinas Kesehatan dan PPKB
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	89,50 nilai	
		Nilai SAKIP RSUD Dr. Soedirman	71,27 nilai	
		Nilai SAKIP RSUD Prembun	74,85 nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Prembun	91,48 nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Soedirman	90,45 nilai	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	55,00 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakrediatasi Paripurna	94,00 persen	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis	90,00 persen	

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
		(*Treatment Success Rate*)		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	94,50 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan	79,67 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	21,00 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
Program Pembangunan 4.11 Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	21,00 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
Program Pembangunan 4.12 Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	55,00 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakrediatasi Paripurna	94,00 persen	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	90,00 persen	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	21,00 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
Program Pembangunan 4.13 Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinkes PPKB	72,30 nilai	Dinas Kesehatan dan PPKB
		Indeks Kepuasan Masyarakat Dinkes PPKB	89,50 nilai	
		Nilai SAKIP RSUD Dr. Soedirman	71,27 nilai	
		Nilai SAKIP RSUD Prembun	74,85 nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Prembun	91,48 nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Soedirman	90,48 nilai	

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	55,00 persen	Dinas Kesehatan dan PPKB
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakrediatasi Paripurna	94,00 persen	
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	90,00 persen	
Program Pembangunan 4.14 Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Program Pembangunan 4.15 Peningkatan Kualitas Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	72,09 persen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Program Pembangunan 4.16 Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Program Pembangunan 4.17 Peningkatan Kesetaraan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Program Pembangunan 4.18 Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi Olahraga	36,10 persen	Dinas Pendidikan, 4.7 dan Olahraga
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri				

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 5.1 Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	13,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	2,21 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	1,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	39,92 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Dokumen yang terfasilitasi	82,00 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	100,00 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan besar yang telah menyusun RTK Mikro	51,61 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga LPK yang berizin	100,00 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	27,52 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47,27 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	907,85 miliar rupiah	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	23,08 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92,50 persen	DPMPTSP

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 5.2. Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	39,92 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Dokumen yang terfasilitasi	82,00 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	100,00 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	907,85 miliar rupiah	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	23,08 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92,50 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan besar yang telah menyusun RTK Mikro	51,61 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga LPK yang berizin	100,00 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	27,52 persen	Dinas Tenaga Kerja
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47,27 persen	Dinas Tenaga Kerja
Program Pembangunan 5.3. Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	89,04 persen	Disperkimhub
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	78,37 persen	DPUPR
	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Peningkatan Nilai	0,60 persen	Disperindag KUKM

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan Retribusi Pasar		
Program Pembangunan 5.4. Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	907,85 miliar rupiah	DPMPTSP
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	23,08 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92,50 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100,00 persen	DPMPTSP
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	100,00 persen	DPMPTSP
Program Pembangunan 5.5 Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	0,60 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	1,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	13,20 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertambahan Usaha Mikro	2,21 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	39,92 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Dokumen yang terfasilitasi	82,00 persen	Disperindag KUKM
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI	Tersedianya Informasi Industri	100,00 persen	Disperindag KUKM

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	INDUSTRI NASIONAL	secara Lengkap dan Terkini		
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan				
Program Pembangunan 6.1 Pembangunan Wilayah Metropolitan	BUKAN WILAYAH METROPOLITAN			
Program Pembangunan 6.2. Pembangunan Ibu Kota Nusantara	BUKAN WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA			
Program Pembangunan 6.3. Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00 persen	Disperkimhub
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	3,63 persen	Disperkimhub
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	12,96 persen	Disperkimhub
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	17,97 persen	Disperkimhub
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM	4,23 persen	DPUPR
Program Pembangunan 6.4. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang ditetapkan dengan Perbup Penegasan Batas Desa	51,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama	60,00 persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Layanan Administrasi Baik	76,25 persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik	30,00 persen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembangunan 6.5 Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	82,85 persen	Disdukcapil
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	99,91 persen	Disdukcapil
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100,00 persen	Disdukcapil
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pembangunan 6.6 Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Program Pembangunan 6.7 Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Program Pembangunan 6.8 Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
		Kabupaten yang Tertangani		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Dinas Sosial dan P3A
Program Pembangunan 6.9 Inklusi Sosial untuk Kesejahteraan Kelompok Rentan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan				
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	Sekretariat DPRD
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kinerja ASN dengan Predikat Minimal Baik	98,35 persen	BKPSDM
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45,20 persen	BKPSDM
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100 persen	Kecamatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga	100 persen	Kecamatan dan Kelurahan

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas	100 persen	Kecamatan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100 persen	Kecamatan
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Zakat Nasional	0,65 nilai	Sekretariat Daerah
		Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	100 persen	
		Indeks Kualitas Kebijakan	73,00 indeks	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	84,39 nilai	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	86,00 persen	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Penambahan Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK	1 unit kerja	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	79 persen	Bakesbangpol

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur				
Program Pembangunan 8.1 Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	79 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	79 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan	78 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	79 persen	Bakesbangpol
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	100 persen	Bakesbangpol
Program Pembangunan 8.2. Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	86,74 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	1,70 persen	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
Program Pembangunan 8.3. Pembangunan Berketahanan Iklim	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	100 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten	33.369,191 hektar	DLHKP
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	65,51 persen	DLHKP
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup	51,42 persen	DLHKP
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	23,91 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3,48 persen	DLHKP
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100 persen	DLHKP
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10,25 persen	DLHKP

Prioritas Nasional/Program Pembangunan/Kegiatan Pembangunan	Program RKPD yang Mendukung Prioritas Nasional	Indikator Program	Target	Perangkat Daerah Pengampu
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	81,18 persen	DPUPR
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	1,53 persen	Dinas Pertanian dan Pangan
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	8,91 persen	DLHKP
Program Pembangunan 8.4. Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD	0,77 angka	BPBD
		Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD	0,87 angka	
		Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD	0,90 angka	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100,00 persen	Dinas Sosial dan P3A
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00 persen	Disperkimhub

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, 2026

4.2.5 Dukungan Program Daerah terhadap Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional (Pro-SN) adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Pro-SN menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis

nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan layanan kesehatan yang merata, perluasan akses pendidikan, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan investasi dan daya saing nasional. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional dilaksanakan secara terintegrasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga tercipta keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan nasional dan daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional melalui penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengalokasian program pembangunan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran nasional, meliputi penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, peningkatan akses pendidikan melalui pengelolaan pendidikan dan dukungan terhadap Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas permukiman melalui program pembangunan kawasan permukiman, penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan diversifikasi pangan masyarakat, peningkatan derajat kesehatan melalui pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, serta penguatan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian inflasi, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan iklim penanaman modal. Seluruh dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional sehingga target-target pembangunan dapat dicapai secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berikut uraian Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap Program Prioritas Nasional (ProSN):

1. **Penanggulangan Kemiskinan**

   Kabupaten Kebumen mendukung Program Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan pembangunan tiga juta rumah. Dukungan tersebut diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat miskin, serta penyediaan hunian layak sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.

   Pada urusan perumahan dan permukiman, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga mendukung Program Strategis Nasional mengenai program 3 juta rumah yaitu implementasi perkada terkait Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Kabupaten Kebumen telah melaksanakan pembebasan BPHTB bagi MBR. Sampai dengan triwulan II tahun 2026 (19 Juni 2026) sudah terbit untuk 16 orang. Selain itu juga pada implementasi perkada terkait Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Kabupaten Kebumen telah melaksanakan penghapusan retribusi PBG untuk 1 pengembang, 2 permohonan, dan 56 unit. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Kebumen adalah melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut.

Kontribusi Kabupaten Kebumen dalam rangka penanganan RTLH adalah pembangunan RLH menggunakan APBD, pengusulan pada anggaran lain serta mengupayakan pembangunan menggunakan kerjasama dengan pihak lain (CSR). Pemerintah Kabupaten Kebumen juga melaksanakan kegiatan pembangunan RLH menggunakan atap genteng sebagai upaya pendukung gerakan asri gentengisasi.

2. Ketahanan Pangan

Dukungan Kabupaten Kebumen diwujudkan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang mendukung pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan, peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta penguatan ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasokan pangan nasional.

3. Kesehatan untuk Semua

Dalam mendukung Program Prioritas Nasional bidang kesehatan, Kabupaten Kebumen melaksanakan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang mendukung implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan, memperbaiki status gizi masyarakat, serta mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk Program Strategis Nasional (ProSN) khususnya untuk urusan pangan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di antaranya adalah pembentukan Satgas SPPG di kabupaten sebagai wadah koordinasi pelaksanaan program, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan bahan baku pangan, serta pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji termasuk fasilitasi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam penanganan dan investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan melalui Tim Gerak Cepat (TGC), pelaksanaan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, pola konsumsi pangan B2SA, serta gerakan stop pemborosan pangan. Dukungan lainnya dilakukan melalui monitoring kecukupan

pasokan bahan baku guna memastikan keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan program MBG di daerah.

4. **Perluasan Akses Pendidikan**
   Dukungan diberikan melalui Program Pengelolaan Pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah, termasuk mendukung pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan serta peningkatan mutu layanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen.
5. **Pertumbuhan Ekonomi**
   Kabupaten Kebumen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai program yang meliputi pengendalian inflasi daerah, percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta pengembangan iklim penanaman modal. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat kelembagaan ekonomi desa, memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan investasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4.18.
Dukungan Kabupaten Kebumen Terhadap Program Strategis Nasional (ProSN)

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	**1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Dinsos P3A**
		1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
		1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
			dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
		1.06.04.2.02.0003 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.04.2.02.0004 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.04.2.02.0007 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**Sekretariat Daerah**

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		
		4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
		4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		
		4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Dinkes PPKB**
		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
		1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		**Dinsos P3A**
		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		**Sekretariat Daerah**
		4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		
		4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
		5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		**Bapperida**
		5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
		5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
		5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		**Bapperida**
		5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
		5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
		3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		**Disperindag KUKM**

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
		3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		**Disdikpora**
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
		1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
		1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
	Sekolah rakyat	**1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Dinsos P3A**
		1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
		1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
			Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pembangunan 3 juta rumah	**1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**		**Disperkimhub**
		1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
		1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	
		1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		**Disperkimhub**
		1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
		1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	
Ketahanan Pangan	Pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah	**2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Distapang**
		2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
		2.09.03.2.02.0006 - Pengelolaan Cadangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		Pangan Pemerintah Kab/Kota	Kab/Kota yang terpelihara	
Kesehatan untuk Semua	Jaminan kesehatan nasional	**1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Dinkes PPKB**
		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
	Makan bergizi gratis	**2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		**Distapang**
		2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
		2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
		2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		**Distapang**
		2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		
		2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
			pangan segar asal tumbuhan	
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Dinkes PPKB**
		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Dinkes PPKB**
		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	
Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	**1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**		**Disdikpora**
		1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
		1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
			Direhabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
		1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
		1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
		1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
		1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	
Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian inflasi	**3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Disperindag KUKM**
		3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
		3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
	Percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih	**2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Disperindag KUKM**
		2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam		

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		Daerah Kabupaten/Kota		
		2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
	Kemudahan perizinan di daerah	**2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**DPMPTSP**
		2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	
		2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
		2.18.02.2.02.0006 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	
		2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		**DPMPTSP**
		2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	
		2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan		

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		
		2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
		2.18.04.2.01.0009 - Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	
		2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		**DPMPTSP**
		2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
		2.18.05.2.01.0007 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam	

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (ProSN)		DUKUNGAN KABUPATEN KEBUMEN		
Program Strategis Nasional	**Kegiatan**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator**	**Perangkat Daerah**
		Merealisasikan Kegiatan Usahanya	merealisasikan Kegiatan Usahanya	
		2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	
		2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	
		2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		**DPMPTSP**
		2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
		2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	

Sumber: Tim Penyusun RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, 2026

4.2.6 Dukungan Program Daerah terhadap Pengembangan WP Keburejo

Dukungan Kabupaten Kebumen terhadap pengembangan WP Keburejo melalui pelaksanaan program unggulan dan strategis pengerak pertumbuhan

ekonomi. Beberapa aspek perlu dipertimbangkan dalam aspek kewilayahan untuk mempertegas kontribusi Kabupaten Kebumen dalam pengembangan wilayah Keburejo. Dalam hal ini aspek kewilayahan meliputi:

a. Struktur ruang dan konektivitas TOD dengan penguatan konektivitas antar pusat pertumbuhan
b. Ekonomi Pesisir dengan pengembangan ekonomi perikanan terpadu (Penguatan TPI, Cold Storage dan hilirisasi perikanan)
c. Pertanian dan Pangan dengan pengembangan destinasi wisata berbasis alam/Agromen)
d. Infrastruktur dasar dengan pengembangan SPAM Komunal maupun Regional
e. Penataan ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang (penyusunan RDTR/ pengendalian alih fungsi lahan)
f. Kelembagaan dan kolaborasi wilayah dengan Sinkronisasi perencanaan WP Keburejo lintas kabupaten.
g. Integrasi Ketahanan Bencana lintas Kabupaten

4.2.7 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menyebutkan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dalam rangka penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dengan diselaraskan kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan tahun 2027 yaitu "Pemenuhan Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan".

Mendasari hal tersebut di atas, pokok-pokok pikiran DPRD akan diprioritaskan pada:

1. Pemenuhan kebutuhan utilitas publik dan infrastruktur pelayanan dasar berupa hibah untuk sarana, prasarana dan utilitas perumahan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan rumah ibadah serta pembangunan sarana prasarana pendidikan. Hal ini sesuai dengan Prioritas 1 pada tema pembangunan 2027 yaitu Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan serta Prioritas 2 yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar.

2. Penguatan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi dan aksesibilitas pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Prioritas 4 yaitu penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan serta Prioritas 8 yaitu mendorong pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi lokal melalui sektor pertanian berkelanjutan, perikanan ramah lingkungan, dan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan
3. Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa berupa kegiatan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan infrastruktur jalan dengan prioritas jalan poros desa. Hal ini sesuai dengan tema pembangunan tahun 2027 yang akan memprioritaskan pemenuhan infrastruktur di awal periode RPJMD maupun dengan Prioritas 1 yaitu Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan dan Prioritas 7 yaitu pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi, utilitas publik, dan fasilitas pendukung destinasi pariwisata unggulan dalam rangka penguatan pelayanan publik.
4. Belanja kegiatan prioritas pembangunan daerah lainnya.

4.2.8 Dukungan Prioritas Daerah

a. Dukungan terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi permasalahan mendasar yang mendapat perhatian serius dari pemerintah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan dari 17,83% pada tahun 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun, seiring dengan pemulihan perekonomian daerah, tingkat kemiskinan kembali menurun secara konsisten hingga mencapai 13,58% pada tahun 2025. Kinerja penanggulangan kemiskinan menunjukkan hasil yang sangat signifikan, dimana Kabupaten Kebumen berhasil menggeser posisinya dari status kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah menjadi peringkat kedua dengan penurunan tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 2,13%. Penurunan angka kemiskinan juga terjadi berdasarkan jumlah jiwa penduduk miskin. Walaupun sempat meningkat sebesar 212.900 jiwa dikarenakan Pandemi Covid-19 tahun 2021, dengan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk miskin terus menurun menjadi 162.540 jiwa pada tahun 2025.

Kenaikan garis kemiskinan masih menjadi isu pelik dalam penanggulangan kemiskinan, selain karena dasar perhitungan tingkat kemiskinan menurut BPS adalah persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Kebumen terus merangkak naik dari Rp. 390.599,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.502.841,00 pada tahun 2025.

Walaupun kenaikan garis kemiskinan dapat berarti terjadinya peningkatan standar hidup, namun disisi lain kenaikan garis kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan garis kemiskinan. Seperti yang telah tercantum pada Bab II, menunjukkan kenaikan inflasi (menggunakan perhitungan deflator) tahun sebelumnya cukup mempengaruhi kenaikan garis kemiskinan berikutnya. Sebagai contoh ketika terjadi kenaikan inflasi tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,28% menyebabkan kenaikan garis kemiskinan tertinggi di tahun berikutnya yaitu sebesar 8,58% pada tahun 2023. Selanjutnya ketika inflasi relatif menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 3,78% maka kenaikan garis kemiskinan juga relatif menurun menjadi 4,46% pada tahun 2024. Untuk itu kenaikan garis kemiskinan seharusnya diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan selama kurun waktu 2021-2025 Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang baik. Secara umum fluktuasi tingkat kemiskinan memiliki pola yang sama yaitu sempat meningkat pada tahun 2021 dikarenakan Pandemi Covid-19. Walaupun Kabupaten Kebumen masih menjadi Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Tengah, akan tetapi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan utamanya dengan pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan yang tepat lokus, fokus maupun tepat secara waktu. Keberhasilan upaya ini bisa terlihat dengan kinerja penurunan tingkat kemiskinan selama tahun 2021-2025 Kabupaten Kebumen mencapai 4,25% lebih baik dibandingkan kinerja Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,31% dan Nasional sebesar 1,67%.

Berdasarkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, strategi dari sisi makro adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Menjaga stabilitas ekonomi makro;
3. Menjaga stabilitas harga dan inflasi;
4. Menciptakan iklim yang mendukung investasi;
5. Menciptakan regulasi perdagangan untuk menjamin kelancaran distribusi; serta
6. Menyediakan infrastruktur wilayah yang mantap di seluruh wilayah (terdepan. terkecil. tertinggal. maupun pusat ekonomi baru).

Sementara itu strategi penanggulangan kemiskinan mikro mendasari determinan penyebab kemiskinan adalah prioritas intervensi sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, akan dilakukan prioritas intervensi pada dimensi:
   a. Kesehatan dengan kegiatan prioritas:

1) Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas kurang mampu;
2) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) bagi masyarakat miskin; serta
3) Pemberian jaminan kesehatan bagi warga miskin di luar menu BPJS.

b. Pendidikan dengan kegiatan prioritas:
1) Mengoptimalkan pesantren/lembaga keagamaan;
2) Memberikan beasiswa; serta
3) Menyelenggarakan pendidikan non formal.

c. Infrastruktur dasar dengan kegiatan prioritas:
1) Peningkatan akses sanitasi aman;
2) Peningkatan akses air minum perpipaan; serta
3) Peningkatan akses hunian layak.

d. Konsumsi dengan kegiatan prioritas:
1) Pemberian bantuan permakanan dan sandang; serta
2) Edukasi makanan sehat.

e. Ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas yaitu pengembangan desa berbasis pertanian

2. Meningkatkan pendapatan masyarakat, akan dilakukan prioritas intervensi pada dimensi ketahanan pangan dengan kegiatan prioritas:
a. Pengembangan petani milenial;
b. Pengembangan *corporate farming*; serta
c. Pengembangan *integrated farming.*

3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, akan dilakukan prioritas intervensi pada dimensi ketenagakerjaan dengan kegiatan prioritas:
a. Penyiapan tenaga kerja;
b. Perlindungan tenaga kerja formal dan informal;
c. Akselerasi pengembangan pusat pertumbuhan baru;
d. Pengembangan ekonomi kreatif;
e. Peningkatan kapasitas UMKM;
f. Pengembangan inkubasi wirausaha;
g. Perluasan akses permodalan bagi UMKM; serta
h. Optimalisasi Sentra KI (Kekayaan Intelektual)

Namun demikian, ketersediaan dan keakuratan data sebagai dasar pengalokasian program-program penanggulangan kemiskinan menjadi fokus utama di tahun 2026. Selain itu juga dilakukan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Kebumen yang ditujukan untuk memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan baik, responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan termasuk koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan hingga level desa. Penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan juga perlu dilaksanakan untuk menjamin program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan

sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak kepada masyarakat. Selanjutnya keterlibatan berbagai sektor dan peran aktif masyarakat menjadi penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Sumber pembiayaan utama penanggulangan kemiskinan di daerah adalah anggaran pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Selain itu dukungan pendanaan di tingkat desa melalui dana desa seringkali digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Lembaga swasta dan dunia usaha seringkali berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan pemberian bantuan sosial, bantuan biaya pendidikan, kesehatan, pemenuhan infrastruktur dasar maupun program yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Kemitraan dan kerjasama dengan swasta dapat dioptimalkan dalam rangka membangun sinergi penanggulangan kemiskinan selain melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun demikian perlu dilakukan inovasi sumber pendanaan dan atau melakukan pendekatan-pendekatan alternatif sumber pembiayaan agar jangkauan program penanggulangan kemiskinan dapat lebih luas. Terdapat beberapa mekanisme pendanaan yang dapat dilakukan seperti skema *Public-Private Partnership* (PPP) yang dianggap lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya kemungkinan adanya pinjaman lunak untuk skema penanggulangan kemiskinan dan penggalangan *crowdfunding* di era digital yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

b. Dukungan terhadap Penanganan Stunting

Salah satu isu yang dihadapi oleh Kabupaten Kebumen dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah masih ditemukannya kasus stunting. Meskipun jumlah penderita maupun prevalensi stunting di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, penanganan stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat dampak negatifnya terhadap kualitas sumberdaya manusia. Stunting dalam jangka panjang memiliki akibat buruk yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat berada di masa sekolah dan disabilitas di usia tua.

Upaya penurunan stunting akan dilakukan antara lain melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Intervensi sasaran balita resiko stunting dengan skala prioritas tingkat keberhasilan;
2. Pemberian edukasi pada kelompok rentan remaja, pasangan usia subur, ibu hamil;
3. Peningkatan layanan/inovasi pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan wanita usia subur;

4. Peningkatan layanan KB untuk menurunkan unmeet need dan meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca persalinan;
5. Penyediaan sarana pendukung seperti jamban sehat, air bersih dan rumah layak huni;
6. Perbaikan manajemen dan koordinasi lintas sektor dalam kerjasama penanganan stunting; serta
7. Validasi data pemantauan tumbuh kembang balita dan data kelompok rentan stunting (remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan wanita usia subur).

Selain itu, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kebumen dilaksanakan melalui Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) melalui Website Monitoring Aksi Konvergensi sesuai Mekanisme Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) menekankan penguatan tahapan analisis situasi, penguatan perencanaan, penguatan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dukungan regulasi/kebijakan, serta publikasi pelaksanaan aksi konvergensi. Pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta unsur masyarakat dan swasta. Pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Kebumen juga mengedepankan prinsip PATRIOT yaitu Partisipatif, Akuntabel, Transparan, Responsif, Integritas, Objektif, dan Terukur sebagai dasar tata kelola kolaboratif dalam upaya percepatan penurunan stunting secara berkelanjutan.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, Kabupaten Kebumen melalui beberapa perangkat daerah yang masuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga telah melakukan salah satunya Pra Musrenbang Stunting. Dalam Pra Musrenbang Stunting, beberapa kegiatan yang sudah berjalan dan menjadi masukan dalam agenda tersebut antara lain:

Tabel 4.19.
Hasil Utama Pra Musrenbang Tematik Stunting
Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Pelaksana	Usulan Kegiatan
Dinkes PPKB	1. Edukasi ibu hamil 2. Edukasi dan konseling gizi ibu hamil 3. Gerakan Ibu Hamil Sehat 4. Sweeping dan edukasi kepada ibu hamil tentang pentingnya MMS untuk kehamilan serta edukasi cara minum dan penyimpanan MMS 5. Penyuluhan tentang gizi seimbang, sosialisasi dan edukasi peminuman TTD/MMS, edukasi makanan beragam dan bergizi seimbang, edukasi isi piringku, serta edukasi pentingnya IMD di kelas ibu hamil 6. Pendampingan keluarga untuk mengawasi minum MMS

Pelaksana	Usulan Kegiatan
	7. Pendampingan, pengawasan dan kunjungan ke rumah oleh kader atau nakes 8. Bidan desa melakukan kunjungan rumah kepada semua ibu hamil 9. Penyuluhan dan pendampingan terhadap ibu hamil mengonsumsi makanan beragam 10. Pelaksanaan sosialisasi pemeriksaan ANC minimal 6 kali di kelas ibu hamil dan posyandu 11. Sweeping ibu hamil yang belum periksa ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan 12. Penyuluhan untuk keluarga untuk pendampingan ibu hamil 13. Penyuluhan data sasaran Unmetneed (Pasangan yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda) 14. Konseling mengenai KBPP kepada ibu hamil sebelum melahirkan dan penyuluhan KB paska persalinan 15. Edukasi PUS (Istri dan Suami) tentang KB Pasca Persalinan sejak kehamilan 16. Layanan edukasi dan konseling kepada ibu paska persalinan 17. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader 18. Sosialisasi pentingnya IMD kepada kader 19. Pembentukan KP ASI 20. Kelas Ibu Balita 21. Pendampingan PMBA oleh kader, konseling PMBA di posyandu, cetak leaflet isi piringku MPASI 22. Pendampingan keluarga dan edukasi kepada orang tua tentang MP ASI 23. Sosialisasi fasilitas publik dan swasta tentang penyediaan ruang laktasi 24. Penyuluhan ASI 25. Penguatan Deteksi Dini dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Baduta 26. Pendampingan keluarga balita yang bermasalah gizi 27. Bintek tatalaksana balita masalah gizi 28. Pembelian alat antropometri yang rusak 29. Update tentang tumbang untuk petugas dan kader, pendampingan, rujukan bila ada kasus gangguan tumbang 30. Pemberian PMT dan Pelatihan Kader di 18 Desa Kecamatan Ayah 31. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita gizi kurang 32. Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh kader Tim Pendamping Keluarga 33. Pendampingan Keluarga pada balita gizi kurang hingga buruk 34. Edukasi terkait PHBS di tingkat keluarga 35. Kalibrasi alat antropometri secara berkala oleh kalibrator 36. Pendampingan keluarga dan kerjasama lintas sektor dengan melibatkan desa

Pelaksana	Usulan Kegiatan
	37. Aksi bergizi di SMP dan SMA 38. Sosialisasi dan edukasi tentang anemia dan TTD pada remaja putri 39. Monitoring minum TTD 40. Skrining anemia untuk semua sasaran remaja putri 41. Pendampingan keluarga pada catin 42. Pendampingan Pra Nikah Calon Pengantin 43. Bintek pencatatan dan pelaporan kesehatan catin 44. Bimbingan materi pencegahan stunting kepada catin 45. Edukasi dan sosialisasi tentang makanan seimbang untuk wanita dewasa/ calon pengantin 46. Pengecekan Air Minum Masyarakat secara berkala per semester (1 tahun 2 kali)
Dinas PUPR	1. Pembangunan SPAM
Dinas Perkim	1. Pemicuan SPAL komunal 2. Edukasi dan pendampingan TPK 3. Edukasi dan stimulasi pembuatan sarana prasarana SPAL sesuai estándar 4. Pembangunan Jamban / Tangki limbah industri umkm, jaringan pipa air / sejenisnya
DLHKP	1. Pembangunan saluran pembuangan air limbah
Dinas Sosial	1. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kepesertaan Jamkes 2. Validasi data dengan meningkatkan DTKS
Disdukcapil	1. Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya data kependudukan dan pembuatan akta kelahiran dan KIA 2. Pelayanan Jemput Bola Kependudukan dan Pelayanan Kependudukan tingkat Desa serta akta kelahiran dan KIA 3. Melaksanakan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, pendidikan dan BPJS
Dinas PMD	1. Pelatihan pengelolaan kebun gizi 2. Pemanfaatan lahan sempit dengan metode sederhana 3. Pemanfaatan lahan kosong
Dinas Pertanian dan Pangan	1. Sosialisasi dan penanaman pangan yang cukup gizi 2. Sosialisasi pentingnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk peningkatan gizi keluarga 3. Sosialisasi dan peningkatan pendampingan dalam pemanfaatan pekarangan untuk perbaikan gizi 4. Budidaya tanam vertikultur (menanam di wadah bertingkat) 5. Pendampingan oleh Penyuluh BPP bagi kelompok masyarakat 6. Edukasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) atau Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) 7. Penyediaan Sarana Prasarana (Lahan, Bibit, dan Pupuk) 8. Belanja sarana prasarana pertanian masyarakat 9. Memberikan pelatihan kepada Pokja 3 Pengurus PKK di desa dan melakukan kegiatan pemeringkatan AKU HATINYA PKK.

Sumber: Berita Acara Pra Musrenbang Tematik Stunting Kabupaten Kebumen, 2026

c. Dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) menekankan pentingnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam setiap tahapan pembangunan. Dukungan terhadap Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kebumen merupakan strategi pembangunan yang mendasar untuk memastikan perspektif gender terintegrasi secara menyeluruh dalam setiap siklus perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari Misi 1 RPJMD 2025-2029, yaitu Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat yang Adil dan Inklusif, di mana PUG ditempatkan sebagai instrumen strategis untuk menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Analisis kondisi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus mengalami perbaikan hingga mencapai angka 93,39 pada tahun 2024, yang merepresentasikan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang semakin setara antara perempuan dan laki-laki. Namun demikian, tantangan dalam perencanaan pembangunan masih ditemukan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), di mana TPAK laki-laki sebesar 88,08% masih terpaut jauh dari perempuan yang sebesar 66,46%. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh hambatan budaya dan norma sosial yang membatasi mobilitas, beban domestik, serta masih terbatasnya fasilitas pendukung di tempat kerja.

Untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Kebumen, langkah-langkah yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Pelembagaan PUG dan PPRG
   diarahkan pada penguatan kapasitas seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui sosialisasi kebijakan dan advokasi teknis guna menjamin anggaran daerah dialokasikan secara adil bagi seluruh kelompok masyarakat.
2. Penguatan Sistem Data Pilah
   Memastikan tersedianya sistem informasi dan pengelolaan data pilah menurut jenis kelamin sebagai basis data yang akurat dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan laki-laki, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
3. Advokasi Kebijakan Inklusif
   Mendorong terciptanya regulasi dan rencana aksi daerah yang menjamin lingkungan sosial yang inklusif, termasuk penguatan partisipasi dalam pembangunan daerah melalui advokasi kebijakan pada organisasi kemasyarakatan.
4. Sinergi Program Unggulan
   Melakukan integrasi dengan program unggulan daerah seperti "Biyunge Momong" sebagai instrumen untuk mempercepat penyelesaian isu-isu ketimpangan gender pada masa transisi. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan

perempuan.

d. Dukungan terhadap Pemenuhan Kualitas Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor penting untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Strategi yang akan dijalankan dalam pemenuhan kualitas infrastruktur di Kabupaten Kebumen tahun 2027 yaitu:

1. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di beberapa wilayah dengan memperhatikan perkembangan wilayah tersebut, dalam upaya mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat;
2. Peningkatan kelengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan memperlancar arus transportasi;
3. Peningkatan pemeliharaan jaringan dan kinerja sistem irigasi hingga tingkat desa untuk mendukung produktivitas pertanian;
4. Pengembangan infrastruktur pemenuhan layanan dasar masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan sarana air minum aman (perpipaan), peningkatan akses sanitasi aman, pemugaran RTLH, peningkatan akses hunian layak; serta penanganan kawasan kumuh;
5. Pemeliharaan dan optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
6. Optimalisasi pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan.

e. Dukungan terhadap Geopark Kebumen

Sejarah *Geopark* Kebumen dapat ditelusuri kembali ke tahun 2004 ketika Presiden Republik Indonesia menetapkan Kawasan Lanskap Karst Gombong Selatan (KBAK) sebagai kawasan pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2006, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kawasan Karangsambung sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kebumen mengusulkan pembentukan *Geopark* Karangsambung – Karangbolong yang kemudian ditetapkan menjadi *Geopark* Nasional pada tanggal 30 November 2018. Saat itu *Geopark* Karangsambung – Karangbolong memiliki luas 543.599 Km2 yang meliputi 12 Kecamatan dengan 117 Desa. Kawasan ini meliputi wilayah Utara, Tengah, dan Karst di Selatan dengan morfologi yang bervariasi mulai dari perbukitan, lembah, dataran hingga pantai. Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Perbup No. 25 Tahun 2023 berubah nama menjadi *Geopark* Kebumen. Perubahan ini bertepatan dengan perluasan kawasan *geopark* dengan luas daratan 1.138,70 kilometer persegi dan luas laut 21,98 kilometer persegi. Di dalam *geopark* tersebut terdapat 22 kecamatan dengan 374 desa dengan mengangkat tema "*The Glowing Mother Earth of Java*". Pada Tahun 2025 Geopark Kebumen secara resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Sesuai dengan rancangan Rencana Induk *Geopark* Kebumen Tahun 2025-2034, visi pengembangannya adalah "Menjadi *Geopark* yang Terkemuka, Berkelanjutan, dan Bermanfaat bagi Kesejahteraan Masyarakat".

1. Strategi & Kebijakan dalam Pengembangan Geopark

Pengembangan geopark di Kebumen, Jawa Tengah, menawarkan peluang luar biasa untuk melestarikan keragaman geologi sekaligus

mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pariwisata berbasis alam. Kebumen memiliki berbagai situs geologi yang kaya, seperti formasi batuan karst, gua, pantai, dan cekungan endapan, yang berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai geopark. Oleh karena itu, pengembangan geopark Kebumen tidak hanya fokus pada konservasi geosistem, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan ekonomi, serta pengelolaan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan. Untuk itu, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang terintegrasi untuk mewujudkan pengembangan geopark yang efektif dan efisien. Visi pengembangan Geopark Kebumen adalah untuk menjadikan Kebumen sebagai destinasi wisata geopark terkemuka yang berbasis pada pelestarian geosistem, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Melalui pengembangan geopark ini, Kebumen diharapkan dapat menjadi model kawasan konservasi yang mengintegrasikan aspek geologi, budaya, dan ekologi, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional.

2. Strategi Pengembangan Geopark Kebumen

2.1. Inventarisasi dan Penilaian Situs Geologi

Langkah pertama dalam pengembangan geopark Kebumen adalah melakukan inventarisasi dan penilaian terhadap situs-situs geologi yang ada di wilayah ini. Kebumen memiliki sejumlah formasi geologi yang unik, seperti bentang alam karst di kawasan Gombong, gua-gua alami di kawasan Sermo, serta pantai yang kaya akan fosil dan geosite lainnya. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi situs yang memenuhi kriteria sebagai geosites, seperti nilai ilmiah, pendidikan, estetika, serta potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata.

2.2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Geopark

Rencana pengelolaan geopark Kebumen akan berfokus pada pengelolaan yang berbasis pada prinsip konservasi, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Rencana ini mencakup pengaturan zonasi geopark, pengelolaan situs-situs geologi, serta kebijakan pelestarian lingkungan. Pengelolaan yang efektif harus memperhatikan dampak ekologis dari aktivitas manusia, serta memastikan bahwa pengunjung dan masyarakat setempat dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan geopark.

2.3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dalam pengembangan geopark. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan dan pengembangan kapasitas dalam bidang pariwisata berkelanjutan, pemandu wisata geologi, serta pemanfaatan hasil alam

secara bijaksana tanpa merusak lingkungan. Selain itu, masyarakat lokal juga dapat dilibatkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan situs geologi, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pelestarian geopark.

2.4. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas Wisata

Untuk mendukung pengembangan geopark Kebumen, penting untuk meningkatkan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti akses jalan, parkir, pusat informasi, serta fasilitas wisata lainnya. Pengembangan fasilitas ini harus dirancang dengan prinsip keberlanjutan, misalnya dengan membangun pusat informasi berbasis energi terbarukan, tempat parkir yang ramah lingkungan, serta jalur wisata yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi wisata berbasis geolokasi, juga dapat meningkatkan pengalaman pengunjung serta mempermudah akses informasi mengenai geopark.

2.5. Promosi dan Pemasaran

Promosi dan pemasaran geopark Kebumen harus dilakukan secara intensif melalui berbagai saluran, baik offline maupun online. Kampanye promosi dapat melibatkan media sosial, website resmi, dan kerjasama dengan agen perjalanan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional. Selain itu, pengembangan program wisata edukasi mengenai geosites Kebumen, baik untuk sekolah-sekolah, universitas, maupun komunitas wisata, akan membantu meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya geopark.

2.6. Pendidikan dan Penyuluhan

Pengembangan geopark Kebumen juga harus disertai dengan program pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dan pengunjung. Program ini meliputi penyuluhan tentang pentingnya geologi, pengelolaan sumber daya alam, serta manfaat keberagaman hayati. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan akan memperkuat pelestarian geopark serta meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keindahan alam untuk generasi mendatang.

3. Kebijakan Pengembangan Geopark Kebumen

3.1. Kebijakan Konservasi dan Pelestarian

Kebijakan utama dalam pengembangan geopark Kebumen adalah pelestarian geosites dan ekosistem yang ada di kawasan tersebut. Kebijakan ini mencakup penetapan kawasan konservasi geologi, pembatasan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan geopark. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas pariwisata dan

edukasi kepada pengunjung tentang perilaku yang ramah lingkungan menjadi prioritas utama.

3.2. Kebijakan Kolaborasi dan Kemitraan

Pengembangan geopark Kebumen tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, kebijakan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat lokal, serta sektor swasta, sangat penting. Kerja sama antara pemerintah, lembaga lingkungan, serta masyarakat akan memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan geopark yang efektif.

3.3. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Pengembangan geopark Kebumen harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, di mana kegiatan pariwisata harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan dan warisan geologi. Kebijakan ini mengarah pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta upaya konservasi yang sejalan dengan pengembangan ekonomi lokal.

3.4. Kebijakan Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan geopark Kebumen dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data geosites hingga pemantauan dampak pariwisata terhadap lingkungan. Kebijakan untuk mendorong penggunaan teknologi digital dalam promosi dan manajemen kawasan akan meningkatkan daya tarik geopark dan memberikan pengalaman wisata yang lebih baik.

Strategi dan kebijakan pengembangan Geopark Kebumen merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan potensi geologi yang ada, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pada konservasi dan keberlanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, pengembangan geopark Kebumen dapat menjadi model kawasan konservasi yang sukses, mengintegrasikan aspek geologi, budaya, dan ekonomi dalam satu sistem yang berkelanjutan. Ke depan, diharapkan Geopark Kebumen tidak hanya menjadi destinasi wisata yang menarik, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat.

4. Arahan Kebijakan Pembangunan dan Prinsip Pengembangan Geopark Kebumen

Arah dan kebijakan pembangunan Geopark Kebumen meliputi:

4.1. Konservasi dan Pelestarian

4.1.1. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan pelestarian geodiversitas, biodiversitas, dan budaya lokal melalui program-program konservasi yang berbasis pada penelitian dan partisipasi masyarakat.

4.1.2. Mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang nilai-nilai konservasi.

4.2. Pendidikan dan Penelitian

4.2.1. Menetapkan Geopark Kebumen sebagai pusat pendidikan dan penelitian yang fokus pada geodiversitas dan keberlanjutan lingkungan.

4.2.2. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan dan lembaga penelitian untuk memfasilitasi program-program edukasi yang relevan dan aplikatif.

4.3. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

4.3.1. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan mempromosikan potensi geowisata dan produk-produk lokal.

4.3.2. Mendorong pembentukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan.

4.4. Kelembagaan dan Tata Kelola

4.4.1. Mendirikan kelembagaan pengelola Geopark yang independen dan memiliki wewenang dalam pengelolaan teknis serta memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.

4.4.2. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan lokal dan mendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan Geopark.

4.5. Koordinasi dan Sinergi

4.5.1. Mengembangkan forum koordinasi lintas sektor dan lintas kabupaten/kota untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan dan pengelolaan Geopark.

4.5.2. Menyusun kebijakan yang memastikan sinkronisasi antara berbagai level pemerintahan dalam pengelolaan Geopark, dari pusat hingga daerah.

5. Implementasi dan Tahapan Pengembangan Geopark Kebumen

Implementasi Kebijakan

5.1. Rencana Aksi Konservasi

Mengembangkan program pelestarian yang terukur dengan indikator keberhasilan.

5.2. Program Edukasi dan Kesadaran

Menyelenggarakan seminar dan lokakarya untuk meningkatkan pengetahuan tentang Geopark.

5.3. Pengembangan Infrastruktur
Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas di Geopark.

5.4. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan yang diimplementasikan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

f. Dukungan terhadap Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata diarahkan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Dukungan terhadap pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui penguatan destinasi wisata yang berdaya tarik, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya, dan kearifan lokal masyarakat.

Prioritas pembangunan pariwisata difokuskan pada peningkatan kualitas destinasi wisata unggulan melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur pendukung, aksesibilitas kawasan wisata, penataan kawasan, serta pengembangan amenitas dan fasilitas pelayanan wisata. Pengembangan pariwisata dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada optimalisasi potensi wisata desa dan wisata berbasis komunitas sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkuat identitas dan daya tarik daerah.

g. Dukungan terhadap Pengembangan Kebudayaan

Pengembangan kebudayaan daerah diarahkan untuk memperkuat identitas, karakter, dan jati diri masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dukungan terhadap pengembangan kebudayaan dilaksanakan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan nilai-nilai budaya, tradisi, adat istiadat, serta warisan budaya daerah agar tetap lestari dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Prioritas pembangunan kebudayaan difokuskan pada pelestarian warisan budaya benda maupun tak benda melalui inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi, serta penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan ruang ekspresi budaya dan kreativitas masyarakat melalui fasilitasi sanggar seni, komunitas budaya, festival budaya, serta pembinaan pelaku seni dan budaya.

Upaya pengembangan kebudayaan juga dilaksanakan melalui penguatan pendidikan karakter dan literasi budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda, guna menanamkan nilai-nilai luhur budaya daerah, memperkuat toleransi sosial, serta menjaga keberagaman budaya sebagai aset pembangunan daerah. Dengan demikian, kebudayaan tidak

hanya menjadi warisan yang dilestarikan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

h. Dukungan terhadap Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi

Penyelenggaraan riset dan inovasi daerah merupakan instrumen strategis dalam mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam pelaksanaannya riset dan inovasi daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang memiliki urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pembentukan BRIDA dapat berupa perangkat daerah tersendiri atau diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menangani perencanaan pembangunan dengan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Tugas dan fungsi BRIDA/BAPPERIDA sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023, serta Peraturan Kepala BRIN Nomor 5 Tahun 2023, secara umum meliputi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi di daerah. Melalui pelaksanaan tugas tersebut, BAPPERIDA bertugas mendorong tumbuh dan berkembangnya ekosistem riset dan inovasi daerah yang mencakup aspek kebijakan dan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, kemitraan, budaya riset dan inovasi, keterpaduan antar program, serta keselarasan dengan perkembangan global. Peraturan Kepala BRIN Nomor 5 Tahun 2023 juga menegaskan pentingnya sinergi penyelenggaraan riset dan inovasi melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu forum bersama yang diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna mendukung pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa tugas dan fungsi BRIDA di Kabupaten Kebumen terintegrasi dengan perangkat daerah urusan perencanaan melalui nomenklatur BAPPERIDA. Dengan pembentukan BAPPERIDA tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan lebih optimal. Salah satu tugas awal yang menjadi prioritas adalah penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta penguatan kemitraan antar lembaga.

Pelaksanaan riset dan inovasi daerah selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang mengatur bahwa BAPPERIDA bukan hanya melaksanakan tugas perencanaan namun juga menyelenggaraan bidang riset dan inovasi sebagai unsur penunjang

pemerintahan daerah yang bertugas merumuskan kebijakan, memfasilitasi penelitian, serta mengembangkan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan hasil riset ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang lebih berbasis data, hasil kajian, dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga perencanaan daerah menjadi lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah strategis daerah.

Melalui BAPPERIDA, pemerintah daerah melakukan penguatan kembali terhadap pengembangan produk unggulan daerah sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi, sekaligus bersinergi dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan berbasis bukti. Selain itu, dilakukan peningkatan promosi, fasilitasi invensi dan inovasi, serta pemberian apresiasi dan perlindungan terhadap pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan masyarakat. Ke depan, pengembangan dan replikasi inovasi, diseminasi hasil riset, serta penguatan dampak riset dan inovasi bagi masyarakat akan terus didorong, termasuk melalui pengembangan perusahaan pemula berbasis riset dan pembentukan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah.

Untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi, telah dibentuk Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Riset dan Inovasi Daerah sekaligus mengimplementasikan amanah yang tertuang dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki fungsi sebagai ruang kolaborasi dalam penyelenggaraan riset dan inovasi, termasuk perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, komunitas inovator, dan masyarakat. Melalui forum ini diharapkan tercipta keselarasan arah, sinergi program, serta integrasi hasil riset dan inovasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Penguatan invensi dan inovasi juga terus dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Kabupaten Kebumen sebagai jejaring inovasi serta bentuk apresiasi kepada para inventor atas kontribusinya dalam menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi penyelesaian masalah, pengembangan potensi, dan penciptaan peluang wirausaha baru di masyarakat.

Pengembangan ekosistem inovasi selain ditumbuhkan di kalangan masyarakat, inovasi juga ditumbuhkembangkan oleh Perangkat Daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja

maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan inovasi. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Atas inovasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. Sedangkan Pemerintah Daerah juga dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi. Selain perangkat daerah, penghargaan juga dapat diberikan kepada BUMD yang berhasil melaksanakan inovasi.

Sejak tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, yang dilaporkan dan dinilai berdasarkan indikator tertentu untuk memotivasi peningkatan kinerja, memberikan penghargaan, dan memetakan potensi inovasi daerah secara nasional. Provinsi dan Kabupaten/kota yang memiliki IID kategori sangat inovatif akan memperoleh penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) dari Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Kebumen setiap tahunnya menyiapkan dan melaporkan Inovasi terbaiknya dengan target memperoleh kategori Kabupaten Sangat Inovatif. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai kategori Sangat Inovatif yaitu meningkatkan kualitas maupun kuantitas inovasi. Untuk meningkatkan semangat berinovasi akan diberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah maupun pihak lain yang telah berkontribusi dalam penilaian IID. Pada tahun 2025, telah teridentifikasi sebanyak 302 (tiga ratus dua) inovasi yang berasal dari Perangkat Daerah/BUMD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.9/442 Tahun 2025 dan inovasi Perangkat Daerah tersebut akan bertambah dengan banyaknya prototipe yang disiapkan menjadi inovasi baru.

Sebagai penguatan ekosistem riset dan inovasi, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah membentuk Sentra Kekayaan Intelektual yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.9.1/79 Tahun 2024 tentang Pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Kebumen, dimana salah satu tugasnya adalah memberikan fasilitasi berupa pendampingan kepada periset dan inventor untuk mendapatkan pelindungan hukumnya atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan hak cipta, merek, dan paten. Terhadap potensi Kekayaan Intelektual Komunal, Sentra Kekayaan Intelektual Kabupaten Kebumen juga mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi Kekayaan Intelektual yang ada di masyarakat.

Sampai dengan tahun 2025, fasilitasi pendaftaran dan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kebumen sudah banyak dilakukan dengan berbagai jenis sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 4.20.
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kebumen

NO	JENIS HKI	JUMLAH
1	Hak Cipta	67
2	Merek	279
3	Paten	2
4	Indikasi Geografis	1
5	Kekayaan Intelektual Komunal	4

Sumber: Bapperida Kab. Kebumen, BRIDA Prov. Jateng dan Kemenkum Kanwil Jateng, 2025

Pembangunan daerah yang berkelanjutan menuntut adanya kebijakan yang disusun secara terencana, sistematis, dan berbasis bukti ilmiah (*evidence-based policy*). Riset dan inovasi menjadi instrumen penting dalam menyediakan dasar ilmiah bagi perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki kelembagaan yang mampu menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memanfaatkan hasil riset dan inovasi secara efektif.

Sebagai tindak lanjut penguatan sistem riset dan inovasi nasional, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peraturan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah dilaksanakan melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang dalam praktik kelembagaan di daerah dapat terintegrasi dengan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). BRIN berperan sebagai pembina dan pengendali teknis, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan riset dan inovasi sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya, Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah memberikan landasan operasional yang lebih rinci mengenai tugas dan fungsi BRIDA/BAPPERIDA. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa BRIDA/BAPPERIDA memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan riset dan inovasi daerah dan menghasilkan kajian ilmiah yang mendukung rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

Pengembangan publikasi ilmiah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset yang dapat digunakan sebagai informasi maupun referensi dalam pelaksanaan kajian maupun penelitian lanjutan yang hasilnya dapat menjadi input/rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam

pengambilan keputusan. Selain itu, hasil kreasi dan inovasi Masyarakat yang telah terjaring selama ini perlu mendapatkan wadah pendokumentasian yang baik dalam hal ini diciptakan wadah khusus untuk menuliskan hasil-hasil pengembangan kreasi dan inovasi masyarakat, yang kemudian dilakukan penelaahan dan pengkajian dari sisi ilmiah (reviu) sehingga menghasilkan tulisan karya ilmiah disamping produk kreasi dan inovasi yang dihasilkan. Pengembangan jurnal ilmiah ini dapat menjadi salah satu sarana publikasi hasil-hasil riset dan inovasi yang dilakukan baik oleh aparatur pemerintah daerah, akademisi maupun Masyarakat umum. Selain sebagai sarana publikasi hasil riset dan inovasi, juga dapat berfungsi sebagai wahana membangun jaringan riset dan inovasi serta kolaborasi penelitian/pengkajian para peneliti maupun akademisi.

Pengembangan jurnal ilmiah oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dikembangkan secara *online* mendasari aturan jurnal ilmiah elektronik yang berlaku untuk mendorong publikasi ilmiah serta mengatur baku mutu standar publikasi ilmiah sesuai dengan kaidah jurnal ilmiah internasional.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dokumen ini dirumuskan melalui rangkaian proses perencanaan yang dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD, pembahasan substansi program dan kegiatan, hingga pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027. Musrenbang RKPD menjadi forum strategis untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan bersama para pemangku kepentingan, yang meliputi unsur pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), akademisi, dunia usaha, komunitas, serta masyarakat. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 juga didasarkan pada hasil evaluasi capaian pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tahun perencanaan.

5.1. Rencana Program Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan aktual serta isu strategis daerah, dengan mengacu pada sasaran dan target tahunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Penetapan prioritas Tahun 2027 mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan hingga Tahun 2025 sebagai dasar penajaman kebijakan dan program. Selain itu, prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, guna memastikan keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan secara vertikal dan horizontal.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.

5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan difokuskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten maka SPM yang akan ditangani melalui program pengelolaan pendidikan meliputi pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/kesetaraan. Untuk mendukung pencapaian SPM tersebut, beberapa kegiatan yang akan kita prioritaskan di Tahun 2027 meliputi Pembangunan sarana prasarana dan *utilitas* sekolah, Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Pengadaan perlengkapan sekolah, Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah, Penyediaan biaya personil

peserta didik sekolah dasar bagi siswa kurang mampu, Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik, Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa, Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah, Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Pengelolaan Dana BOS, Pengadaan alat praktik dan peraga, Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, Pembinaan kelembagaan dan manajemen, serta Pengelolaan dana BOP PAUD. Selain itu dalam mendukung pencapaian proporsi penduduk berkualifikasi Pendidikan tinggi juga telah dianggarkan beasiswa ke perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara serta dukungan perkembangan perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Kebumen.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini difokuskan untuk mendukung pencapaian IKU persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah /seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan. Hal ini dilakukan dengan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar termasuk pelatihan bagi para penyusun kurikulum agar meningkat kompetensinya. Dengan demikian diharapkan satuan Pendidikan SD maupun SMP yang melaksanakan kurikulum muatan lokal akan terus meningkat.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini difokuskan untuk mendukung kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru. Hal ini dilakukan dengan perhitungan dan pemetaan serta penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Dengan demikian pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan dapat terpenuhi.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini difokuskan untuk mendukung peningkatan pelayanan izin pendidikan. Hal ini dilakukan dengan penilaian kelayakan usul perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat serta pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Selain itu juga dilakukan pengendalian dan pengawasan perizinan PAUD dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat

Dalam masa transisi, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada urusan pendidikan diselaraskan dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, selain dengan program prioritas juga diupayakan melalui program unggulan yaitu Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge serta Anak Soleh. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator

kinerja yaitu Angka Partisipasi Kasar. Selain itu urusan bidang Pendidikan juga diarahkan mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis dan Digitalisasi Pendidikan.

2. Kesehatan

Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah dalam rangka memenuhi SPM Kesehatan. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan pada urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pembangunan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan serta pengadaan obat/vaksin. Pada strata layanan kesehatan rujukan dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan. Peningkatan akses dan mutu pada layanan dasar maupun rujukan melalui pelaksanaan akreditasi dan operasional rumah sakit.

Selain itu peningkatan akses dan mutu layanan yang berkait dengan SPM kesehatan yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita, usia pendidikan dasar, usia produktif dan usia lanjut. Deteksi dini penyakit tidak menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, *diabetes melitus* dan ODGJ, serta penyakit menular seperti pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, orang dengan risiko terinveksi HIV. Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, Pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainya, pengelolaan Surveillans kesehatan, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat serta SPELING (Spesialis Keliling). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian SPM bidang Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM dan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan melalui Peningkatan kompetensi dan

kualifikasi sumber daya manusia kesehatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga serta pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase produk pangan PIRT yang tersertifikasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan untuk advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor, pola hidup sehat dalam rangka promotif preventif dan pengembangan serta pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Anak Soleh. Program ini ditujukan dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase capaian PHBS tingkat Kabupaten.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air minum. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada Pembangunan embung dan penampung air lainnya, Operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya, Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan serta Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan pengembangan sumber air yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan air irigasi pertanian. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan serta Njamu Bergas. Keberhasilan program ini diukur

melalui indikator kinerja yaitu persentase infrastruktur sumber daya air kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik.

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Program ini diarahkan pada Pembangunan SPAM di kawasan perdesaan, dan Peningkatan SPAM di kawasan perdesaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung persentase pelayanan air bersih dan pemenuhan SPM air minum yang diukur dengan indikator kinerja persentase pelayanan air bersih dan perpipaan.

c. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Program ini diarahkan pada pembangunan sistem drainase lingkungan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

d. Program penataan bangunan gedung

Program ini diarahkan pada perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan, rehabilitasi, renovasi, ubah suai serta pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota. Selain itu, fokus implementasi program juga mengarah pada penyelengaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik.

e. Program penataan bangunan dan lingkungannya

Program ini diarahkan pada penataan bangunan dan lingkungannya untuk mendukung pelaksanaan TMMD. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase bangunan dan lingkungan yang tertangani.

f. Program penyelenggaraan jalan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan kabupaten/kota melalui penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jalan, pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pelebaran jalan menuju standar, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan dan pemeliharaan berkala jembatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan

dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap.

g. Program pengembangan jasa konstruksi

Program ini diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Njamu Bergas. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja penyedia jasa konstruksi yang telah dibina dan nilainya baik.

h. Program penyelenggaraan tata ruang

Program ini diarahkan pada penetapan peraturan daerah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesesuaian lahan dengan pola ruang RTRW.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah dan SPM Perumahan Rakyat. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini untuk mendukung capaian indikator kinerja persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota dan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha melalui pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh. Selain itu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh kewenangan kabupaten. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan Kawasan kumuh di bawah 10 Ha. Program ini juga diarahkan untuk mendukung program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah serta Program Prioritas Gubernur

yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota melalui perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaur kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari dan Biyunge Momong. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase rumah tidak layak huni tertangani.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain sanitasi, angkutan lumpur tinja dan sarana prasarana akses jalan IPLT. Koordinasi sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan antara lain pemeliharaan IPAL/IPLT dan pelayanan pengolahan air limbah. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan akses air limbah aman.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, SPM Pemadam Kebakaran dan SPM Penanggulangan Bencana. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan serta misi kelima yaitu Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan untuk menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota melalui upaya pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, termasuk pelaksanaan tugas yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia, serta kerjasama antarlembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu,

program ini juga mencakup penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati melalui penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta sosialisasi penegakan Perda dan Perkada. Program ini juga didukung oleh program unggulan *Biyunge Momong* dan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini ditujukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penegakkan perda.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota melalui kegiatan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/Kota (per jenis bencana), pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan pascabencana serta pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota. Selain itu, program ini meliputi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana melalui respon cepat darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota, serta penyediaan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Program ini juga didukung oleh program unggulan *Lingkungan Bersih Lestari*. Program ini ditujukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tangguh bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada upaya pemadaman dan pengendalian kebakaran di wilayah Kabupaten/Kota untuk mendukung *response time* dalam penanggulangan bencana dan kebakaran, kesiapsiagaan SDM Pemadam Kebakaran dalam penanganan kebakaran dan nonkebakaran. Pelaksanaan program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini ditujukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Sosial dalam rangka mendukung pencapaian SPM bidang Sosial. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Selain itu, urusan pemerintahan bidang Sosial juga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Sekolah Rakyat, Kartu Kesejahteraan, dan Kartu Usaha

Afirmatif. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan untuk penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan melalui Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan warga negara korban tindak kekerasan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, penyediaan sandang, penyediaan alat bantu, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberian layanan data dan pengaduan, serta pemberian layanan kedaruratan. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya melalui pemberian layanan data dan pengaduan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase PMKS diluar panti kewenangan Kabupaten yang tertangani.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan jaminan sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota melalui penyediaan

makanan, penyediaan sandang, penyediaan tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pemenuhan SPM Sosial dan pencapaian indikator kinerja persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

f. Program pengelolaan taman makam pahlawan

Program ini diarahkan pada pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase taman makam pahlawan yang dikelola.

5.1.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja adalah dalam rangka menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas, peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja termasuk perempuan. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan Sregep Ngode Bareng Biyunge dan Perempuan Berdaya. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan tenaga kerja

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan produktivitas, meningkatkan kinerja, memperluas kesempatan kerja serta menjamin kelangsungan perusahaan, dimana setiap perusahaan besar diharapkan untuk menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro. Dengan perencanaan tenaga kerja yang tepat di sektor riil diharapkan penyerapan tenaga kerja semakin berkualitas dan TPT semakin menurun.

b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran LPK sebagai lembaga penyalur tenaga kerja sehingga penempatan tenaga kerja akan lebih baik, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penurunan TPT.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja yang berkualitas, yang selanjutnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan penurunan TPT.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan tenaga kerja formal yang memberikan kepastian kesejahteraan tenaga kerja tersebut melalui peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan pada urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota melalui sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota melalui advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

b. Program Perlindungan perempuan

Program ini diarahkan pada penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dan koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu sebagai bentuk promosi difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan perempuan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada penyediaan data gender dan anak kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program pengelolaan sistem data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini diarahkan pada pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan Kabupaten Kebumen serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kategori Kabupaten Layak Anak (KLA).

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota dengan fokus pada penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan perlindungan anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pangan adalah dalam rangka mengendalikan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta memperkuat penanganan kerawanan pangan dengan menjaga kecukupan konsumsi pangan. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan Mangan Wareg dan Bergizi serta Petani Makmur dan Swadaya Pangan serta Prioritas Pusat Penanganan Inflasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan masyarakat terutama di masa sulit seperti paceklik atau bencana dengan menyimpan cadangan pangan, melindungi hasil panen, menstabilkan harga bagi petani serta menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial sehingga dapat memastikan masyarakat tidak kelapan dan lebih mandiri. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan lumbung pangan masyarakat.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan untuk meningkatkan angka kecukupan energi atau kebutuhan kalori rata-rata harian masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan keragaman pangan masyarakat yang berkualitas sehingga akan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara luas.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan melalui rekomendasi perizinan keamanan pangan segar serta juga melakukan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan.

d. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan penanganan kerawanan pangan. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pemetaan kerentanan dan ketahanan pangan di tingkat kecamatan serta pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada untuk mengatasi kerawanan pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* serta pelaksaaan penataan aset dan akses pada Urusan Pertanahan sesuai dengan Perpres Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan sengketa lahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada sub bidang air limbah. Secara umum dalam masa transisi, program pada urusan kesehatan telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan. Adapun rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pembuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. Selain itu pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi, serta penghentian sumber pencemaran. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten/kota dengan fokus pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada penyimpanan sementara limbah B3 sebelum dilakukan pembuangan akhir ditempat yang ditentukan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase kegiatan usaha yang memiliki ijin pengelolaan LB3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan fokus pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH dan pengawasan usaha atas ijin yang telah diterbitkan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengawasan lingkungan hidup.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Kebumen melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup dan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang memiliki peraturan lingkungan hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat di Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase Desa dan Kelurahan yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan fokus pada pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dan fasilitasi koordinasi penerapan sanksi lingkungan hidup. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada pengelolaan sampah dengan fokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jumlah lembaga pengolah sampah. Selain itu program ini juga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengelolaan Sampah Terpadu.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pelayanan pendaftaran penduduk dengan tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, serta mendukung Program Unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini memiliki kegiatan diantaranya pelayanan pendaftaran penduduk, penataan pendaftaran penduduk, dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelayanan pencatatan sipil dengan tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendaftaran penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan layanan pencatatan sipil, serta mendukung Program Unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini memiliki kegiatan diantaranya pelayanan pencatatan sipil, dan penyelenggaraan pencatatan sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini memiliki fungsi dalam pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan, pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan, serta mendukung Program Unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini memiliki kegiatan diantaranya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan penataan desa yang mencakup pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa serta penegasan batas desa. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa tertata.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini difokuskan pada fasilitasi kerja sama antardesa, kerja sama antara desa dan pihak ketiga, serta fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan. Pelaksanaan program ini juga mendukung upaya pencapaian program unggulan *Desa Berdaya* yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan fasilitasi kerja sama desa.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Fokus kegiatan meliputi fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, fasilitasi produk hukum desa, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa, serta pembinaan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa, serta pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh desa. Program ini ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui fasilitasi pembinaan BUMDes, tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa, dan cakupan administrasi pemerintahan desa. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh program unggulan *Mangan Wareg Bareng Biyunge*, *Anak Soleh*, *Desa Berdaya* serta *Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge*. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dengan layanan administrasi baik.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota. Fokus kegiatan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Program ini juga didukung oleh program unggulan *Desa Berdaya* serta *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung capaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat termasuk lembaga ekonomi desa dan mendukung pencapaian indikator kinerja persentase PKK desa/kelurahan tertib administrasi.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah melalui penyusunan profil kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta penyusunan kajian dampak kependudukan. Fokus pada implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal dan penyusunan profil kependudukan keluarga dan kajian dampak kependudukan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal fokus pada pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK dan promosi dan penyediaan sarana KIE program KKBPK. Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/ Petugas lapangan KB (PKB/PLKB) dengan fokus pada penyediaan sarana pendukung operasional PKB/PLKB dan Penggerakan Kader Institusi masyarakat pedesaan (IMP). Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah fokus pada pengendalian distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan, peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang, serta promosi dan konseling kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB fokus pada Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan peserta KB aktif.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dilaksanakan melalui orientasi bagi pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga, promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan dan mitra kerja. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Biyunge Momong. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pemberdayaan keluarga sejahtera.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perhubungan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi ketiga yaitu Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan untuk penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota melalui penyediaan dan rehabilitasi serta pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana terminal. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Pengujian berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota melalui pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota fokus pada pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan serta Njamu Bergas. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks infrastruktur perhubungan. Selain itu, urusan pemerintahan bidang Perhubungan mendukung pembangunan/pengembangan *Double Track* Jawa Selatan.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks PPID.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan fokus pada penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berfokus pada pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah dalam menunjang pelaksanaan e-government di lingkup pemerintah daerah dan mewujudkan kebumen smart city. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai domain layanan SPBE dalam penilaian indeks SPBE dan telah masuk kategori sangat baik pada Tahun 2024 tetapi pada tahun 2025 tidak dilakukan perhitungan karena sedang pada masa transisi menjadi indikator Evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI).

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi utamanya pada sektor PDRB industri pengolahan melalui peningkatan kewirausahaan, kualitas sektor koperasi serta kapasitas UMKM. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan Sregep Ngode, serta Plesir Bareng dan Bakulan Laris serta Program Nasional Koperasi Desa Merah Putih. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan volume usaha koperasi melalui optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Hal ini dilakukan meningkatkan akuntabilitas lembaga koperasi yang ada.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi. SDM yang berkualitas dharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang baik sehingga mampu menjalankan operasional koperasi secara efektif dan efisien. Pengurus dan pengelola koperasi yang kompeten dapat mengambil keputusan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip koperasi. Serta dengan Pengurus dan pengelola koperasi yang kompeten dapat mengambil keputusan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip koperasi.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan advokasi terhadap koperasi melalui Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi serta Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas UMKM melalui Peningkatan jumlah usaha mikro yg terbina, Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, serta Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro. Program ini juga mendukung Program Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu Jumlah Produk Tersertifikasi Halal yang akan difasilitasi BPJPH Kemenag dan Provinsi Jawa Tengah melalui fasilitasi NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal serta Peningkatan literasi terkait produk tersertifikasi halal kepada UMKM melalui sosialisasi dan dan fasilitasi bekerjasama dengan BPJPH Kemenag. Selain itu juga mendukung Program Tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 lainnya yaitu Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah oleh Bank Jateng di wilayah Kabupaten Kebumen melalui Penguatan UMKM sebagai basis pembiayaan syariah.

e. Program pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan untuk pertambahan usaha mikro melalui Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Pertambahan UMKM bertujuan untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan investasi sebaga i upaya pendanaan sektor-sektor produktif dan *value*

added. Urusan ini secara umum juga mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi ke depan serta indikator makro lainnya seperti TPT, pendapatan perkapita, hingga kemiskinan dan ketimpangan. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan realisasi investasi di Kabupaten Kebumen melalui Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota serta penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026-2046.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk peningkatan kepeminatan penanaman modal melalui Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal serta Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko dan terintegrasi secara elektronik.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan cakupan kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku melalui Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya serta pengawasan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kemudahan mengakses data dan informasi perijinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang menjadi kewenangan kabupaten.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak dasar Yang Inklusif dan Berkeadilan Serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini difokuskan pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten/Kota dengan fokus pada koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan

didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase organisasi pemuda yang aktif. Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator yaitu pelatihan/ kursus/ training dan memperoleh sertifikat untuk mendukung indikator persentase pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/training dan memperoleh sertifikat.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dengan fokus pada pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan *(Sport Science)* dan pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota dan pemberian penghargaan olahraga Kabupaten/Kota serta pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga melalui pengembangan organisasi keolahragaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase prestasi olahraga.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini difokuskan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan dengan fokus pada partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Muda Kreatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja capaian perstasi kepramukaan.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Statistik secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase OPD yang mengisi website satu data sesuai SOP.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Persandian secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah dalam rangka meningkatkan pemajuan kebudayaan melalui peningkatan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal melalui pelestarian seni, budaya dan adat istiadat serta optimalisasi Kelompok Masyarakat yang Terlibat dalam Kegiatan Kebudayaan. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan plesir bareng dan bakulan laris serta ayem, tentrem, guyub, rukun. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, serta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan peningkatan kunjungan tempat bersejarah melalui Pelindungan Cagar Budaya serta Pengembangan Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Perpustakaan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi pertama yaitu Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Inklusif dan Berkeadilan serta Pemberdayaan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Rencana program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini difokuskan pada pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang difokuskan pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan serta Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks pembangunan literasi masyarakat.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini difokuskan pada pelestarian koleksi naskah kuno yang ada di Kabupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Plesir Bareng Biyunge. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pelestarian koleksi dan naskah kuno.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kearsipan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Selain itu juga diupayakan mendukung program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge. Rencana program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini berfokus pada pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase jumlah pencipta arsip yang menerapkan arsip baku.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini berfokus pada pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana, penyelamatan arsip perangkat daerah, autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, serta pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase OPD yang telah menyelamatkan arsipnya secara NSPK.

c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini berfokus pada pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja regulasi akses ijin penggunaan arsip tertutup.

5.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kedua yaitu Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Keberlanjutan. Program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini difokuskan untuk pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan nelayan kecil melalui penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap dan pengembangan kapasitas nelayan kecil, serta penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten dengan fokus pada pembinaan KUB melalui pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT melalui pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja produksi perikanan tangkap PUD dan tangkap laut.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini difokuskan pada penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan fokus pada pelayanan tanda daftar usaha perikanan budidaya dan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan, penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan, pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat, serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase nilai produksi perikanan budidaya tawar dan air payau.

c. Program Pengawasan sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Progam ini difokuskan pada pengawasan sumber daya perikanan diwilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air dari penangkapan yang dapat merusak ekosistem yang ada didalamnya. Pengawasan dilakukan di daerah Kebupaten Kebumen. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan didukung oleh program unggulan Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase wilayah yang dilakukan pengawasan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Progam ini difokuskan pada pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil dan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan melalui pelaksanaan bimbingan penerapan standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Dalam masa transisi, program ini juga diupayakan untuk mendukung program unggulan Mangan Wareg Bareng Biyunge serta Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase peningkatan nilai produksi usaha kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pariwisata adalah dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum melalui peningkatan kualitas daya tarik wisata, peningkatan kunjungan wisatawan serta pengembangan sub sektor ekonomi kreatif. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan plesir bareng dan bakulan laris serta muda kreatif (anake biyunge) serta mendukung pengembangan *Geopark* Kebumen. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata melalui peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, serta Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini juga mendukung program tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu Jumlah DTW Alam yang Dikembangkan melalui pemetaan DTW Alam beresiko tinggi, penilaian skala prioritas DTW Alam beresiko tinggi yang akan dijadikan pilot project, serta edukasi, pelatihan dan workshop terkait peyusunan SOP Pelayanan dan Manajemen Risiko kepada SDM pengelola DTW. Selain itu juga mendukung program tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 lainnya yaitu Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang Dicanangkan oleh Provinsi Jawa Tengah melalui pemetaan calon Desa Wisata/Kampung Wisata yang akan masuk ke databese Provinsi; Mendukung Provinsi melakukan penilaian skala prioritas calon Desa Wisata sesuai potensi masing-masing desa menjadi shortlist database: Melakukan pendampingan, pelatihan, *workshop*, pengembangan desa menjadi Desa Wisata yang akan ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Juga mendukung program tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 lainnya yaitu Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah melalui

pengembangan pada daya tarik wisata sejarah makam dan tempat ibadah Muslim di wilayah Kabupaten Kebumen

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota. Program ini juga mendukung program tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu Jumlah Kunjungan wisatawan melalui Penyelenggaraan *Event* Pariwisata dan Budaya; Promosi Pemasaran Pariwisata; Pameran Pariwisata Daerah; serta Penguatan Paket Pariwisata.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan cakupan pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi melalui Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar serta Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif. Program ini juga mendukung program tematik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu Jumlah Konten Kreator yang dilatih oleh Provinsi Jawa Tengah melalui Pelatihan konten kreator desa wisata di Kebumen.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanian adalah dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor pertanian serta PDRB perkapita melalui peningkatan daya saing ekonomi dengan mengoptimalkan nilai produksi pertanian. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan Mangan Wareg dan Bergizi serta Petani Makmur dan Swadaya Pangan. Urusan pertanian juga akan mempedomani target komitmen bersama antara Gubernur, Polda, Kodam IV Diponegoro, BPS, Bupati/ Walikota tanggal 14 Januari 2026 di Kota Surakarta, menjadi dasar perhitungan target Tahun 2027. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Cakupan Penyediaan dan Pengembangan praSarana Pertanian melalui Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian, serta Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Cakupan penanganan penyakit hewan melalui Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM), Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Cakupan Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian melalui Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Cakupan izin usaha Pertanian dan Perternakan melalui Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian, serta Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan. Program ini juga mendukung program tematik Jawa Tengah tahun 2027 yaitu Jumlah RPH/RPU yang Tersertifikasi Halal yang difasilitasi oleh Provinsi melalui Sertifikasi halal terhadap tukang jagal dari RPU yang telah tersertifikasi NKV. Selain itu juga mendukung program tematik Jawa Tengah tahun 2027 lainnya yaitu Jumlah Tukang Jagal yang Orang Tersertifikat Halal yang difasilitas Provinsi Jawa Tengah melalui fasilitasi pelatihan untuk tukang jagal yang belum memiliki sertifikat atau yang masa berlakunya telah habis, Sosialisasi dan edukasi terpadu kepada tukang jagal di RPH/RPU/TPH/Masjid atau panitia kurban terkait pentingnya kompetensi tukang jagal yang telah memiliki sertifikasi halal, serta Melakukan koordinasi dengan BI, Baznas, serta Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah terkait kolaborasi dalam pemberian fasilitasi pelatihan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan untuk meningkatkan skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian melalui Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, serta Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian, Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral adalah dalam rangka mendukung pengurangan dampak perubahan iklim dan pemanasan global sekaligus untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan peran EBT dalam pembangunan berkelanjutan. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan Lingkungan Bersih Lestari. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program pengelolaan EBT yang diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi EBT melalui Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota serta Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang perdaganganl adalah dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan kontribusi perdagangan terhadap perekonomian wilayah. Urusan ini secara umum juga mendukung program unggulan Plesir Bareng Bakulan Laris. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar melalui Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, serta Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota.

b. Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk mengendalikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagai bagian pengendalian inflasi melalui penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, serta Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Target program ini adalah menjaga disparitas harga mendekati 0% melalui kerja sama antardaerah.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan untuk peningkatan nilai ekspor perdagangan melalui Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan metrologi melalui Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan untuk peningkatan cakupan Pelaksanaan Belanja Produk dalam Negeri melalui Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

6. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang perindustrian adalah dalam rangka pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi melalui peningkatan kapasita sektor industri pengolahan khususnya oleh IKM. Urusan ini secara umum juga mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi serta indikator makro lainnya yaitu penurunan TPT serta peningkatan PDRB perkapita. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan untuk peningkatan Pencapian Sasaran Pembangunan Industri Daerah melalui Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan untuk Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan untuk penyediaan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini melalui Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), serta Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

7. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang transmigarsi adalah dalam rangka mengurangi TPT melalui peningkatan kualitas program transmigrasi. Rencana program yang akan dilaksanakan adalah program pembangunan kawasan

transmigrasi yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan transmigran yang berhasil/menetap melalui fasilitasi kepada calon transmigran untuk mengikuti program transmigrasi nasional.

5.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi dengan rincian program antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini juga mendukung program unggulan Ayem Tentrem Guyub Rukun. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja nilai IKM Sekretariat Daerah dan nilai SAKIP Sekretariat Daerah.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini difokuskan pada Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dan Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Program ini mendukung program unggulan Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge, serta program unggulan Anak Soleh. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Zakat Nasional, dan Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini memiliki *outcome* meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah. Program ini difokuskan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang dilaksanaan antara lain:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini difokuskan pada kegiatan dengan sasaran Sekretariat DPRD diantaranya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, Administrasi Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta dengan sasaran DPRD diantaranya kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dan Layanan Administrasi DPRD. Program ini mendukung ketercapaian indikator kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dan Nilai IKM Sekretariat DPRD.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini difokuskan pada layanan fasilitasi DPRD diantaranya kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, dan Fasilitasi Tugas DPRD. Program ini mendukung ketercapaian indikator kinerja Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

5.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Adapun program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini memiliki fokus pada tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan data informasi pembangunan Daerah. Program ini mendukung program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini memiliki fokus pada tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi urusan tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral, pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, pariwisata, kebudayaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan unsur Kewilayahan. Program ini mendukung program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dan indikator kinerja Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

2. Keuangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang dilaksanaan antara lain:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program ini mendukung program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Capaian Pendapatan Daerah.

3. Kepegawaian

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada bidang Kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah. Program ini difokuskan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Program ini mendukung program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Penempatan ASN dalam Jabatan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada bidang Pendidikan dan Pelatihan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program ini difokuskan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Program ini mendukung program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase ASN yang Meningkat Kapasitasnya.

5. Penelitian dan Pengembangan

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada bidang Penelitian dan Pengembangan adalah Program Riset dan Inovasi Daerah. Program ini memiliki fokus pada tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana

induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Program ini mendukung program unggulan Muda Kreatif (Anake Biyunge). Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah.

5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kebumen secara umum telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program yang dilaksanaan antara lain:

a. Progam Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Program ini mendukung program unggulan ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja Level Kapabilitas APIP.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dan Pendampingan dan Asistensi. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Persepsi Korupsi.

5.1.7. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam Unsur Kewilayahan secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi keempat yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi. Program pada urusan unsur kewilayahan bertujuan untuk mendukung capaian nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan fokus pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait degan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelaksanaan program ini didukung oleh program unggulan *Desa Berdaya* serta *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kegiatan pemberdayaan kelurahan. Fokus pelaksanaan meliputi padat karya dan swakelola pada pembangunan fisik lingkungan kelurahan,

peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang desa/kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan. Program ini didukung oleh program unggulan *Desa Berdaya*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kelurahan.

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan pemerintah daerah, dengan fokus pada pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Program ini didukung oleh program unggulan *Desa Berdaya* serta *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kondusivitas kecamatan.

d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa. Fokus kegiatan meliputi fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, fasilitasi kerja sama desa dan antardesa, fasilitasi penyelenggaraan dan ketertiban umum, fasilitasi penyusunan pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya. Program ini didukung oleh program unggulan *Desa Berdaya* serta *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase desa dengan Indeks Desa (ID) kategori maju dan mandiri.

5.1.8. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik) secara umum dalam masa transisi ini telah selaras dengan pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 terutama misi kelima yaitu mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai kegamaan dan budaya lokal. Program yang akan dilaksanakan yaitu:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis serta pemantapan pelaksanaan urusan di bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Fokus program meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. Program ini didukung oleh program unggulan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan urusan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik. Fokus pelaksanaan mencakup kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini didukung oleh program unggulan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja capaian partisipasi masyarakat/penduduk dalam proses pemilihan umum.

c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis serta pemantapan pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Fokus kegiatan meliputi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dibidang pendaftaran, pemberdayaan, evaluasi, mediasi sengketa dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Program ini didukung oleh program unggulan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Fokus kegiatan mencakup pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Program ini didukung oleh program unggulan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja rasio elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Fokus kegiatan meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta penanganan konflik di daerah. Program ini didukung oleh program unggulan *Ayem Tentrem Guyub Rukun*. Program ini bertujuan untuk mendukung pencapaian

indikator kinerja persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, ideologi, politik, radikal dan sumber daya ekonomi.

Selain program yang termasuk dalam klasifikasi urusan kewenangan pemerintah daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah yang mencakup:

a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
b. Administrasi Keuangan dengan fokus kegiatan pada pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan perangkat daerah termasuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN pada lingkup perangkat daerah.
c. Administrasi umum perangkat daerah dengan fokus kegiatan pada penyediaan barang/jasa pendukung administrasi perkantoran.
d. Pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan fokus pada kegiatan pengadaan barang/jasa pendukung operasional perangkat daerah.
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan fokus pada penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah meliputi penyediaan jasa surat-menyurat, jasa komunikasi air dan listrik serta jasa pelayanan umum kantor.

Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

Secara lengkap rencana pendanaan dan dukungan terhadap prioritas pembangunan tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2027

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PRIORITAS 1. Peningkatan pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar yang terjangkau serta pengembangan pariwisata guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**26.939.648.609**	**0,87%**	**11.972.246.145**	**1.683.171.000**	**-**	**-**	**13.284.231.464**	**1,09%**	
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	**13.124.739.341**	**0,42%**	**8.225.336.877**	**1.378.225.000**	**-**	**-**	**3.521.177.464**	**0,29%**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.211.239.341		8.225.336.877	1.378.225.000			2.607.677.464		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	255.000.000						255.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	472.000.000						472.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	96.500.000						96.500.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.000.000						90.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**12.944.410.284**	**0,42%**	**3.746.909.268**	**304.946.000**	**-**	**-**	**8.892.555.016**	**0,01**	Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.258.258.329,00		3.746.909.268,00	304.946.000,00			1.206.403.061		
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	90.000.000						90.000.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	2.866.455						2.866.455		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.352.578.500						1.352.578.500		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.627.522.000						5.627.522.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	593.185.000						593.185.000		Dinas Sosial dan P3A

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	20.000.000						20.000.000		Dinas Sosial dan P3A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**870.498.984**	**0,03%**	**-**		**-**	**-**	**870.498.984**	**0,00**	**Dinas Sosial dan P3A**
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	147.057.984						147.057.984		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	286.705.000						286.705.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.636.000						10.636.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6.805.000						6.805.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	167.360.000						167.360.000		Dinas Sosial dan P3A
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	251.935.000						251.935.000		Dinas Sosial dan P3A
PRIORITAS 2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan dasar	**1.047.428.371.204**	**33,81%**	**795.292.732.204**	**25.158.968.000**	**-**	**-**	**226.976.671.000**	**18,56%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**1.027.000.523.736**	**33,15%**	**791.883.417.136**	**24.773.418.000**	**-**	**-**	**210.343.688.600**	**17,20%**	**Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga**

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	820.790.182.066		791.883.417.136	24.773.418.000			4.133.346.930		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	202.565.033.590						202.565.033.590		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	48.000.000						48.000.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.567.308.080						3.567.308.080		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	30.000.000						30.000.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**5.184.116.068**	**0,17%**	**3.409.315.068**	**385.550.000**	**-**	**-**	**1.389.251.000**	**0,11%**	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.432.622.068		3.409.315.068	385.550.000			637.757.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	705.009.000						705.009.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	46.485.000						46.485.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**15.243.731.400**	**0,49%**	**-**		**-**	**-**	**15.243.731.400**	**1,25%**	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	14.866.112.400						14.866.112.400		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	377.619.000						377.619.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PRIORITAS 3. Peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam rangka penguatan pelayanan dasar	**588.556.941.819**	**19,00%**	**139.211.281.819**	**14.932.567.000**	**-**	**-**	**434.413.093.000**	**35,52%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**576.808.265.819**	**18,62%**	**139.211.281.819**	**14.932.567.000**	**-**	**-**	**422.664.417.000**	**34,56%**	**Dinas Kesehatan dan PPKB**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	427.982.942.819		139.211.281.819	14.932.567.000			273.839.094.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	142.292.970.900		-	-	-		142.292.970.900		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.546.657.000						2.546.657.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	697.965.000						697.965.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.287.730.100						3.287.730.100		Dinas Kesehatan dan PPKB

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**11.748.676.000**	**0,38%**	**-**		**-**	**-**	**11.748.676.000**	**0,96%**	Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	543.800.000						543.800.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.996.876.000						3.996.876.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.208.000.000						7.208.000.000		Dinas Kesehatan dan PPKB
PRIORITAS 4. Penguatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang memperkuat aksesibilitas pelaku usaha dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**40.192.949.584**	**1,30%**	**6.129.119.048**	**307.772.000**	**-**	**-**	**33.756.058.536**	**2,76%**	

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**9.925.287.536**	**0,32%**	**-**		**-**	**-**	**9.925.287.536**	**0,81%**	**Dinas Pertanian dan Pangan**
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.631.375.250						3.631.375.250		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.857.152.636						4.857.152.636		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	605.000.000						605.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	135.000.000						135.000.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	29.180.000						29.180.000		Dinas Pertanian dan Pangan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	667.579.650						667.579.650		Dinas Pertanian dan Pangan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**1.165.271.000**	**0,04%**	**-**		**-**	**-**	**1.165.271.000**	**0,10%**	DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	510.433.000						510.433.000		DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	513.454.000						513.454.000		DLHKP
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	12.426.000						12.426.000		DLHKP
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	128.958.000						128.958.000		DLHKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**13.345.506.048**	**0,43%**	**6.129.119.048**	**307.772.000**	**-**	**-**	**6.908.615.000**	**0,56%**	Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.973.612.048		6.129.119.048	307.772.000			536.721.000		Dinas Tenaga Kerja

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	15.000.000						15.000.000		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	734.438.000						734.438.000		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	246.000.000						246.000.000		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	5.376.456.000						5.376.456.000		Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	**45.000.000**	**0,00%**	**-**		**-**	**-**	**45.000.000**	**0,00%**	**Dinas Tenaga Kerja**
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	45.000.000						45.000.000		Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	**8.542.099.000**	**0,28%**	**-**		**-**	**-**	**8.542.099.000**	**0,70%**	**Disperindag KUKM**
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.033.539.000						5.033.539.000		Disperindag KUKM
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.827.600.000						2.827.600.000		Disperindag KUKM

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	60.000.000						60.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	134.881.000						134.881.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	486.079.000						486.079.000		Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**7.169.786.000**	**0,23%**	**-**		**-**	**-**	**7.169.786.000**	**0,59%**	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.704.786.000						4.704.786.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.205.000.000						2.205.000.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	260.000.000						260.000.000		Dinas Pariwisata dan K ebudayaan
PRIORITAS 5. Peningkatan iklim investasi yang kondusif berbasis pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang bagi kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya kepariwisataan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**4.078.583.447**	**0,13%**	**2.623.420.447**	**397.012.000**	**-**	**-**	**1.058.151.000**	**0,09%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**4.078.583.447**	**0,13%**	**2.623.420.447**	**397.012.000**	**-**	**-**	**1.058.151.000**	**0,09%**	**DPMPTSP**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.886.183.447		2.623.420.447	397.012.000			865.751.000		DPMPTSP
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-						-		DPMPTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	96.400.000						96.400.000		DPMPTSP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	54.000.000						54.000.000		DPMPTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	34.000.000						34.000.000		DPMPTSP
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	8.000.000						8.000.000		DPMPTSP
PRIORITAS 6. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana terpadu guna mendukung proses produksi, promosi, pemasaran, dan distribusi produk secara efektif dan berkelanjutan guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**53.568.485.378**	**1,73%**	**11.502.297.378**	**3.728.906.000**	**-**	**-**	**38.337.282.000**	**3,13%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**33.777.283.000**	**1,09%**	**-**		**-**	**-**	**33.777.283.000**	**2,76%**	Disperindag KUKM
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	33.627.283.000						33.627.283.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	90.000.000						90.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	60.000.000						60.000.000		Disperindag KUKM

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	**18.900.519.378**	**0,61%**	**11.502.297.378**	**3.728.906.000**	**-**	**-**	**3.669.316.000**	**0,30%**	**Disperindag KUKM**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.375.535.378		11.502.297.378	3.728.906.000			2.144.332.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	14.400.000						14.400.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	40.000.000						40.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	91.000.000						91.000.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.500.000						25.500.000		Disperindag KUKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.354.084.000						1.354.084.000		Disperindag KUKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**890.683.000**	**0,03%**	**-**		**-**	**-**	**890.683.000**	**0,07%**	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	890.683.000						890.683.000		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
PRIORITAS 7. Penguatan landasan perencanaan dan pembangunan sarana prasarana yang terintegrasi dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah dalam rangka penguatan pelayanan publik	**318.400.481.022**	**10,28%**	**30.958.291.278**	**3.741.245.000**	**6.492.000.000**	**-**	**279.756.120.744**	**22,88%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**5.128.222.000**	**0,17%**	**-**		**-**	**-**	**5.128.222.000**	**0,42%**	**Disperkimhub**

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.507.606.000						1.507.606.000		Disperkimhub
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	431.662.000						431.662.000		Disperkimhub
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.085.704.000						2.085.704.000		Disperkimhub
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.103.250.000						1.103.250.000		Disperkimhub
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**27.434.729.212**	**0,89%**	**7.865.953.212**	**2.547.176.000**	**-**	**-**	**19.568.776.000**	**1,60%**	**Disperkimhub**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.969.129.212		7.865.953.212	2.547.176.000			5.103.176.000		Disperkimhub
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	14.465.600.000						14.465.600.000		Disperkimhub
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**270.398.604.798**	**8,73%**	**18.697.165.054**	**1.134.651.000**	**-**	**-**	**250.566.788.744**	**20,49%**	DPUPR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.208.816.054		18.697.165.054	1.134.651.000			4.377.000.000		DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.124.227.486						13.124.227.486		DPUPR

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.250.000.000						9.250.000.000		DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	19.661.033.461						19.661.033.461		DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.730.000.000						20.730.000.000		DPUPR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	950.000.000						950.000.000		DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	181.005.445.312						181.005.445.312		DPUPR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	268.734.601						268.734.601		DPUPR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.200.347.884						1.200.347.884		DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**100.000.000**	**0,00%**	**-**		**-**	**-**	**100.000.000**	**0,01%**	DPUPR
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	100.000.000						100.000.000		DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**15.338.925.012**	**0,50%**	**4.395.173.012**	**59.418.000**	**6.492.000.000**	**-**	**4.392.334.000**	**0,36%**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.964.677.230		4.395.173.012	59.418.000			510.086.218		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENATAAN DESA	22.750.000						22.750.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	1.072.200.000						1.072.200.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.757.577.782				6.492.000.000		1.265.577.782		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.521.720.000						1.521.720.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PRIORITAS 8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yang ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat pascabencana guna percepatan penanggulangan kemiskinan	**44.248.078.990**	**1,43%**	**16.130.335.990**	**8.501.019.000**	**-**	**-**	**20.175.202.000**	**1,65%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**36.073.322.425**	**1,16%**	**12.302.024.425**	**7.942.541.000**	**-**	**-**	**15.828.757.000**	**1,29%**	**DLHKP**

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.341.856.425		12.302.024.425	7.942.541.000			3.097.291.000		DLHKP
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	30.984.000						30.984.000		DLHKP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	463.516.000						463.516.000		DLHKP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.815.679.000						1.815.679.000		DLHKP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27.200.000						27.200.000		DLHKP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	32.475.000						32.475.000		DLHKP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	14.285.000						14.285.000		DLHKP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	8.963.000						8.963.000		DLHKP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	8.648.000						8.648.000		DLHKP

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.329.716.000						10.329.716.000		DLHKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	**8.000.000**	**0,00%**	**-**		**-**	**-**	**8.000.000**	**0,00%**	**Dinas Tenaga Kerja**
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	8.000.000						8.000.000		Dinas Tenaga Kerja
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**8.166.756.565**	**0,26%**	**3.828.311.565**	**558.478.000**	**-**	**-**	**4.338.445.000**	**0,35%**	**BPBD**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.447.736.565		3.828.311.565	558.478.000			1.619.425.000		BPBD
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.719.020.000						2.719.020.000		BPBD

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PRIORITAS 9. Penguatan kapasitas ASN di bidang ekonomi digital, khususnya pariwisata, dalam pelayanan publik, pengelolaan destinasi, serta pemasaran digital yang profesional dalam rangka mendukung pemerataan akses layanan publik dan program penanggulangan kemiskinan	**153.237.067.436,00**	**4,95%**	**105.439.686.436,00**	**4.502.059.000,00**	**-**	**-**	**43.295.322.000,00**	**3,54%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**8.108.694.974**	**0,26%**	**4.277.498.974**	**808.553.000**	**-**	**-**	**3.022.643.000**	**0,25%**	**Disdukcapil**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.782.137.974		4.277.498.974	808.553.000			696.086.000		Disdukcapil
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.718.000.000						1.718.000.000		Disdukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	94.000.000						94.000.000		Disdukcapil

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	514.557.000						514.557.000		Disdukcapil
KEWILAYAHAN	**78.017.421.898**	**2,52%**	**59.539.429.898**	**2.144.894.000**	**-**	**-**	**16.333.098.000**	**1,34%**	Kecamatan
SELURUH PROGRAM DI KECAMATAN DAN KELURAHAN	78.017.421.898		59.539.429.898	2.144.894.000			16.333.098.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**9.929.040.562**	**0,32%**	**3.858.513.562**	**915.751.000**	**-**	**-**	**5.154.776.000**	**0,42%**	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.636.934.562		3.858.513.562	915.751.000			862.670.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.794.443.000						1.794.443.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.497.663.000						2.497.663.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
SEKRETARIAT DPRD	**57.181.910.002**	**1,85%**	**37.764.244.002**	**632.861.000**	**-**	**-**	**18.784.805.000**	**1,54%**	**Sekretariat DPRD**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.916.805.002		37.764.244.002	632.861.000			2.519.700.000		Sekretariat DPRD

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	16.265.105.000						16.265.105.000		Sekretariat DPRD
PRIORITAS 10. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan dapat diakses publik untuk Memastikan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan pelayanan publik	**781.565.175.780,00**	**25,23%**	**62.519.686.620,00**	**1.727.711.000,00**	**595.806.446.160,00**	**9.480.000.000,00**	**112.031.332.000,00**	**9,16%**	
SEKRETARIAT DAERAH	**49.724.877.644**	**1,61%**	**21.768.214.644**	**506.657.000**	**-**	**-**	**27.450.006.000**	**2,24%**	**Sekretariat Daerah**

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.400.680.644		21.768.214.644	506.657.000			9.125.809.000		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.881.000.000						16.881.000.000		Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.443.197.000						1.443.197.000		Sekretariat Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**142.669.000**	**0,00%**	**-**		**-**	**-**	**142.669.000**	**0,01%**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	124.669.000						124.669.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	16.000.000						16.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.000.000						2.000.000		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
PERENCANAAN	**9.418.680.451**	**0,30%**	**6.395.396.451**	**182.706.000**	**-**	**-**	**2.840.578.000**	**0,23%**	**Bapperida**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.880.680.451		6.395.396.451	182.706.000			1.302.578.000		Bapperida
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	810.000.000						810.000.000		Bapperida

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	728.000.000						728.000.000		Bapperida
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**1.160.000.000**	**0,04%**	**-**		**-**	**-**	**1.160.000.000**	**0,09%**	**Bapperida**
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.160.000.000						1.160.000.000		Bapperida
KEUANGAN	**686.537.943.068**	**22,16%**	**18.529.846.908**	**1.008.567.000**	**595.806.446.160**	**9.480.000.000**	**61.713.083.000**	**5,05%**	**BPKPD**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.473.171.908		18.529.846.908	1.008.567.000			1.934.758.000		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	659.673.993.160				595.806.446.160	9.480.000.000	54.387.547.000		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	680.000.000						680.000.000		BPKPD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.710.778.000						4.710.778.000		BPKPD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	**34.000.000,00**	**0,00%**	**-**		**-**	**-**	**34.000.000,00**	**0,00%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	34.000.000,00						34.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	**86.000.000**	**0,00%**	**-**		**-**	**-**	**86.000.000**	**0,01%**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	86.000.000						86.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEPEGAWAIAN	**7.363.464.798**	**0,24%**	**5.851.264.798**	**-**	**-**	**-**	**1.512.200.000**	**0,12%**	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.473.464.798		5.851.264.798	-			622.200.000		BKPSDM
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	890.000.000						890.000.000		BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**1.374.002.000**	**0,04%**	**-**		**-**	**-**	**1.374.002.000**	**0,11%**	**BKPSDM**
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.374.002.000						1.374.002.000		BKPSDM
INSPEKTORAT DAERAH	**25.723.538.819**	**0,83%**	**9.974.963.819**	**29.781.000**	**-**	**-**	**15.718.794.000**	**1,29%**	**Inspektorat Daerah**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.593.538.819		9.974.963.819	29.781.000			3.588.794.000		Inspektorat Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.460.000.000						7.460.000.000		Inspektorat Daerah

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	4.670.000.000						4.670.000.000		Inspektorat Daerah
PRIORITAS 11. Penguatan landasan pengembangan pusat kegiatan keagamaan, kebudayaan, dan seni tradisional sebagai ruang pembelajaran, interaksi sosial, dan pelestarian warisan budaya dalam rangka penguatan pelayanan kepada masyarakat	**9.277.968.276**	**0,30%**	**5.643.252.276**	**1.767.410.000**	**-**	**-**	**1.867.306.000**	**0,15%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**9.277.968.276**	**0,30%**	**5.643.252.276**	**1.767.410.000**	**0**	**0**	**1.867.306.000**	**0,15%**	**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.439.968.276		5.643.252.276	1.767.410.000			1.029.306.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	674.000.000						674.000.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	164.000.000						164.000.000		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
PRIORITAS 12. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penguatan pelayanan publik	**30.200.780.615**	**0,97%**	**12.158.694.615**	**2.938.878.000**	**-**	**-**	**17.982.308.000**	**1,47%**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**20.944.597.167**	**0,68%**	**8.635.373.167**	**2.879.100.000**	**0**	**0**	**12.309.224.000**	**1,01%**	**Satuan Polisi Pamong Praja**

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.719.040.167		8.635.373.167	2.879.100.000			6.083.667.000		Satuan Polisi Pamong P raja
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.700.400.000						5.700.400.000		Satuan Polisi Pamong P raja
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	525.157.000						525.157.000		Satuan Polisi Pamong P raja
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**9.256.183.448**	**0,30%**	**3.523.321.448**	**59.778.000**	**-**	**-**	**5.673.084.000**	**0,46%**	**Bakesbangpol**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.956.048.448		3.523.321.448	59.778.000			372.949.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	504.000.000						504.000.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.141.906.000						4.141.906.000		Bakesbangpol

PRIORITAS/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	PAGU BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN, KDH, DPRD	PAGU BELANJA GAJI PPPK PARUH WAKTU	PAGU BELANJA DANA DESA, ADD, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI, BPJS PERANGKAT DESA, BKK	BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)	JIKA TIDAK TERMASUK GAJI TUNJ ASN, PPPK, KDH, DPRD, DANA DESA, ADD BH PAJAK RETRIBUSI, DAN BTT		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
							PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI PRIORITAS DAN URUSAN TERHADAP TOTAL BELANJA	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	71.000.000						71.000.000		Bakesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	161.229.000						161.229.000		Bakesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	422.000.000						422.000.000		Bakesbangpol
TOTAL	**3.097.694.532.160**	**100,00%**	**1.199.581.044.256**	**69.386.718.000**	**602.298.446.160**	**9.480.000.000**	**1.222.933.077.744**	**100,00%**	

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

Program prioritas untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2027 sejumlah 105 program sesuai dengan Perda RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Program prioritas dimaksud didukung dengan total anggaran pendanaan sebesar Rp 2.583.330.108.563 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.2
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
VISI KABUPATEN KEBUMEN						
KEBUMEN BERDAYA (KEBUMEN BERIMAN-MAJU – SEJAHTERA - BERBUDAYA)						
Misi 1 Pengentasan Kemiskinan melalui Pemenuhan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif						
	1. Mewujudkan Masyarakat yang unggul dan sejahtera			Indeks Pembangunan Manusia		
				Tingkat Kemiskinan		
		1.1 Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			1.1.1 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	147.057.984
			1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	6.805.000
			1.1.3 Meningkatnya kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Sosial	90.000.000
			1.1.4 Meningkatnya cakupan perlindungan jaminan sosial	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial (Dengan Satuan: Persen)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.627.522.000
			1.1.5 Terjaminnya pemenuhan hak anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) (Dengan Satuan: Penghargaan)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	167.360.220
			1.1.6 Meningkatnya perlindungan khusus anak	Cakupan Perlindungan Anak (Dengan Satuan: Persen)	Program Perlindungan Khusus Anak	251.935.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			1.1.7 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan (Dengan Satuan: Persen)	Program Perlindungan Perempuan	286.705.000
			1.1.8 Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.866.455
			1.1.9 Meningkatnya layanan PMKS di luar panti kewenangan kabupaten yang tertangani	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Rehabilitasi Sosial	1.352.578.500
			1.1.10 Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	593.185.000
			1.1.11 Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase pangan segar aman (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	90.000.000
			1.1.12 Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	255.000.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			1.1.13 Meningkatnya angka kecukupan energi	Angka Kecukupan Energi (Dengan Satuan: Kkal)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	472.000.000
		1.2 Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan		
			1.2.1 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Pendidikan	202.565.033.590
				Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV (Dengan Satuan: Persen)		
			1.2.2 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (Dengan Satuan: Persen)		
			1.2.3 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B (Dengan Satuan: Persen)		
			1.2.4 Meningkatnya pembinaan perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Dengan Satuan: Nilai)	Program Pembinaan Perpustakaan	705.009.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			1.2.5 Meningkatnya Cakupan Prestasi Kepramukaan	Cakupan Prestasi Kepramukaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	377.619.000
			1.2.6 Meningkatnya Persentase prestasi Olahraga	Persentase prestasi Olahraga (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.866.112.400
		1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Indeks Kesehatan		
			1.3.1 Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	142.292.970.900
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Dengan Satuan: Persen)		
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (Dengan Satuan: Persen)		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			1.3.2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.546.657.000
			1.3.3 Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan (Dengan Satuan: Persen)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	697.965.000
			1.3.4 Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.287.730.100
			1.3.5 Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.208.000.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
Misi 2 Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Pariwisata, UMKM Yang Inovatif dan Berkelanjutan						
	2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing			Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota		
		2.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian daerah		LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		
			2.1.1 Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase ketersedian Prasarana Pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.857.152.636

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			2.1.2 Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.631.375.250
			2.1.3 Meningkatnya kinerja penyuluhan pertanian	Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyuluhan Pertanian	667.579.650
			2.1.4 Meningkatnya penerbitan izin usaha pertanian dan peternakan	Persentase Izin Usaha Pertanian dan Peternakan (Dengan Satuan: Persen)	Program Perizinan Usaha Pertanian	29.180.000
			2.1.5 Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian	Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	135.000.000
			2.1.6 Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penyakit hewan yang tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	605.000.000
			2.1.7 Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau (Dengan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	513.454.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
				Satuan: Milyar Rupiah)		
			2.1.8 Meningkatnya Pengelolaan perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	510.433.000
			2.1.9 Meningkatnya Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	128.958.000
			2.1.10 Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Garam (Dengan Satuan: Milyar Rupiah)		
				Persentase Pengolahan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan (Dengan Satuan: Persen)		
			2.1.11 Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12.426.000
		2.2 Meningkatnya daya saing ekonomi daerah		Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah		
				Net Ekspor Barang dan Jasa		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			2.2.1 Meningkatnya pengembangan ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Ekspor	60.000.000
			2.2.2 Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri (Dengan Satuan: Persen)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	486.079.000
			2.2.3 Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.033.539.000
			2.2.4 Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas Harga (Dengan Satuan: Persen)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.827.600.000
			2.2.5 Terlaksananya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku (Dengan Satuan: Persen)	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.881.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			2.2.6 Tercapainya Pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pelayanan Penanaman Modal	54.000.000
			2.2.7 Tercapainya realisasi nilai investasi PMA/PMDN	Nilai realisasi penanaman modal (Dengan Satuan: Milyar rupiah)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0
			2.2.8 Terlaksananya Kegiatan Usaha yang telah terverifikasi dan dilakukan Pengendalian	Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	34.000.000
			2.2.9 Meningkatnya calon pelaku usaha/penanam modal yang menginvestasikan modalnya di daerah	Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal (Dengan Satuan: Persen)	Program Promosi Penanaman Modal	96,400.000
		2.3 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian kerakyatan berbasis hilirisasi		LPE Kategori Industri Pengolahan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			2.3.1 Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	60.000.000
			2.3.2 Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	25.500.000
			2.3.3 Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	890.683.000
			2.3.4 Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Advokasi kepada Koperasi (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	91.000.000
		2.4 Meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata		LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
			2.4.1 Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemasaran Pariwisata	2.205.000.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			2.4.2 Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.704.786.000
			2.4.3 Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	260.000.000
		2.5 Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			2.5.1 Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lembaga LPK yang berizin (Dengan Satuan: Persen)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	734.438.000
			2.5.2 Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar (Dengan Satuan: Persen)	Program Penempatan Tenaga Kerja	246.000.000
			2.5.3 Meningkatnya Hubungan Industrial	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Hubungan Industrial	5.376.456.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
Misi 3 Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan						
	3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif			Indeks Infrastruktur		
				Penurunan Emisi GRK Kumulatif		
		3.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		
			3.1.1 Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.103.250.000
			3.1.2 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh (Dengan Satuan: Persen)	Program Kawasan Permukiman	431.662.300

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			3.1.3 Meningkatnya Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Perumahan	1.507.606.000
			3.1.4 Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.085.704.800
		3.2 Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas Masyarakat		Indeks Infrastruktur Perhubungan		
			3.2.1 Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang	Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.465.600.000
		3.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum		Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			3.3.1 Meningkatnya Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persentase Jalan Dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Jalan	181.005.445.312
			3.3.2 Meningkatnya Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	Cakupan drainase yang tertangani (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	19.661.033.461
			3.3.3 Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah	Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.124.227.486
			3.3.4 Pengembangan Jasa Konstruksi yang terampil	Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	268.734.601
			3.3.5 Meningkatnya Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman	Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.250.000.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			3.3.6 Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	Persentase bangunan gedung kantor dalam kondisi baik dan inklusif (Dengan Satuan: Persen)	Program Penataan Bangunan Gedung	20.730.000.000
		3.4 Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur desa dan kawasan perdesaan		Persentase Desa Mandiri		
			3.4.1 Meningkatnya legalitas kelembagaan, partisipasi dalam musyawarah desa dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.521.720.000
			3.4.2 Meningkatnya Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa	Persentase Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa (Dengan Satuan: Persen)	Program Penataan Desa	22.750.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			3.4.3 Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama (misalnya jalan, pasar, atau irigasi) (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.072.200.000
			3.4.4 Meningkatnya Desa dengan Layanan Administrasi baik	Persentase Desa Dengan Layanan Administrasi Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.757.577.782
		3.5 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup		
			3.5.1 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.475.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			3.5.2 Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.648.000
			3.5.3 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten (Dengan Satuan: Ha)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.815.679.000
			3.5.4 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Persampahan	10.329.716.000
			3.5.5 Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di Tingkat Kabupaten	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3 (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	27.200.000
			3.5.6 Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	463.516.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			3.5.7 Tercapainya Pemberiaan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan: Persen)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	8.963.000
			3.5.8 Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	14.285.000
			3.5.9 Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (Dengan Satuan: Persen)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	30.984.000
			3.5.10 Meningkatnya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase potensi pemanfaatan EBT (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	8.000.000
		3.6 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah		Indeks Risiko Bencana		
			3.6.1 Meningkatnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	2.719.020.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
				dalam IKD (Dengan Satuan: Angka)		
			3.6.2 Meningkatnya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD (Dengan Satuan: Angka)		
			3.6.3 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD (Dengan Satuan: Angka)		
			3.6.4 Meningkatnya Penanganan korban Bencana dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan: Persen)	Program Penanganan Bencana	593.185.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
Misi 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, ngopeni, ngayomi, dan ngayemi						
	4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan			Indeks Reformasi Birokrasi		
		4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		Nilai SAKIP		
			4.1.1 Meningkatnya Kinerja ASN dengan predikat minimal baik	Persentase Kinerja ASN dengan Predikat Minimal Baik (Dengan Satuan: Persen)	Program Kepegawaian Daerah	890.000.000
			4.1.2 Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Dengan satuan: Persen)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.374.002.000
			4.1.3 Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Dengan Satuan: Indeks)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	16.881.000.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
				Indeks Zakat Nasional (IZN) (Dengan Satuan: Poin)		
				Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)		
			4.1.4 Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur (Dengan Satuan: Persen)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	728.000.000
			4.1.5 Meningkatnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Dengan Satuan: Persen)		
			4.1.6 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.598.271.027.892

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Indeks)		
			4.1.7 Meningkatnya fasilitasi riset dan inovasi daerah	Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Riset dan Inovasi Daerah	1.160.000.000
			4.1.8 Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase Capaian Pendapatan Daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.710.778.000
			4.1.9 Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD (Dengan Satuan: Persen)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	810.000.000
		4.2 Meningkatnya efektivitas dan kapabilitas pengendalian intern		Nilai Maturitas SPIP		
			4.2.1 Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.460.000.000
		4.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT		Indeks Pelayanan Publik		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			4.3.1 Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.497.663.000
			4.3.2 Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik (Dengan Satuan: Kategori)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.794.443.000
			4.3.3 Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan: Persen)	Program Pencatatan Sipil	94.000.000
			4.3.4 Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan. (Dengan Satuan: Persen)	Program Pendaftaran Penduduk	1.718.000.000
			4.3.5 Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan. (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	514.557.000
			4.3.6 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	277.367.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
				Kecamatan (Dengan Satuan: Persen)		
			4.3.7 Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	Persentase desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.860.242.781
			4.3.8 Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan (Dengan Satuan: Indeks)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	494.328.000
Misi 5 Mewujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal						
	5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan			Indeks Kebudayaan		
				Indeks Kesalehan Sosial		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
		5.1 Meningkatnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBtb) yang dilestarikan*		
			5.1.1 Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah (Dengan Satuan: Persen)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	164.000.000
			5.1.2 Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kebudayaan	674.000.000
			5.1.3 Meningkatnya presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pengembangan Kurikulum	48.000.000
		5.2 Meningkatnya kondusivitas wilayah berbasis nilai-nilai keagamaan		Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan		

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
				Indeks Ketertiban Umum		
			5.2.1 Terlaksananya penyelesaian pelanggaran trantibum dan pelindungan masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.700.400.000
			5.2.2 Terlaksananya pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan (Dengan Satuan: Persen)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71.000.000
			5.2.3 Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya (Dengan Satuan: Persen)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	161.229.000
			5.2.4 Meningkatnya pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan: Persen)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	504.000.000

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PAGU ANGGARAN 2027 (Rp)
			5.2.5 Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	422.000.000
			5.2.6 Meningkatnya Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pemahaman terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan: Persen)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.141.906.000
			5.2.7 Telaksananaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan: Persen)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	525.157.000

Sumber: Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

5.2. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Program Unggulan Tahun 2027

Program Unggulan Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan bagian dari upaya akselerasi dalam mencapai target pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan inklusif sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029. Pelaksanaan program unggulan pada Tahun 2027 difokuskan pada percepatan pencapaian sasaran pembangunan tahun ketiga RPJMD melalui pendekatan berbasis potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Program unggulan tersebut merupakan penjabaran dari komitmen Kepala Daerah yang telah dirumuskan sejak masa kampanye dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Pada Tahun 2027, implementasi program unggulan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, yang mencakup peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pelaksanaan program sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah pada Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam memastikan ketercapaian target RPJMD secara bertahap dan terukur. Oleh karena itu, program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah, serta disusun sesuai dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, sekaligus memastikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, implementasi Program Unggulan Bupati pada Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen secara berkelanjutan.

Pada tahun 2027, terdapat 15 program unggulan Kepala Daerah Tahun yang akan dukung dengan pendanaan sejumlah Rp 2.983.767.296.498. Secara lebih lengkap berikut Program unggulan Bupati Kebumen Tahun 2027 beserta program prioritas dan Anggaran 2027.

Keberadaan Program Unggulan Bupati Tahun 2027 juga merupakan instrumen percepatan penyelesaian berbagai permasalahan strategis daerah, meliputi penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, penguatan tata kelola pemerintahan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah. Seluruh program tersebut selaras dengan tema pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2027, yaitu Pemenuhan

Infrastruktur Dalam Rangka Penguatan Aksesibilitas Pelayanan Dasar dan Pengembangan Pariwisata Guna Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Penerima manfaat Program Unggulan Bupati mencakup seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kebumen, dengan fokus pada kelompok masyarakat miskin dan rentan, pelajar dan tenaga pendidik, petani, nelayan, pelaku UMKM, perempuan, anak, penyandang disabilitas, pemuda, pemerintah desa, pelaku seni budaya, serta aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan publik. Dengan cakupan sasaran yang luas tersebut, program unggulan diharapkan mampu memberikan manfaat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Keberlanjutan pelaksanaan Program Unggulan Bupati telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hingga Renja Perangkat Daerah. Dari sisi pendanaan, program-program tersebut didukung melalui APBD Kabupaten Kebumen serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan dukungan tersebut Program Unggulan Bupati Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Tabel 5.3
Program Unggulan Bupati Kebumen Tahun 2027 beserta Program Prioritas dan Anggaran 2027

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
1.	Cerdas dan Sehat Bareng Biyunge	Meningkatkan kualitas dan mempermudah akses pendidikan untuk semua, diantaranya melalui: perbaikan data base, peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah wilayah pinggiran, peningkatan kualitas kurikulum lokal, beasiswa miskin dan/ atau prestasi, insentif guru di wilayah pinggiran/ perbatasan, fasilitasi pembiayaan pendidikan jenjang perguruan tinggi.	Program Pengelolaan Pendidikan	202.565.033.590	Disdikpora
			Program Pembinaan Perpustakaan	705.009.000	Disarpus
		Meningkatkan kualitas derajat Kesehatan masyarakat melalui kualitas dan kemudahan akses layanan, peningkatan Kesehatan ibu dan anak, fasilitasi sarana transportasi pasien 24 jam, insentif tenaga Kesehatan di wilayah pinggiran/perbatasan, dan peningkatan sarana prasarana yang memadahi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	142.292.970.900	Dinkes PPKB
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.546.657.000	Dinkes PPKB
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	697.965.000	Dinkes PPKB
2.	Mangan Wareg dan Bergizi	Meningkatkan kualitas pangan dan gizi melalui: percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, gizi buruk melalui pemenuhan makan bergizi anak, serta gizi keluarga terutama lansia.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	96.500.000	Distapang
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	90.000.000	Distapang
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	142.292.970.900	Dinkes PPKB

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
3.	Sregep Ngode	Program perluasan lapangan kerja minimal 5000 tenaga kerja melalui upaya mendekatkan investasi pada wilayah pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, memberikan akses tenaga kerja difabel, perempuan, dan masyarakat marjinal lainnya, dan fasilitasi pembiayaan calon pekerja migran	Program Pelayanan Penanaman Modal	54.000.000	DPMPTSP
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	25.400.000	DPMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	34.000.000	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	71.000.000	DPMPTSP
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	734.438.000	Dinas Tenaga Kerja
			Program Penempatan Tenaga Kerja	246.000.000	Dinas Tenaga Kerja
			Program Hubungan Industrial	5.376.456.000	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	8.000.000	Dinas Tenaga Kerja
4.	Biyunge Momong	Program ini difokuskan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap kelompok rentan, diantaranya penyandang disabilitas, lansia, anak, warga miskin, dan KDRT.	Program Pemberdayaan Sosial	90.000.000	Dinsos P3A
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.627.522.000	Dinsos P3A
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	113.377.000	Dinsos P3A
			Program Perlindungan Khusus Anak	260.857.000	Dinsos P3A
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	2.866.455	Dinsos P3A
			Program Rehabilitasi Sosial	1.352.578.500	Dinsos P3A

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.208.000.000	Dinkes PPKB
5.	Perempuan Berdaya	Program ini dikhususkan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan kemandirian perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan kesempatan mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terhadap sumber daya, sehingga tidak terjadi lagi kekerasan, peminggiran, dan diskriminasi terhadap perempuan. Perempuan menjadi berdaya, kritis, dan mandiri.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	147.057.984	Dinkes PPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	51.866.000	Dinkes PPKB
			Program Perlindungan Perempuan	286.705.000	Dinkes PPKB
6	Plesir Bareng & Bakulan Laris	Program ini diarahkan untuk memperkuat sinergisitas pengembangan sektor pariwisata, UMKM dan pedagang kecil guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat melalui: optimalisasi tatakelola wisata milik daerah, mendorong wisata berbasis masyarakat, bela dan beli produk Kebumen, optimalisasi kerjasama pengembangan wisata Kawasan geopark, dan atau kerjasama dengan pihak ketiga lainnya	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	91.000.000	Disperindag KUKM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	25.500.000	Disperindag KUKM
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	60.000.000	Disperindag KUKM
			Program Pengembangan Ekspor	60.000.000	Disperindag KUKM
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	486.079.000	Disperindag KUKM
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	5.033.539.000	Disperindag KUKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.827.600.000	Disperindag KUKM

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	134.881.000	Disperindag KUKM
			Program Pemasaran Pariwisata	2.205.000.000	Disparbud
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.704.786.000	Disparbud
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	260.000.000	Disparbud
7.	Petani Makmur dan Swadaya Pangan	Program ini diprioritaskan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pembiayaan sektor pertanian secara menyeluruh dan meringankan beban petani, mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan masyarakat, melalui: pengadaan bibit, pendampingan, dan memfasilitasi kerjasama pemanfaatan lahan dengan pihak terkait	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.857.152.636	Distapang
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.631.375.250	Distapang
			Program Penyuluhan Pertanian	667.579.650	Distapang
			Program Perizinan Usaha Pertanian	29.180.000	Distapang
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	135.000.000	Distapang
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	605.000.000	Distapang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	255.000.000	Distapang
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	472.000.000	Distapang

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	513.454.000	DLHKP
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	510.433.000	DLHKP
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	12.426.000	DLHKP
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	128.958.000	DLHKP
8.	Njamu Bergas	Akronim: Gawe Jalan, Jembatan Mulus, Air Bersih dan Irigasi. Program percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kantong - kantong kemiskinan dan wilayah strategis pengembangan ekonomi, seperti: jalan, jembatan, air bersih, irigasi dan infrastruktur dasar yang meliputi: akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak yang strategi pelaksanaannya disesuaikan kondisi geografis.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.250.000.000	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	181.005.445.312	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	19.661.033.461	DPUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.124.227.486	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	268.734.601	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	14.465.600.000	Disperkimhub
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.103.250.000	Disperkimhub
9.	Lingkungan Bersih Lestari	Program pelestarian lingkungan hidup, Pengurangan Kawasan kumuh dan ketahanan bencana yang akan dilakukan melalui: pemberdayaan masyarakat dalam gerakan sadar menanam, Desa	Program Penataan Bangunan Gedung	20.730.000.000	DPUPR
			Program Kawasan Permukiman	431.662.000	Disperkimhub
			Program Pengembangan Perumahan	1.507.606.000	Disperkimhub

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
		Tangguh Bencana, program stimulan ADD dan/atau BHPR berbasis ekologi, dan mendorong pembangunan ramah bencana, serta memperkuat kerjasama sinergis dengan program pengembangan kawasan geopark, dalam hal pemberdayaaan, edukasi, dan konservasi.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.085.704.000	Disperkimhub
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	32.475.000	DLHKP
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.648.000	DLHKP
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.815.679.000	DLHKP
			Program Pengelolaan Persampahan	10.329.716.000	DLHKP
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	27.200.000	DLHKP
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	463.516.000	DLHKP
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	8.963.000	DLHKP
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	14.285.000	DLHKP
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	30.984.000	DLHKP
			Program Penanganan Bencana	593.185.000	Dinsos P3A

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
			Program Penanggulangan Bencana	2.719.020.000	BPBD
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	525.157.000	Satpol PP
10.	ASN Nyaman, Terampil dan Inovatif	Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjamin kenyamanan ASN dalam berkerja dan berinovasi melalui sistem merit menuju reformasi birokrasi, zonasi wilayah dinas dan/atau reward ASN di wilayah pinggiran/perbatasan	Program Kepegawaian Daerah	890.000.000	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.374.002.000	BKPSDM
			Program Pencatatan Sipil	94.000.000	Disdukcapil
			Program Pendaftaran Penduduk	1.718.000.000	Disdukcapil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	514.557.000	Disdukcapil
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	277.367.000	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	7.460.000.000	Inspektorat
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	728.000.000	Bapperida
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	810.000.000	Bapperida
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.710.778.000	BPKPD
11.		Program ini pada hakikatnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.881.000.000	Sekretariat Daerah

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
	Ngobrol dan Rembug Bareng Biyunge	yang lebih terbuka, partisipatif melalui talkshow, kongkow, media sosial, media pengaduan, temu kangen dengan masyarakat, dan peningkatan kualitas forum musyawarah perencanaan.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.794.443.000	Diskominfo
12.	Desa Berdaya	Program ini diprioritas untuk memperkuat kewenangan Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenda kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata Kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.521.720.000	Dinas PMD
			Program Penataan Desa	22.750.000	Dinas PMD
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	1.072.200.000	Dinas PMD
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.757.577.782	Dinas PMD
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.860.242.781	Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	494.328.000	Kecamatan
13.	Anak Soleh	Merupakan program untuk memfasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan guna mencetak anak yang soleh/ berbudi luhur, melalui sosialisasi ayo mondok/ ngaji/ sekolah agama, fasilitasi legalitas hukum kelembagaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas, beasiswa, insentif ustadz/ guru, dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.287.730.100	Dinkes PPKB
			Program Pengelolaan Pendidikan	202.565.033.590	Disdikpora
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	16.881.000.000	Sekretariat Daerah
14.	Muda Kreatif (Anake Biyunge)	Program diarahkan untuk meningkatkan peran serta aktif anak muda dalam	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	377.619.000	Disdikpora

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
		mengembangkan ekonomi kreatif dan sector strategis lainnya serta membangun Kebumen Tecno Kreatif sebagai bentuk penghargaan terhadap ruang ekspresi kaum muda untuk menggerakkan inovasi pengembangan Kebumen berbasis digital.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	14.866.112.400	Disdikpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	890.683.000	Disdikpora
			Program Riset dan Inovasi Daerah	1.160.000.000	Bapperida
15.	Ayem, Tentrem, Guyub, Rukun	Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, keswadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitasi pengembagan seni, dan budaya, dan mendorong kegiatan budaya Desa, seperti : merdi deso, selamatan desa, sedekah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	164.000.000	Disparbud
			Program Pengembangan Kebudayaan	674.000.000	Disparbud
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.700.400.000	Satpol PP
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.598.271.027.892	Semua PD
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	71.000.000	Bakesbangpol
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	161.229.000	Bakesbangpol
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	504.000.000	Bakesbangpol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	422.000.000	Bakesbangpol

No.	Program Unggulan	Penjabaran Program Unggulan/Sub Program	Program Prioritas	PAGU ANGGARAN 2027	PD Pengampu
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.141.906.000	Bakesbangpol

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2027

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan pendanaan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian. Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan inetgrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.4
Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
1	SPM Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	31.186.845.400
		Pendidikan Dasar		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	106.166.962.940
		Pendidikan Kesehatan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	60.551.096.250
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.660.129.000
2	SPM Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.481.677.900
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			
		Pelayanan kesehatan balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan Pada Usia Lanjut			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus			

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
3	SPM Pekerjaan Umum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.250.000.000
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.103.250.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	28.500.000
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.479.106.000
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.085.704.000

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
5	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	779.309.000
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.327.000
		Pelayanan informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	180.000.000
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	525.000.000
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.204.020.000
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	810.000.000
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.504.000,
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	12.400.000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	42.253.000
6	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	897.264.000

No	SPM Bidang	Jenis Pelayanan	Program	Kegiatan	Anggaran
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial		Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	522.185.000
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	71.000.000

Sumber: BPKPD dan Tim Penyusun RKPD Tahun 2027 (data diolah)

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 telah menyesuaikan dengan dokumen rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar beserta targetnya di tahun 2027.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan RPJMD terbagi menjadi beberapa indikator kinerja yakni Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). Rincian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam pembangunan jangka menengah periode 2025-2029 dapat dilihat sebagai berikut.

6.1.1. Indikator Kinerja Makro

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara makro/umum. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama periode pembangunan. Adapun target indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target Tahun 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00*
2	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,68-10,80*
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-4,00*
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00-7,85*
6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	40,44
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,80
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	2.399.500,84

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target Tahun 2027
9	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,14

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
*Keterangan: *) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*

6.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. IKU terdiri dari Indikator Tujuan RPJMD dan Indikator Sasaran RPJMD yang terseleksi. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Kebumen dan targetnya tahun 2027:

Tabel 6.2.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2027
Indikator Tujuan RPJMD			
Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang unggul dan sejahtera			
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00*
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,68-10,80*
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang tumbuh dan berdaya saing			
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00-7,85*
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	Juta rupiah	40,44
Tujuan 3. Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas, ramah lingkungan dan inklusif			
5	Indeks Infrastruktur	Indeks	49,32
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCO2Eq	2.399.500,84
Tujuan 4. Mengimplementasikan reformasi birokrasi di seluruh bidang pembangunan			

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2027
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,42**
Tujuan 5. Meningkatkan pembangunan berbasis budaya dan kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan			
8	Indeks Kebudayaan	Indeks	17,18
9	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	83,16
Indikator Sasaran RPJMD			
1	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89
2	Indeks Pendidikan	Indeks	66,11
3	Indeks Kesehatan	Indeks	86,33
4	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,00
5	Kontribusi PDRB Kabupaten Kebumen Terhadap Provinsi Jawa Tengah	Persen	2,14
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-2,50
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,95
8	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,07
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-4,00*
10	Indeks Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman	Indeks	8,30
11	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	87,67
12	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	52,62
13	Persentase Desa Mandiri	Indeks	41,20
14	Indeks Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks	66,32
15	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115,96-113,29
16	Nilai SAKIP	Nilai	71,27
17	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,65

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2027
18	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66
19	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak benda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	22,89**
20	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	81,00
21	Indeks Ketertiban Umum	Indeks	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
*Keterangan: *) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*
***) target telah disesuaikan dengan mendasari kinerja pada Tahun 2025*

6.1.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kinerja pembangunan daerah mencerminkan seberapa efektif dan efisien suatu pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur yang dapat menggambarkan secara objektif dan terukur terhadap tingkat pencapaian pembangunan tersebut. Dalam konteks ini, indikator kinerja menjadi komponen penting yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah.

Agar hasil evaluasi kinerja lebih akurat dan fokus, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan IKD serta diperlukan penetapan IKK yang mampu merepresentasikan pencapaian sasaran utama pembangunan secara menyeluruh dan strategis. IKK tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan ke depan. Adapun penetapan IKK beserta target capaian yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**		

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,36
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Persen	8,35
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	26,00
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	60,25
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,80
6	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	17,97
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	57,84
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2Eq	2.399.500,80
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	115,96-113,29
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,83
11	Rasio Penduduk	Persen	103,16
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km 2	1.152,00
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00-7,85*
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,68-10,80*
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	40,44
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-4,00*
5	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00*
7	Indeks Kesehatan	Indeks	86,33
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,11
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14
10	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,05
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	Persen	95,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*)	Persen	90,00
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,07
14	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	75,82
15	Jumlah Kasus Kematian Balita	Kasus	151
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	55,00
17	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	100,00
18	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00
19	Persentase Puskesmas yang Memiliki Kebijakan Operasional Aktifitas Fisik bagi Masyarakat	Persen	95,00
20	Indeks Pendidikan	Indeks	66,11
21	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,99
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21
23	Literasi Membaca SD	Persen	85,29
24	Literasi Membaca SMP	Persen	88,30
25	Numerasi Membaca SD	Persen	74,69
26	Numerasi Membaca SMP	Persen	83,35
27	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,56
28	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	87,22
29	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,87
30	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	47,27
31	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	Persen	19,13
32	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang Dilestarikan	Persen	14,65
33	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	55.583

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
34	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Persen	23,46
35	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	65,04
36	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	83,16
37	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	86,74
38	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	Lembaga	300
39	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	Lembaga	160
40	Persentase Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Melaksanakan Kegiatan Kemasyarakatan	Persen	81,00
41	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,62
42	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,21-66,23
43	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,321-0,297
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**		
1	Angka Ketergantungan	Persen	47,00
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	23,46
3	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	6,95
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,36
5	LPE Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	12,07
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,23
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,89
8	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	4,22
9	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,34**
10	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	28

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	78,69
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67,96
13	Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,07
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)	Persen	19,28
15	Net Ekspor Barang dan Jasa	Persen	-2,50
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	84,20
17	Persentase Desa Mandiri	Persen	41,20
18	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89,74
19	Indeks Infrastruktur	Indeks	49,53
20	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Indeks	8,30
21	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Indeks	87,67
22	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	52,62
23	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	78,37
24	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	84,60
25	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,62
26	Disparitas Harga	Persen	±10
27	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	3,00
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,42***
2	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,55***
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (PEMDI)	Indeks	4,11
4	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	2,07
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66
6	Indeks Integritas Nasional	Indeks	81,44
7	Nilai SAKIP	Nilai	71,27
8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,65
9	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,89

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
10	Indeks Ketertiban Umum	Indeks	100,00
11	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	1***
12	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,61
13	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,45
INDIKATOR KINERJA KUNCI			
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
a. Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	87,22
2	Angka Partisipasi Sekolah 7-15 Tahun	Persen	99,84
3	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun	Persen	11,87
4	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	74,96
5	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	66,21
6	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	83,23
7	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	72,55
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	89,42
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV	Persen	80,06
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	80,75
11	Iklim Keamanan SMP	Nilai	78,99
12	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	78,39
13	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	77,87
14	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	68,80
15	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	70,94
b. Kesehatan			
1	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,05
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Persen	100,00
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Persen	100,00
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Persen	100,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100,00
7	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100,00
8	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar	Persen	100,00
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100,00
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	100,00
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Persen	100,00
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Persen	100,00
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Persen	100,00
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar	Persen	100,00
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota	Persen	16,68
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	Persen	81,14
3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi dan bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	Persen	100,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
4	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	Persen	98,11
5	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	99,71
6	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	76,74
7	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Tersertifikasi di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/Teknisi/Analis	Persen	56,81
8	Persentase Pengawasan Penyelenggaran Jasa Konstruksi Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persen	56,75
9	Jumlah Hari Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Nonberusaha (Sesuai Kewenangan) yang Terbit/Dilayani Pemerintah Daerah	Hari	13
10	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	Persen	100,00
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100,00
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100,00
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	3,63
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen	12,96

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
5	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	28,26
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang Dilaksanakan oleh Satpol PP	Persen	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100,00
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5
4	Presentase SOP yang Tersedia dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	100,00
5	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal yang Digunakan sebagai Penunjang dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Persen	100,00
6	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang telah Mengikuti Diklat Dasar	Persen	2,50
7	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100,00
8	Persentase Warga Negara dan Aparatur yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00
9	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100,00
10	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	Persen	100,00
11	Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	100,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100,00
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100,00
14	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	97,71
f. Sosial			
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00
2	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00
4	Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Sasarnya di Luar Panti	Persen	100,00
5	Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti	Persen	100,00
6	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Sesuai Standar	Persen	100,00
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100,00
8	Persentase Sarana Prasarana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Disediakan Sesuai Standar	Persen	100,00
9	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa	Persen	100,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
	Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Persen	100,00
11	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	Persen	100,00
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100,00
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	100,00
14	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan selama Satu Tahun	Persen	84,00
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
a. Tenaga Kerja			
1	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	100,00
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	1,09**
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Orang	31.743.144,91
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100,00
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	34,63
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak			
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,75

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *(B21)	Indeks	0,321-0,297
3	Persentase ARG Daerah	Persen	32,10
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100,00
c. Pangan			
1	Persentase Pengelolaan Cadangan Pangan	Persen	17,89
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai	93,65
3	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Persen	63,04
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	94,12
d. Pertanahan			
1	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	100,00
2	Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah dalam Satu Desa atau Kelurahan Lengkap secara Berkualitas	Persen	44,00
3	Ditetapkannya Hak atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	100,00
e. Lingkungan Hidup			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,80
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	79,60
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin	Persen	88,62

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
	Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota		
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100,00
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00
3	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Persen	100,00
4	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Persen	99,76
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	70,57
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun	Persen	100,00
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	18,21
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	7,56
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	100,00
3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Persen	100,00
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persen	100,00
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100,00
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,14
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Persen	67,35
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	5,92**
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000	14,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
		WUS 15 - 19 tahun	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,21-66,23
i. Perhubungan			
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,64
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	84,60
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Persen	100,00
j. Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	100,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	100,00
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	11,76
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	2,50
3	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	7,00
l. Penanaman Modal			
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	10,00
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100,00
m. Kepemudaan dan Olahraga			

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
1	Persentase Pemuda yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training dan Memperoleh Sertifikat	Persen	0,26
2	Persentase Atlet yang Berasal dari Kab/Kota yang Masuk Pelatda Provinsi	Persen	0,95
n. Statistik			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,72
o. Persandian			
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen	81,25
p. Kebudayaan			
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	Persen	88,08
2	Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan	Persen	15,92
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Dibidang Kebudayaan	Persen	2,00
q. Perpustakaan			
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	81,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	17,33
r. Kearsipan			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	97,20
3. Urusan Pilihan			
a. Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	10.255.079,00
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Kg	3.662.762,00
b. Pariwisata			
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	10,00
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Nonbintang)	Persen	70,44
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	100,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
c. Pertanian			
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	13,17
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	9,99
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	10,15
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	7,04
5	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Ha	615,00
6	Persentase Penyakit Hewan yang Tertangani	Persen	100,00
d. Kehutanan			
e. Energi dan Sumber Daya Mineral			
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada Kabupaten/Kota	Persen	34,00
2	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	52,74***
g. Perindustrian			
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	Persen	39,92

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Persen	43,34
3	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan Dibandingkan dengan Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Telah Dilakukan Pengawasan.	Persen	100,00
4	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik' Dibandingkan Seluruh Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang Sudah Dilakukan Pembinaan.	Persen	100,00
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	Persen	100,00
h. Transmigrasi			
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan			
a. Perencanaan			
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	Persen	100,00
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	Persen	30,00
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	17,25
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	96,50
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	6,70
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	15,00
6	Persentase Penurunan SILPA	Persen	-8,00

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	82,00
d. Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	Persen	78,00
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	1,00
e. Fungsi Pengawasan			
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori/ Opini	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,65
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	Level 3 (3,49)
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3,25
5	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	97,60
f. Fungsi Pengadaan			
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	34,48
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	21,30
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	55,00
g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah			
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100,00
h. Pelayanan Publik			
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	4,94

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
*Keterangan: *) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*
***) Target berdasarkan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.7.2.2/492/2026 tanggal*

26 Juni 2026 Hal Capaian dan Target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) kabupaten/kota

****) target telah disesuaikan dengan mendasari kinerja pada Tahun 2025*

6.1.4. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

IUP dalam RPJPD merupakan indikator makro yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Indikator ini menyelaraskan dengan Indikator Utama Pembangunan RPJPN dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Indikator utama tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang akan diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun pemetaan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

Tabel 6.4.
Indikator Utama Pembangunan
Kabupaten Kebumen Tahun 2027

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,00*
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	87,42**
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,00-7,85*
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	11,68-10,80*
5	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	2.399.500,84
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,11
7	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	14
8	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	9,05
9	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*)	Persen	95,00
10	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis *(Treatment Success Rate)*	Persen	90,00
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	99,07
12	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7,99
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2027
14	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):		
	a) Literasi Membaca SD	Persen	85,29
	b) Literasi Membaca SMP	Persen	88,30
	c) Numerasi Membaca SD	Persen	74,69
	d) Numerasi Membaca SMP	Persen	83,35
15	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	8,56
16	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	Persen	87,22
17	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Persen	0,87
18	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang dilestarikan	Persen	14,65
19	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	55.583
20	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	Persen	23,46
21	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	Persen	65,04
22	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	83,16
23	Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	Persen	86,74
24	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Anggaran	Lembaga	300
25	Jumlah Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Mendapatkan Fasilitasi Pendampingan	Lembaga	160
26	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,321-0,297
27	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	66,21-66,23

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2027
28	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66
29	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	99,55**
30	Indeks Integritas Nasional	Indeks	81,44
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,11
32	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	1**
33	Kapabilitas Inovasi	Nilai	3,07
34	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	40,44
35	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	23,46
36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,36
37	*Return on Aset* (ROA) BUMD	Persen	4,22
38	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	28
39	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,50-4,00*
40	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen	67,96
41	Persentase Desa Mandiri	Persen	41,20
42	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	78,37
43	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	Persen	84,60
44	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	84,98
45	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Persen	89,74
46	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,62
47	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,61
48	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	Persen	1,45
49	Pembentukan Modal Tetap Bruto (Persen PDRB)	Persen	19,28

No.	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2027
50	Disparitas Harga	Persen	±10
51	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,23
52	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1,89
53	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	Persen	20,89
54	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	47,27
55	Cakupan Fasilitas Publik yang Inklusif	Persen	19,13
56	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	74,36
57	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishment)*	Persen	8,35
58	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	74,80
59	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	17,97
60	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	57,84
61	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	115,96-113,29
62	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	26,00
63	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks	60,25

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029
*Keterangan: *) Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026*
***) target telah disesuaikan dengan mendasari kinerja pada Tahun 2025*

6.2. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM dalam hal ini adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dengan indikator SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5.
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian, Penghitungan Pencapaian, Pelaporan Penerapan Dan Format Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	pelayanan minimal bidang pendidikan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelum nya	Setiap tahun					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pendidikan

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal pelayanan dasar berupa barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Kesehatan

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di provinsi dan kabupaten/kota	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		Perangkat Daerah Pengampu Urusan Sosial

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 akan menjadi pedoman penyusunan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 yang merupakan dasar pelaksanaan kebijakan fiskal pembangunan daerah Tahun 2027. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan penjabaran dari rancangan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan telah disesuaikan dengan visi misi Bupati Kebumen, kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga diharapkan terjadi keselarasan pembangunan di pusat dan daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 disusun sebagai Upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati dan penyelenggara pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menyejahterakan Masyarakat.

Untuk itu, RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2027. Selain itu, RKPD Kabupaten Kebumen diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya yang memiliki perhatian dan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kebumen. Hal ini sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas seluruh pelaku pembangunan daerah baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan berbagai organisasi masyarakat agar lebih terintegrasi dalam upaya bersama mencapai sasaran pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 telah mengacu pada sistem nomenklatur yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang terakhir telah dirubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta terinput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) Kemendagri. Dengan adanya dokumen RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027, seluruh Perangkat Daerah diharapkan secara konsisten dan komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

BUPATI KEBUMEN,

ttd

LILIS NURYANI

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS DAERAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8	22	75	Rp 1.043.134.938.136
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	27	92	Rp 397.556.941.819
3	RSUD dr. SOEDIRMAN	1	1	1	Rp 129.000.000.000
4	RSUD PREMBUN	1	1	1	Rp 62.000.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	22	76	Rp 270.498.604.798
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	6	22	44	Rp 32.562.951.212
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	13	31	Rp 20.944.597.167
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	10	38	Rp 8.166.756.565
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	24	72	Rp 13.814.909.268
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11	32	68	Rp 23.050.026.877
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	14	27	62	Rp 37.238.593.425
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	14	34	Rp 8.108.694.974
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	11	44	Rp 15.338.925.012
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	11	27	Rp 10.049.040.562
15	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	14	22	54	Rp 61.219.901.378
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	13	26	Rp 4.078.583.447
17	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6	15	35	Rp 16.447.754.276
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6	19	42	Rp 5.326.785.068
19	DINAS TENAGA KERJA	7	15	33	Rp 13.398.506.048
20	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	55	Rp 49.724.877.644
21	SEKRETARIAT DPRD	2	15	52	Rp 57.181.910.002
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	4	15	35	Rp 10.578.680.451
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	13	53	Rp 686.537.943.068
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	30	Rp 8.737.466.798
25	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	37	Rp 25.723.538.819
26	KECAMATAN AYAH	4	9	27	Rp 2.628.314.963
27	KECAMATAN BUAYAN	4	9	26	Rp 2.569.215.519
28	KECAMATAN PURING	4	9	29	Rp 2.363.436.480
29	KECAMATAN PETANAHAN	4	9	30	Rp 2.655.531.463
30	KECAMATAN KLIRONG	4	9	31	Rp 2.127.134.067
31	KECAMATAN BULUSPESANTREN	4	9	29	Rp 2.276.946.387
32	KECAMATAN AMBAL	4	9	25	Rp 2.313.748.994
33	KECAMATAN MIRIT	4	9	29	Rp 2.218.566.777
34	KECAMATAN BONOROWO	4	9	29	Rp 2.299.610.355
35	KECAMATAN PREMBUN	4	9	30	Rp 2.438.541.476
36	KECAMATAN PADURESO	4	9	28	Rp 2.203.705.012
37	KECAMATAN KUTOWINANGUN	4	9	28	Rp 2.253.440.054
38	KECAMATAN ALIAN	4	9	27	Rp 2.426.077.403
39	KECAMATAN PONCOWARNO	4	9	27	Rp 2.253.478.021
40	KECAMATAN KEBUMEN	5	10	35	Rp 10.328.999.044
41	KECAMATAN PEJAGOAN	4	9	29	Rp 2.440.800.684
42	KECAMATAN SRUWENG	4	9	32	Rp 2.383.455.998
43	KECAMATAN ADIMULYO	4	9	27	Rp 2.340.190.342
44	KECAMATAN KUWARASAN	4	9	26	Rp 2.251.713.638
45	KECAMATAN ROWOKELE	4	9	28	Rp 2.444.638.488
46	KECAMATAN SEMPOR	4	9	29	Rp 2.470.274.504
47	KECAMATAN GOMBONG	5	10	33	Rp 5.320.348.022
48	KECAMATAN KARANGANYAR	5	10	33	Rp 7.645.699.920
49	KECAMATAN KARANGGAYAM	4	9	29	Rp 2.367.696.263
50	KECAMATAN SADANG	4	9	30	Rp 2.585.313.622
51	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	4	9	29	Rp 2.410.544.402
52	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3	13	30	Rp 9.256.183.448

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. KEBUMEN
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**1.043.134.938.136,00**							**1.981.578.608.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.027.000.523.736,00**							**1.962.195.587.876,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.027.000.523.736,00**							**1.962.195.587.876,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**820.790.182.066,00**							**1.715.742.597.126,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***820.690.182.066,00***							***1.715.642.597.126,00***	
			1.Nilai SAKIP	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	820.690.182.066,00						72.51 Nilai	1.715.642.597.126,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	820.690.182.066,00						90.50 Indeks	1.715.642.597.126,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						108.082.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		108.082.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						108.082.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		108.082.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	52.592.000,00						10 Dokumen	52.592.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	55.490.000,00						8 Laporan	55.490.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						52.592.000,00							52.592.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	52.592.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		10 Dokumen	52.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.490.000,00							55.490.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	55.490.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		8 Laporan	55.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						792.085.632.136,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		1.689.678.552.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	202.215.000,00						12 Dokumen	202.215.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8158 Orang/bulan		8158 Orang/bulan	8158 Orang/bulan	1.244.941.000,00						8158 Orang/bulan	885.714.669.403,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.244.941.000,00							885.714.669.403,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8158 Orang/bulan		8158 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.244.941.000,00	Kab. Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		8158 Orang/bulan	885.714.669.403,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						202.215.000,00							202.215.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	202.215.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Dokumen	202.215.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						205.496.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		205.496.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						205.496.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		205.496.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	205.496.000,00						10 Laporan	205.496.000,00	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						205.496.000,00							205.496.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	205.496.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		10 Laporan	205.496.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	117 Orang		117 Orang	117 Orang	100.000.000,00						117 Orang	100.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	117 Orang		117 Orang	117 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		117 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						874.735.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		883.735.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						874.735.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		883.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	127.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	107.000.000,00						12 Paket	110.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	393.735.000,00						12 Paket	393.735.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	119.000.000,00						12 Paket	123.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	120.000.000,00						4 Paket	120.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	120.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		4 Paket	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						107.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	107.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Paket	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						119.000.000,00							123.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	119.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Paket	123.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						393.735.000,00							393.735.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	393.735.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Paket	393.735.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						125.000.000,00							127.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Laporan	127.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						605.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang						605.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		100.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		80 Unit	56 Unit	55.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	450.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		12 Unit	10 Unit	100.000.000,00						10 Unit	100.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						450.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	450.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						55.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		80 Unit	56 Unit	55.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		0 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		12 Unit	10 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		10 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.811.236.930,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		24.236.731.330,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.811.236.930,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		24.236.731.330,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	670.000.000,00						12 Laporan	675.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.129.686.930,00						12 Laporan	23.550.181.330,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.550.000,00						12 Laporan	11.550.000,00	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						11.550.000,00							11.550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Laporan	11.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						670.000.000,00							675.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	670.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Laporan	675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						25.129.686.930,00							23.550.181.330,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.129.686.930,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		12 Laporan	23.550.181.330,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.000.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		430.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.000.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		430.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	200.000.000,00						12 Unit	225.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		12 Unit	225.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						792.085.632.136,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		1.689.678.552.796,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						792.085.632.136,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		1.689.678.552.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	-	790.638.476.136,00						-	803.761.668.393,00	
	1.01.01.2.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						790.638.476.136,00							803.761.668.393,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	7459 Orang/bulan	790.638.476.136,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD	-	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		-	803.761.668.393,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.000.000.000,00					ASN Disdikpora Kab. Kebumen		430.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	800.000.000,00						-	205.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						800.000.000,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	9 Unit	800.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		-	205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**202.565.033.590,00**							**240.466.298.550,00**	
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD						***35.746.974.400,00***							***41.950.952.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	44.92 %		44.8 %	44.83 %	35.746.974.400,00						44.86 %	41.950.952.000,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						31.186.845.400,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		37.551.823.000,00	
		Meningkatnya tata kelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas						31.186.845.400,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		37.551.823.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	60 Paket		30 Paket	60 Paket	100.000.000,00						30 Paket	1.560.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	32.130.000,00						2 Dokumen	32.130.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	107.246.400,00						55 Satuan Pendidikan	178.744.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1131 Satuan Pendidikan		1131 Satuan Pendidikan	1131 Satuan Pendidikan	18.863.100.000,00						1131 Satuan Pendidikan	20.206.800.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2809 Orang		2809 Orang	2809 Orang	10.114.324.000,00						2809 Orang	11.891.400.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	520 Paket		520 Paket	520 Paket	76.889.000,00						520 Paket	76.889.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	184.056.000,00						180 Orang	306.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik		150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	36.000.000,00						150 Peserta Didik	36.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	820 Satuan Pendidikan		520 Satuan Pendidikan	820 Satuan Pendidikan	100.000.000,00						820 Satuan Pendidikan	220.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1131 Orang		1131 Orang	1131 Orang	113.100.000,00						1131 Orang	113.100.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	165.000.000,00						1 Ruang	165.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	180.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22 Unit		22 Unit	22 Unit	1.100.000.000,00						40 Unit	2.100.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00						2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	450.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						180.000.000,00							200.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	180.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		2 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						36.000.000,00							36.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik		150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	36.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		150 Peserta Didik	36.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						10.114.324.000,00							11.891.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2809 Orang		2809 Orang	2000 Orang	10.114.324.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2809 Orang	11.891.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						107.246.400,00							178.744.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	107.246.400,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		55 Satuan Pendidikan	178.744.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						18.863.100.000,00							20.206.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1131 Satuan Pendidikan		1131 Satuan Pendidikan	1131 Satuan Pendidikan	18.863.100.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		1131 Satuan Pendidikan	20.206.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						113.100.000,00							113.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1131 Orang		1131 Orang	1131 Orang	113.100.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan		1131 Orang	113.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						32.130.000,00							32.130.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	32.130.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2 Dokumen	32.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						165.000.000,00							165.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	165.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		1 Ruang	165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						184.056.000,00							306.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	184.056.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		180 Orang	306.760.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0,00							450.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		1 Unit	450.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						76.889.000,00							76.889.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	520 Paket		520 Paket	520 Paket	76.889.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		520 Paket	76.889.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		2 Unit	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						1.100.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22 Unit		22 Unit	22 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		40 Unit	2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						100.000.000,00							1.560.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	60 Paket		30 Paket	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		30 Paket	1.560.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						100.000.000,00							220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	820 Satuan Pendidikan		520 Satuan Pendidikan	370 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		820 Satuan Pendidikan	220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						4.660.129.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan Kabupaten Kebumen		4.414.129.000,00	
		Meningkatnya tata kelola Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang berkualitas						4.660.129.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan Kabupaten Kebumen		4.414.129.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	120.000.000,00						4 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.025.000,00						5 Dokumen	200.025.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	64 Orang		64 Orang	64 Orang	21.000.000,00						64 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	975 Peserta Didik		975 Peserta Didik	975 Peserta Didik	689.000.000,00						975 Peserta Didik	692.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	18.000.000,00						50 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Peserta Didik		50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	54.404.000,00						50 Peserta Didik	74.404.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	123.000.000,00						50 Satuan Pendidikan	205.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	3.434.700.000,00						25 Satuan Pendidikan	2.862.700.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						689.000.000,00							692.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	975 Peserta Didik		975 Peserta Didik	975 Peserta Didik	689.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		975 Peserta Didik	692.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						21.000.000,00							35.000.000,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	64 Orang		64 Orang	64 Orang	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		64 Orang	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						123.000.000,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	123.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		50 Satuan Pendidikan	205.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						3.434.700.000,00							2.862.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	25 Satuan Pendidikan		25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	3.434.700.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		25 Satuan Pendidikan	2.862.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						18.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan		50 Orang	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						200.025.000,00							200.025.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	200.025.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		5 Dokumen	200.025.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						54.404.000,00							74.404.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Peserta Didik		50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	54.404.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		50 Peserta Didik	74.404.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Pejagoan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		1 Unit	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						120.000.000,00							250.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket		4 Paket	4 Paket	120.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		4 Paket	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Pejagoan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		3 Ruang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A						***106.166.962.940,00***							***128.446.690.000,00***	
			1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100 %		100 %	100 %	106.166.962.940,00						100 %	128.446.690.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						106.166.962.940,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		128.746.690.000,00	
		Meningkatnya tata kelola pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang berkualitas						106.166.962.940,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		128.746.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	763 Dokumen		763 Dokumen	763 Dokumen	90.000.000,00						763 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.320.000,00						2 Kegiatan	164.560.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	139.840.000,00						4 Komunitas	480.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	75 Paket		15 Paket	50 Paket	886.367.200,00						75 Paket	1.910.081.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang		250 Orang	300 Orang	56.150.000,00						300 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	15 Paket		15 Paket	15 Paket	0,00						15 Paket	1.620.250.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang		2 Ruang	3 Ruang	610.000.000,00						10 Ruang	3.858.750.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9570 Orang		6500 Orang	9570 Orang	600.000.000,00						9570 Orang	1.843.710.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2700 Peserta Didik		2700 Peserta Didik	2700 Peserta Didik	1.130.000.000,00						2700 Peserta Didik	1.130.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	718 Orang		718 Orang	718 Orang	59.500.000,00						718 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		4 Ruang	10 Ruang	588.000.000,00						10 Ruang	3.307.500.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang		30 Ruang	40 Ruang	3.999.498.340,00						40 Ruang	4.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit		6 Unit	10 Unit	338.100.000,00						10 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit		5 Unit	15 Unit	2.960.000.000,00						15 Unit	5.688.125.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit		55 Unit	15 Unit	1.575.000.000,00						60 Unit	6.653.750.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	746 Satuan Pendidikan		746 Satuan Pendidikan	746 Satuan Pendidikan	64.970.400,00						746 Satuan Pendidikan	108.284.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	746 Satuan Pendidikan		746 Satuan Pendidikan	746 Satuan Pendidikan	230.000.000,00						746 Satuan Pendidikan	230.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	746 Satuan Pendidikan		746 Satuan Pendidikan	746 Satuan Pendidikan	92.194.417.000,00						746 Satuan Pendidikan	95.000.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik		1804 Peserta Didik	6 Peserta Didik	420.000.000,00						6 Peserta Didik	750.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	746 Orang		746 Orang	746 Orang	124.800.000,00						746 Orang	251.680.000,00	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						610.000.000,00							3.858.750.000,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	610.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		10 Ruang	3.858.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.960.000.000,00							5.688.125.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit		5 Unit	1 Unit	2.960.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		15 Unit	5.688.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						886.367.200,00							1.910.081.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	75 Paket		15 Paket	42 Paket	886.367.200,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		75 Paket	1.910.081.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							1.620.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	15 Paket		15 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kebumen	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		15 Paket	1.620.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						338.100.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit		6 Unit	2 Unit	338.100.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		10 Unit	1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						420.000.000,00							750.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5 Peserta Didik		1804 Peserta Didik	1804 Peserta Didik	420.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		6 Peserta Didik	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						230.000.000,00							230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	746 Satuan Pendidikan		746 Satuan Pendidikan	746 Satuan Pendidikan	230.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		746 Satuan Pendidikan	230.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						92.194.417.000,00							95.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	746 Satuan Pendidikan		746 Satuan Pendidikan	746 Satuan Pendidikan	92.194.417.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		746 Satuan Pendidikan	95.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						124.800.000,00							251.680.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	746 Orang		746 Orang	746 Orang	124.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		746 Orang	251.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						56.150.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang		250 Orang	300 Orang	56.150.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan		300 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						59.500.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	718 Orang		718 Orang	718 Orang	59.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan		718 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						90.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	763 Dokumen		763 Dokumen	763 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		763 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						139.840.000,00							480.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas		4 Komunitas	4 Komunitas	139.840.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		4 Komunitas	480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						100.320.000,00							164.560.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.320.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2 Kegiatan	164.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						588.000.000,00							3.307.500.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang		4 Ruang	2 Ruang	588.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		10 Ruang	3.307.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.575.000.000,00							6.653.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit		55 Unit	7 Unit	1.575.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		60 Unit	6.653.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						600.000.000,00							1.843.710.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9570 Orang		6500 Orang	9570 Orang	600.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		9570 Orang	1.843.710.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						64.970.400,00							108.284.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	746 Satuan Pendidikan		746 Satuan Pendidikan	746 Satuan Pendidikan	64.970.400,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		746 Satuan Pendidikan	108.284.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						3.999.498.340,00							4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40 Ruang		30 Ruang	30 Ruang	3.999.498.340,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		40 Ruang	4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						1.130.000.000,00							1.130.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2700 Peserta Didik		2700 Peserta Didik	2700 Peserta Didik	1.130.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2700 Peserta Didik	1.130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B						***60.551.096.250,00***							***69.753.656.550,00***	
			1.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	90.03 %		86.03 %	87.03 %	60.551.096.250,00						88.03 %	69.753.656.550,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						60.551.096.250,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		69.753.656.550,00	
		Meningkatnya tata kelola pendidikan SMP yang berkualitas						60.551.096.250,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		69.753.656.550,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		6 Paket	6 Paket	117.164.400,00						10 Paket	1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56 Dokumen		56 Dokumen	56 Dokumen	24.060.600,00						56 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	112 Kegiatan		112 Kegiatan	112 Kegiatan	10.800.000,00						112 Kegiatan	18.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	10 Paket	105.000.000,00						5 Paket	231.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	112 Orang		112 Orang	112 Orang	15.600.000,00						112 Orang	26.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660 Orang		660 Orang	660 Orang	697.728.000,00						660 Orang	782.680.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1088 Orang		1088 Orang	1088 Orang	258.498.000,00						1088 Orang	290.830.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	350 Paket	182.000.000,00						350 Paket	470.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1680 Orang		1680 Orang	1680 Orang	466.395.600,00						1680 Orang	777.326.800,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1800 Peserta Didik		1800 Peserta Didik	1800 Peserta Didik	1.635.074.600,00						1800 Peserta Didik	2.025.791.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	163.200.000,00						112 Satuan Pendidikan	472.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	112 Orang		112 Orang	112 Orang	22.800.000,00						112 Orang	38.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang		2 Ruang	4 Ruang	300.000.000,00						2 Ruang	600.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		15 Ruang	15 Ruang	2.850.000.000,00						15 Ruang	3.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	210.000.000,00						4 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		5 Unit	5 Unit	735.000.000,00						2 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		20 Unit	42 Unit	4.887.294.250,00						38 Unit	5.466.952.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	253.697.800,00						112 Satuan Pendidikan	2.159.163.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	46.703.583.000,00						112 Satuan Pendidikan	49.288.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	840 Peserta Didik		840 Peserta Didik	840 Peserta Didik	840.000.000,00						1330 Peserta Didik	1.605.913.750,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	112 Orang		112 Orang	112 Orang	73.200.000,00						112 Orang	122.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						735.000.000,00							800.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		5 Unit	5 Unit	735.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		2 Unit	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						2.850.000.000,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang		15 Ruang	10 Ruang	2.850.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		15 Ruang	3.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						4.887.294.250,00							5.466.952.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		20 Unit	42 Unit	4.887.294.250,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		38 Unit	5.466.952.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						105.000.000,00							231.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	10 Paket	105.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		5 Paket	231.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						210.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	210.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		4 Unit	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						1.635.074.600,00							2.025.791.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1800 Peserta Didik		1800 Peserta Didik	1800 Peserta Didik	1.635.074.600,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		1800 Peserta Didik	2.025.791.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						840.000.000,00							1.605.913.750,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	840 Peserta Didik		840 Peserta Didik	840 Peserta Didik	840.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		1330 Peserta Didik	1.605.913.750,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						258.498.000,00							290.830.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1088 Orang		1088 Orang	1071 Orang	258.498.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		1088 Orang	290.830.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						697.728.000,00							782.680.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660 Orang		660 Orang	660 Orang	697.728.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		660 Orang	782.680.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						253.697.800,00							2.159.163.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	253.697.800,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		112 Satuan Pendidikan	2.159.163.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						46.703.583.000,00							49.288.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	46.703.583.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		112 Satuan Pendidikan	49.288.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						73.200.000,00							122.000.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	112 Orang		112 Orang	112 Orang	73.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		112 Orang	122.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						15.600.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	112 Orang		112 Orang	112 Orang	15.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan dan melengkapi infrastruktur digital pendidikan		112 Orang	26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						22.800.000,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	112 Orang		112 Orang	112 Orang	22.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		112 Orang	38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						24.060.600,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56 Dokumen		56 Dokumen	56 Dokumen	24.060.600,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		56 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						10.800.000,00							18.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	112 Kegiatan		112 Kegiatan	1 Kegiatan	10.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		112 Kegiatan	18.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						163.200.000,00							472.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	112 Satuan Pendidikan		112 Satuan Pendidikan	112 Satuan Pendidikan	163.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		112 Satuan Pendidikan	472.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						300.000.000,00							600.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		2 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						466.395.600,00							777.326.800,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1680 Orang		1680 Orang	1680 Orang	466.395.600,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		1680 Orang	777.326.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						182.000.000,00							470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket		350 Paket	135 Paket	182.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		350 Paket	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						117.164.400,00							1.200.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		6 Paket	1 Paket	117.164.400,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penguatan keberlanjutan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan		10 Paket	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**48.000.000,00**							**110.000.000,00**	
		Meningkatnya presentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah /seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan						***48.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			1.Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	66.48 %		64.55 %	64.55 %	48.000.000,00						65.52 %	110.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						48.000.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		110.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						48.000.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		110.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	130 Orang		110 Orang	130 Orang	48.000.000,00						130 Orang	110.000.000,00	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						48.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	130 Orang		110 Orang	130 Orang	48.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		130 Orang	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**3.567.308.080,00**							**5.846.692.200,00**	
		Meningkatnya Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru						***3.567.308.080,00***							***5.846.692.200,00***	
			1.Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru	17.47 %		16.59 %	16.81 %	3.567.308.080,00						17.03 %	5.846.692.200,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.567.308.080,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		5.846.692.200,00	
		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.567.308.080,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		5.846.692.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	306 Dokumen		306 Dokumen	306 Dokumen	3.058.528.080,00						306 Dokumen	5.196.692.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	508.780.000,00						4 Laporan	650.000.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.058.528.080,00							5.196.692.200,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	306 Dokumen		306 Dokumen	306 Dokumen	3.058.528.080,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		306 Dokumen	5.196.692.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						508.780.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	508.780.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		4 Laporan	650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya Presentase Pengajuan Izin yang dilayani						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Presentase Pengajuan Izin yang dilayani	100.00 %		100.00 %	100 %	10.000.000,00						100.00 %	10.000.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		20.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		10.000.000,00	
		Telaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00					Peserta Didik, Pendidik, Tenaga kependidikan		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan atau potensi lokal		2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.134.414.400,00**							**19.383.021.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**16.134.414.400,00**							**19.383.021.000,00**	
6.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**890.683.000,00**							**1.008.442.000,00**	
		Meningkatnya Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif						***890.683.000,00***							***1.008.442.000,00***	
			1.Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	76.74 %		69.77 %	72.09 %	890.683.000,00						74.42 %	1.008.442.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						890.683.000,00					Pemuda di Kab. Kebumen		1.008.442.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						890.683.000,00					Pemuda di Kab. Kebumen		1.008.442.000,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	890.683.000,00						-	1.008.442.000,00	
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						890.683.000,00							1.008.442.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	800 Orang	890.683.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	1.008.442.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
7.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**14.866.112.400,00**							**17.979.796.000,00**	
		Meningkatnya Persentase prestasi Olahraga						***14.866.112.400,00***							***17.979.796.000,00***	
			1.Persentase prestasi Olahraga	42.13 %		34.21 %	36.10 %	14.866.112.400,00						38.34 %	17.979.796.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						11.902.312.000,00					Atlet di Kab. Kebumen		13.532.312.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						11.902.312.000,00					Atlet di Kab. Kebumen		13.532.312.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	11.902.312.000,00						-	13.532.312.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						11.902.312.000,00							13.532.312.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	7 Unit	11.902.312.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	13.532.312.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.014.468.400,00					Atlet di Kab. Kebumen		1.191.752.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.014.468.400,00					Atlet di Kab. Kebumen		1.191.752.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	1.014.468.400,00						-	1.191.752.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						1.014.468.400,00							1.191.752.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	400 Orang	1.014.468.400,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	1.191.752.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						249.332.000,00					Atlet di Kab. Kebumen		755.247.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						249.332.000,00					Atlet di Kab. Kebumen		755.247.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	86.400.000,00						-	170.691.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	162.932.000,00						-	584.556.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						86.400.000,00							170.691.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	35 Orang	86.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	170.691.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						162.932.000,00							584.556.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	65 Orang	162.932.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	584.556.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.700.000.000,00					Atlet di Kab. Kebumen		2.500.485.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.700.000.000,00					Atlet di Kab. Kebumen		2.500.485.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	1.700.000.000,00						-	2.500.485.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						1.700.000.000,00							2.500.485.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kerja Sama	1.700.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	2.500.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**377.619.000,00**							**394.783.000,00**	
		Meningkatnya Cakupan Prestasi Kepramukaan						***377.619.000,00***							***394.783.000,00***	
			1.Cakupan Prestasi Kepramukaan	100 %		66.67 %	66.67 %	377.619.000,00						100 %	394.783.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						377.619.000,00					Pemuda di Kab. Kebumen		394.783.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						377.619.000,00					Pemuda di Kab. Kebumen		394.783.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	-	377.619.000,00						-	394.783.000,00	
	2.19.04.2.01.0013	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						377.619.000,00							394.783.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	1 Organisasi	377.619.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembinaan kepemudaan dan olahraga		-	394.783.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**397.556.941.819,00**							**429.957.269.265,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**385.808.265.819,00**							**417.958.381.265,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**385.808.265.819,00**							**417.958.381.265,00**	
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**236.982.942.819,00**							**255.689.028.011,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***236.662.942.819,00***							***255.521.028.011,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.25 Nilai	72.30 Nilai	236.662.942.819,00						72.51 Nilai	255.521.028.011,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.00 Indeks		89.40 Indeks	89.50 Indeks	236.662.942.819,00						89.60 Indeks	255.521.028.011,00	
			3.Nilai SAKIP RSUD dr. Soedirman	75.00 Nilai		71.00 Nilai	71.27 Nilai	236.662.942.819,00						72.51 Nilai	255.521.028.011,00	
			4.Nilai SAKIP RSUD Prembun	75.00 Nilai		74.80 Nilai	74.85 Nilai	236.662.942.819,00						74.90 Nilai	255.521.028.011,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Prembun	91.51 Indeks		91.47 Indeks	91.48 Indeks	236.662.942.819,00						91.49 Indeks	255.521.028.011,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. Soedirman	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	236.662.942.819,00						90.50 Indeks	255.521.028.011,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						131.000.000,00					Dinkesppkb dan stakeholder terkait		140.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						131.000.000,00					Dinkesppkb dan stakeholder terkait		140.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	86.000.000,00						9 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	45.000.000,00						7 Laporan	50.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						86.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	86.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		9 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		7 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						139.361.281.819,00					ASN Dinkesppkb		155.832.553.679,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						139.361.281.819,00					ASN Dinkesppkb		155.832.553.679,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	150.000.000,00						13 Dokumen	155.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2040 Orang/bulan		1941 Orang/bulan	1941 Orang/bulan	139.211.281.819,00						1941 Orang/bulan	155.677.553.679,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						139.211.281.819,00							155.677.553.679,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2040 Orang/bulan		1941 Orang/bulan	1915 Orang/bulan	139.211.281.819,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1941 Orang/bulan	155.677.553.679,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						150.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		13 Dokumen	155.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.000.000,00					ASN Dinkesppkb		55.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.000.000,00					ASN Dinkesppkb		55.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang		150 Orang	200 Orang	35.000.000,00						250 Orang	55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						35.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang		150 Orang	200 Orang	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		250 Orang	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.250.000,00					Dinkesppkb		350.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						243.250.000,00					Dinkesppkb		350.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00						12 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	77.000.000,00						12 Paket	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00						12 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.250.000,00						12 Paket	47.500.000,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						26.250.000,00							47.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Paket	47.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						45.000.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Paket	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Paket	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						77.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	77.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Paket	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						45.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Laporan	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						185.000.000,00					Barang Milik Daerah di Dinkesppkb		220.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						185.000.000,00					Barang Milik Daerah di Dinkesppkb		220.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		10 Unit	46 Unit	35.000.000,00						46 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		20 Unit	20 Unit	150.000.000,00						12 Unit	160.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						35.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		10 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		46 Unit	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		20 Unit	28 Unit	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Unit	160.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.998.567.000,00					Kantor Dinkesppkb dan UPT		16.186.567.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.998.567.000,00					Kantor Dinkesppkb dan UPT		16.186.567.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	740.000.000,00						12 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.257.567.000,00						12 Laporan	15.382.567.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	4.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Laporan	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						740.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	740.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Laporan	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.257.567.000,00							15.382.567.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.257.567.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12 Laporan	15.382.567.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						488.000.000,00					Barang Milik Daerah di Dinkesppkb		550.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						488.000.000,00					Barang Milik Daerah di Dinkesppkb		550.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	190.000.000,00						20 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00						10 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	120.000.000,00						60 Unit	120.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						190.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	190.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		20 Unit	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	50 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		10 Unit	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	129 Unit	120.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		60 Unit	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						80.540.844.000,00					35 Puksesmas		82.354.407.332,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						80.540.844.000,00					35 Puksesmas		82.354.407.332,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	37 Unit Kerja		37 Unit Kerja	37 Unit Kerja	80.540.844.000,00						37 Unit Kerja	82.354.407.332,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						80.540.844.000,00							82.354.407.332,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	37 Unit Kerja		37 Unit Kerja	35 Unit Kerja	80.540.844.000,00	Kab. Kebumen	Pendapatan dari BLUD Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		37 Unit Kerja	82.354.407.332,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						488.000.000,00					Barang Milik Daerah di Dinkesppkb		550.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	173.000.000,00						-	215.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						173.000.000,00							215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	4 Unit	173.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	215.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**142.292.970.900,00**							**154.663.376.154,00**	
		Meningkatnya pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						***142.002.970.900,00***							***154.388.333.154,00***	
			1.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80.00 %		46.00 %	55.00 %	142.002.970.900,00						61.00 %	154.388.333.154,00	
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	95.00 %		93.61 %	94.00 %	142.002.970.900,00						94.00 %	154.388.333.154,00	
			3.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)(%)	92.81 %		90.00 %	90.00 %	142.002.970.900,00						90.00 %	154.388.333.154,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						29.497.839.000,00					UPT Dinkesppkb		30.761.919.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						29.497.839.000,00					UPT Dinkesppkb		30.761.919.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	245 Unit		245 Unit	245 Unit	165.000.000,00						245 Unit	278.114.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	115.340.000,00						120 Paket	127.050.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	9 Unit		15 Unit	17 Unit	8.570.000.000,00						8 Unit	5.600.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	12.127.499.000,00						7 Paket	14.461.755.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	35 Unit		3 Unit	2 Unit	8.520.000.000,00						13 Unit	10.295.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						8.570.000.000,00							5.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	9 Unit		15 Unit	12 Unit	8.570.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Argopeni || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Tlogosari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Adiwarno || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Puring || Desa Waluyorejo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Karanggadung || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Klirong || Desa Kedungwinangun || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan		8 Unit	5.600.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						8.520.000.000,00							10.295.000.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	35 Unit		3 Unit	1 Unit	8.520.000.000,00	Kab. Kebumen	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan		13 Unit	10.295.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						165.000.000,00							278.114.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	245 Unit		245 Unit	245 Unit	165.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		245 Unit	278.114.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						12.127.499.000,00							14.461.755.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	12.127.499.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		7 Paket	14.461.755.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						115.340.000,00							127.050.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	115.340.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		120 Paket	127.050.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						112.481.677.900,00					Masyarakat sesuai kelompok siklus hidup; 35 Puskesmas; Rumah Sakit, Bayi dan Balita yang mempunyai masalah gizi; Masyarakat yang mengidap penyakit menular dan tidak menular, Masyarakat Kab. Kebumen dan stakeholder terkait		123.574.207.154,00	
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						112.481.677.900,00					Masyarakat sesuai kelompok siklus hidup; 35 Puskesmas; Rumah Sakit, Bayi dan Balita yang mempunyai masalah gizi; Masyarakat yang mengidap penyakit menular dan tidak menular, Masyarakat Kab. Kebumen dan stakeholder terkait		123.574.207.154,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193992 Orang		186425 Orang	188289 Orang	328.680.000,00						190171 Orang	340.342.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58778 Orang		63724 Orang	62450 Orang	40.000.000,00						61201 Orang	50.820.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11451 Orang		12413 Orang	12165 Orang	2.091.365.000,00						11922 Orang	2.101.365.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	73.073.249.000,00						25 Dokumen	86.470.775.404,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00						4 Dokumen	44.468.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	38.115.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.336.069.000,00						4 Dokumen	8.122.324.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.284.720.000,00						4 Dokumen	1.294.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	31.763.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.071.004.000,00						6 Dokumen	770.218.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.162.773.000,00						6 Dokumen	1.172.773.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	357.515.000,00						36 Dokumen	425.002.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00						4 Dokumen	50.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00						2 Dokumen	684.571.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.867.401.000,00						1 Dokumen	6.756.183.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	88 Unit		88 Unit	88 Unit	50.000.000,00						88 Unit	63.525.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11492 Orang		12458 Orang	12209 Orang	30.000.000,00						11965 Orang	39.930.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11492 Orang		12458 Orang	12209 Orang	4.996.501.000,00						11965 Orang	5.006.501.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.041.695.000,00						4 Laporan	1.051.695.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	925 Orang		825 Orang	850 Orang	25.000.000,00						875 Orang	38.115.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1882 Orang		2959 Orang	2555 Orang	127.000.000,00						2268 Orang	139.836.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14497 Orang		15485 Orang	15231 Orang	57.500.000,00						14981 Orang	69.878.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10162 Orang		15976 Orang	13800 Orang	3.413.130.000,00						12249 Orang	3.889.763.850,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7 Orang		15 Orang	13 Orang	20.000.000,00						11 Orang	36.228.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5081 Orang		4831 Orang	4931 Orang	940.549.000,00						4981 Orang	950.549.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14795 Orang		12172 Orang	12780 Orang	35.000.000,00						13419 Orang	50.820.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82796 Orang		68117 Orang	71522 Orang	35.000.000,00						75099 Orang	44.468.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181689 Orang		178103 Orang	178993 Orang	30.000.000,00						179887 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758110 Orang		623699 Orang	654884 Orang	35.000.000,00						687628 Orang	50.820.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						4.996.501.000,00							5.006.501.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11492 Orang		12458 Orang	12209 Orang	4.996.501.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		11965 Orang	5.006.501.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						30.000.000,00							39.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11492 Orang		12458 Orang	12209 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi		11965 Orang	39.930.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						2.091.365.000,00							2.101.365.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11451 Orang		12413 Orang	12165 Orang	2.091.365.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		11922 Orang	2.101.365.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						40.000.000,00							50.820.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	58778 Orang		63724 Orang	62450 Orang	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		61201 Orang	50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						328.680.000,00							340.342.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	193992 Orang		186425 Orang	188270 Orang	328.680.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		190171 Orang	340.342.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						35.000.000,00							50.820.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	758110 Orang		623699 Orang	640734 Orang	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		687628 Orang	50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	181689 Orang		178103 Orang	178993 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		179887 Orang	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						35.000.000,00							44.468.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82796 Orang		68117 Orang	67418 Orang	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		75099 Orang	44.468.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						35.000.000,00							50.820.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14795 Orang		12172 Orang	12093 Orang	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		13419 Orang	50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						940.549.000,00							950.549.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5081 Orang		4831 Orang	4931 Orang	940.549.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		4981 Orang	950.549.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.413.130.000,00							3.889.763.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10162 Orang		15976 Orang	13800 Orang	3.413.130.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		12249 Orang	3.889.763.850,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						57.500.000,00							69.878.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14497 Orang		15485 Orang	15231 Orang	57.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		14981 Orang	69.878.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						35.000.000,00							44.468.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		4 Dokumen	44.468.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						30.000.000,00							38.115.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		4 Dokumen	38.115.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						7.336.069.000,00							8.122.324.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	7.336.069.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		4 Dokumen	8.122.324.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.284.720.000,00							1.294.720.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.284.720.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		4 Dokumen	1.294.720.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						1.071.004.000,00							770.218.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.071.004.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		6 Dokumen	770.218.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						20.000.000,00							31.763.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		3 Dokumen	31.763.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1.162.773.000,00							1.172.773.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.162.773.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		6 Dokumen	1.172.773.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						73.073.249.000,00							86.470.775.404,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	73.073.249.000,00	Kab. Kebumen	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi		25 Dokumen	86.470.775.404,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						40.000.000,00							50.820.000,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		4 Dokumen	50.820.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						10.867.401.000,00							6.756.183.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.867.401.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Dokumen	6.756.183.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						600.000.000,00							684.571.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		2 Dokumen	684.571.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						50.000.000,00							63.525.000,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	88 Unit		88 Unit	93 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		88 Unit	63.525.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1.041.695.000,00							1.051.695.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.041.695.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		4 Laporan	1.051.695.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						127.000.000,00							139.836.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1882 Orang		2959 Orang	2555 Orang	127.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		2268 Orang	139.836.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						25.000.000,00							38.115.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	925 Orang		825 Orang	850 Orang	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		875 Orang	38.115.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						20.000.000,00							36.228.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	7 Orang		15 Orang	13 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		11 Orang	36.228.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						357.515.000,00							425.002.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	357.515.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		36 Dokumen	425.002.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						51.204.000,00					Puskesmas, RS, Klinik, Labkes, Tempat Praktek Mandiri		55.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						51.204.000,00					Puskesmas, RS, Klinik, Labkes, Tempat Praktek Mandiri		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.204.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						51.204.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.204.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						262.250.000,00					Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik di Kabupaten Kebumen		272.250.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						262.250.000,00					Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik di Kabupaten Kebumen		272.250.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	82 Unit		82 Unit	82 Unit	262.250.000,00						82 Unit	272.250.000,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						262.250.000,00							272.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	82 Unit		82 Unit	83 Unit	262.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		82 Unit	272.250.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						112.481.677.900,00					Masyarakat sesuai kelompok siklus hidup; 35 Puskesmas; Rumah Sakit, Bayi dan Balita yang mempunyai masalah gizi; Masyarakat yang mengidap penyakit menular dan tidak menular, Masyarakat Kab. Kebumen dan stakeholder terkait		123.574.207.154,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	3.205.026.900,00						-	3.215.026.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	37.500.000,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	25.000.000,00						-	442.792.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	40.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						25.000.000,00							442.792.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	12 Paket	25.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	442.792.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						3.205.026.900,00							3.215.026.900,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	5 Laporan	3.205.026.900,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		-	3.215.026.900,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						37.500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	3 Laporan	37.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		-	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**2.546.657.000,00**							**2.566.140.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						***2.546.657.000,00***							***2.566.140.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	95.25 Persentase		94.25 Persentase	94.50 Persentase	2.546.657.000,00						94.75 Persentase	2.566.140.000,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						327.167.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kebumen		346.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						327.167.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kebumen		346.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	277.167.000,00						2 Dokumen	287.167.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						277.167.000,00							287.167.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	277.167.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		2 Dokumen	287.167.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.219.490.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kebumen		2.219.490.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.219.490.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kebumen		2.219.490.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	450 Orang		450 Orang	450 Orang	2.219.490.000,00						450 Orang	2.219.490.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.219.490.000,00							2.219.490.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	450 Orang		450 Orang	356 Orang	2.219.490.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		450 Orang	2.219.490.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						327.167.000,00					Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kabupaten Kebumen		346.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	50.000.000,00						-	59.483.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						50.000.000,00							59.483.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	59.483.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
12.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**697.965.000,00**							**770.069.000,00**	
		Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						***697.965.000,00***							***770.069.000,00***	
			1.Persentase sarana sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman serta produk pangan industri rumah tangga yang memenuhi persyaratan perijinan	84.67 %		78.00 %	79.67 %	697.965.000,00						81.33 %	770.069.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						90.711.000,00					Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kabupaten Kebumen		100.711.000,00	
		Meningkatnya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						90.711.000,00					Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) di Kabupaten Kebumen		100.711.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	90.711.000,00						8 Dokumen	100.711.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						90.711.000,00							100.711.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	90.711.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		8 Dokumen	100.711.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						239.322.000,00					Produsen/Pelaku Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen		291.426.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						239.322.000,00					Produsen/Pelaku Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen		291.426.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	239.322.000,00						8 Dokumen	291.426.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						239.322.000,00							291.426.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	239.322.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		8 Dokumen	291.426.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						367.932.000,00					Produsen/Pelaku Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen		377.932.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						367.932.000,00					Produsen/Pelaku Pangan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Kebumen		377.932.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	367.932.000,00						100 Unit	377.932.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						367.932.000,00							377.932.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	367.932.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		100 Unit	377.932.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**3.287.730.100,00**							**4.269.768.100,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***3.287.730.100,00***							***4.269.768.100,00***	
			1.Persentase rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup sehat	27.00 %		19.00 %	21.00 %	3.287.730.100,00						23.00 %	4.269.768.100,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						932.285.000,00					Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kebumen		942.285.000,00	
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						932.285.000,00					Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kebumen		942.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	932.285.000,00						3 Dokumen	942.285.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						932.285.000,00							942.285.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	932.285.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		3 Dokumen	942.285.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						87.500.000,00					Masyarakat dan Pesantren di Kabupaten Kebumen		99.138.000,00	
		Terwujudnya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						87.500.000,00					Masyarakat dan Pesantren di Kabupaten Kebumen		99.138.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	87.500.000,00						4 Dokumen	99.138.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						87.500.000,00							99.138.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	87.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		4 Dokumen	99.138.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.267.945.100,00					Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Siklus Hidup di Kabupaten Kebumen		3.228.345.100,00	
		Meningkatnya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.267.945.100,00					Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Siklus Hidup di Kabupaten Kebumen		3.228.345.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.267.945.100,00						4 Dokumen	3.228.345.100,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						2.267.945.100,00							3.228.345.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.267.945.100,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		4 Dokumen	3.228.345.100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.748.676.000,00**							**11.998.888.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**11.748.676.000,00**							**11.998.888.000,00**	
14.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**543.800.000,00**							**683.503.000,00**	
		Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk						***510.800.000,00***							***683.503.000,00***	
			1.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	13.23 Angka		14.25 Angka	14.00 Angka	510.800.000,00						13.75 Angka	683.503.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						460.800.000,00					Fasilitas Kesehatan / Klinik Keluarga Berencana (Puskesmas, RS, Bidan Praktek Mandiri); Stakeholder terkait; Keluarga di Kabupaten Kebumen		575.103.000,00	
		Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						460.800.000,00					Fasilitas Kesehatan / Klinik Keluarga Berencana (Puskesmas, RS, Bidan Praktek Mandiri); Stakeholder terkait; Keluarga di Kabupaten Kebumen		575.103.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.000.000,00						1 Dokumen	387.702.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	63.525.000,00	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						326.000.000,00							387.702.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	326.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Dokumen	387.702.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						25.000.000,00							63.525.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Dokumen	63.525.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						83.000.000,00					Kampung KB dan Sekolah di Kabupaten Kebumen		108.400.000,00	
		Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						83.000.000,00					Kampung KB dan Sekolah di Kabupaten Kebumen		108.400.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	-	33.000.000,00						-	48.400.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						50.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	298 Kampung KB	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Argopeni || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Rangkah || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Ampelsari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buluspesantren || Desa Ampih || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Prembun || Desa Tunggalroso || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Depokrejo || 1 ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						33.000.000,00							48.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	1 Laporan / Dokumen	33.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Petanahan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ambal || Desa Ambalresmi || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kutosari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Pejagoan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	48.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						460.800.000,00					Fasilitas Kesehatan / Klinik Keluarga Berencana (Puskesmas, RS, Bidan Praktek Mandiri); Stakeholder terkait; Keluarga di Kabupaten Kebumen		575.103.000,00	
			Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	-	33.000.000,00						-	37.076.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	76.800.000,00						-	86.800.000,00	
	2.14.02.2.02.0029	Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						33.000.000,00							37.076.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyusunan analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Jumlah analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	37.076.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						76.800.000,00							86.800.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	76.800.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	86.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**3.996.876.000,00**							**4.067.772.000,00**	
		Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***3.969.376.000,00***							***4.067.772.000,00***	
			1.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	67.50 %		67.30 %	67.35 %	3.969.376.000,00						67.40 %	4.067.772.000,00	
			2.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.50 %		10.20 %	10.00 %	3.969.376.000,00						9.50 %	4.067.772.000,00	
			3.Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	88.70 %		88.40 %	88.45 %	3.969.376.000,00						88.50 %	4.067.772.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						510.991.000,00					Stakeholder terkait Stunting; Balai Penyuluhan KB, Masyarakat Kabupaten Kebumen; Stakeholder terkait Bangga Kencana		553.491.000,00	
		Terciptanya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						510.991.000,00					Stakeholder terkait Stunting; Balai Penyuluhan KB, Masyarakat Kabupaten Kebumen; Stakeholder terkait Bangga Kencana		553.491.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00						1 Dokumen	37.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	389.991.000,00						1 Laporan	399.991.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.500.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi		5 Organisasi	5 Organisasi	66.000.000,00						5 Organisasi	76.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						27.500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan		1 Laporan	3 Laporan	27.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Laporan	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						389.991.000,00							399.991.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	389.991.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Laporan	399.991.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						27.500.000,00							37.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Dokumen	37.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						66.000.000,00							76.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi		5 Organisasi	3 Organisasi	66.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		5 Organisasi	76.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						497.500.000,00					Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		507.500.000,00	
		Terciptanya Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdaya						497.500.000,00					Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		507.500.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2413 Orang		2413 Orang	2413 Orang	497.500.000,00						2413 Orang	507.500.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						497.500.000,00							507.500.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2413 Orang		2413 Orang	2413 Orang	497.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		2413 Orang	507.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						2.988.385.000,00					Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kebumen dan Akseptor KB		3.006.781.000,00	
		Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						2.988.385.000,00					Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kebumen dan Akseptor KB		3.006.781.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11712 Orang		11712 Orang	11712 Orang	2.905.817.000,00						11712 Orang	2.915.817.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						2.905.817.000,00							2.915.817.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	11712 Orang		11712 Orang	9284 Orang	2.905.817.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		11712 Orang	2.915.817.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						2.988.385.000,00					Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Kebumen dan Akseptor KB		3.006.781.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	82.568.000,00						-	90.964.000,00	
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						82.568.000,00							90.964.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	82.568.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	90.964.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**7.208.000.000,00**							**7.247.613.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemberdayaan keluarga dalam upaya peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						***7.158.000.000,00***							***7.247.613.000,00***	
			1.Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	66.00 %		62.00 %	63.00 %	7.158.000.000,00						64.00 %	7.247.613.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						294.000.000,00					Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Duta Genre, Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL,PIK)		323.613.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	64.963.000,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						50.000.000,00							64.963.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Laporan	64.963.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						6.914.000.000,00					Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		6.924.000.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						6.914.000.000,00					Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		6.924.000.000,00	
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1.560.000.000,00						1 laporan	1.560.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.560.000.000,00							1.560.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan		1 laporan	1 laporan	1.560.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		1 laporan	1.560.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		1 Laporan	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						294.000.000,00					Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Duta Genre, Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL,PIK)		323.613.000,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						294.000.000,00					Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Duta Genre, Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL,PIK)		323.613.000,00	
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	-	172.500.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	-	71.500.000,00						-	78.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						71.500.000,00							78.650.000,00	
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	1 Laporan	71.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	78.650.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						172.500.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-		-	460 Kelompok	172.500.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan sarana prasarana kesehatan dengan peralatan medis modern, ruang rawat inap yang memadai, dan fasilitas penunjang sesuai standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan		-	180.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						6.914.000.000,00					Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		6.924.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	5.304.000.000,00						-	5.304.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						5.304.000.000,00							5.304.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	40718 Keluarga	5.304.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan layanan kesehatan perempuan dan bayi guna percepatan penanggulangan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk berbasis penguatan ketahanan pangan daerah		-	5.304.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		RSUD dr. SOEDIRMAN						**129.000.000.000,00**							**127.360.490.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**129.000.000.000,00**							**127.360.490.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**129.000.000.000,00**							**127.360.490.000,00**	
17.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**129.000.000.000,00**							**127.360.490.000,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Dr. Soedirman	-		-	90,45 %	129.000.000.000,00						-	127.360.490.000,00	
			Nilai SAKIP RSUD Dr. Soedirman	-		-	71,27 Nilai	129.000.000.000,00						-	127.360.490.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						129.000.000.000,00					-		127.360.490.000,00	
		-						129.000.000.000,00					-		127.360.490.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	129.000.000.000,00						-	127.360.490.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						129.000.000.000,00							127.360.490.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	129.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	127.360.490.000,00	RSUD dr. SOEDIRMAN
		RSUD PREMBUN						**62.000.000.000,00**							**69.669.375.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**62.000.000.000,00**							**69.669.375.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**62.000.000.000,00**							**69.669.375.000,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**62.000.000.000,00**							**69.669.375.000,00**	
			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Prembun	-		-	91,48 Nilai	62.000.000.000,00						-	69.669.375.000,00	
			Nilai SAKIP RSUD Prembun	-		-	74,85 Nilai	62.000.000.000,00						-	69.669.375.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						62.000.000.000,00					-		69.669.375.000,00	
		-						62.000.000.000,00					-		69.669.375.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	62.000.000.000,00						-	69.669.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						62.000.000.000,00							69.669.375.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	62.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Prembun || Desa Prembun || 1	Retribusi Jasa Umum	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	69.669.375.000,00	RSUD PREMBUN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**270.498.604.798,00**							**301.079.422.314,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**270.398.604.798,00**							**300.979.422.314,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**270.398.604.798,00**							**300.979.422.314,00**	
19.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.208.816.054,00**							**29.304.079.639,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***22.948.816.054,00***							***28.244.079.639,00***	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	90.60 Indeks		90.45 Indeks	90.50 Indeks	22.948.816.054,00						90.55 Indeks	28.244.079.639,00	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.00 Nilai	72.51 Nilai	22.948.816.054,00						73.76 Nilai	28.244.079.639,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						175.000.000,00					Kabupaten Kebumen		175.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						175.000.000,00					Kabupaten Kebumen		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	85.000.000,00						10 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	90.000.000,00						17 Laporan	90.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Dokumen	85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						90.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		17 Laporan	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.972.165.054,00					Kabupaten Kebumen		24.062.079.639,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.972.165.054,00					Kabupaten Kebumen		24.062.079.639,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	275.000.000,00						30 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	18.697.165.054,00						180 Orang/bulan	23.787.079.639,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.697.165.054,00							23.787.079.639,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		180 Orang/bulan	180 Orang/bulan	18.697.165.054,00	Kab. Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		180 Orang/bulan	23.787.079.639,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						275.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	275.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Dokumen	275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200.000.000,00					Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah						200.000.000,00					Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						110.000.000,00					Kabupaten Kebumen		110.000.000,00	
		Terlaksannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						110.000.000,00					Kabupaten Kebumen		110.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang		57 Orang	57 Orang	100.000.000,00						57 Orang	100.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang		57 Orang	57 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		57 Orang	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						340.000.000,00					Kabupaten Kebumen		340.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						340.000.000,00					Kabupaten Kebumen		340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	70.000.000,00						12 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	60.000.000,00						4 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00						4 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	45.000.000,00						3 Paket	45.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Paket	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Paket	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Paket	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Paket	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.450.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.550.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.450.000.000,00					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.550.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		35 Unit	15 Unit	50.000.000,00						15 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	200.000.000,00						6 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		36 Unit	30 Unit	200.000.000,00						30 Unit	200.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	5 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						1.000.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0 Unit		10 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		35 Unit	15 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		15 Unit	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		36 Unit	30 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.676.651.000,00					Kabupaten Kebumen		582.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.676.651.000,00					Kabupaten Kebumen		582.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.314.651.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00						3 Laporan	2.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Laporan	2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						360.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.314.651.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.314.651.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.285.000.000,00					Kabupaten Kebumen		1.285.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.285.000.000,00					Kabupaten Kebumen		1.285.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	36 Unit		36 Unit	36 Unit	500.000.000,00						36 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00						4 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	128 Unit		128 Unit	128 Unit	500.000.000,00						128 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit		85 Unit	85 Unit	25.000.000,00						85 Unit	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	60.000.000,00						68 Unit	60.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	128 Unit		128 Unit	128 Unit	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		128 Unit	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	36 Unit		36 Unit	36 Unit	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		36 Unit	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	85 Unit		85 Unit	85 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		85 Unit	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		68 Unit	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**13.124.227.486,00**							**25.425.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas sistem irigasi daerah						***13.124.227.486,00***							***23.425.000.000,00***	
			1.Persentase kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	83.58 %		79.98 %	81.18 %	13.124.227.486,00						82.38 %	23.425.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Kabupaten Kebumen		300.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Embung yang terbangun dan terpelihara						300.000.000,00					Kabupaten Kebumen		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Srati || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Banjararjo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanggayam || Desa Kalirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						12.824.227.486,00					Kabupaten Kebumen		25.125.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah areal irigasi yang terlayani (HA)						12.824.227.486,00					Kabupaten Kebumen		25.125.000.000,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen		8 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00						5 Dokumen	525.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	525.000.000,00						30 Lembaga	600.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM		2 KM	2 KM	2.000.000.000,00						2 KM	2.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM		4 KM	4 KM	8.199.227.486,00						2 KM	20.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.3 KM		0.3 KM	0.3 KM	1.500.000.000,00						0.3 KM	2.000.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						1.500.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.3 KM		0.3 KM	0,3 KM	1.500.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Rowokele || Desa Wonoharjo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Desa Candi || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Wonosari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0.3 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						8.199.227.486,00							20.000.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM		4 KM	2,8 KM	8.199.227.486,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Candirenggo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Buayan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kuwarasan || Desa Purwodadi || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Rowokele || Desa Rowokele || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Rowokele || Desa Giyanti || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Rowokele || Desa Wonoharjo || 1 ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 KM	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 KM		2 KM	2 KM	2.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						525.000.000,00							600.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	525.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Lembaga	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						600.000.000,00							525.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	5 Dokumen		8 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Dokumen	525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**9.250.000.000,00**							**8.400.000.000,00**	
		Meningkatnya Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman						***9.250.000.000,00***							***8.400.000.000,00***	
			1.Persentase Pelayanan Air Minum Perpipaan Perdesaan Aman oleh KPSPAM	5.82 %		3.70 %	4.23 %	9.250.000.000,00						4.76 %	8.400.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						9.250.000.000,00					Kabupaten Kebumen		8.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengambangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						9.250.000.000,00					Kabupaten Kebumen		8.400.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	184 Orang		184 Orang	184 Orang	50.000.000,00						184 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik		5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	5.700.000.000,00						5 Liter/Detik	5.850.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.500.000.000,00						2 Liter/Detik	1.500.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	184 Orang		184 Orang	184 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		184 Orang	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						2.500.000.000,00							1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	6 Liter/Detik	2.500.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Pakuran || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Tugu || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sruweng || Desa Pengempon || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sruweng || Desa Kejawang || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sruweng || Desa Sidoagung || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Desa Giripurno || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Liter/Detik	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						5.700.000.000,00							5.850.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik		5 Liter/Detik	12 Liter/Detik	5.700.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Argosari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Kalipoh || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Jatiroto || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Prembun || Desa Sembirkadipaten || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Prembun || Desa Mulyosri || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Triwarno || 1 || Provinsi Jawa	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Liter/Detik	5.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	2 Unit		2 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Kalibangkang || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Wonodadi || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Watulawang || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanggayam || Desa Kalirejo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanggayam || Desa Kalibening || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Pucangan || 1 || Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
22.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**19.661.033.461,00**							**20.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik						***19.661.033.461,00***							***20.000.000.000,00***	
			1.Cakupan drainase yang tertangani	1.05 %		0.65 %	0.48 %	19.661.033.461,00						1.18 %	20.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						19.661.033.461,00					-		20.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						19.661.033.461,00					-		20.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00						4 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	3 Sistem Drainase Lingkungan		5 Sistem Drainase Lingkungan	4 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000.000,00						4 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1800 M		270 M	2300 M	11.161.033.461,00						1800 M	11.500.000.000,00	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter		500 Meter	500 Meter	3.000.000.000,00						500 Meter	3.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						11.161.033.461,00							11.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	1800 M		270 M	3550 M	11.161.033.461,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Bulurejo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Puring || Desa Tambakmulyo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Puring || Desa Banjarejo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Puring || Desa Sitiadi || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Munggu || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab.	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1800 M	11.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						3.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	500 Meter		500 Meter	500 Meter	3.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		500 Meter	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan						5.000.000.000,00							5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	3 Sistem Drainase Lingkungan		5 Sistem Drainase Lingkungan	4 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Sidomulyo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Banjarwinangun || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Klirong || Desa Bumiharjo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sruweng || Desa Karanggedang || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Rowokele || Desa Rowokele || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Sistem Drainase Lingkungan	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**20.730.000.000,00**							**10.730.000.000,00**	
		Meningkatnya bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik						***20.730.000.000,00***							***10.730.000.000,00***	
			1.Persentase Bangunan Gedung Kantor dalam Kondisi Baik dan Inklusif	83.94 %		83.86 %	83.88 %	20.730.000.000,00						83.90 %	10.730.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						20.730.000.000,00					-		10.730.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan Inkulsif						20.730.000.000,00					-		10.730.000.000,00	
			Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	50 Bantuan Teknis		50 Bantuan Teknis	50 Bantuan Teknis	30.000.000,00						50 Bantuan Teknis	30.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	150.000.000,00						500 Dokumen	150.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	50 Bantuan Teknis		50 Bantuan Teknis	50 Bantuan Teknis	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Bantuan Teknis	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		500 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Meningkatnya Jumlah bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik dan Inkulsif						20.730.000.000,00					-		10.730.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000.000,00						-	10.000.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	500.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	6 Bangunan Gedung	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000.000,00							10.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	7 Bangunan Gedung	20.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Penyelenggara Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	150 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**950.000.000,00**							**2.150.000.000,00**	
		Tertanganinya bangunan gedung+bangunan SPAM yang membutuhkan DED						***950.000.000,00***							***2.150.000.000,00***	
			1.Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	20.00 %		16.00 %	17.00 %	950.000.000,00						18.00 %	2.150.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						950.000.000,00					Kabupaten Kebumen		2.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah penataan bangunan dan lingkunganya yang tertangani dengan DED						950.000.000,00					Kabupaten Kebumen		2.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	650.000.000,00						10 Dokumen	650.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	50 Kawasan		50 Kawasan	50 Kawasan	300.000.000,00						50 Kawasan	1.500.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						650.000.000,00							650.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	5 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Dokumen	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	50 Kawasan		50 Kawasan	50 Kawasan	300.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		50 Kawasan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**181.005.445.312,00**							**203.305.342.675,00**	
		Meningkatnya Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Dalam Kondisi Mantap						***180.005.445.312,00***							***202.305.342.675,00***	
			1.Persentase Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	84.36 %		75.94 %	78.37 %	180.005.445.312,00						80.68 %	202.305.342.675,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						181.005.445.312,00					Kabupaten Kebumen		203.305.342.675,00	
		Meningkatnya Jumlah panjang jalan yang tertangani						181.005.445.312,00					Kabupaten Kebumen		203.305.342.675,00	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00						5 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000.000,00						8 Dokumen	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan		5 Jembatan	5 Jembatan	1.000.000.000,00						2 Jembatan	1.000.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1017.15 KM		1017.15 KM	1017.15 KM	650.000.000,00						1017.15 KM	650.000.000,00	
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	47 KM		45 KM	46 KM	350.000.000,00						47 KM	350.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	15 KM		13 KM	14 KM	54.095.032.210,00						14 KM	61.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	8 KM		8 KM	8 KM	31.376.290.000,00						8 KM	35.820.125.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	14 KM		15 KM	15 KM	62.429.975.102,00						15 KM	65.175.217.675,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM		9 KM	9 KM	15.000.000.000,00						10 KM	15.000.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	30 Meter		82 Meter	60 Meter	11.794.148.000,00						56 Meter	20.000.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dilebarkan	30 Meter		12 Meter	24 Meter	1.960.000.000,00						30 Meter	1.960.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	20 Meter		25 Meter	20 Meter	1.100.000.000,00						20 Meter	1.100.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	8 Dokumen		8 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						650.000.000,00							650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1017.15 KM		1017.15 KM	1017,15 KM	650.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1017.15 KM	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0049	Pelebaran Jembatan						1.960.000.000,00							1.960.000.000,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	30 Meter		12 Meter	30 Meter	1.960.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Karangsari || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Peniron || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kuwarasan || Desa Madureso || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sempor || Desa Semali || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sempor || Desa Kenteng || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Desa Grenggeng || 1 || Provinsi Jawa	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Meter	1.960.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						15.000.000.000,00							15.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM		9 KM	9 KM	15.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 KM	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	47 KM		45 KM	52 KM	350.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		47 KM	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						54.095.032.210,00							61.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	15 KM		13 KM	12 KM	54.095.032.210,00	Kab. Kebumen	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 KM	61.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						62.429.975.102,00							65.175.217.675,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	14 KM		15 KM	21 KM	62.429.975.102,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		15 KM	65.175.217.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan						1.100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	20 Meter		25 Meter	8 Meter	1.100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Meter	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	2 Jembatan		5 Jembatan	5 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar						31.376.290.000,00							35.820.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	8 KM		8 KM	10 KM	31.376.290.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 KM	35.820.125.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						11.794.148.000,00							20.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	30 Meter		82 Meter	64 Meter	11.794.148.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		56 Meter	20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**268.734.601,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang Terampil						***168.734.601,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Penyediaan Jasa Konstruksi yang terampil	65.48 %		65.16 %	65.24 %	168.734.601,00						65.32 %	100.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						168.734.601,00					Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		200.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah tenaga kontruksi yang terampil						168.734.601,00					Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		200.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga		100 Lembaga	100 Lembaga	68.734.601,00						100 Lembaga	100.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						68.734.601,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Lembaga		100 Lembaga	50 Lembaga	68.734.601,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		100 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		50 Orang	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Meningkatnya Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.200.347.884,00**							**1.365.000.000,00**	
		Meningkatnya Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang						***1.045.347.884,00***							***1.090.000.000,00***	
			1.Persentase Kinerja Pelaksanaan Penataan Tata Ruang	97.62 %		79.00 %	84.00 %	1.045.347.884,00						88.96 %	1.090.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						460.000.000,00					Kabupaten Kebumen		515.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota						460.000.000,00					Kabupaten Kebumen		515.000.000,00	
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota						75.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						120.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						550.347.884,00					Kabupaten Kebumen		600.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah						550.347.884,00					Kabupaten Kebumen		600.000.000,00	
			Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta		1 Peta	1 Peta	150.347.884,00						1 Peta	200.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar						150.347.884,00							200.000.000,00	
		Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta		1 Peta	1 Peta	150.347.884,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Peta	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						140.000.000,00					Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	
		Terlaksanya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						140.000.000,00					Kabupaten Kebumen		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00						6 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	75 Layanan		75 Layanan	75 Layanan	40.000.000,00						75 Layanan	50.000.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	25.000.000,00						1 Sistem Informasi	50.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	75 Layanan		75 Layanan	75 Layanan	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		75 Layanan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Sistem Informasi	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Kabupaten Kebumen		50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Kabupaten Kebumen		50.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
28.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						***100.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100.00 %		100.00 %	100.00 %	100.000.000,00						100.00 %	100.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	
		Terlaksanya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN						**32.562.951.212,00**							**37.284.425.557,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.128.222.000,00**							**4.430.154.150,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**5.128.222.000,00**							**4.430.154.150,00**	
29.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**1.507.606.000,00**							**683.078.550,00**	
		Meningkatnya Pengembangan Perumahan						***1.507.606.000,00***							***683.078.550,00***	
			1.Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.00 %		100.00 %	100.00 %	1.507.606.000,00						100.00 %	683.078.550,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						28.500.000,00					Kemiskinan		30.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						28.500.000,00					Kemiskinan		30.975.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.500.000,00						1 Dokumen	30.975.000,00	
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						28.500.000,00							30.975.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	30.975.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.479.106.000,00					Kemiskinan		652.103.550,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.479.106.000,00					Kemiskinan		652.103.550,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	23 Unit Rumah		35 Unit Rumah	22 Unit Rumah	1.479.106.000,00						22 Unit Rumah	652.103.550,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						1.479.106.000,00							652.103.550,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	23 Unit Rumah		35 Unit Rumah	42 Unit Rumah	1.479.106.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		22 Unit Rumah	652.103.550,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
30.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**431.662.000,00**							**473.445.300,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***431.662.000,00***							***473.445.300,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	7.26 %		2.42 %	3.63 %	431.662.000,00						4.84 %	473.445.300,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						320.000.000,00					Kemiskinan		345.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						320.000.000,00					Kemiskinan		345.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat		1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	320.000.000,00						1 Kelompok Masyarakat	345.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						320.000.000,00							345.000.000,00	
		Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat		1 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	320.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Kelompok Masyarakat	345.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						111.662.000,00					Kemiskinan		128.445.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						111.662.000,00					Kemiskinan		128.445.300,00	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.122.000,00						1 Dokumen	20.122.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	91.540.000,00						1 Laporan	108.323.300,00	
	1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						20.122.000,00							20.122.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.122.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.122.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						91.540.000,00							108.323.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	91.540.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	108.323.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
31.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**2.085.704.000,00**							**2.085.704.800,00**	
		Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						***2.085.704.000,00***							***2.085.704.800,00***	
			1.Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	21.21 %		11.47 %	12.96 %	2.085.704.000,00						14.89 %	2.085.704.800,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						2.085.704.000,00					Kemiskinan		2.085.704.800,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						2.085.704.000,00					Kemiskinan		2.085.704.800,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	94 Unit Rumah		103 Unit Rumah	92 Unit Rumah	2.085.704.000,00						92 Unit Rumah	2.085.704.800,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						2.085.704.000,00							2.085.704.800,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	94 Unit Rumah		103 Unit Rumah	94 Unit Rumah	2.085.704.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		92 Unit Rumah	2.085.704.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
32.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**1.103.250.000,00**							**1.187.925.500,00**	
		Meningkatnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)						***1.103.250.000,00***							***1.187.925.500,00***	
			1.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	30.00 %		11.95 %	17.97 %	1.103.250.000,00						23.98 %	1.187.925.500,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						1.103.250.000,00					Kemiskinan		1.187.925.500,00	
		Terselenggaranya PSU Perumahan						1.103.250.000,00					Kemiskinan		1.187.925.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	362.704.000,00						1 Laporan	385.904.150,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	740.546.000,00						1 Lokasi	802.021.350,00	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						362.704.000,00							385.904.150,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	362.704.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	385.904.150,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						740.546.000,00							802.021.350,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		1 Lokasi	2 Lokasi	740.546.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Lokasi	802.021.350,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**27.434.729.212,00**							**32.854.271.407,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**27.434.729.212,00**							**32.854.271.407,00**	
33.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.969.129.212,00**							**14.335.697.326,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***12.969.129.212,00***							***14.327.428.576,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	12.969.129.212,00						72.51 Nilai	14.327.428.576,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87.40 Indeks		84.65 Indeks	85.36 Indeks	12.969.129.212,00						86.03 Indeks	14.327.428.576,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81.307.000,00					Pegawai Disperkimhub		89.878.950,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81.307.000,00					Pegawai Disperkimhub		89.878.950,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	53.559.000,00						5 Dokumen	56.385.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.748.000,00						4 Laporan	33.493.950,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						53.559.000,00							56.385.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	53.559.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	56.385.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.748.000,00							33.493.950,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	27.748.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	33.493.950,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.939.195.212,00					Pegawai Disperkimhub		11.535.288.096,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.939.195.212,00					Pegawai Disperkimhub		11.535.288.096,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.242.000,00						12 Dokumen	79.170.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.865.953.212,00						50 Orang/bulan	11.456.118.096,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.865.953.212,00							11.456.118.096,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	166 Orang/bulan	7.865.953.212,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Orang/bulan	11.456.118.096,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						73.242.000,00							79.170.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.242.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	79.170.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.000.000,00					Pegawai Disperkimhub		36.750.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.000.000,00					Pegawai Disperkimhub		36.750.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	11.000.000,00						4 Orang	36.750.000,00	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						11.000.000,00							36.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Orang	36.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						296.752.000,00					Pegawai Disperkimhub		347.130.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						296.752.000,00					Pegawai Disperkimhub		347.130.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	8.268.750,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	95.000.000,00						8 Laporan	99.750.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.000.000,00						12 Paket	49.061.250,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	24.000.000,00						4 Paket	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	130.002.000,00						7 Paket	136.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.600.000,00						4 Paket	11.550.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.600.000,00							11.550.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	11.550.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							49.061.250,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	7 Paket	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	49.061.250,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						130.002.000,00							136.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	130.002.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Paket	136.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.150.000,00							8.268.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	8.268.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						24.000.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	24.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						95.000.000,00							99.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	99.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65.100.000,00					Pegawai Disperkimhub		65.070.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65.100.000,00					Pegawai Disperkimhub		65.070.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.350.000,00						1 Unit	7.320.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	57.750.000,00						5 Unit	57.750.000,00	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.350.000,00							7.320.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.350.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	7.320.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						57.750.000,00							57.750.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	57.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	57.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.656.663.000,00					Pegawai Disperkimhub		1.139.895.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.656.663.000,00					Pegawai Disperkimhub		1.139.895.100,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00						12 Laporan	178.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.487.726.000,00						12 Laporan	954.505.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.937.000,00						2 Laporan	6.890.100,00	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.937.000,00							6.890.100,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.937.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	6.890.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						165.000.000,00							178.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	178.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.487.726.000,00							954.505.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.487.726.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	954.505.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						919.112.000,00					Pegawai Disperkimhub		1.121.685.180,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						919.112.000,00					Pegawai Disperkimhub		1.121.685.180,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	600.000.000,00						1 Unit	764.820.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.725.000,00						5 Unit	8.268.750,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	26.414.000,00						25 Unit	46.224.780,00	
	2.15.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.725.000,00							8.268.750,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.725.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	8.268.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.414.000,00							46.224.780,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	26.414.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Unit	46.224.780,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						600.000.000,00							764.820.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	600.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	764.820.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						919.112.000,00					Pegawai Disperkimhub		1.121.685.180,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	287.973.000,00						-	302.371.650,00	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						287.973.000,00							302.371.650,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	59 Unit	287.973.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	302.371.650,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
34.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**14.465.600.000,00**							**18.518.574.081,00**	
		Meningkatnya kualitas kelengkapan jalan terpasang						***14.465.600.000,00***							***18.518.574.081,00***	
			1.Persentase Capaian Fasilitas Perlengkapan Jalan untuk Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	91.25 %		88.31 %	89.04 %	14.465.600.000,00						89.77 %	18.518.574.081,00	
		Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						13.447.494.000,00					Masyarakat		16.853.981.931,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	925 Unit		486 Unit	875 Unit	3.136.158.000,00						895 Unit	6.503.178.023,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						3.136.158.000,00							6.503.178.023,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	925 Unit		486 Unit	132 Unit	3.136.158.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		895 Unit	6.503.178.023,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						18.000.000,00					Masyarakat		31.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						18.000.000,00					Masyarakat		31.500.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	18.000.000,00						4 Unit	31.500.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						18.000.000,00							31.500.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Unit	31.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						122.315.000,00					Masyarakat		255.106.950,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						122.315.000,00					Masyarakat		255.106.950,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.175.000,00						12 Dokumen	175.306.950,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	22.140.000,00						12 Laporan	79.800.000,00	
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						100.175.000,00							175.306.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	100.175.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	175.306.950,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						22.140.000,00							79.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	22.140.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	79.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						156.923.000,00					Masyarakat		147.930.200,00	
		Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						156.923.000,00					Masyarakat		147.930.200,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4591 Unit		4391 Unit	4441 Unit	26.358.000,00						4491 Unit	28.625.100,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	65.302.000,00						9 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit		0 Unit	1 Unit	48.263.000,00						1 Unit	84.915.500,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang		0 Orang	1 Orang	17.000.000,00						1 Orang	34.389.600,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						48.263.000,00							84.915.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit		0 Unit	1 Unit	48.263.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	84.915.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						17.000.000,00							34.389.600,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang		0 Orang	1 Orang	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Orang	34.389.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						26.358.000,00							28.625.100,00	
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	4591 Unit		4391 Unit	4441 Unit	26.358.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4491 Unit	28.625.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						65.302.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	65.302.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		9 Unit	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						365.771.000,00					Masyarakat		766.099.950,00	
		Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						365.771.000,00					Masyarakat		766.099.950,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	345.771.000,00						12 Laporan	692.599.950,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	80 Dokumen		0 Dokumen	80 Dokumen	20.000.000,00						80 Dokumen	73.500.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						345.771.000,00							692.599.950,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	345.771.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	692.599.950,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						20.000.000,00							73.500.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	80 Dokumen		0 Dokumen	80 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		80 Dokumen	73.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						15.055.000,00					Masyarakat		29.846.250,00	
		Disetujuinya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						15.055.000,00					Masyarakat		29.846.250,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.055.000,00						12 Laporan	14.096.250,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00						12 Laporan	15.750.000,00	
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						8.055.000,00							14.096.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan		12 Laporan	7 Laporan	8.055.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	14.096.250,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						7.000.000,00							15.750.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	15.750.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						94.156.000,00					Masyarakat		173.171.800,00	
		Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						94.156.000,00					Masyarakat		173.171.800,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	94.156.000,00						12 Laporan	173.171.800,00	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						94.156.000,00							173.171.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	94.156.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	173.171.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						220.686.000,00					Masyarakat		216.837.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						220.686.000,00					Masyarakat		216.837.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	220.686.000,00						4 Unit	216.837.000,00	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						220.686.000,00							216.837.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	220.686.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Unit	216.837.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.200.000,00					-		44.100.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						25.200.000,00					-		44.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Unit		100 Unit	100 Unit	25.200.000,00						100 Unit	44.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						25.200.000,00							44.100.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Unit		100 Unit	50 Unit	25.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		100 Unit	44.100.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						13.447.494.000,00					Masyarakat		16.853.981.931,00	
		Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						13.447.494.000,00					Masyarakat		16.853.981.931,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	-	10.311.336.000,00						-	10.350.803.908,00	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						10.311.336.000,00							10.350.803.908,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	-		-	110 Unit	10.311.336.000,00	Kab. Kebumen	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	10.350.803.908,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**20.944.597.167,00**							**19.846.029.480,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.944.597.167,00**							**19.846.029.480,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**20.944.597.167,00**							**19.846.029.480,00**	
35.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.719.040.167,00**							**12.398.292.480,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***14.700.040.167,00***							***12.387.402.980,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	72.4 Nilai	14.700.040.167,00						72.51 Nilai	12.387.402.980,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	14.700.040.167,00						90.50 Indeks	12.387.402.980,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.000.000,00					Kantor Satpol PP		28.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.000.000,00					Kantor Satpol PP		28.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	18.000.000,00						8 Laporan	18.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	18.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.661.899.167,00					Kantor Satpol PP		9.195.054.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.661.899.167,00					Kantor Satpol PP		9.195.054.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	26.526.000,00						8 Dokumen	28.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/bulan		209 Orang/bulan	209 Orang/bulan	8.635.373.167,00						209 Orang/bulan	9.167.054.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.635.373.167,00							9.167.054.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	209 Orang/bulan		209 Orang/bulan	2086 Orang/bulan	8.635.373.167,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		209 Orang/bulan	9.167.054.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						26.526.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	84 Dokumen	26.526.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	28.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						187.000.000,00					Satpol PP		298.487.730,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						187.000.000,00					Satpol PP		298.487.730,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	209 Paket		209 Paket	209 Paket	164.000.000,00						209 Paket	182.967.730,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	295 Orang		295 Orang	295 Orang	23.000.000,00						295 Orang	115.520.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						164.000.000,00							182.967.730,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	209 Paket		209 Paket	209 Paket	164.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		209 Paket	182.967.730,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						23.000.000,00							115.520.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	295 Orang		295 Orang	295 Orang	23.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		295 Orang	115.520.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						84.000.000,00					Kantor Satpol PP		95.994.750,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						84.000.000,00					Kantor Satpol PP		95.994.750,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	2.420.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.500.000,00						12 Laporan	24.805.750,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	31.500.000,00						12 Paket	33.075.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	13.915.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00						4 Paket	10.889.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00						4 Paket	10.889.500,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.000.000,00							10.889.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	10.889.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.500.000,00							33.075.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	31.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	33.075.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.000.000,00							10.889.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	10.889.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							13.915.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	13.915.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.500.000,00							24.805.750,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	24.805.750,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							2.420.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.420.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						156.562.250,00					Kantor Satpol PP		156.570.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						156.562.250,00					Kantor Satpol PP		156.570.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	156.562.250,00						8 Unit	156.570.000,00	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						156.562.250,00							156.570.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	156.562.250,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	156.570.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.107.839.000,00					Kantor Satpol PP		2.039.800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.107.839.000,00					Kantor Satpol PP		2.039.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00						12 Laporan	132.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.002.839.000,00						12 Laporan	1.906.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	1.800.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.000.000,00							132.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	132.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.002.839.000,00							1.906.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.002.839.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.906.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						493.739.750,00					Kantor Satpol PP		584.386.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						493.739.750,00					Kantor Satpol PP		584.386.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		4 Unit	4 Unit	151.525.000,00						5 Unit	286.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	32 Unit	20.466.750,00						32 Unit	22.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.466.750,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	32 Unit	20.466.750,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Unit	22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						151.525.000,00							286.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		4 Unit	4 Unit	151.525.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	286.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						493.739.750,00					Kantor Satpol PP		584.386.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	321.748.000,00						-	276.386.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						321.748.000,00							276.386.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	48 Unit	321.748.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	276.386.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
36.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.700.400.000,00**							**7.017.236.000,00**	
		Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat						***5.700.400.000,00***							***7.017.236.000,00***	
			1.Persentase Penyelesaian Pelanggaran Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	100.00 %		100.00 %	100.00 %	5.700.400.000,00						100.00 %	7.017.236.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.913.764.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.982.807.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.227.000,00						1 Dokumen	2.366.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.127.730.000,00						2 Dokumen	1.141.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	402.193.000,00						12 laporan	1.402.193.000,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						3.127.730.000,00							1.141.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.127.730.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	1.141.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						1.310.227.000,00							2.366.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.227.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	2.366.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						402.193.000,00							1.402.193.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	402.193.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 laporan	1.402.193.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						779.309.000,00					-		2.026.735.000,00	
		Terlaksananya Penegakan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						779.309.000,00					-		2.026.735.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	16.464.000,00						16 Laporan	25.411.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	65.529.000,00						16 Laporan	90.983.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	697.316.000,00						12 Laporan	1.910.341.000,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						65.529.000,00							90.983.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	65.529.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16 Laporan	90.983.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						697.316.000,00							1.910.341.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	697.316.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	1.910.341.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						16.464.000,00							25.411.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	16.464.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16 Laporan	25.411.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						7.327.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		7.694.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						7.327.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		7.694.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.327.000,00						4 Laporan	7.694.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						7.327.000,00							7.694.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.327.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	7.694.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.913.764.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.982.807.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.913.764.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.982.807.000,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	-	73.614.000,00						-	73.614.000,00	
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						73.614.000,00							73.614.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	-		-	90 Orang	73.614.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	73.614.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
37.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**525.157.000,00**							**430.501.000,00**	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran						***525.157.000,00***							***430.501.000,00***	
			1.Persentase Ketahanan Terhadap Kebakaran dan Non Kebakaran	100.00 %		43.00 %	61.00 %	525.157.000,00						81.00 %	430.501.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						470.504.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		356.604.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan , Pengendalian , Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						470.504.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		356.604.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	53.909.000,00						12 Dokumen	56.604.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.595.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						416.595.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	416.595.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						53.909.000,00							56.604.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	53.909.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	56.604.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						42.253.000,00					Kantor Satpol PP		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						42.253.000,00					Kantor Satpol PP		50.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	83 Orang		83 Orang	83 Orang	42.253.000,00						83 Orang	50.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						42.253.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	83 Orang		83 Orang	83 Orang	42.253.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		83 Orang	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						12.400.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		23.897.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						12.400.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		23.897.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	12.400.000,00						-	23.897.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						12.400.000,00							23.897.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	12 Laporan	12.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	23.897.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**8.166.756.565,00**							**9.157.660.982,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.166.756.565,00**							**9.157.660.982,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**8.166.756.565,00**							**9.157.660.982,00**	
38.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.447.736.565,00**							**5.308.344.619,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***5.433.736.565,00***							***5.206.344.619,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.27 Nilai	72.00 Nilai	5.433.736.565,00						73.00 Nilai	5.206.344.619,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	5.433.736.565,00						90.50 Indeks	5.206.344.619,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		22.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	14.000.000,00						6 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	6.000.000,00						8 Laporan	6.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.000.000,00							16.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		6 Dokumen	16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		8 Laporan	6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.858.311.565,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		3.666.260.619,00	
		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.858.311.565,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		3.666.260.619,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00						8 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.828.311.565,00						37 Orang/bulan	3.616.260.619,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.828.311.565,00							3.616.260.619,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.828.311.565,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		37 Orang/bulan	3.616.260.619,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemenuhan infrastruktur dalam memperlancar arus barang, jasa, dan distribusi pendukung kegiatan kepariwisataan dan perekonomian lokal pada umumnya		8 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						170.500.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		207.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						170.500.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		207.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00						12 Laporan	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.000.000,00						12 Paket	36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	27.500.000,00						4 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00						4 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Paket	10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Paket	36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Paket	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						27.500.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	27.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Paket	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						95.000.000,00							96.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	95.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	96.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	70.000.000,00						7 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		7 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						903.925.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		877.084.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						903.925.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		877.084.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00						12 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	777.525.000,00						12 Laporan	750.084.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.400.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.400.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						777.525.000,00							750.084.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	777.525.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	750.084.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						425.000.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		436.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						425.000.000,00					Kantor BPBD Kabupaten Kebumen		436.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	300.000.000,00						40 Unit	310.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00						20 Unit	26.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						300.000.000,00							310.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		40 Unit	310.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		20 Unit	26.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
39.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**2.719.020.000,00**							**3.849.316.363,00**	
		Meningkatnya Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana						***180.000.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD	0.80 Angka		0.76 Angka	0.77 Angka	180.000.000,00						0.78 Angka	350.000.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						180.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		350.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						180.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		350.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	5650 Orang		5650 Orang	5650 Orang	180.000.000,00						5650 Orang	350.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						180.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	5650 Orang		5650 Orang	5650 Orang	180.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		5650 Orang	350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana						***760.000.000,00***							***825.000.000,00***	
			1.Skor Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD	0.93 Angka		0.89 Angka	0.90 Angka	760.000.000,00						0.91 Angka	825.000.000,00	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						810.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		925.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						810.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		925.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	650.000.000,00						4 Kegiatan	750.000.000,00	
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		50 Orang	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						650.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	650.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Kegiatan	750.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana						***1.539.020.000,00***							***2.274.316.363,00***	
			1.Skor Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD	0.90 Angka		0.86 Angka	0.87 Angka	1.539.020.000,00						0.88 Angka	2.274.316.363,00	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						525.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		745.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						525.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		745.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		4 Kawasan	4 Kawasan	70.000.000,00						4 Kawasan	150.000.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan		12 laporan	12 laporan	50.000.000,00						12 laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	65.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	90 Orang		90 Orang	90 Orang	50.000.000,00						90 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang		200 Orang	200 Orang	75.000.000,00						200 Orang	120.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						65.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		5 Unit	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						75.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang		200 Orang	200 Orang	75.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		200 Orang	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						70.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		4 Kawasan	4 Kawasan	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Kawasan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							90.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	90 Orang		90 Orang	90 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		90 Orang	90.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						65.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan		12 laporan	12 laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 laporan	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						75.000.000,00							0,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.204.020.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		1.829.316.363,00	
		-						1.204.020.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		1.829.316.363,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	978.500.000,00						2 Dokumen	1.504.316.363,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2400 Orang		2400 Orang	2400 Orang	90.000.000,00						2400 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang		250 Orang	250 Orang	110.520.000,00						250 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	25.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						978.500.000,00							1.504.316.363,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	978.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Dokumen	1.504.316.363,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						110.520.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	250 Orang		250 Orang	250 Orang	110.520.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		250 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						90.000.000,00							150.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2400 Orang		2400 Orang	2400 Orang	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2400 Orang	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Laporan	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						525.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		745.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	60.000.000,00						-	130.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						60.000.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	150 Orang	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		-	130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**13.814.909.268,00**							**29.054.655.633,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.944.410.284,00**							**27.854.405.413,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**12.944.410.284,00**							**27.854.405.413,00**	
40.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.258.258.329,00**							**6.234.530.790,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***5.208.258.329,00***							***6.219.530.790,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	5.208.258.329,00						72.51 Nilai	6.219.530.790,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87.50 Indeks		85.50 Indeks	86.00 Indeks	5.208.258.329,00						86.50 Indeks	6.219.530.790,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.347.000,00					Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		72.645.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.347.000,00					Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		72.645.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.00 Dokumen		11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	55.347.000,00						11.00 Dokumen	55.347.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.00 Laporan		7.00 Laporan	7.00 Laporan	17.000.000,00						7.00 Laporan	17.298.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						55.347.000,00							55.347.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.00 Dokumen		11.00 Dokumen	11 Dokumen	55.347.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		11.00 Dokumen	55.347.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000,00							17.298.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.00 Laporan		7.00 Laporan	7 Laporan	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		7.00 Laporan	17.298.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.786.909.268,00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.905.815.126,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.786.909.268,00					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.905.815.126,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.00 Dokumen		5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	40.000.000,00						5.00 Dokumen	56.568.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55.00 Orang/bulan		38.00 Orang/bulan	52.00 Orang/bulan	3.746.909.268,00						55.00 Orang/bulan	4.849.247.126,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.746.909.268,00							4.849.247.126,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55.00 Orang/bulan		38.00 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.746.909.268,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		55.00 Orang/bulan	4.849.247.126,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						40.000.000,00							56.568.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.00 Dokumen		5.00 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5.00 Dokumen	56.568.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Pegawai OPD		15.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Pegawai OPD		15.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0.00 Orang		0.00 Orang	43.00 Orang	50.000.000,00						43.00 Orang	15.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0.00 Orang		0.00 Orang	43 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		43.00 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						213.739.000,00					Urusan Umum Perangkat Daerah		192.596.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						213.739.000,00					Urusan Umum Perangkat Daerah		192.596.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen		2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.750.000,00						2.00 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00 Dokumen		2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	10.000.000,00						2.00 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan		24.00 Laporan	25.00 Laporan	100.000.000,00						25.00 Laporan	71.122.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00 Paket		3.00 Paket	3.00 Paket	53.201.000,00						3.00 Paket	50.088.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5.00 Paket		4.00 Paket	4.00 Paket	25.723.000,00						5.00 Paket	20.730.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00 Paket		4.00 Paket	4.00 Paket	15.000.000,00						5.00 Paket	30.591.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		2.00 Paket	2.00 Paket	8.065.000,00						2.00 Paket	8.065.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.065.000,00							8.065.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket		2.00 Paket	1 Paket	8.065.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2.00 Paket	8.065.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						53.201.000,00							50.088.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.00 Paket		3.00 Paket	2 Paket	53.201.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3.00 Paket	50.088.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							30.591.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.00 Paket		4.00 Paket	3 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5.00 Paket	30.591.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.750.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen		2.00 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2.00 Dokumen	2.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						25.723.000,00							20.730.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5.00 Paket		4.00 Paket	4 Paket	25.723.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5.00 Paket	20.730.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							71.122.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.00 Laporan		24.00 Laporan	36 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25.00 Laporan	71.122.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00 Dokumen		2.00 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2.00 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235.179.000,00					Pengadaan Barang Milik Daerah		67.314.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						235.179.000,00					Pengadaan Barang Milik Daerah		67.314.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10.00 Unit		2.00 Unit	10.00 Unit	100.865.000,00						4.00 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.00 Unit		2.00 Unit	20.00 Unit	134.314.000,00						8.00 Unit	52.314.000,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						100.865.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10.00 Unit		2.00 Unit	12 Unit	100.865.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4.00 Unit	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						134.314.000,00							52.314.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.00 Unit		2.00 Unit	10 Unit	134.314.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8.00 Unit	52.314.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						586.504.061,00					Penunjang Urusan Perangkat Daerah		595.568.664,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						586.504.061,00					Penunjang Urusan Perangkat Daerah		595.568.664,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12.00 Laporan	174.988.397,00						12.00 Laporan	183.624.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00 Laporan		3.00 Laporan	3.00 Laporan	409.865.664,00						3.00 Laporan	409.865.664,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.650.000,00						12.00 Laporan	2.079.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.650.000,00							2.079.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12 Laporan	1.650.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12.00 Laporan	2.079.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						174.988.397,00							183.624.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12 Laporan	174.988.397,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12.00 Laporan	183.624.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						409.865.664,00							409.865.664,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.00 Laporan		3.00 Laporan	12 Laporan	409.865.664,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3.00 Laporan	409.865.664,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						313.580.000,00					Pemeliharaan Barang milik daerah		385.592.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						313.580.000,00					Pemeliharaan Barang milik daerah		385.592.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit		3.00 Unit	3.00 Unit	50.000.000,00						3.00 Unit	187.012.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.00 Unit		63.00 Unit	63.00 Unit	193.580.000,00						63.00 Unit	163.580.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55.00 Unit		47.00 Unit	50.00 Unit	70.000.000,00						54.00 Unit	35.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						193.580.000,00							163.580.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63.00 Unit		63.00 Unit	63 Unit	193.580.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		63.00 Unit	163.580.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55.00 Unit		47.00 Unit	50 Unit	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		54.00 Unit	35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							187.012.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit		3.00 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3.00 Unit	187.012.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
41.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**90.000.000,00**							**168.420.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial						***90.000.000,00***							***168.420.000,00***	
			2.Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	100.00 %		100.00 %	100.00 %	90.000.000,00						100.00 %	168.420.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00					Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial		168.420.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00					Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial		168.420.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00 Lembaga		2.00 Lembaga	2.00 Lembaga	20.000.000,00						2.00 Lembaga	80.380.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	100.00 Orang		126.00 Orang	100.00 Orang	61.160.000,00						100.00 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00 Orang		25.00 Orang	25.00 Orang	8.840.000,00						25.00 Orang	43.040.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00							80.380.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2.00 Lembaga		2.00 Lembaga	2 Lembaga	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2.00 Lembaga	80.380.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						8.840.000,00							43.040.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00 Orang		25.00 Orang	25 Orang	8.840.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25.00 Orang	43.040.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						61.160.000,00							45.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	100.00 Orang		126.00 Orang	100 Orang	61.160.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100.00 Orang	45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
42.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**2.866.455,00**							**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						***2.866.455,00***							***60.000.000,00***	
			3.Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	2.866.455,00						100.00 %	60.000.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						2.866.455,00					Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						2.866.455,00					Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		60.000.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.00 Orang		3.00 Orang	5.00 Orang	2.866.455,00						5.00 Orang	60.000.000,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						2.866.455,00							60.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5.00 Orang		3.00 Orang	3 Orang	2.866.455,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5.00 Orang	60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**1.352.578.500,00**							**8.868.615.223,00**	
		Meningkatnya layanan PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani						***1.292.578.500,00***							***8.828.615.223,00***	
			4.Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100.00 %		100.00 %	100.00 %	1.292.578.500,00						100.00 %	8.828.615.223,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						897.264.000,00					PPPK Terlantar di Luar Panti		8.262.422.023,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						897.264.000,00					PPPK Terlantar di Luar Panti		8.262.422.023,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		10.00 Orang	10.00 Orang	10.000.000,00						10.00 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00 Orang		120.00 Orang	120.00 Orang	187.580.000,00						150.00 Orang	187.580.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.00 Orang		70.00 Orang	95.00 Orang	71.177.000,00						80.00 Orang	66.177.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang		50.00 Orang	50.00 Orang	15.000.000,00						50.00 Orang	15.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang		50.00 Orang	50.00 Orang	10.000.000,00						50.00 Orang	31.294.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		10.00 Orang	10.00 Orang	10.000.000,00						10.00 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		100.00 Orang	10.00 Orang	10.000.000,00						10.00 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1184.00 Orang		1184.00 Orang	1184.00 Orang	480.000.000,00						1184.00 Orang	7.788.089.023,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300.00 Orang		300.00 Orang	300.00 Orang	93.507.000,00						300.00 Orang	93.507.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		10.00 Orang	10.00 Orang	10.000.000,00						10.00 Orang	10.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						480.000.000,00							7.788.089.023,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1184.00 Orang		1184.00 Orang	100 Orang	480.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1184.00 Orang	7.788.089.023,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						93.507.000,00							93.507.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	300.00 Orang		300.00 Orang	100 Orang	93.507.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		300.00 Orang	93.507.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						71.177.000,00							66.177.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.00 Orang		70.00 Orang	25 Orang	71.177.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		80.00 Orang	66.177.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		100.00 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10.00 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						187.580.000,00							187.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00 Orang		120.00 Orang	120 Orang	187.580.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		150.00 Orang	187.580.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						15.000.000,00							15.775.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang		50.00 Orang	50 Orang	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50.00 Orang	15.775.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						10.000.000,00							31.294.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang		50.00 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50.00 Orang	31.294.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		10.00 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10.00 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		10.00 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10.00 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.00 Orang		10.00 Orang	10 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10.00 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						455.314.500,00					PPKS Terlantar di Luar Panti		606.193.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						455.314.500,00					PPKS Terlantar di Luar Panti		606.193.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	26.994.000,00						1.00 Dokumen	182.494.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang		50.00 Orang	50.00 Orang	8.957.000,00						50.00 Orang	8.957.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00 Orang		25.00 Orang	25.00 Orang	10.000.000,00						25.00 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00 Orang		150.00 Orang	150.00 Orang	204.649.500,00						150.00 Orang	264.730.000,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00 Orang		100.00 Orang	100.00 Orang	78.329.000,00						100.00 Orang	78.329.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00 Orang		100.00 Orang	100.00 Orang	116.385.000,00						100.00 Orang	51.683.200,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	200.00 Orang		100.00 Orang	200.00 Orang	10.000.000,00						200.00 Orang	10.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						8.957.000,00							8.957.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.00 Orang		50.00 Orang	50 Orang	8.957.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50.00 Orang	8.957.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						204.649.500,00							264.730.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150.00 Orang		150.00 Orang	130 Orang	204.649.500,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		150.00 Orang	264.730.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						78.329.000,00							78.329.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00 Orang		100.00 Orang	80 Orang	78.329.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100.00 Orang	78.329.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25.00 Orang		25.00 Orang	25 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25.00 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						116.385.000,00							51.683.200,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00 Orang		100.00 Orang	80 Orang	116.385.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100.00 Orang	51.683.200,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	200.00 Orang		100.00 Orang	80 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		200.00 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						26.994.000,00							182.494.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	26.994.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1.00 Dokumen	182.494.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**5.627.522.000,00**							**6.413.847.400,00**	
		Meningkatnya cakupan perlindungan jaminan sosial						***5.627.522.000,00***							***6.413.847.400,00***	
			5.Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	92.00 %		92.00 %	92.00 %	5.627.522.000,00						92.00 %	6.413.847.400,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						5.627.522.000,00					Penerima Bantuan Sosial		6.413.847.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						5.627.522.000,00					Penerima Bantuan Sosial		6.413.847.400,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4300.00 Orang		4300.00 Orang	4300.00 Orang	4.519.522.000,00						4300.00 Orang	5.398.047.400,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	6500.00 Usulan		6500.00 Usulan	6500.00 Usulan	1.108.000.000,00						6500.00 Usulan	1.015.800.000,00	
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						4.519.522.000,00							5.398.047.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4300.00 Orang		4300.00 Orang	3640 Orang	4.519.522.000,00	Kab. Kebumen	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4300.00 Orang	5.398.047.400,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1.108.000.000,00							1.015.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	6500.00 Usulan		6500.00 Usulan	90000 Usulan	1.108.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6500.00 Usulan	1.015.800.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**593.185.000,00**							**6.088.611.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota						***453.185.000,00***							***6.088.611.000,00***	
			6.Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100.00 %		100.00 %	100.00 %	453.185.000,00						100.00 %	6.088.611.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						522.185.000,00					Korban Bencana Alam dan Sosial		4.422.260.000,00	
		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						522.185.000,00					Korban Bencana Alam dan Sosial		4.422.260.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200.00 Orang		280.00 Orang	225.00 Orang	50.000.000,00						230.00 Orang	648.276.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80.00 Orang		60.00 Orang	95.00 Orang	96.685.000,00						90.00 Orang	778.318.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	110.00 Orang		92.00 Orang	110.00 Orang	90.000.000,00						92.00 Orang	896.176.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400.00 Orang		400.00 Orang	350.00 Orang	195.500.000,00						400.00 Orang	1.087.440.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	225.00 Orang		300.00 Orang	250.00 Orang	90.000.000,00						280.00 Orang	1.012.050.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						195.500.000,00							1.087.440.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	400.00 Orang		400.00 Orang	400 Orang	195.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		400.00 Orang	1.087.440.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						96.685.000,00							778.318.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	80.00 Orang		60.00 Orang	40 Orang	96.685.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		90.00 Orang	778.318.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						90.000.000,00							896.176.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	110.00 Orang		92.00 Orang	90 Orang	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		92.00 Orang	896.176.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						50.000.000,00							648.276.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	200.00 Orang		280.00 Orang	300 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		230.00 Orang	648.276.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						90.000.000,00							1.012.050.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	225.00 Orang		300.00 Orang	200 Orang	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		280.00 Orang	1.012.050.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						71.000.000,00					Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana		1.666.351.000,00	
		Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						71.000.000,00					Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana		1.666.351.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6.00 Kampung		6.00 Kampung	6.00 Kampung	21.000.000,00						6.00 Kampung	634.328.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75.00 Orang		60.00 Orang	60.00 Orang	50.000.000,00						75.00 Orang	1.032.023.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						21.000.000,00							634.328.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	6.00 Kampung		6.00 Kampung	6 Kampung	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6.00 Kampung	634.328.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						50.000.000,00							1.032.023.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75.00 Orang		60.00 Orang	60 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		75.00 Orang	1.032.023.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**20.000.000,00**							**20.381.000,00**	
		Meningkatnya Taman Makam Pahlawan yang Dikelola						***20.000.000,00***							***20.381.000,00***	
			7.Persentase TMP yang Dikelola	100.00 %		100.00 %	100.00 %	20.000.000,00						100.00 %	20.381.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Taman Makam Pahlwan		20.381.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Taman Makam Pahlwan		20.381.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12.00 Laporan	20.000.000,00						12.00 Laporan	20.381.000,00	
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						20.000.000,00							20.381.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12.00 Laporan	20.381.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**870.498.984,00**							**1.200.250.220,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**870.498.984,00**							**1.200.250.220,00**	
47.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**147.057.984,00**							**164.344.000,00**	
		Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						***147.057.984,00***							***164.344.000,00***	
			8.Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	147.057.984,00						100.00 %	164.344.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						62.057.984,00					lembaga PUG		50.663.000,00	
		Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						62.057.984,00					lembaga PUG		50.663.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	62.057.984,00						1.00 Laporan	50.663.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						62.057.984,00							50.663.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	62.057.984,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1.00 Laporan	50.663.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						85.000.000,00					Perempuan yang diberdayakan		113.681.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						85.000.000,00					Perempuan yang diberdayakan		113.681.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	85.000.000,00						-	113.681.000,00	
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						85.000.000,00							113.681.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	31 Lembaga	85.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	113.681.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**286.705.000,00**							**207.242.000,00**	
		Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan						***286.705.000,00***							***207.242.000,00***	
			9.Cakupan Perlindungan Perempuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	286.705.000,00						100.00 %	207.242.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						112.000.000,00					Perempuan korban kekerasan		32.537.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						112.000.000,00					Perempuan korban kekerasan		32.537.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	112.000.000,00						-	32.537.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						112.000.000,00							32.537.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	4 Kegiatan	112.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	32.537.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						174.705.000,00					Perempuan korban kekerasan		174.705.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						174.705.000,00					Perempuan korban kekerasan		174.705.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	2.400.000,00						-	2.400.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	7.845.000,00						-	7.845.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	111.820.000,00						-	111.820.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	46.000.000,00						-	46.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	2.640.000,00						-	2.640.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						111.820.000,00							111.820.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	31 Orang	111.820.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	111.820.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	4 Orang	2.400.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	2.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						46.000.000,00							46.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	46.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	46.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	10 Orang	4.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						7.845.000,00							7.845.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	5 Orang	7.845.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	7.845.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						2.640.000,00							2.640.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	3 Orang	2.640.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	2.640.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**10.636.000,00**							**10.636.000,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam pembangunan						***10.636.000,00***							***10.636.000,00***	
			10.Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.00 %		100.00 %	100.00 %	10.636.000,00						100.00 %	10.636.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.636.000,00					Pokja BK TKI		10.636.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.636.000,00					Pokja BK TKI		10.636.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	20.00 Lembaga		20.00 Lembaga	20.00 Lembaga	10.636.000,00						20.00 Lembaga	10.636.000,00	
	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						10.636.000,00							10.636.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	20.00 Lembaga		20.00 Lembaga	3 Lembaga	10.636.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20.00 Lembaga	10.636.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
50.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**51.866.000,00**							**51.866.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak						***51.866.000,00***							***51.866.000,00***	
			11.Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100.00 %		100.00 %	100.00 %	51.866.000,00						100.00 %	51.866.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						51.866.000,00					Masyarakat		51.866.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						51.866.000,00					Masyarakat		51.866.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	6.805.000,00						-	6.805.000,00	
			Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	-	45.061.000,00						-	45.061.000,00	
	2.08.05.2.01.0006	Penguatan Penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA untuk Penyediaan Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berkualitas						45.061.000,00							45.061.000,00	
		Terwujudnya data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui optimalisasi penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA di daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan Aplikasi Simfoni PPA, mencakup beberapa hal, seperti: pelaksanan Bimtek di tingkat daerah, komposisi penyelenggara, pengelolaan data, Kebijakan & SOP pendukung, mekanisme validasi, pemanfaatan data, rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya	-		-	1 Dokumen	45.061.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan		-	45.061.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						6.805.000,00							6.805.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	2 Dokumen	6.805.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	6.805.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**113.377.000,00**							**376.240.220,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak anak (PHA)						***113.377.000,00***							***376.240.220,00***	
			12.Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama Penghargaan		Madya Penghargaan	Nindya Penghargaan	113.377.000,00						Nindya Penghargaan	376.240.220,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						55.000.000,00					Masyrakat		85.035.000,00	
		Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						55.000.000,00					Masyrakat		85.035.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	36.000.000,00						-	53.394.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	19.000.000,00						-	31.641.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						36.000.000,00							53.394.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Lembaga	36.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	53.394.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						19.000.000,00							31.641.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	70 Orang	19.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	31.641.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						58.377.000,00						Anak		291.205.220,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						58.377.000,00						Anak		291.205.220,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	20.377.000,00							-	34.176.220,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	20.000.000,00							-	231.647.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	18.000.000,00							-	25.382.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						20.000.000,00								231.647.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	231.647.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0011	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						20.377.000,00							34.176.220,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	20.377.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	34.176.220,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						18.000.000,00							25.382.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	4 Lembaga	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	25.382.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
52.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**260.857.000,00**							**389.922.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan khusus anak						***260.857.000,00***							***389.922.000,00***	
			13.Cakupan Perlindungan Anak	100.00 %		100.00 %	100.00 %	260.857.000,00						100.00 %	389.922.000,00	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						251.935.000,00					Anak yang memerlukan perlindungan khusus		381.000.000,00	
		Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						251.935.000,00					Anak yang memerlukan perlindungan khusus		381.000.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	26.445.000,00						-	26.445.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	122.650.000,00						-	251.715.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	2.640.000,00						-	2.640.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	200.000,00						-	200.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	84.000.000,00						-	84.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						122.650.000,00							251.715.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	50 Orang	122.650.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	251.715.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	20 Orang	12.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	12.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						26.445.000,00							26.445.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	26.445.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	26.445.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	10 Orang	4.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						84.000.000,00							84.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	84.000.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	84.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						2.640.000,00							2.640.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	3 Orang	2.640.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	2.640.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						200.000,00							200.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	1 Orang	200.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.922.000,00					-		8.922.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.922.000,00					-		8.922.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	8.922.000,00						-	8.922.000,00	
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						8.922.000,00							8.922.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	80 Orang	8.922.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan berbasis data yang valid dan relevan		-	8.922.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						**23.050.026.877,00**							**50.229.254.835,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.124.739.341,00**							**26.616.746.330,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**13.124.739.341,00**							**26.616.746.330,00**	
53.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.211.239.341,00**							**25.108.246.330,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***12.211.239.341,00***							***25.108.246.330,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.00 Nilai		77.69 Nilai	77.77 Nilai	12.211.239.341,00						77.85 Nilai	25.108.246.330,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.70 Indeks		90.50 Indeks	90.55 Indeks	12.211.239.341,00						90.60 Indeks	25.108.246.330,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.136.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		107.943.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.136.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		107.943.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	29.166.000,00						22 Dokumen	53.764.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	28.970.000,00						18 Laporan	54.179.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.166.000,00							53.764.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	6 Dokumen	29.166.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		22 Dokumen	53.764.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.970.000,00							54.179.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	8 Laporan	28.970.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		18 Laporan	54.179.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.266.124.877,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		21.117.796.866,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						8.266.124.877,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		21.117.796.866,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	40.788.000,00						14 Dokumen	40.788.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 Orang/bulan		211 Orang/bulan	211 Orang/bulan	8.225.336.877,00						211 Orang/bulan	21.077.008.866,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.225.336.877,00							21.077.008.866,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	211 Orang/bulan		211 Orang/bulan	1512 Orang/bulan	8.225.336.877,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		211 Orang/bulan	21.077.008.866,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						40.788.000,00							40.788.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen		14 Dokumen	55 Dokumen	40.788.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		14 Dokumen	40.788.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.438.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		4.438.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.438.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		4.438.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.438.000,00						4 Laporan	4.438.000,00	
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.438.000,00							4.438.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	4.438.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Laporan	4.438.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		50.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	290 Orang		290 Orang	290 Orang	50.000.000,00						290 Orang	50.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	290 Orang		290 Orang	125 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		290 Orang	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						208.092.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		208.092.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						208.092.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		208.092.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.000,00						12 Dokumen	4.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.605.000,00						4 Dokumen	5.605.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	74.894.000,00						12 Paket	74.894.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	47.148.000,00						4 Paket	47.148.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.682.000,00						4 Paket	6.682.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.473.000,00						4 Paket	4.473.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	35.000.000,00						2 Paket	35.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.473.000,00							4.473.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.473.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Paket	4.473.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Paket	35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						74.894.000,00							74.894.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	74.894.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Paket	74.894.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.682.000,00							6.682.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.682.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Paket	6.682.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.290.000,00							4.290.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.290.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Dokumen	4.290.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						47.148.000,00							47.148.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	47.148.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Paket	47.148.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.605.000,00							5.605.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	5.605.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	5.605.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						412.211.464,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		412.211.464,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						412.211.464,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		412.211.464,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit		22 Unit	22 Unit	27.650.000,00						22 Unit	27.650.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		17 Unit	17 Unit	84.560.000,00						17 Unit	84.560.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	300.001.464,00						20 Unit	300.001.464,00	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						27.650.000,00							27.650.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit		22 Unit	22 Unit	27.650.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		22 Unit	27.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						84.560.000,00							84.560.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		17 Unit	10 Unit	84.560.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		17 Unit	84.560.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.001.464,00							300.001.464,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	8 Unit	300.001.464,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		20 Unit	300.001.464,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.917.443.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		2.912.971.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.917.443.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		2.912.971.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	336.262.000,00						12 Laporan	336.262.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.578.685.000,00						12 Laporan	2.574.213.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.496.000,00						4 Laporan	2.496.000,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.496.000,00							2.496.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.496.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Laporan	2.496.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						336.262.000,00							336.262.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	336.262.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	336.262.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.578.685.000,00							2.574.213.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.578.685.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		12 Laporan	2.574.213.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.794.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		294.794.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.794.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		294.794.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	216.000.000,00						7 Unit	216.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	67.244.000,00						9 Unit	67.244.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	11.550.000,00						4 Unit	11.550.000,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						67.244.000,00							67.244.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	11 Unit	67.244.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		9 Unit	67.244.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.550.000,00							11.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	17 Unit	11.550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Unit	11.550.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						216.000.000,00							216.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	6 Unit	216.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		7 Unit	216.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
54.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**255.000.000,00**							**840.000.000,00**	
		Meningkatnya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik						***255.000.000,00***							***840.000.000,00***	
			1.Persentase Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik	91.86 %		89.76 %	90.29 %	255.000.000,00						90.81 %	840.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						255.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		840.000.000,00	
		Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang terkelola dengan baik						255.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		840.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 Unit		2 Unit	4 Unit	255.000.000,00						4 Unit	840.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						255.000.000,00							840.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	4 Unit		2 Unit	1 Unit	255.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanggayam || Desa Kalirejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Unit	840.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
55.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**472.000.000,00**							**472.000.000,00**	
		Meningkatnya Angka Kecukupan Energi						***472.000.000,00***							***472.000.000,00***	
			1.Angka Kecukupan Energi	3675.56 Kkal/Kapita/Hari		3655.56 Kkal/Kapita/Hari	3660.56 Kkal/Kapita/Hari	472.000.000,00						3665.56 Kkal/Kapita/Hari	472.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						71.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Masyarakat, Pelaku Usaha		71.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						71.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Masyarakat, Pelaku Usaha		71.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00						4 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	27 laporan		27 laporan	27 laporan	46.000.000,00						27 laporan	46.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						46.000.000,00							46.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	27 laporan		27 laporan	27 laporan	46.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		27 laporan	46.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						325.000.000,00					Masyarakat		325.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan cadangan pangan pemerintah						325.000.000,00					Masyarakat		325.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	20 Ton		20 Ton	20 Ton	325.000.000,00						20 Ton	325.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						325.000.000,00							325.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	20 Ton		20 Ton	20 Ton	325.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		20 Ton	325.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						76.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Masyarakat, Desa, Kelurahan		76.000.000,00	
		Terlaksananya Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						76.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Masyarakat, Desa, Kelurahan		76.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.000.000,00						4 Laporan	76.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						76.000.000,00							76.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Laporan	76.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
56.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**96.500.000,00**							**96.500.000,00**	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***96.500.000,00***							***96.500.000,00***	
			1.Persentase penanganan daerah rawan pangan	89.13 %		54.35 %	63.04 %	96.500.000,00						71.74 %	96.500.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						12.500.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		12.500.000,00	
		Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan						12.500.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait		12.500.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.500.000,00						4 Dokumen	12.500.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						12.500.000,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	12.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						84.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, Stakeholder terkait, Masyarakat		84.000.000,00	
		Tertanganinya Desa Rawan Pangan						84.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani, Stakeholder terkait, Masyarakat		84.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	84.000.000,00						4 Dokumen	84.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						84.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	84.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	84.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
57.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**90.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya keamanan dan mutu pangan segar						***90.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase pangan segar aman	95.88 %		93.53 %	94.12 %	90.000.000,00						94.71 %	100.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						90.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Masyarakat, Pelaku Usaha		100.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan keamanan dan mutu pangan segar						90.000.000,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Masyarakat, Pelaku Usaha		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**9.925.287.536,00**							**23.612.508.505,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**9.925.287.536,00**							**23.612.508.505,00**	
58.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3.631.375.250,00**							**3.012.852.000,00**	
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						***3.631.375.250,00***							***3.012.852.000,00***	
			1.Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.61 %		9.31 %	9.37 %	3.631.375.250,00						9.52 %	3.012.852.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.751.422.250,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		407.203.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Sarana Pertanian						1.751.422.250,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		407.203.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	75.580.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.701.422.250,00						1 Laporan	331.623.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						1.701.422.250,00							331.623.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.701.422.250,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Nogoraji || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Pejagatan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Korowelang || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Pesalakan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Alian || Desa Krakal || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Pengaringan || 1 ||	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	331.623.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						50.000.000,00							75.580.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Laporan	75.580.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						380.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		486.696.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						380.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		486.696.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00						3 Dokumen	250.809.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00						3 Dokumen	100.859.000,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	70.000.000,00						1 Varietas Unggul Baru (VUB)	135.028.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						250.000.000,00							250.809.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		3 Dokumen	250.809.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						60.000.000,00							100.859.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		3 Dokumen	100.859.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						70.000.000,00							135.028.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	135.028.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						39.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani Ternak, Peternak		39.000.000,00	
		Terfasilitasinya KTT yang menerapkan pemberian pakan/HPT unggul						39.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani Ternak, Peternak		39.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00						1 Laporan	39.000.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						39.000.000,00							39.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	39.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Kritig || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Petanahan || Desa Banjarwinangun || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buluspesantren || Desa Arjowinangun || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buluspesantren || Desa Sidomoro || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Mirit || Desa Patukgawemulyo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Mirit ||	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	39.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						10.953.000,00					Pelaku Usaha Obat Hewan		10.953.000,00	
		Terawasinya pengecer obat hewan						10.953.000,00					Pelaku Usaha Obat Hewan		10.953.000,00	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.953.000,00						1 Laporan	10.953.000,00	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						10.953.000,00							10.953.000,00	
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.953.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	10.953.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						950.000.000,00					Masyarakat Peternak		1.190.000.000,00	
		Terlaksananya peredaran benih/bibit ternak						950.000.000,00					Masyarakat Peternak		1.190.000.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00						1 Laporan	1.190.000.000,00	
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak						950.000.000,00							1.190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	1.190.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						500.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani Ternak, Peternak		879.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kelompok Tani ternak yang mendapatkan Bantuan Bibit ternak						500.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/ Kelompok Tani Ternak, Peternak		879.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	124 Ekor		596 Ekor	108 Ekor	500.000.000,00						113 Ekor	879.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						500.000.000,00							879.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	124 Ekor		596 Ekor	40 Ekor	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		113 Ekor	879.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
59.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**4.857.152.636,00**							**18.816.689.855,00**	
		Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						***4.607.152.636,00***							***18.816.689.855,00***	
			1.Persentase ketersedian Prasarana Pertanian dalam kondisi baik	29.39 %		29.16 %	29.21 %	4.607.152.636,00						29.27 %	18.816.689.855,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						1.019.872.100,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		3.059.932.600,00	
		Meningkatnya Pengembangan Prasarana Pertanian						1.019.872.100,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		3.059.932.600,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	929.872.100,00						1 Laporan	2.943.267.600,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	66.665.000,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						929.872.100,00							2.943.267.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	929.872.100,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buayan || Desa Nogoraji || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Pejagatan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Korowelang || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kutowinangun || Desa Pesalakan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa Pengaringan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Pejagoan || Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	2.943.267.600,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						40.000.000,00							66.665.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Dokumen	66.665.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						3.787.280.536,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		15.606.757.255,00	
		Tersedianya Prasarana Pertanian						3.787.280.536,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		15.606.757.255,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit		5 Unit	6 Unit	1.200.000.000,00						6 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit		2 Unit	3 Unit	499.895.545,00						3 Unit	922.597.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit		5 Unit	4 Unit	803.104.455,00						4 Unit	803.104.455,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00						2 Unit	11.350.000.000,00	
			Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	884.280.536,00						2 Unit	1.131.055.800,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit		5 Unit	4 Unit	1.200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		6 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya						499.895.545,00							922.597.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit		2 Unit	2 Unit	499.895.545,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		3 Unit	922.597.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						200.000.000,00							11.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		2 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Unit	11.350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						803.104.455,00							803.104.455,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	4 Unit		5 Unit	2 Unit	803.104.455,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Unit	803.104.455,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan						884.280.536,00							1.131.055.800,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	884.280.536,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Unit	1.131.055.800,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						50.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		150.000.000,00	
		Terfasilitasinya Wilayah Sumber Bibit dalam rangka pelestarian						50.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
60.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**605.000.000,00**							**714.801.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						***505.000.000,00***							***714.801.000,00***	
			1.Persentase penyakit hewan yang tertangani	100.00 %		100.00 %	100.00 %	505.000.000,00						100.00 %	714.801.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
		Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						165.000.000,00					Masyarakat		229.000.000,00	
		Terawasinya Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						165.000.000,00					Masyarakat		229.000.000,00	
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	164.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan		1 laporan	1 laporan	65.000.000,00						1 laporan	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan		1 laporan	1 laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 laporan	65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya						100.000.000,00							164.000.000,00	
		Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	164.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						270.000.000,00					Masyarakat		270.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						270.000.000,00					Masyarakat		270.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00						1 Laporan	270.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						270.000.000,00							270.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	270.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						70.000.000,00					Pelaku Usahan Produk Hewan		115.801.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						70.000.000,00					Pelaku Usahan Produk Hewan		115.801.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	115.801.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						70.000.000,00							115.801.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		1 Laporan	115.801.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
61.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**135.000.000,00**							**371.406.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanganan bencana pertanian						***135.000.000,00***							***371.406.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan pengendalian dan penanganan bencana pertanian	1.73 %		1.51 %	1.53 %	135.000.000,00						1.68 %	371.406.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		371.406.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						135.000.000,00					Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani		371.406.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha		50 Ha	50 Ha	40.000.000,00						100 Ha	48.750.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	595 Ha		555 Ha	565 Ha	70.000.000,00						575 Ha	289.087.000,00	
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	33.569.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						70.000.000,00							289.087.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	595 Ha		555 Ha	565 Ha	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		575 Ha	289.087.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						40.000.000,00							48.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	100 Ha		50 Ha	20 Ha	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		100 Ha	48.750.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						25.000.000,00							33.569.000,00	
		Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		2 Laporan	33.569.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
62.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**29.180.000,00**							**29.180.000,00**	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pertanian dan Peternakan						***29.180.000,00***							***29.180.000,00***	
			1.Persentase izin usaha Pertanian dan Perternakan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	29.180.000,00						100.00 %	29.180.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.599.000,00					Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan		14.599.000,00	
		Terfasilitasinya izin usaha pertanian						14.599.000,00					Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan		14.599.000,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	14.599.000,00						4 Dokumen	14.599.000,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						14.599.000,00							14.599.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	14.599.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	14.599.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						14.581.000,00					Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan		14.581.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya izin usaha peternakan						14.581.000,00					Pelaku Usaha Pertanian dan Peternakan		14.581.000,00	
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	14.581.000,00						4 Dokumen	14.581.000,00	
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan						14.581.000,00							14.581.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	14.581.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		4 Dokumen	14.581.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
63.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**667.579.650,00**							**667.579.650,00**	
		Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian						***667.579.650,00***							***667.579.650,00***	
			1.Persentase skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	85.00 %		75.00 %	77.50 %	667.579.650,00						80.00 %	667.579.650,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						667.579.650,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Penyuluh		667.579.650,00	
		Meningkatnya Kinerja Penyuluhan Pertanian						667.579.650,00					Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Stakeholder terkait, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Penyuluh		667.579.650,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	-	61.902.650,00						-	61.902.650,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	360.000.000,00						-	360.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	154.736.000,00						-	27.283.000,00	
			Jumlah koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	-	65.941.000,00						-	193.394.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						61.902.650,00							61.902.650,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didiseminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	1 Dokumen	61.902.650,00	Kab. Kebumen	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		-	61.902.650,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						360.000.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	26 Unit	360.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		-	360.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0011	Penumbuhan dan peningkatan kapasitas Penyuluh pertanian swadaya						0,00							0,00	
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian swadaya	Jumlah penyuluh pertanian swadaya yang tersedia di wilayah kab/kota dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0012	Koordinasi pengawalan penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kab/kota						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	Jumlah koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan di wilayah kab/kota	-		-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		-	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						154.736.000,00							27.283.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	31 Unit	154.736.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	27.283.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.07.2.01.0014	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian kab/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota						65.941.000,00							193.394.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	2 Laporan	65.941.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa yang tahan terhadap guncangan bencana, seperti pertanian tahan iklim dan usaha berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan		-	193.394.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						0,00							0,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN						**37.238.593.425,00**							**35.512.370.062,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**36.073.322.425,00**							**33.937.527.062,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**36.073.322.425,00**							**33.937.527.062,00**	
64.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.341.856.425,00**							**23.199.911.062,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***23.341.856.425,00***							***23.199.911.062,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	23.341.856.425,00						90.50 Indeks	23.199.911.062,00	
			2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		73.00 Nilai	73.20 Nilai	23.341.856.425,00						73.50 Nilai	23.199.911.062,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						93.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		121.527.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						93.000.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		121.527.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	52.000.000,00						14 Dokumen	70.009.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	41.000.000,00						19 Laporan	51.518.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						52.000.000,00							70.009.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	7 Dokumen	52.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		14 Dokumen	70.009.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						41.000.000,00							51.518.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan	9 Laporan	41.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		19 Laporan	51.518.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.339.850.425,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		21.096.743.062,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.339.850.425,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		21.096.743.062,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	37.826.000,00						12 Dokumen	119.397.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302 Orang/bulan		112 Orang/bulan	167 Orang/bulan	12.302.024.425,00						222 Orang/bulan	20.977.346.062,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.302.024.425,00							20.977.346.062,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302 Orang/bulan		112 Orang/bulan	128 Orang/bulan	12.302.024.425,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		222 Orang/bulan	20.977.346.062,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						37.826.000,00							119.397.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	37.826.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Dokumen	119.397.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21.955.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		30.148.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						21.955.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		30.148.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	21.955.000,00						2 Orang	30.148.000,00	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						21.955.000,00							30.148.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	8 Orang	21.955.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Orang	30.148.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						137.168.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		244.091.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						137.168.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		244.091.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.162.000,00						3 Dokumen	6.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.127.000,00						12 Dokumen	2.658.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	92.204.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.130.000,00						12 Paket	79.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.296.000,00						12 Paket	28.756.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.645.000,00						12 Paket	19.399.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.358.000,00						12 Paket	12.788.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.450.000,00						12 Paket	2.726.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.358.000,00							12.788.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.358.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	12.788.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.450.000,00							2.726.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	2.450.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	2.726.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.130.000,00							79.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	8 Paket	35.130.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	79.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.645.000,00							19.399.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	8 Paket	14.645.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	19.399.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.162.000,00							6.360.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	3.162.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Dokumen	6.360.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						14.296.000,00							28.756.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.296.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Paket	28.756.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							92.204.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	92.204.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.127.000,00							2.658.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.127.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Dokumen	2.658.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						107.567.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		131.099.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						107.567.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		131.099.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		62 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		31 Unit	10 Unit	107.567.000,00						10 Unit	121.099.000,00	
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		62 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						107.567.000,00							121.099.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		31 Unit	12 Unit	107.567.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	121.099.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.180.849.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		916.161.000,00	
		Terlaksanannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.180.849.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		916.161.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00						12 Laporan	410.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.778.591.000,00						12 Laporan	501.618.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.258.000,00						12 Laporan	4.543.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.258.000,00							4.543.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	2.258.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	4.543.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						400.000.000,00							410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.778.591.000,00							501.618.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.778.591.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	501.618.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.467.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		660.142.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.467.000,00					Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kab. Kebumen		660.142.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	75.000.000,00						4 Unit	155.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	358.757.000,00						60 Unit	463.392.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	2.710.000,00						20 Unit	5.450.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00						20 Unit	36.300.000,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						358.757.000,00							463.392.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit		60 Unit	28 Unit	358.757.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		60 Unit	463.392.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.710.000,00							5.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	26 Unit	2.710.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Unit	5.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							36.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	82 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Unit	36.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	3 Unit	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Desa Kawedusan || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Unit	155.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
65.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**30.984.000,00**							**50.984.000,00**	
		Terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup						***30.984.000,00***							***50.984.000,00***	
			1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100.00 Persentase		100.00 Persentase	100.00 Persentase	30.984.000,00						100.00 Persentase	50.984.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						30.984.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		50.984.000,00	
		Terlaksananya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						30.984.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		50.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	30.984.000,00						1 Dokumen	50.984.000,00	
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota						30.984.000,00							50.984.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	30.984.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.984.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
66.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**463.516.000,00**							**459.872.000,00**	
		Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						***463.516.000,00***							***459.872.000,00***	
			1.Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air yang Kualitasnya Baik	64.00 %		32.00 %	32.00 %	463.516.000,00						48.00 %	459.872.000,00	
			2.Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Udara yang Kualitasnya Baik	100.00 %		100.00 %	100.00 %	463.516.000,00						100.00 %	459.872.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						248.621.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		227.930.000,00	
		Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						248.621.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		227.930.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.219.000,00						1 Dokumen	6.188.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.739.000,00						1 Dokumen	4.716.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	900 Dokumen		700 Dokumen	750 Dokumen	237.663.000,00						800 Dokumen	217.026.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						4.739.000,00							4.716.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.739.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	4.716.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						6.219.000,00							6.188.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.219.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	6.188.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						237.663.000,00							217.026.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	900 Dokumen		700 Dokumen	750 Dokumen	237.663.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		800 Dokumen	217.026.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						104.317.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		118.424.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						104.317.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		118.424.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	60.141.000,00						10 Laporan	73.047.000,00	
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik		3 Titik	3 Titik	44.176.000,00						3 Titik	45.377.000,00	
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						60.141.000,00							73.047.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	60.141.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Laporan	73.047.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						44.176.000,00							45.377.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik		3 Titik	3 Titik	44.176.000,00	Kab. Kebumen	Pajak Air Tanah	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Titik	45.377.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						110.578.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		113.518.000,00	
		Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						110.578.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		113.518.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.747.000,00						1 Dokumen	2.773.000,00	
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	107.831.000,00						4 Kegiatan	110.745.000,00	
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran						2.747.000,00							2.773.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.747.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	2.773.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						107.831.000,00							110.745.000,00	
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	107.831.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Kegiatan	110.745.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
67.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.815.679.000,00**							**1.815.619.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)						***1.815.679.000,00***							***1.815.619.000,00***	
			1.Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) se-Kabupaten	33369.431 Ha		33369.111 Ha	33369.191 Ha	1.815.679.000,00						33369.271 Ha	1.815.619.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.815.679.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		1.815.619.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.815.679.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		1.815.619.000,00	
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20 Orang		20 Orang	20 Orang	2.684.000,00						20 Orang	2.671.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.608.000,00						1 Unit	9.561.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	875.30 Ha		875.10 Ha	875.15 Ha	1.803.387.000,00						875.20 Ha	1.803.387.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						1.803.387.000,00							1.803.387.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	875.30 Ha		875.10 Ha	875,15 Ha	1.803.387.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		875.20 Ha	1.803.387.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						2.684.000,00							2.671.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	20 Orang		20 Orang	50 Orang	2.684.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Orang	2.671.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						9.608.000,00							9.561.000,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.608.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	9.561.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
68.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**27.200.000,00**							**27.068.000,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) di Tingkat Kabupaten						***27.200.000,00***							***27.068.000,00***	
			1.Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	100 %		54.02 %	64.37 %	27.200.000,00						77.01 %	27.068.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						27.200.000,00					Fasyankes dan masyarakat di Kabupaten Kebumen		27.068.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Penyimpanan Sementara Limbah B3						27.200.000,00					Fasyankes dan masyarakat di Kabupaten Kebumen		27.068.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	10 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	13.001.000,00						10 Dokumen	12.938.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	3 Usaha		6 Usaha	3 Usaha	14.199.000,00						3 Usaha	14.130.000,00	
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						13.001.000,00							12.938.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	13.001.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Dokumen	12.938.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						14.199.000,00							14.130.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	3 Usaha		6 Usaha	3 Usaha	14.199.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Usaha	14.130.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
69.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**32.475.000,00**							**24.445.000,00**	
		Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)						***32.475.000,00***							***24.445.000,00***	
			1.Persentase Pengawasan Lingkungan Hidup	79.72 %		41.98 %	51.42 %	32.475.000,00						60.85 %	24.445.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						32.475.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		24.445.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						32.475.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		24.445.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan Usaha		40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	24.565.000,00						40 Badan Usaha	16.574.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	7.910.000,00						10 Dokumen	7.871.000,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						7.910.000,00							7.871.000,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	7.910.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Dokumen	7.871.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						24.565.000,00							16.574.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan Usaha		40 Badan Usaha	50 Badan Usaha	24.565.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		40 Badan Usaha	16.574.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
70.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**14.285.000,00**							**14.215.000,00**	
		Meningkatnya Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						***14.285.000,00***							***14.215.000,00***	
			1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	27.83 %		22.61 %	23.91 %	14.285.000,00						25.22 %	14.215.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						14.285.000,00					Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen dan masyarakat di kabupaten Kebumen		14.215.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						14.285.000,00					Desa dan Kelurahan di Kabupaten Kebumen dan masyarakat di kabupaten Kebumen		14.215.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	7.726.000,00						6 Lembaga	7.688.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	6.559.000,00						15 Dokumen	6.527.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						6.559.000,00							6.527.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	15 Dokumen		15 Dokumen	12 Dokumen	6.559.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		15 Dokumen	6.527.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						7.726.000,00							7.688.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	6 Lembaga		6 Lembaga	20 Lembaga	7.726.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Lembaga	7.688.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
71.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**8.963.000,00**							**8.919.000,00**	
		Tercapainya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						***8.963.000,00***							***8.919.000,00***	
			1.Persentase Desa dan Kelurahan yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3.48 %		3.48 %	2.83 %	8.963.000,00						3.48 %	8.919.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.963.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.919.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.963.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.919.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas		16 Entitas	16 Entitas	8.963.000,00						16 Entitas	8.919.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						8.963.000,00							8.919.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas		16 Entitas	16 Entitas	8.963.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		16 Entitas	8.919.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
72.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**8.648.000,00**							**8.606.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						***8.648.000,00***							***8.606.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	100.00 %		100.00 %	100.00 %	8.648.000,00						100.00 %	8.606.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						8.648.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.606.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						8.648.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.606.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	15 Pengaduan		15 Pengaduan	15 Pengaduan	8.648.000,00						15 Pengaduan	8.606.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						8.648.000,00							8.606.000,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	15 Pengaduan		15 Pengaduan	15 Pengaduan	8.648.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		15 Pengaduan	8.606.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
73.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**10.329.716.000,00**							**8.327.888.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan						***10.329.716.000,00***							***8.327.888.000,00***	
			1.Peningkatan Jumlah Lembaga Pengolah Sampah	10.25 %		10.25 %	10.25 %	10.329.716.000,00						10.25 %	8.327.888.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						10.329.716.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.327.888.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah						10.329.716.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		8.327.888.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.775.000,00						2 Dokumen	6.742.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok		5 Kelompok	5 Kelompok	8.230.000,00						5 Kelompok	8.190.000,00	
			Jumlah sampah yang terdaur ulang	106457.57 Ton		95324.40 Ton	97993.48 Ton	25.635.000,00						100737.30 Ton	25.510.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	37783.35 Ton		37632.60 Ton	37670.23 Ton	5.774.276.000,00						37707.90 Ton	6.787.446.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	13 Unit		22 Unit	13 Unit	4.514.800.000,00						13 Unit	1.500.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						8.230.000,00							8.190.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok		5 Kelompok	5 Kelompok	8.230.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Kelompok	8.190.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						4.514.800.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	13 Unit		22 Unit	22 Unit	4.514.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		13 Unit	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						6.775.000,00							6.742.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	6.775.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	6.742.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						5.774.276.000,00							6.787.446.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	37783.35 Ton		37632.60 Ton	37670,23 Ton	5.774.276.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		37707.90 Ton	6.787.446.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah						25.635.000,00							25.510.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	106457.57 Ton		95324.40 Ton	20000 Ton	25.635.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100737.30 Ton	25.510.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.165.271.000,00**							**1.574.843.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.165.271.000,00**							**1.574.843.000,00**	
74.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**510.433.000,00**							**763.844.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap						***510.433.000,00***							***763.844.000,00***	
			1.Nilai Produksi Perikanan Tangkap PUD dan Tangkap Laut	286.26 Milyar Rupiah		254.34 Milyar Rupiah	259.24 Milyar Rupiah	510.433.000,00						269.83 Milyar Rupiah	763.844.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						136.768.000,00					Nelayan		136.264.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						136.768.000,00					Nelayan		136.264.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	104.003.000,00						2 Unit	103.499.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit		29 Unit	1 Unit	32.765.000,00						1 Unit	32.765.000,00	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						104.003.000,00							103.499.000,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	1 Unit	104.003.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	103.499.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						32.765.000,00							32.765.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit		29 Unit	1 Unit	32.765.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	32.765.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						47.019.000,00					Nelayan yang tergabung ke dalam KUB		46.830.000,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						47.019.000,00					Nelayan yang tergabung ke dalam KUB		46.830.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	7.226.000,00						10 Kelompok	7.230.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang		50 Orang	40 Orang	39.793.000,00						40 Orang	39.600.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						39.793.000,00							39.600.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40 Orang		50 Orang	30 Orang	39.793.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		40 Orang	39.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						7.226.000,00							7.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok		10 Kelompok	5 Kelompok	7.226.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Kelompok	7.230.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						321.062.000,00					Nelayan		575.184.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						321.062.000,00					Nelayan		575.184.000,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	321.062.000,00						8 Layanan	575.184.000,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						321.062.000,00							575.184.000,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	321.062.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		8 Layanan	575.184.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.584.000,00					Nelayan Pemilik Kapal		5.566.000,00	
		Terlaksanya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						5.584.000,00					Nelayan Pemilik Kapal		5.566.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	25 Rekomendasi		25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	5.584.000,00						25 Rekomendasi	5.566.000,00	
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						5.584.000,00							5.566.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	25 Rekomendasi		25 Rekomendasi	25 Rekomendasi	5.584.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		25 Rekomendasi	5.566.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
75.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**513.454.000,00**							**592.714.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya						***513.454.000,00***							***592.714.000,00***	
			1.Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Dan Air Payau	169.70 Milyar Rupiah		150.77 Milyar Rupiah	155.30 Milyar Rupiah	513.454.000,00						159.96 Milyar Rupiah	592.714.000,00	
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6.061.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		6.061.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6.061.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		6.061.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Rekomendasi		27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	6.061.000,00						27 Rekomendasi	6.061.000,00	
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						6.061.000,00							6.061.000,00	
		Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Rekomendasi		27 Rekomendasi	20 Rekomendasi	6.061.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		27 Rekomendasi	6.061.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						507.393.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		586.653.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						507.393.000,00					Kelompok Pembudidaya Ikan		586.653.000,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.201.000,00						1 Dokumen	66.875.000,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.194.000,00						4 Dokumen	11.378.000,00	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	130 Unit		130 Unit	130 Unit	58.800.000,00						130 Unit	109.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.801.000,00						1 Unit	44.584.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit		20 Unit	7 Unit	326.397.000,00						7 Unit	354.816.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						44.801.000,00							44.584.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.801.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	44.584.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.194.000,00							11.378.000,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	10.194.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Dokumen	11.378.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						326.397.000,00							354.816.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Unit		20 Unit	2 Unit	326.397.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Bonorowo || Desa Bonorowo || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Bonorowo || Desa Bonjoklor || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Unit	354.816.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						58.800.000,00							109.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	130 Unit		130 Unit	75 Unit	58.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		130 Unit	109.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						67.201.000,00							66.875.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.201.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	66.875.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
76.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**12.426.000,00**							**12.365.000,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						***12.426.000,00***							***12.365.000,00***	
			1.Persentase wilayah yang dilakukan pengawasan	10.22 %		8.48 %	8.91 %	12.426.000,00						9.35 %	12.365.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						12.426.000,00					Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		12.365.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						12.426.000,00					Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)		12.365.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	20 Orang		20 Orang	20 Orang	12.426.000,00						20 Orang	12.365.000,00	
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan						12.426.000,00							12.365.000,00	
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	20 Orang		20 Orang	10 Orang	12.426.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Orang	12.365.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
77.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**128.958.000,00**							**205.920.000,00**	
		Meningkatnya Nilai Produksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						***128.958.000,00***							***205.920.000,00***	
			1.Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	50.41 Milyar Rupiah		41.47 Milyar Rupiah	39 Milyar Rupiah	128.958.000,00						45.72 Milyar Rupiah	205.920.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						11.826.000,00					Poklahsar dan Kugar		11.768.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						11.826.000,00					Poklahsar dan Kugar		11.768.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha		8 Unit Usaha	10 Unit Usaha	11.826.000,00						10 Unit Usaha	11.768.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						11.826.000,00							11.768.000,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha		8 Unit Usaha	5 Unit Usaha	11.826.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit Usaha	11.768.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						117.132.000,00					Tingkat Desa Di Kabupaten Kebumen		194.152.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						117.132.000,00					Tingkat Desa Di Kabupaten Kebumen		194.152.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	94.090.000,00						1 Pelaku Usaha	171.222.000,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.95 Ton		42.74 Ton	44.88 Ton	23.042.000,00						47.12 Ton	22.930.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						23.042.000,00							22.930.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.95 Ton		42.74 Ton	42,74 Ton	23.042.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		47.12 Ton	22.930.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						94.090.000,00							171.222.000,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	94.090.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Pelaku Usaha	171.222.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**8.108.694.974,00**							**8.942.584.709,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.108.694.974,00**							**8.942.584.709,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**8.108.694.974,00**							**8.942.584.709,00**	
78.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.782.137.974,00**							**6.303.850.740,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***5.782.137.974,00***							***6.281.571.740,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.80 Nilai		74.60 Nilai	74.65 Nilai	5.782.137.974,00						74.70 Nilai	6.281.571.740,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	5.782.137.974,00						90.50 Indeks	6.281.571.740,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.289.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		38.586.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengangggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.289.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		38.586.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	16.631.000,00						14 Dokumen	26.578.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	11.658.000,00						6 Laporan	12.008.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.631.000,00							26.578.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	6 Dokumen	16.631.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		14 Dokumen	26.578.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.658.000,00							12.008.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	11.658.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		6 Laporan	12.008.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.302.401.974,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.840.798.740,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.302.401.974,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.840.798.740,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.903.000,00						12 Dokumen	27.358.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		41 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.277.498.974,00						39 Orang/bulan	4.813.440.740,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.277.498.974,00							4.813.440.740,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		41 Orang/bulan	1232 Orang/bulan	4.277.498.974,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		39 Orang/bulan	4.813.440.740,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						24.903.000,00							27.358.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	24.903.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		12 Dokumen	27.358.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.900.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		31.827.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.900.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		31.827.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang		41 Orang	39 Orang	30.900.000,00						39 Orang	31.827.000,00	
	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.900.000,00							31.827.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang		41 Orang	66 Orang	30.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		39 Orang	31.827.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						80.312.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		85.170.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						80.312.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		85.170.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.700.000,00						2 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.571.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	20.424.000,00						10 Laporan	22.279.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.750.000,00						1 Paket	11.113.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.000.000,00						1 Paket	22.279.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.838.000,00						1 Paket	16.314.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.600.000,00						1 Paket	3.714.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.600.000,00							3.714.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	3.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Paket	3.714.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.750.000,00							11.113.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	10.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Paket	11.113.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.838.000,00							16.314.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	15.838.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Paket	16.314.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.700.000,00							3.900.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		2 Dokumen	3.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						21.000.000,00							22.279.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	21.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Paket	22.279.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.424.000,00							22.279.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	20.424.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		10 Laporan	22.279.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							5.571.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		12 Dokumen	5.571.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						91.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		94.689.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						91.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		94.689.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	27.000.000,00						1 Unit	27.850.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		12 Unit	9 Unit	55.000.000,00						9 Unit	56.812.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	9.500.000,00						2 Unit	10.027.000,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						27.000.000,00							27.850.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	9 Unit	27.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Unit	27.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.000.000,00							56.812.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		12 Unit	5 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		9 Unit	56.812.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.500.000,00							10.027.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	9.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		2 Unit	10.027.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.055.535.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		1.012.381.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.055.535.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		1.012.381.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	160.000.000,00						4 Laporan	165.315.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	894.575.000,00						4 Laporan	846.046.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	960.000,00						1 Laporan	1.020.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						960.000,00							1.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	960.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Laporan	1.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.000.000,00							165.315.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		4 Laporan	165.315.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						894.575.000,00							846.046.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	894.575.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		4 Laporan	846.046.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		200.399.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		200.399.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.500.000,00						1 Unit	53.045.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	77.700.000,00						21 Unit	80.054.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit		28 Unit	28 Unit	6.000.000,00						28 Unit	6.366.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	58.000.000,00						25 Unit	60.934.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						77.700.000,00							80.054.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	27 Unit	77.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		21 Unit	80.054.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						6.000.000,00							6.366.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	28 Unit		28 Unit	28 Unit	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		28 Unit	6.366.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.000.000,00							60.934.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	65 Unit	58.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		25 Unit	60.934.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.500.000,00							53.045.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Unit	53.045.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
79.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**1.718.000.000,00**							**1.892.952.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***1.718.000.000,00***							***1.892.952.000,00***	
			1.Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	85.93 %		81.83 %	82.85 %	1.718.000.000,00						83.88 %	1.892.952.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						192.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		233.399.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk						192.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		233.399.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	110000 Dokumen		110000 Dokumen	110000 Dokumen	79.000.000,00						110000 Dokumen	95.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000,00						4 Dokumen	5.305.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	109.000.000,00						4 Laporan	132.613.000,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						79.000.000,00							95.481.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	110000 Dokumen		110000 Dokumen	110000 Dokumen	79.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		110000 Dokumen	95.481.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						109.000.000,00							132.613.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	109.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		4 Laporan	132.613.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan						4.500.000,00							5.305.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		4 Dokumen	5.305.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						1.518.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		1.650.004.000,00	
		Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk						1.518.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		1.650.004.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.518.000.000,00						2 Dokumen	1.650.004.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						1.518.000.000,00							1.650.004.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.518.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		2 Dokumen	1.650.004.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						7.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		9.549.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						7.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		9.549.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00						1 Laporan	9.549.000,00	
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						7.500.000,00							9.549.000,00	
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Laporan	9.549.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
80.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**94.000.000,00**							**101.316.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***94.000.000,00***							***101.316.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Cakupan Layanan Pencatatan Sipil.	99.95 %		99.90 %	99.91 %	94.000.000,00						99.93 %	101.316.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						86.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		92.298.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil						86.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		92.298.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00						1 Dokumen	23.340.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	65.000.000,00						1 Layanan	68.958.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						21.000.000,00							23.340.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Dokumen	23.340.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						65.000.000,00							68.958.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	65.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Layanan	68.958.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						8.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		9.018.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						8.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		9.018.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00						2 Laporan	9.018.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						8.000.000,00							9.018.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		2 Laporan	9.018.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
81.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**514.557.000,00**							**644.465.969,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan						***514.557.000,00***							***635.977.969,00***	
			1.Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 %		100 %	100 %	514.557.000,00						100 %	635.977.969,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						20.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		26.523.000,00	
		Terlaksananya Pengumpuan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						20.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		26.523.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	26.523.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						20.000.000,00							26.523.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		3 Dokumen	26.523.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						494.557.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		617.942.969,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administasi Kependudukan						494.557.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		617.942.969,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00						1 Laporan	8.488.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00						2 Dokumen	8.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	480.057.000,00						1 Laporan	600.966.969,00	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						480.057.000,00							600.966.969,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	480.057.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Laporan	600.966.969,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						8.000.000,00							8.488.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		2 Dokumen	8.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						6.500.000,00							8.488.000,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil berbasis IT		1 Laporan	8.488.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**15.338.925.012,00**							**19.068.004.360,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.338.925.012,00**							**19.068.004.360,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**15.338.925.012,00**							**19.068.004.360,00**	
82.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.964.677.230,00**							**5.844.328.360,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***4.944.677.230,00***							***5.844.328.360,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		73.47 Nilai	73.48 Nilai	4.944.677.230,00						73.49 Nilai	5.844.328.360,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	4.944.677.230,00						90.50 Indeks	5.844.328.360,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		38.000.000,00	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	21.000.000,00						6 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00						8 Laporan	16.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Dokumen	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8 Laporan	16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.413.173.012,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		5.248.729.979,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.413.173.012,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		5.248.729.979,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	18.000.000,00						8 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.395.173.012,00						39 Orang/bulan	5.230.729.979,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.395.173.012,00							5.230.729.979,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan		39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4.395.173.012,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		39 Orang/bulan	5.230.729.979,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8 Dokumen	18.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		21.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		21.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang		51 Orang	51 Orang	20.000.000,00						51 Orang	21.000.000,00	
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 Orang		51 Orang	51 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		51 Orang	21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.971.218,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		114.065.381,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.971.218,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		114.065.381,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	2.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.570.000,00						12 Dokumen	4.570.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.750.000,00						12 Laporan	21.750.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	51.750.000,00						12 Paket	52.750.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.400.000,00						4 Paket	13.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.501.218,00						4 Paket	8.502.381,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	11.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Paket	11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						51.750.000,00							52.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	51.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	52.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.501.218,00							8.502.381,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.501.218,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Paket	8.502.381,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00							2.093.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	2.093.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.400.000,00							13.400.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Paket	13.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.750.000,00							21.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	21.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.570.000,00							4.570.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.570.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	4.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.600.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		65.600.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.600.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		65.600.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.250.000,00						1 Unit	11.250.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00						6 Unit	36.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.350.000,00						1 Unit	18.350.000,00	
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.250.000,00							11.250.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	11.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Unit	36.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17.350.000,00							18.350.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.350.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	18.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.308.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		236.308.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.308.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		236.308.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	127.658.000,00						12 Laporan	127.658.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.650.000,00						12 Laporan	3.650.000,00	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.650.000,00							3.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.650.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	3.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						127.658.000,00							127.658.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	127.658.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	127.658.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						110.625.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		120.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						110.625.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		120.625.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1 Unit	1 Unit	23.475.000,00						1 Unit	33.475.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	36 Unit	65.300.000,00						26 Unit	65.300.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	7.300.000,00						5 Unit	7.300.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	14.550.000,00						50 Unit	14.550.000,00	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.300.000,00							65.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	65.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		26 Unit	65.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						7.300.000,00							7.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	7.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Unit	7.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.550.000,00							14.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	14.550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Unit	14.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						23.475.000,00							33.475.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1 Unit	1 Unit	23.475.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	33.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
83.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**22.750.000,00**							**25.750.000,00**	
		Meningkatnya Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa						***22.750.000,00***							***25.750.000,00***	
			1.Persentase Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Penegasan Batas Desa	100 %		34.79 %	51.09 %	22.750.000,00						67.39 %	25.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						22.750.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		25.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa						22.750.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		25.750.000,00	
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa		1 Desa	1 Desa	22.750.000,00						1 Desa	25.750.000,00	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						22.750.000,00							25.750.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa		1 Desa	1 Desa	22.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Desa	25.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
84.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**1.072.200.000,00**							**1.360.700.000,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama						***1.072.200.000,00***							***1.360.700.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dari Kerja Sama (misalnya jalan, pasar, atau irigasi)	100.00 %		40.00 %	60.00 %	1.072.200.000,00						80.00 %	1.360.700.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						1.072.200.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		1.360.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						1.072.200.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		1.360.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	47.000.000,00						6 Dokumen	332.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	25.200.000,00						26 Dokumen	28.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.000.000.000,00						5 Dokumen	1.000.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						25.200.000,00							28.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	25.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		26 Dokumen	28.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						47.000.000,00							332.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	6 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Dokumen	332.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
85.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**7.757.577.782,00**							**6.043.026.000,00**	
		Meningkatnya Desa Dengan Layanan Administrasi baik						***7.737.577.782,00***							***6.023.026.000,00***	
			1.Persentase Desa Dengan Layanan Administrasi baik	79.25 %		75.00 %	76.25 %	7.737.577.782,00						77.50 %	6.023.026.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						7.757.577.782,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		6.043.026.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						7.757.577.782,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		6.043.026.000,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	449 Orang		449 Orang	449 Orang	265.852.000,00						449 Orang	20.852.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15.500.000,00						100 Orang	23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	449 Dokumen		449 Dokumen	449 Dokumen	25.000.000,00						449 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.800.000,00						2 Dokumen	15.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00						4 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	19.475.000,00						4 Dokumen	23.475.000,00	
			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	449 Dokumen		449 Dokumen	449 Dokumen	6.558.254.782,00						449 Dokumen	5.800.130.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00						5 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	16.500.000,00						3 Laporan	16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.769.000,00						2 Laporan	10.842.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	758.427.000,00						3 Laporan	20.427.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						15.800.000,00							15.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	15.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	449 Dokumen		449 Dokumen	449 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		449 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						15.500.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Orang	23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						10.769.000,00							10.842.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.769.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	10.842.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						19.475.000,00							23.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	19.475.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	23.475.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						758.427.000,00							20.427.000,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	758.427.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	20.427.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						16.500.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	16.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						265.852.000,00							20.852.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	449 Orang		449 Orang	449 Orang	265.852.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		449 Orang	20.852.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa						6.558.254.782,00							5.800.130.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	449 Dokumen		449 Dokumen	449 Dokumen	6.558.254.782,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		449 Dokumen	5.800.130.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
86.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**1.521.720.000,00**							**5.794.200.000,00**	
		Meningkatnya legalitas kelembagaan, partisipasi dalam musyawarah desa dan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan Desa						***1.506.720.000,00***							***5.794.200.000,00***	
			1.Persentase Desa dengan Legalitas Kelembagaan Baik	37.50 %		27.50 %	30.00 %	1.506.720.000,00						32.50 %	5.794.200.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.521.720.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		5.794.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.521.720.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kebumen		5.794.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00						3 Dokumen	2.235.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.360.720.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00						3 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00						3 Laporan	2.517.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	117.000.000,00						66 Lembaga	20.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						117.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	117.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		66 Lembaga	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						14.000.000,00							2.235.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Dokumen	2.235.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						15.000.000,00							2.517.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	2.517.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						15.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						1.360.720.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.360.720.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**10.049.040.562,00**							**10.658.858.747,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.049.040.562,00**							**10.658.858.747,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**9.929.040.562,00**							**10.534.458.747,00**	
87.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.636.934.562,00**							**6.194.713.747,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***5.592.934.562,00***							***6.150.713.747,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.00 Nilai	72.51 Nilai	5.592.934.562,00						73.76 Nilai	6.150.713.747,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.45 Indeks	90.50 Indeks	5.592.934.562,00						90.55 Indeks	6.150.713.747,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		16.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00						5 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.000.000,00						3 Laporan	7.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.868.513.562,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		4.343.611.913,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.868.513.562,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		4.343.611.913,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						1212000000 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		41 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3.858.513.562,00						41 Orang/bulan	4.331.611.913,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.858.513.562,00							4.331.611.913,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		41 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.858.513.562,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		41 Orang/bulan	4.331.611.913,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1212000000 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		25.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		25.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		41 Orang	41 Orang	10.000.000,00						41 Orang	25.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		41 Orang	1 Orang	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		41 Orang	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.400.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		59.400.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						46.400.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		59.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00						12 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00						12 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.000.000,00						12 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.000.000,00						12 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.000.000,00						12 Paket	4.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	7.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	30.000.000,00						8 Unit	50.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	5 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.542.421.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.573.955.834,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.542.421.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.573.955.834,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00						12 Laporan	431.532.834,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.140.921.000,00						12 Laporan	1.140.923.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00						12 Laporan	1.500.000,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						400.000.000,00							431.532.834,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	431.532.834,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.140.921.000,00							1.140.923.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.140.921.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.140.923.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.600.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		126.746.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.600.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		126.746.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00						3 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	70.000.000,00						31 Unit	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.600.000,00						3 Unit	1.746.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		40 Unit	40 Unit	25.000.000,00						40 Unit	25.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	30 Unit	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		31 Unit	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.600.000,00							1.746.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	17 Unit	1.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	1.746.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		40 Unit	16 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Unit	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
88.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.794.443.000,00**							**1.817.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						***1.794.443.000,00***							***1.817.000.000,00***	
			1.Kategori keterbukaan Informasi Publik Badan Publik	Informatif Kategori		Informatif Kategori	Informatif Kategori	1.794.443.000,00						Informatif Kategori	1.817.000.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.794.443.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.817.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.794.443.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		1.817.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	52.000.000,00						-	52.000.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	1.528.571.000,00						-	1.490.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	213.872.000,00						-	275.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0028	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						213.872.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	95 %	213.872.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						52.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	11 Komunitas	52.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	52.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						1.528.571.000,00							1.490.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	1743 Konten	1.528.571.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.490.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
89.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.497.663.000,00**							**2.522.745.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika						***2.497.663.000,00***							***2.522.745.000,00***	
			1.Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100.00 %		100.00 %	100.00 %	2.497.663.000,00						100.00 %	2.522.745.000,00	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.497.663.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		2.522.745.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.497.663.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		2.522.745.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	850.000.000,00						-	850.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	1.647.663.000,00						-	1.672.745.000,00	
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						850.000.000,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	2 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						1.647.663.000,00							1.672.745.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	50 Titik	1.647.663.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.672.745.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**34.000.000,00**							**38.400.000,00**	
90.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**34.000.000,00**							**38.400.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral						***34.000.000,00***							***38.400.000,00***	
			1.Predikat Domain Prinsip SDI dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Memuaskan Predikat		Baik Predikat	Baik Predikat	34.000.000,00						Sangat Baik Predikat	38.400.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						34.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		38.400.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						34.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		38.400.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00						1 Laporan	38.400.000,00	
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						34.000.000,00							38.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan		1 Laporan	38.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**86.000.000,00**							**86.000.000,00**	
91.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**86.000.000,00**							**86.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi						***86.000.000,00***							***86.000.000,00***	
			1.Kategori Sistem Elektronik dalam Indeks KAMI	Tinggi Kategori		Tinggi Kategori	Tinggi Kategori	86.000.000,00						Tinggi Kategori	86.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		86.000.000,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		86.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	86.000.000,00						-	86.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						86.000.000,00							86.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	86.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	86.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**61.219.901.378,00**							**29.972.610.319,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.900.519.378,00**							**19.108.197.319,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**18.900.519.378,00**							**19.108.197.319,00**	
92.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.375.535.378,00**							**17.423.197.319,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***17.375.535.378,00***							***17.293.197.319,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73.85 Nilai		73.81 Nilai	72.51 Nilai	17.375.535.378,00						73.83 Nilai	17.293.197.319,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	94.35 Indeks		94.31 Indeks	90.50 Indeks	17.375.535.378,00						94.33 Indeks	17.293.197.319,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		82.500.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		82.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00						8 Dokumen	52.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00						3 Laporan	30.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							52.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		8 Dokumen	52.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	8 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		3 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.544.797.378,00					-		12.711.105.758,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.544.797.378,00					-		12.711.105.758,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51 Dokumen		51 Dokumen	51 Dokumen	42.500.000,00						51 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		111 Orang/bulan	111 Orang/bulan	11.502.297.378,00						111 Orang/bulan	12.656.105.758,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.502.297.378,00							12.656.105.758,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan		111 Orang/bulan	2.660 Orang/bulan	11.502.297.378,00	Kab. Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		111 Orang/bulan	12.656.105.758,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						42.500.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51 Dokumen		51 Dokumen	30 Dokumen	42.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		51 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Telaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						0 Orang	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						0 Orang	0,00	
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	226 Orang	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		0 Orang	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		0 Orang	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						150.094.000,00					-		205.750.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						150.094.000,00					-		205.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00						1 Dokumen	2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.520.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.074.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.450.000,00						1 Paket	14.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.000.000,00						1 Paket	46.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.300.000,00						1 Paket	9.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.300.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Paket	9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.074.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	11 Paket	43.074.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Paket	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.000.000,00							46.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Paket	46.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.750.000,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Dokumen	2.750.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.450.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	9.450.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Paket	14.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						42.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.520.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	2.520.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					-		55.000.000,00	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.000.000,00					-		55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	16 Unit	150.000.000,00						12 Unit	55.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	36 Unit	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		12 Unit	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.135.644.000,00					-		3.973.841.561,00	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.135.644.000,00					-		3.973.841.561,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	575.000.000,00						12 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.545.194.000,00						12 Laporan	3.425.526.561,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00						12 Laporan	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.450.000,00						12 Laporan	2.315.000,00	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.450.000,00							2.315.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	1.450.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		12 Laporan	2.315.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						575.000.000,00							525.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	575.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		12 Laporan	525.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.000.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		12 Laporan	21.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.545.194.000,00							3.425.526.561,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.545.194.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		12 Laporan	3.425.526.561,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.000.000,00					-		395.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.000.000,00					-		395.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	60.000.000,00						4 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit		77 Unit	77 Unit	210.000.000,00						77 Unit	240.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	50.000.000,00						25 Unit	75.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						210.000.000,00							240.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit		77 Unit	78 Unit	210.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		77 Unit	240.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		Unit	15 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		1 Unit	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		25 Unit	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						60.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		4 Unit	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
93.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**14.400.000,00**							**15.000.000,00**	
		Terlaksananya Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi						***14.400.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	12.00 %		12.00 %	11.76 %	14.400.000,00						12.00 %	15.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						14.400.000,00					Koperasi		15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.400.000,00					Koperasi		15.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	22 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	14.400.000,00						21 Unit Usaha	15.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						14.400.000,00							15.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	22 Unit Usaha		20 Unit Usaha	60 Unit Usaha	14.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		21 Unit Usaha	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
94.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**40.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						***40.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	31.38 %		6.27 %	13.49 %	40.000.000,00						18.71 %	50.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00					Koperasi		50.000.000,00	
		Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00					Koperasi		50.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	76 Orang		25 Orang	32 Orang	40.000.000,00						42 Orang	50.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	76 Orang		25 Orang	40 Orang	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		42 Orang	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
95.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**91.000.000,00**							**145.000.000,00**	
		Terlaksananya Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi						***91.000.000,00***							***145.000.000,00***	
			1.Persentase Advokasi kepada Koperasi	28.07 %		25.89 %	26.43 %	91.000.000,00						26.98 %	145.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						91.000.000,00					Koperasi		145.000.000,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						91.000.000,00					Koperasi		145.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha		25 Unit Usaha	35 Unit Usaha	80.000.000,00						50 Unit Usaha	90.000.000,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	15 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	11.000.000,00						7 Kelompok Masyarakat	55.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						11.000.000,00							55.000.000,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	15 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		7 Kelompok Masyarakat	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	85 Unit Usaha		25 Unit Usaha	460 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		50 Unit Usaha	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
96.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**25.500.000,00**							**65.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm)						***25.500.000,00***							***65.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	14.78 %		12.74 %	13.20 %	25.500.000,00						13.72 %	65.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						25.500.000,00					UMKM		65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						25.500.000,00					UMKM		65.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	25.500.000,00						-	65.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						25.500.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	200 Unit Usaha	25.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		-	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
97.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**1.354.084.000,00**							**1.410.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengembangan UMKM						***1.354.084.000,00***							***1.410.000.000,00***	
			1.Persentase Pertambahan Usaha Mikro	2.54 %		2.08 %	0.07 %	1.354.084.000,00						2.33 %	1.410.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						1.354.084.000,00					UMKM		1.410.000.000,00	
		Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						1.354.084.000,00					UMKM		1.410.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	405.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	177.084.000,00						-	0,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	772.000.000,00						-	1.410.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						772.000.000,00							1.410.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	90 Orang	772.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		-	1.410.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						405.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	1.000 Unit Usaha	405.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri						177.084.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	120 Produk	177.084.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan infrastruktur dengan program pemberdayaan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif		-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**42.319.382.000,00**							**10.864.413.000,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**8.542.099.000,00**							**9.343.913.000,00**	
98.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**5.033.539.000,00**							**5.723.086.000,00**	
		Terlaksananya Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						***5.033.539.000,00***							***5.718.086.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	0.90 %		0.50 %	0.6 %	5.033.539.000,00						0.70 %	5.718.086.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						4.777.873.000,00					Pedagang		5.093.086.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						4.777.873.000,00					Pedagang		5.093.086.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.887.873.000,00						4 Unit	2.190.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	5.000.000,00	
			Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	1 laporan		laporan	1 laporan	0,00						1 laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.890.000.000,00						5 Unit	2.893.086.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						2.890.000.000,00							2.893.086.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.890.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		5 Unit	2.893.086.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.887.873.000,00							2.190.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		4 Unit	5 Unit	1.887.873.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		4 Unit	2.190.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota						0,00							5.000.000,00	
		Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1 Kegiatan		Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		1 Kegiatan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	1 laporan		laporan	0 laporan	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		1 laporan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						255.666.000,00					Pedagang		630.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						255.666.000,00					Pedagang		630.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	105.666.000,00						4 Dokumen	480.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						105.666.000,00							480.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	105.666.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		4 Dokumen	480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		9 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
99.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**2.827.600.000,00**							**2.876.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***2.827.600.000,00***							***2.876.000.000,00***	
			1.Disparitas Harga	10 %		10 %	±10 %	2.827.600.000,00						10 %	2.876.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						60.000.000,00					Pedagang		81.000.000,00	
		Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00					Pedagang		81.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3381 Laporan		381 Laporan	381 Laporan	60.000.000,00						381 Laporan	81.000.000,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						60.000.000,00							81.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3381 Laporan		381 Laporan	381 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah		381 Laporan	81.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						2.767.600.000,00					Pedagang		2.795.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						2.767.600.000,00					Pedagang		2.795.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.720.000.000,00						4 Laporan	2.720.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan		365 Laporan	365 Laporan	47.600.000,00						365 Laporan	75.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						47.600.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan		365 Laporan	365 Laporan	47.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan sistem logistik daerah yang efisien untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok antarwilayah		365 Laporan	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						2.720.000.000,00							2.720.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.720.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengendalian harga barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat		4 Laporan	2.720.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
100.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**60.000.000,00**							**62.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengembangan Ekspor						***60.000.000,00***							***62.500.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Perdagangan	1.50 %		1.10 %	1.3 %	60.000.000,00						1.30 %	62.500.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00					Pelaku Usaha		62.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00					Pelaku Usaha		62.500.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	45 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	39 Pelaku Usaha	60.000.000,00						41 Pelaku Usaha	62.500.000,00	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						60.000.000,00							62.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	45 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		41 Pelaku Usaha	62.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
101.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**134.881.000,00**							**198.500.000,00**	
		Terlaksananya Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen						***134.881.000,00***							***198.500.000,00***	
			2.Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	68.11 %		40.86 %	52,74 %	134.881.000,00						54.48 %	198.500.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						134.881.000,00					UTTP		198.500.000,00	
		Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						134.881.000,00					UTTP		198.500.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit		3500 Unit	5000 Unit	112.881.000,00						6000 Unit	165.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	90 Orang		70 Orang	76 Orang	19.500.000,00						80 Orang	28.000.000,00	
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.500.000,00						1 Unit	5.500.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						112.881.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	8000 Unit		3500 Unit	5.000 Unit	112.881.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif		6000 Unit	165.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						19.500.000,00							28.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	90 Orang		70 Orang	76 Orang	19.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif		80 Orang	28.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal						2.500.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan pekerja agar iklim investasi tetap kondusif		1 Unit	5.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
102.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**486.079.000,00**							**483.827.000,00**	
		Meningkatnya Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						***486.079.000,00***							***483.827.000,00***	
			1.Persentase Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri	92.60 %		92.40 %	90 %	486.079.000,00						92.50 %	483.827.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						486.079.000,00					UMKM		483.827.000,00	
		Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						486.079.000,00					UMKM		483.827.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM		15 UMKM	15 UMKM	10.500.000,00						15 UMKM	15.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM		40 UMKM	50 UMKM	475.579.000,00						50 UMKM	468.827.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						475.579.000,00							468.827.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM		40 UMKM	35 UMKM	475.579.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		50 UMKM	468.827.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						10.500.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM		15 UMKM	15 UMKM	10.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan daya saing perdagangan melalui perluasan jejaring pemasaran dan peningkatan konsumsi produk lokal		15 UMKM	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**33.777.283.000,00**							**1.520.500.000,00**	
103.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**33.627.283.000,00**							**1.353.000.000,00**	
		Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri						***33.627.283.000,00***							***823.000.000,00***	
			2.Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	41.84 %		39.28 %	39.92 %	33.627.283.000,00						40.56 %	823.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						33.627.283.000,00					IKM		1.353.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						33.627.283.000,00					IKM		1.353.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	32.933.000.000,00						10 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00						3 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00						3 Dokumen	91.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	530.000.000,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	36 Dokumen		12 Dokumen	18 Dokumen	5.000.000,00						24 Dokumen	12.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						32.933.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	32.933.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		10 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						80.000.000,00							91.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		3 Dokumen	91.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						90.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		3 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						0,00							530.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		3 Dokumen	530.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						5.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	36 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		24 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						33.627.283.000,00					IKM		1.353.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	519.283.000,00						-	530.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						519.283.000,00							530.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	3 Dokumen	519.283.000,00	Kab. Kebumen	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		-	530.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
104.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**90.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Izin Usaha Industri						***90.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Dokumen yang terfasilitasi	100.00 %		76.00 %	83 %	90.000.000,00						88.00 %	100.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						90.000.000,00					IKM		100.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						90.000.000,00					IKM		100.000.000,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	220 Dokumen		110 Dokumen	130 Dokumen	90.000.000,00					155 Dokumen	100.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						90.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	220 Dokumen		110 Dokumen	135 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		155 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
105.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**60.000.000,00**							**67.500.000,00**	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						***60.000.000,00***							***67.500.000,00***	
			1.Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100.00 %		100.00 %	100 %	60.000.000,00						100.00 %	67.500.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						60.000.000,00					IKM		67.500.000,00	
		Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						60.000.000,00					IKM		67.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						3 Dokumen	12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		1 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						5.000.000,00							12.500.000,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan creative hub dan co-working space untuk mendukung kegiatan promosi, branding, dan pengembangan konten pemasaran produk industri, wisata maupun UMKM lainnya		3 Dokumen	12.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.078.583.447,00**							**5.766.051.346,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.078.583.447,00**							**5.766.051.346,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.078.583.447,00**							**5.766.051.346,00**	
106.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.886.183.447,00**							**5.315.617.646,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***3.865.483.447,00***							***5.271.969.646,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.88 Nilai		76.73 Nilai	76.77 Nilai	3.865.483.447,00						76.80 Nilai	5.271.969.646,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.45 Indeks		90.27 Indeks	90.32 Indeks	3.865.483.447,00						90.36 Indeks	5.271.969.646,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.497.000,00					Pegawai DPMPTSP		20.225.000,00	
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.497.000,00					Pegawai DPMPTSP		20.225.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.497.000,00						4 Dokumen	13.925.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00						4 Laporan	6.300.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.497.000,00							13.925.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	8.497.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	13.925.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00							6.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	11 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.643.088.447,00					-		3.924.972.646,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.643.088.447,00					-		3.924.972.646,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.668.000,00						12 Dokumen	28.726.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.623.420.447,00						28 Orang/bulan	3.896.246.646,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.623.420.447,00							3.896.246.646,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	616 Orang/bulan	2.623.420.447,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		28 Orang/bulan	3.896.246.646,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						19.668.000,00							28.726.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	68 Dokumen	19.668.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	28.726.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		51.300.000,00	
		Terlaksananya pelatihan dan diklat pegawai sesuai dengan tupoksi						0,00					-		51.300.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	51.300.000,00	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							51.300.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Orang	51.300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						112.500.000,00					Pegawai DPMPTSP		134.297.000,00	
		Tersedianya administrasi umum penunjang kegiatan						112.500.000,00					Pegawai DPMPTSP		134.297.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	1.800.000,00						25 Dokumen	6.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.000.000,00						12 Laporan	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.700.000,00						1 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.700.000,00						1 Paket	20.824.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.000.000,00						1 Paket	20.824.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.300.000,00						1 Paket	20.824.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.300.000,00							20.824.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	18.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	20.824.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.700.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	20.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	21.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.000.000,00							20.824.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	20.824.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.700.000,00							20.824.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	20.824.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						37.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	10 Laporan	37.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	42.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.800.000,00							6.825.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25 Dokumen		25 Dokumen	27 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		25 Dokumen	6.825.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						92.342.000,00					-		65.546.000,00	
		Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						92.342.000,00					-		65.546.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	92.342.000,00						2 Unit	65.546.000,00	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						92.342.000,00							65.546.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	12 Unit	92.342.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	65.546.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						704.820.000,00					DPMPTSP Kabupaten Kebumen		784.230.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						704.820.000,00					DPMPTSP Kabupaten Kebumen		784.230.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	229.600.000,00						1 Laporan	284.130.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	474.220.000,00						1 Laporan	497.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	2.200.000,00	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						229.600.000,00							284.130.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	229.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	284.130.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						474.220.000,00							497.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	474.220.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	497.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.936.000,00					DPMPTSP Kabupaten Kebumen		335.047.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	124.500.000,00						1 Unit	130.725.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		13 Unit	13 Unit	1.681.000,00						13 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		10 Unit	10 Unit	45.355.000,00						10 Unit	47.622.000,00	
	2.18.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.681.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		13 Unit	16 Unit	1.681.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		13 Unit	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.355.000,00							47.622.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		10 Unit	63 Unit	45.355.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Unit	47.622.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						124.500.000,00							130.725.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	124.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	130.725.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						92.342.000,00					-		65.546.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.936.000,00					DPMPTSP Kabupaten Kebumen		335.047.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.936.000,00					DPMPTSP Kabupaten Kebumen		335.047.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	147.400.000,00						-	154.700.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						147.400.000,00							154.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	32 Unit	147.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	154.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
107.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**25.400.000,00**							**95.954.000,00**	
		Tercapainya realisasi nilai investasi PMA/PMDN						***25.400.000,00***							***95.954.000,00***	
			1.Nilai realisasi penanaman modal	1224.90 Milyar Rupiah		825.32 Milyar Rupiah	907.85 Milyar Rupiah	25.400.000,00						1000.91 Milyar Rupiah	95.954.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		20.414.000,00	
		Tercapainya jumlah Kesepakatan Mitra Usaha Besar dengan UMKM di daerah						0,00					-		20.414.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	20.414.000,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						0,00							20.414.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	20.414.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						25.400.000,00					-		75.540.000,00	
		Tersusun dan terlaksananya review Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						25.400.000,00					-		75.540.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	25.400.000,00						-	25.540.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	50.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan sinergi dalam pengembangan sektor pariwisata berbasis kewilayahan dan ekonomi kreatif		-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						25.400.000,00							25.540.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	25.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	25.540.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
108.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**71.000.000,00**							**180.150.000,00**	
		Meningkatnya calon pelaku usaha/penanam modal yang menginvestasikan modalnya di daerah						***71.000.000,00***							***180.150.000,00***	
			1.Persentase peningkatan kepeminatan penanaman modal	28.00 %		18.18 %	23.08 %	71.000.000,00						25.00 %	180.150.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						71.000.000,00					-		180.150.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						71.000.000,00					-		180.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	71.000.000,00						4 Dokumen	180.150.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						71.000.000,00							180.150.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	180.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
109.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**54.000.000,00**							**102.258.700,00**	
		Tercapainya Pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan						***54.000.000,00***							***102.258.700,00***	
			1.Persentase pelaku usaha yang mendapatkan layanan dan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan	92.50 %		92.50 %	92.50 %	54.000.000,00						92.50 %	102.258.700,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						54.000.000,00					Pelaku Usaha di daerah		102.258.700,00	
		Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						54.000.000,00					Pelaku Usaha di daerah		102.258.700,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	6.000.000,00						15 Dokumen	9.150.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	40.000.000,00						5000 Pelaku Usaha	80.620.000,00	
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						6.000.000,00							9.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		15 Dokumen	9.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						40.000.000,00							80.620.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5000 Pelaku Usaha	80.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Tercapainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						54.000.000,00					Pelaku Usaha di daerah		102.258.700,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	8.000.000,00						-	12.488.700,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						8.000.000,00							12.488.700,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	10 Kegiatan Usaha	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.488.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
110.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**34.000.000,00**							**59.680.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Usaha yang telah terverifikasi dan dilakukan Pengendalian						***34.000.000,00***							***59.680.000,00***	
			1.Persentase Jumlah kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku	100.00 %		100.00 %	100.00 %	34.000.000,00						100.00 %	59.680.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						34.000.000,00					-		59.680.000,00	
		Tersedianya Kegiatan usaha yang telah terverifikasi						34.000.000,00					-		59.680.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha		50 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	20.000.000,00						60 Kegiatan Usaha	25.620.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	0,00						50 Pelaku Usaha	19.600.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						0,00							19.600.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60 Pelaku Usaha		40 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Pelaku Usaha	19.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						20.000.000,00							25.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	70 Kegiatan Usaha		50 Kegiatan Usaha	55 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Kegiatan Usaha	25.620.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Tersedianya Kegiatan usaha yang telah terverifikasi						34.000.000,00					-		59.680.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	14.000.000,00						-	14.460.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						14.000.000,00							14.460.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	30 Kegiatan Usaha	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	14.460.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
111.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**8.000.000,00**							**12.391.000,00**	
		Tersusunnya Dokumen hasil pengolahan dan pengkajian data penanaman modal yang mudah diakses						***8.000.000,00***							***12.391.000,00***	
			1.Persentase kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal yang dibutuhkan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	8.000.000,00						100.00 %	12.391.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00					-		12.391.000,00	
		Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00					-		12.391.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	8.000.000,00						10 Dokumen	12.391.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						8.000.000,00							12.391.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 Dokumen		10 Dokumen	8 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Dokumen	12.391.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**16.447.754.276,00**							**19.361.451.240,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.277.968.276,00**							**11.822.498.193,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9.277.968.276,00**							**11.822.498.193,00**	
112.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.439.968.276,00**							**10.983.998.193,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***8.349.968.276,00***							***10.950.998.193,00***	
			1.Nilai SAKIP	74.45 Nilai		74.25 Nilai	74.30 Nilai	8.349.968.276,00						74.35 Nilai	10.950.998.193,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	8.349.968.276,00						90.50 Indeks	10.950.998.193,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00					Aparatur/ Pemangku Kepentingan , Stakeholder Kab. Kebumen		47.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00					Aparatur/ Pemangku Kepentingan , Stakeholder Kab. Kebumen		47.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	33.000.000,00						4 Dokumen	34.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00						2 Laporan	13.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						33.000.000,00							34.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	34.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	13.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.773.252.276,00					Aparatur		8.274.346.193,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daera						5.773.252.276,00					Aparatur		8.274.346.193,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	130.000.000,00						2 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		50 Orang/bulan	52 Orang/bulan	5.643.252.276,00						53 Orang/bulan	8.034.346.193,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.643.252.276,00							8.034.346.193,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		50 Orang/bulan	1372 Orang/bulan	5.643.252.276,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		53 Orang/bulan	8.034.346.193,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						130.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	56 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	240.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.800.000,00					Kantor Disparbud, Obyek wisata Kab. Kebumen		153.700.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.800.000,00					Kantor Disparbud, Obyek wisata Kab. Kebumen		153.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00						12 Dokumen	3.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.000.000,00						1 Paket	27.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.000.000,00						1 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	31.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	33.000.000,00	
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.000.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	26.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	27.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							31.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	6 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	31.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	3.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						23.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	23.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	24.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	21 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						178.000.000,00					Aparatur		182.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						178.000.000,00					Aparatur		182.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	30.000.000,00						8 Unit	32.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		18 Unit	18 Unit	148.000.000,00						18 Unit	150.000.000,00	
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8 Unit	32.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						148.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		18 Unit	16 Unit	148.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		18 Unit	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.131.916.000,00					Aparatur		2.132.552.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.131.916.000,00					Aparatur		2.132.552.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.830.552.000,00						12 Laporan	1.830.552.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.364.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.364.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.364.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	2.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.830.552.000,00							1.830.552.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.830.552.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	1.830.552.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166.000.000,00					Aparatur		194.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						166.000.000,00					Aparatur		194.400.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						1 Unit	33.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		41 Unit	41 Unit	125.000.000,00						41 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	1.000.000,00						40 Unit	4.400.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		17 Unit	17 Unit	10.000.000,00						17 Unit	22.000.000,00	
	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.000.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit		41 Unit	40 Unit	125.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		41 Unit	135.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.000.000,00							4.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	10 Unit	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Unit	4.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit		17 Unit	8 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		17 Unit	22.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
113.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**674.000.000,00**							**674.500.000,00**	
		Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan						***592.000.000,00***							***592.500.000,00***	
			1.Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus	89.13 %		86.09 %	86.74 %	592.000.000,00						87.39 %	592.500.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						164.000.000,00					Pelaku Seni dan Budaya, Lembaga dan Komunitas Budaya, Masyarakat, Pemangku Kepentingan, Pemerintah dan Institusi Pendidikan Kab. Kebumen		164.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota						164.000.000,00					Pelaku Seni dan Budaya, Lembaga dan Komunitas Budaya, Masyarakat, Pemangku Kepentingan, Pemerintah dan Institusi Pendidikan Kab. Kebumen		164.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	82.000.000,00						1 Objek	82.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang		110 Orang	110 Orang	82.000.000,00						110 Orang	82.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						82.000.000,00							82.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	82.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Objek	82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						82.000.000,00							82.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	120 Orang		110 Orang	110 Orang	82.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		110 Orang	82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						510.000.000,00					Organisasi Kesenian/ kebudayaan, PKK, Karangtaruna, Sekolah Kab. Kebumen		510.500.000,00	
		Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						510.000.000,00					Organisasi Kesenian/ kebudayaan, PKK, Karangtaruna, Sekolah Kab. Kebumen		510.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00						2 Laporan	135.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		4 Objek	4 Objek	375.000.000,00						4 Objek	375.500.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						375.000.000,00							375.500.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek		4 Objek	4 Objek	375.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Objek	375.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						135.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	135.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
114.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**164.000.000,00**							**164.000.000,00**	
		Meningkatnya Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						***82.000.000,00***							***82.000.000,00***	
			1.Persentase peningkatan kunjungan tempat bersejarah	2.16 %		1.59 %	1.70 %	82.000.000,00						1.81 %	82.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						164.000.000,00					Masyarakat, Cagar Budaya Kab. Kebumen		164.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						164.000.000,00					Masyarakat, Cagar Budaya Kab. Kebumen		164.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	21 Objek		17 Objek	18 Objek	82.000.000,00						19 Objek	82.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	133 Objek		133 Objek	133 Objek	82.000.000,00						133 Objek	82.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						82.000.000,00							82.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	133 Objek		133 Objek	133 Objek	82.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		133 Objek	82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						82.000.000,00							82.000.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	21 Objek		17 Objek	18 Objek	82.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		19 Objek	82.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**7.169.786.000,00**							**7.538.953.047,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**7.169.786.000,00**							**7.538.953.047,00**	
115.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**4.704.786.000,00**							**5.063.953.047,00**	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata						***4.704.786.000,00***							***5.063.953.047,00***	
			1.Persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	27.34 %		14.84 %	17.19 %	4.704.786.000,00						19.53 %	5.063.953.047,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						110.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, Insitusi/Lembaga, Wisatawan Kab. Kebumen		110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						110.000.000,00					Masyarakat, Pelaku Usaha, Insitusi/Lembaga, Wisatawan Kab. Kebumen		110.000.000,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	245 Orang		133 Orang	154 Orang	110.000.000,00						175 Orang	110.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						110.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	245 Orang		133 Orang	154 Orang	110.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		175 Orang	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						4.561.186.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat Kab. Kebumen		4.905.953.047,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						4.561.186.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat Kab. Kebumen		4.905.953.047,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.025.586.000,00						3 Laporan	2.889.814.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	58 Unit		53 Unit	54 Unit	2.315.600.000,00						55 Unit	491.139.047,00	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						50.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2.315.600.000,00							491.139.047,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	58 Unit		53 Unit	54 Unit	2.315.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		55 Unit	491.139.047,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						1.025.586.000,00							2.889.814.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.025.586.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	2.889.814.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						33.600.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat, Investor dan Mitra Usaha Kab. Kebumen		48.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						33.600.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat, Investor dan Mitra Usaha Kab. Kebumen		48.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00						1 Laporan	33.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota						18.600.000,00							33.000.000,00	
		Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	33.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						4.561.186.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Wisatawan, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat Kab. Kebumen		4.905.953.047,00	
			Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata taman bumi (Geopark)	-		-	-	1.170.000.000,00						-	1.445.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0011	Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Taman Bumi (Geopark)						1.170.000.000,00							1.445.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata taman bumi (Geopark)	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata taman bumi (Geopark)	-		-	12 Dokumen	1.170.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	1.445.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						33.600.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat, Investor dan Mitra Usaha Kab. Kebumen		48.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	30 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
116.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**2.205.000.000,00**							**2.210.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemasaran Pariwisata						***2.205.000.000,00***							***2.210.000.000,00***	
			1.Persentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara	100 %		100 %	100 %	2.205.000.000,00						100 %	2.210.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2.205.000.000,00					Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara, Pelaku Industri Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat Kab. Kebumen		2.210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2.205.000.000,00					Wisatawan Nusantara, Wisatawan Mancanegara, Pelaku Industri Pariwisata, Lembaga/ Insitusi, Masyarakat Kab. Kebumen		2.210.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	2.205.000.000,00						9 Kegiatan	2.210.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						2.205.000.000,00							2.210.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Kegiatan		8 Kegiatan	12 Kegiatan	2.205.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		9 Kegiatan	2.210.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
117.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**260.000.000,00**							**265.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						***260.000.000,00***							***265.000.000,00***	
			1.Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	17.60 %		12.85 %	13.97 %	260.000.000,00						15.64 %	265.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						105.000.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Stakeholde, Insitusi/ Lembaga Kab. Kebumen		110.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						105.000.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata, Pelaku Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Stakeholde, Insitusi/ Lembaga Kab. Kebumen		110.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang		80 Orang	90 Orang	105.000.000,00						100 Orang	110.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						105.000.000,00							110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 Orang		80 Orang	90 Orang	105.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100 Orang	110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						155.000.000,00					Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, SDM Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Lembaga/ Institusi Kab. Kebumen		155.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreati						155.000.000,00					Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Komunitas Kreatif, SDM Ekonomi Kreatif, Masyarakat, Lembaga/ Institusi Kab. Kebumen		155.000.000,00	
			Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	18 Orang		15 Orang	15 Orang	155.000.000,00						15 Orang	155.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif						155.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	18 Orang		15 Orang	15 Orang	155.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		15 Orang	155.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**5.326.785.068,00**							**6.697.041.457,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.326.785.068,00**							**6.697.041.457,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**5.184.116.068,00**							**6.498.472.457,00**	
118.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.432.622.068,00**							**5.164.158.457,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***4.410.622.068,00***							***5.145.372.457,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	4.410.622.068,00						72.51 Nilai	5.145.372.457,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	4.410.622.068,00						90.50 Indeks	5.145.372.457,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.000.000,00					Disarpus, OPD dan masyarakat		33.372.231,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.000.000,00					Disarpus, OPD dan masyarakat		33.372.231,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.000.000,00						5 Dokumen	21.741.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00						4 Laporan	11.631.231,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.000.000,00							21.741.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Dokumen	21.741.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.000.000,00							11.631.231,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	11.631.231,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.421.400.068,00					ASN Disarpus		4.250.796.910,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.421.400.068,00					ASN Disarpus		4.250.796.910,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.085.000,00						8 Dokumen	16.955.408,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.409.315.068,00						32 Orang/bulan	4.233.841.502,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.409.315.068,00							4.233.841.502,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.409.315.068,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Orang/bulan	4.233.841.502,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.085.000,00							16.955.408,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.085.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		8 Dokumen	16.955.408,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						31.422.000,00					Pegawai Disarpus		60.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						31.422.000,00					Pegawai Disarpus		60.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang		48 Orang	48 Orang	31.422.000,00						48 Orang	60.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						31.422.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang		48 Orang	44 Orang	31.422.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		48 Orang	60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.000.000,00					Disarpus		127.364.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						76.000.000,00					Disarpus		127.364.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	2.000.000,00						18 Dokumen	2.424.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	5.959.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	32.000.000,00						40 Laporan	41.412.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.000.000,00						12 Paket	18.786.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.000.000,00						12 Paket	18.786.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00						12 Paket	12.625.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10.000.000,00						8 Paket	27.372.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							27.372.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		8 Paket	27.372.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						11.000.000,00							18.786.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	18.786.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							12.625.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	12.625.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							2.424.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		18 Dokumen	2.424.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.000.000,00							18.786.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	11.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	18.786.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						32.000.000,00							41.412.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	35 Laporan	32.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Laporan	41.412.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							5.959.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Dokumen	5.959.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.699.000,00					Disarpus		28.482.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.699.000,00					Disarpus		28.482.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.699.000,00						5 Unit	28.482.000,00	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.699.000,00							28.482.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	3 Unit	30.699.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Unit	28.482.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						744.601.000,00					Disarpus		533.866.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						744.601.000,00					Disarpus		533.866.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	228.000.000,00						12 Laporan	261.186.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	515.601.000,00						12 Laporan	270.680.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						228.000.000,00							261.186.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	228.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	261.186.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						515.601.000,00							270.680.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	515.601.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	270.680.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.500.000,00					Disarpus		130.277.316,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100.500.000,00					Disarpus		130.277.316,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	24.500.000,00						2 Unit	37.976.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	59.000.000,00						12 Unit	66.458.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	4.000.000,00						50 Unit	7.070.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	13.000.000,00						35 Unit	18.773.316,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						59.000.000,00							66.458.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	15 Unit	59.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Unit	66.458.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.000.000,00							7.070.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	43 Unit	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Unit	7.070.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.000.000,00							18.773.316,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	25 Unit	13.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		35 Unit	18.773.316,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.500.000,00							37.976.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	24.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	37.976.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
119.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**705.009.000,00**							**1.259.877.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan perpustakaan						***695.009.000,00***							***1.259.877.000,00***	
			2.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	81.30 Nilai		80.90 Nilai	81.00 Nilai	695.009.000,00						81.10 Nilai	1.259.877.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						332.387.000,00					Perpustakaan Binaan, Pustakawan Disarpus, Pengelola Perpustakaan		655.894.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						332.387.000,00					Perpustakaan Binaan, Pustakawan Disarpus, Pengelola Perpustakaan		655.894.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	400 Eksemplar		400 Eksemplar	400 Eksemplar	132.887.000,00						400 Eksemplar	339.663.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	10.000.000,00						1 Perpustakaan	28.078.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4 Perpustakaan		4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	129.500.000,00						4 Perpustakaan	161.903.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 Orang		90 Orang	90 Orang	60.000.000,00						90 Orang	126.250.000,00	
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						129.500.000,00							161.903.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	4 Perpustakaan		4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	129.500.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Perpustakaan	161.903.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00							126.250.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90 Orang		90 Orang	90 Orang	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		90 Orang	126.250.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						132.887.000,00							339.663.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	400 Eksemplar		400 Eksemplar	150 Eksemplar	132.887.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		400 Eksemplar	339.663.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						10.000.000,00							28.078.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Perpustakaan	28.078.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						372.622.000,00					Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, sekolah, desa/ kelurahan		603.983.000,00	
		Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						372.622.000,00					Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, sekolah, desa/ kelurahan		603.983.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	7.575.000,00						1 Orang	7.575.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan		5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	342.220.000,00						5 Perpustakaan	549.443.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	75 Lokus		64 Lokus	75 Lokus	10.000.000,00						75 Lokus	34.138.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	12.827.000,00						5 Orang	12.827.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.575.000,00							7.575.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	7.575.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Orang	7.575.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						342.220.000,00							549.443.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	5 Perpustakaan		5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	342.220.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Perpustakaan	549.443.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						12.827.000,00							12.827.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang		5 Orang	6 Orang	12.827.000,00	Kab. Kebumen	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Orang	12.827.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						10.000.000,00							34.138.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	75 Lokus		64 Lokus	62 Lokus	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		75 Lokus	34.138.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
120.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**46.485.000,00**							**74.437.000,00**	
		Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno						***46.485.000,00***							***74.437.000,00***	
			1.Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	100.00 %		100.00 %	100.00 %	46.485.000,00						100.00 %	74.437.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						46.485.000,00					Masyarakat umum		74.437.000,00	
		Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						46.485.000,00					Masyarakat umum		74.437.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang		1 Orang	1 Orang	43.020.000,00						1 Orang	70.801.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	3.465.000,00						1 Eksemplar	3.636.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						43.020.000,00							70.801.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang		1 Orang	1 Orang	43.020.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Orang	70.801.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						3.465.000,00							3.636.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	3.465.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Eksemplar	3.636.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**142.669.000,00**							**198.569.000,00**	
121.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**124.669.000,00**							**168.569.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan pencipta Arsip yang menerapkan arsip baku						***124.669.000,00***							***168.569.000,00***	
			1.Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	98.00 Indeks		97.00 Indeks	97.20 Indeks	124.669.000,00						97.40 Indeks	168.569.000,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						52.000.000,00					Disarpus, Pencipta Arsip		73.700.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						52.000.000,00					Disarpus, Pencipta Arsip		73.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	25.500.000,00						50 Laporan	31.500.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50 Berkas		50 Berkas	50 Berkas	4.020.000,00						50 Berkas	5.800.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2 Berkas		2 Berkas	2 Berkas	22.480.000,00						2 Berkas	36.400.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						4.020.000,00							5.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	50 Berkas		50 Berkas	50 Berkas	4.020.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Berkas	5.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						22.480.000,00							36.400.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2 Berkas		2 Berkas	50 Berkas	22.480.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Berkas	36.400.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						25.500.000,00							31.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	25.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Laporan	31.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						31.200.000,00					Disarpus, Pencipta Arsip		31.200.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						31.200.000,00					Disarpus, Pencipta Arsip		31.200.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	4 Arsip		4 Arsip	4 Arsip	31.200.000,00						4 Arsip	31.200.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						31.200.000,00							31.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	4 Arsip		4 Arsip	501 Arsip	31.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Arsip	31.200.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						41.469.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		63.669.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						41.469.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		63.669.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	4.669.000,00						5 Laporan	4.669.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	24 Pengguna		24 Pengguna	24 Pengguna	36.800.000,00						24 Pengguna	59.000.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						36.800.000,00							59.000.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	24 Pengguna		24 Pengguna	120 Pengguna	36.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		24 Pengguna	59.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						4.669.000,00							4.669.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	4.669.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Laporan	4.669.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
122.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**16.000.000,00**							**27.000.000,00**	
		Terlaksananya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip						***7.000.000,00***							***23.000.000,00***	
			1.Jumlah kegiatan penyelamatan arsip yang dilaksanakan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	7.000.000,00						5 Kegiatan	23.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						5.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		7.500.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						5.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		7.500.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas		500 Berkas	500 Berkas	5.000.000,00						500 Berkas	7.500.000,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	500 Berkas		500 Berkas	500 Berkas	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		500 Berkas	7.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		8.500.000,00	
		Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		8.500.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip		50 Arsip	50 Arsip	5.000.000,00						50 Arsip	8.500.000,00	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						5.000.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	50 Arsip		50 Arsip	50 Arsip	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Arsip	8.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Arsip		2 Arsip	2 Arsip	2.000.000,00						2 Arsip	4.000.000,00	
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						2.000.000,00							4.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Arsip		2 Arsip	2 Arsip	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Arsip	4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.000.000,00	
		Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		4.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300 Arsip		300 Arsip	300 Arsip	2.000.000,00						300 Arsip	4.000.000,00	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						2.000.000,00							4.000.000,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	300 Arsip		300 Arsip	300 Arsip	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		300 Arsip	4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	
		Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 Arsip		1 Arsip	1 Arsip	2.000.000,00						1 Arsip	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 Arsip		1 Arsip	1 Arsip	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Arsip	3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
123.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						**2.000.000,00**							**3.000.000,00**	
		Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip						***2.000.000,00***							***3.000.000,00***	
			2.Jumlah Regulasi Akses Izin Penggunaan Arsip Tertutup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kebumen		3.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip		1 Arsip	1 Arsip	2.000.000,00						1 Arsip	3.000.000,00	
	2.24.04.2.01.0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip		1 Arsip	1 Arsip	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Arsip	3.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS TENAGA KERJA						**13.398.506.048,00**							**9.196.813.965,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.345.506.048,00**							**9.124.813.965,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**13.345.506.048,00**							**9.124.813.965,00**	
124.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.973.612.048,00**							**7.596.156.965,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***6.973.612.048,00***							***7.596.156.965,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	6.973.612.048,00						72.51 Nilai	7.596.156.965,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.45 Indeks	90.50 Indeks	6.973.612.048,00						90.55 Indeks	7.596.156.965,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.636.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		42.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.636.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	27.136.000,00						10 Dokumen	29.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	13.500.000,00						11 Laporan	13.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						27.136.000,00							29.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	6 Dokumen	27.136.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		10 Dokumen	29.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.500.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan		11 Laporan	8 Laporan	13.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		11 Laporan	13.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.150.324.048,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		6.941.709.269,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.150.324.048,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		6.941.709.269,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.205.000,00						12 Dokumen	21.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.129.119.048,00						48 Orang/bulan	6.920.709.269,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.129.119.048,00							6.920.709.269,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan		48 Orang/bulan	1152 Orang/bulan	6.129.119.048,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		48 Orang/bulan	6.920.709.269,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.205.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	55 Dokumen	21.205.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		12 Dokumen	21.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.580.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		65.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						63.580.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		65.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.000,00						12 Dokumen	2.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00						12 Laporan	27.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.000.000,00						12 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.500.000,00						3 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.700.000,00						4 Paket	2.700.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.300.000,00						4 Paket	7.500.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.300.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		4 Paket	7.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		12 Paket	12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.700.000,00							2.700.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		4 Paket	2.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.880.000,00							2.900.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		12 Dokumen	2.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.500.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		3 Paket	8.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						27.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		12 Laporan	27.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.200.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	4.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		1 Dokumen	4.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.300.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		60.600.696,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.300.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		60.600.696,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		5 Unit	3 Unit	33.300.000,00						4 Unit	60.600.696,00	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.300.000,00							60.600.696,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		5 Unit	8 Unit	33.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		4 Unit	60.600.696,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						507.772.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		278.739.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						507.772.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		278.739.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	361.772.000,00						12 Laporan	122.739.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00						4 Laporan	1.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		4 Laporan	1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						145.000.000,00							155.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		12 Laporan	155.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						361.772.000,00							122.739.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	361.772.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		12 Laporan	122.739.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		208.008.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						178.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Terkait		208.008.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	62.000.000,00						2 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	90.000.000,00						29 Unit	93.808.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit		55 Unit	55 Unit	4.000.000,00						55 Unit	5.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		33 Unit	33 Unit	22.000.000,00						30 Unit	19.000.000,00	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90.000.000,00							93.808.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	30 Unit	90.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		29 Unit	93.808.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.000.000,00							5.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	55 Unit		55 Unit	55 Unit	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		55 Unit	5.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						22.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		33 Unit	33 Unit	22.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		30 Unit	19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						62.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	62.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		2 Unit	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
125.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**15.000.000,00**							**59.000.000,00**	
		Terlaksananya Perencanaan Tenaga Kerja						***15.000.000,00***							***59.000.000,00***	
			1.Persentase Perusahaan besar yang telah menyusun RTK Mikro	100.00 %		35.48 %	51.61 %	15.000.000,00						67.74 %	59.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						15.000.000,00					Perusahaan di Kabupaten Kebumen		59.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						15.000.000,00					Perusahaan di Kabupaten Kebumen		59.000.000,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	6 Orang		7 Orang	6 Orang	15.000.000,00						6 Orang	59.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						15.000.000,00							59.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	6 Orang		7 Orang	6 Orang	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		6 Orang	59.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
126.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**734.438.000,00**							**735.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja						***734.438.000,00***							***717.000.000,00***	
			1.Persentase lembaga LPK yang berizin	100.00 %		100.00 %	100.00 %	734.438.000,00						100.00 %	717.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						701.438.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		699.000.000,00	
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	37.000.000,00						2 Kesepakatan	67.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas						37.000.000,00							67.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	1 Kesepakatan	37.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		2 Kesepakatan	67.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						13.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		18.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						13.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		18.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	13.000.000,00						30 Lembaga	18.000.000,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						13.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	30 Lembaga		30 Lembaga	40 Lembaga	13.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		30 Lembaga	18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		18.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						20.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		1 Dokumen	18.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						701.438.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		699.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						701.438.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		699.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	664.438.000,00						-	632.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						664.438.000,00							632.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	312 Orang	664.438.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		-	632.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
127.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**246.000.000,00**							**310.657.000,00**	
		Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja						***186.000.000,00***							***310.657.000,00***	
			1.Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	29.02 %		27.02 %	27.52 %	186.000.000,00						28.02 %	310.657.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						174.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		225.657.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						174.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		225.657.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang		30 Orang	30 Orang	20.000.000,00						30 Orang	25.637.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang		30 Orang	30 Orang	60.000.000,00						30 Orang	72.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3567 Orang		2767 Orang	2967 Orang	94.000.000,00						3167 Orang	128.020.000,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						94.000.000,00							128.020.000,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	3567 Orang		2767 Orang	2967 Orang	94.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		3167 Orang	128.020.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						20.000.000,00							25.637.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	30 Orang		30 Orang	65 Orang	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		30 Orang	25.637.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						60.000.000,00							72.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang		30 Orang	25 Orang	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		30 Orang	72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						72.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		85.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						72.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		85.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	550 Orang		300 Orang	350 Orang	60.000.000,00						400 Orang	70.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	550 Orang		300 Orang	111 Orang	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		400 Orang	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						72.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		85.000.000,00	
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-		-	-	12.000.000,00						-	15.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0004	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA Layanan Terpadu	-		-	1400 Orang	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		-	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
128.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**5.376.456.000,00**							**424.000.000,00**	
		Meningkatnya Hubungan Industrial						***5.376.456.000,00***							***424.000.000,00***	
			1.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	54.29 (%)		44.95 (%)	47.27 (%)	5.376.456.000,00						49.72 (%)	424.000.000,00	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						5.376.456.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		424.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						5.376.456.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		424.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		10 Perkara	10 Perkara	99.000.000,00						10 Perkara	114.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	5.277.456.000,00						1500 Orang	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						99.000.000,00							114.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara		10 Perkara	6 Perkara	99.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		10 Perkara	114.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						5.277.456.000,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1500 Orang		1500 Orang	26.175 Orang	5.277.456.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		1500 Orang	310.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**53.000.000,00**							**72.000.000,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**8.000.000,00**							**10.000.000,00**	
129.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**						**8.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Energi Baru Terbarukan						***8.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Persentase potensi pemanfaatan EBT	100.00 %		100.00 %	100.00 %	8.000.000,00						100.00 %	10.000.000,00	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan PelaksanaanPerizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyediaan keberlanjutan dan keandalan pasokan energi serta utilitas publik untuk mendukung operasional sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**45.000.000,00**							**62.000.000,00**	
130.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**45.000.000,00**							**62.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi						***45.000.000,00***							***62.000.000,00***	
			1.Persentase transmigran yang berhasil/menetap	100.00 %		100.00 %	100.00 %	45.000.000,00						100.00 %	62.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		62.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		62.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga		1 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	45.000.000,00						1 Kepala Keluarga	62.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00							62.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga		1 Kepala Keluarga	1 Kepala Keluarga	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penguatan kualitas tenaga kerja dalam rangka peningkatan penempatan dan keterserapan tenaga kerja melalui program link and match		1 Kepala Keluarga	62.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		SEKRETARIAT DAERAH						**49.724.877.644,00**							**66.830.299.885,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**49.724.877.644,00**							**66.830.299.885,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**49.724.877.644,00**							**66.830.299.885,00**	
131.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**31.400.680.644,00**							**33.037.945.885,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***30.413.680.644,00***							***32.048.945.885,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.72 Nilai		72.64 Nilai	72.66 Nilai	30.413.680.644,00						72.68 Nilai	32.048.945.885,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	30.413.680.644,00						90.50 Indeks	32.048.945.885,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.796.580.644,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		21.884.217.676,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.796.580.644,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		21.884.217.676,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	127.909.000,00						4 Dokumen	129.373.657,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/bulan		161 Orang/bulan	161 Orang/bulan	20.668.671.644,00						161 Orang/bulan	21.754.844.019,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.668.671.644,00							21.754.844.019,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/bulan		161 Orang/bulan	161 Orang/bulan	20.668.671.644,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		161 Orang/bulan	21.754.844.019,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						127.909.000,00							129.373.657,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	127.909.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	129.373.657,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						170.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		183.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						170.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		183.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00						6 Dokumen	29.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		300 Orang	300 Orang	100.000.000,00						300 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00						10 Orang	54.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						20.000.000,00							29.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	29.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Orang	54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang		300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300 Orang	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.133.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		2.150.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.133.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		2.150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	37.000.000,00						12 Dokumen	39.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	950.000.000,00						12 Laporan	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	950.000.000,00						12 Paket	950.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	37.000.000,00						4 Paket	39.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	42.000.000,00						4 Paket	44.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	102.000.000,00						4 Paket	104.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						102.000.000,00							104.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	102.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	104.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						950.000.000,00							950.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	950.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						42.000.000,00							44.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	42.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	44.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						37.000.000,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						37.000.000,00							39.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	37.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	39.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						950.000.000,00							950.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	950.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						608.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		657.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						608.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		657.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	103.000.000,00						5 Unit	105.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	255.000.000,00						15 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	250.000.000,00						30 Unit	252.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						103.000.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	103.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						255.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	255.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						250.000.000,00							252.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Unit	252.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.880.557.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		2.978.332.809,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.880.557.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		2.978.332.809,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.255.000.000,00						12 Laporan	1.260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.556.657.000,00						12 Laporan	1.644.332.809,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.400.000,00						12 Laporan	64.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.255.000.000,00							1.260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.255.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.400.000,00							64.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	64.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.556.657.000,00							1.644.332.809,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.556.657.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.644.332.809,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.527.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		1.629.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.527.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		1.629.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	450.000.000,00						4 Unit	525.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	113 Unit		113 Unit	113 Unit	900.000.000,00						113 Unit	920.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	105.000.000,00						20 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	72.000.000,00						25 Unit	74.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						900.000.000,00							920.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	113 Unit		113 Unit	113 Unit	900.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		113 Unit	920.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						105.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	200 Unit	105.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Unit	110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.000.000,00							74.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	72.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Unit	74.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						450.000.000,00							525.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	450.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	525.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.361.543.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		1.596.395.400,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.361.543.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		1.596.395.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	939.064.000,00						12 Orang/Bulan	726.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	216.479.000,00						2 Orang/Bulan	664.395.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	6.000.000,00						2 Orang	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200.000.000,00						2 Paket	200.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						216.479.000,00							664.395.400,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	216.479.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang/Bulan	664.395.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang	6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						939.064.000,00							726.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan		12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	939.064.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Orang/Bulan	726.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						920.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		940.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						920.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		940.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	660.000.000,00						12 Paket	670.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	260.000.000,00						12 Paket	270.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						660.000.000,00							670.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	660.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	670.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						260.000.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	260.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						360.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		370.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi						360.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		370.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00						1 Dokumen	114.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00						1 Dokumen	99.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00						1 Laporan	157.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						110.000.000,00							114.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	114.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						155.000.000,00							157.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	155.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	157.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						95.000.000,00							99.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	99.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						644.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		650.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan						644.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	375.000.000,00						3 Laporan	377.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	142.000.000,00						2 Laporan	144.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	127.000.000,00						3 Laporan	129.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						375.000.000,00							377.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	375.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	377.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						142.000.000,00							144.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	142.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	144.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						127.000.000,00							129.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	127.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	129.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
132.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**16.881.000.000,00**							**32.202.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat						***16.786.000.000,00***							***32.014.000.000,00***	
			1.Indeks Kualitas Kebijakan	75.00 Indeks		70.00 Indeks	73.00 Indeks	16.786.000.000,00						73.00 Indeks	32.014.000.000,00	
			2.Indeks Zakat Nasional	0.71 Indeks		0.59 Indeks	0.62 Indeks	16.786.000.000,00						0.65 Indeks	32.014.000.000,00	
			3.Capaian Penerapan SPM Pemerintah Daerah	100.00 %		100.00 %	100.00 %	16.786.000.000,00						100.00 %	32.014.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						344.000.000,00					Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		422.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan						344.000.000,00					Sekretariat Daerah Kab. Kebumen		422.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	254.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000,00						1 Dokumen	84.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00						2 Dokumen	84.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						74.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						70.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						200.000.000,00							254.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	254.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						16.030.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		31.196.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						16.030.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		31.196.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.020.000.000,00						5 Dokumen	30.030.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	640.000.000,00						4 Dokumen	759.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	370.000.000,00						7 Dokumen	407.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						15.020.000.000,00							30.030.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.020.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	30.030.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						370.000.000,00							407.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	370.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	407.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						640.000.000,00							759.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	640.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	759.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						440.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		515.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						440.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		515.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus		12 Kasus	12 Kasus	250.000.000,00						12 Kasus	307.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen		550 Dokumen	550 Dokumen	95.000.000,00						550 Dokumen	104.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen		626 Dokumen	626 Dokumen	95.000.000,00						626 Dokumen	104.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						95.000.000,00							104.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	550 Dokumen		550 Dokumen	550 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		550 Dokumen	104.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						250.000.000,00							307.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus		12 Kasus	12 Kasus	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Kasus	307.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						95.000.000,00							104.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	626 Dokumen		626 Dokumen	626 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		626 Dokumen	104.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						67.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		69.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah						67.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		69.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	67.000.000,00						5 Dokumen	69.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						67.000.000,00							69.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	67.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	69.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
133.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.443.197.000,00**							**1.590.354.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian Dan Pembangunan Daerah						***1.443.197.000,00***							***1.590.354.000,00***	
			1.Indeks Tata Kelola Pengadaan	84.45 Indeks		84.37 Indeks	84.39 Indeks	1.443.197.000,00						84.41 Indeks	1.590.354.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						204.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		208.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan Perekonomian						204.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		208.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	127.000.000,00						2 Dokumen	129.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00						1 Laporan	79.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						127.000.000,00							129.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	127.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	129.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						77.000.000,00							79.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	79.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						235.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		239.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pembangunan						235.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		239.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	153.000.000,00						12 Laporan	155.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.000.000,00						12 Laporan	84.000.000,00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						82.000.000,00							84.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	82.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	84.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						153.000.000,00							155.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	153.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						612.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		743.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						612.000.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		743.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	72.000.000,00						4 Dokumen	74.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	340.000.000,00						2 Dokumen	412.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang		200 Orang	200 Orang	200.000.000,00						200 Orang	257.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						340.000.000,00							412.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	340.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	412.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						72.000.000,00							74.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	72.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	74.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						200.000.000,00							257.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang		200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		200 Orang	257.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						392.197.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		400.354.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						392.197.000,00					Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen		400.354.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00						1 Dokumen	24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00						1 Dokumen	9.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	362.697.000,00						1 Dokumen	366.854.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						362.697.000,00							366.854.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	362.697.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	366.854.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						7.500.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	9.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						22.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**57.181.910.002,00**							**101.643.144.294,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**57.181.910.002,00**							**101.643.144.294,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**57.181.910.002,00**							**101.643.144.294,00**	
134.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**40.916.805.002,00**							**76.298.465.247,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***40.831.805.002,00***							***41.428.139.247,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.90 Nilai		70.70 Nilai	70.75 Nilai	40.814.805.002,00						70.80 Nilai	41.401.139.247,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.80 Indeks		90.60 Indeks	90.65 Indeks	40.814.805.002,00						90.70 Indeks	41.401.139.247,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000,00					DPRD		27.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.000.000,00					DPRD		27.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen		5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	15.000.000,00						5.00 Dokumen	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Laporan		5.00 Laporan	5.00 Laporan	2.000.000,00						5.00 Laporan	3.000.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.00 Dokumen		5.00 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5.00 Dokumen	24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.00 Laporan		5.00 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5.00 Laporan	3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.313.918.002,00					DPRD		4.717.613.247,00	
		Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun						3.313.918.002,00					DPRD		4.717.613.247,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen		12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	50.000.000,00						12.00 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35.00 Orang/bulan		35.00 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	3.263.918.002,00						35 Orang/bulan	4.642.613.247,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.263.918.002,00							4.642.613.247,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35.00 Orang/bulan		35.00 Orang/bulan	576 Orang/bulan	3.263.918.002,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		35 Orang/bulan	4.642.613.247,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen		12.00 Dokumen	52 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12.00 Dokumen	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						115.000.000,00					DPRD		137.500.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						115.000.000,00					DPRD		137.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.00 Orang		35.00 Orang	35.00 Orang	20.000.000,00						35.00 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.00 Orang		10.00 Orang	10.00 Orang	95.000.000,00						10.00 Orang	97.500.000,00	
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						95.000.000,00							97.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.00 Orang		10.00 Orang	10 Orang	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10.00 Orang	97.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.00 Orang		35.00 Orang	47 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		35.00 Orang	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						273.000.000,00					DPRD		420.700.000,00	
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah						273.000.000,00					DPRD		420.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	3.000.000,00						1.00 Dokumen	3.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00						1.00 Dokumen	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	60.000.000,00						1.00 Laporan	82.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	1.00 Paket	90.000.000,00						1.00 Paket	140.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	1.00 Paket	30.000.000,00						1.00 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	1.00 Paket	80.000.000,00						1.00 Paket	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00						1.00 Paket	12.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Paket	12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						90.000.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	12 Paket	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Paket	140.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						80.000.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	12 Paket	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Paket	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	3.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Paket	55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							82.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	82.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	12.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						943.061.000,00					DPRD		640.500.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						943.061.000,00					DPRD		640.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	250.000.000,00						1.00 Laporan	320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	692.861.000,00						1.00 Laporan	320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	200.000,00						1.00 Laporan	500.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						200.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		1.00 Laporan	12 Laporan	200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00							320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						692.861.000,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	12 Laporan	692.861.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	320.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						433.500.000,00					DPRD		532.500.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						433.500.000,00					DPRD		532.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34.00 Unit		34.00 Unit	34.00 Unit	283.500.000,00						34.00 Unit	340.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	178.00 Unit		178.00 Unit	178.00 Unit	10.000.000,00						178.00 Unit	22.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00 Unit		100.00 Unit	100.00 Unit	30.000.000,00						100.00 Unit	50.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						283.500.000,00							340.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34.00 Unit		34.00 Unit	34 Unit	283.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		34.00 Unit	340.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00							22.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	178.00 Unit		178.00 Unit	178 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		178.00 Unit	22.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100.00 Unit		100.00 Unit	450 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100.00 Unit	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						35.050.326.000,00					DPRD		69.050.652.000,00	
		Terselenggaranya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD						35.050.326.000,00					DPRD		69.050.652.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50.00 Orang/Bulan		50.00 Orang/Bulan	50.00 Orang/Bulan	34.500.326.000,00						50.00 Orang/Bulan	34.500.326.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	5.00 Orang		5.00 Orang	5.00 Orang	50.000.000,00						5.00 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5.00 Paket		5.00 Paket	5.00 Paket	500.000.000,00						5.00 Paket	34.500.326.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						34.500.326.000,00							34.500.326.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50.00 Orang/Bulan		50.00 Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	34.500.326.000,00	Kab. Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50.00 Orang/Bulan	34.500.326.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						500.000.000,00							34.500.326.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5.00 Paket		5.00 Paket	5 Paket	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5.00 Paket	34.500.326.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	5.00 Orang		5.00 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5.00 Orang	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						771.000.000,00					DPRD		772.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD						771.000.000,00					DPRD		772.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	21.000.000,00						1.00 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	750.000.000,00						1.00 Laporan	750.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						21.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						750.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						433.500.000,00					DPRD		532.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	110.000.000,00						-	120.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						110.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	110.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
135.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**16.265.105.000,00**							**25.344.679.047,00**	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						***15.636.105.000,00***							***24.766.679.047,00***	
			1.Persentase pemenuhan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100.00 %		100.00 %	100.00 %	15.636.105.000,00						100.00 %	24.766.679.047,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.900.000.000,00					DPRD		4.325.000.000,00	
		Terfasilitasinya pembentukan dokumen peraturan daerah dan peraturan DPRD						2.900.000.000,00					DPRD		4.325.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.00 Dokumen		15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	2.000.000.000,00						15.00 Dokumen	3.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	500.000.000,00						1.00 Dokumen	525.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4.00 Dokumen		4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	240.000.000,00						4.00 Dokumen	240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.00 Dokumen		4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	160.000.000,00						4.00 Dokumen	160.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						500.000.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						2.000.000.000,00							3.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15.00 Dokumen		15.00 Dokumen	15 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15.00 Dokumen	3.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						160.000.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4.00 Dokumen		4.00 Dokumen	7 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4.00 Dokumen	160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						240.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4.00 Dokumen		4.00 Dokumen	7 Dokumen	240.000.000,00	Kab. Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4.00 Dokumen	240.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						680.000.000,00					DPRD		690.000.000,00	
		Terfasilitasinya pembahasan kebijakan anggaran						680.000.000,00					DPRD		690.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00						1.00 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00						1.00 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00						1.00 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00						1.00 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00						1.00 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00						1.00 Dokumen	115.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						95.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						95.000.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						150.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						150.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						95.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						95.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						99.000.000,00					DPRD		109.000.000,00	
		Terfasilitasinya pengawasan penyelenggaran pemerintahan						99.000.000,00					DPRD		109.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00						1.00 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00						1.00 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00						1.00 Laporan	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00						1.00 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00						1.00 Dokumen	105.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						95.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4.143.855.000,00					DPRD		4.484.000.000,00	
		Terfasilitasinya peningkatan kapasitas DPRD						4.143.855.000,00					DPRD		4.484.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6.00 Dokumen		6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	2.984.855.000,00						6.00 Dokumen	3.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	70.000.000,00						1.00 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00						1.00 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	95.000.000,00						1.00 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21.00 Orang		21.00 Orang	21.00 Orang	600.000.000,00						21.00 Orang	625.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7.00 Orang		7.00 Orang	7.00 Orang	294.000.000,00						7.00 Orang	294.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						2.984.855.000,00							3.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6.00 Dokumen		6.00 Dokumen	6 Dokumen	2.984.855.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6.00 Dokumen	3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						600.000.000,00							625.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21.00 Orang		21.00 Orang	13 Orang	600.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		21.00 Orang	625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						294.000.000,00							294.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7.00 Orang		7.00 Orang	7 Orang	294.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7.00 Orang	294.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						70.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						95.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						100.000.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1.505.000.000,00					DPRD		1.506.500.000,00	
		Terfasilitasinya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat						1.505.000.000,00					DPRD		1.506.500.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3.00 Dokumen		3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1.500.000.000,00						3.00 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.000.000,00						1.00 Dokumen	6.500.000,00	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						5.000.000,00							6.500.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	6.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3.00 Dokumen		3.00 Dokumen	3 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3.00 Dokumen	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						1.000.000,00					DPRD		1.000.000.000,00	
		Terfasilitasinya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD						1.000.000,00					DPRD		1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.000.000,00						1.00 Laporan	1.000.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						1.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						6.936.250.000,00					DPRD		13.230.179.047,00	
		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas DPRD						6.936.250.000,00					DPRD		13.230.179.047,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.000.000.000,00						1.00 Dokumen	1.800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.931.000.000,00						1.00 Dokumen	11.424.679.047,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.250.000,00						1.00 Laporan	5.500.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						5.931.000.000,00							11.424.679.047,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	5.931.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	11.424.679.047,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						5.250.000,00							5.500.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Laporan	5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.000.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1.00 Dokumen	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**10.578.680.451,00**							**11.242.947.431,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.578.680.451,00**							**11.242.947.431,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**9.418.680.451,00**							**9.933.947.431,00**	
136.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.880.680.451,00**							**8.040.947.431,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***7.795.680.451,00***							***8.017.947.431,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.02 Nilai		77.94 Nilai	77.96 Nilai	7.795.680.451,00						77.98 Nilai	8.017.947.431,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	7.795.680.451,00						90.50 Indeks	8.017.947.431,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.000.000,00					Bapperida dan stakeholder terkait		52.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.000.000,00					Bapperida dan stakeholder terkait		52.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	28.000.000,00						6 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00						8 Laporan	16.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						28.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		6 Dokumen	36.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		8 Laporan	16.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.415.474.451,00					Bapperida dan stakeholder terkait		6.454.447.431,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.415.474.451,00					Bapperida dan stakeholder terkait		6.454.447.431,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.078.000,00						6 Dokumen	23.619.353,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan		57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.395.396.451,00						57 Orang/bulan	6.430.828.078,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.395.396.451,00							6.430.828.078,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan		57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	6.395.396.451,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		57 Orang/bulan	6.430.828.078,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.078.000,00							23.619.353,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.078.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		6 Dokumen	23.619.353,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						31.000.000,00					Bapperida dan stakeholder terkait		35.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						31.000.000,00					Bapperida dan stakeholder terkait		35.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang		58 Orang	58 Orang	31.000.000,00						58 Orang	35.000.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						31.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang		58 Orang	58 Orang	31.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		58 Orang	35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						426.000.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		598.800.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						426.000.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		598.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	140.000.000,00						12 Paket	188.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	23.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	90.000.000,00						12 Paket	128.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00						4 Paket	23.000.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		4 Paket	23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						140.000.000,00							188.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	140.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		12 Paket	188.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						90.000.000,00							128.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		12 Paket	128.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		12 Dokumen	3.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							23.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		4 Paket	23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		12 Laporan	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		1 Dokumen	33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						246.000.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		335.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						246.000.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		335.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	70.000.000,00						20 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	14 Unit	101.000.000,00						10 Unit	130.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		8 Unit	7 Unit	75.000.000,00						7 Unit	85.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						70.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		20 Unit	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						101.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	14 Unit	101.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		10 Unit	130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						75.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		8 Unit	7 Unit	75.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		7 Unit	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						394.206.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		222.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						394.206.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		222.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00						12 Laporan	108.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	282.706.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00						4 Laporan	4.700.000,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		4 Laporan	4.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						108.000.000,00							108.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	108.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		12 Laporan	108.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						282.706.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	282.706.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		12 Laporan	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.000.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		343.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.000.000,00					Bapperida dan Stakeholder terkait		343.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit		36 Unit	36 Unit	155.000.000,00						36 Unit	160.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit		49 Unit	49 Unit	70.000.000,00						49 Unit	83.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit		36 Unit	36 Unit	155.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		36 Unit	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.000.000,00							83.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit		49 Unit	49 Unit	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		49 Unit	83.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		1 Unit	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
137.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**810.000.000,00**							**959.000.000,00**	
		Meningkatnya Konsistensi dan Kesinambungan Perencanaan dan Penganggaran						***730.000.000,00***							***850.000.000,00***	
			1.Persentase Konsistensi Program RKPD dengan APBD	100.00 %		100.00 %	100.00 %	730.000.000,00						100.00 %	850.000.000,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						650.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		741.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						650.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		741.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	240.000.000,00						2 Berita Acara	327.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00						2 Dokumen	414.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						240.000.000,00							327.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	4 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	240.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Berita Acara	327.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						410.000.000,00							414.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Dokumen	414.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		109.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		109.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	109.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00							109.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		1 Dokumen	109.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		109.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						80.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		109.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	109.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						80.000.000,00							109.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Laporan	109.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
138.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**728.000.000,00**							**934.000.000,00**	
		Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah						***568.000.000,00***							***825.000.000,00***	
			1.Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	100.00 %		100.00 %	100.00 %	568.000.000,00						100.00 %	825.000.000,00	
			2.Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00 %		100.00 %	100.00 %	568.000.000,00						100.00 %	825.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						348.000.000,00					Perangkat Daerah dan stake holder terkait		407.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia bersama OPD, KECAMATAN dan Stakeholder Terkait						348.000.000,00					Perangkat Daerah dan stake holder terkait		407.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	188.000.000,00						2 Dokumen	189.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	109.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	109.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						80.000.000,00							109.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Dokumen	109.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						80.000.000,00							109.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Laporan	109.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						188.000.000,00							189.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	188.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Dokumen	189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						240.000.000,00					Perangkat Daerah dan stake holder terkait		318.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						240.000.000,00					Perangkat Daerah dan stake holder terkait		318.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000,00						2 Dokumen	219.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	99.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						160.000.000,00							219.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	160.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Dokumen	219.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						80.000.000,00							99.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Dokumen	99.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						140.000.000,00					Perangkat Daerah dan stake holder terkait		209.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						140.000.000,00					Perangkat Daerah dan stake holder terkait		209.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00						2 Dokumen	209.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						140.000.000,00							209.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Dokumen	209.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**1.160.000.000,00**							**1.309.000.000,00**	
139.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**1.160.000.000,00**							**1.309.000.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Riset dan Inovasi Daerah						***1.160.000.000,00***							***1.309.000.000,00***	
			1.Persentase fasilitasi riset dan inovasi daerah	100.00 %		100.00 %	100.00 %	1.160.000.000,00						100.00 %	1.309.000.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						840.000.000,00					Perangkat Daerah, Perguran Tinggi dan Masyarakat Kabupaten Kebumen		842.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						840.000.000,00					Perangkat Daerah, Perguran Tinggi dan Masyarakat Kabupaten Kebumen		842.000.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	840.000.000,00						3 Laporan	842.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						840.000.000,00							842.000.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	840.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		3 Laporan	842.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						320.000.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen		467.000.000,00	
		Terlaksananya Invensi dan Inovasi						320.000.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Kebumen		467.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00						2 Laporan	219.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00						2 Laporan	114.000.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00						2 Laporan	134.000.000,00	
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						85.000.000,00							134.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Laporan	134.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						135.000.000,00							219.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	135.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Laporan	219.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah						100.000.000,00							114.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		2 Laporan	114.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**686.537.943.068,00**							**763.081.718.446,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**686.537.943.068,00**							**763.081.718.446,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**686.537.943.068,00**							**763.081.718.446,00**	
140.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.473.171.908,00**							**21.801.774.415,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***21.470.171.908,00***							***21.651.774.415,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.90 Nilai		76.70 Nilai	76.75 Nilai	21.470.171.908,00						76.80 Nilai	21.651.774.415,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	21.470.171.908,00						90.50 Indeks	21.651.774.415,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.758.000,00					-		106.079.951,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.758.000,00					-		106.079.951,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	38.758.000,00						5 Dokumen	73.827.551,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00						5 Laporan	32.252.400,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						38.758.000,00							73.827.551,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	38.758.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	73.827.551,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00							32.252.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Laporan	32.252.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.624.846.908,00					-		18.981.416.687,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.624.846.908,00					-		18.981.416.687,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	95.000.000,00						12 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		92 Orang/bulan	92 Orang/bulan	18.529.846.908,00						92 Orang/bulan	18.831.416.687,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.529.846.908,00							18.831.416.687,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan		92 Orang/bulan	89 Orang/bulan	18.529.846.908,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		92 Orang/bulan	18.831.416.687,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						95.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		102.232.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						70.000.000,00					-		102.232.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 Orang		92 Orang	92 Orang	70.000.000,00						92 Orang	102.232.000,00	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						70.000.000,00							102.232.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92 Orang		92 Orang	126 Orang	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		92 Orang	102.232.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						355.000.000,00					-		500.667.600,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						355.000.000,00					-		500.667.600,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00						12 Dokumen	7.282.800,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	4.161.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	110.000.000,00						12 Paket	166.464.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	83.232.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	40.800.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.000.000,00						1 Paket	18.727.200,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.000.000,00							18.727.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	18.727.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						110.000.000,00							166.464.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	110.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	166.464.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							40.800.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	40.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.000.000,00							7.282.800,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	7.282.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						50.000.000,00							83.232.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	83.232.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						140.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	180.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							4.161.600,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.161.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						454.000.000,00					-		262.445.536,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						454.000.000,00					-		262.445.536,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00						4 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	4 Unit	359.000.000,00						5 Unit	157.445.536,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	4 Unit	85.000.000,00						4 Unit	85.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						359.000.000,00							157.445.536,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	3 Unit	359.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	157.445.536,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						85.000.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	4 Unit	85.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.441.567.000,00					-		1.391.499.841,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.441.567.000,00					-		1.391.499.841,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	290.000.000,00						12 Laporan	316.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.148.567.000,00						12 Laporan	1.070.097.841,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00						12 Laporan	5.202.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							5.202.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	5.202.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						290.000.000,00							316.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	290.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	316.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.148.567.000,00							1.070.097.841,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.148.567.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	1.070.097.841,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						469.000.000,00					-		457.432.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						469.000.000,00					-		457.432.800,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	170.000.000,00						2 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	240.000.000,00						40 Unit	246.372.800,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	59.000.000,00						20 Unit	61.060.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						240.000.000,00							246.372.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	240.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		40 Unit	246.372.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						59.000.000,00							61.060.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	59.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Unit	61.060.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						170.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	170.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
141.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**659.673.993.160,00**							**735.164.990.031,00**	
		Meningkatnya tata kelola keuangan daerah						***659.518.993.160,00***							***735.083.390.031,00***	
			1.Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	96.20 %		95.40 %	95.60 %	659.518.993.160,00						95.80 %	735.083.390.031,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						835.000.000,00					-		875.256.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						835.000.000,00					-		875.256.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	41.616.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00						2 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	71.000.000,00						2 Dokumen	71.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	117.300.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	279.000.000,00						2 Dokumen	279.120.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	245.000.000,00						2 Dokumen	245.820.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						110.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						71.000.000,00							71.400.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	71.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						279.000.000,00							279.120.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	279.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	279.120.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						245.000.000,00							245.820.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	245.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	245.820.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						100.000.000,00							117.300.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	117.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						30.000.000,00							41.616.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	41.616.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						360.000.000,00					-		528.740.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						360.000.000,00					-		528.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	221 Dokumen		221 Dokumen	221 Dokumen	90.000.000,00						221 Dokumen	161.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	60.000.000,00						22 Dokumen	81.280.000,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41 Laporan		41 Laporan	41 Laporan	65.000.000,00						41 Laporan	94.540.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	81.600.000,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	95.000.000,00						3 Dokumen	110.160.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						90.000.000,00							161.160.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	221 Dokumen		221 Dokumen	221 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		221 Dokumen	161.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						65.000.000,00							94.540.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	41 Laporan		41 Laporan	41 Laporan	65.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		41 Laporan	94.540.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						60.000.000,00							81.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		22 Dokumen	81.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						95.000.000,00							110.160.000,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	110.160.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							81.600.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100 Orang	81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						230.000.000,00					-		400.234.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						230.000.000,00					-		400.234.000,00	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga		37 Lembaga	37 Lembaga	30.000.000,00						37 Lembaga	81.600.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	58.534.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	60.000.000,00						17 Laporan	80.580.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	35.000.000,00						50 Orang	92.820.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00						2 Dokumen	86.700.000,00	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						60.000.000,00							80.580.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		17 Laporan	80.580.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						40.000.000,00							58.534.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	58.534.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						65.000.000,00							86.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	86.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						35.000.000,00							92.820.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Orang	92.820.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						30.000.000,00							81.600.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	37 Lembaga		37 Lembaga	37 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		37 Lembaga	81.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						658.248.993.160,00					-		733.360.760.031,00	
		Tersusunnya Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						658.248.993.160,00					-		733.360.760.031,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.112.627.160,00						1 Laporan	710.025.611.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.656.366.000,00						1 Laporan	21.335.148.231,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.480.000.000,00						1 Laporan	2.000.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						620.112.627.160,00							710.025.611.800,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.112.627.160,00	Kab. Kebumen	Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	710.025.611.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						9.480.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.480.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						28.656.366.000,00							21.335.148.231,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.656.366.000,00	Kab. Kebumen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	21.335.148.231,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
142.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**680.000.000,00**							**1.201.952.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola Barang Milik Daerah						***680.000.000,00***							***1.201.952.000,00***	
			1.Persentase Laporan BMD yang disusun sesuai dengan ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	680.000.000,00						100.00 %	1.201.952.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						680.000.000,00					-		1.201.952.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah						680.000.000,00					-		1.201.952.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00						5 Dokumen	120.686.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	390.000.000,00						4 Laporan	405.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						3 Laporan	504.980.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	40.000.000,00						100 Orang	83.232.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00						2 Dokumen	87.393.600,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						45.000.000,00							87.393.600,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	87.393.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						150.000.000,00							504.980.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	504.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						390.000.000,00							405.660.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	390.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	405.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						55.000.000,00							120.686.400,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	120.686.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						40.000.000,00							83.232.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	50 Orang	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100 Orang	83.232.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
143.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**4.710.778.000,00**							**4.913.002.000,00**	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***4.710.778.000,00***							***4.808.962.000,00***	
			1.Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100.00 %		100.00 %	100.00 %	4.710.778.000,00						100.00 %	4.808.962.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.710.778.000,00					-		4.913.002.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						4.710.778.000,00					-		4.913.002.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00						8 Dokumen	124.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.105.778.000,00						8 Dokumen	3.190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00						2 Dokumen	104.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1400500 Dokumen		1398345 Dokumen	1399000 Dokumen	380.000.000,00						1399500 Dokumen	395.352.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	60.020.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	95.000.000,00						8 Laporan	104.040.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	900.000.000,00						2 Laporan	905.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	30.510.000,00	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						100.000.000,00							124.040.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Dokumen	124.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						900.000.000,00							905.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	900.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	905.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						95.000.000,00							104.040.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	104.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						380.000.000,00							395.352.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1400500 Dokumen		1398345 Dokumen	1399500 Dokumen	380.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1399500 Dokumen	395.352.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						3.105.778.000,00							3.190.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.105.778.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Dokumen	3.190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						70.000.000,00							104.040.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	104.040.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						45.000.000,00							60.020.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	60.020.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						15.000.000,00							30.510.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	30.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**8.737.466.798,00**							**37.469.593.405,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**8.737.466.798,00**							**37.469.593.405,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**7.363.464.798,00**							**34.727.593.405,00**	
144.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.473.464.798,00**							**33.255.374.405,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***6.468.464.798,00***							***33.255.374.405,00***	
			0.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.30 Nilai		71.50 Nilai	71.70 Nilai	6.468.464.798,00						71.90 Nilai	33.255.374.405,00	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	6.468.464.798,00						90.50 Indeks	33.255.374.405,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		39.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		39.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	29.000.000,00						8 Dokumen	29.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	10.000.000,00						9 Laporan	10.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.000.000,00							29.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	6 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		8 Dokumen	29.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan		9 Laporan	8 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		9 Laporan	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.872.264.798,00					ASN di BKPSDM Kabupaten Kebumen		32.577.705.994,00	
		Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.872.264.798,00					ASN di BKPSDM Kabupaten Kebumen		32.577.705.994,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	21.000.000,00						7 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.851.264.798,00						50 Orang/bulan	32.555.705.994,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.851.264.798,00							32.555.705.994,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.851.264.798,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang/bulan	32.555.705.994,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						21.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	3 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		7 Dokumen	22.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.000.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		53.000.000,00	
		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						45.000.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		53.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	45.000.000,00						50 Orang	53.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						45.000.000,00							53.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang	53.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						118.285.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		133.400.000,00	
		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						118.285.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		133.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	43.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.000.000,00						12 Paket	27.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00						12 Paket	25.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	19.285.000,00						12 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.300.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.300.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Paket	5.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	27.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.285.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	19.285.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Dokumen	3.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							25.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Paket	25.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							43.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	43.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Dokumen	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						44.415.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		46.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						44.415.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		46.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	7 Unit	44.415.000,00						4 Unit	46.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44.415.000,00							46.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	7 Unit	44.415.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Unit	46.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						191.500.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		202.268.411,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						191.500.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		202.268.411,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00						12 Laporan	160.563.411,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	39.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00						12 Laporan	2.205.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							2.205.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	2.205.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						160.000.000,00							160.563.411,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	160.563.411,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.000.000,00							39.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	39.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		203.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		203.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	2 Unit	48.000.000,00						2 Unit	48.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	35.000.000,00						22 Unit	38.500.000,00	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		22 Unit	38.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						48.000.000,00							48.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	2 Unit	48.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	48.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						163.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		203.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	80.000.000,00						-	116.500.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00							116.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	23 Unit	80.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	116.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
145.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**890.000.000,00**							**1.472.219.000,00**	
		Meningkatnya Kinerja ASN dengan predikat minimal baik						***855.000.000,00***							***1.472.219.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Kinerja ASN dengan Predikat Minimal Baik	98.65 %		98.25 %	98.35 %	855.000.000,00						98.45 %	1.472.219.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						370.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		759.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						370.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		759.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	610 Dokumen		610 Dokumen	610 Dokumen	85.000.000,00						610 Dokumen	142.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00						12 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00						3 Dokumen	580.500.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						250.000.000,00							580.500.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Dokumen	580.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						85.000.000,00							142.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	610 Dokumen		610 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		610 Dokumen	142.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						35.000.000,00							36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Dokumen	36.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						395.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		559.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN						395.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		559.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	95.000.000,00						3 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00						6 Dokumen	401.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						95.000.000,00							158.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Dokumen	158.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						300.000.000,00							401.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Dokumen	401.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						45.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		57.219.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN						45.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		57.219.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang		200 Orang	200 Orang	15.000.000,00						200 Orang	20.219.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	30.000.000,00						150 Orang	37.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						30.000.000,00							37.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		150 Orang	37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						15.000.000,00							20.219.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang		200 Orang	200 Orang	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		200 Orang	20.219.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						80.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		97.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						80.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		97.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	53.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00						6 Dokumen	44.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						35.000.000,00							44.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	44.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						45.000.000,00							53.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	53.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**1.374.002.000,00**							**2.742.000.000,00**	
146.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**1.374.002.000,00**							**2.742.000.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN						***1.374.002.000,00***							***2.742.000.000,00***	
			1.Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45.50 %		45.10 %	70 %	1.374.002.000,00						45.30 %	2.742.000.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						175.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		176.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis						175.000.000,00					ASN Kabupaten Kebumen		176.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	220 Orang		220 Orang	220 Orang	175.000.000,00						220 Orang	176.000.000,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						175.000.000,00							176.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	220 Orang		220 Orang	110 Orang	175.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		220 Orang	176.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.199.002.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		2.566.000.000,00	
		Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						1.199.002.000,00					ASN BKPSDM Kabupaten Kebumen		2.566.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.199.002.000,00						5 Laporan	2.566.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.199.002.000,00							2.566.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1.199.002.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Laporan	2.566.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH						**25.723.538.819,00**							**27.652.806.385,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.723.538.819,00**							**27.652.806.385,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**25.723.538.819,00**							**27.652.806.385,00**	
147.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.593.538.819,00**							**13.533.116.385,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***13.407.038.819,00***							***13.512.116.385,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.50 Nilai		78.30 Nilai	78.35 Nilai	13.407.038.819,00						78.40 Nilai	13.512.116.385,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	13.407.038.819,00						90.50 Indeks	13.512.116.385,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.000.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		56.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.000.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		56.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	34.000.000,00						6 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00						8 Laporan	21.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						34.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		6 Dokumen	35.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		8 Laporan	21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.994.047.819,00					ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		9.934.204.385,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.994.047.819,00					ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		9.934.204.385,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	19.084.000,00						8 Dokumen	19.931.264,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	9.974.963.819,00						72 Orang/bulan	9.914.273.121,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.974.963.819,00							9.914.273.121,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan		72 Orang/bulan	70 Orang/bulan	9.974.963.819,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		72 Orang/bulan	9.914.273.121,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						19.084.000,00							19.931.264,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	19.084.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		8 Dokumen	19.931.264,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.260.552.000,00					ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		1.265.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.260.552.000,00					ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		1.265.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72 Orang		24 Orang	72 Orang	1.260.552.000,00						72 Orang	1.265.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.260.552.000,00							1.265.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72 Orang		24 Orang	70 Orang	1.260.552.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		72 Orang	1.265.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						306.500.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		395.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						306.500.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		395.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	180.000.000,00						11 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	25.000.000,00						11 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	53.000.000,00						11 Paket	56.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	15.750.000,00						11 Paket	19.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.750.000,00						5 Paket	21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.750.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		5 Paket	21.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		11 Paket	30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.750.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	15.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		11 Paket	19.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		12 Dokumen	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						53.000.000,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	53.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		11 Paket	56.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						180.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	180.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		11 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.500.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		12 Dokumen	9.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						680.800.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		1.171.622.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						680.800.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		1.171.622.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		150 Unit	20 Unit	110.000.000,00						15 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		63 Unit	20 Unit	337.787.000,00						10 Unit	762.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	3 Unit	233.013.000,00						2 Unit	209.622.000,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						110.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		150 Unit	72 Unit	110.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		15 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						337.787.000,00							762.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		63 Unit	42 Unit	337.787.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		10 Unit	762.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						233.013.000,00							209.622.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	233.013.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		2 Unit	209.622.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.940.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		281.290.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.940.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		281.290.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00						12 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.440.000,00						12 Laporan	104.440.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00						12 Laporan	6.850.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.500.000,00							6.850.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	11 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		12 Laporan	6.850.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						165.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		12 Laporan	170.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.440.000,00							104.440.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.440.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		12 Laporan	104.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.024.699.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		430.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.024.699.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		430.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	779.699.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	180.000.000,00						28 Unit	195.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	15.000.000,00						10 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		34 Unit	34 Unit	50.000.000,00						34 Unit	60.000.000,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.000.000,00							195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	180.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		28 Unit	195.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		10 Unit	25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		34 Unit	34 Unit	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		34 Unit	60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						779.699.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	779.699.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		1 Unit	150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
148.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**7.460.000.000,00**							**9.039.690.000,00**	
		Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan						***6.660.000.000,00***							***9.039.690.000,00***	
			1.Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	87.50 %		85.50 %	86.00 %	6.660.000.000,00						86.50 %	9.039.690.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						5.860.000.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		7.019.690.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal						5.860.000.000,00					Perangkat Daerah, BUMD, Desa, BUMDes		7.019.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00						5 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	700.000.000,00						1 Kesepakatan	875.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	115 Laporan		40 Laporan	80 Laporan	1.775.000.000,00						104 Laporan	1.950.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33 Laporan		20 Laporan	25 Laporan	1.000.000.000,00						25 Laporan	1.390.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan		20 Laporan	35 Laporan	975.000.000,00						35 Laporan	1.075.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	900.000.000,00						20 Laporan	1.148.801.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan		4 Laporan	10 Laporan	260.000.000,00						12 Laporan	280.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						975.000.000,00							1.075.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	40 Laporan		20 Laporan	35 Laporan	975.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		35 Laporan	1.075.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						1.000.000.000,00							1.390.889.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	33 Laporan		20 Laporan	25 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		25 Laporan	1.390.889.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						260.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	16 Laporan		4 Laporan	10 Laporan	260.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		12 Laporan	280.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						900.000.000,00							1.148.801.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	25 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	900.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		20 Laporan	1.148.801.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						1.775.000.000,00							1.950.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	115 Laporan		40 Laporan	80 Laporan	1.775.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		104 Laporan	1.950.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						700.000.000,00							875.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	700.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		1 Kesepakatan	875.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						250.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		5 Dokumen	300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.600.000.000,00					Perangkat Daerah, ASN, Masyarakat Kab. Kebumen		2.020.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						1.600.000.000,00					Perangkat Daerah, ASN, Masyarakat Kab. Kebumen		2.020.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	800.000.000,00						25 Laporan	995.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	800.000.000,00						2 Laporan	1.025.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						800.000.000,00							1.025.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	800.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		2 Laporan	1.025.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						800.000.000,00							995.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	800.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		25 Laporan	995.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
149.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**4.670.000.000,00**							**5.080.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah						***2.785.000.000,00***							***2.990.000.000,00***	
			1.Penambahan Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.785.000.000,00						1 Unit Kerja	2.990.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						70.000.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		80.000.000,00	
		Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						70.000.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	35.000.000,00						3 Rekomendasi	40.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	35.000.000,00						1 Rekomendasi	40.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		1 Rekomendasi	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						35.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		3 Rekomendasi	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						4.600.000.000,00					Perangkat Daerah, Kecamatan, Masyarakat Kab. Kebumen		5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Daerah						4.600.000.000,00					Perangkat Daerah, Kecamatan, Masyarakat Kab. Kebumen		5.000.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.825.000.000,00						8 Kegiatan	1.925.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah		8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	925.000.000,00						8 perangkat daerah	1.025.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 perangkat daerah		13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	925.000.000,00						13 perangkat daerah	1.025.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 perangkat daerah		24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	925.000.000,00						24 perangkat daerah	1.025.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						925.000.000,00							1.025.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	24 perangkat daerah		24 perangkat daerah	24 perangkat daerah	925.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		24 perangkat daerah	1.025.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						925.000.000,00							1.025.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 perangkat daerah		13 perangkat daerah	13 perangkat daerah	925.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		13 perangkat daerah	1.025.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						1.825.000.000,00							1.925.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	8 Kegiatan		8 Kegiatan	8 Kegiatan	1.825.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		8 Kegiatan	1.925.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						925.000.000,00							1.025.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah		8 perangkat daerah	8 perangkat daerah	925.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akselerasi implementasi sistem pengawasan penggunaan keuangan daerah		8 perangkat daerah	1.025.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN AYAH						**2.628.314.963,00**							**3.183.607.774,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.628.314.963,00**							**3.183.607.774,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.628.314.963,00**							**3.183.607.774,00**	
150.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.455.908.963,00**							**3.009.871.774,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.449.908.963,00***							***2.962.871.774,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.60 Nilai	71.70 Nilai	2.449.908.963,00						72.51 Nilai	2.962.871.774,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.245.000,00					ASN Kecamatan Ayah		8.245.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.245.000,00					ASN Kecamatan Ayah		8.245.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.245.000,00						6 Dokumen	4.245.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.000.000,00						8 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.245.000,00							4.245.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.245.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	4.245.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.173.988.963,00					ASN Kecamatan Ayah		2.727.381.620,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.173.988.963,00					ASN Kecamatan Ayah		2.727.381.620,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	22.622.000,00						8 Dokumen	24.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.151.366.963,00						20 Orang/bulan	2.703.381.620,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.151.366.963,00							2.703.381.620,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.151.366.963,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang/bulan	2.703.381.620,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						22.622.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	22.622.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	24.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.667.000,00					ASN Kecamatan Ayah		41.565.154,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.667.000,00					ASN Kecamatan Ayah		41.565.154,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.110.000,00						4 Laporan	3.260.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00						12 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.557.000,00						4 Paket	9.305.154,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.557.000,00							9.305.154,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.557.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	9.305.154,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.110.000,00							3.260.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.110.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	3.260.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					ASN Kecamatan Ayah		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					ASN Kecamatan Ayah		35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	5 Unit	35.000.000,00						3 Unit	35.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		2 Unit	5 Unit	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.008.000,00					ASN Kecamatan Ayah		137.680.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						139.008.000,00					ASN Kecamatan Ayah		137.680.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.099.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97.709.000,00						12 Laporan	97.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000,00						12 Laporan	200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						200.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	200.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.099.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.099.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97.709.000,00							97.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97.709.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	97.480.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.000.000,00					ASN Kecamatan Ayah		60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.000.000,00					ASN Kecamatan Ayah		60.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	40.000.000,00						11 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	36 Unit	4.000.000,00						36 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit		36 Unit	36 Unit	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Ayah || Desa Demangsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN AYAH
151.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**14.967.000,00**							**14.967.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***14.967.000,00***							***14.967.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	14.967.000,00						100.00 %	14.967.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.967.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah		14.967.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.967.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah		14.967.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.967.000,00						4 Laporan	14.967.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						14.967.000,00							14.967.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.967.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	14.967.000,00	KECAMATAN AYAH
152.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***30.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	30.000.000,00						100.00 Indeks	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						30.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah		30.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						30.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Ayah		30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	210 Orang		210 Orang	210 Orang	30.000.000,00						210 Orang	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	210 Orang		210 Orang	210 Orang	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		210 Orang	30.000.000,00	KECAMATAN AYAH
153.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**127.439.000,00**							**128.769.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***117.439.000,00***							***93.769.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	117.439.000,00						100.00 %	93.769.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						127.439.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Ayah		128.769.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						127.439.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Ayah		128.769.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.620.000,00						4 Dokumen	51.769.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	24.819.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						24.819.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	24.819.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						49.620.000,00							51.769.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.620.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	51.769.000,00	KECAMATAN AYAH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN AYAH
		KECAMATAN BUAYAN						**2.569.215.519,00**							**2.893.388.021,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.569.215.519,00**							**2.893.388.021,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.569.215.519,00**							**2.893.388.021,00**	
154.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.470.000.519,00**							**2.791.501.021,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.460.000.519,00***							***2.791.501.021,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.55 Nilai	72.56 Nilai	2.460.000.519,00						72.57 Nilai	2.791.501.021,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.720.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		4.527.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.720.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		4.527.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.303.000,00						6 Dokumen	2.620.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.417.000,00						8 Laporan	1.907.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.303.000,00							2.620.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.303.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	2.620.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.417.000,00							1.907.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.417.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	1.907.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.189.467.519,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		2.518.987.922,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.189.467.519,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		2.518.987.922,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	7.000.000,00						8 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		18 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.182.467.519,00						21 Orang/bulan	2.511.987.922,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.182.467.519,00							2.511.987.922,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		18 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.182.467.519,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		21 Orang/bulan	2.511.987.922,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.750.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		22.617.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						18.750.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		22.617.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00						12 Dokumen	1.367.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.850.000,00						4 Laporan	1.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00						12 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.600.000,00						4 Paket	3.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.100.000,00						4 Paket	2.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.000.000,00						4 Paket	1.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	1.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.100.000,00							2.600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.100.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.600.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.600.000,00							3.800.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.800.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.850.000,00							1.850.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.850.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.850.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.200.000,00							1.367.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.367.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.270.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						9.270.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	9.270.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.270.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	9.270.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.741.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		199.237.099,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.741.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		199.237.099,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.340.000,00						12 Laporan	46.570.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	159.631.000,00						12 Laporan	151.897.099,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	770.000,00						12 Laporan	770.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						770.000,00							770.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	770.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	770.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						47.340.000,00							46.570.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.340.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	46.570.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						159.631.000,00							151.897.099,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	159.631.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	151.897.099,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.052.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		31.132.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.052.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Buayan		31.132.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	27.152.000,00						17 Unit	27.152.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.900.000,00						4 Unit	3.980.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						27.152.000,00							27.152.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	27.152.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Unit	27.152.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.900.000,00							3.980.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.900.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	3.980.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN BUAYAN
155.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**7.120.000,00**							**7.120.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***7.120.000,00***							***7.120.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	7.120.000,00						100.00 %	7.120.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.120.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buayan		7.120.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.120.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buayan		7.120.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.120.000,00						4 Laporan	7.120.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7.120.000,00							7.120.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.120.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	7.120.000,00	KECAMATAN BUAYAN
156.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**20.814.000,00**							**27.500.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***20.814.000,00***							***27.500.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	20.814.000,00						100.00 Indeks	27.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.814.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buayan		27.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.814.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buayan		27.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 Orang		55 Orang	55 Orang	20.814.000,00						55 Orang	27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						20.814.000,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 Orang		55 Orang	55 Orang	20.814.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		55 Orang	27.500.000,00	KECAMATAN BUAYAN
157.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**71.281.000,00**							**67.267.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***71.281.000,00***							***67.267.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	71.281.000,00						100.00 %	67.267.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						71.281.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Buayan		67.267.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						71.281.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Buayan		67.267.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	7.570.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	3.000.000,00						20 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.000.000,00						4 Dokumen	37.700.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.137.000,00						5 Dokumen	8.137.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.574.000,00						1 Laporan	5.430.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.137.000,00							8.137.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.137.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	8.137.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.570.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	7.570.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						36.000.000,00							37.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	37.700.000,00	KECAMATAN BUAYAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.574.000,00							5.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.574.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	5.430.000,00	KECAMATAN BUAYAN
		KECAMATAN PURING						**2.363.436.480,00**							**2.573.039.653,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.363.436.480,00**							**2.573.039.653,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.363.436.480,00**							**2.573.039.653,00**	
158.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.207.385.480,00**							**2.412.841.164,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.191.885.480,00***							***2.397.341.164,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.90 Nilai	71.27 Nilai	2.191.885.480,00						72.51 Nilai	2.397.341.164,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Kantor Kecamatan Puring		10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Kantor Kecamatan Puring		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00						6 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00						8 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.992.059.480,00					Kantor Kecamatan Puring		2.196.881.164,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.992.059.480,00					Kantor Kecamatan Puring		2.196.881.164,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00						8 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.987.059.480,00						19 Orang/bulan	2.191.881.164,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.987.059.480,00							2.191.881.164,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.987.059.480,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Orang/bulan	2.191.881.164,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.260.000,00					Kantor Kecamatan Puring		44.260.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.260.000,00					Kantor Kecamatan Puring		44.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.700.000,00						12 Dokumen	1.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.810.000,00						4 Laporan	4.810.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00						12 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.250.000,00						4 Paket	6.250.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.500.000,00						4 Paket	4.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	4.500.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.700.000,00							1.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.700.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.250.000,00							6.250.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.250.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.810.000,00							4.810.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.810.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	4.810.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						52.811.000,00					Kantor Kecamatan Puring		60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						52.811.000,00					Kantor Kecamatan Puring		60.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	52.811.000,00						2 Unit	60.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						52.811.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	52.811.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.255.000,00					Kantor Kecamatan Puring		43.700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.255.000,00					Kantor Kecamatan Puring		43.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00						12 Laporan	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31.755.000,00						12 Laporan	25.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						31.755.000,00							25.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31.755.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	25.200.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00					Kantor Kecamatan Puring		58.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						58.000.000,00					Kantor Kecamatan Puring		58.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	26.500.000,00						10 Unit	26.500.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		3 Unit	5 Unit	500.000,00						5 Unit	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.000.000,00						3 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						26.500.000,00							26.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	26.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	26.500.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		3 Unit	5 Unit	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	500.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN PURING
159.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**8.000.000,00**							**8.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***8.000.000,00***							***8.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	8.000.000,00						100.00 %	8.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.000.000,00					Kantor Kecamatan Puring		8.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.000.000,00					Kantor Kecamatan Puring		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00						4 Laporan	8.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN PURING
160.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***20.000.000,00***							***20.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	20.000.000,00						100.00 Indeks	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Puring		20.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Puring		20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180 Orang		180 Orang	180 Orang	20.000.000,00						180 Orang	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	180 Orang		180 Orang	180 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		180 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN PURING
161.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**128.051.000,00**							**132.198.489,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***128.051.000,00***							***132.198.489,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	128.051.000,00						100.00 %	132.198.489,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						128.051.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Puring		132.198.489,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						128.051.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Puring		132.198.489,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	22 Dokumen	4.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	44.051.000,00						4 Dokumen	49.998.489,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.000.000,00						23 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00						1 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00						5 Dokumen	22.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						20.000.000,00							22.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	22.700.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	22 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						44.051.000,00							49.998.489,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	44.051.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	49.998.489,00	KECAMATAN PURING
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PURING
		KECAMATAN PETANAHAN						**2.655.531.463,00**							**2.911.481.617,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.655.531.463,00**							**2.911.481.617,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.655.531.463,00**							**2.911.481.617,00**	
162.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.519.439.463,00**							**2.754.481.617,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.519.439.463,00***							***2.733.481.617,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	2.519.439.463,00						72.51 Nilai	2.733.481.617,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.435.000,00					ASN Kecamatan Petanahan		11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.435.000,00					ASN Kecamatan Petanahan		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.785.000,00						6 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.650.000,00						8 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.785.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.785.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.650.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.650.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.273.071.463,00					Kecamatan Petanahan		2.492.245.617,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.273.071.463,00					Kecamatan Petanahan		2.492.245.617,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	9.810.000,00						8 Dokumen	13.369.516,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.263.261.463,00						20 Orang/bulan	2.478.876.101,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.263.261.463,00							2.478.876.101,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.263.261.463,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang/bulan	2.478.876.101,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						9.810.000,00							13.369.516,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	9.810.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	13.369.516,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						43.100.000,00					-		51.300.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						43.100.000,00					-		51.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00						12 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.480.000,00						12 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.520.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.600.000,00						12 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.700.000,00						4 Paket	14.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.500.000,00						6 Paket	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.500.000,00						4 Paket	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.600.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						13.700.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	14.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.520.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.520.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.480.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.480.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43.640.000,00					Kecamatan Petanahan		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						43.640.000,00					Kecamatan Petanahan		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	1.640.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		8 Unit	2 Unit	12.000.000,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		4 Unit	2 Unit	30.000.000,00						2 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.640.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	1.640.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		8 Unit	2 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		4 Unit	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.461.000,00					Kecamatan Petanahan		88.936.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.461.000,00					Kecamatan Petanahan		88.936.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.500.000,00						12 Laporan	28.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.411.000,00						12 Laporan	60.236.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.000,00						12 Laporan	700.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						550.000,00							700.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	700.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.500.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	28.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						63.411.000,00							60.236.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.411.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	60.236.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.732.000,00					Kecamatan Petanahan		61.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.732.000,00					Kecamatan Petanahan		61.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00						2 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	41.000.000,00						9 Unit	42.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.932.000,00						0 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		8 Unit	3 Unit	2.800.000,00						3 Unit	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.000.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	41.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	42.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.932.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.932.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.800.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		8 Unit	3 Unit	2.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
163.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.000.000,00**							**13.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***10.000.000,00***							***13.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	10.000.000,00						100.00 %	13.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petanahan		13.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petanahan		13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
164.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**21.000.000,00**							**22.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***21.000.000,00***							***22.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	21.000.000,00						100.00 Indeks	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						21.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petanahan		22.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						21.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Petanahan		22.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 Orang		55 Orang	55 Orang	21.000.000,00						55 Orang	22.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						21.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 Orang		55 Orang	55 Orang	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		55 Orang	22.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
165.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**105.092.000,00**							**122.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***105.092.000,00***							***122.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	105.092.000,00						100.00 %	122.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						105.092.000,00					Pemerintah Desa di Kecamatan Petanahan		122.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						105.092.000,00					Pemerintah Desa di Kecamatan Petanahan		122.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	19 Dokumen	6.960.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.640.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.900.000,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	29.000.000,00						5 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.992.000,00						1 Laporan	8.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						29.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						6.960.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	19 Dokumen	6.960.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						13.900.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.900.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.600.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	11.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						18.640.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.640.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	22.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.992.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.992.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN PETANAHAN
		KECAMATAN KLIRONG						**2.127.134.067,00**							**2.549.332.036,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.127.134.067,00**							**2.549.332.036,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.127.134.067,00**							**2.549.332.036,00**	
166.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.973.610.067,00**							**2.386.332.036,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***1.973.610.067,00***							***2.347.832.036,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.00 Nilai	71.27 Nilai	1.925.647.067,00						72.51 Nilai	2.307.832.036,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.660.000,00					Kecamatan Klirong		11.500.000,00	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.660.000,00					Kecamatan Klirong		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6.729.000,00						6 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.931.000,00						8 Laporan	5.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.729.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6.729.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.931.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.931.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.681.176.067,00					Kecamatan Klirong		2.185.227.737,00	
		Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.681.176.067,00					Kecamatan Klirong		2.185.227.737,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00						8 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.671.176.067,00						15 Orang/bulan	2.175.227.737,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.671.176.067,00							2.175.227.737,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.671.176.067,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Orang/bulan	2.175.227.737,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.357.000,00					Kecamatan Klirong		58.604.299,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						55.357.000,00					Kecamatan Klirong		58.604.299,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.160.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	22.000.000,00						12 Paket	22.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.000.000,00						4 Paket	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.897.000,00						4 Paket	10.604.299,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00						4 Paket	4.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	22.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	22.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.897.000,00							10.604.299,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.897.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	10.604.299,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	11.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.160.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.160.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.500.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.963.000,00					Kecamatan Klirong		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.963.000,00					Kecamatan Klirong		40.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		5 Unit	2 Unit	20.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	19.963.000,00						4 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	8.000.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.963.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	19.963.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	2 Unit	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.187.000,00					Kecamatan Klirong		38.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.187.000,00					Kecamatan Klirong		38.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.760.000,00						12 Laporan	26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.767.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	660.000,00						12 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						660.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	660.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.760.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.760.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	26.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.767.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.767.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.267.000,00					Kecamatan Klirong		52.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50.267.000,00					Kecamatan Klirong		52.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.000.000,00						3 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	30.000.000,00						13 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.470.000,00						5 Unit	2.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	9.797.000,00						8 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.470.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	8 Unit	1.470.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.797.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	11 Unit	9.797.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	9.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
167.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**14.000.000,00**							**15.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***14.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	14.000.000,00						100.00 %	15.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						14.000.000,00					Kecamatan Klirong		15.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						14.000.000,00					Kecamatan Klirong		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.000.000,00						4 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						14.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
168.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14.000.000,00**							**15.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***14.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	14.000.000,00						100.00 Indeks	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.000.000,00					Kecamatan Klirong		15.000.000,00	
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						14.000.000,00					Kecamatan Klirong		15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	96 Orang		96 Orang	96 Orang	14.000.000,00						96 Orang	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						14.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	96 Orang		96 Orang	96 Orang	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		96 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
169.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**125.524.000,00**							**133.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***125.524.000,00***							***121.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	125.524.000,00						100.00 %	121.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						125.524.000,00					Kecamatan Klirong		133.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						125.524.000,00					Kecamatan Klirong		133.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	22 Dokumen	25.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.910.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.734.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00						4 Dokumen	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.880.000,00						5 Dokumen	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.880.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.880.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	23.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	22 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						11.910.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.910.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						14.734.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.734.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	26.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						35.000.000,00							42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	42.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN KLIRONG
		KECAMATAN BULUSPESANTREN						**2.276.946.387,00**							**2.460.119.392,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.276.946.387,00**							**2.460.119.392,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.276.946.387,00**							**2.460.119.392,00**	
170.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.157.728.387,00**							**2.364.838.112,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.130.728.387,00***							***2.349.838.112,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.26 Nilai	71.27 Nilai	2.130.728.387,00						72.51 Nilai	2.349.838.112,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.500.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00						6 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00						8 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.869.228.387,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		2.120.338.112,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Keuanga Perangkat Daerah						1.869.228.387,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		2.120.338.112,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	6.500.000,00						8 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.862.728.387,00						17 Orang/bulan	2.115.338.112,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.862.728.387,00							2.115.338.112,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.862.728.387,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Orang/bulan	2.115.338.112,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.500.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		54.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.500.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		54.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00						4 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.000.000,00						4 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.500.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	13.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.000.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.000.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	11 Unit	10.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	23.000.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	23.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125.500.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		123.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125.500.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		123.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00						12 Laporan	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	23.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						102.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.000.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		63.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						68.000.000,00					ASN pada Kantor Kecamatan Buluspesantren		63.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	4 Unit	15.000.000,00						4 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	45.000.000,00						15 Unit	48.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	2 Unit	2.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	8 Unit	6.000.000,00						9 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.000.000,00							48.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	48.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	4 Unit	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	10 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
171.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**7.000.000,00**							**5.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***7.000.000,00***							***5.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	7.000.000,00						100.00 %	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buluspesantren		5.000.000,00	
		Terlakanannya Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilimpahkan Kepada Camat						7.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buluspesantren		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
172.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**18.000.000,00**							**13.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***18.000.000,00***							***13.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	18.000.000,00						100.00 Indeks	13.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buluspesantren		13.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						18.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Buluspesantren		13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	345 Orang		250 Orang	300 Orang	18.000.000,00						345 Orang	13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						18.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	345 Orang		250 Orang	350 Orang	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		345 Orang	13.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
173.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**94.218.000,00**							**77.281.280,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***86.218.000,00***							***77.281.280,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	86.218.000,00						100.00 %	77.281.280,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						94.218.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Buluspesantren		77.281.280,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						94.218.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Buluspesantren		77.281.280,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	8.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.218.000,00						4 Dokumen	34.781.280,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00						5 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	4.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						8.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Buluspesantren || Desa Buluspesantren || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						15.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						35.218.000,00							34.781.280,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.218.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	34.781.280,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN BULUSPESANTREN
		KECAMATAN AMBAL						**2.313.748.994,00**							**2.517.450.887,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.313.748.994,00**							**2.517.450.887,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.313.748.994,00**							**2.517.450.887,00**	
174.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.127.557.994,00**							**2.343.008.887,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.119.557.994,00***							***2.343.008.887,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.27 Nilai	2.119.557.994,00						72.51 Nilai	2.343.008.887,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.962.000,00					Kecamatan Ambal		10.962.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.962.000,00					Kecamatan Ambal		10.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	5.644.000,00						6 Dokumen	5.644.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.318.000,00						8 Laporan	5.318.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.644.000,00							5.644.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	5.644.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	5.644.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.318.000,00							5.318.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.318.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	5.318.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.959.152.994,00					Kecamatan Ambal		2.191.917.457,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.959.152.994,00					Kecamatan Ambal		2.191.917.457,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	16.387.000,00						8 Dokumen	16.387.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.942.765.994,00						17 Orang/bulan	2.175.530.457,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.942.765.994,00							2.175.530.457,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17/14 Orang/bulan	1.942.765.994,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Orang/bulan	2.175.530.457,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						16.387.000,00							16.387.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	16.387.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	16.387.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						35.241.000,00					Kecamatan Ambal		39.834.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.241.000,00					Kecamatan Ambal		39.834.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.231.000,00						12 Dokumen	2.231.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00						4 Laporan	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00						12 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.000.000,00						4 Paket	12.593.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.010.000,00						4 Paket	6.010.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.010.000,00							6.010.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.010.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.010.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.000.000,00							12.593.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	12.593.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.231.000,00							2.231.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	2.231.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.231.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.524.366,00					Kecamatan Ambal		45.940.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.524.366,00					Kecamatan Ambal		45.940.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.968.122,00						12 Laporan	17.440.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.006.244,00						12 Laporan	27.950.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.000,00						12 Laporan	550.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						550.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	550.000,00	KECAMATAN AMBAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.968.122,00							17.440.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.968.122,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	17.440.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						47.006.244,00							27.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.006.244,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	27.950.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.677.634,00					Kecamatan Ambal		54.355.430,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52.677.634,00					Kecamatan Ambal		54.355.430,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	7.200.000,00						4 Unit	7.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.477.634,00						12 Unit	39.155.430,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	8.000.000,00						12 Unit	8.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.477.634,00							39.155.430,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.477.634,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	39.155.430,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.200.000,00							7.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	7.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	7.200.000,00	KECAMATAN AMBAL
175.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**7.500.000,00**							**7.500.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***7.500.000,00***							***7.500.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	7.500.000,00						100.00 %	7.500.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.500.000,00					Kecamatan Ambal		7.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.500.000,00					Kecamatan Ambal		7.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00						4 Laporan	7.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN AMBAL
176.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**18.000.000,00**							**18.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***18.000.000,00***							***18.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	18.000.000,00						100.00 Indeks	18.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00					Kecamatan Ambal		18.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00					Kecamatan Ambal		18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang		120 Orang	120 Orang	18.000.000,00						120 Orang	18.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						18.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang		120 Orang	120 Orang	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		120 Orang	18.000.000,00	KECAMATAN AMBAL
177.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**160.691.000,00**							**148.942.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***160.691.000,00***							***148.942.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	160.691.000,00						100.00 %	148.942.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						160.691.000,00					Kecamatan Ambal		148.942.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						160.691.000,00					Kecamatan Ambal		148.942.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.320.000,00						1 Dokumen	12.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.668.000,00						1 Dokumen	27.668.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	53.251.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.569.000,00						1 Dokumen	14.569.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00						5 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.134.000,00						1 Laporan	6.134.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	32 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN AMBAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						14.569.000,00							14.569.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.569.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	14.569.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.320.000,00							12.320.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.320.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.320.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						27.668.000,00							27.668.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.668.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	27.668.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						50.000.000,00							53.251.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	53.251.000,00	KECAMATAN AMBAL
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.134.000,00							6.134.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.134.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	6.134.000,00	KECAMATAN AMBAL
		KECAMATAN MIRIT						**2.218.566.777,00**							**2.607.360.827,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.218.566.777,00**							**2.607.360.827,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.218.566.777,00**							**2.607.360.827,00**	
178.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.079.966.777,00**							**2.464.360.827,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.073.466.777,00***							***2.447.860.827,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.57 Nilai	71.58 Nilai	2.073.466.777,00						72.51 Nilai	2.447.860.827,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					Kecamatan Mirit		8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					Kecamatan Mirit		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00						6 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00						8 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.876.135.777,00					Kecamatan Mirit		2.238.146.809,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.876.135.777,00					Kecamatan Mirit		2.238.146.809,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	17.000.000,00						8 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.859.135.777,00						18 Orang/bulan	2.221.146.809,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.859.135.777,00							2.221.146.809,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		17 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.859.135.777,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Orang/bulan	2.221.146.809,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.800.000,00					Kecamatan Mirit		56.900.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						47.800.000,00					Kecamatan Mirit		56.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00						12 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	22.800.000,00						12 Paket	28.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00						4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.500.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						22.800.000,00							28.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	22.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	28.400.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					Kecamatan Mirit		40.000.000,00	
		Terlaksanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					Kecamatan Mirit		40.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00						4 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	30.000.000,00						6 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	8 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.845.000,00					Kecamatan Mirit		72.518.682,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera						62.845.000,00					Kecamatan Mirit		72.518.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00						12 Laporan	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.345.000,00						12 Laporan	54.018.682,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						41.345.000,00							54.018.682,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.345.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	54.018.682,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.186.000,00					Kecamatan Mirit		48.795.336,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.186.000,00					Kecamatan Mirit		48.795.336,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.000.000,00						2 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	36.186.000,00						14 Unit	36.795.336,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	5.000.000,00						15 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.186.000,00							36.795.336,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	36.186.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Unit	36.795.336,00	KECAMATAN MIRIT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	5 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
179.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**16.000.000,00**							**16.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***16.000.000,00***							***16.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	16.000.000,00						100.00 %	16.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						16.000.000,00					Kecamatan Mirit		16.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						16.000.000,00					Kecamatan Mirit		16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	16.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						16.000.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
180.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**16.600.000,00**							**18.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***16.600.000,00***							***18.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	16.600.000,00						100.00 Indeks	18.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						16.600.000,00					Kecamatan Mirit		18.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						16.600.000,00					Kecamatan Mirit		18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	16.600.000,00						100 Orang	18.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						16.600.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	16.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	18.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
181.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**106.000.000,00**							**109.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***94.000.000,00***							***109.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	94.000.000,00						100.00 %	109.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						106.000.000,00					Desa di Kecamatan Mirit		109.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						106.000.000,00					Desa di Kecamatan Mirit		109.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00						1 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.000.000,00						4 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00						5 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00						1 Laporan	11.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						12.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						4.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	21 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						18.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						36.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN MIRIT
		KECAMATAN BONOROWO						**2.299.610.355,00**							**2.703.554.872,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.299.610.355,00**							**2.703.554.872,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.299.610.355,00**							**2.703.554.872,00**	
182.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.198.265.355,00**							**2.599.218.872,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.189.265.355,00***							***2.590.218.872,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.60 Nilai	72.00 Nilai	2.189.265.355,00						72.51 Nilai	2.590.218.872,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.223.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		6.223.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.223.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		6.223.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.223.000,00						6 Dokumen	4.223.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00						8 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.223.000,00							4.223.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.223.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	4.223.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.971.070.355,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		2.372.973.872,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.971.070.355,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		2.372.973.872,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.008.000,00						8 Dokumen	13.074.421,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.959.062.355,00						16 Orang/bulan	2.359.899.451,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.959.062.355,00							2.359.899.451,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16/12 Orang/bulan	1.959.062.355,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Orang/bulan	2.359.899.451,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.008.000,00							13.074.421,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.008.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	13.074.421,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.760.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		28.760.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.760.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		28.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000,00						12 Dokumen	1.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00						4 Laporan	3.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.760.000,00						12 Paket	13.760.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.760.000,00							13.760.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.760.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	13.760.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.400.000,00							1.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.400.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.600.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.827.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		25.420.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.827.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		25.420.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	6 Unit	4.970.000,00						12 Unit	4.970.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.030.000,00						1 Unit	12.030.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	2 Unit	7.827.000,00						5 Unit	8.420.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.970.000,00							4.970.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	4.970.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Penguatan keamanan dan stabilitas wilayah investasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan aparat keamanan		12 Unit	4.970.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.030.000,00							12.030.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.030.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	12.030.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.827.000,00							8.420.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	7.827.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	8.420.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.378.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		85.748.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.378.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		85.748.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.900.000,00						12 Laporan	21.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.078.000,00						12 Laporan	63.448.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000,00						12 Laporan	400.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						400.000,00							400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	400.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.900.000,00							21.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.900.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	21.900.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						66.078.000,00							63.448.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.078.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	63.448.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.007.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		80.094.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						79.007.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		80.094.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.000.000,00						2 Unit	19.087.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	56.007.000,00						13 Unit	56.007.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	5.000.000,00						7 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56.007.000,00							56.007.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	56.007.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Unit	56.007.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.000.000,00							19.087.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	19.087.000,00	KECAMATAN BONOROWO
183.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**5.340.000,00**							**5.340.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***5.340.000,00***							***5.340.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	5.340.000,00						100.00 %	5.340.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.340.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		5.340.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat						5.340.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		5.340.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.340.000,00						4 Laporan	5.340.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.340.000,00							5.340.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.340.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.340.000,00	KECAMATAN BONOROWO
184.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**16.095.000,00**							**17.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***16.095.000,00***							***17.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	16.095.000,00						100.00 Indeks	17.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						16.095.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		17.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						16.095.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		17.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	16.095.000,00						100 Orang	17.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						16.095.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	16.095.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	17.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
185.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**79.910.000,00**							**81.996.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***79.910.000,00***							***81.996.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	79.910.000,00						100.00 %	81.996.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						79.910.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		81.996.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						79.910.000,00					Kantor Kecamatan Bonorowo		81.996.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.160.000,00						1 Dokumen	17.246.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	2.500.000,00						11 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00						5 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00						1 Laporan	5.250.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						13.160.000,00							17.246.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.160.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	17.246.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN BONOROWO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.250.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	5.250.000,00	KECAMATAN BONOROWO
		KECAMATAN PREMBUN						**2.438.541.476,00**							**2.721.057.896,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.438.541.476,00**							**2.721.057.896,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.438.541.476,00**							**2.721.057.896,00**	
186.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.331.541.476,00**							**2.618.057.896,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.289.541.476,00***							***2.554.057.896,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.35 Nilai	71.27 Nilai	2.289.541.476,00						72.51 Nilai	2.554.057.896,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00					ASN Kecamatan Prembun		7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00					ASN Kecamatan Prembun		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00						6 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.000.000,00						8 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.057.188.476,00					ASN Kecamatan Prembun		2.334.551.370,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.057.188.476,00					ASN Kecamatan Prembun		2.334.551.370,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00						8 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.047.188.476,00						20 Orang/bulan	2.324.551.370,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.047.188.476,00							2.324.551.370,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.047.188.476,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang/bulan	2.324.551.370,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.280.000,00					ASN Kecamatan Prembun		55.798.526,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.280.000,00					ASN Kecamatan Prembun		55.798.526,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.560.000,00						12 Dokumen	1.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00						12 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00						12 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00						4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.220.000,00						4 Paket	9.738.526,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00						4 Paket	7.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.220.000,00							9.738.526,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.220.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	9.738.526,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.560.000,00							1.560.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.560.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.560.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					ASN Kecamatan Prembun		65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					ASN Kecamatan Prembun		65.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00						5 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00						5 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	11.000.000,00						2 Unit	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						11.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.273.000,00					ASN Kecamatan Prembun		103.908.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						101.273.000,00					ASN Kecamatan Prembun		103.908.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.365.000,00						12 Laporan	37.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.408.000,00						12 Laporan	66.408.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						32.365.000,00							37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.365.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	37.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68.408.000,00							66.408.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.408.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	66.408.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.800.000,00					ASN Kecamatan Prembun		51.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.800.000,00					ASN Kecamatan Prembun		51.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	29.800.000,00						24 Unit	29.800.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	7.000.000,00						11 Unit	7.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						29.800.000,00							29.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	29.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Unit	29.800.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		11 Unit	11 Unit	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Unit	7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
187.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**8.000.000,00**							**9.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***8.000.000,00***							***9.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	8.000.000,00						100.00 %	9.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Prembun		9.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Prembun		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00						4 Laporan	9.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
188.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***15.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	15.000.000,00						100.00 Indeks	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Prembun		15.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Prembun		15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15.000.000,00						100 Orang	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
189.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**84.000.000,00**							**79.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***78.000.000,00***							***79.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	78.000.000,00						100.00 %	79.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						84.000.000,00					Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Prembun		79.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						84.000.000,00					Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Prembun		79.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00						1 Dokumen	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	4.000.000,00						13 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00						5 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						19.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	19.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PREMBUN
		KECAMATAN PADURESO						**2.203.705.012,00**							**2.541.077.340,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.203.705.012,00**							**2.541.077.340,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.203.705.012,00**							**2.541.077.340,00**	
190.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.072.105.012,00**							**2.415.077.340,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.069.105.012,00***							***2.398.077.340,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.50 Nilai	71.75 Nilai	2.069.105.012,00						72.89 Nilai	2.398.077.340,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00					ASN Kecamatan Padureso		23.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00					ASN Kecamatan Padureso		23.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00						6 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00						8 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.790.977.012,00					ASN Kecamatan Padureso		2.174.584.977,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.790.977.012,00					ASN Kecamatan Padureso		2.174.584.977,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	18.000.000,00						8 Dokumen	18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.772.977.012,00						17 Orang/bulan	2.156.584.977,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.772.977.012,00							2.156.584.977,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.772.977.012,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Orang/bulan	2.156.584.977,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						69.746.000,00					ASN Kecamatan Padureso		72.992.363,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						69.746.000,00					ASN Kecamatan Padureso		72.992.363,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.700.000,00						4 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.000.000,00						12 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.846.000,00						4 Paket	21.392.363,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.500.000,00						4 Paket	7.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00						4 Paket	7.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	24.000.000,00	KECAMATAN PADURESO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.500.000,00							7.600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.600.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						19.846.000,00							21.392.363,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	19.846.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	21.392.363,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.700.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						42.800.000,00					ASN Kecamatan Padureso		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						42.800.000,00					ASN Kecamatan Padureso		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		5 Unit	1 Unit	2.800.000,00						3 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	8 Unit	40.000.000,00						8 Unit	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.800.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		5 Unit	1 Unit	2.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.582.000,00					ASN Kecamatan Padureso		35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						95.582.000,00					ASN Kecamatan Padureso		35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	25.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.082.000,00						12 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00						12 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						25.000.000,00							25.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	25.500.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68.082.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.082.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00					ASN Kecamatan Padureso		59.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						58.000.000,00					ASN Kecamatan Padureso		59.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	53.000.000,00						11 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	10 Unit	2.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		4 Unit	4 Unit	3.000.000,00						7 Unit	4.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						53.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	53.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		4 Unit	4 Unit	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Unit	4.500.000,00	KECAMATAN PADURESO
191.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**9.600.000,00**							**10.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***9.600.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	9.600.000,00						100.00 %	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.600.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Padureso		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat						9.600.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Padureso		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.600.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.600.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
192.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**13.000.000,00**							**13.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***13.000.000,00***							***13.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	13.000.000,00						100.00 Indeks	13.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						13.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Padureso		13.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						13.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Padureso		13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	13.000.000,00						60 Orang	13.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						13.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	13.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Orang	13.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
193.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**109.000.000,00**							**103.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***106.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	106.000.000,00						100.00 %	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						109.000.000,00					Pemerintah Desa Di Wilayah Kecamatan Padureso		103.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						109.000.000,00					Pemerintah Desa Di Wilayah Kecamatan Padureso		103.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00						5 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						15.000.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	21.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						49.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PADURESO
		KECAMATAN KUTOWINANGUN						**2.253.440.054,00**							**2.561.293.784,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.253.440.054,00**							**2.561.293.784,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.253.440.054,00**							**2.561.293.784,00**	
194.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.088.945.054,00**							**2.386.910.784,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.079.945.054,00***							***2.313.910.784,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		73.00 Nilai	73.25 Nilai	2.079.945.054,00						73.50 Nilai	2.313.910.784,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.000.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		14.750.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.000.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		14.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00						6 Dokumen	9.750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00						8 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.000.000,00							9.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	9.750.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.816.554.054,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		2.212.196.820,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.816.554.054,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		2.212.196.820,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.740.000,00						8 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.804.814.054,00						14 Orang/bulan	2.200.196.820,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.804.814.054,00							2.200.196.820,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.804.814.054,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Orang/bulan	2.200.196.820,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						11.740.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.740.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.960.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		56.463.964,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						52.960.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		56.463.964,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00						12 Dokumen	2.463.964,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.800.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.960.000,00						12 Paket	18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	16.000.000,00						4 Paket	18.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00						4 Paket	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.960.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.960.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	18.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							2.463.964,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.463.964,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						16.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	16.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	18.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.800.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.789.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		23.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.789.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		23.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		50 Unit	30 Unit	5.589.000,00						12 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	3.200.000,00						1 Unit	17.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						5.589.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		50 Unit	30 Unit	5.589.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.200.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	3 Unit	3.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	17.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.142.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		31.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						143.142.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		31.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00						12 Laporan	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	127.442.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00						12 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.200.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.500.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	17.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						127.442.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	127.442.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.500.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		49.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						53.500.000,00					ASN di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		49.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.000.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	38.000.000,00						10 Unit	38.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	4.000.000,00						12 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.500.000,00						10 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.000.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	38.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	38.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	0,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
195.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**12.500.000,00**							**20.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***12.500.000,00***							***20.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	12.500.000,00						100.00 %	20.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.500.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		20.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.500.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00						4 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						12.500.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
196.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**18.000.000,00**							**18.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***18.000.000,00***							***18.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	18.000.000,00						100.00 Indeks	18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		18.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						18.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	18.000.000,00						60 Orang	18.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Orang	18.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
197.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**133.995.000,00**							**136.383.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***133.995.000,00***							***136.383.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	133.995.000,00						100.00 %	136.383.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						133.995.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		136.383.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						133.995.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kutowinangun		136.383.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	19 Dokumen	10.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.500.000,00						4 Dokumen	31.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.895.000,00						1 Dokumen	25.383.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.600.000,00						5 Dokumen	38.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						30.600.000,00							38.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	38.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	19 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						22.895.000,00							25.383.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.895.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.383.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						35.000.000,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						30.500.000,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	31.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN KUTOWINANGUN
		KECAMATAN ALIAN						**2.426.077.403,00**							**2.672.163.381,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.426.077.403,00**							**2.672.163.381,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.426.077.403,00**							**2.672.163.381,00**	
198.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.280.701.403,00**							**2.531.663.381,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.274.701.403,00***							***2.524.163.381,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.00 Nilai	71.27 Nilai	2.274.701.403,00						72.51 Nilai	2.524.163.381,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.632.000,00					Kantor Kecamatan Alian		13.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.632.000,00					Kantor Kecamatan Alian		13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.632.000,00						6 Dokumen	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	7.000.000,00						8 Laporan	7.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.632.000,00							6.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.632.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.040.734.403,00					Kantor Kecamatan Alian		2.301.624.378,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.040.734.403,00					Kantor Kecamatan Alian		2.301.624.378,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	16.987.000,00						8 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.023.747.403,00						20 Orang/bulan	2.283.624.378,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.023.747.403,00							2.283.624.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.023.747.403,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi program perlindungan sosial		20 Orang/bulan	2.283.624.378,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						16.987.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	16.987.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.460.000,00					Kantor Kecamatan Alian		57.658.088,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.460.000,00					Kantor Kecamatan Alian		57.658.088,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.960.000,00						4 Laporan	6.158.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00						12 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00						4 Paket	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	6.000.088,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.000.088,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.088,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						14.000.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	16.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.960.000,00							6.158.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.960.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	6.158.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					Kantor Kecamatan Alian		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					Kantor Kecamatan Alian		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	2 Unit	6.000.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	4 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104.375.000,00					Kantor Kecamatan Alian		78.880.915,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						104.375.000,00					Kantor Kecamatan Alian		78.880.915,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00						12 Laporan	27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	77.000.000,00						12 Laporan	50.380.915,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.375.000,00						12 Laporan	1.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.375.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.375.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	27.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						77.000.000,00							50.380.915,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	77.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	50.380.915,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.500.000,00					Kantor Kecamatan Alian		80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64.500.000,00					Kantor Kecamatan Alian		80.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	44.000.000,00						13 Unit	44.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.500.000,00						8 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.000.000,00							44.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	44.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Unit	44.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
199.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11.000.000,00**							**11.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***11.000.000,00***							***11.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	11.000.000,00						100.00 %	11.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.000.000,00					Kantor Kecamatan Alian		11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.000.000,00					Kantor Kecamatan Alian		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00						4 Laporan	11.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
200.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**21.000.000,00**							**21.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***21.000.000,00***							***21.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	21.000.000,00						100.00 Indeks	21.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						21.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Alian		21.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						21.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Alian		21.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	21.000.000,00						100 Orang	21.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						21.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	21.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
201.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**113.376.000,00**							**108.500.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***113.376.000,00***							***108.500.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	113.376.000,00						100.00 %	108.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						113.376.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Alian		108.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						113.376.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Alian		108.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	13 Dokumen	6.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00						1 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.454.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	45.984.000,00						4 Dokumen	46.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00						16 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	13.438.000,00						5 Dokumen	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00						1 Laporan	4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						13.438.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	13.438.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	14.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	13 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						16.000.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						24.454.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.454.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						45.984.000,00							46.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	45.984.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	46.000.000,00	KECAMATAN ALIAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN ALIAN
		KECAMATAN PONCOWARNO						**2.253.478.021,00**							**2.499.145.656,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.253.478.021,00**							**2.499.145.656,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.253.478.021,00**							**2.499.145.656,00**	
202.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.114.812.395,00**							**2.359.479.272,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.094.812.395,00***							***2.359.479.272,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.03 Nilai	71.27 Nilai	2.094.812.395,00						72.51 Nilai	2.359.479.272,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.156.000,00					Kecamatan Poncowarno		10.156.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.156.000,00					Kecamatan Poncowarno		10.156.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.700.000,00						6 Dokumen	5.700.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.456.000,00						8 Laporan	4.456.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.700.000,00							5.700.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	5.700.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.456.000,00							4.456.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.456.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	4.456.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.906.644.021,00					Kecamatan Poncowarno		2.145.715.380,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.906.644.021,00					Kecamatan Poncowarno		2.145.715.380,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00						8 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.886.644.021,00						16 Orang/bulan	2.125.715.380,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.886.644.021,00							2.125.715.380,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.886.644.021,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Orang/bulan	2.125.715.380,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.250.000,00					Kecamatan Poncowarno		39.250.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.250.000,00					Kecamatan Poncowarno		39.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00						12 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00						4 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00						12 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.750.000,00						4 Paket	1.750.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.750.000,00							1.750.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.750.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	1.750.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	20.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		9 Unit	3 Unit	30.000.000,00						5 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		9 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.758.482,00					Kecamatan Poncowarno		73.854.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.758.482,00					Kecamatan Poncowarno		73.854.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00						12 Laporan	39.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.208.482,00						12 Laporan	34.304.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.000,00						12 Laporan	550.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						550.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	550.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.000.000,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	39.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						39.208.482,00							34.304.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.208.482,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	34.304.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.003.892,00					Kecamatan Poncowarno		40.503.892,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.003.892,00					Kecamatan Poncowarno		40.503.892,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.500.000,00						1 Unit	12.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	23.503.892,00						13 Unit	23.503.892,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	9 Unit	5.000.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.503.892,00							23.503.892,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	23.503.892,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Unit	23.503.892,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	9 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.500.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	12.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
203.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**8.000.000,00**							**8.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***8.000.000,00***							***8.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	8.000.000,00						100.00 %	8.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.000.000,00					Kecamatan Poncowarno		8.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						8.000.000,00					Kecamatan Poncowarno		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00						4 Laporan	8.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
204.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**17.500.000,00**							**17.500.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***17.500.000,00***							***17.500.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	17.500.000,00						100.00 Indeks	17.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						17.500.000,00					Kecamatan Poncowarno		17.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						17.500.000,00					Kecamatan Poncowarno		17.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang		250 Orang	250 Orang	17.500.000,00						250 Orang	17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						17.500.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 Orang		250 Orang	250 Orang	17.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		250 Orang	17.500.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
205.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**113.165.626,00**							**114.166.384,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***113.165.626,00***							***114.166.384,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	113.165.626,00						100.00 %	114.166.384,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						113.165.626,00					Desa di Wilayah Kecamatan Poncowarno		114.166.384,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						113.165.626,00					Desa di Wilayah Kecamatan Poncowarno		114.166.384,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	10.494.169,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00						1 Dokumen	16.174.927,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00						1 Dokumen	19.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.671.457,00						4 Dokumen	41.671.457,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	11.470.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00						5 Dokumen	14.650.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00						1 Laporan	10.650.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						12.000.000,00							14.650.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	14.650.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						10.494.169,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	10.494.169,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.000.000,00							11.470.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	11.470.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.000.000,00							16.174.927,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	16.174.927,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						19.000.000,00							19.550.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	19.550.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						40.671.457,00							41.671.457,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	40.671.457,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	41.671.457,00	KECAMATAN PONCOWARNO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						8.000.000,00							10.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	10.650.000,00	KECAMATAN PONCOWARNO
		KECAMATAN KEBUMEN						**6.372.786.044,00**							**6.652.141.208,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.372.786.044,00**							**6.652.141.208,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.372.786.044,00**							**6.652.141.208,00**	
206.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.001.510.044,00**							**7.214.566.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***6.140.464.044,00***							***6.417.341.208,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.05 Nilai	71.27 Nilai	6.140.464.044,00						72.51 Nilai	6.417.341.208,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	6.140.464.044,00						92.70 Indeks	6.417.341.208,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	6.140.464.044,00						92.70 Indeks	6.417.341.208,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	6.140.464.044,00						92.70 Indeks	6.417.341.208,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	6.140.464.044,00						92.70 Indeks	6.417.341.208,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	6.140.464.044,00						92.70 Indeks	6.417.341.208,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kecamatan Kebumen		33.769.304,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kecamatan Kebumen		33.769.304,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	20.010.000,00						6 Dokumen	20.710.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	12.392.000,00						28 Laporan	13.059.304,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.810.000,00							6.810.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	6 Dokumen	6.810.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	6.810.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.756.000,00							5.915.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	8 Laporan	5.756.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Laporan	5.915.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kecamatan Kebumen		6.177.184.481,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kecamatan Kebumen		6.177.184.481,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	66.500.000,00						28 Dokumen	69.181.481,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.837.278.044,00						50 Orang/bulan	6.108.003.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.837.278.044,00							6.108.003.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.837.278.044,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Orang/bulan	6.108.003.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	8 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kecamatan Kebumen		169.690.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kecamatan Kebumen		169.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	8.200.000,00						72 Dokumen	8.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	7.500.000,00						72 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	3.950.000,00						12 Laporan	3.950.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	72 Paket	47.000.000,00						72 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	55.300.000,00						24 Paket	59.590.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	27.144.000,00						24 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	12.950.000,00						24 Paket	13.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	12 Paket	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	1.200.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	10.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.950.000,00							3.950.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		8 Laporan	4 Laporan	3.950.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	3.950.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kecamatan Kebumen		139.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kecamatan Kebumen		139.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	35 Unit	19.000.000,00						70 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	6 Unit	89.837.000,00						6 Unit	88.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		38 Unit	29 Unit	15.000.000,00						7 Unit	16.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	10 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	2 Unit	26.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	27.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		38 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Unit	0,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kecamatan Kebumen		470.970.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kecamatan Kebumen		470.970.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	90.572.000,00						72 Laporan	93.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	484.441.000,00						72 Laporan	373.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	4.140.000,00						60 Laporan	4.250.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						550.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	550.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	550.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.600.000,00							30.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	30.600.000,00	KECAMATAN KEBUMEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						123.984.000,00							122.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	123.984.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	122.920.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kecamatan Kebumen		223.953.208,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kecamatan Kebumen		223.953.208,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	98.010.000,00						8 Unit	120.010.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	70.576.000,00						45 Unit	71.633.208,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	65 Unit	31.710.000,00						65 Unit	32.310.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.826.000,00							27.883.208,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	11 Unit	27.826.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	27.883.208,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	5 Unit	6.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	6.500.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.010.000,00							25.010.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	2 Unit	18.010.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	25.010.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
207.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**26.000.000,00**							**26.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***26.000.000,00***							***26.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	26.000.000,00						100.00 %	26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						26.000.000,00					Kecamatan Kebumen		26.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						26.000.000,00					Kecamatan Kebumen		26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.000.000,00						4 Laporan	26.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						26.000.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	26.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	26.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
208.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**32.000.000,00**							**32.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***32.000.000,00***							***32.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	32.000.000,00						100.00 Indeks	32.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.000.000,00					Kecamatan Kebumen		32.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.000.000,00					Kecamatan Kebumen		32.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	32.000.000,00						100 Orang	32.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						32.000.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	32.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	32.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
209.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**164.322.000,00**							**156.800.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***164.322.000,00***							***156.800.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	164.322.000,00						100.00 %	156.800.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						164.322.000,00					Kecamatan Kebumen		156.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						164.322.000,00					Kecamatan Kebumen		156.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	17.500.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.123.000,00						1 Dokumen	44.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	59.504.000,00						4 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	2.600.000,00						4 Dokumen	2.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.395.000,00						5 Dokumen	29.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.700.000,00						1 Laporan	7.700.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						25.395.000,00							29.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	25.395.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	29.500.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						17.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.600.000,00							2.600.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen		4 Dokumen	24 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	2.600.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	4.500.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						39.123.000,00							44.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.123.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	44.500.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						59.504.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	59.504.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						7.700.000,00							7.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	7.700.000,00	KECAMATAN KEBUMEN
		KELURAHAN PANJER						**762.260.000,00**							**842.402.544,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**762.260.000,00**							**842.402.544,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**762.260.000,00**							**842.402.544,00**	
210.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.001.510.044,00**							**7.214.566.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***103.634.000,00***							***64.054.304,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.05 Nilai	71.27 Nilai	103.634.000,00						72.51 Nilai	64.054.304,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	103.634.000,00						92.70 Indeks	64.054.304,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	103.634.000,00						92.70 Indeks	64.054.304,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	103.634.000,00						92.70 Indeks	64.054.304,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	103.634.000,00						92.70 Indeks	64.054.304,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	103.634.000,00						92.70 Indeks	64.054.304,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Panjer		33.769.304,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Panjer		33.769.304,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	20.010.000,00						6 Dokumen	20.710.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	12.392.000,00						28 Laporan	13.059.304,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.200.000,00							1.900.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	5 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	1.900.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						636.000,00							644.304,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	636.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Laporan	644.304,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Panjer		6.177.184.481,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Panjer		6.177.184.481,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	66.500.000,00						28 Dokumen	69.181.481,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Dokumen	10.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Panjer		169.690.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Panjer		169.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	8.200.000,00						72 Dokumen	8.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	7.500.000,00						72 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	72 Paket	47.000.000,00						72 Paket	48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	55.300.000,00						24 Paket	59.590.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	27.144.000,00						24 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	12.950.000,00						24 Paket	13.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	1.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	1.200.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	12 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.144.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	3.144.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	3.500.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	3.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.500.000,00							12.590.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	11.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	12.590.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	1.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Panjer		139.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Panjer		139.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		38 Unit	29 Unit	15.000.000,00						7 Unit	16.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit		38 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Unit	16.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Panjer		470.970.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Panjer		470.970.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	90.572.000,00						72 Laporan	93.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	484.441.000,00						72 Laporan	373.148.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						54.034.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	54.034.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Panjer		223.953.208,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Panjer		223.953.208,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	98.010.000,00						8 Unit	120.010.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	70.576.000,00						45 Unit	71.633.208,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	65 Unit	31.710.000,00						65 Unit	32.310.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	7 Unit	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	9.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.120.000,00							5.220.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	8 Unit	5.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	5.220.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN PANJER
211.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.105.167.000,00**							**3.341.795.407,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***635.426.000,00***							***753.348.240,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bumirejo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	635.426.000,00						100.00 %	753.348.240,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Selang	100.00 %		100.00 %	100.00 %	635.426.000,00						100.00 %	753.348.240,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tamanwinangun	100.00 %		100.00 %	100.00 %	635.426.000,00						100.00 %	753.348.240,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen	100.00 %		100.00 %	100.00 %	635.426.000,00						100.00 %	753.348.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer	100.00 %		100.00 %	100.00 %	635.426.000,00						100.00 %	753.348.240,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Panjer		3.341.795.407,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Panjer		3.341.795.407,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	19.930.000,00						5 Laporan	19.930.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	82.900.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	88.900.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.181.795.000,00						8 Pokmas / Ormas	1.248.586.607,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	36 Unit	1.820.542.000,00						36 Unit	1.984.378.800,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						16.300.000,00							16.300.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	16.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Lembaga Kemasyarakatan	16.300.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						391.462.000,00							477.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	9 Unit	391.462.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Unit	477.000.000,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						226.464.000,00							258.848.240,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	226.464.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Pokmas / Ormas	258.848.240,00	KELURAHAN PANJER
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Panjer || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	1.200.000,00	KELURAHAN PANJER
		KELURAHAN SELANG						**806.120.000,00**							**815.798.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**806.120.000,00**							**815.798.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	**KECAMATAN**						**806.120.000,00**							**815.798.000,00**	
212.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.001.510.044,00**							**7.214.566.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***175.557.000,00***							***189.150.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.05 Nilai	71.27 Nilai	175.557.000,00						72.51 Nilai	189.150.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.557.000,00						92.70 Indeks	189.150.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.557.000,00						92.70 Indeks	189.150.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.557.000,00						92.70 Indeks	189.150.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.557.000,00						92.70 Indeks	189.150.000,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.557.000,00						92.70 Indeks	189.150.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Selang		33.769.304,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Selang		33.769.304,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	20.010.000,00						6 Dokumen	20.710.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	12.392.000,00						28 Laporan	13.059.304,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.000,00							3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	3.500.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Selang		6.177.184.481,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Selang		6.177.184.481,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	66.500.000,00						28 Dokumen	69.181.481,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Dokumen	9.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Selang		169.690.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Selang		169.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	8.200.000,00						72 Dokumen	8.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	7.500.000,00						72 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	72 Paket	47.000.000,00						72 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	55.300.000,00						24 Paket	59.590.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	27.144.000,00						24 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	12.950.000,00						24 Paket	13.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.250.000,00							2.250.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	2.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	2.250.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	12 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	1.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Selang		139.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Selang		139.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	6 Unit	89.837.000,00						6 Unit	88.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	1 Unit	17.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	20.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Selang		470.970.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Selang		470.970.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	90.572.000,00						72 Laporan	93.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	484.441.000,00						72 Laporan	373.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	4.140.000,00						60 Laporan	4.250.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						990.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	990.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	1.100.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.300.000,00							9.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	9.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	9.300.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						92.517.000,00							93.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	92.517.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	93.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Selang		223.953.208,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Selang		223.953.208,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	98.010.000,00						8 Unit	120.010.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	70.576.000,00						45 Unit	71.633.208,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	65 Unit	31.710.000,00						65 Unit	32.310.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	6 Unit	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	9.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	20 Unit	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN SELANG
213.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.105.167.000,00**							**3.341.795.407,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***616.563.000,00***							***616.648.000,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bumirejo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	616.563.000,00						100.00 %	616.648.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Selang	100.00 %		100.00 %	100.00 %	616.563.000,00						100.00 %	616.648.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tamanwinangun	100.00 %		100.00 %	100.00 %	616.563.000,00						100.00 %	616.648.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen	100.00 %		100.00 %	100.00 %	616.563.000,00						100.00 %	616.648.000,00	
			5.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer	100.00 %		100.00 %	100.00 %	616.563.000,00						100.00 %	616.648.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Selang		3.341.795.407,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Selang		3.341.795.407,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	19.930.000,00						5 Laporan	19.930.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	82.900.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	88.900.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.181.795.000,00						8 Pokmas / Ormas	1.248.586.607,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	36 Unit	1.820.542.000,00						36 Unit	1.984.378.800,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						14.000.000,00							14.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Lembaga Kemasyarakatan	14.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						428.525.000,00							428.148.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	6 Unit	428.525.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Unit	428.148.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						169.538.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	169.538.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Pokmas / Ormas	170.000.000,00	KELURAHAN SELANG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Selang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	4.500.000,00	KELURAHAN SELANG
		KELURAHAN TAMANWINANGUN						**794.880.000,00**							**824.080.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**794.880.000,00**							**824.080.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**794.880.000,00**							**824.080.000,00**	
214.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.001.510.044,00**							**7.214.566.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***156.880.000,00***							***168.080.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.05 Nilai	71.27 Nilai	156.880.000,00						72.51 Nilai	168.080.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.880.000,00						92.70 Indeks	168.080.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.880.000,00						92.70 Indeks	168.080.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.880.000,00						92.70 Indeks	168.080.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.880.000,00						92.70 Indeks	168.080.000,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.880.000,00						92.70 Indeks	168.080.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		33.769.304,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		33.769.304,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	20.010.000,00						6 Dokumen	20.710.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	12.392.000,00						28 Laporan	13.059.304,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	3.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Tamanwinangun		6.177.184.481,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Tamanwinangun		6.177.184.481,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	66.500.000,00						28 Dokumen	69.181.481,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						13.000.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	3 Dokumen	13.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Dokumen	14.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		169.690.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		169.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	7.500.000,00						72 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	72 Paket	47.000.000,00						72 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	55.300.000,00						24 Paket	59.590.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	27.144.000,00						24 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	12.950.000,00						24 Paket	13.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Paket	8.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	7.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.800.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	11.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	12.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	1.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		139.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		139.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	6 Unit	89.837.000,00						6 Unit	88.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	1 Unit	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	10.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		470.970.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		470.970.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	90.572.000,00						72 Laporan	93.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	484.441.000,00						72 Laporan	373.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	4.140.000,00						60 Laporan	4.250.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.200.000,00							15.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	15.200.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						91.880.000,00							91.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	91.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	91.880.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		223.953.208,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Tamanwinangun		223.953.208,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	70.576.000,00						45 Unit	71.633.208,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	65 Unit	31.710.000,00						65 Unit	32.310.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	6 Unit	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	8.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	10 Unit	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	4.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
215.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.105.167.000,00**							**3.341.795.407,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***620.000.000,00***							***644.000.000,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bumirejo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	620.000.000,00						100.00 %	644.000.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Selang	100.00 %		100.00 %	100.00 %	620.000.000,00						100.00 %	644.000.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tamanwinangun	100.00 %		100.00 %	100.00 %	620.000.000,00						100.00 %	644.000.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen	100.00 %		100.00 %	100.00 %	620.000.000,00						100.00 %	644.000.000,00	
			5.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer	100.00 %		100.00 %	100.00 %	620.000.000,00						100.00 %	644.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tamanwinangun		3.341.795.407,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tamanwinangun		3.341.795.407,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	19.930.000,00						5 Laporan	19.930.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	82.900.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	88.900.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.181.795.000,00						8 Pokmas / Ormas	1.248.586.607,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	36 Unit	1.820.542.000,00						36 Unit	1.984.378.800,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Lembaga Kemasyarakatan	17.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						320.000.000,00							330.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	5 Unit	320.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Unit	330.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						280.000.000,00							294.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	280.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Pokmas / Ormas	294.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Tamanwinangun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	3.000.000,00	KELURAHAN TAMANWINANGUN
		KELURAHAN KEBUMEN						**778.771.000,00**							**813.109.167,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**778.771.000,00**							**813.109.167,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**778.771.000,00**							**813.109.167,00**	
216.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.001.510.044,00**							**7.214.566.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***156.648.000,00***							***170.148.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.05 Nilai	71.27 Nilai	156.648.000,00						72.51 Nilai	170.148.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.648.000,00						92.70 Indeks	170.148.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.648.000,00						92.70 Indeks	170.148.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.648.000,00						92.70 Indeks	170.148.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.648.000,00						92.70 Indeks	170.148.000,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	156.648.000,00						92.70 Indeks	170.148.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Kebumen		33.769.304,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Kebumen		33.769.304,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	20.010.000,00						6 Dokumen	20.710.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	12.392.000,00						28 Laporan	13.059.304,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	2.500.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Kebumen		6.177.184.481,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Kebumen		6.177.184.481,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	66.500.000,00						28 Dokumen	69.181.481,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Dokumen	8.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Kebumen		169.690.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Kebumen		169.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	7.500.000,00						72 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	72 Paket	47.000.000,00						72 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	55.300.000,00						24 Paket	59.590.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	27.144.000,00						24 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	12.950.000,00						24 Paket	13.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	5.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	10.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	3.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Kebumen		139.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Kebumen		139.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	35 Unit	19.000.000,00						70 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	6 Unit	89.837.000,00						6 Unit	88.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.000.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	6 Unit	24.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	24.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Kebumen		470.970.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Kebumen		470.970.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	90.572.000,00						72 Laporan	93.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	484.441.000,00						72 Laporan	373.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	4.140.000,00						60 Laporan	4.250.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						800.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	800.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	18.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						32.848.000,00							32.848.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	32.848.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	32.848.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Kebumen		223.953.208,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Kebumen		223.953.208,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	98.010.000,00						8 Unit	120.010.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	70.576.000,00						45 Unit	71.633.208,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	65 Unit	31.710.000,00						65 Unit	32.310.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	11 Unit	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	8.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	8 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	5.500.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	40.000.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
217.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.105.167.000,00**							**3.341.795.407,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***612.123.000,00***							***629.961.167,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bumirejo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	612.123.000,00						100.00 %	629.961.167,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Selang	100.00 %		100.00 %	100.00 %	612.123.000,00						100.00 %	629.961.167,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tamanwinangun	100.00 %		100.00 %	100.00 %	612.123.000,00						100.00 %	629.961.167,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen	100.00 %		100.00 %	100.00 %	612.123.000,00						100.00 %	629.961.167,00	
			5.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer	100.00 %		100.00 %	100.00 %	612.123.000,00						100.00 %	629.961.167,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Kebumen		3.341.795.407,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Kebumen		3.341.795.407,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	19.930.000,00						5 Laporan	19.930.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	82.900.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	88.900.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.181.795.000,00						8 Pokmas / Ormas	1.248.586.607,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	36 Unit	1.820.542.000,00						36 Unit	1.984.378.800,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						22.600.000,00							22.600.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	22.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Lembaga Kemasyarakatan	22.600.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						330.000.000,00							333.660.800,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	5 Unit	330.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Unit	333.660.800,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						251.793.000,00							265.970.367,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	251.793.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Pokmas / Ormas	265.970.367,00	KELURAHAN KEBUMEN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						7.730.000,00							7.730.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	7.730.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	7.730.000,00	KELURAHAN KEBUMEN
		KELURAHAN BUMIREJO						**814.182.000,00**							**823.631.481,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**814.182.000,00**							**823.631.481,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**814.182.000,00**							**823.631.481,00**	
218.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.001.510.044,00**							**7.214.566.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah						***175.127.000,00***							***122.793.481,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.05 Nilai	71.27 Nilai	175.127.000,00						72.51 Nilai	122.793.481,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Selang	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.127.000,00						92.70 Indeks	122.793.481,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Tamanwinangun	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.127.000,00						92.70 Indeks	122.793.481,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjer	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.127.000,00						92.70 Indeks	122.793.481,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Kebumen	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.127.000,00						92.70 Indeks	122.793.481,00	
			6.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Bumirejo	93.00 Indeks		92.20 Indeks	92.50 Indeks	175.127.000,00						92.70 Indeks	122.793.481,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Bumirejo		33.769.304,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.402.000,00					Kelurahan Bumirejo		33.769.304,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	26 Dokumen	20.010.000,00						6 Dokumen	20.710.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	12.392.000,00						28 Laporan	13.059.304,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 Dokumen		26 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	3.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Laporan		28 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Bumirejo		6.177.184.481,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.903.778.044,00					Kelurahan Bumirejo		6.177.184.481,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	66.500.000,00						28 Dokumen	69.181.481,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.000.000,00							16.181.481,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen		28 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Dokumen	16.181.481,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Bumirejo		169.690.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.044.000,00					Kelurahan Bumirejo		169.690.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	8.200.000,00						72 Dokumen	8.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	7.500.000,00						72 Dokumen	8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	72 Paket	47.000.000,00						72 Paket	48.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	55.300.000,00						24 Paket	59.590.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	27.144.000,00						24 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	12.950.000,00						24 Paket	13.950.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket		72 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Paket	8.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen		72 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Paket	10.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	72 Dokumen		72 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Dokumen	1.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Bumirejo		139.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						123.837.000,00					Kelurahan Bumirejo		139.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	6 Unit	89.837.000,00						6 Unit	88.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.837.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		9 Unit	3 Unit	15.837.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Bumirejo		470.970.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						579.153.000,00					Kelurahan Bumirejo		470.970.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	90.572.000,00						72 Laporan	93.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	484.441.000,00						72 Laporan	373.148.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	4.140.000,00						60 Laporan	4.250.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						800.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	800.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.472.000,00							11.472.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	11.472.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	11.472.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						89.178.000,00							29.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	12 Laporan	89.178.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		72 Laporan	29.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Bumirejo		223.953.208,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200.296.000,00					Kelurahan Bumirejo		223.953.208,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	98.010.000,00						8 Unit	120.010.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	45 Unit	70.576.000,00						45 Unit	71.633.208,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	65 Unit	31.710.000,00						65 Unit	32.310.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		45 Unit	5 Unit	9.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	9.750.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.090.000,00							5.090.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		67 Unit	22 Unit	5.090.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Unit	5.090.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
219.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.105.167.000,00**							**3.341.795.407,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***621.055.000,00***							***697.838.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Bumirejo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	621.055.000,00						100.00 %	697.838.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Selang	100.00 %		100.00 %	100.00 %	621.055.000,00						100.00 %	697.838.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Tamanwinangun	100.00 %		100.00 %	100.00 %	621.055.000,00						100.00 %	697.838.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Kebumen	100.00 %		100.00 %	100.00 %	621.055.000,00						100.00 %	697.838.000,00	
			5.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjer	100.00 %		100.00 %	100.00 %	621.055.000,00						100.00 %	697.838.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Bumirejo		3.341.795.407,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.105.167.000,00					Kelurahan Bumirejo		3.341.795.407,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	19.930.000,00						5 Laporan	19.930.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	82.900.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	88.900.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	1.181.795.000,00						8 Pokmas / Ormas	1.248.586.607,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	36 Unit	1.820.542.000,00						36 Unit	1.984.378.800,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						13.000.000,00							19.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga Kemasyarakatan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	13.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Lembaga Kemasyarakatan	19.000.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						350.555.000,00							415.570.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 Unit		35 Unit	6 Unit	350.555.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Unit	415.570.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						254.000.000,00							259.768.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas		8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	254.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Pokmas / Ormas	259.768.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.500.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Bumirejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	3.500.000,00	KELURAHAN BUMIREJO
		KECAMATAN PEJAGOAN						**2.440.800.684,00**							**2.790.686.944,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.440.800.684,00**							**2.790.686.944,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.440.800.684,00**							**2.790.686.944,00**	
220.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.321.715.684,00**							**2.678.601.944,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.321.715.684,00***							***2.672.601.944,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.05 Nilai		71.20 Nilai	71.30 Nilai	2.321.715.684,00						72.60 Nilai	2.672.601.944,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.736.000,00					Kecamatan Pejagoan		4.736.878,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.736.000,00					Kecamatan Pejagoan		4.736.878,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.696.000,00						6 Dokumen	2.696.878,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.040.000,00						8 Laporan	2.040.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.696.000,00							2.696.878,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.696.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	2.696.878,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.040.000,00							2.040.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.040.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	2.040.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.071.067.684,00					Kecamatan Pejagoan		2.474.852.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.071.067.684,00					Kecamatan Pejagoan		2.474.852.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8.323.000,00						8 Dokumen	8.323.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.062.744.684,00						16 Orang/bulan	2.466.529.500,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.062.744.684,00							2.466.529.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.062.744.684,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Orang/bulan	2.466.529.500,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						8.323.000,00							8.323.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	8.323.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	8.323.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.554.000,00					Kecamatan Pejagoan		17.554.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.554.000,00					Kecamatan Pejagoan		17.554.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00						12 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00						12 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.500.000,00						12 Paket	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.254.000,00						4 Paket	2.254.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.254.000,00							2.254.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.254.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.254.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	1.500.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					Kecamatan Pejagoan		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					Kecamatan Pejagoan		40.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	40.000.000,00						4 Unit	40.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.611.000,00					Kecamatan Pejagoan		71.320.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.611.000,00					Kecamatan Pejagoan		71.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00						12 Laporan	21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.111.000,00						12 Laporan	49.820.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	500.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						105.111.000,00							49.820.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.111.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	49.820.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.747.000,00					Kecamatan Pejagoan		70.138.566,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61.747.000,00					Kecamatan Pejagoan		70.138.566,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	27.123.000,00						2 Unit	33.491.709,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	30.624.000,00						14 Unit	30.646.857,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.000.000,00						10 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.624.000,00							30.646.857,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	30.624.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Unit	30.646.857,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						27.123.000,00							33.491.709,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	27.123.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	33.491.709,00	KECAMATAN PEJAGOAN
221.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**7.040.000,00**							**7.040.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***7.040.000,00***							***7.040.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	7.040.000,00						100.00 %	7.040.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.040.000,00					Kecamatan Pejagoan		7.040.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.040.000,00					Kecamatan Pejagoan		7.040.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.040.000,00						4 Laporan	7.040.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7.040.000,00							7.040.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.040.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	7.040.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.040.000,00					Kecamatan Pejagoan		7.040.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	0 Laporan	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	KECAMATAN PEJAGOAN
222.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**14.388.000,00**							**14.388.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***14.388.000,00***							***14.388.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	14.388.000,00						100.00 Indeks	14.388.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.388.000,00					Kecamatan Pejagoan		14.388.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.388.000,00					Kecamatan Pejagoan		14.388.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	14.388.000,00						Orang	14.388.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						14.388.000,00							14.388.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	14.388.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Orang	14.388.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
223.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**97.657.000,00**							**90.657.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***97.657.000,00***							***90.657.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	97.657.000,00						100.00 %	90.657.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						97.657.000,00					Kecamatan Pejagoan		90.657.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						97.657.000,00					Kecamatan Pejagoan		90.657.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.900.000,00						1 Dokumen	13.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.400.000,00						4 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.950.000,00						2 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.120.000,00						1 Dokumen	8.120.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.620.000,00						5 Dokumen	10.620.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.667.000,00						1 Laporan	7.667.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10.620.000,00							10.620.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.620.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	10.620.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						4.950.000,00							4.950.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	4.950.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						8.120.000,00							8.120.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.120.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	8.120.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						13.900.000,00							13.900.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.900.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	13.900.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						35.400.000,00							35.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	35.400.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						7.667.000,00							7.667.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.667.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	7.667.000,00	KECAMATAN PEJAGOAN
		KECAMATAN SRUWENG						**2.383.455.998,00**							**3.021.458.938,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.383.455.998,00**							**3.021.458.938,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.383.455.998,00**							**3.021.458.938,00**	
224.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.274.466.238,00**							**2.906.439.938,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.246.466.238,00***							***2.869.439.938,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.30 Nilai	2.246.466.238,00						72.60 Nilai	2.869.439.938,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.370.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		5.035.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.370.000,00					Masyarakat dan Stakeholder terkait		5.035.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00						6 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.370.000,00						8 Laporan	3.035.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.370.000,00							3.035.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.370.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	3.035.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.057.110.998,00					stakeholder terkait		2.726.997.035,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.057.110.998,00					stakeholder terkait		2.726.997.035,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.500.000,00						8 Dokumen	3.970.759,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.053.610.998,00						17 Orang/bulan	2.723.026.276,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.053.610.998,00							2.723.026.276,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.053.610.998,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Orang/bulan	2.723.026.276,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.500.000,00							3.970.759,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	3 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	3.970.759,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.549.000,00					stakeholder terkait		39.647.924,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						29.549.000,00					stakeholder terkait		39.647.924,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	2.974.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.000.000,00						12 Paket	17.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	8.624.924,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.049.000,00						4 Paket	3.049.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	4.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						16.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	17.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.049.000,00							3.049.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.049.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.049.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							8.624.924,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	8.624.924,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							2.974.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.974.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						44.000.000,00					stakeholder terkait		51.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						44.000.000,00					stakeholder terkait		51.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	21.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	19.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	5 Unit	25.000.000,00						4 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	21.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	19.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.436.240,00					stakeholder terkait		41.759.979,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.436.240,00					stakeholder terkait		41.759.979,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00						12 Laporan	19.059.979,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.436.240,00						12 Laporan	21.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	1.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00							19.059.979,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	19.059.979,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.436.240,00							21.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.436.240,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	21.500.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.000.000,00					stakeholder terkait		42.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.000.000,00					stakeholder terkait		42.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	19.000.000,00						12 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000,00						2 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3.000.000,00						8 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						19.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	19.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
225.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***5.000.000,00***							***5.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	5.000.000,00						100.00 %	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.000.000,00					Masyarakat dan stakeholder terkait		5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat						5.000.000,00					Masyarakat dan stakeholder terkait		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Laporan	0,00	KECAMATAN SRUWENG
226.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**12.200.000,00**							**14.200.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***12.200.000,00***							***14.200.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	12.200.000,00						100.00 Indeks	14.200.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						12.200.000,00					orang yang mengikuti kegiatan		14.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						12.200.000,00					orang yang mengikuti kegiatan		14.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang		200 Orang	200 Orang	12.200.000,00						200 Orang	14.200.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						12.200.000,00							14.200.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang		200 Orang	200 Orang	12.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		200 Orang	14.200.000,00	KECAMATAN SRUWENG
227.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**91.789.760,00**							**95.819.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***91.789.760,00***							***95.819.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	91.789.760,00						100.00 %	95.819.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						91.789.760,00					-		95.819.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						91.789.760,00					-		95.819.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	19 Dokumen	2.500.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000,00						2 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	3.270.760,00						21 Dokumen	5.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00						1 Dokumen	10.300.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00						5 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.719.000,00						1 Laporan	6.719.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.270.760,00							5.800.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	21 Dokumen		21 Dokumen	2 Dokumen	3.270.760,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		21 Dokumen	5.800.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						9.300.000,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	10.300.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						21.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	22.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN SRUWENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.719.000,00							6.719.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.719.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	6.719.000,00	KECAMATAN SRUWENG
		KECAMATAN ADIMULYO						**2.340.190.342,00**							**2.822.227.407,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.340.190.342,00**							**2.822.227.407,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.340.190.342,00**							**2.822.227.407,00**	
228.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.166.849.342,00**							**2.648.386.407,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.160.349.342,00***							***2.641.886.407,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.90 Nilai	72.00 Nilai	2.160.349.342,00						72.51 Nilai	2.641.886.407,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					Kecamatan Adimulyo		13.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					Kecamatan Adimulyo		13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6.500.000,00						6 Dokumen	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	6.500.000,00						8 Laporan	6.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	6.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	6.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.972.988.342,00					Kecamatan Adimulyo		2.433.433.086,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.972.988.342,00					Kecamatan Adimulyo		2.433.433.086,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.410.000,00						8 Dokumen	14.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.961.578.342,00						17 Orang/bulan	2.419.433.086,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.961.578.342,00							2.419.433.086,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.961.578.342,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Orang/bulan	2.419.433.086,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						11.410.000,00							14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.410.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	14.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.645.000,00					Kecamatan Adimulyo		34.308.639,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.645.000,00					Kecamatan Adimulyo		34.308.639,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000,00						12 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.126.000,00						12 Dokumen	3.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.200.000,00						4 Laporan	3.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.400.000,00						12 Paket	15.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.800.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.479.000,00						4 Paket	1.608.639,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.200.000,00						4 Paket	2.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.200.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.400.000,00							15.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	15.600.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.479.000,00							1.608.639,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.479.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	1.608.639,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.440.000,00							1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.800.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.200.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	3.600.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.126.000,00							3.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.126.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	3.200.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						38.600.000,00					Kecamatan Adimulyo		39.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						38.600.000,00					Kecamatan Adimulyo		39.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	38.600.000,00						6 Unit	39.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						38.600.000,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	38.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	39.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.161.000,00					Kecamatan Adimulyo		77.668.682,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.161.000,00					Kecamatan Adimulyo		77.668.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00						12 Laporan	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00						12 Laporan	53.018.682,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	561.000,00						12 Laporan	1.650.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						561.000,00							1.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	561.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.650.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						22.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	23.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						33.600.000,00							53.018.682,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	53.018.682,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.455.000,00					Kecamatan Adimulyo		50.976.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						55.455.000,00					Kecamatan Adimulyo		50.976.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	13.000.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	35.675.000,00						14 Unit	36.976.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.780.000,00						12 Unit	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.675.000,00							36.976.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	35.675.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Unit	36.976.000,00	KECAMATAN ADIMULYO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.780.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.780.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	13.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
229.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11.500.000,00**							**12.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***11.500.000,00***							***12.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	11.500.000,00						100.00 %	12.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.500.000,00					Kecamatan Adimulyo		12.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.500.000,00					Kecamatan Adimulyo		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.500.000,00						4 Laporan	12.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						11.500.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
230.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**24.191.000,00**							**24.191.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***24.191.000,00***							***24.191.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	24.191.000,00						100.00 Indeks	24.191.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						24.191.000,00					Kecamatan Adimulyo		24.191.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						24.191.000,00					Kecamatan Adimulyo		24.191.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	24.191.000,00						50 Orang	24.191.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						24.191.000,00							24.191.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	24.191.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Orang	24.191.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
231.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**137.650.000,00**							**137.650.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***137.650.000,00***							***137.650.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	137.650.000,00						100.00 %	137.650.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						137.650.000,00					Kecamatan Adimulyo		137.650.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						137.650.000,00					Kecamatan Adimulyo		137.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	6.250.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00						1 Dokumen	13.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000,00						1 Dokumen	32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00						4 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.700.000,00						1 Dokumen	13.300.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	31.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.200.000,00						1 Laporan	11.200.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						30.000.000,00							31.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	31.500.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						6.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	6.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						12.700.000,00							13.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	13.300.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.000.000,00							13.650.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	13.650.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						30.500.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	32.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						35.000.000,00							36.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						10.200.000,00							11.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	11.200.000,00	KECAMATAN ADIMULYO
		KECAMATAN KUWARASAN						**2.251.713.638,00**							**2.544.889.077,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.251.713.638,00**							**2.544.889.077,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.251.713.638,00**							**2.544.889.077,00**	
232.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.096.113.638,00**							**2.390.389.077,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.080.113.638,00***							***2.380.389.077,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		70.52 Nilai	71.27 Nilai	2.080.113.638,00						72.51 Nilai	2.380.389.077,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		4.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00						8 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00						8 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.860.909.638,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		2.158.364.143,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.860.909.638,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		2.158.364.143,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00						8 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.855.909.638,00						18 Orang/bulan	2.152.364.143,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.855.909.638,00							2.152.364.143,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.855.909.638,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Orang/bulan	2.152.364.143,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						22.160.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		28.360.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						22.160.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		28.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.160.000,00						4 Laporan	1.160.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00						12 Paket	13.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00						4 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00							13.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	13.200.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.160.000,00							1.160.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.160.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.160.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	4 Unit	30.000.000,00						4 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang difokuskan pada kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan		1 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.044.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		118.164.934,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.044.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		118.164.934,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.144.000,00						12 Laporan	27.926.887,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.650.000,00						12 Laporan	89.988.047,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000,00						12 Laporan	250.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						250.000,00							250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	250.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.144.000,00							27.926.887,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.144.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	27.926.887,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.650.000,00							89.988.047,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.650.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	89.988.047,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		51.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Kuwarasan		51.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.500.000,00						2 Unit	8.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	33.000.000,00						14 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	4.500.000,00						15 Unit	8.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						33.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	33.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	4.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
233.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**12.500.000,00**							**12.500.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***12.500.000,00***							***12.500.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	12.500.000,00						100.00 %	12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.500.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan		12.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.500.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan		12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00						4 Laporan	12.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						12.500.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	12.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
234.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***25.000.000,00***							***25.000.000,00***	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan		25.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kuwarasan		25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang		200 Orang	200 Orang	25.000.000,00						200 Orang	25.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang		200 Orang	200 Orang	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		200 Orang	25.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
235.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**118.100.000,00**							**117.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***118.100.000,00***							***117.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						118.100.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kuwarasan		117.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						118.100.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Kuwarasan		117.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	20 Dokumen	17.600.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00						1 Dokumen	37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00						4 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00						5 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						17.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	20 Dokumen	17.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						6.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.500.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						37.000.000,00							37.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	37.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						35.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	45.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KUWARASAN
		KECAMATAN ROWOKELE						**2.444.638.488,00**							**2.631.016.133,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.444.638.488,00**							**2.631.016.133,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.444.638.488,00**							**2.631.016.133,00**	
236.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.320.311.488,00**							**2.501.408.133,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.299.311.488,00***							***2.474.408.133,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.42 Nilai	71.45 Nilai	2.299.311.488,00						72.51 Nilai	2.474.408.133,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00						6 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00						8 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.024.925.488,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		2.180.133.133,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.024.925.488,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		2.180.133.133,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.352.000,00						8 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.012.573.488,00						19 Orang/bulan	2.167.133.133,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.012.573.488,00							2.167.133.133,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.012.573.488,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Orang/bulan	2.167.133.133,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.352.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.352.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.060.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		45.060.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.060.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		45.060.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000,00						12 Dokumen	2.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.960.000,00						4 Laporan	2.960.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00						12 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00						4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.100.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.100.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.960.000,00							2.960.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.960.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	2.960.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.554.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		45.325.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.554.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		45.325.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		15 Unit	15 Unit	10.300.000,00						15 Unit	10.300.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5 Unit	5 Unit	15.254.000,00						5 Unit	35.025.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						10.300.000,00							10.300.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		15 Unit	16 Unit	10.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	10.300.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.254.000,00							35.025.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5 Unit	5 Unit	15.254.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	35.025.000,00	KECAMATAN ROWOKELE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.037.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		128.155.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128.037.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		128.155.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.968.000,00						12 Laporan	34.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.969.000,00						12 Laporan	92.735.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00						12 Laporan	1.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.100.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.100.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						34.968.000,00							34.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.968.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	34.320.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						91.969.000,00							92.735.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	91.969.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	92.735.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.735.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		92.735.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						92.735.000,00					Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Rowokele		92.735.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	22.000.000,00						2 Unit	22.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	65.735.000,00						17 Unit	65.735.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.000.000,00						8 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.735.000,00							65.735.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	65.735.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Unit	65.735.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						22.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	22.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
237.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	10.000.000,00						100.00 %	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rowokele		10.000.000,00	
		Terlaksananya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rowokele		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
238.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**20.655.000,00**							**20.655.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***20.655.000,00***							***20.655.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	20.655.000,00						100.00 Indeks	20.655.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.655.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rowokele		20.655.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah						20.655.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rowokele		20.655.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	20.655.000,00						100 Orang	20.655.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						20.655.000,00							20.655.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	20.655.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	20.655.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
239.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**93.672.000,00**							**98.953.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***93.672.000,00***							***98.953.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	93.672.000,00						100.00 %	98.953.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						93.672.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Rowokele		98.953.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						93.672.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Rowokele		98.953.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.523.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.545.000,00						1 Dokumen	20.953.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	33.408.000,00						4 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00						5 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.196.000,00						1 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.523.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.523.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						17.545.000,00							20.953.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.545.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	20.953.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						33.408.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	33.408.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.196.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.196.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN ROWOKELE
		KECAMATAN SEMPOR						**2.470.274.504,00**							**2.903.176.542,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.470.274.504,00**							**2.903.176.542,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.470.274.504,00**							**2.903.176.542,00**	
240.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.305.974.504,00**							**2.740.576.542,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.305.974.504,00***							***2.738.176.542,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.50 Nilai	72.75 Nilai	2.305.974.504,00						73.50 Nilai	2.738.176.542,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.200.000,00					ASN Kecamatan Sempor		6.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.200.000,00					ASN Kecamatan Sempor		6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.600.000,00						6 Dokumen	4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.600.000,00						8 Laporan	1.700.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.600.000,00							4.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	4.800.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.600.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	1.700.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.003.650.504,00					ASN Kecamatan Sempor		2.429.838.396,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.003.650.504,00					ASN Kecamatan Sempor		2.429.838.396,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.900.000,00						8 Dokumen	12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.991.750.504,00						17 Orang/bulan	2.417.738.396,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.991.750.504,00							2.417.738.396,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.991.750.504,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Orang/bulan	2.417.738.396,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						11.900.000,00							12.100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	11.900.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	12.100.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.700.000,00					ASN Kecamatan Sempor		35.700.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.700.000,00					ASN Kecamatan Sempor		35.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000,00						12 Dokumen	1.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000,00						12 Dokumen	2.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.400.000,00						4 Laporan	2.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.200.000,00						12 Paket	13.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.700.000,00						4 Paket	7.900.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.700.000,00						4 Paket	3.900.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.600.000,00						4 Paket	3.700.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.600.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.600.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.700.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.200.000,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	13.500.000,00	KECAMATAN SEMPOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.700.000,00							3.900.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.900.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.900.000,00							1.900.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.900.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.700.000,00							7.900.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.700.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.900.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	2.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.200.000,00							2.400.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.200.000,00					ASN Kecamatan Sempor		21.400.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.200.000,00					ASN Kecamatan Sempor		21.400.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	3.200.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	2 Unit	21.000.000,00						2 Unit	21.400.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	3.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.000.000,00							21.400.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	2 Unit	21.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	21.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.324.000,00					ASN Kecamatan Sempor		161.238.146,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						153.324.000,00					ASN Kecamatan Sempor		161.238.146,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.000.000,00						12 Laporan	42.067.146,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.524.000,00						12 Laporan	118.321.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	800.000,00						12 Laporan	850.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						800.000,00							850.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	850.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						41.000.000,00							42.067.146,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	41.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	42.067.146,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						111.524.000,00							118.321.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.524.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	118.321.000,00	KECAMATAN SEMPOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.900.000,00					ASN Kecamatan Sempor		85.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.900.000,00					ASN Kecamatan Sempor		85.900.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	13.000.000,00						3 Unit	13.400.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		10 Unit	16 Unit	56.400.000,00						16 Unit	57.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	6.200.000,00						9 Unit	6.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	8.300.000,00						6 Unit	8.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56.400.000,00							57.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		10 Unit	16 Unit	56.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Unit	57.500.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.200.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	6.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	6.500.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						13.000.000,00							13.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	13.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	13.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.300.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	8.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	8.500.000,00	KECAMATAN SEMPOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
241.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**13.300.000,00**							**13.500.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***13.300.000,00***							***13.500.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	13.300.000,00						100.00 %	13.500.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.300.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Sempor		13.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.300.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Sempor		13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.300.000,00						4 Laporan	13.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						13.300.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	13.300.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	13.500.000,00	KECAMATAN SEMPOR
242.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**25.000.000,00**							**26.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***25.000.000,00***							***26.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	25.000.000,00						100.00 Indeks	26.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Sempor		26.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Sempor		26.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	140 Orang		140 Orang	140 Orang	25.000.000,00						140 Orang	26.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						25.000.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	140 Orang		140 Orang	140 Orang	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		140 Orang	26.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR
243.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**126.000.000,00**							**123.100.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***126.000.000,00***							***123.100.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	126.000.000,00						100.00 %	123.100.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						126.000.000,00					Pemdes di wilayah Kecamatan Sempor		123.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						126.000.000,00					Pemdes di wilayah Kecamatan Sempor		123.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	14 Dokumen	7.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00						1 Dokumen	6.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	64.000.000,00						4 Dokumen	66.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00						1 Dokumen	8.600.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	16.400.000,00						5 Dokumen	16.800.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.300.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						16.400.000,00							16.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	16.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	16.800.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	14 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEMPOR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						8.400.000,00							8.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	8.600.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.200.000,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	6.400.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						19.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						64.000.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	64.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	66.000.000,00	KECAMATAN SEMPOR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							5.300.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	5.300.000,00	KECAMATAN SEMPOR
		KECAMATAN GOMBONG						**4.011.816.022,00**							**4.456.637.762,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.011.816.022,00**							**4.456.637.762,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.011.816.022,00**							**4.456.637.762,00**	
244.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.179.796.371,00**							**4.559.357.506,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***3.890.902.627,00***							***4.328.252.762,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombong	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	3.890.902.627,00						90.50 Indeks	4.328.252.762,00	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Wonokriyo	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	3.890.902.627,00						90.50 Indeks	4.328.252.762,00	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.50 Nilai	73.00 Nilai	3.890.902.627,00						73.50 Nilai	4.328.252.762,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.056.000,00					ASN Kecamatan Gombong		15.345.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.056.000,00					ASN Kecamatan Gombong		15.345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	11.081.000,00						14 Dokumen	12.250.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	2.975.000,00						16 Laporan	3.095.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	8 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.675.386.627,00					Kecamatan Gombong		4.111.188.762,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.675.386.627,00					Kecamatan Gombong		4.111.188.762,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.346.605,00						8 Dokumen	40.568.468,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.635.040.022,00						28 Orang/bulan	4.070.620.294,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.635.040.022,00							4.070.620.294,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.635.040.022,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Orang/bulan	4.070.620.294,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						18.000.605,00							18.001.468,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	18.000.605,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	18.001.468,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.529.000,00					Kecamatan Gombong		100.660.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.529.000,00					Kecamatan Gombong		100.660.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.200.000,00						12 Dokumen	6.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.480.000,00						4 Laporan	1.480.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	44.640.000,00						12 Paket	46.640.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	26.780.000,00						4 Paket	27.790.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.500.000,00						4 Paket	11.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.429.000,00						4 Paket	5.450.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						28.000.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	28.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	28.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.480.000,00							1.480.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.480.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.480.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					Kecamatan Gombong		53.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					Kecamatan Gombong		53.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	61.000.000,00						3 Unit	53.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.493.744,00					Kecamatan Gombong		134.444.744,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.493.744,00					Kecamatan Gombong		134.444.744,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.888.744,00						12 Laporan	60.388.744,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.155.000,00						12 Laporan	70.606.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.450.000,00						12 Laporan	3.450.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						31.132.000,00							32.132.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31.132.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	32.132.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						56.000.000,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	56.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.331.000,00					Kecamatan Gombong		144.719.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.331.000,00					Kecamatan Gombong		144.719.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	53.350.000,00						15 Unit	56.450.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	17.481.000,00						9 Unit	18.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.500.000,00						1 Unit	47.569.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.250.000,00							37.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	37.250.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	37.250.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							6.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	6.700.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.500.000,00							22.569.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	22.569.000,00	KECAMATAN GOMBONG
245.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**9.000.000,00**							**9.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***9.000.000,00***							***9.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	9.000.000,00						100.00 %	9.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Gombong		9.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						9.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Gombong		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00						4 Laporan	9.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
246.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**11.885.000,00**							**11.885.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***11.885.000,00***							***11.885.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	11.885.000,00						100.00 Indeks	11.885.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						11.885.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Gombong		11.885.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						11.885.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Gombong		11.885.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang		2 Orang	2 Orang	11.885.000,00						2 Orang	11.885.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						11.885.000,00							11.885.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang		2 Orang	80 Orang	11.885.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang	11.885.000,00	KECAMATAN GOMBONG
247.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**98.028.395,00**							**105.500.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***94.028.395,00***							***96.500.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	94.028.395,00						100.00 %	96.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						98.028.395,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Gombong		105.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						98.028.395,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Gombong		105.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00						1 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00						1 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.528.395,00						4 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000,00						3 Dokumen	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00						1 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.000.000,00						5 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						4.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.500.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN GOMBONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						22.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	22.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						28.528.395,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.528.395,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN GOMBONG
		KELURAHAN GOMBONG						**683.639.000,00**							**683.041.028,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**683.639.000,00**							**683.041.028,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**683.639.000,00**							**683.041.028,00**	
248.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.179.796.371,00**							**4.559.357.506,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***168.110.744,00***							***97.932.744,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombong	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	168.110.744,00						90.50 Indeks	97.932.744,00	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Wonokriyo	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	168.110.744,00						90.50 Indeks	97.932.744,00	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.50 Nilai	73.00 Nilai	168.110.744,00						73.50 Nilai	97.932.744,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.056.000,00					Kelurahan Gombong		15.345.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.056.000,00					Kelurahan Gombong		15.345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	11.081.000,00						14 Dokumen	12.250.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	2.975.000,00						16 Laporan	3.095.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	5 Dokumen	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	750.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						270.000,00							270.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	4 Laporan	270.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Laporan	270.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.675.386.627,00					Kelurahan Gombong		4.111.188.762,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.675.386.627,00					Kelurahan Gombong		4.111.188.762,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.346.605,00						8 Dokumen	40.568.468,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						14.000.000,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	14.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.529.000,00					Kelurahan Gombong		100.660.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.529.000,00					Kelurahan Gombong		100.660.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.200.000,00						12 Dokumen	6.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	44.640.000,00						12 Paket	46.640.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	26.780.000,00						4 Paket	27.790.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.500.000,00						4 Paket	11.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.429.000,00						4 Paket	5.450.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						900.000,00							900.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	900.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.700.000,00							2.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.800.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.300.000,00							11.300.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	11.300.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					Kelurahan Gombong		53.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					Kelurahan Gombong		53.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	61.000.000,00						3 Unit	53.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	21.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	11.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.493.744,00					Kelurahan Gombong		134.444.744,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.493.744,00					Kelurahan Gombong		134.444.744,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.888.744,00						12 Laporan	60.388.744,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.155.000,00						12 Laporan	70.606.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.450.000,00						12 Laporan	3.450.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.200.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.756.744,00							14.056.744,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.756.744,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	14.056.744,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						61.734.000,00							1.156.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	61.734.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.156.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.331.000,00					Kelurahan Gombong		144.719.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.331.000,00					Kelurahan Gombong		144.719.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	53.350.000,00						15 Unit	56.450.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	17.481.000,00						9 Unit	18.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.500.000,00						1 Unit	47.569.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	7 Unit	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	6.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	6.500.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	25.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
249.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.021.638.256,00**							**1.089.213.284,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***512.528.256,00***							***582.108.284,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Gombong	100.00 %		100.00 %	100.00 %	512.528.256,00						100.00 %	582.108.284,00	
			2.Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Wonokriyo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	512.528.256,00						100.00 %	582.108.284,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.021.638.256,00					Pokmas dan Ormas		1.089.213.284,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.021.638.256,00					Pokmas dan Ormas		1.089.213.284,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.055.000,00						2 Laporan	1.055.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	27.416.000,00						16 Lembaga Kemasyarakatan	29.400.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas		16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	330.782.000,00						16 Pokmas / Ormas	337.818.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	662.385.256,00						3 Unit	720.940.284,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Lembaga Kemasyarakatan	11.000.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						372.037.256,00							434.940.284,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	372.037.256,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	434.940.284,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						129.141.000,00							135.818.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas		16 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	129.141.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Pokmas / Ormas	135.818.000,00	KELURAHAN GOMBONG
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						350.000,00							350.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	350.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Gombong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	350.000,00	KELURAHAN GOMBONG
		KELURAHAN WONOKRIYO						**624.893.000,00**							**635.277.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**624.893.000,00**							**635.277.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**624.893.000,00**							**635.277.000,00**	
250.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.179.796.371,00**							**4.559.357.506,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***115.783.000,00***							***128.172.000,00***	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Gombong	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	115.783.000,00						90.50 Indeks	128.172.000,00	
			1.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Wonokriyo	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	115.783.000,00						90.50 Indeks	128.172.000,00	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.50 Nilai	73.00 Nilai	115.783.000,00						73.50 Nilai	128.172.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.056.000,00					Kelurahan Wonokriyo		15.345.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.056.000,00					Kelurahan Wonokriyo		15.345.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	11.081.000,00						14 Dokumen	12.250.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	2.975.000,00						16 Laporan	3.095.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.331.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	7 Dokumen	6.331.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	7.500.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						705.000,00							825.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	5 Laporan	705.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Laporan	825.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.675.386.627,00					Kelurahan Wonokriyo		4.111.188.762,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.675.386.627,00					Kelurahan Wonokriyo		4.111.188.762,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.346.605,00						8 Dokumen	40.568.468,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						8.346.000,00							8.567.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	8.346.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	8.567.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.529.000,00					Kelurahan Wonokriyo		100.660.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						97.529.000,00					Kelurahan Wonokriyo		100.660.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.200.000,00						12 Dokumen	6.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	44.640.000,00						12 Paket	46.640.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	26.780.000,00						4 Paket	27.790.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.500.000,00						4 Paket	11.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.429.000,00						4 Paket	5.450.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.529.000,00							1.550.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.529.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	1.550.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						13.640.000,00							15.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	13.640.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	15.640.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.500.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.500.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.500.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.480.000,00							7.490.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.480.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.490.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					Kelurahan Wonokriyo		53.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.000.000,00					Kelurahan Wonokriyo		53.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	61.000.000,00						3 Unit	53.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	12.000.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.493.744,00					Kelurahan Wonokriyo		134.444.744,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.493.744,00					Kelurahan Wonokriyo		134.444.744,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.888.744,00						12 Laporan	60.388.744,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.155.000,00						12 Laporan	70.606.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.450.000,00						12 Laporan	3.450.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.250.000,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.250.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.000.000,00							14.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	14.200.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						13.421.000,00							13.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	13.421.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	13.450.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.331.000,00					Kelurahan Wonokriyo		144.719.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						138.331.000,00					Kelurahan Wonokriyo		144.719.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	22.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	53.350.000,00						15 Unit	56.450.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	17.481.000,00						9 Unit	18.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.100.000,00							13.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	6 Unit	10.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	13.200.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.981.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	10 Unit	4.981.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							22.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	22.500.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
251.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.021.638.256,00**							**1.089.213.284,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***509.110.000,00***							***507.105.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Gombong	100.00 %		100.00 %	100.00 %	509.110.000,00						100.00 %	507.105.000,00	
			2.Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Wonokriyo	100.00 %		100.00 %	100.00 %	509.110.000,00						100.00 %	507.105.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.021.638.256,00					Pokmas dan Ormas		1.089.213.284,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.021.638.256,00					Pokmas dan Ormas		1.089.213.284,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.055.000,00						2 Laporan	1.055.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	27.416.000,00						16 Lembaga Kemasyarakatan	29.400.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas		16 Pokmas / Ormas	16 Pokmas / Ormas	330.782.000,00						16 Pokmas / Ormas	337.818.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	662.385.256,00						3 Unit	720.940.284,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						16.416.000,00							18.400.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	16 Lembaga Kemasyarakatan		16 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	16.416.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Lembaga Kemasyarakatan	18.400.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						290.348.000,00							286.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	290.348.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	286.000.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						201.641.000,00							202.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	16 Pokmas / Ormas		16 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	201.641.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Pokmas / Ormas	202.000.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						705.000,00							705.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	705.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Gombong || Kelurahan Wonokriyo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	705.000,00	KELURAHAN WONOKRIYO
		KECAMATAN KARANGANYAR						**5.058.872.920,00**							**6.668.353.917,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**5.058.872.920,00**							**6.668.353.917,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**5.058.872.920,00**							**6.668.353.917,00**	
252.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.431.161.920,00**							**7.050.503.917,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***4.923.247.920,00***							***6.544.153.917,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.27 Nilai	4.923.247.920,00						72.51 Nilai	6.544.153.917,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	4.923.247.920,00						90.50 Indeks	6.544.153.917,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan	92.40 Indeks		92.33 Indeks	92.35 Indeks	4.923.247.920,00						92.36 Indeks	6.544.153.917,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	4.923.247.920,00						90.50 Indeks	6.544.153.917,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	4.923.247.920,00						90.50 Indeks	6.544.153.917,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					Kantor Kecamatan Karanganyar		29.550.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					Kantor Kecamatan Karanganyar		29.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.750.000,00						22 Dokumen	16.950.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.850.000,00						24 Laporan	12.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.000.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	6 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		22 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					Kecamatan Karanganyar		6.357.753.917,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					Kecamatan Karanganyar		6.357.753.917,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	51.518.000,00						24 Dokumen	55.215.905,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.554.065.920,00						45 Orang/bulan	6.302.538.012,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.554.065.920,00							6.302.538.012,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.554.065.920,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Orang/bulan	6.302.538.012,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						15.526.000,00							17.215.905,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	8 Dokumen	15.526.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Dokumen	17.215.905,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					Kecamatan Karanganyar		181.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					Kecamatan Karanganyar		181.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	10.900.000,00						60 Dokumen	11.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	3.500.000,00						20 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	49.800.000,00						60 Paket	53.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	59.934.000,00						20 Paket	60.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	25.608.000,00						20 Paket	26.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	16.650.000,00						20 Paket	18.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Paket	17.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	2.400.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	25.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.500.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					Kecamatan Karanganyar		113.600.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					Kecamatan Karanganyar		113.600.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	65.000.000,00						1 Unit	63.100.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.000.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	4 Unit	45.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	43.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					Kecamatan Karanganyar		195.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					Kecamatan Karanganyar		195.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	104.120.000,00						60 Laporan	85.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	245.795.000,00						60 Laporan	101.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	8.450.000,00						60 Laporan	8.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.500.000,00							20.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	20.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	20.500.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						177.256.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	177.256.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	32.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					Kecamatan Karanganyar		172.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					Kecamatan Karanganyar		172.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	80.121.000,00						15 Unit	82.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	48.100.000,00						37 Unit	52.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	52 Unit	30.100.000,00						52 Unit	38.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						29.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	10 Unit	29.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	10 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		52 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	3 Unit	12.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
253.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11.000.000,00**							**11.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***11.000.000,00***							***11.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	11.000.000,00						100.00 %	11.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.000.000,00					Kantor Kecamatan Karanganyar		11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.000.000,00					Kantor Kecamatan Karanganyar		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00						4 Laporan	11.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
254.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***15.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	15.000.000,00						100.00 Indeks	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	
		Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah						15.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Karanganyar		15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 Orang		55 Orang	55 Orang	15.000.000,00						55 Orang	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	55 Orang		55 Orang	55 Orang	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		55 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
255.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**85.625.000,00**							**83.200.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***85.625.000,00***							***83.200.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	85.625.000,00						100.00 %	83.200.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						85.625.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Karanganyar		83.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						85.625.000,00					Desa di Wilayah Kecamatan Karanganyar		83.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00						1 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00						1 Dokumen	2.200.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.425.000,00						5 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.425.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	8.425.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KARANGANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						2.200.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	2.200.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGANYAR
		KELURAHAN JATILUHUR						**660.029.000,00**							**699.305.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**660.029.000,00**							**699.305.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**660.029.000,00**							**699.305.000,00**	
256.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.431.161.920,00**							**7.050.503.917,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***136.959.000,00***							***118.800.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.27 Nilai	136.959.000,00						72.51 Nilai	118.800.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	136.959.000,00						90.50 Indeks	118.800.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan	92.40 Indeks		92.33 Indeks	92.35 Indeks	136.959.000,00						92.36 Indeks	118.800.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	136.959.000,00						90.50 Indeks	118.800.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	136.959.000,00						90.50 Indeks	118.800.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					Kelurahan Jatiluhur		29.550.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					Kelurahan Jatiluhur		29.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.750.000,00						22 Dokumen	16.950.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.850.000,00						24 Laporan	12.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		22 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.650.000,00							1.650.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	4 Laporan	1.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Laporan	1.650.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					Kelurahan Jatiluhur		6.357.753.917,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					Kelurahan Jatiluhur		6.357.753.917,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	51.518.000,00						24 Dokumen	55.215.905,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Dokumen	5.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					Kelurahan Jatiluhur		181.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					Kelurahan Jatiluhur		181.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	10.900.000,00						60 Dokumen	11.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	49.800.000,00						60 Paket	53.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	59.934.000,00						20 Paket	60.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	25.608.000,00						20 Paket	26.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	16.650.000,00						20 Paket	18.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.650.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	1.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	1.650.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.800.000,00							16.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	12 Paket	15.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Paket	16.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	2.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						13.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	13.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	13.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	1.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					Kelurahan Jatiluhur		113.600.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					Kelurahan Jatiluhur		113.600.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		19 Unit	19 Unit	41.400.000,00						18 Unit	39.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		19 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Unit	9.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					Kelurahan Jatiluhur		195.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					Kelurahan Jatiluhur		195.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	104.120.000,00						60 Laporan	85.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	245.795.000,00						60 Laporan	101.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	8.450.000,00						60 Laporan	8.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.250.000,00							1.250.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	1.250.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.320.000,00							21.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	42.320.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	21.900.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.939.000,00							31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	30.939.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	31.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					Kelurahan Jatiluhur		172.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					Kelurahan Jatiluhur		172.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	80.121.000,00						15 Unit	82.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	48.100.000,00						37 Unit	52.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	52 Unit	30.100.000,00						52 Unit	38.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.500.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	7 Unit	6.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Unit	6.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		52 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	7.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
257.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.102.913.000,00**							**2.129.455.000,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***509.420.000,00***							***571.855.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatilihur	100.00 %		100.00 %	100.00 %	509.420.000,00						100.00 %	571.855.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	509.420.000,00						100.00 %	571.855.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	509.420.000,00						100.00 %	571.855.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar	100.00 %		100.00 %	100.00 %	509.420.000,00						100.00 %	571.855.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					Kelurahan Jatiluhur		2.129.455.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					Kelurahan Jatiluhur		2.129.455.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.550.970,00						4 Laporan	7.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	41.000.000,00						32 Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	405.024.944,00						32 Pokmas / Ormas	379.300.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.648.337.086,00						4 Unit	1.698.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						408.120.000,00							468.555.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	408.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	468.555.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						92.300.000,00							94.300.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	92.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Pokmas / Ormas	94.300.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						1.500.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Jatiluhur || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.500.000,00	KELURAHAN JATILUHUR
		KELURAHAN PLARANGAN						**638.644.000,00**							**830.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**638.644.000,00**							**830.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**638.644.000,00**							**830.700.000,00**	
258.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.431.161.920,00**							**7.050.503.917,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***127.771.000,00***							***106.750.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.27 Nilai	127.771.000,00						72.51 Nilai	106.750.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	127.771.000,00						90.50 Indeks	106.750.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan	92.40 Indeks		92.33 Indeks	92.35 Indeks	127.771.000,00						92.36 Indeks	106.750.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	127.771.000,00						90.50 Indeks	106.750.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	127.771.000,00						90.50 Indeks	106.750.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					Kelurahan Plarangan		29.550.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					Kelurahan Plarangan		29.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.750.000,00						22 Dokumen	16.950.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.850.000,00						24 Laporan	12.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						750.000,00							750.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	5 Dokumen	750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		22 Dokumen	750.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	4 Laporan	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Laporan	750.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					Kelurahan Plarangan		6.357.753.917,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					Kelurahan Plarangan		6.357.753.917,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	51.518.000,00						24 Dokumen	55.215.905,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.500.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Dokumen	7.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					Kelurahan Plarangan		181.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					Kelurahan Plarangan		181.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	10.900.000,00						60 Dokumen	11.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	49.800.000,00						60 Paket	53.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	59.934.000,00						20 Paket	60.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	25.608.000,00						20 Paket	26.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	16.650.000,00						20 Paket	18.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Paket	10.500.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	5.200.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.400.000,00							2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	2.400.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.000.000,00							9.600.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	9.600.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	1.200.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					Kelurahan Plarangan		113.600.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					Kelurahan Plarangan		113.600.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		19 Unit	19 Unit	41.400.000,00						18 Unit	39.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.400.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		19 Unit	3 Unit	16.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Unit	20.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					Kelurahan Plarangan		195.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					Kelurahan Plarangan		195.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	104.120.000,00						60 Laporan	85.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	245.795.000,00						60 Laporan	101.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	8.450.000,00						60 Laporan	8.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.800.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						11.800.000,00							11.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	11.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	11.900.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						29.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	30.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					Kelurahan Plarangan		172.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					Kelurahan Plarangan		172.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	80.121.000,00						15 Unit	82.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	48.100.000,00						37 Unit	52.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	52 Unit	30.100.000,00						52 Unit	38.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.500.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	6 Unit	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Unit	3.700.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	19 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		52 Unit	5.200.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						28.121.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	4 Unit	28.121.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	30.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
259.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.102.913.000,00**							**2.129.455.000,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***505.873.000,00***							***688.000.000,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatilihur	100.00 %		100.00 %	100.00 %	505.873.000,00						100.00 %	688.000.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	505.873.000,00						100.00 %	688.000.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	505.873.000,00						100.00 %	688.000.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar	100.00 %		100.00 %	100.00 %	505.873.000,00						100.00 %	688.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					Kelurahan Plarangan		2.129.455.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					Kelurahan Plarangan		2.129.455.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.550.970,00						4 Laporan	7.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	41.000.000,00						32 Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	405.024.944,00						32 Pokmas / Ormas	379.300.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.648.337.086,00						4 Unit	1.698.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						400.700.000,00							580.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	400.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	580.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						92.673.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	92.673.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Pokmas / Ormas	95.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Plarangan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.000.000,00	KELURAHAN PLARANGAN
		KELURAHAN PANJATAN						**638.677.000,00**							**616.100.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**638.677.000,00**							**616.100.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**638.677.000,00**							**616.100.000,00**	
260.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.431.161.920,00**							**7.050.503.917,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***85.900.000,00***							***102.200.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.27 Nilai	85.900.000,00						72.51 Nilai	102.200.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	85.900.000,00						90.50 Indeks	102.200.000,00	
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan	92.40 Indeks		92.33 Indeks	92.35 Indeks	85.900.000,00						92.36 Indeks	102.200.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	85.900.000,00						90.50 Indeks	102.200.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	85.900.000,00						90.50 Indeks	102.200.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					KELURAHAN PANJATAN		29.550.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					KELURAHAN PANJATAN		29.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.750.000,00						22 Dokumen	16.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.850.000,00						24 Laporan	12.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		22 Dokumen	3.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.700.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	4 Laporan	1.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Laporan	2.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					KELURAHAN PANJATAN		6.357.753.917,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					KELURAHAN PANJATAN		6.357.753.917,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	51.518.000,00						24 Dokumen	55.215.905,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.492.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	3 Dokumen	12.492.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Dokumen	13.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					KELURAHAN PANJATAN		181.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					KELURAHAN PANJATAN		181.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	10.900.000,00						60 Dokumen	11.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	49.800.000,00						60 Paket	53.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	59.934.000,00						20 Paket	60.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	25.608.000,00						20 Paket	26.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	16.650.000,00						20 Paket	18.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	4.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000,00							4.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	12 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Paket	4.700.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.108.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	2.108.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	2.500.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.600.000,00							2.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	4 Dokumen	2.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Dokumen	2.800.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.500.000,00							3.700.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Desa Karangkemiri || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	3.700.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					KELURAHAN PANJATAN		113.600.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					KELURAHAN PANJATAN		113.600.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		19 Unit	19 Unit	41.400.000,00						18 Unit	39.500.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	65.000.000,00						1 Unit	63.100.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		19 Unit	4 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Unit	10.500.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	5.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					KELURAHAN PANJATAN		195.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					KELURAHAN PANJATAN		195.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	104.120.000,00						60 Laporan	85.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	245.795.000,00						60 Laporan	101.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	8.450.000,00						60 Laporan	8.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.900.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	1.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						13.500.000,00							13.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Laporan	13.800.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.600.000,00							2.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Laporan	2.800.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					KELURAHAN PANJATAN		172.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					KELURAHAN PANJATAN		172.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	80.121.000,00						15 Unit	82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	48.100.000,00						37 Unit	52.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	52 Unit	30.100.000,00						52 Unit	38.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						6.100.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	6 Unit	6.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.100.000,00							6.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	6 Unit	6.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		52 Unit	6.900.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	21.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
261.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.102.913.000,00**							**2.129.455.000,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***541.077.000,00***							***511.100.000,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatilihur	100.00 %		100.00 %	100.00 %	541.077.000,00						100.00 %	511.100.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	541.077.000,00						100.00 %	511.100.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	541.077.000,00						100.00 %	511.100.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar	100.00 %		100.00 %	100.00 %	541.077.000,00						100.00 %	511.100.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					KELURAHAN PANJATAN		2.129.455.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					KELURAHAN PANJATAN		2.129.455.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.550.970,00						4 Laporan	7.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	41.000.000,00						32 Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	405.024.944,00						32 Pokmas / Ormas	379.300.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.648.337.086,00						4 Unit	1.698.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						6.500.000,00							9.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	6.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Lembaga Kemasyarakatan	9.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						434.293.030,00							400.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	6 Unit	434.293.030,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	400.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						96.733.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	96.733.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN PANJATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.550.970,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	3.550.970,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Panjatan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	2.100.000,00	KELURAHAN PANJATAN
		KELURAHAN KARANGANYAR						**649.477.000,00**							**474.700.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**649.477.000,00**							**474.700.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**649.477.000,00**							**474.700.000,00**	
262.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.431.161.920,00**							**7.050.503.917,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***76.434.000,00***							***104.000.000,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.25 Nilai	71.27 Nilai	76.434.000,00						72.51 Nilai	104.000.000,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Jatiluhur	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	76.434.000,00						90.50 Indeks	104.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Plarangan	92.40 Indeks		92.33 Indeks	92.35 Indeks	76.434.000,00						92.36 Indeks	104.000.000,00	
			4.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Panjatan	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	76.434.000,00						90.50 Indeks	104.000.000,00	
			5.Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan Karanganyar	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	76.434.000,00						90.50 Indeks	104.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					KELURAHAN KARANGANYAR		29.550.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.600.000,00					KELURAHAN KARANGANYAR		29.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.750.000,00						22 Dokumen	16.950.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.850.000,00						24 Laporan	12.600.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.100.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		22 Dokumen	3.100.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.100.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Laporan	3.100.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					-		6.357.753.917,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.605.583.920,00					-		6.357.753.917,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	51.518.000,00						24 Dokumen	55.215.905,00	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		24 Dokumen	13.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					-		181.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						173.892.000,00					-		181.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	10.900.000,00						60 Dokumen	11.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	49.800.000,00						60 Paket	53.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	59.934.000,00						20 Paket	60.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	25.608.000,00						20 Paket	26.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	16.650.000,00						20 Paket	18.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Paket	3.100.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	12 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Paket	5.100.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							4.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Paket	4.100.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.500.000,00							1.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen		60 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Dokumen	1.600.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.434.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	4 Paket	9.434.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Paket	9.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.500.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Dokumen	2.100.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					-		113.600.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	65.000.000,00						1 Unit	63.100.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat		1 Unit	15.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					-		195.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						358.365.000,00					-		195.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	104.120.000,00						60 Laporan	85.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	245.795.000,00						60 Laporan	101.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	8.450.000,00						60 Laporan	8.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		60 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Pembangunan infrastruktur berbasis potensi wilayah, termasuk kawasan wisata desa, agrowisata, dan ekowisata berbasis masyarakat		60 Laporan	2.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Laporan	17.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Laporan	6.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					-		172.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						158.321.000,00					-		172.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	80.121.000,00						15 Unit	82.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	48.100.000,00						37 Unit	52.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	52 Unit	30.100.000,00						52 Unit	38.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	7 Unit	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		37 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit		52 Unit	4 Unit	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		52 Unit	6.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		15 Unit	9.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					-		113.600.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						106.400.000,00					-		113.600.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	11.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
263.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.102.913.000,00**							**2.129.455.000,00**	
		Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan kelurahan						***546.543.000,00***							***358.500.000,00***	
			1.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Jatilihur	100.00 %		100.00 %	100.00 %	546.543.000,00						100.00 %	358.500.000,00	
			2.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Plarangan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	546.543.000,00						100.00 %	358.500.000,00	
			3.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan Kegiatan Kelurahan Panjatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	546.543.000,00						100.00 %	358.500.000,00	
			4.Tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan Kelurahan Karanganyar	100.00 %		100.00 %	100.00 %	546.543.000,00						100.00 %	358.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					Kelurahan Karanganyar		2.129.455.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						2.102.913.000,00					Kelurahan Karanganyar		2.129.455.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.550.970,00						4 Laporan	7.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	32 Lembaga Kemasyarakatan	41.000.000,00						32 Lembaga Kemasyarakatan	44.500.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	405.024.944,00						32 Pokmas / Ormas	379.300.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.648.337.086,00						4 Unit	1.698.555.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						15.000.000,00							16.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32 Lembaga Kemasyarakatan		32 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						405.224.056,00							250.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit		4 Unit	2 Unit	405.224.056,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	250.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						123.318.944,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	32 Pokmas / Ormas		32 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	123.318.944,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Pokmas / Ormas	90.000.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karanganyar || Kelurahan Karanganyar || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	2.500.000,00	KELURAHAN KARANGANYAR
		KECAMATAN KARANGGAYAM						**2.367.696.263,00**							**2.619.646.398,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.367.696.263,00**							**2.619.646.398,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.367.696.263,00**							**2.619.646.398,00**	
264.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.224.696.263,00**							**2.483.646.398,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.182.696.263,00***							***2.459.646.398,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.40 Nilai	72.45 Nilai	2.182.696.263,00						72.51 Nilai	2.459.646.398,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00						6 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	7.000.000,00						8 Laporan	7.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.880.501.263,00					ASN Kecamatan Karanggayam		2.137.534.303,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.880.501.263,00					ASN Kecamatan Karanggayam		2.137.534.303,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	17.800.000,00						8 Dokumen	18.631.237,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.862.701.263,00						25 Orang/bulan	2.118.903.066,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.862.701.263,00							2.118.903.066,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.862.701.263,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Orang/bulan	2.118.903.066,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						17.800.000,00							18.631.237,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	17.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	18.631.237,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		39.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		39.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00						12 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	7.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	7.500.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	8.500.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		20.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	15.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	15.000.000,00						3 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.195.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		218.112.095,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						213.195.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		218.112.095,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	173.195.000,00						12 Laporan	184.112.095,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00						12 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						173.195.000,00							184.112.095,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	173.195.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	184.112.095,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		56.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						56.000.000,00					ASN Kecamatan Karanggayam		56.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	40.000.000,00						13 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.000.000,00						12 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	40.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Unit	40.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
265.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**18.000.000,00**							**18.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***18.000.000,00***							***18.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	18.000.000,00						100.00 %	18.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						18.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanggayam		18.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat						18.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanggayam		18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00						4 Laporan	18.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penguatan Integrasi data kemiskinan berbasis DTSEN dan digitalisasi pendataan dan verifikasi penerima manfaat program pengentasan kemiskinan		4 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
266.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***20.000.000,00***							***20.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	20.000.000,00						100.00 Indeks	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanggayam		20.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karanggayam		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	165 Orang		165 Orang	165 Orang	20.000.000,00						165 Orang	20.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	165 Orang		165 Orang	165 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		165 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
267.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**105.000.000,00**							**98.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***85.000.000,00***							***78.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	85.000.000,00						100.00 %	78.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						105.000.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Karanggayam		98.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						105.000.000,00					Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Karanggayam		98.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	7.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	39.000.000,00						4 Dokumen	39.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	6.000.000,00						19 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00						5 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00						1 Laporan	8.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	18 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						39.000.000,00							39.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	39.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	39.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN KARANGGAYAM
		KECAMATAN SADANG						**2.585.313.622,00**							**2.650.820.175,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.585.313.622,00**							**2.650.820.175,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.585.313.622,00**							**2.650.820.175,00**	
268.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.470.613.622,00**							**2.543.320.175,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.450.613.622,00***							***2.516.320.175,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		73.68 Nilai	73.70 Nilai	2.450.613.622,00						73.72 Nilai	2.516.320.175,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		7.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00						6 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00						8 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.238.856.622,00					Kantor Kecamatan Sadang		2.294.930.183,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.238.856.622,00					Kantor Kecamatan Sadang		2.294.930.183,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00						8 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.233.856.622,00						18 Orang/bulan	2.289.930.183,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.233.856.622,00							2.289.930.183,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.233.856.622,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Orang/bulan	2.289.930.183,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.159.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		38.339.992,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						34.159.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		38.339.992,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.800.000,00						12 Dokumen	2.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.459.000,00						12 Dokumen	1.439.992,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00						4 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.000.000,00						12 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.400.000,00						4 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00						4 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00						4 Paket	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.800.000,00							2.900.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	2.900.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.400.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.459.000,00							1.439.992,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.459.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	1.439.992,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41.500.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		47.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41.500.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		47.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	8.000.000,00						4 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	3 Unit	33.500.000,00						3 Unit	42.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						8.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.500.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	3 Unit	33.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	42.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.098.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		90.050.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87.098.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		90.050.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00						12 Laporan	19.322.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.898.000,00						12 Laporan	69.728.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.200.000,00							19.322.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	19.322.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						66.898.000,00							69.728.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.898.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	69.728.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		66.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						62.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		66.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.000.000,00						1 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	30.000.000,00						12 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		21 Unit	4 Unit	2.000.000,00						4 Unit	1.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00						4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.000.000,00						1 Unit	26.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit		21 Unit	4 Unit	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	1.500.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	2.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						16.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.000.000,00							26.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	26.500.000,00	KECAMATAN SADANG
269.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**5.000.000,00**							**5.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***5.000.000,00***							***5.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	5.000.000,00						100.00 %	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SADANG
270.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**15.000.000,00**							**15.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***15.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	15.000.000,00						100.00 Indeks	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						15.000.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85 Orang		85 Orang	85 Orang	15.000.000,00						85 Orang	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	85 Orang		85 Orang	85 Orang	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		85 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN SADANG
271.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**94.700.000,00**							**87.500.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***94.700.000,00***							***87.500.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	94.700.000,00						100.00 %	87.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						94.700.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		87.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						94.700.000,00					Kantor Kecamatan Sadang		87.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	21.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	19.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00						4 Dokumen	29.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.000.000,00						5 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						17.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	16.500.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						21.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	21.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						6.700.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20.000.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	19.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						25.000.000,00							29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	29.000.000,00	KECAMATAN SADANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Sadang || Desa Sadangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN SADANG
		KECAMATAN KARANGSAMBUNG						**2.410.544.402,00**							**2.757.513.645,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.410.544.402,00**							**2.757.513.645,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.410.544.402,00**							**2.757.513.645,00**	
272.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.284.588.402,00**							**2.636.513.645,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***2.258.288.402,00***							***2.615.513.645,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		71.45 Nilai	71.46 Nilai	2.258.288.402,00						72.51 Nilai	2.615.513.645,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		12.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00						6 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00						8 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.069.927.402,00					Kecamatan Karangsambung		2.417.165.304,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.069.927.402,00					Kecamatan Karangsambung		2.417.165.304,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000,00						8 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.063.927.402,00						20 Orang/bulan	2.411.165.304,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.063.927.402,00							2.411.165.304,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.063.927.402,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Karangsambung || Desa Karangsambung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang/bulan	2.411.165.304,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.800.000,00					Kecamatan Karangsambung		49.300.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.800.000,00					Kecamatan Karangsambung		49.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00						12 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.000.000,00						12 Paket	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00						4 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.000.000,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Paket	17.500.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.800.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	1.800.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	12.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.361.000,00					Kecamatan Karangsambung		99.089.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						97.361.000,00					Kecamatan Karangsambung		99.089.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.561.000,00						12 Laporan	67.089.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.800.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						35.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						60.561.000,00							67.089.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.561.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	67.089.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.500.000,00					Kecamatan Karangsambung		43.959.341,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.500.000,00					Kecamatan Karangsambung		43.959.341,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	26.000.000,00						13 Unit	27.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		15 Unit	16 Unit	3.500.000,00						20 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	6.000.000,00						6 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.000.000,00						1 Unit	6.959.341,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						26.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	26.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		13 Unit	27.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.500.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		15 Unit	16 Unit	3.500.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.000.000,00							6.959.341,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		1 Unit	6.959.341,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
273.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	10.000.000,00						100.00 %	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		10.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Pengaduan Masyarakat						10.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	-		-	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
274.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**20.000.000,00**							**21.000.000,00**	
		Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan						***20.000.000,00***							***21.000.000,00***	
			1.Indeks Kondusivitas Kecamatan	100.00 Indeks		100.00 Indeks	100.00 Indeks	20.000.000,00						100.00 Indeks	21.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		21.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						20.000.000,00					Kecamatan Karangsambung		21.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	20.000.000,00						50 Orang	21.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						20.000.000,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Orang	21.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
275.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**95.956.000,00**							**90.000.000,00**	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						***75.956.000,00***							***70.000.000,00***	
			1.Persentase desa di Kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan	100.00 %		100.00 %	100.00 %	75.956.000,00						100.00 %	70.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						95.956.000,00					Kecamatan Karangsambung		90.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah desa di kecamatan yang melaksanakan APBDes sesuai ketentuan						95.956.000,00					Kecamatan Karangsambung		90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	7.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	43.956.000,00						4 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00						14 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00						5 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	11 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0 Dokumen	0,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Percepatan koordinasi antar perangkat daerah baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi		14 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						43.956.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	43.956.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	45.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kebumen	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**9.256.183.448,00**							**33.670.553.289,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**9.256.183.448,00**							**33.670.553.289,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**9.256.183.448,00**							**33.670.553.289,00**	
276.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.956.048.448,00**							**4.609.526.289,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah						***3.912.048.448,00***							***4.609.526.289,00***	
			1.Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.00 Nilai		72.90 Nilai	73.00 Nilai	3.912.048.448,00						73.20 Nilai	4.609.526.289,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	90.60 Indeks		90.40 Indeks	90.45 Indeks	3.912.048.448,00						90.50 Indeks	4.609.526.289,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		24.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00						6 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8.000.000,00						8 Laporan	8.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							16.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		6 Dokumen	16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		8 Laporan	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.536.059.448,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		4.162.479.626,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.536.059.448,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		4.162.479.626,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.738.000,00						8 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.523.321.448,00						28 Orang/bulan	4.149.479.626,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.523.321.448,00							4.149.479.626,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan		28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.523.321.448,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		28 Orang/bulan	4.149.479.626,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.738.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.738.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		8 Dokumen	13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						27.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		28.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						27.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		28.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	27.000.000,00						30 Orang	28.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						27.000.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	27.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		30 Orang	28.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						79.511.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		90.002.663,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						79.511.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		90.002.663,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00						12 Dokumen	2.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00						12 Laporan	49.740.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.000.000,00						3 Paket	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.000.000,00						1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.159.000,00						3 Paket	8.062.663,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.852.000,00						1 Paket	3.500.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.852.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.852.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Paket	3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		3 Paket	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.159.000,00							8.062.663,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.159.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		3 Paket	8.062.663,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		12 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	11.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Paket	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						48.000.000,00							49.740.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		12 Laporan	49.740.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.500.000,00							2.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		12 Dokumen	2.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		36.500.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						36.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		36.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		6 Unit	3 Unit	36.000.000,00						3 Unit	36.500.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.000.000,00							36.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		6 Unit	4 Unit	36.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		3 Unit	36.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.478.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		132.544.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						122.478.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		132.544.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.500.000,00						12 Laporan	56.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.778.000,00						12 Laporan	73.644.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00						1 Laporan	2.400.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							2.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	2.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.500.000,00							56.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		12 Laporan	56.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						70.778.000,00							73.644.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.778.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		12 Laporan	73.644.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		136.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						132.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		136.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	36.000.000,00						2 Unit	37.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	75.000.000,00						17 Unit	76.700.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		5 Unit	5 Unit	2.000.000,00						8 Unit	2.800.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		15 Unit	15 Unit	19.000.000,00						16 Unit	19.500.000,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							76.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	75.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		17 Unit	76.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							2.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		8 Unit	2.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.000.000,00							19.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		15 Unit	15 Unit	19.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		16 Unit	19.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						36.000.000,00							37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	36.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		2 Unit	37.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
277.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**504.000.000,00**							**516.000.000,00**	
		Meningkatnya Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						***504.000.000,00***							***516.000.000,00***	
			1.Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85.00 %		77.00 %	79.00 %	504.000.000,00						81.00 %	516.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						504.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		516.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						504.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		516.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	504.000.000,00						1 Dokumen	516.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						504.000.000,00							516.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	504.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Dokumen	516.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
278.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**4.141.906.000,00**							**27.790.480.000,00**	
		Meningkatnya Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						***4.141.906.000,00***							***27.790.480.000,00***	
			1.Persentase Pemahamanan terhadap Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	85.00 %		77.00 %	79.00 %	4.141.906.000,00						81.00 %	27.790.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						4.141.906.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		27.790.480.000,00	
		Terlaksananya perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						4.141.906.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		27.790.480.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang		100 Orang	1600 Orang	4.141.906.000,00						110 Orang	27.790.480.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						4.141.906.000,00							27.790.480.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang		100 Orang	100 Orang	4.141.906.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		110 Orang	27.790.480.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
279.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**71.000.000,00**							**73.000.000,00**	
		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan						***71.000.000,00***							***73.000.000,00***	
			1.Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	90.00 %		74.00 %	78.00 %	71.000.000,00						82.00 %	73.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						71.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		73.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						71.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		73.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	71.000.000,00						100 Orang	73.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						71.000.000,00							73.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	71.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	73.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
280.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**161.229.000,00**							**172.547.000,00**	
		Meningkatnya pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya						***161.229.000,00***							***172.547.000,00***	
			1.Persentase pemahaman terhadap pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	85.00 %		77.00 %	79.00 %	161.229.000,00						81.00 %	172.547.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						161.229.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		172.547.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						161.229.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		172.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	76.229.000,00						100 Orang	86.547.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang		100 Orang	2100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	86.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						85.000.000,00							86.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	86.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						76.229.000,00							86.547.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	76.229.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	86.547.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
281.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**422.000.000,00**							**509.000.000,00**	
		Meningkatnya kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen					***422.000.000,00***							***509.000.000,00***	
			1.Persentase kewaspadaan nasional di daerah dan penanganan konflik sosial dan kerjasama intelijen	100.00 %		100.00 %	100.00 %	422.000.000,00						100.00 %	509.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						422.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		509.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						422.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Kebumen		509.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	197.000.000,00						4 Dokumen	198.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	58.400.000,00						4 Dokumen	79.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.600.000,00						4 Dokumen	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang		100 Orang	1600 Orang	85.000.000,00						100 Orang	86.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	45.000.000,00						100 Orang	81.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						58.400.000,00								79.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	58.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Dokumen	79.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						30.600.000,00								57.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Dokumen	57.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						45.000.000,00								81.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang		100 Orang	100 Orang	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	81.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						85.000.000,00								86.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang		100 Orang	165 Orang	85.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	86.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						6.000.000,00								8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						197.000.000,00							198.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	197.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Kebumen || Kecamatan Kebumen || Kelurahan Kebumen || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		4 Dokumen	198.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**3.097.694.532.160,00**							**4.329.954.826.784,00**	

DAFTAR USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	2067833	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RW 04 Desa Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinangun	RW 04 Desa Tanjungmeru, Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	375	m2	88.369.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2	2067873	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RT 5 RW 2 Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno	RT 5 RW 2 Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	275	M2	75.928.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3	2067890	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RW 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun	RW 03 Desa Mekarsari, Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	425	m2	77.945.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
4	2067905	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RW 04 Desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun	RW 04 Desa Kuwarisan, Kecamatan Kutowinangun , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	450	m2	79.065.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
5	2067919	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RW 04 Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun	RW 04 Desa Jlegiwinangun, Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	375	m2	93.375.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
6	2079105	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Ruang kelas RA Al Iman Desa Purwosari Kec. Puring memerlukan renovasi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar	RT 02 RW 02 Desa Purwosari, Kec. Puring, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	unit	35.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
7	2079662	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Desa rusak sehingga perlu adanya pembangunan berupa rabat beton di RT 02 RW 01 Desa Sidomulyo	RT 02 RW 01 Desa Sidomulyo, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	33	m3	56.430.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
8	2080093	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak perlu Pembangunan Jalan Aspal	Dukuh Depok, RT02 RW08, Desa Sidoagung, Sruweng, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1200	M2	292.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
9	2080504	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	ternak KAMBING	KTT MEKARSARI, RT 03 RW 02 DANO SARI, SRUWENG, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	32.188.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
10	2080557	Belum optimalnya produksi pertanian dalam arti luas	TRAKTOR,	JASIRIN, RT 03 RW 02 DANO SARI, SRUWENG	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	22.200.750	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
11	2081084	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Rabat Beton	RT 01 RW 01 PENGEMPON, SRUWENG, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	82	m3	129.372.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
12	2081337	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rabat Beton	Jl. Makam RT01, RW1, Desa Pengempon, Sruweng, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	85	m3	135.028.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
13	2083739	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui hasil pengembangbiakan ternak sapi, serta untuk mengembangkan usaha peternakan sapi lokal agar tercipta populasi ternak sapi yang mendukung kebutuhan daging sapi dan bibit ternak sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan ditingkat lokal, oleh sebab itu KTT Berkah Menggala membutuhkan banyak bantuan sapi berupa indukan sapi bibit unggul atau sapi peranakan ongole.	KTT Berkah Menggala, alamat Rt 01 Rw 08 Dukuh Karangmalang, Desa Kaleng, Kecamatan Puring., Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	39.226.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
14	2083973	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring sudah sangat rusak sehingga menghambat roda aktivitas warga, oleh sebab itu maka membutuhkan pengaspalan jalan sebagai sarana infrastruktur dalam rangka menunjang perekonomian dan ketahanan pangan.	Dk Gedong Rt 03 dan Rt 04 Rw 04 Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	245	M2	69.221.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
15	2084070	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Purwosari, Kecamatan Puring sangat rusak dan sangat menghambat aktivitas warga dalam menuju akses layanan dasar pendidikan dan layanan dasar kesehatan, sehingga sangat membutuhkan pengaspalan jalan poros yang rusak tersebut.	Rt 06 Rw 02 Desa Purwosari, Kecamatan Puring., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	m2	65.590.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
16	2088731	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Pasir, Dusun Betah Rt 02/Rw 02, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar.	Desa Pasir, Dusun Betah Rt 02/Rw 02, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	m3	234.926.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
17	2089049	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan rusak, Memerlukan Pengaspalan	dk Semali Tengah RT 003 RW 003 desa Semali Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	722	m2	176.168.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
18	2089200	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan rusak sulit dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat memerlukan bantuan pembangunan rabat beton	Gang Nanas I RT 002 RW 002 desa Banjarsari Kec. Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	111	m3	174.381.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
19	2089388	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan pengaspalan jalan karena kondisi permukaan jalan yang tidak rata dan sudah rusak di Desa Arjomulyo RT 02 dan RT 03 RW 01 Kecamatan Adimulyo	Desa Arjomulyo RT 02 dan RT 03 RW 01 Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	750	M2	126.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
20	2089643	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan memerlukan rabat beton	RT.001/002 Desa Sekarteja, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	55	m3	94.051.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
21	2089723	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Desa rusak sehingga perlu adanya pembangunan berupa rabat beton di RT 02 RW 03 Desa Candiwulan	RT 02 RW 03 Desa Candiwulan, Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	350	m2	58.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
22	2089770	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga perlu adanya pembangunan jalan desa berupa rabat beton di RT 02 RW 02 Desa Madurejo	RT 02 RW 02 Desa Madurejo, Kec. Puring, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	M2	69.338.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
23	2090046	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Ruang kelas RA Al Badar Desa Karangpule Kec. Sruweng memerlukan renovasi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar	RT 02 RW 03 Desa Karangpule, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	unit	35.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
24	2090052	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan di RW 01 Desa Semampir, Kecamatan Buayan banyak lubang dan rusak sehingga diperlukan perbaikan berupa rabat beton/pengaspalan.	DESA SEMAMPIR RW 01 KECAMATAN BUAYAN , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	M3	62.840.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
25	2090084	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan di Dukuh Kebebekan RT 005 RW 002 Desa Purbowangi merupakan akses penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan saat ini belum memadai sehingga menghambat mobilitas warga. Oleh karena itu diajukan usulan pengaspalan jalan AC-BC guna meningkatkan kenyamanan dan kelancaran akses transportasi serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat setempat.	RT 005 RW 002 DESA PURBOWANGI, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	M2	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
26	2090291	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan di RT 01 RW 05 Desa Sidoagung rusak perlu pembangunan berupa rabat beton	RT 01 RW 05 Dukuh Sipendok, Desa Sidoagung, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	50	M3	91.753.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
27	2090311	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Jladri, Dusun Londeng Rt 01 / Rw 08, Kecamatan Buayan membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Jladri, Dusun Londeng Rt 01 / Rw 08, Kecamatan Buayan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	M3	235.650.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
28	2090350	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Giyanti, Rt 04 / Rw 02, Kecamatan Rowokele membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Giyanti, Rt 04 / Rw 02, Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1000	M2	244.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
29	2090362	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Mangunweni, Dusun Kaliputri Rt 08 / Rw 01, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Mangunweni, Dusun Kaliputri Rt 08 / Rw 01, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	m3	157.100.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
30	2090394	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Demangsari, Rw 02, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Demangsari, Rw 02, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	900	m2	243.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
31	2090465	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Jatijajar, Dusun Nusawaru Rt 04 / Rw 03, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Jatijajar, Dusun Nusawaru Rt 04 / Rw 03, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1500	m2	366.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
32	2090471	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Rogodono, Dusun Golongan Rt 02 / Rw 01, Kecamatan Buayan membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Rogodono, Dusun Golongan Rt 02 / Rw 01, Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	M3	157.100.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
33	2090960	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Bumiagung, Dusun Tambakwringin Rt 06 / Rw 02, Kecamatan Rowokele membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Bumiagung, Dusun Tambakwringin Rt 06 / Rw 02, Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	900	M2	219.600.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
34	2090965	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Dukuh Kebanaran RT 04 RW 04 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan bantuan berupa Pembangunan Rabat Beton	Dukuh Kebanaran RT 04 RW 04 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	m3	55.470.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
35	2090973	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Nogoraji, Dusun Era Rt 01 / Rw 01 , Kecamatan Buayan membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Nogoraji, Dusun Era Rt 01 / Rw 01 , Kecamatan Buayan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	700	M2	170.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
36	2091096	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Pringtutul, Dusun Pringtutul Utara Rt 09 / Rw 01, Kecamatan Rowokele membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Jl. Comando, Desa Pringtutul, Dusun Pringtutul Utara Rt 09 / Rw 01 , Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	700	M2	170.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
37	2091103	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Kretek, Dukuh Karanganyar Rt 04 / Rw 03, Kecamatan Rowokele membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Kretek, Dukuh Karanganyar Rt 04 / Rw 03, Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	M3	157.100.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
38	2091123	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Bangunan rumah a.n. Sukini dalam kondisi tidak layak huni sehingga membutuhkan bantuan perbaikan untuk meningkatkan kualitas hunian sehingga memenuhi standar kelayakan dan kesehatan	Desa Purbowangi, Dusun Jetak Rt 01 Rw 02, Kecamatan Buayan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	1	Rupiah	20.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
39	2091139	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Argosari, Rw 05, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Argosari, Rw 05, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	m3	235650000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
40	2091170	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Banjararjo, Rt 02 / Rw 04, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Banjararjo, Rt 02 / Rw 04, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	120	M3	188520000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
41	2091183	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Mergosono, Dukuh Jati Sawit Rt 01 dan rt 02/ Rw 01, Kecamatan Buayan membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Mergosono, Dukuh Jati Sawit Rt 01 dan rt 02/ Rw 01, Kecamatan Buayan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1500	M2	366000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
42	2091202	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Masyarakat Desa Bulurejo, Dukuh Gemilir Lor Rt 03 / Rw 03, Kecamatan Ayah membutuhkan pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Bulurejo, Dukuh Gemilir Lor Rt 03 / Rw 03, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	54	M3	92340000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
43	2091281	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Jintung, Dusun Bundel Rt 02 / Rw 02, Kecamatan Ayah membutuhkan perbaikan berupa pengaspalan (hotmix) jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Jintung, Dukuh Bundel Rt 02 / Rw 02, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	151800000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
44	2091296	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Sukomulyo, Rt 06 / Rw 06, Kecamatan Rowokele membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Sukomulyo, Rt 06 / Rw 06, Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	m3	157631000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
45	2091299	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga warga di wilayah Desa Pakuran, Rt 01 / Rw 03, Kecmamatan Buayan membutuhkan perbaikan berupa pembangunan rabat beton jalan poros desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat agar lebih efisien dan lancar	Desa Pakuran, Rt 01 / Rw 03, Kecmamatan Buayan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	M3	157100000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
46	2091370	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Gedung PAUD dalam kondisi rusak sehingga masyarakat di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah membutuhkan pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak usia dini	Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah , Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	60.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
47	2091374	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Gedung TK dalam kondisi rusak sehingga masyarakat di Desa Watukelir, Rt 03 / Rw 02, Kecamtan Ayah membutuhkan pembangunan gedung TK Baru untuk untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi anak usia dini	Desa Watukelir, Rt 03 / Rw 02, Kecamtan Ayah , Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	100.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
48	2091390	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Dukuh Era RT 01 RW 02 Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam Rusak sehingga membutuhkan Bantuan untuk pembangunan Rabat Beton	Dukuh Era RT 01 RW 02 Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	m3	55470000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
49	2091539	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Dukuh Muntuk RT 03 RW 03 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan untuk pembangunan Rabat Beton jalan	Dukuh Muntuk RT 03 RW 03 Desa Kajoran Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m2	55470000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
50	2091552	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Dukuh Pengilon RT 06 RW 02 Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan Aspal	Dukuh Pengilon RT 06 RW 02 Desa Ginandong Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	325	M2	55575000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
51	2094972	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	jalan penghubung antar Desa Giyanti - Desa Sukomulyo rusak membutuhkan perbaikan berupa rabat beton	RT 05 RW 01 Dukuh Kedung gondang Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	57	M3	89547000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
52	2094977	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan poros desa di Karangsari RT 004 RW 002 Kecamatan Buayan merupakan akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan saat ini belum memadai sehingga menghambat mobilitas warga. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan rabat beton guna meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, memperlancar akses transportasi, serta mendukung aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat setempat.	DESA KARANGSARI RT 004 RW 002 KECAMATAN BUAYAN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	M3	62840000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
53	2094987	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan poros desa di Rogodono RT 002 RW 004 Kecamatan Buayan memiliki peran penting sebagai jalur penghubung antar wilayah dan akses utama masyarakat. Kondisi jalan yang belum memadai menyebabkan aktivitas warga kurang lancar. Oleh karena itu diajukan usulan pembangunan rabat beton guna meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.	DESA ROGODONO RT 002 RW 004 KECAMATAN BUAYAN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	M3	62840000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
54	2095009	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan di RT 03 RW 01 Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele merupakan akses penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi jalan rusak dan kurang memadai sehingga diperlukan memerlukan pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan agar dapat berfungsi dengan baik.	RT 03 RW 01 Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	M2	58913000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
55	2095123	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Desa penghubung antar Desa Kretek - Desa Wonoharjo yang beralamat di RT/RW : RT04/RW05 Dukuh : Gendon Desa : Kretek Kecamatan: Rowokele mengalami kerusakan butuh perbaikan berupa pengaspalan.	RT04/RW05 Dukuh Gendon Desa Kretek Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	375	m2	91500000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
56	2095159	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Desa di RT02/ RW01 Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele mengalami kerusakan. membutuhkan bantuan berupa rabat beton.	RT02/ RW01 Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	75	M3	117829000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
57	2095199	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa yang berlokasi di RT02/RW12 Dukuh Lokarsa Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele mengalami kerusakan. membutuhkan bantuan untuk melaksanakan rabat beton.	RT02/RW12 Dukuh Lokarsa Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	60	M3	94260000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
58	2095242	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan lingkungan memerlukan perbaikan berupa rabat beton	dukuh bringin 007/001 desa Madurejo Kec. Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	450	M2	115425000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
59	2095272	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Desa di RT 01 / RW 09 Dukuh Lemungsur Desa Wonoharjo rusak membutuhkan pengaspalan.	RT 01 / RW 09 Dukuh Lemungsur Desa Wonoharjo Kec. Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	400	m2	97600000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
60	2095290	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	jalan desa RT06/ RW03 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele rusak. membutuhkan perbaikan.	RT06/ RW03 Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	70	M3	109970000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
61	2095339	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Mobilisasi penduduk antarwilayah terkendala akibat jalan rusak, sehingga memerlukan bantuan perbaikan jalan	003/002, desa Kuwarasan Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	875	meter2	147000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
62	2095386	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Mobilisasi penduduk antarwilayah terkendala akibat jalan rusak, sehingga memerlukan bantuan perbaikan berupa rabat beton	dukuh Pabrit RT 003 RT 004 RW 001 desa Tambaharjo Kec. Adimulyo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	385	m2	98753000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
63	2095557	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak sehingga membutuhkan bantuan Aspal Hotmix RT 01 - RT 02 RW 03 Desa Munggu Kecamatan Petanahan	RT 01 - RT 02 RW 03 Desa Munggu Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	725	m2	189950000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
64	2095596	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Jalan Poros Desa (Talud Jalan) Dukuh Kawilangan RT 01 RW 01 Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan	Dukuh Kawilangan RT 01 RW 01 Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	M3	89100000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
65	2095656	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 02 RW 04 Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan	RT 02 RW 04 Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	75	M3	117825000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
66	2096282	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa, Dukuh Karangjambu RT 03 RW 02 ,Desa Pesalakan, Kec. Kutowinangun	Dukuh Karangjambu RT 03 RW 02 ,Desa Pesalakan, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	700	m2	164955000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
67	2096316	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pengaspalan Jalan desa, Dukuh Jatisawit RT 02 RW 02, Desa Jatipurus, Kec. Poncowarno	Dukuh Jatisawit RT 02 RW 02, Desa Jatipurus, Kec. Poncowarno, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	450	M2	117315000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
68	2096374	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan rabat beton Jalan desa, Desa Tanjungmeru RW 5, Kec. Kutowinangun	Desa Tanjungmeru RW 5, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	500	meter2	117825000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
69	2096480	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bantuan Bibit Ternak Sapi lokal untuk kelompok tani berkah makmur sejahtera, Desa Arjowinangun, Kec. Buluspesantren	Desa Arjowinangun, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	39.226.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
70	2096588	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan aspal ac bc Jalan poros desa, RW 002 Desa Ampih, Kec. Buluspesantren	RW 002 Desa Ampih, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	650	m2	176963000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
71	2096639	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak dan berlubang sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan Poros Desa Dusun Karangasem RT 002 RW 004 Desa Wonosigro Kecamatan Gombong	Dusun Karangasem RT 002 RW 004 Desa Wonosigro Kecamatan Gombong , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	461	m2	75604000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
72	2096748	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa, Jalan Blok Jagatamu-Pancing,Desa Waluyo, Kec. Buluspesantren	Jalan Blok Jagatamu-Pancing,Desa Waluyo, Kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	720	m2	184680000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
73	2097060	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Rabat Beton Jalan di RT 004 RW 004 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor	RT 004 RW 004 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	m2	47130000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
74	2097124	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Mobilisasi penduduk antarwilayah terkendala akibat jalan rusak, sehingga memerlukan bantuan perbaikan berupa rabat beton	RT. 002/002, desa Gunungmujil Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	500	meter2	143959000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
75	2097470	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan jalan rusak sehingga perlu bantuan aspal Desa Jemur - Desa Gemeksekti Kebumen	Desa Jemur - Desa Gemeksekti Kebumen , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	300	m2	49200000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
76	2097652	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya kemampuan keuangan desa untuk pembangunan jalan aspal sehingga perlu bantuan keuangan desa	DUKUH SIDOMUKTI RT 005-RT 006 /RW 001 DESA JEMUR KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m2	48800000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
77	2097670	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya pembangunan jalan sehingga perlu bantuan untuk pembangunan jalan aspal	RT 004 RW 003 DESA JEMUR KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	M2	36600000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
78	2097686	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BANTUAN PERBAIKAN RTLH DESA SIDOMULYO, AMBAL, KEBUMEN	DESA SIDOMULYO, AMBAL, KEBUMEN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	1	Rupiah	20.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
79	2097833	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	BANTUAN PENGASPALAN JALAN POROS DESA DUKUH KRAJAN-DUKUH KEMULAN RT 01 RW 02, DESA PADURESO, PADURESO, KEBUMEN	DUKUH KRAJAN-DUKUH KEMULAN RT 01 RW 02, DESA PADURESO, PADURESO, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	180	M2	47160000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
80	2097835	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya pembangunan jalan sehingga perlu bantuan keuangan desa untuk membangun jalan beraspal	DUKUH SOKAWERA DESA JEMUR - DESA GEMEKSEKTI KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	M2	41000000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
81	2097976	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Belum layak/ kurang optimal rumah warga sehingga perlu dibangun/ direhabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat kurang mampu	Desa jemur Rw. 01 (Dukuh Sidomukti) Rw. 02 (Dukuh Sokawera) Rw. 03 (Dukuh Kedungkracak)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	2	Rupiah	40.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
82	2098070	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL JALAN SILIWADI DUKUH TUNJUNGAN RT 03 RW 03, DESA SIDOLUHUR, AMBAL, KEBUMEN	DUKUH TUNJUNGAN RT 03 RW 03, DESA SIDOLUHUR, AMBAL, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	167	m2	47.395.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
83	2098089	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Belum optimalnya pembangunan TK sehingga perlu bantuan untuk membangun/ memperbaiki TK	TK TRIJAYA PGRI DESA JEMUR KEC KEBUMEN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	125.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
84	2098362	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	BANTUAN PENGASPALAN JALAN DESA, JALAN GOLONG SIYEM RT 01-RT 02 RW 02 WIROMARTAN, MIRIT, KEBUMEN	JALAN GOLONG SIYEM RT 01-RT 02 RW 02 WIROMARTAN, MIRIT, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	177	m2	47.507.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
85	2099568	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	KTT Sumber makmurDesa Gebangsari memerlukan bibit sapi	KTT Sumber makmur, RT 03 RW 02 Desa Gebangsari, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	78.453.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
86	2100550	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya Talud jalan poros desa sehingga diperlukan pembangunan Talud Jalan Poros Desa	Dukuh Mudal RT 01 RW 02 Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	60	M3	53.460.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
87	2100595	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya jalan dengan kondisi baik atau rusak berlubang sehingga diperlukan pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa	Dukuh Larangan RT 02 RW 01 Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	185	M2	47.453.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
88	2100678	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak sehingga membutuhkan Bantuan Pembangunan Rabat Beton RT 001 RW 003 Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal	RT 001 RW 003 Desa Sinungrejo Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	m3	67.500.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
89	2100709	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Rabat Beton Dukuh Madugawe RT 01 RW 02 Desa Kaibon Kecamatan Ambal	Dukuh Madugawe RT 01 RW 02 Desa Kaibon Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	540	m3	115.425.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
90	2100824	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak dan Berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	Dukuh Purwogondo RT 05 RW 05, Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	31	meter3	53.010.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
91	2100849	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak dan Berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	Dukuh Purwogondo RT 01 RW 05 Desa Kalipurwo Kecamatan Kuwarasan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	m3	54.720.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
92	2100853	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	TK Kuncup Mekar RT 02 RW 02 Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo membutuhkan bantuan APE	RT 02 RW 02 Desa Bonorowo Kecamatan Bonorowo , Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
93	2100904	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak sehingga membutuhkan bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton RT 01 RW 03 Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal	RT 01 RW 03 Desa Ambalkebrek Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	m3	62.840.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
94	2101080	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	PERMOHONAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON , JALAN MAKAM DESA KARANGMAJA RT 03 - 04 RW 03	JALAN MAKAM DESA KARANGMAJA RT 03 - 04 RW 03 KEC. KARANGGAYAM, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	375	m2	104.007.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
95	2101383	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RT 09 RW 03 Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah	RT 09 RW 03 Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	55	M3	86.405.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
96	2101415	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RW 02 - RW 03 Desa Argopeni, Kecamatan Ayah	RW 02 - RW 03 Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	50	M3	78.550.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
97	2101424	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang rusak dan perlu adanya perbaikan di RT 03/01 Asem Simbek, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah	RT 03/01 Asem Simbek, Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	35	M3	54.985.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
98	2102031	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	BANTUAN PENGASPALAN JALAN DESA, JALAN GOLONG RONDHO RT 01 RW 01 WIROMARTAN, MIRIT, KEBUMEN	JALAN GOLONG RONDHO RT 01 RW 01 WIROMARTAN, MIRIT, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	176	m2	47.916.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
99	2102048	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	BANTUAN RABAT BETON JALAN DESA TAMBAKREJO RT 04 RW 02, SIRNOBOYO, BONOROWO, KEBUMEN	TAMBAKREJO RT 04 RW 02, SIRNOBOYO, BONOROWO, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
100	2102251	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak perlu Pemeliharaan jalan 300 Meter	RW 03 Desa Kalirejo, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	825	m2	201.300.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
101	2106849	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN SYEH ABDUL JALAL SAMPAI BALAIDESA TANAHSARI RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	JALAN SYEH ABDUL JALAL SAMPAI BALAIDESA TANAHSARI, KECAMATAN KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m2	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
102	2106863	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN ANTAR DESA SIDOMORO - SANGUBANYU RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	ANTARA DESA SIDOMORO KE DESA SANGUBANYU KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	m2	49.500.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
103	2106898	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN RW 02 DESA ARJOWINANGUN RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RW 02 DESA ARJOWINANGUN KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	220	m2	42.045.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
104	2106919	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN RW 01 DESA MENGKOWO RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RW 01 DESA MENGKOWO KECAMATAN KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	155	m2	37.820.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
105	2106978	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN RW 02 DESA SETROJENAR RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RW 02 DESA SETROJENAR KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	145	m2	40.035.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
106	2107040	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN RW 01 DESA SANGUBANYU RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RW 01 DESA SANGUBANYU KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	185	m2	51.079.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
107	2107068	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN RW 05 DESA AMPIH RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RW 05 DESA AMPIH KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m2	50.600.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
108	2107075	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN RW 02 DESA INDROSARI RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RW 02 DESA INDROSARI KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	m2	44.880.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
109	2107099	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	BELUM ADANYA PERALATAN PENUNJANG BELAJAR DI TK HARDIKASARI SIDOMORO, SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN LAPTOP	TK HARDIKASARI SIDOMORO KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
110	2107117	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	BELUM ADANYA PERALATAN PENUNJANG BELAJAR DI TK PERTIWI 14.06.15 DESA KLAPASAWIT, SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN LAPTOP	TK PERTIWI 14.06.15 DESA KLAPASAWIT KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
111	2107132	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	ELUM ADANYA PERALATAN PENUNJANG BELAJAR DI TK PERTIWI 24.06.02 DESA JOGOPATEN, SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN LAPTOP	TK PERTIWI 24.06.02 DESA JOGOPATEN KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
112	2107141	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	BELUM ADANYA PERALATAN PENUNJANG BELAJAR DIPOS PAUD SETULUS BUNDA DESA SANGUBANYU, SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PENGADAAN LAPTOP	PAUD SETULUS BUNDA DESA SANGUBANYU KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
113	2107712	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan karena kondisi permukaan jalan yang rusak dan tidak rata di Dk. Gasaran RT 02 RW 02 dan RT 03 RW 02 Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit	Dk. Gasaran RT 02 RW 02 dan RT 03 RW 02 Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	605	M2	153.065.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
114	2107757	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengerasan Jalan karena kondisi jalan yang tidak rata dan tidak aman untuk menahan beban kendaraan di RT 02 RW 01 Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit	RT 02 RW 01 Desa Singoyudan, Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	66	m3	112.860.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
115	2107819	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di Dk. Tlogo RT 03 sampai dengan RT 06 RW 01 Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit	Dk. Tlogo RT 03 sampai dengan RT 06 RW 01 Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	M3	171.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
116	2107855	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di RT 04 RW 01 Desa Benerkulon, Kecamatan Ambal	RT 04 RW 01 Desa Benerkulon, Kecamatan Ambal , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	625	m2	160.312.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
117	2108966	Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN GEDUNG CADANGAN PANGAN KELOMPOK TANI " MARGO REJO" DESA KALIREJO RT 01 RW 01	DESA KALIREJO RT 01 RW 01 KEC. KARANGGAYAM, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Unit	185.000.000	Non Belanja Transfer	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
118	2109300	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	PAUD Desa Bendogarap memerlukan APE	PAUD Desa Bendogarap Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
119	2109660	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	PERMOHONAN PENGASPALAN JALAN YANG RUSAK DESA NOGORAJI RT 05 RW 01	DK. JATIWAYANG RT 05 RW 01 DESA NOGORAJI KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	880	M2	214.720.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
121	2116575	Belum optimalnya kualitas dan akses pendidikan untuk semua	Permohonan Bantuan Pembangunan Tempat Bermain "Paud Lestari" Desa Krandegan RT 01 RW 01 Kecamatan Puring	"Paud Lestari" Desa Krandegan RT 01 RW 01 Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	35.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
122	2116624	Belum optimalnya produksi pertanian dalam arti luas	Permohonan Bantuan Alat Pertanian berupa Traktor Quick untuk Kelompok Tani "RUKUN TANI JAYA" Desa Srusuh Jurutengah, Kecamatan Puring	Kelompok Tani "RUKUN TANI JAYA" Desa Srusuh Jurutengah, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	unit	33.585.750	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
123	2144359	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya jalan lingkungan di wiwlayah RT 01 RW 05 Desa Karangsari Sehingga diperlukan Pengaspalan	Desa Karangsari RT 01 RW 05 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	120	m3	189.397.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
124	2144408	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya jalan desa wonosari sehingga diperlukan perbaikan berupa pengaspalan	Desa Wonosari RT 02 RW 04 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	146.400.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
125	2144429	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya jalan lingkungan diwilayah RT 04 RW 01 Desa Banjurpasar sehingga diperlukan perbaikan berupa rabat beton	Desa Banjurpasar RT 04 RW 01, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	153.900.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
126	2144455	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya jalan lingkungan di wilayah Dukuh Kedondong Desa Kalibagor sehingga diperlukan pelebaran jalan berupa rabat beton	Dukuh Kedondong Desa Kalibagor, kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	67	m3	106.043.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
127	2144575	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo sangat membutuhkan pengaspalan jalan karena jalan poros tersebut merupakan infrastruktur utama menuju akses layanan dasar pendidikan dan akses jalan utama perekonomian warga menuju pasar.	Jalan poros desa penghubung Dukuh Gentan Kidul Rt 02 Rw 04 menuju Dukuh Karang Jambu Rt 03 Rw 03 Desa Caruban, Kecamatan Adimulyo., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	330	m2	55.440.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
128	2145608	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Pakuran, Kecamatan Sruweng sangat licin dan membahayakan sehingga menghambat aktivitas warga dalam menuju akses layanan dasar pendidikan dan layanan dasar kesehatan, oleh karena itu sangat membutuhkan pengaspalan jalan poros desa yang sangat licin tersebut.	Dukuh Widara Payung Rt 05 Rw 03 Desa Pakuran, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	M2	61.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
129	2145784	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Joho, Kecamatan Adimulyo sangat rusak dan menghambat aktivitas warga dalam menuju akses layanan dasar pendidikan dan layanan dasar kesehatan, sehingga sangat membutuhkan pembangunan jalan rabat beton.	Rt 04 Rw 02 Desa Joho, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	m3	49.211.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
130	2145929	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Donosari, Kecamatan Sruweng sangat rusak dan menghambat aktivitas warga dalam menuju akses layanan dasar pendidikan dan layanan dasar kesehatan, sehingga sangat membutuhkan pembangunan jalan rabat beton.	RW 01 dan RW 02 Desa Donosari, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	35	M3	59.850.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
131	2145968	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng sangat rusak dan menghambat aktivitas warga dalam menuju akses layanan dasar pendidikan dan layanan dasar kesehatan, sehingga sangat membutuhkan pengaspalan jalan.	Rt 03 Rw 02 Desa Kejawang, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	225	m2	56.925.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
132	2146012	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Pengempon, Kecamatan Sruweng masih makadam dan sangat rusak sehingga menghambat aktivitas warga dalam menuju akses lokasi pertanian dan perkebunan dalam rangka menunjang ketahanan pangan, sehingga sangat membutuhkan pembangunan jalan rabat beton.	Rt 03 Rw 05 Desa Pengempon, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	45	m3	70.786.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
133	2146063	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan poros desa di Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng sangat rusak dan menghambat aktivitas warga dalam menuju akses layanan dasar pendidikan dan layanan dasar kesehatan, sehingga sangat membutuhkan pengaspalan jalan.	Dukuh Pita Pitu, Rw 06 Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng., Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	285	m2	72.105.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
134	2148839	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang tidak rata dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan di Dukuh Prambanan Lor RT 02 RW 02 Desa Sekarteja, Kecamatan Adimulyo	Dukuh Prambanan Lor RT 02 RW 02 Desa Sekarteja, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	675	m2	130.725.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
135	2148856	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak di RT 02 RW 02 dan RT 03 RW 02 Desa Tambaksari, Kecamatan Kuwarasan	RT 02 RW 02 dan RT 03 RW 02 Desa Tambaksari, Kecamatan Kuwarasan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1750	meter2	485.870.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
136	2148866	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang rusak di RT 03 RW 01 Desa Kamulyan, Kecamatan Kuwarasan	RT 03 RW 01 Desa Kamulyan, Kecamatan Kuwarasan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1620	meter2	409.860.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
137	2148877	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Peningkatan/Perbaikan Jalan karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan yakni di Jalan Srumbung RT 09 RW 04, Dukuh Tuaburu Tengah, Desa Waluyorejo, Kecamatan Puring	Jalan Srumbung RT 09 RW 04, Dukuh Tuaburu Tengah, Desa Waluyorejo, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1200	M2	332.820.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
138	2148903	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Jalan Rabat Beton karena kondisi jalan yang rusak, tidak kokoh dan tidak dapat menahan beban kendaraan dengan baik di RW 03 Desa Tegalsari, Kecamatan Adimulyo	RW 03 Desa Tegalsari, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	75	m3	128.250.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
139	2148999	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BANTUAN BIBIT PERTANIAN DESA SIDOMULYO, AMBAL, KEBUMEN	DESA SIDOMULYO, AMBAL, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	200	batang	7.762.500	Non Belanja Transfer	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
140	2149023	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BANTUAN PENGADAAN BIBIT ALPUKAT DESA SIDOLUHUR, AMBAL, KEBUMEN	DESA SIDOLUHUR, AMBAL, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	200	batang	7.762.500	Non Belanja Transfer	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
141	2149052	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BANTUAN PERBAIKAN RTLH DESA SIDOLUHUR, AMBAL, KEBUMEN	DESA SIDOLUHUR, AMBAL, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	1	Rupiah	20.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
142	2149088	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak dan berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	RT 02 RW 01 Dukuh Gajah Desa Surorejan Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	m3	59.168.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
143	2149114	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	BANTUAN PEMBUATAN TALUD JALAN KRAJAN RW 01, KENOYOJAYAN, AMBAL, KEBUMEN	KRAJAN RW 01, KENOYOJAYAN, AMBAL, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	53	m2	47.223.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
144	2149163	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak dan berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	RT 04 RW 01 Dukuh Gudang Desa Surorejan Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	m3	59.168.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
145	2149194	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	BANTUAN RTLH RT 01 RW 01, RT 01 RW02, RT 02 RW 02 KRUBUNGAN, MIRIT, KEBUMEN	KRUBUNGAN, MIRIT, KEBUMEN, Kab. Kebumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	3	Rupiah	60.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
146	2149444	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan rusak dan berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	RW 7 Dukuh Karangsari Desa Sidodadi Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	35	M3	59.850.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
147	2149470	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak dan Berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	Jalan Penghubung RW 1 dengan RW 7 Desa Sidodadi Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	35	M3	59.850.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
148	2149471	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Pengerasan Jalan Rabat Beton	Dukuh Patuk Sutren RT 007 RW 003 Desa Wirogaten Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	350	m2	91.797.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
149	2149478	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan di RT 05 RW 02 Desa Nogoraji, Kecamatan Buayan banyak lubang dan rusak sehingga diperlukan perbaikan berupa rabat beton/pengaspalan.	RT 05 RW 02 Desa Nogoraji, Kecamatan Buayan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	35	M3	54.934.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
150	2149514	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Permohonan pemenuhan sarpras kelas dan alat permainan edukatif RA Masyitoh Wirogaten	RA Masyitoh Desa Wirogaten RT 02 RW 02 Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
151	2149521	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan pengaspalan jalan poros desa	Dukuh Ngentak RT 02 RW 03 Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	270	m2	68.371.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
152	2149535	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan pengerasan jalan poros desa Lapis Penetrasi Makadam (Lapen)	Dukuh Kesingan RT 003 RW 002 dan RT 004 RW 002 Desa Peneket Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	300	m2	85.140.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
153	2149565	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan pembangunan jalan rabat beton	Desa Balorejo RT 06 RW 02 Kecamatan Bonorowo, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	M3	62.840.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
154	2149628	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan pengaspalan jalan (Readymix)	Desa Mangunranan RT 01 RW 04 Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	350	meter2	88.550.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
155	2149730	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonann bantuan dana pembangunan rehabilitasi aspal jalan Desa Bejiruyung RW 2 Kecamatan Sempor	Desa Bejiruyung Rw 02 Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	450	m2	109.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
156	2149783	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohanan Bantuan Keuangan aspal jalan Desa Bonosari Dukuh Bleber dan dukuh Entak	Dukuh Bleber sampai Entak Desa Bonosari Kecamatan sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	330	m2	80.520.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
157	2151323	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	PERMOHONAN PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN MAKAM GEDUR DESA BUAYAN RT 04 RW 02	DESA BUAYAN RT 04 RW 02 KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	92	M3	144.639.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
158	2153079	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Membutuhkan rabat beton jalan desa, dukuh kedoya rt 01 rw 02, desa tepakyang, kecamatan adimulyo, kebumen	dukuh kedoya rt 01 rw 02, desa tepakyang, kecamatan adimulyo, kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	39	m3	66.665.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
159	2153133	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Membutuhkan rabat beton jalan desa, dukuh alang amba kulon RT 03 RW 02, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen	dukuh alang amba kulon RT 03 RW 02, Desa Adiluhur, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	135	m3	230.850.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
160	2157049	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak di RT 05 RW 02 Desa Benerkulon Kecamatan Ambal sehingga membutuhkan bantuan pengaspalan jalan	RT 05 RW 02 Desa Benerkulon Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	525	m2	144.953.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
161	2158836	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa	Jalan Arah Masjid Baitul Barokah Desa Surotrunan RT 01 RW 01 Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	m3	62.840.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
162	2159126	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya jalan poros desa sehingga diperlukan pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa	Desa Babadsari RT 02 RW 03 Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	215	m2	50.665.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
163	2159532	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	perlunya peningkatan/perbaikan Jalan karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	750	m2	192.375.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
164	2159612	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	perlunya peningkatan/perbaikan Jalan karena kondisi jalan yang sudah rusak dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	Dukuh Benerpasar Rt 002, Rt 005/Rw 002, Desa Benerkulon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	500	m2	138.050.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
165	2159890	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan pembangunan jalan rabat beton untuk wilayah dukuh menganti	Dukuh Menganti Desa Donorojo Kecamatan Sempor , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	170	m3	267.070.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
166	2159892	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan pengaspalan jalan wilayah RW 1 Dukuh Kedungbulus	RW 01 Dukuh Kedungbulus Desa Kedungjati Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1400	m2	341.600.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
167	2159896	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan rabat beton untuk wilayah RW 03	RW 03 Desa Pekuncen Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	130	M3	204.230.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
168	2159898	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan pengaspalan jalan di wilayah RW 03 Dusun Siwagu	RW 03 Dusun Siwagu Desa Kenteng Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	700	m2	158.125.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
169	2159899	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan pengaspalan jalan untuk wilayah RW 03 dan RW 04 Desa Selokerto	RW 03 dan RW 04 Desa Selokerto Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1770	m2	285.360.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
170	2159916	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan Poros Jalan Puntadewa RT 01 RW 05 Desa Sidoharum	RT 01 RW 05 Desa Sidoharum Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1190	m2	195.160.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
171	2159918	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan rabat beton untuk wilayah RT 07 RW 01 Desa Wero	RT 07 RW 01 Desa Wero Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	107	m2	168.097.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
172	2159920	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan pengaspalan jalan untuk wilayah RW 02 Desa Panjangsari Kecamatan Gombong	RW 02 Desa Panjangsari Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1500	m2	366.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
173	2159922	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan rabat beton untuk wilayah Desa Kedungpuji	Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	562	m2	142.313.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
174	2159923	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan bantuan pengaspalan jalan untuk wilayah RW 02 Dukuh Krajan Desa Panjangsari	RW 02 Dukuh Panjangsari Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	984	m2	240.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
175	2159926	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Kurangnya sarana dan prasarana untuk Kelompok Bermain Bina Mandiri Desa Semanding, sehingga membutuhkan Alat Praktik dan Peraga untuk Peserta Didik	KB. Bina Mandiri Desa Semanding Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
176	2159946	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan karena kondisi permukaan jalan yang sudah rusak di RT 04 RW 06, Desa Kenteng, Kec. Sempor	RT 04 RW 06 Desa Kenteng, Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	m2	63.250.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
177	2159948	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang sudah rusak di RW 01, RW 03, RW 04 Desa Glontor, Kec. Karanggayam	RW 01, RW 03, RW 04 Desa Glontor, Kec. Karanggayam , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	38	m3	70.263.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
178	2159951	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Karena kondisi permukaan jalan yang sudah rusak di Desa Bejiruyung RW 02 RW 01 Kecamatan Sempor	Desa Bejiruyung RW 02 RW 01 Kecamatan Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	235	m2	63.450.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
179	2159961	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang sudah tidak layak atau rusak di RT 05 RW 05 Desa Semanding, Kec. Gombong	RT 05 RW 05 Desa Semanding, Kec. Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	m3	62.840.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
180	2159980	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan karena kondisi permukaan jalan yang tidak rata dan mengganggu kenyamanan dalam berkendara di RT 1- RT 3 RW 3 Desa Pohkumbang, Kec. Karanganyar	RT 1- RT 3 RW 3 Desa Pohkumbang, Kec. Karanganyar, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	400	M2	67.200.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
181	2160012	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan jalan karena kondisi jalan yang tidak rata dan rusak di Desa Sidoharum RT 3 RW 4 Kec. Sempor	Desa Sidoharum RT 3 RW 4 Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	300	m2	73.200.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
182	2160132	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Kurangnya sarana prasarana untuk Pos PAUD BINA CERIA RT 04 RW 05 Desa Semanding	RT 04 R 05 Desa Semanding Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	35.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
183	2160160	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Guna meningkatkan produktivitas dan pengembangan lahan di Desa Semanding membutuhkan bantuan Bibit Melon serta kelengkapan media tanam	Desa Semanding Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	5	bungkus	2.553.000	Non Belanja Transfer	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
184	2160500	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan belajar mengajar siswa siswi yang tidak optimal karena tidak adanya alat peraga berupa laptop, serta membutuhkan rehab bangunan berupa toilet, ruang kantor dan pagar KB MUSLIMAT NU 04 AL ITTIHAD Tamanwinangun.	Kelurahan Tamanwinangun, Kecamatan Kebumen , Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	35.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
185	2160615	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak dan berlubang sehingga membutuhkan Pemeliharaan Jalan Rabat Beton	RW 3 Desa Sidodadi Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	M3	54.720.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
186	2160692	Belum Optimalnya Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terdapat 3 warga yang belum memiliki sepitank atau toilet pribadi dirumahnya dan masih menumpang dirumah tetangga sehingga perlu dibantu untuk dibuatkan. 1. Kepala Keluarga Bapak Paino 2. Kepala Keluarga Bapak Subagyo 3. Kepala Keluarga Bapak Samijo	RT 01 RW 09 DUKUH KUWARISAN KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN , Kab. Kebumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	3	8500000	25.500.000	Non Belanja Transfer	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
187	2160710	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Terdapat gedung lantai 2 MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN yang masih memerlukan pembangunan karena belum selesai sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar.	JALAN BUMIDIRJO GANG TENGAH NO 9 RT 02 RW 02 DESA KAWEDUSAN KECAMATAN KEBUMEN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	100.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Ruang Kelas Baru
188	2160771	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan di Dukuh Krajan Desa Buluspesantren RT 01 RW 01 sekitaran makam syech yusuf yang rusak dan perlu diperbaiki karena itu merupakan akses wisata religi bagi masyarakat sekitar maupun luar kebumen.	RT 01 RW 01 Dukuh Krajan Desa Buluspesantren Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	210	m2	54.747.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
189	2160809	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Dukuh Karanggedang 1 RT 03 RW 04 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membutuhkan bantuan berupa Pembangunan Rabat Beton jalan	Dukuh Karanggedang 1 RT 03 RW 04 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	m3	59.168.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
190	2161602	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Aspal Jalan Poros Desa	Dukuh Jelarang RT 07 RW 02 Desa Karangtanjung Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	42	m3	65.982.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
191	2161640	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Jalan Poros Desa	Jalan Utama RT 01 RW 03 Dukuh Doplang Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	175	M2	48.318.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
192	2161672	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Permohonan Bantuan Rehab Gedung TK PGRI Jatinegoro 1	TK Jatinogoro 1 Desa Jatinegara Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	35.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
193	2161684	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa	Dukuh Gunung Mas RT 02 RW 02 Desa Korowelang Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	270	m2	63.626.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
194	2161688	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Permohonan Bantuan Rehab Gedung PAUD TK Muslimat NU 27 Masyitoh Desa Sampang	Desa Sampang Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	40.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
195	2161699	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Permohonan Bantuan Rehab Gedung PAUD TK Tunas Mekar 1 Desa Tunjungseto Rt 02 Rw 01	Dk. Banaran Rt 02 Rw 01 Desa Tunjungseto Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	35.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
196	2161710	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Permohonan Bantuan Rehab Gedung Pos PAUD Karunia Desa Sempor RT 04 Rw 01	Desa Sempor RT 04 Rw 01 Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	40.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
197	2161726	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Permohonan Pembangunan Tempat Bermain TK Tunas Bangsa Desa Kenteng RT 02 Rw 04	Desa Kenteng Rt 02 Rw 04 Kec. Sempor, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	60.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
198	2161780	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit, Pupuk, Obat hama Dan Alat Pengelolaan Hasil Panen	Kelompok Tani Jaya Desa Korowelang RT 01 RW 03 Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	200	batang	7.762.500	Non Belanja Transfer	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
199	2161983	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak perlu ready mix	Desa Adikarso, Perempatan bakso idola keselatan, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	80	m3	125.680.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
200	2161985	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Rehabilitasi Jalan Desa di RT 01/ RW 05 Desa Logede Kec. Pejagoan Kab. Kebumen yang mana dalam kondisi rusak perlu untuk dilakukan perbaikan	RT 01/ RW 05 Desa Logede Kec. Pejagoan Kab. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	215	m2	52.460.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
201	2162011	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perlu adanya perbaikan atau rehabilitasi jalan Poros Desa di Desa Kedungwinangun dk.dungwaru RT 1 RW 2 Kecamatan Klirong yang saat ini dalam kondisi rusak berat	Desa Kedungwinangun dk.dungwaru RT 1 RW 2 Kecamatan Klirong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m2	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
202	2162030	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perlu adanya perbaikan jalan desa yang mengalami kerusakan berat di Dukuh pedana RT 1 RW 7 Desa Kedunngwinangun Kecamatan Klirong dimana jalan tersebut sebagai sarana mobilitas masyarakat	Dukuh pedana RT 1 RW 7 Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	215	m2	52.460.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
203	2162087	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	PERLU ADANYA PERBAIKAN JALAN RUSAK DI DK. KALIGANDU, RT 02 RW 05 DESA PODOLUHUR KECAMATAN KLIRONG DALAM MENDUKUNG MOBILITAS MASYARAKAT MENAKSES LAYANAN DASAR	DK. KALIGANDU, RT 02 RW 05 DESA PODOLUHUR KECAMATAN KLIRONG , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	215	m2	52.460.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
204	2162135	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perlu adanya perbaikan jalan desa yang rusak di Desa Pengaringan RT 04 RW 02 Kecamatan Pejagoan untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan layanan dasar	Desa Pengaringan RT 04 RW 02 Kecamatan Pejagoan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	300	M2	50.400.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
205	2162149	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan RW 02 rusak perlu pengaspalan	Jalan Desa Kalirejo RW 02 Kec. Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	700	m2	170.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
206	2162162	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perbaikan jalan desa di Dukuh Krajan RT 04 RW 03 desa Peniron Kecamatan Pejagoan yang mengalami kerusakan	Jalan Desa Dukuh Krajan RT 04 RW 03 desa Peniron Kecamatan Pajagoan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m2	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
207	2162179	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Tidak tersedianya prasarana jalan yang memadai bagi masyarakat menuju masjid (masih berupa tanah) Dukuh Wringin Desa Rantewringin RT 01 RW 02 Kecamatan Buluspesantren	RT 01 RW 02 Dukuh Wringin Desa Rantewringin Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	m2	64.125.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
208	2162190	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Tidak optimalnya sarpras jalan desa Dukuh Waja Desa Jogopaten melintasi RT 01, RT 02, RT 03 / RW 03 Kecamatan Buluspesantren	RT 01, RT 02, RT 03 / RW 03 Dukuh Waja Desa Jogopaten Kecamatan Buluspesantren, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	m2	68.063.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
209	2162197	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Tidak optimalnya keadaan jalan desa Dukuh Karangsambung Desa Tanahsari RT 01 RW 03 Kecamatan Kebumen	RT 01 RW 03 Dukuh Karangsambung Desa Tanahsari Kecamatan Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m3	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
210	2162206	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perlu adanya rehabilitasi jalan yang mengalami kerusakan parah di dukuh Curug Rt 1 RW 12 desa Peniron Kecamatan Pejagoan	dukuh Curug Rt 1 RW 12 desa Peniron Kecamatan Pejagoan , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	m3	47.200.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
211	2162212	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa mengalami kerusakan memerlukan pengaspalan 1 KM	Jalan desa RW 3 Dukuh Larangan Desa Krakal Kec. Alian, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	151.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
212	2162250	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kerusakan jalan desa di RT 05 RW 011 dukuh Sibango desa Peniron Kecamatan Pejagoan hal ini perlu adanya rehabilitasi jalan rusak guna mempermudah akses layanan dasar dan perputaran ekonomi masyarakat	RT 05 RW 011 dukuh Sibango desa Peniron kecamatan Pejagoan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	m3	47.226.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
213	2162854	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa dan kondisi jalan yang rusak sehingga perlu adanya pemeliharaan dan pembangunan jalan	Mangunranan RT 04/rW 03, Desa Wirogaten, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	610	m2	168.421.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
214	2163156	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	SD Ma'arif NU Klirong membutuhkan Pembangunan Ruang Kelas Baru	SD Ma'arif NU Klirong, Jalan Raya Soka - Petanahan, Desa Klegenwonosari Kec. Klirong , Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	ruang	100.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Ruang Kelas Baru
215	2163269	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	jalan desa rusak perlu pengaspalan	RT 01 RW 05 Desa Kaliputih, Kec. Alian, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	151.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
216	2163273	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa mengalami kerusakan perlu pengaspalan	Jalan desa RT 02 RW 04 Desa Kaliputih Kec. Alian, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	151.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
217	2163278	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa mengalami kerusakan perlu pengaspalan	Jalan Desa Kaliputih RT 02 RW 03 Kec. Alian, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	151.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
218	2164043	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Dukuh Kebonagung Rt 01 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam rusak sehingga membuthkan bantuan pembangunan rabat beton	Dukuh Kebonagung Rt 01 Rw 03 Desa Gunungsari Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	m3	59.168.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
219	2164196	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Rusaknya Jalan Turi dan Jalan penghubung desa jatijajar dengan desa redisari	Redisari RT02/RW03, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	173	M3	271.783.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
220	2164214	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang di Dusun Kejeron RT 002 RW 003 Desa Klopogodo Kecamatan Gombong sehingga membutuhkan bantuan pembangunan rabat beton	Dusun Kejeron RT 002 RW 003 Desa Klopogodo Kecamatan Gombong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	120	M3	188.520.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
221	2164575	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dibutuhkan bantuan bibit cabe, tomat, dan terong	Redisari RT05/RW06, Kec. Rowokele, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	15	bungkus	48.060.000	Non Belanja Transfer	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
222	2164729	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Belum adanya Pompa Air untuk pertanian	Gapoktan Sumber Rejeki, desa Kemujan, Kecamtan Adimulyo, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	unit	44.264.880	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
223	2164755	Belum Optimalnya Program Penanganan Kerawanan Pangan	Belum adanya cadangan pangan masyarakat maka perlunya Hibah Gabah untuk Cadangan Pangan Masyarakat	Kelompok Tani Maju, Desa Banjarejo, Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	30.000.000	Non Belanja Transfer	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
224	2164811	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dibutuhkan bibit sapi ternak untuk Kelompok Tani Ternak Tambakprogaten	Tambakprogaten, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	39.226.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
225	2164893	Belum Optimalnya Program Penanganan Kerawanan Pangan	Belum adanya Cadangan Pangan Masyarakat	Kelompok Tani Sumber jaya, Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	paket	30.000.000	Non Belanja Transfer	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
226	2164908	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	kurangnya saran pertanian berupa kendaraan roda 3	Kelompok Tani Sumber jaya, Desa Tepakyang, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	unit	40.000.000	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
227	2164925	Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Perlunya Bibit Ikan Lele, Gurame dan Kolam serta Pakan Ikan	Pokdakan Sunr Jaya, Desa Waluyorejo Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan	1	Paket	38.000.000	Non Belanja Transfer	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
228	2164951	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan depan Balai Desa rusak sehingga diperlukan perbaikan	Bendogarap RT01/RW02, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	m3	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
229	2165601	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak perlu perbaikan Jalan Desa	Dusun Widara Payung, RT5 RW3 Desa Pakuran, Sruweng, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	450	M2	109.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
230	2165648	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak, Perlu perbaikan jalan	RT 02 RW 02 Desa Karangsari, Kec. Sruweng, , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	875	M2	213.500.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
231	2165659	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak, perlu perbaikan Jalan poros Desa	Dusun Wera RT 01 RW 06 menuju Dusun Ingas RT 01 RW 05 Desa Sruweng Kec. Sruweng , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1200	m2	292.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
232	2165698	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	belum adanya prasarana pertanian berupa alat semprot hand prayer	Kelompok Tani Margoyoso, Desa Bumirejo Kecamatan Puring, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	unit	1.778.337	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
233	2165704	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Rusak perlu perbaikan jalan Desa	RT1 RW1 DESA KLEPUSANGGAR, SRUWENG, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	1600	m2	262.400.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
234	2165711	Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Kurangnya benih ikan, alat pompa air dan pakan pada kelompak budidaya ikan	Podakan Ulam Jaya, RT1 RW 2 Desa Sugihwaras Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan	1	Paket	38.000.000	Non Belanja Transfer	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
235	2165713	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Pos PAUD Permata RT 02 RW 02 Desa Bojongsari Kecamatan Alian merupakan sarana pendidikan anak usia dini yang berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Untuk menunjang proses pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, diperlukan sarana APE guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan perkembangan anak usia dini.	Pos PAUD Permata RT 02 RW 02 Desa Bojongsari Kecamatan Alian, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	10.000.000	Non Belanja Transfer	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD
236	2165951	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Permohonan bantuan sarpras pertanian traktor bertujuan mendukung kegiatan pertanian masyarakat karena saat ini petani kekurangan sarpras tersebut	Kelompok Tani Sari Rejeki Desa Bojongsari, Kec.Alian, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	unit	33.585.750	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
237	2166692	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Rusak di Dukuh Siglontor Rt 03 Rw 01 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam sehingga membutuhkan bantuan pembangunan rabat beton	Dukuh Siglontor Rt 03 Rw 01 Desa Glontor Kecamatan Karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	32	m3	59.168.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
238	2166855	Belum Optimalnya Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jalan poros desa rusak dari pesanggrahan ke utara arah KUA	Desa Bendogarap RT01/RW02 - RT01/RW01, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	210	m2	51.240.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
239	2166942	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Membutuhkan bantuan bibit sapi ternak untuk KTT Brayan Usaha	Desa Bendogarap RT01/RW02, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	39.226.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
240	2166948	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DIbutuhkan bantuan pompa air untuk gapoktan sido maju	Desa Bendogarap RT001/RW002, Kec. Klirong, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	unit	33.016.500	Non Belanja Transfer	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
241	2166965	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Poros Desa Rusak di RT 004 RW 004 Desa Pekutan Kecamatan Mirit sehingga membutuhkan bantuan pembangunan rabat beton	RT 004 RW 004 Desa Pekutan Kecamatan Mirit, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	300	meter2	76.950.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
242	2166989	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Poros Desa Rusak di RT 001 RW 001 Desa Wergonayan Kecamatan Mirit sehingga membutuhkan bantuan pembangunan rabat beton	RT 001 RW 001 Desa Wergonayan Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	meter2	66.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
243	2166997	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi Jalan Poros Desa Rusak dan Berlubang di RT 001 RW 002 Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal sehingga membutuhkan perbaikan jalan	RT 001 RW 002 Desa Ambarwinangun Kecamatan Ambal, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	400	m2	102.734.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
244	2167110	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak dan berlubang di RT 006 RW 002 Desa Rowo Kecamatan Mirit sehingga membutuhkan bantuan perbaikan jalan	RT 006 RW 002 Desa Rowo Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	350	meter2	93.818.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
245	2167373	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Pelebaran/rehabilistasi jembatan Desa di Dukuh kedunglo Rt1/3 Desa giritirto Kec karanggayam	Dukuh kedunglo rt1/ rw3 Desa giritirto Kec karanggayam, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	20	m2	500.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
246	2167469	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak dan berlubang di RT 001 RW 002 Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit sehingga membutuhkan bantuan perbaikan jalan	RT 001 RW 002 Desa Tlogopragoto Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	150	m2	38.475.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
247	2168144	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kerusakan jalan poros desa menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar. Kondisi jalan yang kurang layak dapat menghambat mobilitas warga, Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan atau rehabilitasi Jalan Poros Desa yang berada di RT 02/RW 04 Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, agar akses masyarakat menjadi lebih lancar, aman, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga setempat.	RT 02/RW 04 Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	70	m2	119.700.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
248	2168161	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kerusakan jalan poros desa menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan dasar. Kondisi jalan yang kurang layak dapat menghambat mobilitas warga, Oleh karena itu, diperlukan adanya pembangunan atau rehabilitasi Jalan Poros Desa yang berada di RT 04/RW 04 sampai RT 04 RW 05 Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen, agar akses masyarakat menjadi lebih lancar, aman, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga setempat.	Jalan Poros Desa yang berada di RT 04/RW 04 sampai RT 04 RW 05 Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen,, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	600	m2	151.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
249	2168299	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan Poros desa membutuhkan aspal di desa Kaligending RT 04 RW 03, jalan untuk aktivitas pokok masyarakat perlu di aspal dan diperbaiki yang longsor	RT 04 RW 03 Dukuh Kunir, desa Kaligending, kecamatan Karangsambung, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	500	M2	126.500.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
251	2168642	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan di Dukuh Kedung Gondang RT 7 RW 1 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele rusak dan berlubang	Dukuh Kedung Gondang RT 7 RW 1 Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	M2	48.800.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
252	2168645	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Kondisi jalan rusak dan berlubang di RT 003 RW 001 Desa Wiromartan Kecamatan Mirit sehingga membutuhkan bantuan perbaikan jalan	RT 003 RW 001 Desa Wiromartan Kecamatan Mirit , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	44	meter2	22.264.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
253	2168746	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Butuh bantuan untuk pengembangan ternak sapi	RT.05 RW.03 Desa Kalipoh, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	39.226.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
254	2168904	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak, butuh rabat beton	RT.02 RW.04 Desa Argosari, Kec. Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	35	M3	54.985.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
255	2168924	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa butuh rabat beton	RT.02 RW.04 Desa Kalibangkang, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
256	2168929	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa butuh rabat beton	RT.03 RW.01 Desa Kalibangkang, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
257	2168937	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa butuh perbaikan	Dk. Srati s/d Golog , Kec. Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	36	Paket	56.556.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
258	2169314	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak, butuh rabat beton	Desa Banjararjo Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	40	M3	62.840.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
259	2169325	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak, butuh rabat beton	RT.01 RW.04 Desa Srati, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	36	M3	56.556.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
260	2169536	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak	RT.04 RW.01 Desa Jintung, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
261	2169542	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan dssa rusak	RT.02 RW.01 Desa Jintung, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	285	m2	47.880.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
262	2169549	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak	RT.04 RW.02 Desa Jintung, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
263	2169557	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak	RT.01 RW.01 Desa Jintung, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
264	2169559	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Jalan desa rusak	RT.05 RW.01 Desa Jintung, Kec Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	185	m2	46.805.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
265	2169756	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perlu adanya pembangunan jalan rabat beton di jalan desa , yang berlokasi di RT 01 RW 01 Desa BANJARWINANGUN, Kecamatan PETANAHAN	RT 01 RW 01 Desa BANJARWINANGUN, Kecamatan PETANAHAN , Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	100	m3	157.489.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
266	2169781	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Perlu adanya perbaikan jalan desa yang rusak di RT 03 RW 02 DESA GROGOLBENINGSARI, KECAMATAN PETANAHAN guna mendukung percepatan ekonomi dan mempermudah akses layanan dasar bagi warga	RT 03 RW 02 DESA GROGOLBENINGSARI, KECAMATAN PETANAHAN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	500	M2	126.500.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
267	2169828	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	Perlu adanya bantuan dalam pembangunan RUANG KELAS BATU (RKB) UNTUK PAUD KHOTIJAH YANG MANA MASIH 1 RUANG DENGAN RA SAFINATUNNAJAH hal ini untuk mendukung terpenuhinya sarana prasarana pendidikan yang layak dan mandiri	RT 02 RW 02 DESA KRITIG, KECAMATAN PETANAHAN , Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	115.000.000	Non Belanja Transfer	Pembangunan Ruang Kelas Baru
268	2170484	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	jalan desa mengalami kerusakan perlu rabat beton	Jalan depan Balai desa, RW 01 dan RW 02 Desa Tambaksari Kec. Kuwarasan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	200	meter2	51.300.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
269	2170573	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan	BELUM MEMADAINYA SARPRAS TK MNU 05 TARBIYATUL MASYITOH DESA MENGKOWO, MAKA PERLU DILAKUKAN REHAB BANGUNAN	TK MNU 05 TARBIYATUL MASYITOH DESA MENGKOWO KECAMATAN BULUSPESANTREN, Kab. Kebumen	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	1	paket	35.000.000	Non Belanja Transfer	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
270	2171030	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	PERMOHONAN BANTUAN BEDAH RUMAH YANG KURANG LAYAK HUNI , RUMAH BAPAK "AHMAD MUJIBUDIN SHODIQ" DESA TUGU RT 06 RW 03	DESA TUGU RT O6 RW 03 KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	1	Rupiah	20.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
271	2171036	Belum Optimlanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	PERMOHONAN BANTUAN BEDAH RUMAH YANG KURANG LAYAK HUNI , RUMAH BAPAK " SONI " DESA TUGU RT 06 RW 03	DESA TUGU RT 06 RW 03 KEC. BUAYAN, Kab. Kebumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	1	Rupiah	20.000.000	Non Belanja Transfer	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
272	2171089	Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Kelompok Perikanan Kube Mina Balong membutuhkan bibit ikan dan pakan ikan di Desa Podoluhur, Klirong, Kebumen	Kelompok Perikanan Kube Mina Balong, DEsa Podoluhur, Kecamatan Klirong, Kab. Kebumen	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan	1	Paket	40.000.000	Non Belanja Transfer	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
273	2171107	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	RW 04 Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan membutuhkan perbaikan jalan aspal sepanjang 250 meter karena jalan rusak dan berlubang	RW 04 Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	112	m3	176.738.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
274	2171293	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Perbaikan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang sudah rusak untuk Desa Pejagatan RW 04 Kecamatan Kutowinangun	Desa Pejagatan RW 04 Kecamatan Kutowinangun, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	350	m2	82.478.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
275	2171324	Belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya	Pokdakan Karya Makmur Desa Pejagoan membutuhkan bibit dan pakan ikan untuk usaha budidaya perikanan	Pokdakan Karya Makmur Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan, Kab. Kebumen	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan Dan Perikanan	1	Paket	30.000.000	Non Belanja Transfer	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
276	2171375	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN DI RT 04 RW 03 DESA PREMBUN RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	RT 04 RW 03 DESA PREMBUN KECAMATAN PREMBUN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	650	M2	169.455.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
277	2171390	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN DI DUKUH JLADRI RT 03 RW 03 DESA PATUK GAWEMULYO RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN PEMBANGUNAN ASPAL	DUKUH JLADRI RT 03 RW 03 DESA PATUK GAWEMULYO KECAMATAN MIRIT, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	750	m2	209.963.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
278	2171457	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN DI RT 03 RW 03 DESA TLOGO PRAGOTO KECAMATAN MIRIT RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN RABAT BETON	RT 03 RW 03 DESA TLOGO PRAGOTO KECAMATAN MIRIT, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	400	m2	102.690.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
279	2171471	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	KONDISI JALAN DI RT 04 RW 01 DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN RUSAK SEHINGGA MEMBUTUHKAN BANTUAN RABAT BETON	RT 04 RW 01 DESA MULYOSRI KECAMATAN PREMBUN, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	500	M2	117.825.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
280	2171546	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Belum optimalnya Pembangunan/pemeliharaan jembatan desa.	Desa jemur, RW. 01, RW. 02, RW. 03, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	6	m2	60.000.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
281	2171728	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan Poros Desa karena kondisi jalan yang rusak dan permukaannya yang tidak rata untuk RT 02 RW 05 - RT 03 RW 05 Desa Argopeni Kecamatan Ayah	RT 02 RW 05 - RT 03 RW 05 Desa Argopeni Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	250	m2	63.250.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
282	2171736	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pembangunan Rabat Beton karena kondisi jalan yang sudah rusak untuk Dk Ampiran RT 04 RW 03 Desa Watukelir, Kecamatan Ayah	Dk Ampiran RT 04 RW 03 Desa Watukelir, Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	30	M3	47.130.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
283	2171745	Belum Optimalnya Kemampuan Keuangan Desa	Permohonan Bantuan Pengaspalan Jalan karena kondisi permukaan jalan yang tidak rata untuk Desa Kalibangkang RT 01 RW 04 Kecamatan Ayah	Desa Kalibangkang RT 01 RW 04 Kecamatan Ayah, Kab. Kebumen	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	275	m2	69.575.000	Belanja Transfer (Bantuan Keuangan)	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
284	2174304	Belum Optimalnya Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ternak Kambing	KTT Ngudi Berkah, Desa Giwangretno, Kab. Kebumen	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	Paket	32.188.500	Non Belanja Transfer	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH